Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan Volume 1
Membongkar Bahasa, Struktur dan Logika Pemerintahan

Volume I ini tidak berangkat dari pertanyaan yang nyaman seperti "bagaimana mempercepat transisi energi", melainkan dari pertanyaan yang lebih mengganggu: siapa yang mendefinisikan dianggap sebagai masalah energi, dengan bahasa apa, dan untuk kepentingan siapa. Ketika pemerintah berbicara tentang "ketahanan energi", "transisi", *net-zero*, atau "energi hijau", publik sering menganggapnya sekadar istilah teknis. Buku ini menunjukkan bahwa istilah-istilah itu bekerja sebagai perangkat kuasa: membatasi batas perdebatan, menentukan siapa yang diakui sebagai "ahli", dan menyingkirkan pertanyaan yang paling sensitif—keadilan.

Dengan nuansa akademis yang tegas, Volume I membedah bagaimana bahasa kebijakan dapat berfungsi sebagai mesin penenang: mengubah konflik menjadi urusan teknokratis, mengubah ketimpangan menjadi "tantangan implementasi", dan mengubah ketidakadilan menjadi bagian kecil dari narasi besar "pembangunan". Kritik buku ini tidak berhenti pada niat baik, tetapi pada cara niat baik dipaketkan agar tetap kompatibel dengan struktur kekuasaan yang sudah mapan. Di titik ini, kebijakan dibaca bukan sebagai dokumen netral, melainkan sebagai cara negara mengatur cara berpikir publik.

Buku ini kemudian masuk ke "dapur" instrumen: *feed-in tariff*, kuota/RPS, lelang, kontrak jangka panjang, insentif fiskal, hingga indikator kinerja. Volume I menegaskan bahwa instrumen bukan alat netral. Detail yang tampak kecil—syarat pra-kualifikasi, ambang ukuran proyek, formula tender, atau model evaluasi—dapat menentukan apakah kebijakan membuka partisipasi atau justru mengunci akses bagi pemain besar. Kebijakan yang tampak pro-transisi bisa saja tetap memproduksi eksklusivitas, hanya dengan mempersulit pintu masuk.

Selanjutnya, Volume I menempatkan institusi dan tata kelola sebagai medan uji. Kebijakan bisa runtuh karena tata kelola lemah, tetapi juga bisa mandek karena *over-governance*: regulasi berlapis yang rapi secara prosedural namun tumpul terhadap realitas sosial. Puncaknya, buku ini menunjukkan bahwa konflik lokal bukan "gangguan", melainkan data politik: tanda bahwa kebijakan menyentuh tanah, identitas, kepemilikan, dan distribusi manfaat-risiko.

Pada akhirnya, Volume I mengajukan provokasi yang rasional: jika kebijakan energi berkelanjutan adalah proyek masa depan, mengapa ia begitu sering memelihara struktur lama. Buku ini memberi kacamata kritis untuk membaca kebijakan sebagai arena kekuasaan—dari bahasa, instrumen, hingga logika pemerintahan yang menentukan siapa menang dan siapa membayar.

Penerbit dan Percetakan
NoerFikri
0813 7964 9378
noerfikri@gmail.com
Palembang-Indonesia

ISBN 978-623-178-399-8 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-623-178-400-1 (jil.1 PDF)
9 786231 784001

ISBN 978-623-178-399-8 (no.jil.lengkap PDF)
9 786231 783998

Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan
Volume 1
Membongkar Bahasa, Struktur dan Logika Pemerintahan
Muhammad Abduh
Yohandri Bow

Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan

Membongkar Bahasa, Struktur, dan Logika Pemerintahan

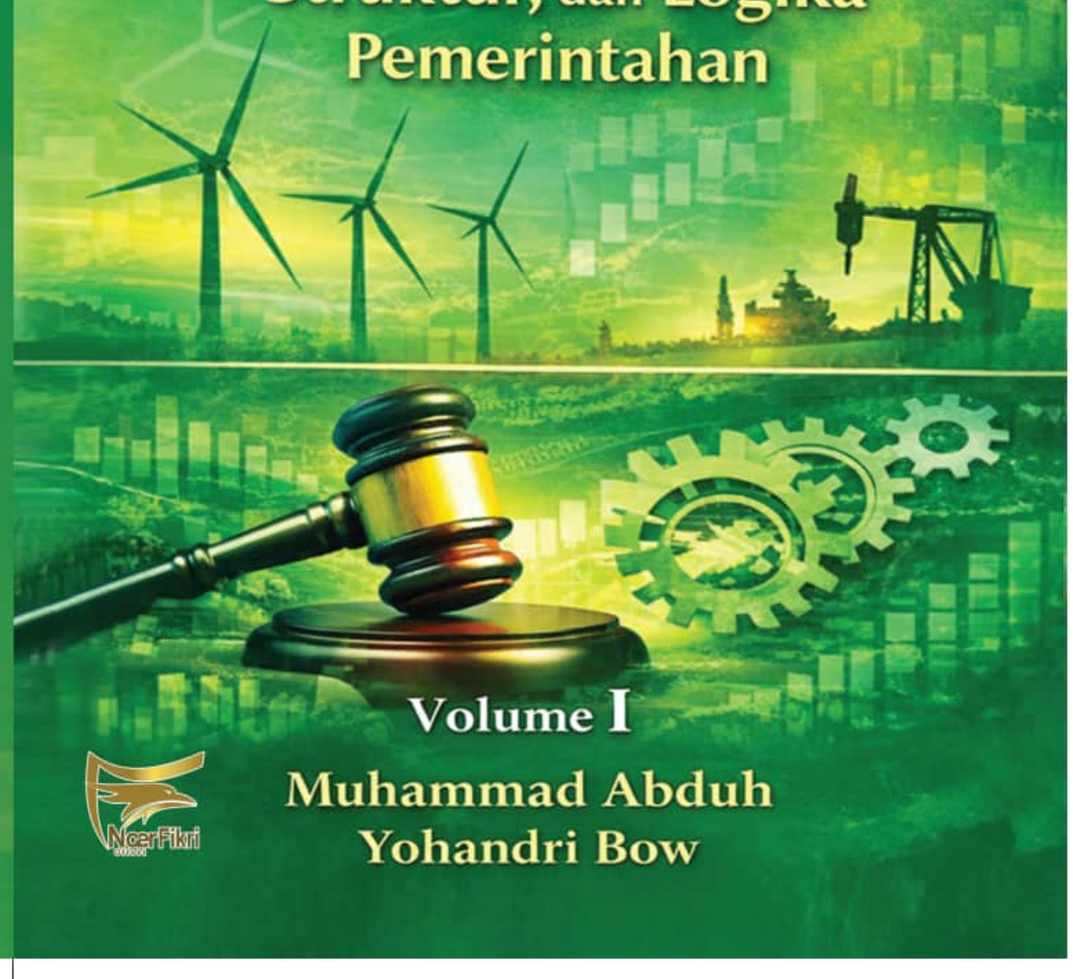

Volume I

Muhammad Abduh
Yohandri Bow

Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan Volume 1

Membongkar Bahasa, Struktur dan Logika Pemerintahan

Muhammad Abduh
Yohandri Bow

Penerbit
NaerFikri
offset

Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis

Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan
Volume 1
Membongkar Bahasa, Struktur dan Logika Pemerintahan

Penulis : Muhammad Abduh
Yohandri Bow
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Muhammad Abduh

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp: (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Februari 2026
15,5 x 23 cm
xxviii, 726 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN :
e-ISBN :

KATA PENGANTAR SERI

Buku ini lahir dari satu kegelisahan yang sederhana, tetapi tidak pernah benar-benar selesai: mengapa kebijakan energi berkelanjutan, yang secara moral tampak "benar" dan secara teknis tampak "mungkin", begitu sering berubah menjadi arena konflik, ketimpangan, dan kekecewaan publik? Dalam banyak diskusi, kebijakan energi berkelanjutan dibayangkan sebagai jawaban rasional atas krisis iklim: kita tinggal mempercepat energi terbarukan, memperbaiki desain pasar, dan memastikan investasi mengalir. Namun, pengalaman kebijakan di banyak negara menunjukkan bahwa jalan itu jarang mulus. Di balik narasi "transisi" yang terdengar tenang, ada pergulatan kepentingan, ada pertarungan legitimasi, ada pemindahan risiko, ada pembentukan rente baru, dan ada warga yang menanggung biaya sosial-lingkungan yang tidak selalu mereka pilih. Karena itu, buku ini tidak ditulis untuk menambah daftar resep kebijakan, melainkan untuk menambah kemampuan pembaca membaca kekuasaan: bagaimana kebijakan energi berkelanjutan bekerja sebagai struktur sosial, sebagai medan politik, dan sebagai arena filsafat yang penuh konsekuensi.

Dalam tradisi kebijakan publik modern, ada kecenderungan kuat untuk memperlakukan kebijakan sebagai instrumen yang netral: alat yang bisa dipakai oleh siapa pun, untuk tujuan apa pun, selama prosedurnya benar dan indikatornya terpenuhi. Di sisi lain, ada kecenderungan yang tak kalah kuat untuk menganggap energi berkelanjutan sebagai agenda teknis: urusan teknologi, insentif, dan infrastruktur. Buku ini mengambil jarak dari dua kecenderungan itu. Ia berangkat dari keyakinan bahwa kebijakan energi berkelanjutan adalah proyek kekuasaan. Ia membentuk dan dibentuk oleh struktur ekonomi politik. Ia hidup di dalam bahasa yang memproduksi batas-batas perdebatan. Ia berjalan

melalui instrumen yang menyaring siapa yang boleh masuk dan siapa yang tersingkir. Ia bertumpu pada institusi yang dapat memperkuat keadilan atau justru mengabadikan ketimpangan. Ia menghasilkan konflik yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh pendekatan partisipasi formal. Dan pada akhirnya, ia menuntut kita mengajukan pertanyaan yang lebih radikal daripada sekadar "apa kebijakan yang efektif": pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, siapa yang menentukan definisi keberlanjutan, dan siapa yang menanggung beban perubahan.

Di sinilah filsafat kekuasaan menjadi penting. Filsafat kekuasaan bukanlah kemewahan teoretis, melainkan cara untuk melihat bahwa kebijakan selalu membawa nilai. Setiap rancangan kebijakan adalah keputusan moral: ia memilih apa yang dianggap prioritas, apa yang dianggap risiko yang dapat diterima, dan apa yang dianggap pengorbanan yang "wajar". Ketika negara memilih jalur insentif tertentu, ketika regulator menetapkan standar, ketika pemerintah mengadopsi indikator performa, atau ketika lembaga keuangan membakukan taksonomi hijau, keputusan itu bukan hanya teknis. Ia adalah keputusan tentang definisi, klasifikasi, dan legitimasi. Dalam bahasa sederhana: kebijakan energi berkelanjutan adalah cara negara dan elite mengatur masa depan. Dan karena masa depan adalah ruang yang diperebutkan, maka kebijakan adalah bentuk politik yang paling nyata.

Buku ini juga berangkat dari pengamatan bahwa banyak konflik dalam energi berkelanjutan bukan muncul karena masyarakat "anti perubahan", tetapi karena perubahan itu dirasakan sebagai proses yang tidak adil. Warga tidak selalu menolak energi terbarukan; mereka sering menolak cara kebijakan dibuat, cara proyek ditempatkan, cara kompensasi dibagi, cara risiko dialihkan, dan cara suara lokal dikecilkan. Dalam banyak kasus, energi berkelanjutan menjadi paradoks: ia

menjanjikan masa depan yang lebih bersih, tetapi proses menuju masa depan itu dapat menciptakan luka sosial baru. Di titik ini, energi berkelanjutan bukan lagi sekadar agenda lingkungan; ia menjadi ujian politik tentang demokrasi, keadilan, dan legitimasi.

Karena kompleksitas inilah, naskah ini disusun sebagai seri dua volume. Secara teknis, pembagian ini juga merupakan respons terhadap kenyataan bahwa proyek intelektual ini telah berkembang menjadi naskah yang sangat besar. Namun pembagian ini bukan semata-mata soal ketebalan. Ia adalah keputusan struktural untuk menjaga koherensi argumentasi. Volume 1 membangun fondasi konseptual: bagaimana kekuasaan bekerja melalui bahasa kebijakan, bagaimana instrumen kebijakan menjadi teknologi kuasa, bagaimana institusi menentukan efektivitas kebijakan, dan bagaimana konflik multi-level memperlihatkan friksi antara desain pusat dan realitas lokal. Volume 2 melanjutkan fondasi itu ke medan yang lebih konkret dan lebih menentukan: ekonomi politik, pembiayaan, rente, keadilan, difusi kebijakan, materialitas transisi, metodologi kritis, perspektif kawasan, dan strategi normatif desain ulang kebijakan. Dengan demikian, dua volume ini membentuk satu kesatuan argumentatif: Volume 1 menyediakan kacamata, Volume 2 mengajak pembaca masuk ke arena.

Ada alasan lain mengapa seri ini disusun dua volume. Kebijakan energi berkelanjutan sering dipelajari dalam disiplin yang terpisah: ekonomi energi memusatkan perhatian pada harga, efisiensi, dan pasar; studi kebijakan publik memusatkan perhatian pada desain instrumen dan implementasi; studi politik menekankan koalisi, konflik, dan kekuasaan; studi lingkungan menekankan emisi, dampak, dan risiko ekologis. Buku ini mencoba menolak fragmentasi itu. Ia menempatkan kebijakan energi berkelanjutan sebagai medan yang

membutuhkan pembacaan lintas-disiplin: ekonomi politik untuk memahami aliran modal dan rente; teori institusi untuk memahami kapasitas dan ambang tata kelola; filsafat moral untuk memahami legitimasi dan keadilan; studi wacana untuk memahami bahasa yang membentuk batas konflik; metodologi kritis untuk memahami apa yang diukur dan apa yang disembunyikan. Karena itu, seri ini bukan hanya tentang energi, tetapi tentang bagaimana pengetahuan kebijakan dibentuk, disebarkan, dan dipertarungkan.

Pembaca mungkin bertanya: mengapa menggunakan istilah "filsafat kekuasaan"? Mengapa tidak cukup menyebut "analisis kebijakan" atau "ekonomi politik energi"? Jawabannya adalah karena istilah "filsafat" menandai sesuatu yang lebih mendasar. Analisis kebijakan sering berhenti pada pertanyaan "bagaimana kebijakan dibuat dan apa dampaknya". Ekonomi politik sering berhenti pada pertanyaan "siapa yang menguasai sumber daya dan bagaimana distribusinya". Tetapi filsafat kekuasaan memaksa kita masuk lebih jauh: ia menanyakan bagaimana suatu kebijakan memperoleh legitimasi; bagaimana definisi "berkelanjutan" dibakukan; bagaimana bahasa transisi digunakan untuk menenangkan publik; bagaimana indikator membentuk realitas; bagaimana standar teknis mengubah ketimpangan menjadi sesuatu yang tampak "alamiah"; dan bagaimana kebijakan memproduksi bentuk-bentuk ketidakadilan yang tidak selalu terlihat oleh statistik. Dalam arti ini, filsafat kekuasaan adalah cara untuk menjaga kebijakan energi berkelanjutan tetap berada di bawah cahaya pertanyaan etis dan epistemik, bukan hanya di bawah cahaya angka dan target.

Seri ini juga tidak ditulis untuk mempromosikan satu ideologi tunggal. Ia tidak ingin menjadi manifesto yang menolak pasar atau memuja negara. Ia juga tidak ingin menjadi pembela teknokrasi yang percaya bahwa semua konflik dapat

diselesaikan oleh desain indikator yang lebih baik. Buku ini justru ingin mempersulit pembaca—dalam arti yang produktif. Ia ingin membuat pembaca tidak nyaman dengan jawaban cepat. Ia ingin menunjukkan bahwa di balik setiap pilihan kebijakan ada kompromi yang tidak bisa dihapus: kompromi antara kecepatan dan keadilan, antara efisiensi dan demokratisasi, antara kepastian investasi dan kedaulatan kebijakan, antara target emisi dan perlindungan sosial. Seri ini mengajak pembaca menerima bahwa kebijakan energi berkelanjutan adalah proyek politik yang membutuhkan keberanian moral, bukan sekadar kecerdasan teknis.

Jika ada satu pesan yang ingin disampaikan sejak awal, maka pesan itu adalah ini: kebijakan energi berkelanjutan akan gagal jika ia hanya dipahami sebagai proyek teknologi. Ia juga akan gagal jika ia hanya dipahami sebagai proyek pasar. Ia akan terus melahirkan resistensi jika ia dipahami sebagai proyek elite. Kebijakan energi berkelanjutan hanya akan memiliki masa depan jika ia dipahami sebagai proyek sosial-politik yang menuntut legitimasi, partisipasi yang bermakna, pembagian risiko yang adil, serta kemampuan institusi untuk belajar dari konflik. Seri ini tidak menawarkan satu formula final, tetapi menawarkan satu cara membaca: membaca kebijakan sebagai relasi kuasa yang selalu dapat dipertanyakan, selalu dapat dinegosiasikan ulang, dan selalu dapat dirancang ulang.

Akhirnya, buku ini juga merupakan undangan. Undangan untuk memandang energi berkelanjutan bukan sebagai slogan yang menenangkan, tetapi sebagai pertanyaan yang membuka: pertanyaan tentang masa depan seperti apa yang sedang dibangun, dan untuk siapa masa depan itu disediakan. Dua volume ini disusun untuk membantu pembaca bergerak dari pertanyaan yang sering disederhanakan—"bagaimana mempercepat energi terbarukan?"—menuju pertanyaan yang lebih sulit namun lebih jujur: "bagaimana memastikan bahwa

percepatan itu tidak menjadi cara baru untuk mengulang ketidakadilan lama?" Jika pembaca selesai membaca seri ini dan menjadi lebih peka terhadap bahasa kebijakan, lebih kritis terhadap instrumen, lebih waspada terhadap arsitektur pembiayaan, dan lebih serius menempatkan keadilan sebagai ukuran, maka buku ini telah menjalankan tugasnya.

PROLOG VOLUME 1
Membongkar Bahasa, Struktur, dan Logika Pemerintahan

Kebijakan energi berkelanjutan sering dibicarakan seolah-olah ia adalah jalan lurus menuju masa depan yang lebih bersih: cukup dengan memperbaiki regulasi, mempercepat energi terbarukan, menata insentif, dan mengalirkan investasi. Dalam kerangka ini, kebijakan tampil sebagai sesuatu yang netral—sebuah perangkat teknis yang dapat dipilih dan disusun, lalu diterapkan, lalu diukur dampaknya. Namun di balik bahasa yang tampak rasional itu, kebijakan energi berkelanjutan sesungguhnya bekerja sebagai arena kekuasaan. Ia bukan hanya mengatur teknologi dan pasar, tetapi mengatur relasi sosial: siapa yang berhak menentukan definisi "berkelanjutan", siapa yang mendapat akses terhadap manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang dianggap cukup penting untuk didengar.

Volume 1 buku ini ditulis untuk membongkar tiga lapisan utama yang sering disembunyikan oleh pembicaraan teknokratis tentang energi berkelanjutan: bahasa, struktur, dan logika pemerintahan. Ketiganya saling terkait. Bahasa membentuk cara publik memahami masalah, struktur membentuk cara kebijakan dijalankan, dan logika pemerintahan membentuk cara negara mengklaim legitimasi atas keputusan yang diambil. Dengan membongkar tiga lapisan ini, Volume 1 tidak sekadar menawarkan kritik, melainkan membangun perangkat membaca yang diperlukan agar pembaca dapat menilai kebijakan energi berkelanjutan secara lebih jernih: bukan hanya apakah ia efisien, tetapi apakah ia adil; bukan hanya apakah ia menurunkan emisi, tetapi apakah ia memperluas demokrasi; bukan hanya apakah ia menarik investasi, tetapi apakah ia menjaga martabat warga.

Lapisan pertama adalah bahasa. Dalam kebijakan energi berkelanjutan, bahasa tidak sekadar menjelaskan kebijakan; bahasa memproduksi kebijakan. Istilah seperti “transisi”, “net-zero”, “ketahanan energi”, atau “energi hijau” tidak hanya menggambarkan arah perubahan, tetapi juga menata batas perdebatan. Bahasa dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengundang partisipasi publik, tetapi juga dapat berfungsi sebagai selimut yang menutupi konflik. Ketika kebijakan dibingkai sebagai “transisi yang tak terelakkan”, publik sering didorong untuk menerima perubahan sebagai sesuatu yang sudah pasti benar. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya menjadi inti kebijakan—siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, siapa yang kehilangan ruang hidup, siapa yang kehilangan pekerjaan, siapa yang menanggung biaya—sering dianggap mengganggu. Volume 1 menunjukkan bahwa membongkar bahasa kebijakan berarti membongkar cara kekuasaan bekerja secara halus: bukan melalui paksaan langsung, tetapi melalui pembingkaian yang membuat sebagian pertanyaan tampak tidak relevan.

Lapisan kedua adalah struktur kebijakan. Struktur di sini bukan hanya susunan bab atau daftar regulasi, melainkan arsitektur kebijakan yang bekerja melalui instrumen, mekanisme pasar, prosedur administrasi, dan parameter teknis. Banyak orang mengira instrumen kebijakan seperti *feed-in tariff*, kuota/RPS, lelang, kontrak jangka panjang, insentif fiskal, atau indikator performa adalah alat yang netral. Volume 1 justru memperlihatkan bahwa instrumen adalah teknologi kuasa. Ia menentukan siapa yang boleh masuk ke arena kebijakan dan siapa yang tersingkir sebelum kompetisi dimulai. Ia menentukan apakah kebijakan membuka ruang bagi aktor kecil, koperasi energi, dan skema komunitas, atau justru mengunci akses hanya untuk perusahaan besar dan konsorsium keuangan. Struktur kebijakan juga menentukan bagaimana pengetahuan

diperlakukan: apakah pengalaman lokal dianggap data yang sah, atau dianggap gangguan yang harus "dikelola". Dalam banyak kasus, struktur kebijakan memproduksi eksklusivitas epistemik: kebijakan tampak terbuka, tetapi hanya dapat dipahami oleh mereka yang menguasai bahasa teknokratik.

Lapisan ketiga adalah logika pemerintahan. Di sini Volume 1 menempatkan kebijakan energi berkelanjutan dalam konteks yang lebih luas: bagaimana negara membangun legitimasi, bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana institusi mengelola konflik kepentingan, dan bagaimana tata kelola menentukan batas-batas kemungkinan. Logika pemerintahan tidak selalu hadir sebagai ideologi eksplisit. Ia sering hadir sebagai kebiasaan institusional: cara negara mengukur keberhasilan, cara regulator menafsirkan kepatuhan, cara pemerintah mendefinisikan "partisipasi", atau cara kebijakan dirancang agar kompatibel dengan kebutuhan investor. Volume 1 memperlihatkan bahwa kebijakan energi berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas institusi. Ada ambang tertentu di mana kebijakan mulai efektif, tetapi ada pula ambang di mana kebijakan menjadi rentan terhadap korupsi, pembajakan, atau privatisasi keuntungan. Bahkan ketika institusi kuat, kebijakan dapat tetap menghasilkan masalah jika tata kelola terlalu menekankan kepastian prosedural dan melupakan legitimasi substantif. Dengan kata lain, logika pemerintahan menentukan apakah kebijakan menjadi proyek publik atau proyek elite.

Dalam Volume 1, tiga lapisan ini—bahasa, struktur, dan logika pemerintahan—tidak diperlakukan sebagai tema yang terpisah, tetapi sebagai rangkaian sebab-akibat yang saling menguatkan. Bahasa membentuk cara masalah didefinisikan; definisi masalah menentukan instrumen apa yang dianggap masuk akal; instrumen membentuk struktur distribusi akses dan manfaat; struktur distribusi memproduksi konflik; konflik menguji legitimasi; legitimasi menentukan stabilitas kebijakan.

Di titik ini, Volume 1 mengajukan tesis yang menjadi tulang punggung seri ini: kebijakan energi berkelanjutan tidak akan stabil jika ia hanya mengejar efisiensi, tetapi mengabaikan legitimasi. Ia tidak akan berhasil jika ia hanya mengejar target emisi, tetapi menunda pertanyaan keadilan. Ia tidak akan berkelanjutan jika ia hanya membangun infrastruktur, tetapi merusak kepercayaan publik.

Karena itu, Volume 1 disusun sebagai fondasi konseptual untuk keseluruhan seri. Bagian I menempatkan pembaca pada pertanyaan filsafat kebijakan: tentang nilai, etika, legitimasi, dan epistemologi. Bagian II membongkar wacana kebijakan: bagaimana narasi dan metafora membentuk batas perdebatan. Bagian III menguji instrumen sebagai teknologi kuasa: bagaimana desain kebijakan menentukan siapa yang diuntungkan. Bagian IV membaca institusi dan kualitas tata kelola: bagaimana ambang institusi menentukan efektivitas. Bagian V menutup dengan multi-level governance dan konflik lokal: arena di mana kebijakan bertemu realitas sosial, dan di mana klaim keberlanjutan diuji oleh pengalaman warga.

Dengan demikian, Volume 1 bukan sekadar pengantar menuju Volume 2. Ia adalah bagian yang berdiri sendiri sebagai fondasi analitis: membangun cara pandang bahwa energi berkelanjutan tidak pernah semata persoalan teknologi atau pasar, melainkan persoalan kekuasaan yang bekerja melalui bahasa, struktur, dan logika pemerintahan. Pembaca yang melewati Volume 1 akan memiliki perangkat untuk melihat bahwa setiap kebijakan membawa nilai, setiap instrumen membawa kepentingan, dan setiap klaim keberlanjutan membawa konsekuensi sosial. Dan dengan perangkat itulah Volume 2 kemudian dimulai: masuk ke ekonomi politik, pembiayaan, rente, konflik, dan keadilan—yakni medan di mana kebijakan energi berkelanjutan benar-benar memperlihatkan siapa yang membayar harga perubahan dan siapa yang memanen manfaatnya.

RINGKASAN STRUKTUR VOLUME 1: BAGIAN I–V

Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan: Membongkar Bahasa, Struktur, dan Logika Pemerintahan

Volume 1 menyusun fondasi argumentatif bahwa kebijakan energi berkelanjutan harus dibaca sebagai arena kekuasaan: ia dibentuk oleh bahasa yang memproduksi legitimasi, oleh instrumen yang mendistribusikan akses dan manfaat, serta oleh institusi yang menentukan kapasitas, stabilitas, dan arah kebijakan. Karena itu, Volume 1 tidak memulai dari teknologi atau target emisi, melainkan dari pertanyaan filosofis tentang nilai, legitimasi, dan keadilan; kemudian bergerak ke wacana, instrumen, tata kelola, hingga konflik multi-level sebagai ujian paling nyata terhadap kebijakan.

Bagian I — Pertanyaan Filsafat Kebijakan
Bagian ini membangun landasan konseptual untuk membaca kebijakan energi berkelanjutan sebagai persoalan etik dan legitimasi, bukan semata persoalan teknis. Fokus utamanya adalah menguji bagaimana nilai, tujuan, dan klaim "rasionalitas" kebijakan sering menyembunyikan pilihan moral yang menentukan arah perubahan. Bagian ini juga menegaskan bahwa kebijakan energi berkelanjutan selalu melibatkan keputusan tentang distribusi risiko, distribusi manfaat, dan batas pengorbanan sosial yang dianggap dapat diterima.

Bagian II — Wacana, Narasi, dan Metafora Kebijakan
Bagian ini membongkar bahasa kebijakan energi berkelanjutan sebagai perangkat kuasa yang membentuk horizon makna. Istilah seperti transisi, net-zero, ketahanan energi, dan "hijau" tidak diperlakukan sebagai kata-kata netral, melainkan sebagai cara negara dan aktor dominan menata batas perdebatan. Bagian ini menunjukkan bahwa wacana kebijakan dapat

memperluas partisipasi publik, tetapi juga dapat menutup konflik dengan membingkai kebijakan sebagai sesuatu yang "tak terelakkan" dan "sudah pasti benar".

Bagian III — Instrumen Kebijakan sebagai Teknologi Kuasa
Bagian ini memusatkan perhatian pada instrumen kebijakan—seperti feed-in tariff, kuota/RPS, lelang, kontrak, insentif fiskal, serta indikator performa—sebagai struktur yang menentukan siapa yang dapat masuk ke arena kebijakan dan siapa yang tersingkir. Instrumen dibaca sebagai teknologi kekuasaan karena ia bekerja melalui parameter teknis yang tampak objektif, tetapi sesungguhnya memuat pilihan normatif tentang skala proyek, kepemilikan, distribusi manfaat, serta dominasi aktor besar. Bagian ini menegaskan bahwa desain instrumen bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal demokratisasi energi.

Bagian IV — Institusi, Kualitas Tata Kelola, dan Dampaknya
Bagian ini menunjukkan bahwa kebijakan energi berkelanjutan bergantung pada kualitas institusi: kapasitas birokrasi, stabilitas hukum, integritas tata kelola, dan kemampuan negara mengelola konflik kepentingan. Bagian ini memperkenalkan gagasan bahwa ada ambang institusi yang menentukan kapan kebijakan mulai efektif, kapan ia rapuh, dan kapan ia menjadi arena rente. Bagian ini juga membahas paradoks tata kelola: institusi yang lemah dapat melahirkan kegagalan implementasi, tetapi institusi yang terlalu prosedural dapat melahirkan over-governance yang menutup ruang legitimasi sosial.

Bagian V — Multi-level Governance dan Konflik Lokal
Bagian ini menjadi puncak Volume 1 dengan menempatkan kebijakan energi berkelanjutan pada arena paling nyata: konflik pusat-daerah, konflik warga-proyek, konflik tanah, serta perebutan legitimasi sosial. Bagian ini menegaskan bahwa konflik bukan gangguan implementasi, melainkan bagian

inheren dari perubahan energi karena kebijakan menyentuh struktur kepemilikan, ruang hidup, serta distribusi risiko dan keuntungan. Dengan demikian, Bagian V memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan energi berkelanjutan tidak hanya diukur dari target emisi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan membangun legitimasi dan keadilan di tingkat lokal.

Penutup Volume 1

Melalui Bagian I–V, Volume 1 menegaskan satu kesimpulan utama: kebijakan energi berkelanjutan tidak akan stabil jika ia hanya mengejar efisiensi teknokratis. Ia membutuhkan legitimasi substantif, institusi yang mampu belajar dari konflik, serta keberanian untuk menempatkan pertanyaan nilai dan keadilan sebagai bagian inti dari desain kebijakan. Fondasi inilah yang menjadi pijakan Volume 2, yang bergerak ke ekonomi politik, pembiayaan, rente, keadilan, difusi kebijakan, materialitas transisi, metodologi kritis, perspektif kawasan, dan strategi normatif desain ulang kebijakan.

RINGKASAN STRUKTUR VOLUME 2: BAGIAN VI–XII

Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan: Menguji Arah Perubahan, Konflik, dan Keadilan

Volume 2 melanjutkan fondasi Volume 1 dengan memasuki arena yang paling menentukan dalam kebijakan energi berkelanjutan: ekonomi politik, pembiayaan, rente, distribusi risiko, dan perebutan legitimasi. Jika Volume 1 membongkar bahasa, struktur, dan logika pemerintahan, maka Volume 2 menguji bagaimana kekuasaan bekerja melalui uang, standar global, jaringan difusi kebijakan, rantai pasok material, serta metodologi yang menentukan apa yang dianggap sebagai "keberhasilan". Volume 2 menempatkan kebijakan energi berkelanjutan sebagai proyek perubahan yang selalu berhadapan dengan konflik dan ketidaksetaraan, sehingga pertanyaan keadilan tidak dapat diposisikan sebagai lampiran moral, melainkan sebagai ukuran utama.

Bagian VI — Ekonomi Politik dan Keuangan Transisi Energi
Bagian ini menjadi pintu masuk Volume 2 dengan menempatkan pembiayaan sebagai arena kekuasaan. Fokusnya adalah bagaimana investasi, kontrak, taksonomi hijau, dan skema de-risking membentuk distribusi risiko serta menentukan siapa yang memperoleh keuntungan. Bagian ini menunjukkan bahwa transisi energi berkelanjutan sering dipromosikan sebagai proyek "pasar", tetapi dalam praktiknya dapat memindahkan risiko ke negara dan publik, sementara manfaat ekonomi terkonsentrasi pada aktor modal dan jaringan finansial.

Bagian VII — Keadilan Energi dan Etika Kebijakan
Bagian ini menguji kebijakan energi berkelanjutan dari sudut pandang keadilan: distribusi manfaat dan beban, pengakuan terhadap kelompok rentan, serta keadilan antargenerasi dan antarwilayah. Bagian ini menegaskan bahwa kebijakan yang

menurunkan emisi dapat tetap tidak adil jika ia memperluas ketimpangan akses, memindahkan beban ekologis, atau mengabaikan martabat sosial. Dengan demikian, keadilan diposisikan sebagai parameter evaluasi yang bersifat substantif, bukan sekadar retorika.

Bagian VIII — Difusi, Imitasi, dan Hegemoni Kebijakan

Bagian ini membahas bagaimana kebijakan energi berkelanjutan menyebar lintas negara melalui donor, lembaga internasional, indikator, serta model "praktik terbaik". Difusi kebijakan tidak dipahami sebagai transfer pengetahuan yang netral, melainkan sebagai arena hegemoni: siapa yang menulis standar, siapa yang menentukan definisi "modern", dan siapa yang memaksakan kompatibilitas institusional. Bagian ini menunjukkan bahwa kebijakan energi berkelanjutan sering dibentuk oleh hierarki epistemik global yang menempatkan negara berkembang sebagai penerima, bukan perumus.

Bagian IX — Materialitas Transisi dan Etika Sirkularitas

Bagian ini menggeser perhatian dari emisi menuju materialitas: rantai pasok mineral, limbah teknologi, daur ulang, dan beban ekologis baru yang lahir dari energi terbarukan. Bagian ini menegaskan bahwa energi berkelanjutan bukan hanya persoalan "bersih" atau "kotor", melainkan persoalan pergeseran titik ekstraksi dan pergeseran titik konflik. Dengan demikian, kebijakan energi berkelanjutan harus diuji bukan hanya pada output energi, tetapi pada konsekuensi material dan ekologis yang menyertainya.

Bagian X — Metodologi Kritis untuk Membaca Kebijakan Energi

Bagian ini mengembangkan metodologi sebagai arena kekuasaan: bagaimana indikator, pengukuran, dan klaim "evidence-based policy" dapat menyederhanakan realitas,

menghapus konflik, dan menyembunyikan ketidakadilan. Bagian ini menawarkan pendekatan metodologis yang reflektif dan plural, termasuk pembacaan kebijakan sebagai relasi kuasa, serta penempatan konflik sebagai data sosial. Metodologi tidak dipahami sebagai alat penutup, melainkan sebagai disiplin pembuka yang menjaga kebijakan tetap dapat dipertanyakan.

Bagian XI — Perspektif Kawasan dan Studi Perbandingan
Bagian ini menghadirkan perspektif kawasan (Afrika Sub-Sahara, Asia Timur, Indonesia, OECD/Eropa) untuk menunjukkan bahwa energi berkelanjutan selalu beroperasi dalam konteks institusi, sejarah, dan struktur ekonomi yang berbeda. Studi perbandingan di sini bukan sekadar variasi kasus, melainkan cara untuk menegaskan bahwa tidak ada satu model kebijakan yang universal. Bagian ini memperlihatkan bahwa "keberhasilan" kebijakan sangat bergantung pada konfigurasi politik, tata kelola, dan legitimasi sosial di tiap wilayah.

Bagian XII — Strategi Normatif dan Desain Ulang Kebijakan
Bagian ini menutup Volume 2 dengan merumuskan strategi normatif: bagaimana kebijakan energi berkelanjutan dapat didesain ulang agar lebih adil, lebih transparan, dan lebih tahan uji. Bagian ini menggabungkan seluruh pembacaan sebelumnya untuk merumuskan arah perubahan kebijakan, termasuk hierarki tujuan, desain multi-level, serta agenda jangka panjang yang menempatkan legitimasi dan keadilan sebagai fondasi. Bagian ini menegaskan bahwa desain ulang kebijakan bukan sekadar perbaikan teknis, melainkan koreksi terhadap struktur kuasa yang membentuk transisi energi.

Penutup Volume 2
Melalui Bagian VI–XII, Volume 2 menegaskan bahwa kebijakan energi berkelanjutan adalah proyek perubahan yang selalu

berhadapan dengan ekonomi politik, konflik kepentingan, dan ketidaksetaraan. Karena itu, keberlanjutan tidak cukup dipahami sebagai target emisi, melainkan sebagai ujian legitimasi sosial dan keadilan substantif. Volume 2 mengakhiri seri ini dengan satu klaim utama: arah perubahan kebijakan energi berkelanjutan hanya akan bertahan jika ia mampu menata ulang distribusi risiko dan manfaat, mengakui konflik sebagai bagian inheren dari perubahan, serta menjadikan keadilan sebagai ukuran yang tidak bisa ditawar.

PETA SERI DUA VOLUME

Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan

Seri ini disusun sebagai dua volume yang membentuk satu kesatuan argumentatif. Pembagian dilakukan bukan sekadar untuk mengurangi ketebalan naskah, melainkan untuk menjaga koherensi gagasan: Volume 1 membangun fondasi konseptual tentang bagaimana kebijakan energi berkelanjutan bekerja sebagai kekuasaan, sedangkan Volume 2 menguji fondasi itu pada medan yang paling menentukan—ekonomi politik, konflik, dan keadilan.

VOLUME 1

Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan: Membongkar Bahasa, Struktur, dan Logika Pemerintahan

Fokus utama: *bagaimana kebijakan bekerja sebagai kuasa*.
Volume 1 menempatkan kebijakan energi berkelanjutan sebagai arena di mana bahasa membentuk legitimasi, instrumen membentuk distribusi akses dan manfaat, serta institusi membentuk stabilitas kebijakan. Volume 1 bergerak dari pertanyaan filsafat kebijakan menuju pembacaan wacana, instrumen, institusi, hingga konflik multi-level sebagai ujian paling nyata.

Bagian I–V:

- Filsafat kebijakan: nilai, legitimasi, epistemologi
- Wacana kebijakan: narasi, metafora, pembingkaian
- Instrumen: teknologi kuasa dalam desain kebijakan
- Institusi: ambang tata kelola dan kapasitas negara
- Multi-level governance: konflik lokal dan legitimasi sosial

Hasil utama Volume 1: pembaca memperoleh perangkat membaca kebijakan energi berkelanjutan sebagai relasi kuasa, bukan sekadar proyek teknokratis.

VOLUME 2

Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan: Menguji Arah Perubahan, Konflik, dan Keadilan

Fokus utama: *apa konsekuensi kekuasaan itu dalam struktur distribusi yang nyata*.

Volume 2 melanjutkan fondasi Volume 1 dengan masuk ke arena yang paling menentukan dalam kebijakan energi berkelanjutan: pembiayaan, rente, distribusi risiko, hegemoni standar global, materialitas transisi, metodologi pengukuran, dan desain ulang kebijakan. Volume 2 menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak cukup diukur dari target emisi, tetapi harus diuji melalui konflik, legitimasi, dan keadilan.

Bagian VI–XII:

- Ekonomi politik dan pembiayaan transisi
- Keadilan energi sebagai ukuran kebijakan
- Difusi kebijakan dan hegemoni pengetahuan
- Materialitas transisi dan etika sirkularitas
- Metodologi kritis untuk membaca kebijakan
- Perspektif kawasan dan studi perbandingan
- Strategi normatif dan desain ulang kebijakan

Hasil utama Volume 2: pembaca memahami bahwa arah perubahan kebijakan selalu terkait dengan siapa yang membayar, siapa yang memperoleh, dan siapa yang ditinggalkan.

DAFTAR ISI

	Hlm
Halaman Judul	**i**
Kata Pengantar Seri	**iii**
Prolog Volume 1	**ix**
Ringkasan Struktur Volume 1: Bagian I–V	**xiii**
Ringkasan Struktur Volume 2: Bagian VI–XII	**xvi**
Peta Seri Dua Volume	**xx**
Daftar Isi	**xxii**
Bagian I — Pertanyaan Filsafat Kebijakan	**1**
1. Mengapa "Berkelanjutan"?: dari Etika Intergenerasional ke Kewajiban Negara–Pasar	**2**
1.1 Genealogi "Keberlanjutan" dalam Etika dan Filsafat Politik	2
1.2 Keadilan Antargenerasi: Hak, Kewajiban, dan Horizon Waktu	6
1.3 Negara, Pasar, dan Pembagian Tanggung Jawab Keberlanjutan	11
1.4 Dari Moralitas ke Regulasi: Bagaimana "Berkelanjutan" Jadi Kewajiban Kebijakan	16
2. Kuasa, Pengetahuan, Legitimasi: Kebijakan sebagai Teknologi Pemerintah (*Governmentality*)	**22**
2.1 Konsep Kekuasaan (Foucault, Hegemoni, Governmentality) dalam Kebijakan Energi	22
2.2 Pengetahuan, Ahli, dan Produksi "Kebenaran" Energi Berkelanjutan	27
2.3 Legitimasi Kebijakan: Prosedural, Substantif, dan Simbolik	33
2.4 Kebijakan Energi sebagai Teknologi Pemerintah: Mengatur Populasi dan Pasar	38

3. Nilai vs Harga: Membedakan Nilai Publik, Martabat, dan Kalkulus Biaya-Manfaat 43
3.1 Nilai Publik, Martabat Manusia, dan Batas Ekonomi Neoklasik 43
3.2 Cost–Benefit Analysis, Diskonto, dan Invisibilitas Nilai Non-Pasar 48
3.3 Energi sebagai Hak, Jasa, atau Komoditas: Implikasi Etis dan Politik 53
3.4 Konflik Nilai dalam Kebijakan Energi: Siapa yang Menentukan Prioritas 58

4. Epistemologi Bukti: Kapan "*Evidence*" Menjadi Tata Bahasa Kekuasaan dalam Energi Berkelanjutan 65
4.1 Ledakan Riset Energi Berkelanjutan: Peta Tema dan Paradigma Utama 65
4.2 Standar Bukti, Model, dan Indikator sebagai Tata Bahasa Kekuasaan 69
4.3 Arus Utama Baru: Keadilan Energi, Demokrasi Energi, dan Partisipasi 74
4.4 Dari Bukti ke Keputusan: Bagaimana Epistemologi Membatasi Imajinasi Kebijakan 79

Bagian II — Arsitektur Wacana & Metafora Kebijakan . 85

5. *Net-Zero* Sebagai Wacana: Target sebagai Konstruksi Epistemik dan Alat Koordinasi Politik . 86
5.1 Asal-Usul dan Difusi Wacana *Net-Zero* 86
5.2 Net-Zero sebagai Konstruksi Epistemik: Angka, Skenario, dan Model Iklim 91
5.3 Fungsi Politik *Net-Zero*: Koordinasi, Penundaan, dan Pembingkaian Ambisi 97
5.4 *Net-Zero* dan *Greenwashing*: Celah Teknis dan Moral.. 103

5.5 Alternatif terhadap Logika Net-Zero: Degrowth, Sufficiency, dan Keadilan Iklim 110

6. Keamanan, Kedaulatan, Ketahanan: Metafora yang Mengarahkan Prioritas Kebijakan 118

6.1 "Keamanan Energi" Sebagai Metafora: Ancaman, Musuh, dan Prioritas Negara 118

6.2 Kedaulatan Energi: Kontrol atas Sumber Daya, Teknologi, dan Data 124

6.3 Ketahanan (*Resilience*) sebagai Wacana Adaptif: Siapa yang Diminta Beradaptasi 131

6.4 Pertemuan Metafora: ketika Keamanan, Kedaulatan, dan Ketahanan Saling Bertabrakan 138

6.5 Implikasi Metafora bagi Desain Kebijakan dan Distribusi Risiko 144

7. Transisi vs Transformasi: Dari Teknokrasi ke Rekayasa Sosial-Politik 151

7.1 "Transisi Energi" sebagai Narasi Teknokratis: Skenario, Jalur, dan *Roadmap* 151

7.2 Transformasi Sosial-Politik: Relasi Kelas, Gender, Ras, dan Ruang 158

7.3 *Just Energy Transition*: Menggabungkan Efisiensi Teknis dan Keadilan Struktural 165

7.4 Kontestasi Wacana: Siapa yang Diuntungkan oleh Istilah "Transisi" 172

Bagian III — Instrumen sebagai Teknologi Kuasa 181

8. *Feed-In Tariff* (FIT): Rasionalitas, Insentif, dan Politik Difusi Kebijakan Lintas Negara 182

8.1 Rasionalitas Ekonomi dan Regulasi FIT: Kepastian Harga dan Risiko Investasi 182

8.2 Bagaimana FIT Menyusun Insentif: Produsen, Utilitas, dan Negara 188
8.3 Difusi FIT Lintas Negara: Peran Epistemic Communities dan Donor 194
8.4 FIT dan Keadilan: Siapa yang Membayar, Siapa yang Menikmati 200
8.5 Reformasi FIT: Penyesuaian Tarif, Degression, dan Stabilitas Kebijakan 207

9. Kuota/RPS & Standar Portofolio: Siapa yang Menanggung Beban Kepatuhan; Adaptasi Pasar-Listrik 214
9.1 Desain Kuota/RPS dan Logika "Wajib Beli" Energi Terbarukan 214
9.2 Beban Kepatuhan: Utilitas, Konsumen, dan Anggaran Publik 221
9.3 Dampak Pada Struktur Pasar Listrik: Kompetisi, Monopoli, dan Integrasi Sistem 228
9.4 Perbandingan FIT vs RPS: Efektivitas, Risiko, dan Distribusi Manfaat 235
9.5 Kuota/RPS dalam Konteks Negara Berkembang: Adaptasi dan Keterbatasan Institusional 242

10. Lelang & Mekanisme Pasar: Efisiensi vs Akses—Menguji Klaim "Netralitas" Ekonomi 251
10.1 Lelang Kapasitas/Proyek Energi Terbarukan: Desain dan Rasionalitas Ekonomi 251
10.2 Kompetisi Harga vs Akses Pelaku Kecil dan Lokal. 259
10.3 Risiko *Underbidding*, Kegagalan Proyek, dan Stabilitas Sistem 267
10.4 Klaim Netralitas Pasar: Siapa yang Diuntungkan oleh Desain Lelang 275
10.5 Kombinasi Instrumen: Lelang, Kontrak Jangka Panjang, dan Jaminan Negara 283

11. Indikator Efektivitas Regulasi: Apa yang "Terlihat" oleh Indikator Komposit, dan Apa yang Disembunyikan..... 292
11.1 Indikator dan Indeks Performa Energi: dari *Doing Business* ke Indeks Energi Hijau 292
11.2 Pilihan Variabel, Bobot, dan Normalisasi: Politik di Balik Angka..... 299
11.3 Apa yang Diukur dan Apa yang Tak Terlihat: Keadilan, Konflik, dan Kualitas Proses..... 308
11.4 Penggunaan Indikator dalam Advokasi dan Conditionalities 316
11.5 Merancang Indikator yang Lebih Adil: Prinsip dan Kompromi 323

Bagian IV — Institusi, Kualitas Tata Kelola, dan Dampaknya..... 331

12. Ambang Kualitas Institusi: Ketika Pengaruh Energi Terbarukan Bergantung pada Mutu Tata Kelola 332
12.1 Konsep Ambang Institusional: Kapan Kebijakan Mulai Efektif..... 332
12.2 Korupsi, Stabilitas Hukum, dan Kapasitas Birokrasi dalam Energi Terbarukan..... 342
12.3 Interaksi Kebijakan Energi dengan Lembaga Fiskal dan Regulasi Sektor Lain..... 352
12.4 Studi Lintas Negara: Pola Hubungan Kualitas Institusi dan Penetrasi Energi Terbarukan..... 360
12.5 Implikasi bagi Negara dengan Institusi Rapuh: Strategi Bertahap dan Protektif..... 370

13. Tata Kelola & Pembangunan Berkelanjutan di OECD: Paradoks Efektivitas dan "*Governance* Terlalu Kuat?"..... 382
13.1 Negara OECD dan Standar Tata Kelola Tinggi: Asumsi Efektivitas Otomatis 382

13.2 Over-Governance: Kompleksitas Regulasi dan Risiko Kebuntuan Kebijakan 393
13.3 Peran Lembaga Independen, Regulator Energi, dan Pengadilan 401
13.4 Paradoks Kebijakan: Keberlanjutan, Kompetitivitas, dan Tekanan Politik Domestik 411
13.5 Pelajaran untuk Negara Lain: Apa yang Dapat dan Tidak Dapat Ditiru 420

14. Kapasitas Implementasi: Stabilitas Regulasi, Koherensi Kebijakan, dan Koordinasi Lintas-Level 429
14.1 Kapasitas Implementasi sebagai Dimensi Kekuasaan: Siapa yang Mampu Mengeksekusi 429
14.2 Stabilitas Regulasi dan Risiko Perubahan Kebijakan Mendadak 437
14.3 Koherensi Lintas Sektor: Energi, Keuangan, Lingkungan, dan Industri 446
14.4 Koordinasi Lintas-Level: Pusat–Provinsi–Lokal dalam Proyek Energi 454
14.5 Mengukur dan Memperkuat Kapasitas Implementasi: Alat, Indikator, dan Reformasi 462

Bagian V — Multi-level Governance & Konflik Lokal 471

15. Dari Target Nasional ke Friksi Lokal: Enam Celah Institusional yang Memicu Resistensi Komunitas... 472
15.1 Rantai Kebijakan dari Target Nasional ke Proyek di Lapangan 472
15.2 Celah Informasi: Siapa yang Tahu Apa dan Kapan . 479
15.3 Celah Representasi: Siapa yang Berbicara atas Nama Siapa 485
15.4 Celah Akuntabilitas: Sulitnya Melacak Penanggung Jawab 492

15.5 Celah Distribusi Manfaat–Beban: Ketimpangan Spasial dan Sosial 498

16. Partisipasi Publik: Ritual atau Deliberasi?: Transparansi, Diseminasi Pengetahuan, dan Mekanisme Persetujuan 506

16.1 Model Partisipasi: Konsultasi, Sosialisasi, Deliberasi, dan Co-Decision 506

16.2 Transparansi Informasi Proyek: Bahasa, Kanal, dan Waktu 513

16.3 Mekanisme Persetujuan (FPIC, Izin Lingkungan, *Hearing*) Sebagai Prosedur Legitimasi 520

16.4 Ketika Partisipasi Menjadi Ritual: Tokenism dan Fatigue Komunitas 527

16.5 Mendesain Ulang Partisipasi Menuju Deliberasi Bermakna 533

17. Legitimasi Sosial Proyek: Beban/Benefit, Rasa Tidak Adil, dan Desain Ulang Mandat Institusional 541

17.1 Konsep Social Licence to Operate dalam Energi Berkelanjutan 541

17.2 Persepsi Keadilan: Prosedural, Distributif, dan Pengakuan 548

17.3 Konflik, Protes, dan Negosiasi Ulang Mandat Institusional 554

17.4 Skema Kompensasi, *Benefit Sharing*, dan Risiko Kooptasi 562

17.5 Membangun Legitimasi Sosial yang Tahan Uji Waktu 568

Daftar Pustaka 576

Glosarium 592

Biodata Penulis 724

Bagian I
Pertanyaan Filsafat Kebijakan

1 Mengapa "Berkelanjutan"?: dari Etika Intergenerasional ke Kewajiban Negara–Pasar

1.1 Genealogi "Keberlanjutan" dalam Etika dan Filsafat Politik

Genealogi istilah "keberlanjutan" dalam etika dan filsafat politik berakar dari kegelisahan sangat tua: bagaimana manusia hidup, memproduksi, dan mengonsumsi tanpa merusak syarat dasar keberlanjutan kehidupan bersama. Dalam tradisi keagamaan maupun filsafat klasik, gagasan "menjaga ciptaan", "kesederhanaan", dan "keadilan" sudah menyinggung batas moral atas eksploitasi alam, meskipun belum memakai istilah *sustainable development*. Baru pada abad ke-20, terutama setelah krisis lingkungan global, intuisi moral ini dirumuskan lebih sistematis: manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama yang hidup sekarang, tetapi juga kepada mereka yang belum lahir. Di titik ini, "keberlanjutan" mulai berfungsi sebagai jembatan antara etika lingkungan, keadilan sosial, dan kalkulasi ekonomi negara–pasar, meski ketiga ranah itu sering saling bertabrakan dalam praktik politik sehari-hari.

Dalam filsafat moral kontemporer, perdebatan tentang "keberlanjutan" bergeser dari sekadar pelestarian alam menuju diskusi tentang struktur kekuasaan global. Pertanyaan etis tidak lagi hanya "berapa banyak emisi yang boleh kita hasilkan", tetapi "siapa yang berhak menghasilkan, siapa yang menanggung dampak, dan siapa yang mengontrol teknologi". Di sini muncul gagasan *climate justice* sebagai kerangka yang menghubungkan tanggung jawab historis, hak atas pembangunan, dan tata kelola teknologi rendah karbon. Analisis tentang keterkaitan antara

keadilan iklim, hak kekayaan intelektual, dan mekanisme pembiayaan menunjukkan bahwa arsitektur hukum dan inovasi dapat memperkuat atau melemahkan keadilan itu sendiri (Rimmer, 2019). Dengan demikian, genealogi "keberlanjutan" semakin tampak sebagai sejarah tarik-menarik antara klaim moral universal dan kepentingan institusional yang sangat konkret.

Ketika wacana etis tersebut masuk ke ranah kebijakan publik, "keberlanjutan" berubah menjadi istilah yang sarat strategi politik. Negara, korporasi, dan lembaga internasional menggunakannya untuk membingkai investasi, bantuan, maupun reformasi regulasi sebagai sesuatu yang secara moral tak terelakkan. Di sektor energi, misalnya, proyek *energi terbarukan* kerap dipresentasikan sebagai solusi netral dan rasional, padahal di baliknya terdapat keputusan tentang siapa yang diberi insentif, siapa yang kehilangan akses lahan, dan siapa yang memegang kendali infrastruktur. Konsep seperti *carbon neutrality* sering dijelaskan kepada publik sebagai "nol emisi bersih", namun secara teknis berarti menyeimbangkan emisi dengan penyerapan atau kompensasi; penjelasan sederhana ini penting agar pembaca awam menyadari bahwa angka-angka tersebut adalah hasil keputusan politik, bukan fakta alamiah yang berdiri sendiri.

Dimensi kekuasaan dalam "keberlanjutan" terlihat jelas dalam arena perundingan iklim global. Prinsip *common but differentiated responsibilities* sering dipuji sebagai kompromi antara keadilan dan realisme, tetapi di tangan aktor tertentu ia dapat dipakai untuk memperluas ruang manuver politik sambil membatasi cakupan keadilan substantif. Kajian tentang posisi Tiongkok di COP27, misalnya, menunjukkan bagaimana klaim kedaulatan dan keadilan dapat sekaligus memperjuangkan hak negara berkembang dan pada saat bersamaan membatasi isu-isu ketidakadilan di level komunitas rentan (Yeh & Loizeaux,

2024). Di sini, genealogi "keberlanjutan" berkelindan dengan praktik diplomasi, di mana istilah yang tampak normatif netral justru menjadi alat untuk mengatur skala, tempo, dan bentuk tanggung jawab yang diakui dalam rezim iklim global.

Perspektif etika intergenerasional menambahkan lapisan problematik lain dalam sejarah "keberlanjutan". Ketika ekonom berbicara tentang *discount rate*—tingkat diskonto—mereka sedang memutuskan seberapa besar nilai masa depan "diperkecil" dibandingkan masa kini, sebuah keputusan teknis yang sesungguhnya sangat moral. Jika tingkat diskonto tinggi, kepentingan generasi mendatang dianggap kurang penting dibanding kebutuhan sekarang; jika rendah, beban pengorbanan generasi kini meningkat. Genealogi keberlanjutan di sini memperlihatkan pergeseran dari intuisi sederhana "jangan menghabiskan semuanya sekarang" menuju kalkulus kompleks yang menggabungkan risiko, ketidakpastian, dan asumsi tentang pertumbuhan ekonomi. Bagi pembaca awam, penting dipahami bahwa angka dalam model iklim bukanlah kebenaran objektif, melainkan perwujudan nilai yang dipilih, dinegosiasikan, dan dilegitimasi oleh aktor yang memegang otoritas pengetahuan.

Pada ranah kebijakan sektor energi, "keberlanjutan" dilipatgandakan lagi melalui perangkat pasar dan birokrasi. *Energy transition* tidak hanya berarti mengganti sumber energi kotor dengan yang lebih bersih, tetapi juga mengubah pola kepemilikan, subsidi, dan insentif yang mengikat pemerintah dan pelaku usaha. Di banyak negara, *kebijakan energi* dirancang dengan bahasa efisiensi ekonomi, seperti *feed-in tariff* atau *carbon pricing*, yang bagi awam dapat dijelaskan sebagai skema harga khusus untuk mendorong energi bersih atau tarif atas emisi karbon. Namun, di balik istilah teknis yang tampak netral tersebut, terdapat pilihan tentang siapa yang menanggung biaya naiknya tarif listrik, siapa yang menikmati jaminan keuntungan

jangka panjang, dan sejauh mana negara berani mengatur ulang relasi kekuasaan antara produsen besar dan masyarakat pengguna.

Genealogi "keberlanjutan" juga bergeser dari wacana etis ke bahasa tata kelola dan inovasi. Di sini, keberlanjutan tidak hanya dipahami sebagai tujuan moral, tetapi sebagai hasil dari kombinasi *green innovation*, regulasi, dan investasi. Studi tentang inovasi hijau dan tata kelola lingkungan di bawah kerangka COP26, misalnya, menunjukkan bagaimana desain regulasi dapat mendorong inovasi sekaligus menciptakan umpan balik positif dengan arus investasi hijau (Li, Razzaq, Irfan, & Luqman, 2023). Istilah seperti *environmental governance* dapat dipahami secara sederhana sebagai cara pemerintah mengatur dan mengarahkan perilaku aktor publik maupun privat agar selaras dengan tujuan lingkungan. Ketika keberlanjutan dipetakan dalam kategori seperti ini, ia berubah menjadi bagian dari strategi pembangunan dan daya saing, bukan hanya seruan moral.

Pada tahap ini, "keberlanjutan" telah menjadi simpul tempat berbagai prinsip etika saling bertemu dan bertabrakan: keadilan distributif, pengakuan terhadap kelompok rentan, tanggung jawab historis, hak atas pembangunan, dan perlindungan ekosistem. Genealogi konsep ini memperlihatkan bagaimana bahasa *sustainable development* yang awalnya tampak harmonis, lama-kelamaan menyingkap ketegangan antara janji pertumbuhan berkelanjutan dan realitas batas ekologi. Di sektor energi, misalnya, klaim bahwa pertumbuhan hijau akan memuaskan semua pihak sering menutupi fakta bahwa ada wilayah yang dijadikan lokasi pembangkit, komunitas yang kehilangan ruang hidup, dan pekerja yang harus beradaptasi dengan restrukturisasi ekonomi. Dengan demikian, keberlanjutan sebagai konsep etis menjadi medan konflik nilai, bukan slogan yang menyatukan semua kepentingan.

Akhirnya, ketika buku ini mengkaji "Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan", genealoginya membantu kita melihat bahwa istilah "keberlanjutan" selalu datang dengan paket lengkap: pilihan teknologi, arsitektur pendanaan, dan desain institusional yang berpihak pada aktor tertentu. Proyek *energi terbarukan* yang dipuji sebagai tonggak masa depan dapat, dalam konteks sosial tertentu, meneguhkan hierarki lama jika hak komunitas lokal dan prinsip keadilan prosedural diabaikan. Di sisi lain, genealoginya juga membuka ruang harapan: keberlanjutan dapat diredefinisi sebagai komitmen kolektif untuk memusatkan suara kelompok terdampak, mengoreksi asimetri kekuasaan, dan menata ulang hubungan negara–pasar–masyarakat. Subbagian-subbagian berikutnya akan menelusuri lebih jauh bagaimana etika intergenerasional, klaim kedaulatan, dan instrumen pasar saling berkelindan dalam produksi makna "berkelanjutan" di dalam kebijakan energi.

1.2 Keadilan Antargenerasi: Hak, Kewajiban, dan Horizon Waktu

Keadilan antargenerasi pada dasarnya mengajukan pertanyaan sederhana namun mengguncang: apakah kita berhak menikmati manfaat ekonomi hari ini dengan cara yang mengurangi ruang hidup generasi esok? Pertanyaan ini menjadi urgen dalam konteks krisis iklim dan krisis sumber daya, ketika keputusan politik dan ekonomi tentang energi meninggalkan jejak puluhan hingga ratusan tahun. Di balik istilah yang tampak abstrak, keadilan antargenerasi menyentuh hal-hal sangat konkret: kualitas udara yang dihirup anak-anak, tingkat risiko bencana yang harus mereka hadapi, dan beban utang ekologis yang menumpuk tanpa persetujuan mereka. Karena itu, membicarakan keberlanjutan tidak cukup berhenti pada efisiensi teknis atau inovasi teknologi; ia menuntut kerangka

etis yang mengakui keberadaan mereka yang belum lahir sebagai pihak yang memiliki hak, bukan sekadar "penerima akibat" dari pilihan kolektif kita hari ini.

Dalam tradisi filsafat moral, kewajiban terhadap generasi mendatang sering dibahas melalui perbedaan antara etika tugas dan etika konsekuensi. Pendekatan berbasis hak menekankan bahwa anak dan cucu, bahkan yang belum lahir, memiliki klaim moral atas lingkungan yang layak: udara yang bersih, iklim yang stabil, dan sistem sosial yang tidak runtuh akibat tekanan ekologis. Pendekatan berbasis konsekuensi, sebaliknya, berfokus pada perhitungan manfaat dan kerugian jangka panjang, termasuk penggunaan *discount rate* atau tingkat diskonto, yaitu cara ekonom menghitung nilai masa depan seolah-olah selalu lebih rendah dari masa kini. Dalam praktik kebijakan, perbedaan ini menentukan apakah negara menganggap pengurangan emisi sebagai kewajiban yang tak bisa ditawar, atau hanya pilihan rasional selama hasil ekonomi jangka pendek tidak terlalu terganggu, sehingga horison waktu moral dapat menyempit secara drastis. Mengabaikan tensi ini membuat wacana keberlanjutan mudah berubah menjadi slogan.

Ketika kita memindahkan diskusi ke bidang energi, keadilan antargenerasi menjadi semakin kompleks karena keputusan infrastruktur bersifat *lock-in*, yaitu mengunci arah perkembangan sistem untuk waktu yang sangat panjang. Pembangunan pembangkit fosil baru hari ini berarti komitmen emisi selama puluhan tahun, sementara investasi pada energi terbarukan membuka kemungkinan menurunkan risiko iklim dan polusi bagi generasi mendatang. Namun pilihan ini tidak netral; ia melibatkan konflik antara kepentingan aktor yang sudah menikmati rente ekonomi sekarang dengan kepentingan mereka yang belum memiliki suara politik. Di sini, keadilan antargenerasi tidak hanya soal pembagian manfaat di masa

depan, tetapi juga soal siapa yang punya hak menentukan struktur risiko hari ini. Dengan kata lain, perdebatan tentang jalur energi adalah perdebatan tentang siapa yang diizinkan "menulis" masa depan dalam bahasa beton, baja, dan regulasi.

Konsep horizon waktu membantu menjelaskan bagaimana politik cenderung memperpendek perhatian terhadap masa depan. Siklus pemilu yang hanya beberapa tahun sering bertabrakan dengan umur teknis instalasi energi yang bisa mencapai 30–50 tahun, sehingga insentif politisi adalah memaksimalkan manfaat yang terlihat segera, sambil "menggulung" biaya ke generasi berikutnya. Dalam konteks desentralisasi kelistrikan, penelitian tentang pergeseran kekuasaan politik menunjukkan bagaimana skala keputusan diubah, aktor baru muncul, dan perebutan pengaruh terjadi di arena baru yang belum sepenuhnya diatur, sehingga konsekuensinya bagi generasi depan kerap tak terbaca (Brisbois, 2020). Jika horizon waktu kebijakan hanya mengikuti ritme politik jangka pendek, keadilan antargenerasi diperlakukan sebagai retorika, bukan prinsip yang mengikat.

Dimensi hak dalam keadilan antargenerasi mengajukan pertanyaan: hak siapa yang sebenarnya kita lindungi ketika berbicara tentang keberlanjutan? Hak generasi kini untuk mengejar pembangunan sering disandingkan dengan hak generasi mendatang atas lingkungan yang aman. Hak tersebut dapat dipahami sebagai hak atas "kemampuan untuk hidup bermartabat", bukan hanya hak abstrak atas alam. Di tingkat praktis, ini menuntut kita mengakui bahwa kebijakan lingkungan dan energi hari ini mengatur sejauh mana generasi masa depan dapat memilih jalannya sendiri, atau justru dipaksa menanggung konsekuensi pilihan yang tidak pernah mereka buat. Karena itu, beberapa gagasan kelembagaan mengusulkan pembentukan ombudsman generasi mendatang atau dewan masa depan yang diberi mandat formal untuk menilai keputusan

jangka panjang, agar hak yang belum memiliki pemilik aktual tetap terwakili dalam proses politik yang cenderung didominasi kepentingan jangka pendek.

Jika hak menyoroti klaim moral generasi mendatang, dimensi kewajiban menyoroti siapa yang harus bertindak dan sejauh mana. Negara memegang peran sentral karena mengatur aturan main pasar, memilih prioritas anggaran, dan menetapkan kerangka hukum bagi investasi. Namun, perusahaan dan rumah tangga juga memikul bagian tanggung jawab, misalnya melalui pola konsumsi dan investasi yang mendorong atau menghambat transformasi sistem energi. Di sinilah istilah *kebijakan energi* menjadi penting: bukan hanya paket regulasi teknis, melainkan kumpulan pilihan politik yang menentukan siapa menanggung biaya transisi, siapa mendapat insentif, dan seberapa besar ruang fiskal dialokasikan untuk melindungi kelompok rentan di masa depan. Kewajiban antargenerasi berarti merancang kebijakan yang tidak sekadar "efisien" hari ini, tetapi juga tidak menjerumuskan anak cucu ke dalam spiral adaptasi darurat yang mahal dan penuh penderitaan sosial.

Keadilan antargenerasi juga berkaitan erat dengan gagasan *energy justice*, yang menyoroti tiga pilar: distribusi, pengakuan, dan prosedur. Jika pilar-pilar ini hanya diterapkan pada generasi yang hidup sekarang, kita mengabaikan fakta bahwa infrastruktur dan tata ruang energi menciptakan pola ketimpangan yang bertahan lintas waktu. Misalnya, lokasi proyek besar di wilayah pedesaan hari ini dapat menghasilkan apa yang disebut *energy peripheralization*, yaitu kondisi ketika komunitas tetap berada di pinggir sistem, menanggung dampak tetapi tidak menikmati kendali dan manfaat yang sepadan (O'Sullivan et al., 2020). Pola ketidakadilan seperti ini tidak berhenti pada satu generasi; ia diwariskan melalui degradasi lingkungan lokal, hilangnya mata pencaharian tradisional, dan

hilangnya kemampuan komunitas untuk mempengaruhi keputusan yang menyentuh masa depan mereka.

Selain itu, horizon waktu keadilan antargenerasi menantang cara kita memahami risiko dan ketidakpastian. Banyak model ekonomi dan teknokratis menganggap masa depan sebagai sesuatu yang bisa "diringkas" dalam angka probabilitas dan skenario, seolah keputusan dapat dinetralkan melalui kalkulasi saja. Namun, perspektif etis mengingatkan bahwa generasi mendatang tidak dapat bernegosiasi dengan kita hari ini; mereka hanya dapat mewarisi struktur risiko yang kita tinggalkan. Karena itu, prinsip kehati-hatian dan *no-regret options*—pilihan yang tetap masuk akal bahkan jika skenario tidak terjadi persis seperti yang diperkirakan—menjadi penting untuk mengurangi kemungkinan penyesalan kolektif di masa depan. Tradisi filsafat politik yang peka terhadap distribusi kuasa mengajak kita bertanya: apakah kita merancang institusi yang memaksa pengambil keputusan untuk memikirkan konsekuensi kebijakan melampaui masa jabatan mereka sendiri, atau justru membiarkan risiko di-"privatisasi" ke masa depan?

Pada akhirnya, membahas keadilan antargenerasi berarti memasukkan dimensi waktu secara eksplisit ke dalam setiap perdebatan tentang keberlanjutan, terutama di sektor energi. Infrastruktur dan regulasi yang mendorong atau menghambat energi terbarukan bukan hanya produk analisis teknis; ia adalah keputusan tentang siapa yang boleh hidup di dunia yang relatif aman dan siapa yang dipaksa beradaptasi di bawah kondisi yang jauh lebih sulit. Penelitian tentang dimensi kebijakan transisi energi di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan mendorong sumber energi yang lebih bersih sangat bergantung pada konfigurasi kekuasaan, partisipasi publik, dan desain kelembagaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang (Werner & Lazaro, 2023). Dengan demikian, keadilan antargenerasi tidak dapat

dipisahkan dari cara kita merancang, mengkritik, dan membenahi struktur kekuasaan yang mengatur arah kebijakan keberlanjutan hari ini.

1.3 Negara, Pasar, dan Pembagian Tanggung Jawab Keberlanjutan

Negara dan pasar sering dibayangkan sebagai dua kutub yang saling berhadapan ketika kita membicarakan keberlanjutan, seolah-olah tanggung jawab etis terhadap bumi dan generasi mendatang hanya dapat dipikul oleh salah satunya. Dalam filsafat kekuasaan, cara kita membagi tanggung jawab ini bukan sekadar soal teknis kelembagaan, tetapi cermin dari jawaban atas pertanyaan: siapa yang berdaulat atas masa depan? Negara membawa klaim representasi publik dan legitimasi demokratis, sementara pasar membawa klaim efisiensi, inovasi, dan fleksibilitas alokasi sumber daya. Namun, dalam konteks krisis iklim dan agenda energi berkelanjutan, kedua klaim tersebut harus diuji secara normatif: siapa yang menanggung risiko, siapa yang menikmati manfaat, dan siapa yang menanggung kerusakan laten yang tak segera tampak, terutama bagi kelompok rentan dan generasi yang belum lahir. Di titik inilah pembagian tanggung jawab keberlanjutan menjadi persoalan filsafat kekuasaan, bukan hanya teknik administrasi.

Negara memiliki kapasitas memaksa sekaligus mengikat diri melalui hukum untuk menjamin kepentingan jangka panjang yang tidak selalu menguntungkan secara ekonomi dalam horizon sempit pelaku pasar. Sistem energi modern adalah contoh klasik: ia padat modal, penuh ketidakpastian, dan sarat konsekuensi lingkungan. Karena itu, jika negara terlalu banyak mendelegasikan keputusan strategis kepada logika laba, ia berisiko membiarkan struktur kekuasaan energi didikte oleh aktor yang tidak mendapat mandat demokratis. Studi tentang komunitas energi dan desentralisasi listrik menunjukkan bahwa

perubahan teknologi bisa memindahkan lokasi kekuasaan, tetapi tidak otomatis membongkar hierarki, karena aktor lama dapat menata ulang jejaring dan tetap dominan (Brisbois, 2020). Artinya, meskipun negara tampak mundur memberi ruang pada pasar dan komunitas, secara normatif ia tetap memikul kewajiban utama untuk memastikan bahwa distribusi kekuasaan baru tidak kembali memproduksi ketidakadilan lama dengan wajah yang berbeda.

Ketika negara dan pasar sama-sama terlibat dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan *energi terbarukan*, pertanyaan etis yang muncul bukan hanya "siapa membayar", tetapi juga "siapa memutuskan" dan "siapa menanggung akibatnya". Subsidi, insentif pajak, atau skema tarif khusus sering dibenarkan atas nama percepatan transisi, tetapi tanpa desain yang sensitif terhadap keadilan sosial, dukungan itu bisa jatuh pada perusahaan besar yang sudah kuat, sementara komunitas lokal hanya menjadi penonton atau bahkan korban proyek. Di sini konsep *energy justice*—yang dapat disederhanakan sebagai keadilan dalam siapa yang menikmati manfaat energi, siapa yang menanggung bebannya, dan siapa yang dilibatkan dalam keputusan—membantu kita melihat bahwa pembagian tanggung jawab tidak netral. Negara yang membiarkan pasar menentukan lokasi proyek tanpa kerangka partisipasi bermakna sebenarnya sedang memindahkan risiko politik dan sosial ke tingkat lokal, sambil mempertahankan keuntungan fiskal dan citra hijau di tingkat pusat.

Pasar sering dipuji sebagai arena inovasi, tempat teknologi baru lahir dan biaya diturunkan melalui kompetisi. Namun, seperti diingatkan oleh pengalaman berbagai negara, logika untung-rugi yang menjadi jiwa pasar tidak otomatis sejalan dengan keadilan distribusi maupun perlindungan ekologis. Werner dan Lazaro (2023) menunjukkan bagaimana kebijakan untuk mendorong sumber-sumber energi yang lebih bersih

dapat, di saat yang sama, menguatkan posisi pelaku privat besar yang memiliki akses modal dan informasi lebih baik daripada komunitas lokal. Dalam perspektif filsafat kekuasaan, ini berarti bahwa pembagian tanggung jawab keberlanjutan yang hanya didasari asumsi "pasar akan menyesuaikan" berpotensi mengabaikan fakta bahwa tidak semua pelaku berdiri pada posisi tawar yang setara. Tanggung jawab etis negara seharusnya bukan menyerahkan risiko kepada rumah tangga dan komunitas, melainkan merancang aturan agar inovasi pasar tidak berjalan dengan mengorbankan hak-hak warga yang lemah.

Di antara negara dan pasar, terdapat ruang *governance* yang lebih luas, yakni cara berbagai aktor—pemerintah, perusahaan, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil—mengatur dan mengelola keputusan bersama. Istilah *governance* di sini dapat dijelaskan secara sederhana sebagai "bagaimana keputusan diambil dan oleh siapa", bukan hanya daftar lembaga formal. Dalam konteks keberlanjutan, *governance* yang adil menuntut pembagian tanggung jawab berdasarkan kapasitas dan kontribusi terhadap kerusakan maupun manfaat. Perusahaan yang mendapat keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya seyogianya memikul tanggung jawab lebih besar untuk restorasi dan inovasi bersih. Negara, di sisi lain, tidak boleh bersembunyi di balik retorika "keterbatasan fiskal" ketika menyusun regulasi yang memengaruhi arah sistem energi. Di titik ini, pengaturan kelembagaan menjadi arena pertarungan definisi: apakah tanggung jawab keberlanjutan dimaknai sebagai beban tambahan atau sebagai bagian inheren dari model bisnis dan model pemerintahan.

Jika kita melihat desain *kebijakan energi* secara lebih rinci, tampak bahwa pembagian tanggung jawab keberlanjutan tercermin dalam instrumen konkret seperti standar emisi, skema pajak karbon, feed-in tariff, maupun dukungan riset dan

pengembangan. Instrumen-instrumen ini bukan sekadar alat teknis, melainkan ekspresi nilai tentang siapa yang harus berubah terlebih dahulu dan siapa yang diberi kompensasi. Ketika subsidi fosil tetap besar sementara dukungan pada teknologi bersih minim, pesan yang dikirim kepada pasar adalah bahwa keberlanjutan hanyalah wacana, bukan prioritas. Sebaliknya, ketika regulasi mengharuskan perusahaan menghitung biaya lingkungan dalam struktur harga, negara sedang menegaskan bahwa keuntungan tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab. Dari sudut pandang filsafat kekuasaan, seluruh detail regulasi ini menunjukkan apakah negara memposisikan diri sebagai pengarah normatif, atau sekadar manajer risiko politik jangka pendek yang mengikuti arus kepentingan ekonomi dominan.

Dalam konteks negara rentan iklim seperti Indonesia, fakta bahwa banyak wilayah menghadapi kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan ancaman terhadap infrastruktur energi membuat persoalan pembagian tanggung jawab keberlanjutan kian mendesak. Jika negara gagal mengarahkan investasi dan inovasi menuju sistem energi yang tahan terhadap risiko iklim, maka biaya sosial dan ekonomi akan ditanggung terutama oleh kelompok miskin dan daerah terpencil. Penelitian tentang kebijakan energi Indonesia menekankan perlunya kombinasi antara penguatan kapasitas *resilience*—daya lenting sistem terhadap guncangan—dan perluasan porsi energi bersih untuk mencapai target emisi dan tujuan pembangunan jangka panjang (Setiawan et al., 2025). Dalam kerangka filsafat kekuasaan, negara tidak sekadar pengatur teknis, tetapi penjaga keadilan antarwilayah dan antargenerasi, sedangkan pasar seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan tujuan tersebut, bukan penentu tunggal arah pembangunan.

Pembagian tanggung jawab keberlanjutan yang lebih adil menuntut kerangka penalaran yang menggabungkan kapasitas,

manfaat, dan kontribusi terhadap kerusakan. Negara memiliki instrumen fiskal dan regulatif untuk mengoreksi asimetri kekuasaan, sementara pelaku pasar memiliki kemampuan inovasi dan manajemen risiko yang dapat digerakkan ke arah tujuan publik. Di sisi lain, warga dan komunitas bukan hanya konsumen pasif, tetapi pemegang hak yang sah terhadap lingkungan hidup yang layak. Konsep seperti *just transition*—yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai "transisi ke ekonomi rendah karbon yang tidak meninggalkan pekerja dan komunitas rentan"—mengingatkan kita bahwa kebijakan yang tampak hijau bisa tetap tidak adil bila tidak memperhitungkan dampak sosialnya. Dengan demikian, filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan menuntut kontrak baru: negara tidak boleh melepaskan perannya sebagai penjaga keadilan, dan pasar tidak boleh dibiarkan beroperasi seolah-olah keberlanjutan hanyalah segmen produk ramah lingkungan.

Pada akhirnya, pembagian tanggung jawab keberlanjutan di sektor energi hanya dapat dinilai adil jika kita memeriksa bagaimana keputusan strategis diambil, siapa dilibatkan, dan bagaimana risiko serta manfaat dibagi sepanjang rantai nilai *energi terbarukan*. Negara yang kuat secara normatif adalah negara yang berani menggunakan kekuasaan politiknya untuk menetapkan batas-batas ekologis dan sosial bagi operasi pasar, bukan yang sibuk menyesuaikan diri dengan tekanan modal jangka pendek. Pasar yang patut dipertahankan adalah pasar yang diikat oleh aturan yang memastikan keuntungan tidak diperoleh dengan memindahkan biaya kepada komunitas marjinal dan generasi mendatang. Filsafat kekuasaan membantu kita melihat bahwa keberlanjutan bukan hanya soal menambah kapasitas produksi bersih, melainkan membongkar dan menata ulang relasi antara negara, pasar, dan warga sedemikian rupa sehingga tanggung jawab etis tidak lagi bisa dialihkan secara sepihak kepada pihak yang paling lemah.

1.4 Dari Moralitas ke Regulasi: Bagaimana "Berkelanjutan" Jadi Kewajiban Kebijakan

Dalam wacana etika lingkungan, istilah "berkelanjutan" mula-mula muncul sebagai seruan moral yang relatif lunak: ajakan untuk tidak menghabiskan sumber daya yang dibutuhkan generasi mendatang, dan imbauan agar manusia hidup "selaras" dengan ekosistem. Dalam fase ini, keberlanjutan terutama dibicarakan sebagai sikap pribadi dan kebajikan kolektif, mirip dengan kejujuran atau kemurahan hati, bukan sebagai kewajiban hukum yang dapat dipaksakan. Di ruang publik, gagasan tersebut hidup dalam kampanye sukarela, gerakan gaya hidup hijau, dan pendidikan karakter yang menekankan kepedulian terhadap bumi. Namun, ketika krisis iklim dan krisis keanekaragaman hayati semakin jelas, klaim moral tersebut mulai berubah menjadi tuntutan normatif yang lebih keras: generasi sekarang tidak sekadar "dianjurkan" tetapi "wajib" membatasi kerusakan. Di titik ini, pertanyaan tentang siapa yang harus bertindak, seberapa jauh, dan dengan cara apa, tidak lagi bisa dijawab hanya melalui kesadaran individual. Pergeseran dari anjuran ke kewajiban inilah yang kemudian membuka jalan bagi bahasa *regulation* dan penataan ulang hubungan antara warga, negara, dan pasar dalam kerangka "pembangunan berkelanjutan" yang lebih mengikat.

Transformasi keberlanjutan dari seruan etis menjadi kewajiban kebijakan dapat dipahami melalui logika risiko dan tanggung jawab yang makin terukur. Ketika dampak krisis iklim dapat diprediksi dan diukur—misalnya naiknya muka laut, gelombang panas yang ekstrem, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi lintas negara—argumen bahwa pemerintah boleh bersikap "netral" menjadi tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam kacamata etika publik, mengetahui risiko tetapi tidak bertindak adalah bentuk kelalaian, bahkan dapat dibaca sebagai ketidakadilan terhadap kelompok yang paling rentan. Di titik ini,

negara diharapkan mengatur pasar dan perilaku aktor ekonomi melalui kerangka *regulation* yang eksplisit, mulai dari standar emisi hingga skema pendanaan hijau yang mengaitkan hak memproduksi dengan kewajiban mengurangi dampak. Studi terbaru tentang transisi energi di negara-negara OECD menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan yang kuat dan kompleksitas ekonomi dapat mendorong pergeseran menuju praktik energi yang lebih bersih, asalkan didukung instrumen kebijakan yang tepat dan konsisten (Bakhsh et al., 2024). Pergeseran tersebut menandai bahwa keberlanjutan kini dibaca sebagai kewajiban institusional jangka panjang, bukan pilihan sukarela jangka pendek.

Meski demikian, proses menjadikan keberlanjutan sebagai kewajiban kebijakan tidak pernah netral secara politik maupun sosial. Ketika pemerintah mulai menargetkan bauran *energi terbarukan*, menghapus subsidi bahan bakar fosil, atau mewajibkan standar efisiensi tertentu, setiap angka, formula, dan indikator segera mengatur siapa yang menanggung biaya, siapa yang menikmati insentif, dan siapa yang berhak menunda perubahan. Di sini, "berkelanjutan" berfungsi sebagai kata kunci yang memberikan legitimasi moral bagi intervensi negara, sekaligus sebagai arena kontestasi antara kelompok kepentingan yang memiliki daya tawar berbeda. Bagi sebagian pelaku industri, regulasi berbasis keberlanjutan dirasakan sebagai pembatasan kebebasan berusaha atau ancaman terhadap keuntungan jangka pendek, sedangkan bagi komunitas rentan, regulasi yang sama dapat dipandang masih terlalu lemah untuk melindungi hak hidup yang layak di wilayah yang sudah terdampak krisis iklim. Genealogi ini menunjukkan bahwa kewajiban berkelanjutan selalu beroperasi di atas peta ketimpangan kekuasaan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pertanyaan “siapa wajib berkorban lebih dulu” menjadi sama pentingnya dengan “seberapa besar pengurangan emisi yang dibutuhkan”.

Di tingkat global, konferensi iklim tahunan di bawah kerangka UNFCCC menjadikan istilah "berkelanjutan" dan "transisi energi" sebagai bagian dari tata bahasa diplomasi internasional yang tidak bisa dihindari. Melalui negosiasi bertahun-tahun, serangkaian keputusan COP menggeser posisi keberlanjutan dari harapan moral menjadi rujukan formal dalam perjanjian internasional, misalnya ketika negara-negara diminta menyusun komitmen nasional yang terukur, melaporkan kemajuan, dan membuka diri terhadap mekanisme peninjauan sejawat. Setiap kata dalam dokumen hasil perundingan—seperti "shall", "should", atau "encouraged"—mengandung konsekuensi berbeda terhadap derajat kewajiban negara. Namun, sekalipun semakin mengeras di tingkat teks hukum, substansi kewajiban ini tetap dinegosiasikan ulang melalui celah bahasa seperti "upaya terbaik" atau "kapasitas nasional", yang memberi ruang bagi negara untuk menunda, mengaburkan, atau mereduksi kewajiban mereka. Dengan demikian, hukum internasional tentang iklim sekaligus mengikat dan lentur: ia menciptakan standar normatif minimum, tetapi juga membuka ruang bagi pembacaan ulang "kewajiban berkelanjutan" sesuai kepentingan politik masing-masing aktor dan blok perundingan.

Global stocktake yang diselenggarakan secara periodik berfungsi sebagai cermin kolektif bagi klaim bahwa dunia sedang bergerak menuju arah berkelanjutan, sekaligus sebagai forum untuk mempertanyakan klaim tersebut. Proses ini dimaksudkan sebagai mekanisme akuntabilitas: negara tidak lagi sekadar berjanji, tetapi harus menunjukkan bukti kinerja, menjelaskan celah, dan menerima kritik atas ketidakselarasan antara target dan tindakan. Di sini, *evidence* bukan sekadar data teknis, tetapi menjadi dasar untuk menilai apakah kewajiban moral telah benar-benar berubah menjadi komitmen operasional. Evaluasi terhadap putaran pertama stocktake

menunjukkan bahwa bahasa transisi energi memang mulai masuk ke jantung evaluasi, namun kekuatan paksanya masih lemah, dan minim keberpihakan terhadap keadilan energi yang menimbang siapa yang paling terdampak dan paling sedikit diuntungkan (Aidam, 2024). Artinya, walaupun "berkelanjutan" telah masuk ke dalam arsitektur regulasi global, cara penafsirannya masih memberi ruang luas bagi negara untuk mengklaim kepatuhan tanpa mengubah secara signifikan struktur produksi dan konsumsi yang tidak adil, terutama di sektor yang sangat bergantung pada energi fosil.

Di tingkat nasional, pergeseran dari moralitas ke regulasi tampak ketika konstitusi, undang-undang lingkungan, dan kerangka *governance* ekonomi mulai memuat kewajiban eksplisit untuk mengarahkan *kebijakan energi* ke jalur rendah karbon dan adaptif terhadap iklim. Istilah *governance* di sini menunjuk pada cara pengambilan keputusan diatur, dikoordinasi, dan dikontrol, bukan hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh lembaga independen, badan usaha milik negara, dan aktor swasta yang mengelola infrastruktur energi. Ketika kewajiban keberlanjutan dimasukkan ke dalam standar perizinan, skema tarif, atau kewajiban pelaporan emisi, kita menyaksikan bagaimana bahasa moral tentang "tanggung jawab terhadap generasi mendatang" diterjemahkan menjadi prosedur administratif yang sangat teknis: formulir, indikator, matriks risiko, dan laporan berkala. Proses teknokratisasi ini berpotensi menutup ruang partisipasi warga, kecuali jika desain kelembagaan dengan sengaja membuka kanal deliberasi, keberatan, dan pengawasan publik yang efektif, sehingga warga tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang dapat menilai apakah kewajiban negara dijalankan secara adil.

Pergeseran serupa juga terjadi di ranah pembiayaan publik dan privat yang semakin dipengaruhi oleh standar keberlanjutan. Instrumen seperti *green bonds*, taksonomi hijau,

atau persyaratan pengungkapan iklim di pasar modal menjadikan keberlanjutan sebagai prasyarat akses terhadap modal, bukan sekadar nilai tambah reputasional yang bisa dinegosiasikan. Bagi pembaca awam, *green bonds* dapat disederhanakan sebagai obligasi atau surat utang yang hanya dapat diterbitkan jika dananya digunakan untuk proyek yang dinilai ramah lingkungan menurut kriteria tertentu. Ketika bank sentral dan otoritas jasa keuangan mengadopsi kriteria keberlanjutan dalam regulasi kehati-hatian, mereka pada dasarnya memaksa lembaga keuangan menginternalisasi risiko iklim yang sebelumnya diabaikan, misalnya risiko aset terdampar pada investasi di sektor batu bara. Dengan cara ini, istilah "berkelanjutan" merembes ke dalam definisi risiko, keuntungan, dan kewajiban fidusia, sehingga pasar keuangan menjadi medan penting penegakan kewajiban keberlanjutan di luar ranah hukum lingkungan yang sempit dan membuka perdebatan baru tentang siapa yang berhak menentukan standar hijau.

Namun, tidak semua transformasi moralitas ke regulasi berjalan secara linear dan progresif; sering kali ia zig-zag, mundur, dan dipenuhi kompromi yang tidak nyaman. Di banyak negara, wacana keberlanjutan justru digunakan secara selektif untuk membenarkan ekspansi infrastruktur yang kontroversial, misalnya ketika proyek energi rendah karbon dibangun di wilayah yang secara sosial dan ekologis rentan tanpa konsultasi memadai. Dalam kasus seperti ini, kebijakan yang diklaim "berkelanjutan" dapat menyingkirkan warga dari lahan, merusak mata pencaharian tradisional, atau mengalihkan air bersih untuk kebutuhan industri, sementara manfaat listrik lebih banyak dinikmati kawasan industri dan kota besar. Di sini kita melihat paradoks: keberlanjutan sebagai kewajiban kebijakan bisa saja memperbaiki indikator emisi nasional dan memuaskan laporan internasional, tetapi pada saat yang sama

memperdalam ketidakadilan lokal dan memperlemah kepercayaan warga pada institusi negara. Karena itu, analisis filosofis perlu menelusuri bagaimana istilah "berkelanjutan" dipakai untuk mengatur tubuh, ruang, dan masa depan kelompok tertentu, bukan hanya menghitung penurunan emisi di atas kertas atau grafik teknokratik.

Akhirnya, genealogi "berkelanjutan" sebagai kewajiban kebijakan perlu dibaca bersamaan dengan perubahan cara kita membayangkan masa depan dan mendefinisikan apa itu kehidupan yang layak. Ketika perencanaan energi jangka panjang memasukkan skenario penurunan emisi hingga tahun 2050 atau 2070, generasi yang hidup hari ini sedang menetapkan batas pilihan bagi generasi mendatang, baik dalam bentuk infrastruktur yang terkunci maupun peluang teknologi baru di sektor *energi terbarukan* yang mungkin belum terbayangkan sepenuhnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita "seharusnya" bertanggung jawab, melainkan siapa yang berhak merumuskan bentuk tanggung jawab itu, melalui forum apa, dan dengan sejauh mana suara kelompok yang selama ini terpinggirkan diikutsertakan. Dengan demikian, mengkaji keberlanjutan sebagai kewajiban kebijakan berarti membongkar distribusi hak berbicara dan hak memutuskan tentang masa depan, serta menanyakan sejauh mana kerangka hukum yang ada benar-benar memberi ruang bagi imajinasi politik yang adil lintas generasi, bukan hanya mengulangi status quo dalam bentuk yang tampak lebih hijau.

2 Kuasa, Pengetahuan, Legitimasi: Kebijakan sebagai Teknologi Pemerintah *(Governmentality)*

2.1 Konsep Kekuasaan (Foucault, Hegemoni, Governmentality) dalam Kebijakan Energi

Konsep kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai siapa yang memegang jabatan formal atau mengendalikan sumber daya ekonomi terbesar. Membaca Foucault, kita diajak melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tersebar, hadir dalam jaringan aturan, pengetahuan, dan praktik teknis yang mengatur bagaimana energi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Dalam kerangka ini, kebijakan tidak sekadar keputusan tertulis, tetapi menjadi teknik halus untuk membentuk perilaku, membatasi kemungkinan, dan mendefinisikan apa yang dianggap rasional. Ketika pemerintah menyusun peta jalan transisi energi, menetapkan insentif, atau merancang skema tarif, semua itu adalah momen di mana kekuasaan bekerja melalui bahasa policy design yang sering tampak netral. Bab ini mengkaji bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan legitimasi saling terkait dalam kebijakan energi, serta bagaimana konsep seperti hegemoni dan governmentality membantu kita membongkar lapisan-lapisan kekuasaan tersebut, sekaligus membuka ruang untuk membayangkan tatanan energi yang lebih adil dan demokratis.

Bagi Foucault, kekuasaan bukan benda yang dimiliki, melainkan relasi yang bekerja melalui produksi pengetahuan, klasifikasi, dan normalisasi. Jika kita terapkan pada kebijakan energi, maka statistik konsumsi, indikator efisiensi, hingga pemodelan skenario emisi menjadi instrumen yang membuat

cara tertentu memandang energi tampak alamiah dan tak terbantahkan. Kajian mengenai desentralisasi kelistrikan menunjukkan bagaimana pergeseran teknologi dan aktor dapat sekaligus menggeser struktur kekuasaan politik, meskipun kemenangan kebijakan tidak selalu mudah diraih (Brisbois, 2020). Dalam perspektif ini, kekuasaan kebijakan muncul dari kemampuan untuk mendefinisikan masalah, membatasi opsi yang dianggap masuk akal, dan menempatkan kelompok tertentu sebagai "ahli" yang suaranya lebih sah dibandingkan warga biasa. Kekuasaan juga hadir ketika negara menentukan apa yang layak didanai, teknologi mana yang diprioritaskan, dan wilayah mana yang diserap atau justru ditinggalkan dari peta infrastruktur energi untuk beberapa dekade ke depan, sering kali tanpa debat publik yang setara.

Konsep hegemoni membantu menjelaskan mengapa paradigma tertentu tentang pembangunan energi dapat diterima luas, bahkan oleh kelompok yang dirugikan. Hegemoni bukan hanya dominasi paksa, melainkan persetujuan aktif yang dibangun melalui bahasa, pendidikan, dan simbol-simbol keseharian. Dalam wacana pembangunan, misalnya, sering muncul narasi bahwa *modernization* berarti jaringan listrik yang makin besar, konsumsi energi yang terus meningkat, dan ketergantungan pada teknologi tinggi yang dikuasai segelintir korporasi global. Di sisi lain, ketika pemerintah dan perusahaan mempromosikan program energi berbasis komunitas atau skema *prosumers*, kita perlu bertanya: apakah ini membuka ruang kuasa baru bagi warga, atau sekadar memperkuat tatanan lama dalam wajah yang lebih ramah? Pertanyaan serupa penting diajukan terhadap proyek energi terbarukan yang diklaim hijau, tetapi dalam praktik justru mengkonsolidasikan tanah, ruang, dan keputusan di tangan aktor yang sama, sambil mengabaikan suara kelompok rentan yang keberatan, baik di desa maupun kota. Kalimat tambahan ini menegaskan bahwa hegemoni

bekerja halus, melalui kebiasaan dan cara kita membayangkan masa depan energi.

Melalui kacamata *governmentality*, kebijakan energi dapat dipahami sebagai cara negara dan beragam institusi mengatur populasi melalui teknik-teknik pemerintahan yang tampak teknis dan netral. *Governmentality* merujuk pada seni memerintah yang bekerja bukan hanya lewat hukum dan paksaan, tetapi melalui produksi pengetahuan, standar, dan prosedur yang mendorong individu agar mengatur diri sendiri. Dalam kebijakan energi, hal ini tampak dalam program penghematan berbasis *smart meter*, pelabelan efisiensi, hingga kampanye gaya hidup hemat energi yang seakan sekadar ajakan moral. Di balik itu, terdapat logika pengelolaan risiko dan biaya yang menggeser tanggung jawab dari negara dan korporasi kepada rumah tangga. Dengan kata lain, warga didorong menjadi subjek yang patuh, rasional, dan dapat diprediksi, sementara keputusan strategis tentang arah sistem energi tetap dipusatkan pada ruang-ruang teknokratis yang sulit diakses publik dan sering kali tertutup dari perdebatan demokratis yang bermakna, terutama bagi kelompok marjinal. Dengan demikian, pengelolaan energi berkelanjutan selalu berkelindan dengan cara negara memproduksi warga yang dianggap ideal.

Dimensi kekuasaan dalam kebijakan energi juga tampak jelas ketika kita melihat ketimpangan antara wilayah pusat dan pinggiran. Studi tentang transisi rendah karbon menunjukkan bahwa komunitas pedesaan sering kali menanggung dampak pembangunan infrastruktur energi tanpa memiliki daya tawar yang sepadan (O'Sullivan, Golubchikov, & Mehmood, 2020). Di banyak negara, lahan di kawasan terpencil dipandang sebagai "ruang kosong" yang siap diisi ladang angin, panel surya skala besar, atau jaringan transmisi baru, sementara manfaat ekonominya terkonsentrasi di kota atau pusat industri. Ketika klaim partisipasi publik hanya diwujudkan dalam konsultasi

formal yang serba teknis, komunitas lokal sulit mengartikulasikan kekhawatiran mereka dalam bahasa yang diakui sah. Di sini, kekuasaan bekerja dengan menyempitkan kategori apa yang dianggap sebagai "masukan" yang valid dan apa yang dicap emosional, irasional, atau menghambat pembangunan di mata perencana pusat dan investor besar, bahkan ketika kekhawatiran itu sangat beralasan. Ketidaksetaraan semacam ini menunjukkan bahwa diskursus transisi sering menutupi ketimpangan kekuasaan yang sangat konkret.

Hegemoni energi terwujud bukan hanya dalam wacana, tetapi juga dalam arsitektur kelembagaan yang mengatur *kebijakan energi*. Lembaga regulator, badan perencanaan, dan kementerian sering disusun sedemikian rupa sehingga memprioritaskan stabilitas pasokan dan kepentingan investor, sementara isu keadilan sosial dan ekologis ditempatkan sebagai pertimbangan tambahan. Istilah teknis seperti *least-cost planning* kerap diterjemahkan sederhana sebagai "pilihan termurah", padahal mengabaikan biaya sosial dan ekologis jangka panjang yang tidak mudah diukur. Dengan cara ini, horizon imajinasi kebijakan dipersempit: pilihan dianggap hanya antara sumber energi A atau B, bukan antara model kepemilikan, pola partisipasi, atau distribusi manfaat yang berbeda secara radikal. Kerangka ini membuat upaya menggeser keseimbangan kuasa—misalnya dengan memperkuat koperasi energi atau inisiatif komunitas—tampak sebagai gangguan, bukan sebagai bagian sah dari perumusan ulang tatanan energi bersama yang lebih demokratis dan tangguh. Pada titik ini, bahasa teknis menjadi alat yang menyamarkan pilihan politik sebagai kalkulasi objektif semata.

Jika kita kembali pada Foucault, kekuasaan bekerja sampai ke tingkat tubuh dan kebiasaan sehari-hari. Dalam kehidupan energi, hal ini tampak pada cara tarif blok bertingkat, ancaman

pemutusan sambungan, atau kampanye "konsumen bijak" membentuk rasa takut dan rasa bersalah warga ketika menyalakan perangkat listrik di rumah. Teknologi *smart grid* dan *demand response*, yang sering dijelaskan sebagai cara cerdas menyeimbangkan beban sistem, pada dasarnya adalah mekanisme untuk membuat rumah tangga dapat dipantau dan diatur dari jarak jauh, meskipun dibungkus retorika pilihan sukarela. Bukan berarti teknologi ini pasti buruk, tetapi kita perlu menyadari bahwa setiap desain teknis mengandung asumsi tentang siapa yang harus menyesuaikan diri, pada jam berapa, dan dengan konsekuensi apa. Dengan membaca detail teknis tersebut sebagai konfigurasi kuasa, kita dapat menilai apakah inovasi benar-benar memperluas otonomi warga atau justru menambah lapisan kontrol yang sulit dipertanyakan di ruang publik. Di sinilah politik energi masuk ke ruang domestik dan membentuk rutinitas sehari-hari secara mendalam.

Relasi kuasa dalam kebijakan energi juga tampak dalam konfigurasi aktor negara, korporasi, dan pasar keuangan yang membiayai proyek-proyek energi besar. Analisis tentang transisi energi di Brasil, misalnya, menunjukkan bagaimana desain kebijakan yang mendorong sumber-sumber terbarukan dapat sekaligus membuka ruang bagi aktor swasta nasional maupun internasional untuk menguatkan posisi tawar mereka terhadap negara (Werner & Lazaro, 2023). Di satu sisi, insentif untuk investasi energi rendah karbon dibutuhkan untuk mempercepat dekarbonisasi. Di sisi lain, jika arsitektur kelembagaan dan tata kelola ruang tidak diatur dengan hati-hati, maka ekspansi infrastruktur dapat memperdalam ketimpangan, meminggirkan komunitas adat, dan mengabaikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Di sini, konsep hegemoni membantu menjelaskan bagaimana kepentingan bisnis bisa tampil seolah-olah identik dengan kepentingan nasional dan kepentingan iklim global yang tak boleh diganggu gugat oleh

suara minoritas, termasuk kelompok yang terdampak langsung. Contoh ini menyoroti bahwa desain insentif dan kontrak bukan soal teknis semata, melainkan juga penataan kuasa.

Dengan menggabungkan konsep kekuasaan Foucault, hegemoni, dan *governmentality*, kita dapat melihat kebijakan energi sebagai arena kontestasi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pilihan teknis antar sumber daya. Kebijakan adalah medan di mana berbagai aktor berupaya mendefinisikan apa arti "krisis", "ketahanan", atau "transisi" energi, siapa yang berhak berbicara, dan siapa yang menanggung risiko. Dalam konteks energi terbarukan, pertanyaan kunci bukan hanya seberapa cepat kapasitas terpasang meningkat, tetapi juga siapa yang mengendalikan infrastruktur, bagaimana manfaatnya dibagi, dan sejauh mana warga dapat mempengaruhi arah kebijakan. Pendekatan seperti ini menggeser fokus dari sekadar mencapai target numerik ke upaya membaca ulang relasi kuasa yang bersemayam di balik statistik, peta jalan, dan skema pasar. Dengan begitu, transisi energi dapat dinilai bukan hanya dari efisiensi teknisnya, tetapi dari sejauh mana ia memulihkan keadilan sosial, ekologis, dan politik lintas generasi, di tingkat lokal maupun global. Perspektif ini memberi landasan konseptual bagi bab-bab berikutnya untuk membaca instrumen dan institusi secara lebih kritis.

2.2 Pengetahuan, Ahli, dan Produksi "Kebenaran" Energi Berkelanjutan

Pengetahuan tentang energi berkelanjutan tidak pernah lahir di ruang hampa; ia selalu ditenun dalam jaringan kekuasaan, institusi, dan kepakaran yang menentukan apa yang dianggap rasional, layak didanai, dan bermoral. Ketika pemerintah membentuk komite ahli, memesan studi kelayakan, atau menerbitkan peta jalan transisi, sebenarnya mereka sedang mengatur cara kita membayangkan masa depan energi dalam

jangka panjang. Di sinilah konsep *governmentality* (cara negara mengarahkan perilaku warga melalui berbagai teknik pengetahuan dan tata kelola) bekerja: laporan ilmiah, model komputasi, hingga indikator emisi menjadi instrumen halus untuk mengarahkan keputusan kolektif. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: siapa yang berhak mendefinisikan "kebenaran" tentang risiko teknologi, harga energi yang "wajar", dan kecepatan transisi, serta sejauh mana warga biasa bisa menegosiasikan definisi tersebut ketika berhadapan dengan bahasa teknis para pakar yang tampak tak terbantahkan, baik di ruang sidang parlemen maupun dalam konsultasi publik yang kaku. Dalam konteks ini, politik pengetahuan menjadi sama pentingnya dengan politik anggaran.

Jika pada tataran permukaan debat energi berkelanjutan tampak berkisar pada teknologi dan biaya, di baliknya berlangsung pergeseran arena kekuasaan yang sangat bergantung pada siapa yang menguasai data, model, dan bahasa teknis. Studi tentang desentralisasi kelistrikan menunjukkan bagaimana komunitas lokal dan koperasi warga berusaha menggeser pusat gravitasi keputusan dari perusahaan besar dan kementerian ke ruang-ruang baru yang lebih dekat dengan warga (Brisbois, 2020). Di sini, para ahli tidak sekadar menyajikan informasi, tetapi merancang kategori, skenario, dan indikator yang menentukan apakah suatu inisiatif dinilai "layak", "berisiko tinggi", atau "tidak ekonomis". Ketika lembaga donor, regulator, dan investor mengutip kategori teknis ini tanpa membuka proses pembentukannya, produksi "kebenaran" tentang masa depan energi berkelanjutan menjadi tertutup dan hierarkis, meskipun di permukaan tampak sebagai proses konsultasi ilmiah yang netral dan berbasis fakta. Hal ini membuat garis antara analisis ilmiah dan keputusan normatif menjadi kabur, karena pilihan moral terselip rapi dalam asumsi teknis yang jarang diperdebatkan secara terbuka.

Kategori "energi berkelanjutan" dan "energi terbarukan" pada gilirannya bukan sekadar istilah deskriptif, tetapi hasil kerja panjang komunitas ahli yang menyaring beragam teknologi ke dalam paket-paket yang tampak rapi. Melalui laporan teknis, *guidelines* (panduan baku), dan standar internasional, para pakar memisahkan mana sumber energi yang pantas menerima subsidi, jaminan harga, atau prioritas akses jaringan, dan mana yang tidak, sembari membungkus keputusan ini dalam bahasa efisiensi dan mitigasi iklim. Bagi warga biasa, istilah seperti *levelized cost of energy* sering terasa abstrak, padahal sebenarnya ini hanya cara untuk menghitung rata-rata biaya suatu teknologi sepanjang umur pakainya. Ketika angka-angka tersebut dipresentasikan sebagai fakta final, ruang untuk mempertanyakan subyektivitas asumsi di balik model—misalnya tentang risiko sosial, konflik lahan, atau nilai ekologis—menjadi sangat sempit dan mudah dianggap sebagai "gangguan emosional" terhadap rasionalitas teknis. Di sinilah kuasa pakar bekerja secara halus, karena batas antara penjelasan yang memudahkan dan penyederhanaan yang menyingkirkan konflik nilai nyaris tidak pernah tampak jelas.

Para ahli yang dominan dalam percakapan global mengenai energi berkelanjutan biasanya berasal dari disiplin teknik, ekonomi, dan ilmu iklim, dengan perangkat analisis yang sangat bergantung pada pemodelan kuantitatif dan pengukuran emisi. Mereka menduduki posisi sebagai "penjaga gerbang" yang menentukan desain skenario, asumsi pertumbuhan permintaan, hingga batas aman pemanasan global, lalu menyajikan hasilnya dalam bentuk grafik dan tabel yang tampak obyektif. Di banyak negara, dokumen itu diterjemahkan langsung menjadi cetak biru investasi infrastruktur tanpa melibatkan pengetahuan lokal tentang tata guna lahan, konflik agraria, atau hak masyarakat adat. Konsep *evidence-based policy* sering dipahami hanya sebagai kebijakan yang mengikuti angka dari model, bukan

sebagai proses reflektif yang juga menimbang bukti kualitatif, pengalaman komunitas, dan ketidakpastian jangka panjang. Akibatnya, lanskap pakar menjadi sempit dan cenderung memperkuat cara pandang yang menguntungkan aktor berdaya tawar kuat. Dalam keadaan seperti ini, suara disiplin lain seperti sosiologi, antropologi, atau studi lingkungan kritis mudah dipinggirkan sebagai "pendekatan lunak" yang dianggap kurang berguna bagi perhitungan investasi.

Dampak dari konfigurasi pengetahuan yang timpang ini terlihat jelas ketika transisi energi menyentuh komunitas yang secara ekonomi dan politik sudah berada di pinggiran. Penelitian mengenai transisi energi rendah karbon di kawasan pedesaan menunjukkan bahwa komunitas yang tidak memiliki akses politik dan kapasitas teknis cenderung mengalami apa yang disebut sebagai "periferisasi energi", yakni situasi ketika mereka hanya menjadi lokasi infrastruktur tanpa menikmati manfaat proporsional (O'Sullivan, Golubchikov, & Mehmood, 2020). Di atas kertas, proyek-proyek pembangkit baru digambarkan sebagai peluang pembangunan lokal, tetapi narasi ini dibentuk oleh studi dampak yang lebih menonjolkan manfaat finansial dan pengurangan emisi dibanding kerentanan sosial. Ketika warga mengeluhkan kebisingan turbin atau hilangnya tanah penggembalaan, suara mereka sering disamakan dengan resistensi irasional terhadap perubahan, karena tidak mudah diterjemahkan ke dalam kategori kuantitatif yang diakui oleh rezim pengetahuan dominan. Di titik ini, produksi "kebenaran" ilmiah tentang keberhasilan transisi dapat berjalan berlawanan dengan pengalaman keseharian, sekaligus mengikis kepercayaan warga terhadap institusi publik yang mengklaim membawa solusi hijau.

Ketika pengetahuan teknis telah dibakukan dalam bentuk standar, indeks, dan panduan internasional, ia kemudian bergerak ke ruang *policy design* dan mengeras menjadi norma

hukum yang mengikat. Di sinilah "kebenaran" ilmiah bertransformasi menjadi kewajiban formal dalam berbagai kebijakan energi, mulai dari target bauran energi hingga kewajiban pembelian listrik dari produsen tertentu. Proses ini sering digambarkan sebagai penerjemahan sains ke regulasi, padahal sesungguhnya ada banyak pilihan normatif di setiap langkah, misalnya ketika pemerintah memilih indikator mana yang diprioritaskan atau asumsi apa yang dipakai untuk menilai risiko fiskal. Dengan kata lain, regulasi tidak sekadar mengikuti sains, tetapi menyaring dan mengatur sains yang mana yang diakui sebagai dasar keputusan. Warga kemudian berhadapan dengan aturan yang tampak netral, sementara jejak perdebatan nilai yang melatarbelakanginya sudah hilang dari dokumen resmi. Akibatnya, gugatan terhadap kebijakan kerap dibalas dengan kalimat "ini sudah sesuai kajian ilmiah", seakan-akan ilmu pengetahuan hanya memiliki satu jawaban tunggal dan bebas dari kepentingan politik maupun ekonomi.

Namun produksi "kebenaran" tentang energi berkelanjutan tidak pernah sepenuhnya dimonopoli oleh pakar resmi; selalu ada pengetahuan tandingan yang lahir dari komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan peneliti kritis. Di banyak tempat, kelompok warga mengembangkan pemetaan partisipatif terhadap dampak proyek pembangkit, mengumpulkan cerita tentang kehilangan mata pencaharian, dan mendokumentasikan perubahan ekologi yang tidak tercakup dalam studi dampak formal. Praktik semacam ini memperluas apa yang dianggap sebagai bukti, karena pengalaman hidup dan kesaksian langsung ditempatkan sejajar dengan angka dan grafik. Melalui lokakarya, *citizens' jury* (juri warga yang menilai suatu kebijakan), atau forum konsultasi yang benar-benar deliberatif, warga dapat mengajukan pertanyaan yang jarang muncul dalam laporan teknis, seperti siapa yang akan menanggung beban perawatan jangka panjang

atau bagaimana perubahan lanskap memengaruhi identitas budaya. Di sini, pengetahuan menjadi arena negosiasi etik, bukan semata produk pakar. Dengan membuka ruang bagi ragam sumber pengetahuan, kemungkinan untuk merumuskan konfigurasi kebijakan yang lebih adil dan peka konteks menjadi jauh lebih besar, meskipun prosesnya sering kali lebih lambat dan penuh perdebatan.

Contoh dari bagaimana pengetahuan, kepakaran, dan kepentingan politik saling berkelindan tampak jelas dalam studi tentang kebijakan transisi energi di Brasil yang menekankan pentingnya desain regulasi dan konfigurasi tata kelola sektor listrik untuk mendorong sumber-sumber rendah karbon (Werner & Lazaro, 2023). Di satu sisi, makalah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sangat bergantung pada kemampuan negara menyusun kerangka kebijakan yang memberi sinyal jelas bagi investor dan mengelola peran aktor swasta yang kian dominan. Di sisi lain, penekanan pada data resmi dan rencana ekspansi nasional berisiko menyingkirkan pertanyaan tentang siapa yang paling terdampak oleh pembangunan pembangkit baru, terutama di wilayah dengan kerentanan sosial dan ekologis tinggi. Ketika analisis tetap berada pada level sistem kelistrikan nasional, suara komunitas lokal mudah direduksi menjadi sekadar "tantangan implementasi", bukan sebagai sumber pengetahuan normatif yang sah. Dengan demikian, konfigurasi pakar dan data yang dipilih menentukan batas imajinasi mengenai apa yang dianggap mungkin, wajar, dan sah dalam peta jalan transisi yang diklaim ilmiah dan berorientasi masa depan.

Membaca ulang peran pengetahuan dan kepakaran dalam energi berkelanjutan berarti menyadari bahwa setiap angka, kategori, dan proyeksi selalu memuat pilihan nilai yang tidak pernah netral. Ketika lembaga internasional mempromosikan skenario bauran *energi terbarukan* tertentu sebagai jalur "paling

rasional", mereka sekaligus menyebarkan cara pandang tertentu tentang pembangunan, risiko, dan keadilan yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan komunitas lokal. Tugas refleksi filosofis di sini adalah membuka kembali ruang tanya: bagaimana jika indikator keberhasilan tidak hanya dihitung dari emisi dan biaya rata-rata, tetapi juga dari distribusi manfaat, penguatan kapasitas warga, serta perlindungan terhadap kelompok rentan? Dengan menggeser fokus dari "kebenaran teknis" ke "kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara etis", kebijakan dapat dibayangkan sebagai proses belajar kolektif yang terus-menerus, bukan sekadar pelaksanaan resep ilmiah yang telah dianggap final. Pendekatan semacam ini menantang posisi tunggal para ahli dan mengundang praktik pengetahuan yang lebih dialogis, di mana keyakinan ilmiah diuji bukan hanya oleh rekan sejawat, tetapi juga oleh mereka yang menanggung konsekuensi langsung dari setiap keputusan infrastruktur.

2.3 Legitimasi Kebijakan: Prosedural, Substantif, dan Simbolik

Legitimasi kebijakan pada dasarnya menjawab pertanyaan sederhana tetapi sulit: mengapa warga dan aktor lain mau menerima suatu kebijakan sebagai "sah" dan pantas dipatuhi, bahkan ketika mereka dirugikan? Dalam kajian filsafat politik, jawaban atas pertanyaan ini tidak tunggal. Ada legitimasi yang tumbuh dari prosedur, dari isi kebijakan, dan dari simbol-simbol yang membungkusnya. Dalam bahasa yang lebih teknis, kita sering menyebutnya *procedural legitimacy*, *substantive legitimacy*, dan *symbolic legitimacy*. *Procedural legitimacy* dapat dipahami sebagai rasa bahwa proses penyusunan kebijakan dianggap adil, transparan, dan inklusif. *Substantive legitimacy* merujuk pada penilaian bahwa isi kebijakan benar-benar menyelesaikan masalah dan membawa keadilan. Sementara itu,

symbolic legitimacy bertumpu pada tanda, narasi, dan gestur yang membuat kebijakan tampak sejalan dengan nilai-nilai luhur masyarakat. Ketiga dimensi ini saling menopang, saling menutupi, atau sebaliknya saling meruntuhkan dalam praktik kebijakan iklim dan energi di berbagai negara.

Dalam praktik global, proses perundingan iklim di bawah kerangka COP memberi contoh jelas bagaimana legitimasi prosedural diuji dan dinegosiasikan. Secara formal, semua negara duduk sebagai pihak yang setara, keputusan diambil dengan konsensus, dan ada prosedur yang mengatur bagaimana rancangan teks disusun. Namun, di balik prosedur resmi itu terdapat dinamika ruangan kecil, kelompok kerja terbatas, dan keputusan ketua yang sangat menentukan ritme perundingan. Analisis terhadap konferensi Baku 2024 menunjukkan bahwa banyak negara merasa proses penyusunan paket keputusan tidak cukup transparan dan terlalu dikendalikan oleh segelintir aktor kunci, sehingga muncul seruan untuk mereformasi prosedur dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban dalam COP (Obergassel et al., 2024). Di sini kita melihat bahwa jika prosedur dirasakan sebagai "milik" elit diplomatik saja, legitimasi hasil perundingan ikut tergerus, meskipun di atas kertas semua aturan formal telah diikuti dengan rapi.

Pada tingkat nasional, legitimasi prosedural dalam *kebijakan energi* sering kali dikaitkan dengan sejauh mana warga merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyentuh hidup mereka. Proses konsultasi publik, dengar pendapat, atau *public hearing* secara formal dimaksudkan untuk menjaring aspirasi. Namun, jika forum-forum ini hanya menjadi ruang presentasi sepihak yang sarat istilah teknis dan tidak memberi waktu memadai untuk diskusi, publik cenderung melihatnya sebagai ritual administratif, bukan sebagai kesempatan nyata untuk memengaruhi kebijakan. Ketika warga diundang hanya setelah keputusan besar ditetapkan—misalnya

lokasi infrastruktur atau jenis teknologi—legitimasi prosedural menjadi tipis. Bahkan proyek yang secara teknis masuk akal dapat memicu protes berkepanjangan jika warga merasa langkah-langkah formal hanya dipakai untuk mengesahkan keputusan yang sebetulnya sudah dikunci sejak awal. Di sini tampak bahwa prosedur tanpa rasa keadilan dan ruang tawar yang nyata hanya menghasilkan kepatuhan minimal dan kecurigaan mendalam terhadap motif negara maupun pelaku usaha.

Legitimasi substantif merujuk pada pertanyaan apakah kebijakan benar-benar menyelesaikan masalah yang diklaim, dan apakah hasilnya adil di mata mereka yang terdampak. Dalam konteks krisis iklim, sebuah kebijakan dinilai substantif ketika ia mampu menurunkan emisi, melindungi kelompok rentan, dan menjaga keberlanjutan fiskal tanpa menciptakan ketidakadilan baru yang berat. Namun, ukuran keberhasilan substantif sering kali disederhanakan menjadi indikator tunggal, seperti ton emisi yang dihindari atau besaran investasi yang masuk. Penyederhanaan ini berisiko mengabaikan kerugian sosial dan ekologis yang sulit dikuantifikasi, misalnya hilangnya praktik budaya, terputusnya jaringan solidaritas lokal, atau bertambahnya beban kerja tak berupah di tingkat rumah tangga. Ketika pemerintah mengejar target teknis sambil menafikan dimensi-dimensi lain, warga bisa saja melihat kebijakan sebagai "sukses di atas kertas" tetapi gagal memenuhi rasa keadilan, sehingga legitimasi substantif melemah walaupun laporan resmi menunjukkan capaian yang mengesankan.

Dalam literatur keadilan iklim, legitimasi substantif berkaitan erat dengan cara kebijakan menanggapi ketimpangan historis dan struktural. *Just transition*—atau transisi berkeadilan—misalnya, menekankan bahwa perpindahan dari ekonomi fosil ke rendah karbon harus diiringi perlindungan bagi pekerja dan komunitas yang paling rentan, bukan sekadar

mengganti satu sumber energi dengan yang lain. Kajian terbaru tentang kerangka COP dari perspektif keadilan menunjukkan bahwa banyak komitmen ambisius gagal diterjemahkan menjadi dukungan finansial dan teknis yang memadai bagi negara berkembang, sehingga kesenjangan antara janji dan realisasi menimbulkan keraguan serius terhadap substansi komitmen itu sendiri (Mahendru, Parihar, Jain, & Sharma, 2025). Dalam konteks ini, legitimasi tidak hanya diukur dari besarnya target, tetapi dari kemampuan kebijakan menjamin bahwa beban penyesuaian tidak kembali ditanggung oleh mereka yang kontribusi historisnya terhadap krisis justru paling kecil.

Legitimasi simbolik bergerak di ranah tanda, gestur, dan narasi yang menyelimuti kebijakan energi. Ketika pemimpin negara menanam pohon secara seremonial, menghadiri konferensi iklim, atau mengumumkan visi jangka panjang, mereka sedang memproduksi simbol bahwa negara berada di jalur yang benar. Simbol ini penting untuk membangun kepercayaan awal dan menyalakan imajinasi kolektif tentang masa depan. Namun, legitimasi simbolik segera runtuh jika simbol tidak didukung tindakan konsisten—misalnya jika pemerintah yang sama tetap memberikan insentif besar bagi industri fosil atau mengkriminalkan protes lingkungan. Dalam situasi seperti itu, warga membaca gestur hijau sebagai *greenwashing*, yakni upaya memoles citra tanpa mengubah praktik mendasar. Legitimasi simbolik yang kosong tidak hanya gagal menenangkan kritik, tetapi bisa berbalik menjadi pemicu sinisme dan delegitimasi menyeluruh terhadap institusi yang dianggap memanipulasi simbol demi menutupi kelambanan atau ketidakadilan.

Relasi antara legitimasi prosedural, substantif, dan simbolik tidak dapat dipisahkan; ketiganya berinteraksi dan saling meneguhkan atau meruntuhkan. Kebijakan yang disusun melalui prosedur inklusif, tetapi menghasilkan keputusan yang memperparah ketimpangan, mungkin tetap dianggap tidak sah

oleh komunitas terdampak. Sebaliknya, kebijakan yang secara substansi adil namun disusun secara tertutup dan komunikasinya buruk bisa memicu resistensi karena publik tidak merasa diajak ikut dalam proses. Di sisi lain, simbol-simbol kuat—seperti deklarasi darurat iklim atau pengesahan undang-undang iklim—dapat memperkuat kedua jenis legitimasi lain jika benar-benar diikuti perubahan anggaran, reformasi kelembagaan, dan pengaturan ulang insentif. Dengan kata lain, legitimasi kebijakan bukanlah status sekali jadi, tetapi hasil dari proses yang berkelanjutan, di mana prosedur yang adil, isi yang bermakna, dan simbol yang jujur harus terus-menerus dikalibrasi terhadap pengalaman konkret warga dan komunitas.

Di tingkat global, perdebatan tentang legitimasi prosedural dan substantif konferensi iklim tidak lepas dari kritik terhadap arsitektur regulasi yang dianggap lamban dan terlalu kompromistis. Beberapa penulis menilai bahwa pendekatan *pledge and review*—negara berjanji secara sukarela lalu dievaluasi—telah menghasilkan rezim yang penuh celah, sehingga memerlukan koreksi kursus yang serius untuk menjawab kesenjangan antara tujuan dan tindakan nyata (Desai & Desai, 2024). Di satu sisi, COP dianggap memiliki legitimasi simbolik yang kuat sebagai ruang pertemuan dunia; di sisi lain, keterlambatan implementasi, minimnya sanksi, dan dominasi aktor kuat menggerus legitimasi substantifnya. Ketegangan ini merembes ke tingkat nasional ketika pemerintah menggunakan "keberhasilan diplomatik" sebagai modal politik di dalam negeri, sementara warga dan kelompok masyarakat sipil mempertanyakan sejauh mana hasil perundingan benar-benar mengubah pola produksi dan konsumsi energi. Dengan demikian, arsitektur global menjadi cermin ketegangan legitimasi yang juga hadir di level negara dan lokal.

Jika kembali ke pertanyaan awal bab ini—bagaimana kebijakan yang mengarah ke masa depan rendah karbon

dianggap sah oleh mereka yang akan menanggung konsekuensinya—maka ketiga bentuk legitimasi ini perlu dibawa secara sadar ke pusat analisis. Prosedur yang inklusif membantu memastikan bahwa suara komunitas terdampak, pekerja sektor fosil, dan generasi muda tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan ikut membentuk arah kebijakan. Isi kebijakan harus menunjukkan keberanian menghadapi konflik nilai dan ketimpangan struktural, bukan hanya mengoptimalkan angka di model ekonomi. Simbol akhirnya tetap penting untuk menyatukan imajinasi kolektif, tetapi harus bersandar pada kejujuran, bukan ilusi. Dalam kerangka inilah, bab-bab berikut akan menelusuri bagaimana legitimasi kebijakan dalam konteks energi terbarukan dan tata kelola iklim global terus dinegosiasikan, dipertarungkan, dan berpotensi ditransformasikan menuju tatanan yang lebih adil secara sosial, ekologis, dan antargenerasi.

2.4 Kebijakan Energi sebagai Teknologi Pemerintah: Mengatur Populasi dan Pasar

Kebijakan energi dalam masyarakat modern tidak pernah hanya soal menghitung kapasitas pembangkit atau menimbang biaya dan manfaat ekonomi. Ia adalah bagian dari cara negara dan aktor-aktor kuat "mengatur" kehidupan warganya, baik sebagai konsumen maupun sebagai populasi yang harus dilindungi dari krisis energi dan iklim. Dalam perspektif *governmentality*, yang dimaksud adalah cara-cara halus negara dan pasar mengarahkan perilaku melalui aturan, insentif, tarif, data, dan wacana, bukan hanya melalui paksaan langsung. Melalui standar emisi, target bauran energi, atau skema subsidi, negara mengajak warga merasa seolah-olah ikut mengambil keputusan, padahal kerangka pilihan sudah sangat ditentukan sebelumnya. Di titik ini, kebijakan energi menjadi teknologi pemerintah yang bekerja di ruang sosial yang sangat konkret:

tagihan listrik di rumah, kualitas udara di kota, dan rasa aman ketika lampu tetap menyala saat bencana melanda.

Ketika pemerintah menyusun peta jalan transisi energi, ia sebenarnya sedang merancang sebuah tata kelola yang mengikat berbagai aktor—perusahaan, pemerintah daerah, komunitas lokal, bahkan rumah tangga—ke dalam logika tertentu tentang apa itu "pembangunan", "kemajuan", dan "risiko". Studi tentang dimensi kebijakan transisi energi di Brasil menunjukkan bahwa desain regulasi dapat memperkuat peran aktor-aktor tertentu, misalnya perusahaan swasta besar, sambil menyisakan sedikit ruang bagi komunitas lokal untuk menentukan bentuk transisi yang mereka anggap adil (Werner & Lazaro, 2023). Dalam logika ini, kebijakan energi bukan sekadar respon teknis terhadap kebutuhan listrik, melainkan sarana untuk menata ulang konfigurasi kekuasaan, siapa yang berhak menentukan arah investasi, serta siapa yang menanggung dampak lingkungan dan sosial dari keputusan tersebut.

Wacana *energy transition* sering dibungkus dengan bahasa teknis yang tampak netral, padahal di dalamnya terdapat pilihan-pilihan politik yang sangat tajam. Istilah *energy transition* sendiri merujuk pada pergeseran sistem energi dari berbasis fosil menuju sistem yang lebih rendah karbon, tetapi arah pergeseran itu tidak pernah tunggal. Dalam banyak kasus, pemerintah mengemas program perluasan energi terbarukan sebagai paket yang secara otomatis dianggap "baik" dan "rasional", tanpa banyak ruang bagi warga untuk mempertanyakan lokasi proyek, skema kepemilikan, atau dampak sosial-ekologis yang muncul. Di sini, teknologi kebijakan bekerja melalui indikator, peta potensi sumber daya, dan model ekonomi yang memposisikan sebagian wilayah sebagai "lahan ideal" untuk investasi, sementara warga di wilayah itu diharapkan menyesuaikan diri dengan narasi kepentingan nasional.

Desentralisasi sistem listrik, misalnya melalui pembangkit skala kecil atau komunitas energi, sering dipromosikan sebagai cara mendemokratisasi sistem energi. Namun, riset tentang desentralisasi listrik menunjukkan bahwa pergeseran skala sering kali justru memunculkan arena baru perebutan pengaruh di antara aktor negara, perusahaan, dan komunitas (Brisbois, 2020). Di balik retorika pemberdayaan, regulasi teknis dan finansial bisa tetap memusatkan kendali pada utilitas besar atau lembaga negara tertentu, sehingga komunitas hanya menjadi pelaksana kebijakan, bukan perancang aturan. Dengan kata lain, teknologi pemerintah dalam kebijakan energi bekerja melalui desain kelembagaan yang tampak netral, tetapi sesungguhnya mengatur siapa yang boleh berbicara, siapa yang didengar, dan sejauh mana keputusan dapat diganggu gugat oleh warga biasa.

Bila kita melihat lebih dekat, banyak instrumen kebijakan yang tampak sederhana—seperti tarif listrik, syarat perizinan, atau skema insentif pajak—sebenarnya adalah bentuk-bentuk mikroskopis dari kuasa yang mengatur keseharian populasi. Tarif yang berbeda antara pelanggan rumah tangga, industri, dan pelanggan sosial, misalnya, bukan hanya cerminan struktur biaya, tetapi juga keputusan tentang kelompok mana yang harus "dijaga" atau justru dapat "dibebani" lebih besar. Dalam perspektif filsafat kekuasaan, negara dan pasar melalui instrumen tersebut mendisiplinkan perilaku: mendorong rumah tangga untuk berhemat, mengundang industri tertentu untuk berinvestasi, atau mengarahkan anggaran rumah tangga miskin ke pilihan energi yang dianggap paling "efisien" menurut logika teknokratik. Di sini, kebijakan energi menyeberang dari ruang abstrak regulasi ke dapur, ruang tamu, dan aktivitas harian warga.

Salah satu contoh penting adalah penggunaan instrumen seperti *feed-in tariff*, yakni skema di mana produsen listrik kecil—misalnya rumah tangga atau koperasi—dijamin dapat menjual listrik ke jaringan dengan harga tertentu. Bagi pembaca

awam, *feed-in tariff* dapat dipahami sebagai "harga khusus yang dijanjikan pemerintah agar orang tertarik memasang pembangkit sendiri". Instrumen seperti ini sering dipuji karena mendorong partisipasi warga, tetapi dari sudut pandang kebijakan energi juga merupakan cara negara mengarahkan bentuk investasi dan pola produksi listrik yang dianggap diinginkan. Ketentuan teknis, batas kapasitas, atau persyaratan administratif menentukan siapa yang betul-betul mampu memanfaatkan skema tersebut: apakah rumah tangga kelas menengah di kota, perusahaan properti besar, atau justru koperasi desa. Dengan demikian, kebijakan energi menjadi filter yang mengatur siapa yang boleh menjadi produsen, dan siapa yang tetap sekadar konsumen.

Dalam konteks Indonesia, agenda ketahanan dan ketangguhan sistem energi di tengah krisis iklim menambah lapisan baru pada cara kekuasaan bekerja melalui kebijakan. Narasi mengenai pentingnya membangun sistem energi yang tangguh terhadap banjir, kenaikan muka laut, atau cuaca ekstrem mendorong pemerintah menyusun peta risiko, prioritas investasi, dan skema pembiayaan baru. Kajian terbaru tentang kebijakan energi Indonesia menekankan bahwa integrasi antara ketahanan iklim, perluasan energi rendah karbon, dan tujuan sosial-ekonomi nasional mengharuskan adanya tata kelola yang lebih inklusif, tetapi sekaligus membuka ruang bagi aktor finansial dan korporasi untuk mendominasi agenda melalui proyek-proyek besar berorientasi *net-zero emissions* (Setiawan et al., 2025). Di sini, teknologi pemerintah bukan hanya mengatur pasokan dan permintaan, tetapi juga mendefinisikan apa arti "ketangguhan" dan kelompok mana yang berhak atas perlindungan prioritas.

Dimensi legitimasi menjadi sangat penting ketika kebijakan energi diklaim mewakili kepentingan publik, sementara proses perumusannya sangat teknokratis. Model

simulasi, proyeksi permintaan, dan skenario bauran energi digunakan sebagai dasar rasional untuk memilih teknologi tertentu, tetapi asumsi-asumsi di balik model itu jarang dibuka ke ruang debat publik. Dalam kerangka *governmentality*, pengetahuan teknis inilah yang memberikan "wajah ilmiah" pada keputusan yang sesungguhnya sarat nilai dan kepentingan. Warga yang tidak terbiasa dengan bahasa teknis cenderung menerima begitu saja hasil simulasi tersebut sebagai kebenaran objektif, sehingga ruang untuk mempertanyakan pilihan lokasi proyek, distribusi manfaat, atau dampak sosial menjadi sangat sempit. Dengan demikian, kebijakan energi berfungsi ganda: sebagai jawaban teknis atas kebutuhan energi dan sebagai mekanisme produksi legitimasi bagi tatanan kekuasaan yang sedang bekerja.

Jika kita rangkai semuanya, tampak jelas bahwa kebijakan yang mengatur pengembangan energi terbarukan bukanlah ruang kosong tanpa konflik, melainkan medan di mana negara, pasar, dan komunitas saling bernegosiasi sekaligus berkompetisi. Melalui target bauran, skema harga, dan regulasi akses ke jaringan, kebijakan membingkai warga sebagai konsumen yang rasional, investor potensial, sekaligus objek edukasi yang perlu diarahkan agar memilih teknologi yang "benar". Filsafat kekuasaan membantu kita melihat bahwa di balik narasi keberlanjutan, ada praktik pengaturan tubuh dan ruang: dari cara orang memasang panel surya di atap rumah, hingga bagaimana wilayah tertentu dikonstruksi sebagai "lumbung" energi hijau. Dengan memahami kebijakan energi sebagai teknologi pemerintah, kita dapat lebih kritis membaca siapa yang diuntungkan, siapa yang dikorbankan, dan apa yang sesungguhnya dipertaruhkan dalam setiap keputusan yang tampak teknis itu.

3 Nilai VS Harga: Membedakan Nilai Publik, Martabat, dan Kalkulus Biaya–Manfaat

3.1 Nilai Publik, Martabat Manusia, dan Batas Ekonomi Neoklasik

Nilai publik sering kali dibicarakan seolah-olah bisa direduksi menjadi angka rupiah, padahal inti persoalannya jauh lebih dalam: ia menyangkut pertanyaan tentang martabat manusia, hak dasar, dan apa yang layak dilindungi bahkan ketika tidak menguntungkan secara finansial. Ekonomi neoklasik cenderung mengukur pilihan publik melalui *cost-benefit analysis*, yaitu teknik yang mencoba membandingkan seluruh manfaat dan biaya dalam satuan moneter agar keputusan tampak "rasional". Bagi pembaca awam, ini berarti segala sesuatu—termasuk udara bersih dan kesehatan—dipaksa dinilai dengan harga. Padahal tradisi etika publik membedakan antara "nilai tukar" dan "nilai martabat": yang pertama boleh dinegosiasikan, yang kedua tidak. Dalam bab ini, kita akan membedakan secara hati-hati antara "harga" sebagai hasil transaksi pasar dan "nilai" sebagai ekspresi etika kolektif, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana logika angka sering kali gagal menangkap dimensi martabat dan keadilan dalam kebijakan iklim dan energi, terutama ketika dampaknya menyentuh kelompok yang posisinya lemah dalam struktur sosial.

Dalam tradisi filsafat politik modern, terutama arus liberal dan utilitarian, kesejahteraan publik kerap didefinisikan sebagai penjumlahan kepuasan individu, sehingga kebijakan yang "baik" adalah kebijakan yang memaksimalkan total manfaat bersih.

Pendekatan ini tampak netral, namun menyimpan asumsi bahwa semua nilai bisa dipertukarkan sepanjang ada kompensasi finansial yang memadai, seolah tidak ada batas moral yang tak boleh dilanggar. Dalam praktik kebijakan energi berkelanjutan, asumsi tersebut mendorong pemerintah menilai proyek terutama dari sisi efisiensi, lalu menyisihkan dimensi keadilan prosedural dan substantif seperti siapa yang diundang ke meja konsultasi dan siapa yang hanya menerima keputusan. Studi tentang transisi energi di Brasil, misalnya, menunjukkan bagaimana desain kebijakan sering bertumpu pada kalkulus ekonomi sekaligus membuka ruang tarik-menarik kepentingan antara aktor publik dan privat (Werner & Lazaro, 2023). Di sini kita melihat bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi, melainkan juga definisi tentang siapa yang layak dilindungi, berapa harga yang dianggap wajar untuk penderitaan mereka, dan siapa yang berhak menetapkan harga tersebut.

Konsep nilai publik sendiri dapat dipahami sebagai kumpulan hal-hal yang dianggap penting untuk dipertahankan bersama, bahkan ketika tidak menguntungkan secara komersial. Layanan dasar seperti listrik yang andal, udara bersih, dan lingkungan hidup yang sehat, merupakan contoh nilai yang tidak boleh semata-mata diserahkan pada logika keuntungan. Ketika negara menyusun kerangka dukungan bagi energi terbarukan, misalnya melalui insentif dan regulasi, pertanyaannya bukan hanya berapa tarif yang paling murah, melainkan juga siapa yang memperoleh akses, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana manfaatnya tersebar lintas kelas sosial. Di banyak wilayah pedesaan, misalnya, warga bersedia menanggung perubahan lanskap asal memperoleh hak suara dan manfaat nyata, bukan sekadar janji kompensasi. Di titik ini, perbedaan antara “nilai publik” dan “harga pasar” menjadi krusial, sebab banyak nilai tidak dapat dijualbelikan tanpa merusak makna moralnya, seperti rasa aman, rasa diakui, atau hak untuk

berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut masa depan komunitas.

Martabat manusia menambah lapisan lain yang tidak bisa diringkas ke dalam angka. Martabat berarti setiap orang memiliki posisi moral yang tidak dapat ditawar, apa pun status ekonomi dan kekuatan tawarnya di pasar. Ketika pemerintah menilai proyek infrastruktur energi yang mengakibatkan relokasi paksa, misalnya, pendekatan yang hanya menghitung kompensasi tanah akan gagal menangkap kehilangan makna tempat, jaringan sosial, dan identitas budaya masyarakat yang tergusur. Dalam istilah ekonomi, kerugian itu sering dikategorikan sebagai *non-market values*, yaitu nilai yang tidak punya harga pasar, tetapi tetap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan istilah ini secara sederhana, *non-market values* menunjuk pada hal-hal yang bila hilang tidak bisa begitu saja diganti dengan uang, seperti situs pemakaman leluhur, hutan yang menjadi ruang ritual, atau ruang ibadah yang telah dirawat lintas generasi. Begitu situs-situs ini dirusak, uang ganti rugi hanya menutup luka finansial, bukan luka identitas dan relasi sosial.

Perdebatan tentang keadilan energi memperlihatkan secara lebih tajam bagaimana fokus pada harga menutupi penderitaan kelompok yang dipinggirkan. Dalam banyak kasus, komunitas pedesaan dan wilayah periferal menanggung beban infrastruktur, sementara manfaat finansial mengalir ke pusat ekonomi dan investor yang jauh secara geografis. Penelitian tentang transisi energi rendah karbon di wilayah pedesaan menunjukkan bahwa ketimpangan politik dan ekonomi membuat potensi manfaat sering kali tidak hadir bagi warga lokal, yang justru terjebak dalam posisi "perifer energi" (O'Sullivan, Golubchikov, & Mehmood, 2020). Bagi warga, yang dirasakan bukanlah "manfaat bersih" sebagaimana dikalkulasi model, melainkan kombinasi antara ketidakpastian pendapatan, gangguan ruang hidup, dan rasa tidak dihargai. Pendekatan

ekonomi neoklasik yang berpusat pada pertumbuhan agregat cenderung mengabaikan pengalaman sehari-hari kelompok rentan, sehingga suara mereka tidak muncul dalam model, meski merekalah yang menanggung kebisingan turbin, perubahan lanskap, dan ketidakpastian kesempatan kerja bagi generasi muda. Dalam situasi seperti itu, istilah keadilan sering terasa abstrak bila tidak diturunkan ke pengalaman konkret keluarga dan komunitas.

Batas ekonomi neoklasik tampak jelas ketika kita menelaah cara *cost-benefit analysis* dipakai dalam kebijakan energi. Teknik ini biasanya menggabungkan seluruh manfaat dan biaya ke dalam satu angka bersih dengan menggunakan *discount rate*, yaitu tingkat diskonto yang menurunkan nilai kerugian atau manfaat di masa depan agar bisa dibandingkan dengan nilai hari ini. Bagi pembaca awam, ini berarti kerugian cucu dan generasi berikutnya dianggap "lebih kecil" sehingga sering kali dikorbankan demi keuntungan jangka pendek. Di atas kertas, sebuah proyek yang meningkatkan emisi selama dua dekade ke depan bisa tetap terlihat menguntungkan jika manfaat fiskalnya segera dirasakan. Ketika *discount rate* tinggi, proyek yang merusak lingkungan namun menghasilkan pemasukan cepat tampak menguntungkan di atas kertas. Padahal, dari sudut pandang keadilan antargenerasi dan kualitas kebijakan energi, cara pandang ini menjadikan masa depan sekadar angka yang boleh dimampatkan demi kebutuhan fiskal dan politik hari ini, seolah hak generasi mendatang hanyalah variabel teknis dalam lembar kerja.

Dalam kerangka nilai publik, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: nilai apa yang tidak boleh dikompromikan, meskipun tampak "tidak efisien" menurut model ekonomi standar? Di sini kita perlu membedakan antara tujuan kebijakan sebagai kompas normatif dan instrumen ekonomi sebagai alat teknis. *Welfare economics*—cabang ekonomi yang menilai

kesejahteraan sosial—sering kali diasumsikan cukup untuk menggambarkan kepentingan publik, padahal ia bekerja dengan seperangkat asumsi tentang preferensi individu, informasi sempurna, dan pasar yang relatif kompetitif, yang jarang terpenuhi dalam kenyataan. Penjelasan sederhana untuk pembaca awam: *welfare economics* mencoba menjawab apakah suatu kebijakan membuat masyarakat "lebih baik secara keseluruhan", tetapi jarang menjawab pertanyaan siapa yang dikorbankan dan apakah pengorbanan itu pantas secara moral. Dalam konteks ini, martabat manusia dan nilai publik menuntut kriteria yang melampaui sekadar penjumlahan kepuasan, misalnya prinsip bahwa tidak boleh ada kelompok yang dijadikan "korban lokal" demi manfaat nasional tanpa persetujuan dan perlindungan yang memadai.

Di samping itu, cara kita mendefinisikan dan mengukur manfaat sangat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan. Kelompok dengan akses pada ahli, data, dan bahasa teknis lebih mampu mendorong definisi manfaat yang sesuai kepentingannya, sementara kelompok marjinal kesulitan mengungkapkan nilai yang mereka anggap penting karena tidak fasih dalam bahasa angka. Model ekonomi yang tampak netral lalu bekerja sebagai bahasa resmi kebijakan, padahal dari awal sudah dikonstruksi oleh perspektif tertentu yang memilih mana nilai yang layak masuk tabel dan mana yang cukup disebut "pertimbangan kualitatif". Ketika kerugian non-material seperti hilangnya rasa memiliki terhadap tanah atau rusaknya jaringan sosial tidak dimasukkan, ia bukan menghilang, melainkan hanya "dikeluarkan" dari ruang pengambilan keputusan. Dengan demikian, analisis nilai publik harus berani mengungkap bagaimana pilihan metodologis—apa yang diukur dan apa yang tidak—sekaligus merupakan pilihan politik tentang siapa yang diakui sebagai pihak yang bernilai dan siapa yang tetap diperlakukan sebagai latar belakang.

Dengan membedakan nilai publik, martabat manusia, dan batas ekonomi neoklasik secara cermat, kita membuka ruang untuk merumuskan kriteria kebijakan yang lebih jujur terhadap kenyataan moral transisi energi. Proyek energi terbarukan tidak dapat dianggap "baik" hanya karena menurunkan emisi atau menghasilkan listrik murah; ia juga harus diuji terhadap pertanyaan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang memikul beban, dan nilai apa yang berpotensi dirusak atau dinegosiasikan secara tidak adil. Pendekatan yang bertumpu semata pada harga memberi ilusi bahwa semua konflik dapat diselesaikan lewat kompensasi finansial, padahal banyak kerugian tidak dapat ditebus dengan uang, terutama ketika menyangkut identitas, hubungan sosial, dan hak untuk menentukan arah hidup sendiri. Subbagian ini, karenanya, menjadi pijakan untuk bab-bab selanjutnya dalam buku, yang akan menelaah bagaimana instrumen pasar, arsitektur institusi, dan wacana kebijakan dapat disusun ulang agar sejalan dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan pencapaian keadilan sosial-ekologis, bukan sekadar optimalitas ekonomi jangka pendek.

3.2 Cost–Benefit Analysis, Diskonto, dan Invisibilitas Nilai Non-Pasar

Cost–benefit analysis pada pandangan pertama tampak seperti alat yang sangat rasional: semua manfaat dan biaya dari suatu proyek dihitung dalam satuan uang, lalu dibandingkan untuk melihat apakah kebijakan "layak" dijalankan. Bagi pembuat kebijakan yang harus memilih di antara banyak program, teknik ini menjanjikan kesederhanaan: cukup pilih yang nilai bersihnya paling tinggi. Namun di balik kesederhanaan itu tersembunyi sejumlah asumsi yang sangat berat secara etis. Pertama, bahwa semua jenis kerugian dan manfaat—termasuk hilangnya keanekaragaman hayati,

gangguan kesehatan, atau pergeseran identitas budaya—dapat dipadatkan ke dalam angka rupiah. Kedua, bahwa kerugian yang menimpa kelompok kecil atau komunitas yang kurang berdaya dapat "dibayar" oleh manfaat agregat bagi masyarakat luas. Bab ini membongkar bagaimana *cost–benefit analysis* mengatur cara kita memandang apa yang penting dan apa yang boleh dikorbankan dalam kebijakan iklim dan energi.

Mekanisme teknis *cost–benefit analysis* bergantung pada konsep *net present value* dan *discount rate*. Secara sederhana, *discount rate* adalah angka yang dipakai ekonom untuk mengatakan bahwa seribu rupiah hari ini nilainya lebih besar dibanding seribu rupiah sepuluh tahun lagi. Ketika diterapkan pada kebijakan iklim, pilihan angka diskonto ini menentukan seberapa serius kita menimbang kerugian generasi mendatang; semakin tinggi diskonto, semakin "kecil" kerugian mereka di mata perhitungan hari ini. Dalam studi mengenai pembiayaan transisi rendah karbon di negara maju, misalnya, keberhasilan mendorong investasi hijau sangat bergantung pada bagaimana arus biaya dan manfaat jangka panjang dinilai dan didiskontokan dalam kerangka keuangan publik dan *green finance* (Habib, Abd Rahman, Hashmi, & Ali, 2025). Dengan demikian, pilihan teknis tentang diskonto bukan sekadar masalah teknokratis, tetapi keputusan normatif tentang seberapa besar kita menghargai masa depan dibanding kenyamanan ekonomi saat ini.

Ketika *cost–benefit analysis* digunakan untuk membandingkan proyek pembangkit batu bara dengan investasi pada energi terbarukan, bias ini menjadi sangat kentara. Manfaat jangka pendek seperti pajak, lapangan kerja, dan listrik murah muncul jelas dalam lembar kerja, sedangkan manfaat jangka panjang berupa penurunan risiko bencana iklim, pengurangan polusi udara, dan peningkatan kesehatan publik sering kali direpresentasikan secara kasar atau sangat tidak

pasti. Di sisi lain, kerugian sosial dan ekologis yang sulit dimonetisasi—seperti hilangnya keindahan lanskap atau rusaknya kawasan sakral—sering diletakkan dalam kategori "tak terukur" dan akhirnya menghilang dari keputusan akhir. Hasilnya, proyek yang secara moral problematik dapat tetap tampak unggul di kertas hanya karena jenis manfaat dan kerugian tertentu lebih mudah dihitung dengan angka. Dengan cara ini, alat yang tampak netral sebenarnya mendorong preferensi sistematis kepada opsi yang menguntungkan kas negara dalam jangka pendek.

Salah satu kelemahan mendasar *cost–benefit analysis* adalah kecenderungannya membuat nilai non-pasar menjadi tidak terlihat. *Non-market values* merujuk pada hal-hal yang tidak memiliki harga pasar langsung, tetapi sangat berarti bagi kehidupan: kualitas udara, ketenangan, rasa aman, atau keberlanjutan ekosistem lokal. Untuk "memasukkan" nilai ini ke dalam model, ekonom sering menggunakan teknik *non-market valuation* seperti *contingent valuation* atau *choice experiment* yang meminta warga menyatakan berapa mereka bersedia membayar untuk melindungi sesuatu. Bagi pembaca awam, ini kurang lebih seperti menanyakan, "berapa rupiah nilai sungai ini bagi Anda?". Masalahnya, situasi hipotesis semacam itu tidak mampu menangkap kedalaman makna relasional dan kultural, sehingga hasilnya mudah dipengaruhi cara pertanyaan diajukan, kondisi sosial responden, atau ketimpangan kekuasaan yang membuat sebagian orang ragu menolak proyek yang sudah dianggap "kehendak negara".

Upaya memperhalus *cost–benefit analysis* sering dilakukan melalui integrasi antara *life cycle assessment* (LCA) dan *life cycle costing* untuk mengukur dampak dan biaya suatu teknologi dalam seluruh daur hidupnya. Studi tentang hidrogen hijau, misalnya, menunjukkan bagaimana analisis daur hidup dapat menampilkan jejak emisi dan biaya teknologi elektrolisis air

secara lebih utuh, dari produksi hingga pemakaian (Koj, Zapp, Wieland, Goerner, & Kuckshinrichs, 2024). Pendekatan ini jelas melampaui perhitungan biaya langsung jangka pendek dan mulai memasukkan dimensi lingkungan yang sebelumnya diabaikan. Namun demikian, sekalipun LCA menambah kedalaman teknis, ia masih sangat bergantung pada asumsi batas sistem dan harga yang berlaku, sehingga nilai non-pasar yang berkaitan dengan keadilan sosial, kehilangan budaya, atau relasi manusia–alam tetap mudah terpinggirkan apabila tidak secara sengaja dijadikan bagian dari kerangka evaluasi.

Dalam praktik pemerintahan, banyak panduan resmi mewajibkan penggunaan *cost–benefit analysis* untuk menilai rancangan kebijakan energi sebelum diadopsi. Di atas kertas, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anggaran publik tidak terbuang pada proyek yang boros dan bahwa setiap regulasi baru membawa manfaat bersih bagi masyarakat. Namun, kewajiban tersebut sering mengunci imajinasi perencana ke dalam satu jenis rasionalitas saja. Proyek yang sangat bermanfaat secara sosial tetapi sulit dimonetisasi cenderung tersisih, sementara intervensi yang meningkatkan profitabilitas aktor kuat lebih mudah lolos karena "angka-angkanya masuk". Akibatnya, keputusan yang tidak sesuai dengan output model sering dipersepsikan sebagai irasional, padahal bisa jadi secara moral dan politis lebih layak. Di sini, kebijakan energi justru berisiko direduksi menjadi latihan optimasi finansial belaka, bukan arena deliberasi tentang arah pembangunan dan struktur keadilan yang ingin diwujudkan.

Diskonto menambahkan lapisan problematik lain pada struktur ini. Dengan menerapkan *discount rate* yang relatif tinggi, model seakan mengirim pesan bahwa kerugian generasi mendatang boleh dinominalkan lebih rendah, sehingga mudah dikalahkan oleh manfaat ekonomi yang langsung dirasakan. Pilihan angka diskonto sebenarnya adalah pilihan filosofis

tentang bagaimana kita menimbang hak generasi yang belum lahir: apakah mereka hanya "opsi masa depan" atau setara dengan warga yang hidup sekarang. Beberapa ekonom iklim mengusulkan penggunaan diskonto sosial yang jauh lebih rendah, bahkan mendekati nol, untuk kerusakan yang tak dapat dipulihkan seperti hilangnya ekosistem penting atau titik balik sistem iklim. Bagi pembaca awam, ini berarti mengakui bahwa ada jenis kerugian yang begitu berat sehingga tidak pantas "dikalkulasi kecil" hanya karena terjadi beberapa dekade dari sekarang, dan karenanya perlu diberi bobot moral yang lebih besar daripada keuntungan fiskal sementara.

Dalam konteks transisi rendah karbon, keterbatasan *cost–benefit analysis* makin tampak ketika kita mempertimbangkan kerentanan sosial yang tidak merata. Studi terbaru menunjukkan bahwa kerentanan terhadap transisi energi—misalnya risiko kehilangan pekerjaan di sektor fosil, kenaikan tarif listrik, atau perubahan akses layanan dasar—sangat berbeda antara kelompok kaya dan miskin, antara pusat dan pinggiran (Shen et al., 2024). Menghitung manfaat bersih tanpa memeriksa siapa yang terdorong ke posisi lebih rentan membuat kebijakan tampak sukses secara agregat tetapi gagal secara keadilan. Di sini, metrik baru seperti indeks kerentanan transisi dapat membantu mengungkap distribusi risiko yang selama ini tersembunyi di balik angka manfaat agregat. Namun, metrik ini hanya akan berpengaruh jika dilekatkan pada mekanisme pengambilan keputusan, bukan sekadar dijadikan lampiran teknis dalam laporan yang tidak mengubah pilihan proyek dan rancangan insentif.

Dengan demikian, tantangan utama bukan sekadar memperbaiki *cost–benefit analysis*, tetapi menempatkannya dalam kerangka etis dan politik yang lebih luas. Untuk kebijakan energi yang adil, kita perlu mengakui bahwa ada nilai yang tidak boleh direduksi menjadi harga, bahwa masa depan tidak boleh

"dikurangi" begitu saja demi kenyamanan hari ini, dan bahwa nilai non-pasar seperti keutuhan komunitas dan kelestarian ekosistem harus dibuat terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan evaluasi yang menggabungkan analisis ekonomi dengan penilaian multi-kriteria, deliberasi publik, dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal dapat membantu menyeimbangkan kembali dominasi angka. Subbagian ini, dengan demikian, mengajak pembaca melihat *cost–benefit analysis* bukan sebagai alat netral, tetapi sebagai teknologi kekuasaan yang harus dinegosiasikan, dikoreksi, dan dilengkapi jika kita sungguh ingin mewujudkan transisi energi yang bermartabat dan berkeadilan bagi semua generasi.

3.3 Energi sebagai Hak, Jasa, atau Komoditas: Implikasi Etis dan Politik

Energi dapat dibayangkan sebagai hak, sebagai jasa, atau sebagai komoditas, dan setiap cara pandang membawa konsekuensi etis serta politik yang sangat berbeda. Ketika energi dipahami sebagai hak, titik tolaknya adalah martabat manusia: tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup dalam kegelapan atau udara kotor hanya karena miskin, baik di kota besar maupun di desa terpencil. Namun, dalam praktik kebijakan, energi sering dikelola seperti jasa utilitas yang harus menutup biaya, atau bahkan seperti komoditas finansial yang diperdagangkan di bursa dan dikejar demi laba jangka pendek. Ketiga cara pandang ini tidak pernah hadir dalam ruang hampa; ia dibentuk oleh sejarah kolonial, desain pasar, dan institusi negara yang mengatur siapa berhak mengakses apa, dengan harga berapa, dan dalam kondisi seperti apa. Karena itu, pertanyaan tentang energi bukan sekadar teknis, melainkan pertanyaan filosofis tentang keadilan, kewajiban, serta struktur kekuasaan yang mengatur kehidupan sehari-hari warga.

Jika kita menelusuri debat global tentang pembangunan, energi sebagai hak sering dikaitkan dengan gagasan *human rights* yang menekankan kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan dasar warganya. Hak atas energi bersih dan dapat diandalkan berkembang dari diskusi tentang hak atas kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak, karena semua itu membutuhkan listrik dan bahan bakar yang aman untuk memasak maupun mobilitas. Di sisi lain, rezim pasar mendorong logika bahwa energi harus dibayar sesuai konsumsi, seolah-olah seperti barang lain yang bisa ditambah atau dikurangi tanpa mengganggu martabat manusia. Ketegangan ini tampak ketika masyarakat miskin dipaksa memilih antara membayar tagihan listrik atau kebutuhan pangan, atau ketika usaha mikro gulung tikar karena tarif melonjak. Di sini, status energi sebagai hak atau komoditas menjadi sangat konkret: ia menentukan apakah kebijakan tarif dan subsidi dirancang untuk melindungi kelompok rentan atau justru memperlakukan mereka sebagai pelanggan tidak menguntungkan yang bisa dilepas begitu saja.

Dalam sejumlah konstitusi dan instrumen hukum, hak atas layanan dasar mulai ditafsirkan mencakup akses terhadap layanan energi, terutama ketika agenda *sustainable development* dan *energy access for all* menguat di forum internasional. Ketika negara mengakui bahwa tanpa listrik dan bahan bakar bersih orang tidak dapat menikmati hak lain, energi mulai ditempatkan sejajar dengan air dan kesehatan, bukan sekadar komponen biaya dalam neraca rumah tangga. Namun, penerjemahan hak ini ke praktik sering bergantung pada bagaimana pemerintah merancang program perluasan jaringan, subsidi, dan dukungan bagi proyek energi terdesentralisasi di wilayah terpencil. Di sinilah perdebatan tentang energi terbarukan memasuki ranah moral: apakah panel surya di atap rumah tangga miskin diperlakukan sebagai prioritas keadilan sosial, atau sebagai peluang bisnis yang hanya diakses mereka yang sudah punya

tabungan, agunan, dan jaringan politik? Cara negara menjawab pertanyaan ini menentukan apakah bahasa hak benar-benar mengubah distribusi kuasa, atau hanya menjadi slogan dalam dokumen kebijakan yang indah di atas kertas.

Cara pandang kedua melihat energi sebagai jasa (*energy service*) yang dikelola oleh utilitas publik atau swasta. Fokusnya adalah keberlanjutan finansial: perusahaan harus menutup biaya operasional, investasi jaringan, dan risiko teknologi, sambil menjaga kualitas pasokan dan memenuhi standar keandalan sistem. Pendekatan ini tampak netral, tetapi di baliknya ada asumsi bahwa kemampuan membayar adalah kunci utama akses, dan siapa yang tidak mampu dianggap gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Kajian tentang demokrasi energi menunjukkan bahwa desain layanan, dari struktur tarif hingga model bisnis, secara halus menggeser keseimbangan kuasa antara perusahaan, negara, dan warga (Burke & Stephens, 2018). Dalam kerangka ini, warga terutama diposisikan sebagai pelanggan yang memilih paket layanan, bukan sebagai pemilik sah infrastruktur kolektif yang menopang kehidupan sosial. Ketika terjadi pemutusan karena tunggakan, itu dianggap konsekuensi logis kontrak jasa, bukan kegagalan struktural dalam menjamin hak dasar yang seharusnya tidak dapat dicabut begitu saja.

Cara pandang ketiga memposisikan energi sebagai komoditas penuh, bagian dari portofolio keuangan yang diperdagangkan melalui *power purchase agreements*, pasar karbon, dan instrumen derivatif lainnya. Di sini, listrik bukan lagi sekadar aliran elektron, melainkan aliran pendapatan dan risiko yang dihitung lewat model *discounted cash flow*, *risk premium*, atau *project finance*. Istilah-istilah ini merujuk pada cara menghitung nilai sekarang dari keuntungan masa depan, tambahan biaya karena ketidakpastian, dan struktur pembiayaan proyek secara keseluruhan. Bagi pembaca awam,

yang penting adalah menyadari bahwa setiap rumus tersebut memengaruhi siapa yang akhirnya menanggung risiko gagal bayar, fluktuasi harga, dan perubahan regulasi. Ketika energi dikomodifikasi seperti ini, warga dan komunitas kerap berubah status menjadi "basis pelanggan" dalam lembar kerja investor, sehingga suara moral tentang keadilan atau martabat mudah tersingkir oleh angka imbal hasil, target *return on investment*, dan peringkat kelayakan kredit yang tidak pernah mereka ikuti proses penentuannya.

Dalam praktik, ketiga cara pandang ini bertemu dalam rancangan kebijakan energi yang mengatur tarif, subsidi, prioritas investasi, dan insentif fiskal. Studi tentang transisi energi berkarbon rendah menunjukkan bahwa hambatan utama sering kali bukan teknologi, melainkan konfigurasi tantangan sosial, ekonomi, dan institusional yang saling terkait dan sulit dipisahkan (Saraji & Streimikiene, 2024). Ketika regulator menimbang antara menjaga iklim investasi dan menekan tarif bagi rumah tangga miskin, mereka sebenarnya sedang memutuskan apakah energi diperlakukan lebih sebagai hak, jasa, atau komoditas, meski jarang diucapkan secara eksplisit dalam naskah resmi. Di sini, keputusan tentang desain subsidi silang, tarif progresif, atau skema bantuan langsung menjadi arsitektur tersembunyi dari keadilan atau ketidakadilan. Dengan kata lain, kategori filosofis tadi bukan abstraksi; ia tertanam dalam pasal, peraturan, dan formula teknis yang mengarahkan keseluruhan kebijakan energi pada satu jenis masa depan, dan bukan yang lain. Dalam banyak kasus, perdebatan itu terjadi di ruang teknokratis yang tertutup, sehingga warga hanya merasakan dampaknya tanpa pernah diajak memahami pilihan-pilihan normatif yang sedang dipertaruhkan.

Di banyak negara Selatan, sejarah kolonial dan ketimpangan pembangunan menjadikan perdebatan tentang

energi sebagai hak, jasa, atau komoditas terkait langsung dengan pertanyaan utang ekologis dan utang sosial. Komunitas yang selama puluhan tahun memasok bahan baku fosil atau menanggung beban pembangkit listrik sering kali justru menjadi kelompok terakhir yang menikmati layanan stabil dan terjangkau. Ketika rezim tarif menaikkan harga untuk menutup biaya transisi, mereka kembali diminta membayar, kali ini demi "masa depan hijau" yang desainnya ditentukan di pusat kekuasaan dan kantor konsultan global. Jika energi didefinisikan terutama sebagai komoditas, beban penyesuaian harga sering didorong ke konsumen kecil, sementara pelaku besar dinegosiasikan lewat kontrak khusus. Sebaliknya, jika energi diakui sebagai hak, negara wajib memikirkan skema perlindungan yang mencegah pemiskinan baru akibat transformasi menuju sistem yang lebih rendah karbon, termasuk pengelolaan ulang subsidi dan program bantuan sosial yang berpihak pada kelompok paling rentan.

Perdebatan status energi juga punya dimensi partisipasi demokratis. Jika ia dipandang sebagai jasa teknis, diskusi kebijakan cenderung dibatasi pada pakar teknik dan ekonomi yang berbicara dalam bahasa *load factor*, *capacity margin*, atau *marginal cost*, istilah yang bagi warga biasa nyaris tak dapat ditembus. Penjelasan sederhana perlu menegaskan bahwa semua istilah itu sebenarnya hanya cara lain untuk menjawab dua pertanyaan: siapa yang dibebani, dan siapa yang dilindungi dalam desain sistem. Ketika energi diakui sebagai hak, konsekuensinya adalah membuka ruang deliberasi yang lebih luas, di mana warga, terutama kelompok rentan, berhak menyatakan keberatan atas model bisnis yang mengorbankan mereka, bukan sekadar diberi informasi satu arah. Sebaliknya, jika energi didefinisikan murni sebagai komoditas, ruang partisipasi mudah dipersempit menjadi konsultasi simbolik, sementara keputusan substansial diambil dalam negosiasi

tertutup antara negara dan pelaku pasar yang tidak dapat diakses publik. Ketika dimensi politik ini disembunyikan di balik bahasa netral teknis, publik kehilangan kesempatan untuk mendefinisikan bersama seperti apa masa depan energi yang mereka anggap adil dan bermartabat.

Menimbang energi sebagai hak, jasa, atau komoditas bukan latihan akademik yang jauh dari kenyataan, melainkan cara untuk membongkar logika tersembunyi di balik tarif, kontrak, dan program transisi. Ketika pemerintah merancang skema dukungan untuk investasi pembangkit berbasis energi terbarukan di satu sisi, dan kebijakan pemutusan listrik bagi rumah tangga menunggak di sisi lain, ia sebenarnya sedang mengirim sinyal nilai: siapa yang dianggap dapat dinegosiasikan, dan siapa yang tidak. Bab-bab selanjutnya akan menunjukkan bagaimana pilihan konsep ini berkelindan dengan desain instrumen pasar, arsitektur kelembagaan, dan bentuk legitimasi publik. Dengan demikian, perdebatan filosofis tentang hak, jasa, dan komoditas membantu kita melihat bahwa efisiensi biaya hanyalah satu dimensi dari kebijakan, sementara dimensi lain menyangkut martabat manusia, keadilan distribusi, dan arah jangka panjang transformasi sosial yang ingin kita capai bersama sebagai komunitas politik. Dengan mengembalikan perdebatan ke ranah nilai, buku ini mengajak pembaca untuk menilai sendiri apakah kerangka yang mendominasi saat ini benar-benar sejalan dengan cita-cita keadilan antargenerasi dan solidaritas sosial.

3.4 Konflik Nilai dalam Kebijakan Energi: Siapa yang Menentukan Prioritas

Dalam perdebatan mengenai konflik nilai dalam kebijakan energi, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar berapa biaya yang harus dikeluarkan negara atau rumah tangga, melainkan nilai apa yang ingin kita lindungi dan siapa yang berhak

menentukannya. Ketika tarif listrik diperdebatkan, di sana bertemu logika keadilan sosial, kebutuhan industri, dan batas-batas ekologi yang tidak bisa dinegosiasikan. Logika biaya-manfaat berusaha mereduksi seluruh dilema itu ke dalam angka: berapa rupiah per kilowatt-jam, berapa lama pengembalian investasi, berapa besar *risk premium* yang dapat diterima investor, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai tambahan biaya karena adanya ketidakpastian. Namun di balik angka-angka tersebut tersembunyi pertanyaan tentang martabat komunitas yang lahannya dikonversi, tentang hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang layak, dan tentang posisi warga biasa dalam menentukan arah masa depan energi di negaranya. Dengan kata lain, konflik nilai selalu melekat pada setiap keputusan, bahkan ketika bahasa resmi yang dipakai seolah hanya membicarakan efisiensi dan rasionalitas ekonomi semata.

Nilai publik dalam kebijakan energi seharusnya merangkum keadilan, keberlanjutan ekologis, dan inklusi politik, sementara harga pasar hanya menangkap apa yang bisa dibeli oleh pihak yang punya daya bayar. Di sinilah kalkulus biaya-manfaat menjadi problematis, karena cenderung mengabaikan nilai yang tidak mudah dimonetisasi, seperti rasa aman, keterikatan budaya pada suatu lanskap, atau rasa adil ketika beban lingkungan dibagi secara merata. Literatur tentang transisi energi menunjukkan bahwa pergeseran dari sistem terpusat menuju konfigurasi yang lebih tersebar tidak otomatis menghasilkan tatanan yang lebih demokratis; yang berubah adalah arena dan pola pertarungan kekuasaan itu sendiri (Brisbois, 2020). Dalam konteks ini, pertanyaan "siapa yang menentukan prioritas" bukan wacana abstrak, tetapi tampak konkret dalam penetapan proyek mana yang dipercepat, wilayah mana yang dikorbankan, dan kelompok mana yang dianggap cukup penting untuk diajak berunding sejak awal

proses perencanaan. Di balik setiap angka di tabel biaya-manfaat, selalu ada keputusan sunyi tentang nyawa, lanskap, dan relasi sosial yang boleh atau tidak boleh dipertaruhkan.

Dalam narasi kebijakan iklim, proyek energi terbarukan sering dipromosikan sebagai solusi teknis yang bersih dan tak bermasalah, seolah-olah begitu panel surya, turbin angin, atau pembangkit berbasis biomassa dibangun, seluruh persoalan moral langsung terjawab. Padahal, di lapangan, pergeseran teknologi justru dapat melahirkan konflik nilai baru: lahan pertanian beralih fungsi, akses air berubah, dan lanskap sosial-ekologis komunitas lokal diganggu oleh infrastruktur besar yang dirancang tanpa dialog memadai. Di sini terlihat ketegangan antara nilai global pengurangan emisi dan nilai lokal mempertahankan ruang hidup yang bermakna. Banyak studi menggambarkan bagaimana wacana hijau digunakan untuk membungkam keberatan warga, sehingga nilai publik yang dikedepankan hanyalah versi yang sesuai dengan kepentingan modal, sementara dimensi keadilan, pengakuan, dan partisipasi diletakkan di pinggir. Ketika suara komunitas didelegitimasi sebagai "anti pembangunan", konflik nilai berubah menjadi konflik definisi tentang apa itu kemajuan dan siapa yang berhak menikmati manfaat dari proyek yang diklaim ramah iklim tersebut.

Ketika teknokrat mempresentasikan studi kelayakan, seolah konflik nilai telah dibereskan oleh model, rumus diskonto, dan skenario permintaan energi. Padahal, asumsi yang dimasukkan ke dalam model itulah yang diam-diam menentukan prioritas: tingkat diskonto yang tinggi, misalnya, membuat kerusakan jangka panjang tampak remeh dibandingkan keuntungan jangka pendek; sementara penilaian atas "kemauan membayar" warga mengabaikan fakta bahwa kelompok miskin memiliki daya beli rendah bukan karena kebutuhan mereka kurang penting, tetapi karena struktur

ekonomi yang timpang. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa rancangan regulasi dan insentif dapat memperkuat kapasitas aktor lokal atau, sebaliknya, mengunci dominasi pelaku besar yang mengejar keuntungan semata (Werner & Lazaro, 2023). Dalam kerangka ini, konflik nilai dalam kebijakan energi tidak pernah netral, sebab sejak tahap desain sudah ada pilihan diam-diam tentang siapa yang dilindungi dan siapa yang dapat dikorbankan demi efisiensi fiskal. Dengan demikian, model teknokratik bukanlah cermin realitas, melainkan alat untuk menata ulang hierarki kepentingan dengan cara yang tampak ilmiah.

Pertarungan antara martabat dan harga tampak jelas ketika komunitas yang rentan diminta menerima pembangunan infrastruktur energi dengan imbalan kompensasi jangka pendek. Di satu sisi, proyek tersebut dijual sebagai peluang kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan simbol kemajuan; di sisi lain, warga diminta mengabaikan hilangnya kualitas lingkungan, resiko kesehatan, dan perubahan identitas ruang tempat mereka hidup. Wacana seperti *energy justice*—yang secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa manfaat dan beban sistem energi dibagi secara adil—muncul sebagai koreksi atas logika semata-mata ekonomistik. Namun, wacana ini mudah terkooptasi jika hanya menjadi bahasa proyek tanpa perubahan prosedur dan struktur pengambilan keputusan. Selama yang menentukan lokasi pembangunan, bentuk kompensasi, dan standar perlindungan hanyalah koalisi elit politik dan korporasi, konflik nilai akan terus berulang dan menumpuk sebagai ketidakpercayaan publik yang sulit dipulihkan, bahkan ketika beberapa fasilitas sosial tampak dibangun sebagai imbalan. Dalam situasi seperti itu, bahasa kompensasi justru menegaskan bahwa sebagian warga dianggap dapat "dibeli" hak dan ruang hidupnya.

Pada level instrumen, kebijakan energi sering dipresentasikan sebagai sekumpulan pilihan teknis: skema subsidi, tarif *feed-in*, pajak karbon, atau skema sertifikat hijau. Bagi pembaca awam, istilah *feed-in* dapat dipahami sebagai mekanisme ketika pemerintah menjamin harga tertentu bagi produsen listrik kecil yang menjual listrik ke jaringan, sehingga dianggap mendorong investasi. Namun di balik istilah teknis tersebut, tersembunyi keputusan normatif tentang siapa yang layak mendapat dukungan, teknologi mana yang dinomorsatukan, dan seberapa besar risiko yang dialihkan kepada publik melalui tarif listrik. Jika desain insentif lebih menguntungkan investor besar dibandingkan koperasi warga, maka prioritas implisitnya adalah akumulasi modal, bukan penguatan kedaulatan energi masyarakat. Dengan demikian, konflik nilai tidak hanya muncul pada tataran slogan, tetapi terpatri dalam detail regulasi yang tampak teknis, mulai dari syarat kapasitas minimal hingga prosedur perizinan yang menentukan siapa yang sanggup masuk ke dalam permainan, dan siapa yang sejak awal tersingkir.

Kekuasaan juga beroperasi melalui bahasa yang digunakan dalam perencanaan energi. Istilah seperti *least-cost expansion*—yang secara sederhana berarti pilihan perluasan sistem dengan biaya finansial terendah—sering digunakan untuk menyingkirkan alternatif yang secara sosial lebih adil tetapi tampak lebih mahal di atas kertas. Demikian pula, jargon *energy security* atau keamanan energi, yang awalnya dimaksudkan sebagai jaminan ketersediaan energi yang andal dan terjangkau, kerap dipakai untuk membenarkan proyek dengan dampak ekologis besar atas nama kepentingan nasional. Dalam situasi seperti itu, konflik nilai diselesaikan secara sepihak di ruang teknokratik: apa yang dianggap "rasional" telah ditentukan sebelum warga sempat mengajukan tafsir lain tentang keamanan, kesejahteraan, dan masa depan yang diinginkan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah ada pilihan lain, tetapi mengapa hanya segelintir aktor yang berhak mendefinisikan rasionalitas tersebut, sementara kelompok yang terdampak hanya diberi ruang untuk menyampaikan keberatan dalam forum konsultasi yang sering bersifat seremonial. Melalui mekanisme ini, bahasa teknis berubah menjadi pagar yang menghalangi perdebatan etis yang lebih luas.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, tekanan krisis iklim dan kebutuhan pembangunan sering digabungkan dalam satu narasi besar: energi harus sekaligus bersih, murah, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Studi terbaru tentang ketahanan sistem energi Indonesia menunjukkan bahwa upaya menghubungkan agenda transisi, ketahanan infrastruktur, dan tujuan sosial-ekonomi membutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh, bukan sekadar daftar proyek baru (Setiawan et al., 2025). Dalam realitas politik, tuntutan menyeluruh ini segera berhadapan dengan keterbatasan anggaran, lobi industri fosil, dan ketidakseimbangan posisi tawar antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal. Di titik ini, prioritas sering diputuskan berdasarkan kalkulasi risiko terhadap stabilitas fiskal dan politik, sementara resiko yang menimpa kelompok paling rentan—seperti nelayan pesisir, petani kecil, atau warga di wilayah terpencil—didorong ke latar belakang sebagai "konsekuensi yang tak terhindarkan" dari pembangunan. Dengan demikian, konflik nilai juga tercermin dalam peta siapa yang boleh kalah terlebih dahulu ketika sumber daya terbatas.

Perdebatan tentang energi terbarukan kerap terjebak pada pertanyaan teknologi mana yang paling efisien, seakan-akan efisiensi teknis adalah ukuran tunggal keberhasilan, padahal pertanyaan filosofis yang lebih dalam adalah: tata nilai siapa yang dijadikan acuan ketika menentukan apa yang "layak" dibiayai dan apa yang boleh dikorbankan. Jika martabat warga,

keutuhan ekosistem, dan hak generasi mendatang tidak dijadikan parameter eksplisit, maka harga energi yang murah bisa saja menutupi biaya sosial dan ekologis yang sangat mahal. Itu sebabnya konflik nilai dalam kebijakan energi perlu dibaca sebagai pertarungan untuk menempatkan nilai publik di atas kalkulus sempit biaya-manfaat. Tanpa pembukaan ruang deliberasi yang sungguh-sungguh, di mana warga dapat ikut mendefinisikan prioritas dan menantang asumsi teknokratik, kebijakan hanya akan menjadi instrumen untuk menstabilkan ketimpangan kekuasaan, bukan jalan menuju tata energi yang adil dan berkelanjutan. Di sinilah filsafat kekuasaan membantu kita melihat bahwa angka, grafik, dan istilah teknis selalu membawa serta pilihan moral yang harus dipertanggungjawabkan.

4 Epistemologi Bukti: Kapan "*Evidence*" Menjadi Tata Bahasa Kekuasaan dalam Energi Berkelanjutan

4.1 Ledakan Riset Energi Berkelanjutan: Peta Tema dan Paradigma Utama

Ledakan riset tentang energi berkelanjutan dalam dua dekade terakhir tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai akumulasi artikel ilmiah, melainkan sebagai gejala filosofis tentang bagaimana dunia mendefinisikan masalah dan solusi. Jumlah publikasi yang membahas transisi rendah karbon, keadilan iklim, tata kelola multilevel, dan inovasi hijau meningkat tajam, terutama setelah Paris Agreement. Namun yang lebih penting dari kuantitas adalah bagaimana riset-riset ini membentuk "bahasa" baru tentang apa yang dianggap sah sebagai fakta, risiko, dan prioritas kebijakan. Dalam konteks ini, pertanyaan epistemologis muncul: siapa yang berhak mendefinisikan bukti, atas dasar metode apa, dan untuk kepentingan siapa? Ledakan riset tidak netral; ia menggeser pusat gravitasi otoritas pengetahuan dari negara ke kombinasi kompleks antara lembaga riset, lembaga keuangan, lembaga internasional, dan konsorsium data yang mengklaim mengukur masa depan planet.

Jika kita menelusuri peta tema riset energi berkelanjutan, tampak jelas bahwa fokus tidak lagi semata pada efisiensi teknologi, tetapi pada hubungan antara transisi energi, keadilan sosial, dan konfigurasi kekuasaan. Kajian tentang tantangan transisi rendah karbon menggunakan pendekatan *intuitionistic fuzzy cognitive map* dan metode *TOPSIS*—yaitu teknik pengambilan keputusan multikriteria yang membandingkan

berbagai skenario kebijakan secara sistematis—menunjukkan bagaimana hambatan seperti investasi, *short-termism* (orientasi jangka pendek), dan resistensi reformasi saling terkait dalam satu jaringan sebab-akibat yang kompleks (Saraji & Streimikiene, 2025). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa "bukti" bukan hanya angka efisiensi, tetapi juga representasi tentang konflik, ketidakpastian, dan pilihan normatif yang disederhanakan menjadi skenario teknis.

Tema besar lain dalam peta riset adalah pergeseran dari melihat *energi terbarukan* semata-mata sebagai solusi teknologi menuju pemahaman yang lebih politik dan sosiologis. Banyak studi kini menelusuri bagaimana proyek-proyek energi bersih memproduksi pemenang dan pecundang baru, menciptakan bentuk ketimpangan yang berbeda dari rezim berbasis fosil. Di sinilah perdebatan tentang keadilan prosedural, distribusi manfaat, dan pengakuan komunitas lokal menjadi arus utama. Riset kualitatif, studi kasus komparatif, dan *mixed-methods* (gabungan kualitatif–kuantitatif) digunakan untuk menangkap pengalaman komunitas yang sebelumnya tak terlihat oleh analisis makro. Dengan cara ini, ledakan riset bukan hanya memperbanyak angka dan model, tetapi memperluas spektrum suara yang dapat tampil sebagai bagian dari "bukti" dalam perdebatan publik.

Salah satu perubahan paradigma penting yang tampak dari literatur adalah pergeseran dari melihat masyarakat sebagai penerima pasif kebijakan menjadi aktor yang dapat mengklaim ruang kekuasaan dalam transisi energi. Studi di kawasan Nordik–Baltik, misalnya, menunjukkan bagaimana struktur produksi listrik dan perluasan *smart grids* (jaringan listrik pintar yang menggunakan sensor dan komputasi untuk menyeimbangkan suplai–permintaan secara real time) dapat dikaitkan dengan pemberdayaan komunitas dan diversitas model kepemilikan energi (Gatto & Sadik-Zada, 2025). Di sini,

pengetahuan teknis tentang kapasitas jaringan, bauran pembangkitan, dan pola konsumsi dipadukan dengan analisis partisipasi warga dan legitimasi kebijakan. Pergeseran ini menandai bahwa bukti teknis dan bukti sosial tidak lagi bisa dipisahkan secara kaku dalam riset energi berkelanjutan.

Peta tema juga menunjukkan proliferasi pendekatan kuantitatif canggih yang membingkai transisi energi sebagai persoalan optimasi. Model *panel data* jangka panjang, teknik ekonometrika seperti *Method of Moments Quantile Regression*, dan simulasi skenario digunakan untuk mengukur dampak kebijakan fiskal hijau, tata kelola lingkungan, dan kompleksitas ekonomi terhadap emisi dan kinerja lingkungan. Bagi pembaca awam, istilah-istilah ini mungkin terdengar rumit, tetapi pada dasarnya mereka adalah cara untuk menjawab pertanyaan sederhana: jika negara mengubah aturan main—pajak karbon, subsidi, regulasi—seberapa besar perubahan yang akan terjadi pada emisi dan kesejahteraan? Tantangan epistemologisnya muncul ketika angka-angka hasil model ini diperlakukan seolah-olah netral, padahal di dalamnya terkandung asumsi nilai, pilihan variabel, dan definisi "keberhasilan" yang tidak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan politik.

Pada saat yang sama, riset tentang *kebijakan energi* mulai banyak menyoroti ketegangan antara narasi global dan kenyataan nasional-lokal. Di satu sisi, ada dorongan kuat menuju standar global seperti net zero dan jalur 1,5°C yang diterjemahkan ke dalam target nasional dan indikator kinerja. Di sisi lain, studi-studi empiris menunjukkan bahwa kapasitas institusional, konflik lahan, serta struktur pasar yang timpang membuat implementasi target tersebut sering berbelok jauh dari desain awal. Literatur tata kelola multilevel menekankan bagaimana daerah, kota, dan komunitas lokal sering kali dipaksa menyesuaikan diri dengan skema insentif yang dirancang dari atas, sementara bukti lokal tentang kerentanan

sosial dan ekologis kurang mendapat ruang dalam desain intervensi.

Ledakan riset juga menghadirkan perubahan dalam cara kita memahami "epistemologi bukti" itu sendiri: siapa yang diakui sebagai ahli, metode apa yang dianggap sah, dan bagaimana hirarki publikasi membentuk lanskap gagasan. Dominasi jurnal-jurnal internasional berbahasa Inggris dan sistem pemeringkatan sitasi menciptakan kecenderungan di mana pengalaman Global South harus "diterjemahkan" ke dalam format narasi dan metodologi yang sesuai dengan standar pusat. Banyak peneliti mencatat bahwa ini berisiko menghilangkan kompleksitas lokal, karena data dan cerita yang tidak mudah diukur—seperti dimensi budaya, spiritual, atau historis dari konflik energi—sering kali disingkirkan sebagai "anekdotal" atau "tidak generalisable". Dalam konteks energi berkelanjutan, hal ini berarti bahwa bentuk-bentuk pengetahuan tertentu diakui sebagai bukti, sementara yang lain diposisikan sebagai opini atau aktivisme.

Tema keadilan dan demokrasi energi menjadi simpul penting yang menghubungkan berbagai kluster riset: dari studi tentang tarif listrik dan kemiskinan energi, hingga literatur tentang partisipasi warga dalam perencanaan proyek dan perdebatan mengenai hak atas energi yang aman, terjangkau, dan bersih. Di sini, istilah seperti *energy justice* (keadilan energi) dan *energy democracy* (demokrasi energi) digunakan untuk menyoroti bahwa distribusi manfaat dan beban transisi bukan sekadar konsekuensi teknis, melainkan hasil dari keputusan politik yang bisa dinegosiasikan. Konsep-konsep ini membantu menggeser fokus dari "seberapa cepat kita bisa mengurangi emisi?" ke "siapa yang menanggung biaya dan siapa yang menikmati hasilnya?", sehingga epistemologi bukti tidak hanya menjawab pertanyaan "apa yang efektif?", tetapi juga "adil bagi siapa?".

Akhirnya, ledakan riset energi berkelanjutan membuka peluang sekaligus risiko bagi perumusan kebijakan di masa depan. Di satu sisi, kelimpahan studi, data, dan pemodelan menyediakan landasan yang lebih kaya bagi pengambil keputusan untuk merancang jalur transisi yang lebih peka terhadap konteks sosial dan ekologis. Di sisi lain, fragmentasi tema dan spesialisasi yang semakin sempit dapat membuat pembuat kebijakan kesulitan melihat gambaran utuh, terutama ketika studi-studi tentang *energi terbarukan* dipisahkan dari analisis ketimpangan sosial, konflik agraria, dan dinamika geopolitik. Tugas filosofis dalam membaca peta riset ini adalah menyusun ulang serpihan-serpihan bukti menjadi kerangka yang mampu mengungkap relasi kekuasaan di balik angka, bukan sekadar merayakan banyaknya publikasi atau kecanggihan metode yang digunakan.

4.2 Standar Bukti, Model, dan Indikator sebagai Tata Bahasa Kekuasaan

Standar bukti, model, dan indikator sering diperlakukan seolah-olah hanya persoalan teknis yang netral, padahal di dalamnya bersemayam pilihan moral, politik, dan epistemologis yang sangat kental. Ketika pemerintah, lembaga internasional, atau konsultan menyusun *model* untuk memproyeksikan emisi, menetapkan *indicator* untuk mengukur kemajuan, atau menentukan standar apa yang boleh disebut "berbasis bukti", sesungguhnya mereka sedang merumuskan tata bahasa tentang apa yang diakui sebagai kenyataan dan apa yang boleh diabaikan. Dalam bahasa Foucault, ini adalah cara kekuasaan menyusun "rezim kebenaran": siapa yang berhak berbicara, dengan bahasa apa, dan berdasarkan data jenis apa. Bab ini mengajak pembaca melihat bahwa angka, grafik, dan indeks bukan sekadar alat bantu penjelasan, melainkan perangkat yang mendisiplinkan imajinasi kebijakan, termasuk dalam energi

berkelanjutan, sehingga hanya sebagian kecil kemungkinan masa depan yang tampak rasional, legal, dan dapat dibiayai.

Standar bukti biasanya hadir dalam bentuk ambang tertentu: tingkat signifikansi statistik, rentang *confidence interval*, atau syarat banyaknya studi sebelum suatu klaim diterima. Kedengarannya teknis, tetapi penetapan ambang itu selalu menyiratkan pertanyaan normatif: berapa besar risiko salah yang masih dianggap dapat diterima, untuk kelompok mana, dan dalam jangka waktu seberapa panjang. Kerangka indikator transisi energi yang dikembangkan Streimikiene dan kolega, misalnya, menunjukkan bagaimana pemilihan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara eksplisit memosisikan keadilan energi sebagai bagian dari rancangan indikator, bukan sekadar tambahan belakangan (Streimikiene et al., 2021). Begitu suatu standar bukti diinstitusikan, ia akan menentukan proposal mana yang dianggap "kurang kuat", kelompok mana yang datanya disebut "anekdotal", dan jenis kerentanan apa yang tidak pernah muncul di meja rapat karena dianggap tidak memenuhi syarat evidensial.

Model dalam kebijakan energi sering berupa persamaan matematika yang menghubungkan permintaan energi, kapasitas pembangkit, biaya investasi, dan emisi, lalu menghasilkan berbagai skenario. Di permukaan, *model* tampak seperti alat bantu netral untuk merapikan kompleksitas, padahal pilihan fungsi, parameter, dan asumsi di dalamnya mengandung preferensi nilai dan kepentingan tertentu. Ketika sebuah *model* mengoptimalkan sistem untuk menurunkan biaya jangka pendek, ia cenderung mengabaikan kerusakan sosial yang muncul pelan-pelan di wilayah proyek *energi terbarukan*. Istilah seperti *least-cost pathway* terdengar sangat rasional, tetapi jarang dijelaskan kepada publik bahwa "biaya" yang dimaksud biasanya hanya yang bisa dihitung dalam mata uang, sementara hilangnya ruang hidup, budaya lokal, atau pergeseran relasi

kekuasaan hampir selalu berada di luar persamaan dan karenanya menguap dari layar kebijakan.

Indikator dan indeks komposit merupakan bentuk lain dari tata bahasa kekuasaan. Ketika suatu negara diperingkat dalam *composite index* tentang transisi energi, ia ditempatkan dalam hierarki tertentu: siapa yang "maju", siapa yang "tertinggal", dan siapa yang menjadi contoh. Untuk membangun indeks, perancang harus memilih variabel, memberi bobot, dan menetapkan cara agregasi. Proses ini tampak teknis, tetapi sebenarnya menentukan mana aspek yang dianggap penting dan mana yang boleh diencerkan. Kajian mengenai *microgrids* menunjukkan bagaimana pemilihan indikator keandalan, biaya listrik, dan keamanan energi secara eksplisit memandu cara proyek dinilai berhasil atau gagal (Shahzad et al., 2023). Jika indikator finansial diberi bobot besar, sementara dimensi partisipasi warga dan kedaulatan lokal hanya menjadi catatan kualitatif, maka struktur insentif yang tercipta akan memihak proyek yang "rapi di atas kertas", meskipun menimbulkan ketegangan sosial di lapangan.

Masalahnya, indikator hampir selalu bekerja melalui reduksi: mengubah realitas multidimensi menjadi satu angka yang dapat dibandingkan lintas negara atau lintas waktu. Reduksi itu diperlukan agar birokrasi dapat mengambil keputusan cepat, tetapi ia juga menciptakan area buta struktural. Ketika indikator kinerja hanya menghitung kapasitas terpasang, faktor kapasitas, atau penurunan intensitas emisi, maka kerja perawatan sosial di komunitas, konflik internal keluarga, atau beban tambahan bagi kelompok rentan sama sekali tidak terlihat. Dalam situasi ini, komunitas yang terdampak tidak hanya kehilangan suara, tetapi bahkan kehilangan status sebagai "fakta" yang relevan. Mereka bisa menyampaikan testimoni, tetapi di hadapan angka indeks, kesaksian tersebut mudah dikategorikan sebagai keluhan

subjektif, bukan bukti yang sah. Di sinilah indikator berfungsi sebagai filter epistemik yang menentukan mana pengalaman yang layak masuk ke dokumen resmi.

Standar bukti, model, dan indikator kemudian menempel sangat kuat pada praktik sehari-hari *kebijakan energi*. Pejabat dan analis kebijakan mengandalkan skor, peringkat, dan dashboard untuk memantau kemajuan program; lembaga donor meminta matriks hasil yang dapat diukur; dan konsultan menyusun simulasi skenario untuk menunjukkan manfaat kebijakan tertentu. Dalam ekosistem seperti ini, bahasa angka menjadi syarat untuk diakui sebagai pembicara sah. Kelompok masyarakat sipil yang tidak punya sumber daya untuk menghasilkan studi kuantitatif berskala besar sering diposisikan sebagai "aktor normatif" yang wacananya penting tetapi tidak setara dengan "bukti". Akibatnya, prioritas kebijakan mudah bergeser mengikuti apa yang paling mudah diukur, bukan apa yang paling mendesak secara moral, misalnya perbaikan ketidakadilan historis atau pengakuan hak-hak komunitas yang termarjinalkan oleh pembangunan infrastruktur energi.

Dari sudut pandang epistemologi, kita dapat mengatakan bahwa tata bahasa kekuasaan ini bekerja melalui mekanisme eksklusi halus. Pertama, ia menetapkan format narasi yang sah: laporan statistik, *impact evaluation*, atau pemodelan skenario. Kedua, ia menyaring isi: hanya variabel yang bisa dinyatakan dalam angka tertentu yang dianggap relevan. Ketiga, ia mengatur pelaku: hanya mereka yang mampu beroperasi dengan bahasa teknis yang diberi posisi sebagai ahli. Dalam konteks energi berkelanjutan, hal ini berarti bahwa pengetahuan lokal, pengalaman perempuan, atau cara komunitas adat memaknai hubungan dengan tanah dan air sering tersingkir, bukan karena sengaja dihapus, tetapi karena tidak cocok dengan format bukti yang dipersyaratkan. Dengan

demikian, standar bukti bukan hanya soal kualitas informasi, melainkan juga perangkat yang menentukan siapa yang diundang dan siapa yang dikeluarkan dari ruang pengetahuan.

Karena itu, perdebatan tentang standar bukti dan indikator tidak boleh berhenti pada pertanyaan teknis tentang validitas dan reliabilitas, tetapi harus meluas ke pertanyaan normatif: standar bukti ini melayani nilai siapa. Di satu sisi, kita perlu menjaga integritas metodologis agar kebijakan tidak disandarkan pada klaim yang rapuh atau manipulatif. Namun di sisi lain, kita juga harus kritis terhadap monopoli satu jenis bukti, misalnya hanya *randomized controlled trial* atau hanya pemodelan optimasi, sebagai satu-satunya sumber kebenaran kebijakan. Yang dibutuhkan adalah ekologi bukti, di mana angka, narasi, studi kasus, dan pengalaman lived reality dapat saling mengoreksi dan memperkaya. Tanpa ekologi seperti ini, tata bahasa kekuasaan akan terus memihak pada aktor yang paling fasih dalam bahasa statistik dan ekonomi, meskipun mereka tidak selalu yang paling terdampak oleh keputusan energi.

Refleksi ini berujung pada pertanyaan politik yang sangat konkret: siapa yang harus terlibat dalam mendefinisikan standar bukti, merancang model, dan memilih indikator yang akan memandu *kebijakan pemerintah* di bidang energi berkelanjutan. Jika proses tersebut sepenuhnya diserahkan kepada komunitas teknokrat dan konsultan, maka buku aturan epistemik akan terus diproduksi secara tertutup dan direproduksi melalui proyek, laporan, serta skema pembiayaan. Sebaliknya, jika penyusunan standar bukti dipandang sebagai proses demokratis—di mana komunitas terdampak turut menentukan apa yang dianggap sebagai dampak relevan dan bagaimana ia seharusnya diukur—maka indikator dapat menjadi jembatan, bukan tembok, antara pengalaman warga dan logika kebijakan. Tantangan filosofisnya adalah merancang institusi dan proses yang memungkinkan negosiasi tersebut,

sehingga tata bahasa kekuasaan dalam energi berkelanjutan tidak lagi dimonopoli oleh satu bahasa, satu disiplin, atau satu kepentingan.

4.3 Arus Utama Baru: Keadilan Energi, Demokrasi Energi, dan Partisipasi

Arus utama baru dalam diskursus kebijakan energi berkelanjutan tidak lahir di ruang hampa; ia muncul dari kekecewaan panjang terhadap cara negara, pasar, dan pakar memonopoli definisi tentang apa yang disebut sebagai "bukti" yang sah. Di dalam kerangka ini, keadilan energi, demokrasi energi, dan partisipasi warga hadir sebagai koreksi epistemologis atas dominasi angka, model, dan skenario yang kerap menyingkirkan pengalaman hidup komunitas yang rentan dan terpinggirkan. Ketika *evidence-based policy*—yang secara sederhana berarti kebijakan yang mengklaim bersandar pada data dan penelitian—diangkat menjadi satu-satunya standar rasionalitas, maka bahasa kekuasaan berubah: hanya mereka yang menguasai statistik, pemodelan, atau istilah teknis yang dianggap layak berbicara di meja perundingan. Subbagian ini mengupas bagaimana tiga arus utama tersebut membuka ruang baru untuk menilai kembali siapa yang boleh mendefinisikan masalah, serta bukti macam apa yang diakui sah dalam perdebatan tentang masa depan energi di berbagai konteks nasional dan lokal.

Gagasan keadilan energi sering dipahami melalui tiga dimensi: distribusi manfaat dan beban, prosedur pengambilan keputusan, dan pengakuan terhadap kelompok yang selama ini tak terdengar. Secara sederhana, *energy justice* adalah cara untuk bertanya: siapa yang menikmati listrik murah dan siapa yang menanggung polusi, relokasi paksa, atau konflik sosial yang menyertai pembangunan infrastruktur besar. Dalam praktik, rezim bukti yang dominan masih bertumpu pada indikator

teknis seperti efisiensi, biaya pembangkitan, atau reliabilitas jaringan, sementara peta kemiskinan energi dan cerita komunitas pedesaan hanya menjadi lampiran yang jarang dibahas dalam rapat kebijakan. Penelitian tentang transisi rendah karbon di komunitas pedesaan Wales, misalnya, menunjukkan bagaimana ruang dengan sumber daya angin yang melimpah justru tetap terjebak dalam posisi "pinggiran energi" karena keterbatasan daya tawar politik (O'Sullivan et al., 2020). Contoh semacam ini menegaskan bahwa keadilan energi selalu terkait dengan distribusi kekuasaan, bukan sekadar distribusi infrastruktur fisik yang tampak di permukaan.

Jika keadilan energi menyoroti pertanyaan "siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan", maka fokus berikutnya adalah bagaimana ekspansi energi terbarukan sering kali dipresentasikan sebagai kemenangan otomatis bagi semua pihak. Di tingkat wacana, penambahan kapasitas surya atau angin dalam gigawatt sering dirayakan sebagai keberhasilan moral dan teknis, tanpa secara serius menelaah siapa yang memiliki lahan, siapa yang mendapatkan saham, dan siapa yang hanya menjadi latar belakang lanskap proyek yang berubah drastis. Dalam banyak kasus, data yang dihadirkan hanya menonjolkan besarnya pengurangan emisi dan penurunan biaya listrik rata-rata, sementara ketegangan sosial di tingkat lokal direduksi menjadi "tantangan implementasi" yang bersifat teknis dan bisa diatasi dengan komunikasi. Pertanyaannya, ketika standar keberhasilan ditentukan oleh indikator makro tersebut, apakah suara warga yang kehilangan akses terhadap ruang hidup dan budaya lokal masih dapat diakui sebagai bukti yang relevan, sah, dan layak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan kolektif yang mengikat mereka?

Demokrasi energi memperluas kritik ini dengan menggeser fokus dari sekadar apa jenis teknologi yang digunakan menuju siapa yang mengendalikannya dan untuk

tujuan apa kekuasaan itu dijalankan. Secara ringkas, *energy democracy* adalah gagasan bahwa warga bukan hanya konsumen listrik, tetapi juga pemilik, perencana, dan pengawas sistem energi di wilayah mereka sendiri. Dalam wacana resmi, demokrasi energi sering dikaitkan dengan partisipasi publik, konsultasi, dan skema kepemilikan komunitas yang tampak inklusif. Namun, di balik istilah yang tampak progresif itu, tata bahasa bukti tetap didominasi oleh studi kelayakan teknis, analisis biaya-manfaat, dan perhitungan risiko finansial yang dirancang untuk menjamin kenyamanan investor besar. Studi tentang desentralisasi kelistrikan di beberapa negara Eropa menunjukkan bagaimana komunitas energi lokal berusaha menggeser struktur kekuasaan, tetapi menghadapi resistensi kuat dari pemilik infrastruktur dan regulator yang mengendalikan definisi risiko dan "rasionalitas" kebijakan (Brisbois, 2020). Di sini tampak jelas bahwa demokrasi energi juga merupakan pertempuran atas apa yang diakui sebagai pengetahuan yang sah dan layak dijadikan dasar kebijakan.

Sementara itu, partisipasi warga kerap direduksi menjadi prosedur konsultasi yang hanya mengundang komentar setelah semua keputusan besar diambil dan diformalkan dalam dokumen resmi. Di banyak negara, regulasi mewajibkan adanya dengar pendapat publik, forum konsultasi, atau mekanisme pengaduan sebelum proyek energi besar disetujui oleh pemerintah. Pada tingkat permukaan, format ini tampak demokratis dan memberikan kesan bahwa warga telah dilibatkan sejak awal, meskipun sebenarnya tidak demikian. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, bentuk-bentuk partisipasi ini sering kali hanya mengizinkan warga menanggapi dokumen teknis yang sangat kompleks, penuh istilah seperti *levelized cost of electricity* atau *capacity factor* yang bagi pembaca awam memerlukan penjelasan panjang tentang biaya rata-rata sepanjang umur pembangkit dan seberapa sering pembangkit

beroperasi dalam setahun. Alhasil, partisipasi dipraktikkan sebagai komentar terhadap paket kebijakan yang sudah hampir final, bukan sebagai ruang ko-produksi pengetahuan yang mengubah arah dan isi kebijakan tersebut secara substantif.

Dalam konteks tersebut, rezim kebijakan energi modern banyak bergantung pada instrumen teknokratis seperti studi kelayakan, analisis risiko, dan evaluasi dampak lingkungan yang sering disusun oleh konsultan spesialis dengan bahasa yang sulit diakses. Di satu sisi, instrumen ini penting untuk mengurangi ketidakpastian dan mengukur konsekuensi keputusan, serta memberi gambaran kemungkinan kerugian finansial bila suatu proyek gagal atau tertunda. Namun di sisi lain, mereka membakukan bahasa tertentu tentang risiko, manfaat, dan biaya, yang tidak selalu sejalan dengan cara komunitas memahami kerentanan atau harapan mereka terhadap masa depan yang layak dihuni. Ketika kerangka pikir yang dominan hanya mengakui risiko finansial dan teknis, misalnya, kerusakan relasi sosial, hilangnya ruang budaya, atau perubahan cara hidup di desa-desa sekitar proyek kerap tidak masuk tabel. Dengan demikian, kebijakan energi tampak netral dan rasional di atas kertas, padahal ia memuat pilihan-pilihan nilai yang menguntungkan sebagian aktor dan merugikan yang lain secara sistematis dan berulang.

Contoh lain yang penting datang dari pengalaman negara berkembang yang menghadapi kombinasi tekanan krisis iklim, kebutuhan pembangunan, dan ketimpangan sosial yang masih dalam dan berlapis-lapis. Di Indonesia, misalnya, agenda transisi menuju sistem energi yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim menuntut penguatan interkoneksi antara resiliensi infrastruktur, kapasitas energi bersih, dan kebijakan pembiayaan yang inklusif untuk kelompok rentan yang sering terlewat. Kajian terbaru menunjukkan bahwa strategi transisi yang efektif mensyaratkan desain kebijakan yang mampu

menghubungkan target emisi jangka panjang dengan mekanisme dukungan bagi proyek berbasis komunitas, termasuk model desentralisasi dan sistem energi skala kecil yang dekat dengan warga (Setiawan et al., 2025). Dalam logika ini, bukti tidak lagi dipahami semata sebagai proyeksi makro emisi atau konsumsi, melainkan juga sebagai pengetahuan lokal tentang kerentanan, kemampuan adaptasi, dan inovasi sosial yang dimiliki komunitas yang selama ini jarang dianggap sebagai pakar meski merekalah yang menanggung risiko pertama.

Di tingkat global, arus keadilan energi, demokrasi energi, dan partisipasi kini saling bersilangan dan menantang cara lembaga internasional mendefinisikan transisi berkelanjutan yang dianggap sah dan ilmiah. Laporan dan peta jalan transisi yang selama ini didominasi oleh skenario teknologi kini dipertanyakan karena sering mengabaikan konflik lahan, ketidakadilan antargenerasi, serta suara masyarakat adat dan komunitas pesisir yang terlantar. Di Amerika Latin, misalnya, ekspansi pembangkit besar yang diklaim ramah lingkungan justru memicu perlawanan karena merusak sungai dan wilayah sakral, sementara di Eropa dan Asia, proyek angin lepas pantai maupun jaringan transmisi menimbulkan kontroversi serupa yang berulang dari satu negara ke negara lain. Pola berulangnya adalah cara "bukti" tentang manfaat global digunakan untuk membungkam atau mengerdilkan klaim keadilan lokal yang dianggap mengganggu kelancaran investasi. Ketegangan inilah yang mendorong munculnya koalisi transnasional yang membawa bahasa keadilan energi ke forum-forum iklim internasional dan memaksa pembuat kebijakan mengkaji ulang standar bukti yang mereka gunakan.

Dengan demikian, arus utama baru ini menggeser fokus epistemologi bukti dari pertanyaan "seberapa cepat kita dapat menambah kapasitas energi terbarukan" menjadi "siapa yang

menentukan arah, tempo, dan distribusi manfaat transisi tersebut" di setiap konteks politik yang spesifik. Keadilan energi menuntut pembongkaran hierarki pengetahuan yang selama ini menempatkan model matematis di puncak dan pengalaman warga di dasar, seolah-olah yang kedua hanya pelengkap naratif yang bisa diabaikan. Demokrasi energi mengajak kita memahami bahwa desain institusi, pola kepemilikan, dan bentuk partisipasi adalah medan kuasa, bukan sekadar urusan teknis yang netral dan bebas nilai. Partisipasi yang bermakna menuntut ruang bagi warga untuk turut mendefinisikan apa yang dianggap sebagai masalah dan bukti yang relevan, bukan sekadar mengomentari naskah kebijakan yang telah selesai diputuskan. Jika tuntutan-tuntutan ini diabaikan, maka transisi energi akan tetap berwajah hijau tetapi berjiwa lama: modern secara teknologi, tetapi usang secara keadilan dan demokrasi sosial bagi generasi sekarang maupun mendatang.

4.4 Dari Bukti ke Keputusan: Bagaimana Epistemologi Membatasi Imajinasi Kebijakan

Kapan sebuah temuan ilmiah mulai dihitung sebagai "bukti" yang relevan untuk keputusan publik, dan kapan ia hanya dianggap sebagai "informasi pendukung" yang boleh diabaikan, adalah pertanyaan epistemologis, bukan sekadar teknis. Di balik istilah *evidence-based policy* yang tampak netral, selalu ada pilihan tentang jenis data apa yang dikumpulkan, model apa yang digunakan, serta horizon waktu apa yang dianggap relevan. Epistemologi bukti, dengan demikian, adalah cara kita mengatur hirarki pengetahuan: mana yang ditempatkan di puncak sebagai dasar keputusan, mana yang didegradasi menjadi catatan kaki. Dalam kebijakan iklim, pilihan ini sangat menentukan: apakah yang dianggap bukti utama adalah proyeksi emisi berbasis model iklim, studi biaya–manfaat jangka pendek, atau narasi komunitas tentang kehilangan ruang

hidup. Ketika buku ini berbicara tentang "dari bukti ke keputusan", yang dipertanyakan bukan hanya kualitas data, tetapi struktur pengetahuan yang mengurutkan data menjadi bukti dan bukti menjadi dasar keputusan yang tampak wajar.

Pertanyaan menjadi lebih rumit ketika kita menyadari bahwa banyak kategori teknis yang digunakan dalam tata kelola iklim lahir dari kompromi politik, bukan dari kesepakatan ilmiah yang tunggal. Perdebatan seputar definisi dan *accounting* pembiayaan iklim, misalnya, menunjukkan bagaimana angka-angka yang tampak objektif sebenarnya dibentuk oleh pilihan tentang apa yang dihitung, bagaimana dihitung, dan siapa yang berhak menghitung. Shishlov dan Censkowsky (2022) menunjukkan bahwa tidak adanya definisi tunggal "climate finance" membuat berbagai aktor dapat mengklaim kemajuan yang berbeda-beda terhadap target yang sama, semata-mata karena perbedaan metode pencatatan dan pelabelan aliran dana. Ketika angka-angka ini kemudian menjadi dasar negosiasi internasional dan rancangan kebijakan nasional, epistemologi bukti secara diam-diam menjadi epistemologi kekuasaan: siapa yang menentukan definisi, ia ikut menentukan realitas yang dipandang sah.

Dalam bidang energi, pergeseran dari data ke keputusan sering terjadi melalui bahasa teknis yang menyembunyikan dimensi normatif di balik angka dan model. Ketika *scenario* dekarbonisasi menyajikan berbagai lintasan emisi, misalnya, selalu ada asumsi implisit tentang laju penetrasi teknologi, pola konsumsi, dan distribusi biaya yang akan ditanggung rumah tangga atau industri. Di sini, *evidence* bukan hanya cerminan masa depan, tetapi cara membingkai apa yang dianggap mungkin, wajar, atau bisa diterima secara politik. Di banyak negara, investasi besar-besaran dalam energi fosil masih bisa dibenarkan dengan mengacu pada proyeksi permintaan dan analisis biaya yang mengabaikan nilai non-pasar seperti

kesehatan, budaya, dan keutuhan ekologi, sementara skenario yang lebih ambisius untuk energi terbarukan sering disisihkan sebagai "terlalu spekulatif". Dalam konteks seperti itu, jurang antara bukti dan keputusan adalah jurang antara imajinasi teknokratis dan imajinasi etis.

Salah satu mekanisme utama yang mempersempit imajinasi kebijakan adalah cara standar bukti didefinisikan secara sempit, seolah hanya metode kuantitatif tertentu yang layak menjadi dasar keputusan. Ketika uji statistik, *cost–effectiveness analysis*, atau model ekonomi makro ditempatkan sebagai "emas standar" bukti, bentuk pengetahuan lain—seperti pengalaman komunitas terdampak atau pengetahuan lokal—sering didorong ke pinggir, dianggap "anekdotal" dan tidak cukup kuat. Padahal istilah seperti *robustness* atau *significance* dalam ilmu statistik hanya berarti bahwa temuan tersebut stabil terhadap variasi asumsi tertentu, bukan bahwa ia menangkap seluruh kebenaran moral dari sebuah situasi. Begitu hanya jenis bukti inilah yang diakui, maka kebijakan yang melindungi kelompok rentan, komunitas adat, atau ekosistem rapuh dapat tersingkir karena tidak bisa "dibuktikan" dalam format yang diakui oleh birokrasi.

Batas epistemologis itu semakin mengeras ketika lembaga internasional, kementerian, dan lembaga riset mengadopsi seperangkat indikator standar sebagai tata bahasa global untuk menilai kinerja iklim dan energi. Indikator memudahkan perbandingan antarnegara, tetapi sekaligus memaksa kompleksitas dunia nyata dimampatkan ke dalam beberapa angka kunci: intensitas emisi, porsi energi bersih, atau rupiah per ton CO_2 yang dihindari. Di satu sisi, indikator semacam ini membantu mengarahkan sumber daya dan mengukur kemajuan. Namun di sisi lain, apa yang tidak terukur dengan mudah—seperti rasa kehilangan, putusnya hubungan spiritual dengan tanah, atau hilangnya martabat ketika komunitas hanya

dijadikan "lokasi proyek"—menjadi tidak terlihat dalam panel pengambilan keputusan. Di titik ini, epistemologi bukti bukan lagi sekadar teori pengetahuan, tetapi perangkat seleksi yang menentukan siapa dan apa saja yang dapat diucapkan di meja kebijakan.

Ketika indikator dan model tersebut kemudian diterjemahkan menjadi rancangan kebijakan energi di tingkat nasional, proses translasi itu jarang bersifat netral. Angka-angka proyeksi permintaan dan suplai, misalnya, sering digunakan untuk menjustifikasi pilihan teknologi tertentu atau struktur tarif yang menguntungkan kelompok konsumen tertentu. Di sini, "keterbatasan fiskal" atau "keterjangkauan tarif" sering dikutip sebagai alasan untuk menunda transisi atau membatasi skala program perlindungan kelompok miskin, padahal batas-batas tersebut bersifat politis dan dapat dinegosiasikan. Dengan cara ini, kebijakan energi mengkristal sebagai hasil dari serangkaian keputusan epistemologis: asumsi tentang elastisitas permintaan, tentang risiko teknologi baru, dan tentang nilai masa depan yang didiskonto. Semakin sempit horizon pengetahuan yang digunakan, semakin sempit pula ruang untuk membayangkan konfigurasi institusional yang lebih adil.

Di tingkat global, imajinasi kebijakan juga dibatasi oleh cara proses negosiasi diatur dan siapa yang diberi hak untuk mengklaim bicara atas nama "bukti". Konferensi Para Pihak (COP) telah berkembang menjadi *mega-events* dengan partisipasi aktor non-negara dalam jumlah besar, namun kualitas keterlibatan mereka sangat bervariasi. Walker dan Groen (2025) menunjukkan bagaimana meningkatnya skala COP menciptakan persaingan ketat untuk ruang keterlibatan, sehingga banyak organisasi masyarakat sipil hanya hadir sebagai latar simbolik tanpa kesempatan bermakna untuk mempengaruhi jalannya perundingan. Ketika akses terhadap forum-formal ini menjadi prasyarat untuk mendefinisikan apa

yang dihitung sebagai bukti sah, kelompok-kelompok yang tidak mampu hadir—karena biaya, bahasa, atau status politik—secara epistemik tersingkir dari arena pengetahuan global.

Dari perspektif filsafat ilmu, pola-pola ini mengingatkan bahwa yang disebut *evidence* selalu dibentuk oleh rezim kepercayaan tertentu tentang apa itu pengetahuan yang baik, siapa yang dipercaya sebagai ahli, dan bagaimana ketidakpastian diperlakukan. Jika hanya bukti yang sesuai dengan format tertentu—misalnya laporan teknis berbahasa Inggris dengan model matematis rumit—yang diakui, maka epistemologi itu secara diam-diam mendefinisikan batas imajinasi kebijakan: hanya solusi yang cocok dengan format tersebut yang dianggap mungkin. Sebaliknya, ketika epistemologi dibuka untuk mengakui bentuk-bentuk pengetahuan lain, termasuk narasi historis, testimoni komunitas, dan praktik-praktik lokal, maka spektrum opsi kebijakan dapat meluas. Ini tidak berarti menolak sains, tetapi mengakui bahwa sains selalu beroperasi dalam kerangka nilai dan institusi yang perlu dikritisi secara reflektif.

Dengan demikian, perjalanan dari bukti ke keputusan dalam tata kelola iklim tidak boleh dibayangkan sebagai jalur lurus dari laboratorium ke meja menteri. Di dalamnya terdapat serangkaian gerbang epistemik yang menyaring data, mengubahnya menjadi indikator, dan menyusun indikator itu menjadi argumen tentang apa yang harus dilakukan oleh kebijakan pemerintah. Jika gerbang-gerbang ini diatur secara sempit oleh kepentingan tertentu, atau oleh definisi "rasionalitas" yang hanya mengakui efisiensi ekonomi jangka pendek, maka imajinasi kebijakan akan terkunci dalam koridor sempit yang menormalkan ketidakadilan dan ketimpangan. Sebaliknya, bila epistemologi bukti dikritisi dan diperluas—dengan mengakui ketidakpastian, membuka ruang bagi suara yang terpinggirkan, dan menantang indikator yang

membungkam pengalaman konkret—maka bukti dapat menjadi titik berangkat bagi imajinasi baru tentang tata kelola energi terbarukan yang lebih adil, bukan sekadar alat pembenaran keputusan yang sudah diambil.

Bagian II
Arsitektur Wacana
&
Metafora Kebijakan

5 *Net–Zero* sebagai Wacana: Target sebagai Konstruksi Epistemik dan Alat Koordinasi Politik

5.1 Asal-usul dan Difusi Wacana *Net-Zero*

Wacana *net-zero* dalam iklim global muncul sebagai jawaban singkat terhadap pertanyaan kompleks: sampai sejauh mana umat manusia harus menurunkan emisi agar krisis iklim tidak lepas kendali. Alih-alih hanya berbicara tentang pengurangan bertahap, istilah ini menawarkan gambaran sederhana namun kuat: pada titik tertentu, jumlah emisi yang kita lepaskan ke atmosfer harus diseimbangkan dengan jumlah yang diserap kembali oleh hutan, tanah, laut, atau teknologi penyerap karbon. Di permukaan, *net-zero* tampak sebagai konsep teknis yang lahir dari kalkulasi ilmiah tentang anggaran karbon. Namun jika ditelusuri genealoginya, istilah ini merupakan konstruksi epistemik yang menyatukan berbagai disiplin—ilmu iklim, ekonomi, teknologi, dan politik—ke dalam satu angka target yang dapat dinegosiasikan di meja diplomasi. Dengan kata lain, *net-zero* tidak hanya menyatakan kondisi fisik sistem Bumi, tetapi juga menetapkan horizon moral dan politis tentang kapan "tanggung jawab" dianggap terpenuhi.

Dalam literatur ilmiah, gagasan masyarakat karbon netral sudah berkembang sebelum istilah *net-zero* menjadi slogan resmi diplomasi. Berbagai tinjauan kebijakan dan teknologi menunjukkan bahwa strategi menuju masyarakat karbon netral mencakup bauran dekarbonisasi sistem energi, perubahan pola konsumsi, serta pengembangan teknologi serapan karbon seperti *carbon capture and storage* dan solusi berbasis alam. Salah satu ulasan komprehensif menegaskan bahwa rencana

carbon neutral society selalu menggabungkan pengurangan emisi di hulunya dengan pengelolaan siklus hidup emisi hingga ke hilir, termasuk tata kelola analisis daur hidup sebagai alat penilaian (Chen et al., 2022). Dalam konteks ini, *net-zero* berfungsi sebagai payung yang merangkum beragam pendekatan tersebut dan menerjemahkannya ke dalam bahasa target kebijakan yang bisa diadopsi oleh negara, kota, maupun sektor bisnis, meskipun perbedaan kapasitas dan kepentingan di antara mereka sangat besar.

Wacana *net-zero* menjadi arus utama saat komunitas ilmiah dan diplomasi iklim berupaya menjembatani hasil-hasil laporan ilmiah dengan struktur negosiasi global. Laporan ilmiah mengenai anggaran karbon untuk menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5°C atau 2°C memberikan basis teknis bagi penetapan tahun sasaran, seperti 2050 atau lebih cepat, yang kemudian dikaitkan dengan transformasi sistem energi menuju dominasi energi terbarukan. Di sinilah istilah tersebut bekerja sebagai "kata kunci" yang mengunci hubungan antara sains dan politik: ia mengemas temuan kompleks menjadi formula tunggal yang dapat disisipkan dalam perjanjian internasional, dokumen strategi jangka panjang, dan rencana kontribusi nasional. Bagi banyak politisi, menyatakan komitmen *net-zero* menjadi cara relatif mudah untuk menunjukkan keseriusan iklim tanpa harus langsung memperinci jalur transisi, konflik distribusi, ataupun konsekuensi sosial-ekonomi yang akan ditanggung kelompok paling rentan.

Difusi wacana *net-zero* tidak berhenti pada negara, tetapi dengan cepat merembes ke kota-kota besar, perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan bahkan universitas. Berbagai koalisi sukarela dibentuk untuk mendorong aktor non-negara mengumumkan target *net-zero* mereka sendiri, sering kali dengan horizon waktu yang selaras, seperti 2050 atau lebih awal. Secara normatif, hal ini mencerminkan pengakuan bahwa

tanggung jawab iklim tidak bisa lagi dipusatkan hanya pada negara; aktor-aktor ekonomi dan sosial lainnya juga memiliki peran besar. Namun, ekspansi ini memiliki sisi gelap: semakin banyak aktor yang mengklaim akan mencapai *net-zero*, semakin besar pula risiko bahwa istilah tersebut berubah menjadi label reputasi yang longgar, tanpa kejelasan mengenai cakupan emisi, ketergantungan pada kredit karbon, dan tingkat pengurangan absolut yang akan ditempuh. Dengan demikian, difusi wacana ini berjalan beriringan dengan difusi potensi *greenwashing*.

Di arena diplomasi, fase penting difusi wacana *net-zero* terjadi ketika konferensi iklim PBB menjadikannya titik fokus pembahasan, terutama setelah Paris Agreement dan diperkuat dalam proses *global stocktake* yang pertama. Pertemuan puncak di Dubai (COP28) menjadi momen di mana hasil peninjauan global terhadap kemajuan penanganan pemanasan global menunjukkan ketidaksesuaian antara target dan aksi, sekaligus menegaskan kembali perlunya perencanaan transisi yang lebih konkret di berbagai sektor (Darby et al., 2024). Dalam proses ini, *net-zero* bukan sekadar kata dalam pidato, tetapi juga menjadi kategori evaluasi: negara dan kelompok aktor dibandingkan berdasarkan keberadaan, kredibilitas, dan detail target mereka. Wacana tersebut dengan demikian mengatur siapa yang digambarkan sebagai "pelopor", siapa yang tertinggal, dan siapa yang dianggap menghambat upaya kolektif, meski kriteria penilaian tersebut sendiri diperdebatkan dan sarat kepentingan.

Di tingkat nasional, *net-zero* kemudian diartikulasikan ulang dalam bahasa yang lebih operasional sebagai strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon dan rencana sektor per sektor. Perumusan *kebijakan energi* menjadi salah satu arena utama penerjemahan ini: target sistem kelistrikan bebas emisi, bauran energi bersih, serta penghentian bertahap pembangkit fosil dirumuskan sebagai langkah-langkah menuju tahun sasaran tertentu. Namun, cara target ini dijabarkan sangat

dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politik domestik. Negara dengan ketergantungan besar pada bahan bakar fosil cenderung menyisipkan penekanan kuat pada teknologi serapan karbon atau skema offset, sementara negara dengan kapasitas teknologi tinggi lebih berani menjanjikan pengurangan absolut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa di balik keseragaman istilah *net-zero*, terdapat pluralitas jalur transisi yang mencerminkan distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kemampuan tawar dalam sistem internasional.

Difusi wacana *net-zero* juga melahirkan arsitektur kelembagaan baru yang mengatur standar dan kredibilitas klaim. Berbagai inisiatif menetapkan kriteria bagi target yang dianggap "ilmiah selaras", misalnya mensyaratkan tingkat dekarbonisasi tertentu sebelum penggunaan offset dan pembatasan ketergantungan pada teknologi serapan yang belum matang. Di sisi lain, lembaga-lembaga keuangan dan regulator pasar modal mulai menghubungkan komitmen *net-zero* dengan akses pembiayaan, risiko portofolio, dan kewajiban pelaporan. Bagi pembaca awam, ini berarti bahwa klaim iklim tidak lagi berhenti pada retorika; ia diukur, diaudit, dan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, standar-standar ini tidak selalu disusun secara demokratis: sering kali ia lahir dari koalisi lembaga internasional, korporasi besar, dan pakar teknis, dengan keterlibatan terbatas dari komunitas yang terdampak langsung oleh pembangunan proyek energi dan perubahan tata ruang di tingkat lokal.

Di luar sektor energi, wacana *net-zero* kini menyeberang ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Komitmen sistem kesehatan untuk mencapai *net-zero*, misalnya, memperlihatkan bagaimana isu iklim dipadukan dengan agenda perlindungan kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara dengan kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim (Blom et al., 2025). Dalam kasus tersebut, *net-*

zero menjadi kerangka untuk menata ulang infrastruktur, rantai pasok, dan pola konsumsi energi di rumah sakit serta fasilitas kesehatan, bukan hanya simbol komitmen abstrak. Difusi lintas sektor ini menjadikan *net-zero* semacam bahasa umum yang menghubungkan berbagai aktor yang sebelumnya tidak banyak terlibat dalam diskursus iklim, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prioritas sosial—seperti pemerataan akses layanan dasar—diimbangi dengan tuntutan dekarbonisasi cepat yang memerlukan investasi besar dan perubahan kelembagaan yang signifikan.

Seiring meluasnya penggunaan istilah tersebut, *net-zero* kian berfungsi sebagai alat koordinasi politik lintas skala: dari perjanjian global hingga kebijakan lokal, dari rencana investasi multinasional hingga proyek komunitas yang mempromosikan energi terbarukan di desa-desa terpencil. Kelebihan utama konsep ini adalah kemampuannya menyatukan berbagai komitmen ke dalam horizon waktu yang sama, sehingga memungkinkan perbandingan dan pemantauan lintas aktor. Namun koordinasi ini memiliki harga epistemik: fokus tajam pada satu angka target cenderung menyingkirkan perdebatan tentang jalur alternatif yang mungkin lebih adil tetapi kurang "efisien" menurut model ekonomi. Di sini terlihat bahwa *net-zero* dapat menyatukan, tetapi juga menyeragamkan cara berpikir tentang masa depan, membuat variasi jalur transisi yang berpusat pada komunitas atau keadilan sejarah tampak seperti penyimpangan dari norma global yang sudah mengakar.

Secara genealogis, wacana *net-zero* dapat dipahami sebagai evolusi dari berbagai upaya sebelumnya untuk mengikat negara dan aktor lain pada komitmen angka—mulai dari target pengurangan emisi relatif, intensitas emisi, hingga batas suhu global. Keunggulannya terletak pada kemudahan komunikasi: publik mungkin kesulitan memahami detail ton CO_2 atau gigawatt kapasitas terpasang, tetapi dapat menangkap

gagasan bahwa suatu negara atau perusahaan akan menghentikan kontribusi bersihnya terhadap pemanasan global pada tahun tertentu. Kelemahan utamanya, bagaimanapun, adalah kecenderungan untuk menyederhanakan dinamika kekuasaan, distribusi, dan waktu ke dalam narasi "semua akan nol pada waktunya". Dalam bentuk paling buruk, ini bisa memicu penundaan aksi sekarang sambil bertumpu pada janji teknologi masa depan dan skema kompensasi yang belum jelas landasan etis maupun teknisnya.

Membaca asal-usul dan difusi wacana *net-zero* sebagai konstruksi epistemik dan alat koordinasi politik membantu kita memahami mengapa istilah ini begitu cepat mendominasi perdebatan publik, sekaligus mengapa begitu banyak konflik dan kecurigaan mengelilinginya. Ia lahir dari kombinasi kebutuhan ilmiah, diplomatik, dan komunikatif, lalu menyebar melalui jaringan institusi global, korporasi, dan kebijakan nasional yang saling memantulkan legitimasinya. Subbagian ini menjadi pintu masuk untuk bagian-bagian berikutnya dalam buku ini, yang akan mengurai bagaimana metafora, target, dan indikator bekerja bersama sebagai arsitektur wacana yang membentuk batas imajinasi tentang apa yang mungkin, wajar, dan dapat diterima dalam kebijakan energi. Dengan demikian, *net-zero* harus dibaca bukan hanya sebagai tujuan teknis, tetapi sebagai ekspresi dari tatanan pengetahuan dan kekuasaan yang sedang dipertaruhkan dalam proyek besar transisi iklim abad ke-21.

5.2 Net-Zero sebagai Konstruksi Epistemik: Angka, Skenario, dan Model Iklim

Net-zero sering dibayangkan sebagai titik tujuan yang jelas: suatu tahun tertentu ketika emisi gas rumah kaca disamakan dengan penyerapan, seolah-olah ada garis finish yang objektif dan tak terbantahkan. Namun, jika dilihat dari

kacamata epistemologi, angka net-zero selalu lahir dari rangkaian pilihan teoretis, asumsi, dan teknik pemodelan tertentu. Para pemodel harus memutuskan apa yang dihitung sebagai emisi, apa yang diakui sebagai penyerapan, dan sejauh mana sektor tertentu—seperti industri, transportasi, atau pertanian—diizinkan terus memancarkan. Dengan kata lain, "nol bersih" bukan sekadar kondisi iklim, melainkan konstruksi pengetahuan yang disusun melalui kompromi ilmiah, politik, dan ekonomi. Di dalam konstruksi itu, masa depan dipaksa mengikuti logika skenario: jalan A, B, atau C menuju angka tertentu, masing-masing dengan kombinasi teknologi, perubahan perilaku, dan pengaturan kelembagaan yang berbeda.

Di balik wacana net-zero, terdapat dunia *models* dan *scenarios* yang sering hanya diketahui oleh komunitas ahli, tetapi dampaknya menjangkau sampai ke petani, buruh, nelayan, dan warga kota. *Integrated assessment models* adalah jenis model yang menggabungkan informasi tentang ekonomi, energi, dan sistem iklim untuk menghitung lintasan emisi yang konsisten dengan sasaran suhu global. Secara sederhana, model ini adalah kalkulator raksasa yang menghubungkan pilihan teknologi dan kebijakan hari ini dengan risiko iklim di masa depan. Namun, kalkulator ini tidak netral: parameter seperti harga karbon, laju difusi teknologi, atau batas penggunaan lahan selalu merefleksikan pandangan tertentu tentang apa yang "masuk akal" secara politik dan apa yang "diterima" secara ekonomi. Di titik ini, net-zero sudah menjadi bahasa kekuasaan, bukan hanya bahasa sains.

Skenario net-zero hampir selalu mengandaikan percepatan dramatis dalam pembangunan *energi terbarukan*, dari pembangkit listrik tenaga surya dan angin hingga berbagai bentuk biomassa dan panas bumi. Di atas kertas, model dapat dengan mudah menaikkan kapasitas teknologi-teknologi ini,

memindahkan angka dari satu kolom ke kolom lain sampai grafik emisi tampak menurun sesuai target. Namun dalam kenyataan, setiap turbin angin dan panel surya beroperasi di lahan konkret, sistem jaringan listrik tertentu, rezim regulasi spesifik, dan relasi sosial yang kompleks. Ketika skenario menulis bahwa porsi *energi terbarukan* harus "dilipatgandakan" dalam dua dekade, itu berarti juga pelipatgandaan konflik tata ruang, sengketa perizinan, dan negosiasi ulang dengan komunitas lokal. Di sinilah konstruksi epistemik net-zero bertemu dengan politik material yang jauh dari steril.

Dalam konteks ini, menarik bahwa sebagian studi terkini mencoba mengurai tantangan transisi rendah karbon justru melalui pendekatan pemodelan alternatif yang menonjolkan ketidakpastian dan konflik nilai. Saraji dan Streimikiene, misalnya, memetakan tantangan transisi rendah karbon dengan *intuitionistic fuzzy cognitive maps* dan metode *TOPSIS*, lalu menunjukkan bagaimana skenario yang berbeda—"people first", "technology first", dan "duet"—menghasilkan prioritas kebijakan yang tidak sama (Saraji & Streimikiene, 2024). Jika dijelaskan secara sederhana, pendekatan ini adalah cara sistematis untuk menimbang banyak faktor yang saling bertentangan—biaya, resistensi sosial, risiko teknologi—tanpa memaksa semuanya ke satu angka tunggal. Dari sini terlihat bahwa keputusan tentang skenario bukan hanya soal "ilmu terbaik", tetapi soal pilihan etis: siapa yang diutamakan, siapa yang diminta menanggung risiko, dan siapa yang boleh menunda pengurangan emisi.

Angka-angka net-zero juga menciptakan hirarki urgensi dan rasionalitas tertentu. Target seperti "net-zero 2050" atau "pengurangan 43 persen pada 2030" bukan sekadar statistik, melainkan penanda moral yang dapat dipakai untuk menilai apakah suatu negara "serius" atau "tidak serius". Di dalam model, garis waktu dan laju penurunan emisi terlihat sebagai

kurva mulus, padahal di dunia sosial ia berarti penutupan pabrik tertentu lebih cepat, konversi lahan yang lebih agresif, atau perubahan tarif listrik yang memengaruhi rumah tangga miskin. Ketika hanya target agregat yang dibicarakan di forum internasional, dimensi keberagaman konteks lokal dan ketidaksetaraan historis menjadi tak terlihat. Di sinilah kekuatan wacana net-zero bekerja: ia menyatukan semua pihak dalam bahasa yang sama, tetapi sekaligus menyamarkan fakta bahwa kapasitas masing-masing pihak untuk memenuhi angka itu sangat berbeda.

Pada saat yang sama, konstruksi epistemik net-zero menetes ke ranah *kebijakan energi* nasional dan subnasional. Target agregat yang awalnya ditetapkan pada level perjanjian iklim global dipecah menjadi bauran teknologi, kerangka regulasi, dan skema pembiayaan yang sangat spesifik: berapa banyak pembangkit batu bara yang harus dipensiunkan, berapa kuota energi terbarukan yang diwajibkan, dan seberapa cepat berbagai sektor diwajibkan beralih ke listrik atau bahan bakar rendah karbon. Dalam proses translasi ini, model dan skenario sering menjadi rujukan utama bagi birokrat dan konsultan ketika menyusun *roadmap* nasional. Mereka menggunakan hasil proyeksi untuk menentukan urutan langkah: mana yang "pantas" dilakukan dalam lima tahun pertama, mana yang boleh ditunda. Dengan demikian, model tidak hanya memotret masa depan, tetapi juga memerintahkan institusi untuk bergerak mengikuti jalur yang dianggap paling "rasional".

Karena net-zero didukung oleh otoritas ilmiah, ia bisa dengan mudah menyingkirkan bentuk pengetahuan lain yang lebih kontekstual. Pengalaman komunitas yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur energi, pengetahuan lokal tentang ekosistem, atau intuisi politik para aktivis akar rumput sering kali dianggap "anecdotal" bila sulit dimasukkan ke dalam struktur model. Ketika hanya hasil simulasi yang diposisikan

sebagai bukti sahih, epistemologi net-zero menciptakan semacam penyempitan imajinasi: hanya kebijakan yang bisa dimasukkan ke dalam model yang dianggap layak dipertimbangkan. Pilihan-pilihan yang lebih radikal, seperti pengurangan konsumsi energi secara struktural atau perubahan model pembangunan, sering terpinggirkan karena sulit dikodekan menjadi parameter yang rapi. Dengan cara ini, bahasa net-zero bukan hanya memandu, tetapi juga membatasi horizon kebijakan yang dianggap mungkin.

Studi tentang transisi energi di Brasil menunjukkan bagaimana angka dan skenario dapat menyatu dengan dinamika politik yang konkret. Werner dan Lazaro menelaah kebijakan nasional untuk mempromosikan energi terbarukan dalam bauran listrik Brasil dan menunjukkan bahwa rancangan kebijakan sangat dipengaruhi oleh cara negara memandang potensi teknis, resiko teritorial, dan konfigurasi aktor di sektor ketenagalistrikan (Werner & Lazaro, 2023). Jika disederhanakan, mereka memperlihatkan bahwa jalur yang tampak "efisien" di atas kertas—misalnya memperbesar kapasitas pembangkit tertentu—bisa berujung pada konflik ekologis dan sosial di wilayah yang kaya biodiversitas. Artinya, bahkan ketika target nasional selaras dengan retorika net-zero, pilihan konkret yang diambil untuk mewujudkannya tetap diwarnai oleh pertarungan kepentingan dan asimetri kekuasaan di dalam negara.

Lebih jauh, banyak skenario net-zero bertumpu pada asumsi bahwa *energi terbarukan* dapat ditingkatkan hampir tanpa batas, dan bahwa teknologi seperti penangkapan dan penyimpanan karbon atau "emisi negatif" akan tersedia tepat waktu dan dalam skala besar. Dalam model, teknologi-teknologi tersebut dapat diaktifkan seperti tombol: jika emisi sulit dikurangi di satu sektor, model "mengizinkan" kompensasi di sektor lain melalui peningkatan kapasitas teknologi penyerapan

karbon. Namun di dunia nyata, setiap teknologi ini menghadapi batasan geologis, sosial, dan politik. Contohnya, penanaman hutan skala besar untuk menyerap karbon dapat bersaing dengan kebutuhan pangan atau hak tanah masyarakat adat. Dengan demikian, konstruksi epistemik net-zero berisiko mengalihkan beban penyesuaian ke masa depan, seolah-olah generasi mendatang pasti memiliki kemampuan teknis dan politik untuk menutup celah yang kita tinggalkan hari ini.

Aspek lain yang sering luput dari perhatian publik adalah bagaimana pilihan teknis dalam model—misalnya tingkat *discount rate* atau asumsi tentang pertumbuhan ekonomi—secara halus mengubah implikasi etis dari jalur net-zero. *Discount rate* adalah cara ekonom menghitung seberapa besar nilai kerugian di masa depan "dikurangi" ketika dibandingkan dengan biaya saat ini. Bila tingkat diskonto tinggi, kerugian yang dialami generasi mendatang tampak kecil dalam perhitungan hari ini, sehingga mendorong pilihan kebijakan yang lebih lambat dan menoleransi emisi lebih besar dalam jangka pendek. Sebaliknya, diskonto rendah akan membuat perlindungan jangka panjang tampak lebih mendesak. Di sini, angka teknis yang tampak netral sebenarnya menyimpan pilihan moral: seberapa besar kita menghargai hak generasi yang belum lahir. Net-zero, dengan demikian, bukan hanya target karbon, tetapi juga cermin dari cara kita menimbang keadilan antargenerasi.

Pertanyaan penting berikutnya adalah: siapa yang berhak mendefinisikan skenario net-zero yang akan menjadi rujukan global? Saat ini, desain dan interpretasi banyak model masih terkonsentrasi di lembaga-lembaga riset besar di negara-negara kaya, yang memiliki kemampuan komputasi dan pendanaan riset jauh lebih besar dari negara berkembang. Hal ini berisiko menghasilkan bias epistemik: pandangan tentang apa yang "mungkin" dan "diinginkan" dalam transisi energi lebih banyak mencerminkan struktur ekonomi dan politik Global North. Agar

wacana net-zero tidak menjadi alat reproduksi ketimpangan, kapasitas pemodelan dan penafsiran skenario perlu diperluas ke universitas, lembaga riset, dan komunitas advokasi di Selatan global. Partisipasi yang lebih luas ini bukan sekadar soal representasi, tetapi juga tentang memperkaya imajinasi masa depan dan membuka ruang bagi jalur transisi yang lebih beragam.

Pada akhirnya, memahami net-zero sebagai konstruksi epistemik membantu kita melihat bahwa *kebijakan energi* tidak pernah sekadar menjalankan "hasil sains". Model dan skenario menyediakan peta, tetapi aktor politiklah yang menentukan rute mana yang ditempuh, siapa yang boleh berbelok lebih lambat, dan siapa yang harus menanggung percepatan. Ketika angka-angka net-zero diperlakukan sebagai kebenaran tunggal, risiko yang muncul adalah matinya perdebatan normatif: seolah semua kompromi keadilan sosial, distribusi beban, dan pilihan teknologi sudah terkunci di dalam grafik emisi. Sebaliknya, bila kita mengakui bahwa peta net-zero dibangun di atas asumsi dan pilihan nilai tertentu, kita bisa menuntut transparansi lebih besar tentang bagaimana model itu dibuat, siapa yang dilibatkan, dan bagaimana hasilnya dipakai untuk membatasi atau membuka kemungkinan kebijakan. Dari sini, net-zero dapat diperlakukan bukan sebagai vonis final, melainkan sebagai undangan untuk menegosiasikan kembali masa depan bersama secara lebih adil.

5.3 Fungsi Politik *Net-Zero*: Koordinasi, Penundaan, dan Pembingkaian Ambisi

Net-zero sering dipresentasikan sebagai tujuan teknis yang netral: jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepas ke atmosfer harus diimbangi oleh penyerapan atau pengurangan emisi di tempat lain. Namun, ketika kita melihat lebih dekat, net-zero adalah proyek politik yang sangat intens. Ia menentukan apa

yang dianggap sebagai tindakan “cukup ambisius”, siapa yang diwajibkan berkontribusi, serta kapan dan di mana pengurangan emisi dianggap sah. Dalam wacana publik, net-zero dibingkai sebagai kompas moral baru, seakan-akan angka tahun target dan persentase pengurangan sudah mewakili keadilan. Padahal, di balik satu angka tahun—misalnya 2050—tersembunyi negosiasi panjang tentang industrialisasi, hak pembangunan, dan distribusi beban yang sangat tidak merata antara Utara dan Selatan global. Di sinilah fungsi politik net-zero beroperasi: bukan hanya sebagai sasaran teknis, tetapi sebagai bahasa yang menyusun ulang peta kewajiban dan hak antarnegar a serta antaraktor.

Fungsi koordinatif net-zero tampak ketika organisasi internasional, negara, korporasi, dan pemerintah daerah mensinkronkan strategi mereka dengan satu horizon waktu. Target yang tampak sederhana ini membantu menyatukan berbagai rencana jangka panjang, dari peta jalan pembangkit listrik hingga strategi industri berat. Dalam ilmu kebijakan, ini sering dipahami sebagai upaya menciptakan “titik fokus” yang memudahkan para aktor menyelaraskan ekspektasi. Namun, koordinasi ini tidak netral. Aktor yang memiliki kapasitas teknokratik, akses pada model iklim, dan kemampuan melakukan lobi cenderung lebih menentukan bagaimana jalur menuju net-zero diterjemahkan ke regulasi konkret. Dengan kata lain, fungsi koordinasi net-zero selalu sekaligus fungsi seleksi; ia mengangkat prioritas tertentu—misalnya dekarbonisasi sektor listrik—dan menunda isu lain seperti konsumsi material atau pola mobilitas yang boros energi.

Net-zero juga beroperasi sebagai bingkai besar yang mempengaruhi cara kita membayangkan masa depan energi terbarukan. Di banyak negara, rencana ekspansi energi matahari dan angin dijahit ke dalam skenario jalan menuju net-zero, sehingga seolah-olah tidak ada alternatif lain selain mengikuti

lintasan yang digariskan oleh skenario-skenario tersebut. Di permukaan, hal ini tampak sebagai dukungan kuat terhadap energi terbarukan, tetapi di baliknya terjadi penguncian imajinasi: hanya jenis teknologi, skala proyek, dan konfigurasi kepemilikan tertentu yang dipandang "rasional" karena paling sesuai dengan model transisi resmi. Komunitas lokal yang mengusulkan desain berbeda—misalnya model kooperasi energi berbasis warga—sering kali dinilai tidak "efisien" atau terlalu kecil untuk relevan, padahal secara etis justru lebih dekat dengan gagasan demokrasi energi dan keadilan distributif.

Dalam perspektif kekuasaan, net-zero bekerja sebagai apa yang bisa disebut tata bahasa kebijakan: ia menjelaskan siapa yang sah berbicara, argumen apa yang dianggap ilmiah, dan kapan suatu intervensi dinilai realistis. Literatur tentang desentralisasi listrik menunjukkan bagaimana konfigurasi kelembagaan dan kepemilikan baru juga menggeser pusat kekuasaan politik, tetapi pergeseran ini tidak otomatis berpihak pada kelompok yang rentan (Brisbois, 2020). Di dalam wacana net-zero, pemerintah dan korporasi besar sering memposisikan diri sebagai aktor yang paling mampu mengelola risiko, dengan alasan skala dan kapasitas investasi. Akibatnya, rancangan skema pembiayaan, penetapan tarif, dan desain pasar listrik cenderung mengukuhkan dominasi aktor besar, sementara inovasi kecil dan eksperimental dipaksa menyesuaikan dengan logika pasar arus utama.

Fungsi politik net-zero yang paling kontroversial adalah kemampuannya mengizinkan penundaan tindakan. Dalam banyak dokumen strategi, beban pengurangan emisi radikal ditempatkan pada dekade-dekade mendatang, sementara emisi jangka pendek tetap tinggi. Celah ini biasanya diisi dengan janji penggunaan *negative emissions technologies*, yakni teknologi yang diklaim dapat menyedot CO_2 dari atmosfer di masa depan. Bagi pembaca awam, istilah teknis ini terdengar meyakinkan,

tetapi secara sederhana ia berarti kita menunda pengurangan emisi hari ini dengan keyakinan bahwa teknologi masa depan akan menyelesaikan masalah. Di tingkat politik, penundaan ini memberi ruang bagi koalisi kepentingan industri fosil untuk mempertahankan basis asetnya, sembari mengadopsi bahasa net-zero agar tetap tampak sejalan dengan agenda iklim global.

Penundaan yang dimungkinkan oleh net-zero diperkuat oleh cara kebijakan energi dirancang dan diukur. Banyak rencana transisi bergantung pada *integrated assessment models*, yaitu model yang menggabungkan ekonomi, energi, dan iklim untuk menghitung jalur yang dianggap paling "efisien". Di atas kertas, model ini membantu membandingkan skenario kebijakan energi yang berbeda dengan cara yang sistematis. Namun, asumsi-asumsi di dalamnya—seperti tingkat diskonto, biaya teknologi, dan kecepatan difusi inovasi—merupakan pilihan normatif yang sarat nilai, bukan fakta teknis belaka. Ketika hasil model dipresentasikan sebagai satu-satunya dasar rasional untuk mengambil keputusan, ruang politik untuk mempertanyakan keadilan antargenerasi, hak komunitas, atau dampak sosial-ekologis jangka panjang menyempit, meskipun dampak tersebut jauh melampaui horizon perhitungan ekonomi.

Ketimpangan kekuasaan ini tampak jelas ketika kita melihat bagaimana transisi rendah karbon berlangsung di wilayah periferal. Studi tentang komunitas pedesaan menunjukkan bahwa janji manfaat transisi sering tidak sebanding dengan beban sosial dan ruang yang mereka tanggung (O'Sullivan et al., 2020). Dalam konteks net-zero, wilayah-wilayah seperti ini kerap diperlakukan sebagai lokasi "optimal" untuk proyek energi skala besar atau sebagai ruang bagi proyek kompensasi karbon, tanpa memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki posisi tawar yang kuat. Di sini net-zero berfungsi ganda: ia memberi bahasa legitimasi bagi proyek-

proyek besar—karena diklaim berkontribusi pada target nasional—sekaligus mengaburkan pertanyaan tentang siapa yang menanggung risiko ketika proyek gagal, lingkungan rusak, atau tarif listrik tidak terjangkau bagi penduduk sekitar.

Fungsi koordinatif dan menunda dari net-zero juga tampak dalam tata kelola lintas level, dari forum global hingga regulasi teknis. Di tingkat internasional, komitmen net-zero negara-negara besar sering dirayakan sebagai pencapaian diplomatik, padahal teks komitmen tersebut menyisakan banyak ruang abu-abu mengenai jenis emisi apa yang dihitung, bagaimana peran sektor tanah dan hutan, dan sejauh mana penggunaan *offsetting* dapat diterima. *Offsetting* di sini berarti mengimbangi emisi di satu tempat dengan mendanai proyek penyerapan karbon di tempat lain. Dalam politik praktis, mekanisme ini dapat mengalihkan tekanan dari sektor industri domestik ke proyek-proyek di negara berkembang, sehingga beban adaptasi sosial dan lingkungan dipindahkan tanpa perubahan struktural yang signifikan di pusat-pusat emisi.

Pada saat yang sama, net-zero menjadi perangkat pembingkaian ambisi bagi korporasi energi terbarukan dan aktor keuangan. Banyak perusahaan berlomba mengumumkan sasaran net-zero untuk portofolio investasi atau operasi mereka, sering kali disertai narasi tentang kepemimpinan moral. Namun, di balik deklarasi itu, terdapat pertanyaan: apakah jalur dekarbonisasi yang diambil justru memperluas logika ekstraktif lama dalam wujud baru, misalnya melalui ekspansi besar-besaran proyek angin lepas pantai atau matahari skala utilitas tanpa partisipasi bermakna warga. Bagi pemerintah, menerima komitmen korporasi ini dapat menjadi cara mudah menunjukkan kemajuan, meskipun desain kontrak, rezim izin, dan pembagian manfaatnya tetap berat sebelah. Di sini, ambisi yang diproklamasikan sering tidak berbanding lurus dengan redistribusi kekuasaan dan manfaat di lapangan.

Net-zero juga membentuk bahasa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik nilai di antara kementerian, regulator, dan pelaku pasar. Ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai kecepatan penghentian batubara, besaran subsidi energi bersih, atau penataan kembali jaringan listrik, merujuk pada jalur resmi net-zero dapat berfungsi sebagai argumen penutup debat. Pejabat dapat mengatakan bahwa keputusan tertentu "sudah sejalan dengan skenario net-zero", sehingga keberatan komunitas atau kelompok kritis dengan mudah dicap tidak realistis atau emosional. Dengan cara ini, fungsi politik net-zero bukan hanya mengkoordinasikan kebijakan, tetapi juga menutup ruang imajinasi kebijakan alternatif yang mungkin lebih adil secara sosial, meskipun secara angka emisi tampak kurang "efisien" dalam jangka pendek.

Bagi pembaca yang tertarik pada etika kebijakan, penting untuk melihat bahwa net-zero menggeser fokus dari pertanyaan "berapa cepat kita harus mengurangi emisi?" ke pertanyaan "jalur mana yang secara politik paling dapat diterima sambil mempertahankan legitimasi?". Di banyak negara, legitimasi pemerintah terkait transisi energi diukur dari kemampuan menjaga stabilitas harga listrik, menghindari protes sosial, dan mempertahankan investasi. Di bawah tekanan tersebut, net-zero sering dijadikan payung naratif untuk menggabungkan langkah progresif yang terbatas dengan berbagai bentuk kompromi yang melindungi kepentingan status quo. Fungsi pembingkaian ini membuat net-zero berperan sebagai semacam kontrak sosial baru yang implisit: masyarakat diminta percaya bahwa meskipun perubahan terasa lambat dan tidak merata, jalur yang sedang ditempuh tetap akan mengantar pada masa depan yang aman.

Di tingkat *kebijakan energi* nasional, net-zero digunakan untuk menyusun ulang hubungan antara kementerian sektor, lembaga perencanaan, dan regulator. Rencana dekarbonisasi

jangka panjang menjadi basis untuk revisi standar teknis, kebijakan subsidi, hingga desain pasar listrik. Namun, fokus kuat pada konsistensi dengan jalur net-zero dapat membuat indikator kuantitatif emisi dan intensitas karbon mendominasi diskusi, sementara indikator lain seperti kualitas partisipasi publik, hak atas informasi, atau dampak sosial jangka panjang kurang diperhatikan. Net-zero, dengan demikian, bukan hanya sasaran emisi, tetapi juga skema prioritas yang menentukan isu mana yang dianggap cukup penting untuk dimasukkan dalam matriks pemantauan resmi. Apa yang tidak terukur dalam kerangka ini berisiko tidak terdengar, meskipun secara etis sangat menentukan.

Menggali fungsi politik net-zero berarti menempatkan konsep ini kembali dalam medan kuasa, wacana, dan institusi yang menjadi fokus utama buku ini. Net-zero bisa menjadi alat koordinasi yang berguna, terutama ketika digunakan untuk mempercepat transformasi struktural dan memperkuat keadilan distribusi manfaat. Namun, ia juga dapat menjadi perangkat penundaan dan depolitisasi, ketika angka target menggantikan percakapan sulit tentang siapa yang berkorban, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana masa depan dibayangkan secara kolektif. Karena itu, bab-bab selanjutnya akan terus menguji apakah jalur menuju net-zero benar-benar menggeser relasi kuasa dalam sistem energi, atau justru menyusun ulang legitimasi bagi pola dominasi lama dengan wajah baru yang lebih "hijau".

5.4 *Net-Zero* dan *Greenwashing*: Celah Teknis dan Moral

Net-zero sering dihadirkan sebagai mantra baru tata kelola iklim: sederhana, mudah dikomunikasikan, dan tampak teknokratis netral. Namun, di balik angka nol bersih itu tersembunyi lapisan asumsi etis dan politis tentang siapa yang harus mengurangi, kapan, dengan cara apa, dan sejauh mana

pengorbanan harus dibagi. Dalam wacana global, net-zero tidak hanya menjadi target teknis, tetapi juga simbol keseriusan negara dan korporasi dalam merespons krisis iklim. Di ruang ini, *greenwashing* – yakni praktik menampilkan diri seolah-olah ramah lingkungan tanpa perubahan substantif – menemukan panggung yang subur. Ketika publik dan investor dibanjiri slogan, logo hijau, dan janji tahun target, sulit membedakan mana komitmen yang sungguh-sungguh dan mana sekadar strategi komunikasi. Karena itu, membedah net-zero dan *greenwashing* bukan sekadar soal moral individu, melainkan tentang bagaimana struktur kekuasaan dan institusi mengizinkan, mendorong, atau justru mengendalikan praktik-praktik manipulatif tersebut.

Konteks keuangan dan pasar modal menunjukkan dengan jelas bagaimana sinyal kebijakan iklim, termasuk peristiwa COP, diterjemahkan menjadi persepsi risiko dan peluang laba. Studi tentang reaksi pasar saham terhadap berita COP26, misalnya, memperlihatkan bahwa investor dapat merespons secara berlebihan terhadap risiko transisi iklim, terutama pada saham perusahaan intensif karbon, dan kondisi ini membuka ruang kecurigaan terhadap praktik *greenwashing* ketika narasi hijau tidak sejalan dengan fondasi bisnis yang sebenarnya (Ge et al., 2024). Di satu sisi, tekanan pasar ini mendorong korporasi mengumumkan target net-zero agar tetap tampak relevan. Di sisi lain, logika yang sama dapat mendorong manajemen untuk memoles citra hijau tanpa mengubah struktur operasi yang mengandalkan bahan bakar fosil. Di antara dua kutub inilah celah teknis dan moral mulai terbentuk, sering kali tersembunyi di balik laporan keberlanjutan yang tebal namun sulit diakses publik awam.

Ketika net-zero dikaitkan dengan *energi terbarukan*, wacana yang muncul tampak sangat progresif: pembangunan ladang surya, ladang angin lepas pantai, dan jaringan listrik

pintar yang efisien. Namun pertanyaan filosofisnya adalah: apakah perluasan infrastruktur ini sungguh-sungguh mengubah relasi kekuasaan atas energi, atau hanya memindahkan sumber daya dari satu bentuk aset ke bentuk aset lainnya yang masih dikuasai aktor besar? Di banyak negara, proyek *energi terbarukan* dipromosikan sebagai solusi cepat yang selaras dengan target net-zero, tetapi struktur kepemilikan, pola pembiayaan, dan desain harga sering kali tetap memusat, mengulang pola eksklusi lama. Jika listrik dari sumber hijau tetap mahal atau tidak terjangkau bagi rumah tangga berpendapatan rendah, maka net-zero hanya menjadi kosmetik statistik, bukan instrumen keadilan. Dengan demikian, pertanyaan tentang hak atas energi, akses, dan martabat tidak boleh dilebur begitu saja ke dalam logika agregat emisi nol bersih di tingkat nasional atau korporasi.

Salah satu sumber utama *greenwashing* adalah kompleksitas teknis dari perhitungan emisi dan klaim net-zero. Di dalam dokumen kebijakan dan laporan korporasi, publik dibawa berkelana melalui istilah seperti *offsetting*, *carbon credits*, *scope 1–2–3 emissions*, dan *baseline scenario*. *Offsetting* berarti mengimbangi emisi yang masih dilepaskan dengan proyek penyerap karbon, misalnya penanaman pohon atau proyek energi bersih di tempat lain. Bagi pembaca awam, ini terdengar masuk akal: jika suatu emisi tidak bisa dihindari, ia bisa "dibayar" dengan aksi positif di tempat lain. Namun secara teknis, perhitungan ini sangat bergantung pada asumsi tentang berapa banyak karbon yang benar-benar diserap, berapa lama serapan itu bertahan, dan apakah proyek tersebut akan terjadi juga tanpa skema offset. Di sinilah muncul celah: angka yang tampak presisi memberi aura objektivitas, padahal di dalamnya terkandung pilihan-pilihan normatif tentang apa yang dianggap sah sebagai pengganti pengurangan emisi langsung.

Celah teknis semakin lebar ketika model iklim dan

skenario jangka panjang digunakan untuk membenarkan kemunduran pengurangan emisi di masa kini. Dalam banyak jalur transisi menuju net-zero, terdapat asumsi bahwa teknologi penangkap dan penyimpan karbon akan tersedia secara massal dan murah di masa depan. Istilah *negative emissions technologies* sering dipakai, seolah-olah teknologi ini sudah mapan dan siap diterapkan. Padahal, dari perspektif etika kebijakan, mengandalkan janji teknologi masa depan berarti memindahkan beban risiko kepada generasi mendatang dan komunitas yang kelak harus hidup dengan infrastruktur tersebut. Ketika angka-angka di skenario menunjukkan bahwa peningkatan emisi saat ini masih "konsisten" dengan net-zero pada 2050, publik mudah diyakinkan bahwa tidak ada masalah. Di titik ini, *greenwashing* bekerja bukan melalui kebohongan langsung, melainkan melalui pengemasan ketidakpastian sebagai kepastian ilmiah yang rapi dan tidak dapat digugat.

Di level tata kelola global, net-zero sering dipasangkan dengan wacana keuangan hijau dan desentralisasi lingkungan. Studi mengenai peran *green finance* dan desentralisasi lingkungan di negara-negara OECD menunjukkan bahwa instrumen keuangan dapat mendorong transisi rendah karbon, tetapi juga berisiko memperkuat ketimpangan jika desainnya tidak mempertimbangkan kapasitas institusional dan distribusi manfaat (Habib et al., 2025). Hal ini memiliki implikasi langsung bagi *kebijakan energi* yang berorientasi net-zero: jika skema pembiayaan hanya menguntungkan proyek berskala besar yang mudah diakses aktor kuat, sementara komunitas lokal menanggung akibat seperti perubahan tata guna lahan atau kenaikan tarif, maka komitmen nol bersih itu memproduksi bentuk baru ketidakadilan. Dengan kata lain, celah moral bukan hanya soal kejujuran komunikasi, tetapi juga soal bagaimana arsitektur kelembagaan dan finansial mengalokasikan hak, kewajiban, dan risiko dalam transisi energi yang diklaim hijau.

Dimensi moral dari net-zero dan *greenwashing* tampak jelas ketika kita menelusuri siapa yang memikul konsekuensi fisik dari proyek yang dipakai sebagai alat offset. Ketika perusahaan di Negara Utara membeli kredit karbon dari proyek reforestasi di Negara Selatan, pertanyaannya bukan hanya apakah karbon benar-benar diserap, tetapi juga bagaimana nasib masyarakat adat dan petani kecil yang ruang hidupnya dijadikan lokasi "kompensasi" emisi. Di sini, janji net-zero bisa berubah menjadi mekanisme pemindahan beban: emisi tetap terjadi di pusat produksi dan konsumsi, sementara kewajiban untuk memulihkan kerusakan dialihkan ke wilayah yang secara historis kurang bertanggung jawab terhadap akumulasi karbon. Jika landasan moral semacam ini tidak dipersoalkan, maka kesan hijau yang muncul hanyalah selimut tebal yang menutupi reproduksi kolonialisme ekologis dalam bentuk baru, dengan bahasa kebijakan iklim yang tampak modern dan ilmiah.

Negara, sebagai pemegang otoritas regulatif, berperan ganda dalam narasi net-zero: ia bisa menjadi penjaga integritas atau justru fasilitator *greenwashing*. Banyak pemerintah menetapkan kerangka pelaporan dan taksonomi hijau yang menentukan apa yang boleh disebut "selaras" dengan net-zero. Namun, tekanan politik untuk tetap menarik investasi dan menjaga daya saing sering mendorong pelonggaran kriteria, sehingga kegiatan yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil pun berpotensi diklasifikasikan sebagai "transisi" yang dapat diterima. Di sisi lain, lembaga pengawas sering kekurangan kapasitas untuk mengaudit kualitas skenario transisi yang diajukan korporasi besar. Tanpa standar yang ketat dan sanksi yang jelas, net-zero akan berfungsi lebih sebagai alat branding kebijakan daripada kerangka etis yang mengikat. Dalam situasi ini, celah teknis berubah menjadi celah moral: publik diminta percaya pada janji yang tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Dalam praktik, wacana net-zero yang menjanjikan ekspansi *energi terbarukan* juga dapat dipakai untuk melakukan *relabeling* terhadap proyek-proyek yang sesungguhnya sarat problem sosial dan ekologis. Pembangkit listrik tenaga air skala besar atau proyek biomassa, misalnya, kerap dipromosikan sebagai bagian dari portofolio energi hijau, padahal dampaknya terhadap keanekaragaman hayati, hak atas tanah, dan mata pencaharian lokal bisa sangat signifikan. Ketika pemerintah dan korporasi memanfaatkan label "hijau" untuk menjustifikasi proyek seperti itu tanpa kajian dampak sosial yang serius, net-zero menjadi argumen serbaguna yang membungkam kritik. Di sini, *greenwashing* beroperasi bukan hanya melalui laporan keberlanjutan, tetapi juga melalui definisi legal tentang apa yang layak disebut energi bersih. Jika politik penamaan ini tidak dikritisi, maka transformasi energi akan berisiko mengulang pola lama ekstraktivisme, hanya dengan cat hijau yang berbeda.

Kerangka COP yang menjadi acuan global bagi negosiasi iklim memberikan latar penting bagi analisis ini. Kajian kritis terhadap rangkaian COP – dari Kyoto hingga Dubai – menunjukkan bahwa meskipun retorika keadilan dan keberlanjutan semakin menonjol, banyak celah yang tetap dibiarkan terbuka dalam hal pembagian tanggung jawab dan mekanisme akuntabilitas substantif (Mahendru et al., 2025). Net-zero sering muncul sebagai kompromi politik yang cukup ambisius di atas kertas, tetapi elastis dalam implementasi, sehingga memungkinkan negara dan korporasi mengklaim kepatuhan tanpa perubahan struktural yang memadai. Konsekuensinya, bahasa *equity* dan *climate justice* menjadi lapisan tipis di atas kalkulus diplomatik yang didorong kepentingan nasional sempit. Dalam konteks ini, celah moral tidak hanya berada di tangan pelaku pasar, tetapi juga tertanam dalam desain perjanjian internasional yang memberi ruang besar untuk interpretasi selektif terhadap komitmen iklim.

Peran pengetahuan dan keahlian sangat menentukan apakah net-zero menjadi alat transformasi atau sekadar sarana *greenwashing*. Para ahli yang merancang model iklim, taksonomi hijau, dan standar pelaporan memegang kuasa epistemik untuk menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam perhitungan. Bila komunitas ahli terlalu dekat dengan kepentingan industri atau pemerintah yang ingin mempertahankan status quo, maka standar yang lahir cenderung permisif. Sebaliknya, ketika organisasi masyarakat sipil, akademisi kritis, dan komunitas terdampak terlibat aktif dalam memeriksa asumsi-asumsi teknis, celah-celah manipulatif bisa diidentifikasi lebih dini. Transparansi metodologi, akses data, dan mekanisme *peer review* yang independen menjadi penting agar angka-angka net-zero tidak diterima begitu saja sebagai kebenaran tunggal. Di sini, literasi publik atas istilah teknis perlu diperkuat, sehingga warga biasa dapat mengajukan pertanyaan mendasar: apa yang dihitung, apa yang diabaikan, dan siapa yang diuntungkan oleh cara penghitungan itu.

Dari perspektif etika kebijakan, tugas utama *kebijakan energi* bukan hanya mengumumkan target net-zero, tetapi juga meminimalkan ruang bagi *greenwashing* melalui desain regulasi yang ketat dan adil. Ini berarti menetapkan kriteria integritas transisi yang mewajibkan pengurangan emisi langsung sebagai prioritas, membatasi penggunaan offset, dan memastikan bahwa proyek kompensasi hanya diizinkan jika memenuhi standar sosial dan lingkungan yang kuat. Kebijakan juga perlu mengharuskan pelaporan terperinci tentang asumsi skenario, termasuk teknologi masa depan yang belum mapan, dan menyediakan mekanisme koreksi ketika jalur aktual menyimpang dari jalur yang direncanakan. Selain itu, pengaturan kelembagaan harus menjamin partisipasi bermakna dari kelompok rentan dalam merumuskan kriteria hijau, agar definisi keberlanjutan tidak hanya mencerminkan perspektif

teknokrat dan investor. Dengan demikian, integritas net-zero menjadi bagian dari arsitektur keadilan, bukan sekadar alat koordinasi angka.

Pada akhirnya, pembahasan net-zero dan *greenwashing* mengembalikan kita pada pertanyaan pokok buku ini: bagaimana kekuasaan bekerja di dalam bahasa kebijakan yang tampak teknis dan netral. Net-zero dapat menjadi kerangka yang memobilisasi tindakan kolektif untuk menghindari kerusakan iklim terburuk, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menunda, mengalihkan, atau menutupi tanggung jawab etis aktor-aktor kuat. Celah teknis dalam penghitungan emisi dan celah moral dalam pembagian beban risiko saling memperkuat, menjadikan wacana keberlanjutan sebagai medan tarik-menarik antara kejujuran dan manipulasi. Tugas analisis filosofis adalah mengupas lapisan angka, model, dan slogan, agar publik dapat melihat dengan lebih jernih siapa yang membentuk definisi keberhasilan iklim dan atas dasar nilai apa. Subbagian ini, dengan demikian, membuka jalan bagi pembahasan berikutnya tentang bagaimana wacana lain—seperti keamanan, kedaulatan, dan keadilan—ikut membentuk batas-batas imajinasi kebijakan energi berkelanjutan.

5.5 Alternatif Terhadap Logika *Net-Zero*: *Degrowth*, *Sufficiency*, dan Keadilan Iklim

Pertanyaan tentang alternatif terhadap logika net-zero lahir dari kegelisahan bahwa kalkulus emisi saja tidak cukup untuk menjawab krisis iklim yang berlapis ketidakadilan. Di satu sisi, net-zero menjanjikan keseimbangan aritmetika antara emisi dan penyerapan; di sisi lain, ia membiarkan struktur produksi dan konsumsi yang boros tetap utuh, sepanjang emisi "diimbangi" di tempat lain. Di sinilah gagasan *degrowth* (pengurangan pertumbuhan material di negara kaya) dan *sufficiency* (kecukupan seperlunya, bukan maksimalisasi

konsumsi) mencoba membalik logika pembangunan arus utama. Keduanya menolak asumsi bahwa kesejahteraan selalu identik dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto, dan mengusulkan orientasi baru: membatasi throughput material–energi agar tetap berada dalam batas ekologi sambil memperkuat keadilan sosial. Subbagian ini mengajak pembaca melihat *degrowth*, *sufficiency*, dan keadilan iklim bukan sebagai jargon alternatif, tetapi sebagai koreksi mendasar atas logika net-zero yang terlalu sempit.

Gagasan *degrowth* berangkat dari kritik moral dan ekologis terhadap model pembangunan yang menjadikan ekspansi produksi dan konsumsi sebagai ukuran utama keberhasilan. Dalam kerangka ini, krisis iklim dipahami bukan sebagai "kecelakaan" teknis, melainkan konsekuensi logis dari ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi dan pembakaran energi fosil terus-menerus. Literatur terbaru tentang *adaptation gap* menunjukkan bahwa bahkan ketika target emisi dibahas dalam forum global, kesenjangan antara kapasitas beradaptasi negara kaya dan negara miskin tetap melebar (Malik & Ford, 2025). Artinya, net-zero tanpa perubahan struktur ekonomi hanya mengatur ulang distribusi risiko, bukan mengurangi ketidakadilan. *Degrowth* menawarkan orientasi berlawanan: mengurangi konsumsi berlebih di Utara global, memperluas ruang ekologis dan fiskal bagi Selatan global, sambil menempatkan pemenuhan hak dasar—bukan akumulasi laba—sebagai tujuan utama tatanan ekonomi.

Dalam konteks energi, *degrowth* dan *sufficiency* menantang bayangan bahwa transisi cukup dilakukan dengan mengganti pembangkit fosil menjadi pembangkit *energi terbarukan* tanpa menyentuh pola permintaan. Pendekatan ini mengingatkan bahwa setiap infrastruktur energi, termasuk surya dan angin, membutuhkan bahan baku, lahan, dan jaringan logistik yang juga memproduksi jejak material dan sosial. Fokus

pada pengurangan permintaan—melalui efisiensi, perubahan gaya hidup, dan pembatasan konsumsi mewah—membantu menghindari ilusi bahwa pasokan terbarukan tak terbatas. Bagi rumah tangga miskin energi, kerangka *sufficiency* juga menuntut pengakuan atas kebutuhan minimum yang bermartabat: pemanasan, pendinginan, pencahayaan, akses digital. Dengan demikian, alternatif terhadap logika net-zero tidak sekadar menambah proyek *energi terbarukan*, tetapi merumuskan kembali pertanyaan: energi untuk siapa, untuk apa, dan dengan konsekuensi apa bagi masyarakat serta ekosistem di sekitarnya.

Konsep *sufficiency* merupakan jembatan penting antara etika pribadi dan desain institusional. Secara sederhana, *sufficiency* berarti "cukup itu cukup": ada batas atas yang wajar bagi konsumsi energi dan sumber daya oleh individu maupun kelompok, terutama mereka yang berada di puncak piramida pendapatan. Di tingkat kebijakan, ini berarti mempertanyakan subsidi energi untuk konsumsi mewah, membatasi infrastruktur yang mendorong mobilitas boros (misalnya, penerbangan jarak pendek yang bisa digantikan kereta), dan mendorong standar bangunan serta kota yang hemat energi. Pendekatan ini menggeser beban perubahan dari "konsumen rasional" individual ke sistem yang membentuk pilihan, seperti tata ruang, transportasi publik, dan standar efisiensi. Dengan demikian, *sufficiency* tidak bermakna menyalahkan rumah tangga miskin, tetapi menantang privilese energi kelas atas yang sering disembunyikan di balik retorika modernisasi dan pertumbuhan hijau.

Keadilan iklim memberikan dimensi normatif yang mempersatukan kritik terhadap net-zero, *degrowth*, dan *sufficiency*. Alih-alih menilai keberhasilan kebijakan dari penurunan emisi semata, kerangka keadilan iklim bertanya: siapa yang menanggung biaya, siapa yang menikmati manfaat, siapa yang didengar dalam proses pengambilan keputusan, dan

siapa yang tersisih. Penelitian tentang proses transisi energi di Taiwan menunjukkan bahwa bahkan kebijakan yang tampak "pro-lingkungan" dapat menghasilkan ketidakadilan prosedural ketika partisipasi publik dibatasi dan transparansi lemah (Huang & Chen, 2023). Pelajarannya penting: tanpa desain institusional yang menjamin partisipasi bermakna, logika net-zero mudah dipakai untuk memaksakan proyek transisi di atas komunitas yang minim kuasa tawar. Dalam kerangka keadilan iklim, keberlanjutan diukur dari terpenuhinya hak substantif dan prosedural kelompok rentan, bukan dari terpenuhinya kurva emisi global semata.

Ketika gagasan *degrowth* dan *sufficiency* dibawa ke ranah *kebijakan energi*, muncul pertanyaan praktis: institusi mana yang harus diubah terlebih dahulu, dan bagaimana mengukur keberhasilan? Logika kebijakan arus utama cenderung menilai keberhasilan dari besaran investasi, kapasitas terpasang, atau harga listrik rata-rata. Sebaliknya, pendekatan alternatif mendorong indikator yang menilai pengurangan kebutuhan energi tanpa mengurangi kualitas hidup, seperti peningkatan efisiensi bangunan rendah pendapatan, akses transportasi publik, dan penghapusan tarif regresif. Di tingkat nasional, ini bisa berarti mengalihkan insentif dari proyek raksasa berintensitas modal tinggi ke program rehabilitasi rumah, dan dukungan teknologi hemat energi untuk komunitas. Pergeseran ini tidak netral secara politik, karena mengurangi ruang laba bagi aktor besar dan memperkuat klaim hak atas energi yang adil bagi warga biasa.

Net-zero sering diposisikan sebagai "bahasa teknis" yang netral dan universal, padahal ia menyembunyikan pilihan politik mengenai laju, arah, dan skala perubahan. Ketika negara dan korporasi menetapkan target net-zero jauh di masa depan, mereka sekaligus memutuskan siapa yang harus menunggu, siapa yang boleh terus memperluas produksi, dan siapa yang

harus beradaptasi dengan dampak iklim yang sudah terjadi sekarang. *Degrowth* dan keadilan iklim menolak penundaan ini dengan menuntut penurunan cepat emisi di sektor dan wilayah yang paling bertanggung jawab secara historis, sambil memperluas kapasitas adaptasi di wilayah yang paling rentan. Dalam logika ini, kompensasi finansial, transfer teknologi, dan pembatalan utang bukanlah "kebaikan hati", tetapi bagian dari redistribusi hak atas ruang atmosfer dan kapasitas adaptasi yang selama ini dimonopoli oleh negara dan korporasi kaya.

Alternatif terhadap logika net-zero juga mengundang pembacaan ulang terhadap instrumen kebijakan yang tampak teknis, seperti perdagangan karbon, *offset*, dan pasar sukarela. Skema ini sering menjanjikan peluang pembiayaan bagi proyek kehutanan atau *renewable energy* di Selatan global, tetapi dalam banyak kasus menciptakan kepemilikan baru atas udara, tanah, dan hutan tanpa konsultasi memadai dengan komunitas yang tinggal di sana. Dalam perspektif keadilan iklim, pertanyaan utamanya bukan semata apakah skema tersebut mengurangi emisi di atas kertas, melainkan apakah ia memperkuat atau melemahkan kedaulatan komunitas atas wilayahnya, dan apakah hak-hak adat diakui. Pendekatan alternatif mengusulkan mekanisme yang lebih berbasis hak, seperti pembiayaan hibah publik, penguatan kepemilikan komunal, dan penghapusan hambatan struktural bagi eksperimen energi komunitas, bukan sekadar memperhalus desain instrumen pasar yang sudah timpang.

Di tingkat lokal, praktik *degrowth* dan *sufficiency* dalam sektor energi sering bermula dari inisiatif kecil yang menolak logika ekspansi tanpa batas, sembari mempraktikkan solidaritas konkret. Kooperasi energi warga, inisiatif retrofit rumah susun, dan proyek mikrogrid berbasis *energi terbarukan* yang dimiliki komunitas adalah contoh di mana tujuan utamanya bukan memaksimalkan laba, tetapi meminimalkan kemiskinan energi,

meningkatkan kontrol warga atas infrastruktur, dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan besar. Di sini, logika net-zero yang abstrak diganti dengan praktik yang mengutamakan kebutuhan riil: pemanasan, pencahayaan, mobilitas dasar. Walaupun skalanya kecil dibanding target nasional, eksperimen semacam ini penting karena memperluas imajinasi kebijakan, menunjukkan bahwa transisi tidak harus dikomando secara terpusat atau digerakkan semata oleh jalan keluar teknokratik.

Keadilan iklim juga menghubungkan kritik atas net-zero dengan tuntutan reparasi sejarah. Banyak negara dan komunitas yang nyaris tidak berkontribusi pada akumulasi emisi global kini berada di garis depan bencana iklim—banjir, kekeringan, gelombang panas—sambil menghadapi keterbatasan fiskal dan utang yang menjerat. Literatur kebijakan iklim global menunjukkan bahwa tanpa instrumen keuangan yang dirancang khusus untuk mengatasi kerugian dan kerusakan, beban adaptasi akan terus jatuh pada mereka yang paling rentan, sementara pusat keuangan global tetap diuntungkan oleh status quo (Malik & Ford, 2025). Alternatif terhadap logika net-zero menuntut agar arsitektur pendanaan iklim dirombak, mengalihkan fokus dari skema pinjaman berbunga dan proyek yang berorientasi laba ke mekanisme hibah, penghapusan utang, dan dana kerugian–kerusakan yang memprioritaskan kebutuhan komunitas terdampak.

Di ranah wacana, istilah seperti *degrowth*, *sufficiency*, dan keadilan iklim membantu membongkar narasi "transisi yang tak terhindarkan" yang kerap hadir dalam pidato pejabat dan korporasi. Narasi resmi sering menggambarkan perubahan sebagai proses linier yang terutama membutuhkan inovasi teknologi dan manajemen yang baik, sementara relasi kekuasaan dan konflik kepentingan hanya disebut sekilas. Dengan memperkenalkan istilah-istilah alternatif ini, kita

memaksa diskusi publik untuk mengakui bahwa arah transisi adalah hasil dari pertarungan kepentingan, bukan hukum alam. Misalnya, keputusan untuk memperluas bandara atau membangun kawasan industri energi intensif sering dibungkus sebagai "keharusan pembangunan", padahal di baliknya ada pilihan untuk tidak mengadopsi *sufficiency* dan tidak mengurangi konsumsi mewah kelompok tertentu. Bahasa alternatif membuka ruang bagi pertanyaan: transisi seperti apa, dan untuk siapa?

Penerapan kerangka *degrowth* dan *sufficiency* dalam *kebijakan energi* menuntut pergeseran indikator kinerja yang diakui secara resmi. Alih-alih hanya menghitung gigawatt kapasitas baru atau triliun rupiah investasi, kebijakan perlu mengukur penurunan konsumsi energi per kapita di kelompok berpendapatan tinggi, pengurangan ketimpangan akses energi, serta peningkatan kendali komunitas atas infrastruktur penting. Ini berarti mengintegrasikan indikator keadilan distribusi, partisipasi, dan pengakuan ke dalam perencanaan energi nasional dan daerah. Di sisi lain, kerangka ini juga menuntut keberanian politik untuk membatasi ekspansi sektor yang sangat intensif energi namun bernilai sosial rendah, seperti iklan digital berlebihan, pusat data yang murni melayani konsumsi hiburan, atau pola mobilitas yang bergantung pada kendaraan pribadi. Tanpa perubahan indikator dan keberanian politik, alternatif terhadap logika net-zero akan tetap menjadi jargon di pinggiran diskursus.

Akhirnya, alternatif terhadap logika net-zero mengajak kita membayangkan ulang hubungan antara politik domestik, diplomasi iklim, dan gerakan sosial. Net-zero telah menjadi semacam "mata uang simbolik" dalam negosiasi internasional: negara yang mengumumkan target ambisius dipuji sebagai pemimpin, terlepas dari apakah kebijakan domestiknya sejalan. Gagasan *degrowth*, *sufficiency*, dan keadilan iklim justru

mengukur kepemimpinan dari kesediaan untuk mengurangi konsumsi berlebih di dalam negeri, mengubah struktur insentif ekonomi, dan mengalihkan sumber daya ke negara serta komunitas paling rentan. Di sini, tekanan dari gerakan sosial, komunitas terdampak, dan jaringan transnasional menjadi kunci untuk menantang simbolisme kosong dan memaksa pergeseran substantif. Dengan demikian, alternatif ini bukan hanya proyek teknokratik, tetapi juga proyek demokratisasi kekuasaan dalam menentukan masa depan iklim dan energi dunia.

6 Keamanan, Kedaulatan, Ketahanan: Metafora yang Mengarahkan Prioritas Kebijakan

6.1 "Keamanan Energi" sebagai Metafora: Ancaman, Musuh, dan Prioritas Negara

Keamanan energi sering dibayangkan seakan-akan ia adalah fakta teknis yang netral: cukup pastikan pasokan stabil, harga terjangkau, dan jaringan listrik tidak sering padam, maka persoalan dianggap selesai. Namun ketika kita menelisik bahasa yang dipakai pemerintah, lembaga internasional, dan korporasi, "keamanan energi" tampak lebih mirip metafora politik daripada sekadar indikator teknis. Di dalamnya tersimpan imaji ancaman, musuh, dan keadaan darurat yang harus segera ditangani, sehingga membuka ruang bagi penggunaan instrumen kekuasaan yang lebih keras, mulai dari subsidi selektif, pengendalian harga, hingga prioritisasi proyek tertentu. Filsafat kekuasaan mengajak kita membaca metafora ini sebagai cara negara mengatur bagaimana warga memandang risiko, siapa yang berhak mendefinisikan krisis, dan kebijakan apa yang dapat dibenarkan atas nama perlindungan bangsa, pasar, serta masa depan pembangunan.

Secara historis, istilah *energy security* muncul kuat sejak krisis minyak 1970-an, ketika negara-negara importir menyadari rapuhnya ketergantungan mereka pada beberapa pemasok di kawasan tertentu. Narasi keamanan energi lalu dikaitkan dengan kedaulatan, kemampuan militer, dan kontrol terhadap jalur pasokan strategis. Di banyak dokumen strategi nasional, keamanan energi diposisikan sejajar dengan keamanan pangan dan keamanan pertahanan, sehingga setiap

gangguan pasokan dengan mudah dibaca sebagai ancaman terhadap kelangsungan negara. Pola pikir inilah yang kemudian merembes ke cara kita berbicara tentang pembangkit listrik, jaringan pipa, dan kontrak jangka panjang. Seolah-olah infrastruktur energi tidak lagi sekadar masalah teknik dan ekonomi, tetapi bagian dari benteng pertahanan yang harus dijaga dengan segala cara.

Ketika pemerintah menyebut gangguan pasokan sebagai ancaman terhadap "keamanan nasional", publik cenderung menerima bahwa kebijakan darurat, investasi besar, atau proyek infrastruktur yang kontroversial perlu segera dijalankan tanpa banyak perdebatan. Di titik ini, keamanan energi bekerja sebagai metafora yang memampatkan beragam risiko – dari perang, ketidakstabilan harga, hingga protes sosial – ke dalam satu frasa yang mudah diingat tetapi sarat nilai. Dalam konteks *energi terbarukan*, metafora tersebut dapat dipakai secara ganda: kadang untuk menjelekkan sumber energi baru sebagai tidak stabil dan berbahaya bagi keandalan sistem, kadang untuk menyanjungnya sebagai solusi kedaulatan karena mengurangi impor bahan bakar fosil. Pergeseran makna ini menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya pilihan teknologi, melainkan juga siapa yang boleh mendefinisikan apa itu ancaman dan apa itu keamanan.

Filsafat bahasa mengingatkan bahwa metafora bukan sekadar pernak-pernik retoris, tetapi turut menentukan apa yang dianggap mungkin dan sah dalam ranah kebijakan. Ketika *energy security* digambarkan seperti benteng yang harus dilindungi dari serangan, maka aktor yang diposisikan sebagai "musuh" berpotensi diperlakukan sebagai objek pengendalian: bisa negara lain, perusahaan asing, bahkan warga lokal yang menolak proyek infrastruktur. Implikasi etisnya signifikan, karena wacana ancaman kerap mengaburkan ketimpangan kuasa antara pemerintah, korporasi, dan komunitas terdampak.

Dalam situasi konflik lahan, misalnya, suara warga yang mengkritik dampak lingkungan sering dibingkai sebagai penghambat pembangunan, bukan sebagai pihak yang sah mengajukan klaim keadilan.

Metafora keamanan juga menyusup ke dalam indikator dan model yang tampak teknokratis. Indeks keamanan energi sering mereduksi persoalan menjadi beberapa dimensi yang dapat diukur: diversifikasi sumber, keandalan jaringan, volatilitas harga, dan ketergantungan impor. Di satu sisi, ukuran ini berguna untuk perbandingan lintas negara dan perencanaan jangka panjang. Namun di sisi lain, ia cenderung menghilangkan dimensi yang sulit dikuantifikasi, seperti rasa aman warga terhadap masa depan kampung mereka, pengalaman ketidakadilan historis, atau trauma akibat pemindahan paksa. Ketika angka-angka tersebut masuk ke meja perundingan regional dan global, suara yang tidak tercermin dalam indikator menjadi mudah dikesampingkan, padahal merekalah yang paling merasakan dampak sehari-hari dari perubahan sistem energi.

Dalam praktik, metafora keamanan energi bisa menggeser prioritas dari kebutuhan rumah tangga miskin menuju agenda makro yang lebih abstrak. Pemerintah mungkin menjustifikasi pembangunan terminal gas, jaringan pipa, atau pembangkit besar atas nama mengurangi risiko gangguan pasokan, sementara masalah keterjangkauan tarif dan pemutusan listrik di tingkat rumah tangga tidak mendapat perhatian memadai. Di sini tampak bahwa definisi keamanan dikendalikan oleh aktor yang memiliki akses ke forum perencanaan dan keahlian teknis, bukan oleh mereka yang sehari-hari mengalami kerentanan. Bagi banyak keluarga, "keamanan" berarti kemampuan membayar tagihan dan memperoleh layanan yang stabil; tetapi dalam dokumen *kebijakan energi*, keamanan lebih sering berarti kestabilan makroekonomi dan kenyamanan investor, bukan keberlangsungan hidup warga miskin.

Dimensi kedaulatan juga berkelindan erat dengan keamanan energi. Negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar fosil sering melihat diversifikasi sumber dan pemasok sebagai agenda strategis, bukan sekadar keputusan ekonomi. Dalam diskusi tentang transisi energi, muncul gagasan "geopolitik transisi hijau" untuk menggambarkan bagaimana kompetisi atas teknologi, mineral kritis, dan rantai pasok baru menciptakan bentuk kerentanan yang berbeda. Kajian tentang kekuatan geoekonomi Uni Eropa menunjukkan bahwa upaya memperkuat keamanan energi dapat sekaligus memperluas pengaruh politik melalui standar, regulasi, dan mekanisme pasar yang mempengaruhi negara lain (Jerzyniak dan Herranz-Surrallés, 2022). Artinya, di balik retorika pengurangan risiko, terdapat praktik pengaturan ulang hierarki antara negara pusat teknologi dan negara yang menjadi pemasok bahan baku atau lokasi proyek energi.

Metafora keamanan energi juga mengatur bagaimana risiko lingkungan dipandang dan dialokasikan. Ketika prioritas utama adalah menjaga pasokan dan stabilitas sistem, dampak ekologis dari eksploitasi sumber daya sering diperlakukan sebagai kompromi yang dapat diterima. Perluasan tambang batu bara, pembangunan jaringan pipa gas di wilayah sensitif, atau proyek pembangkit besar di kawasan pesisir bisa dipresentasikan sebagai "harga yang wajar" demi menjamin bahwa lampu tetap menyala dan industri tetap berjalan. Padahal, komunitas lokal yang terdampak menanggung risiko jangka panjang: kerusakan tanah, hilangnya mata pencaharian tradisional, dan meningkatnya kerentanan terhadap bencana. Di sini, keamanan bagi sebagian orang berarti ketidakamanan bagi yang lain, tetapi ketimpangan ini tidak selalu tampak dalam narasi resmi.

Di era transisi menuju sistem berbasis *energi terbarukan*, metafora keamanan energi mengalami transformasi baru. Di

satu sisi, energi surya dan angin dijual sebagai cara mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kedaulatan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang intermitensi, kebutuhan sistem penyimpanan, dan kerentanan terhadap perubahan pola cuaca yang ekstrem. Kekhawatiran tersebut kerap digunakan sebagai alasan untuk mempertahankan pembangkit fosil atau menunda penutupan infrastruktur lama. Akibatnya, narasi keamanan berpotensi menghambat transformasi yang lebih radikal menuju sistem energi yang adil dan rendah karbon, dengan cara menonjolkan risiko teknis sambil mengecilkan risiko sosial dan ekologis dari kelanjutan penggunaan bahan bakar fosil.

Satu aspek penting yang sering luput adalah bagaimana metafora keamanan mengatur imajinasi masa depan. Ketika masa depan dibayangkan terutama sebagai rentetan krisis yang harus dicegah – pemadaman, lonjakan harga, gangguan pasokan – kebijakan cenderung fokus pada solusi jangka pendek yang memperkuat status quo. Investasi diarahkan pada infrastruktur besar yang mudah dikendalikan dari pusat, sementara solusi desentralisasi komunitas, koperasi energi, atau skema kepemilikan warga dipandang terlalu kecil atau berisiko terhadap stabilitas. Padahal, berbagai eksperimen menunjukkan bahwa diversifikasi bentuk kepemilikan dan pengelolaan dapat meningkatkan ketahanan sosial, sekaligus membuka ruang pembagian manfaat yang lebih adil, terutama di wilayah yang selama ini diposisikan hanya sebagai lokasi produksi energi.

Metafora keamanan juga mempengaruhi cara aparat negara memahami kritik dan perlawanan. Ketika sebuah proyek ditempatkan dalam bingkai "vital untuk keamanan energi", aksi protes warga atau organisasi masyarakat sipil mudah dilabeli sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional. Label tersebut membuat dialog substantif tentang pilihan teknologi, tata kelola, dan desain kelembagaan menjadi tersisih oleh logika kawan–lawan. Dalam situasi seperti itu, warga yang menyuarakan

kekhawatiran atas polusi, hilangnya hak atas tanah, atau ketimpangan manfaat bisa dipandang sebagai pihak yang harus "dikelola", bukan mitra deliberasi. Dengan demikian, metafora keamanan bukan hanya memengaruhi alokasi sumber daya, tetapi juga memetakan siapa yang layak diajak bicara dan siapa yang dianggap pengganggu.

Jika kita menelusuri dokumen strategi nasional dan regional, istilah "keamanan energi" sering ditempatkan berdampingan dengan konsep ancaman hibrida, perang ekonomi, dan ketahanan infrastruktur kritis. Dalam teks-teks tersebut, *kebijakan energi* berkelindan dengan doktrin pertahanan dan strategi industri, sehingga batas antara pengaturan pasar dan pengelolaan ancaman menjadi kabur. Perusahaan negara atau korporasi besar mudah disandingkan dengan lembaga militer sebagai penjaga kepentingan nasional, sementara aktor lokal dan pemerintah daerah direduksi perannya menjadi pelaksana. Konfigurasi ini membuat penataan ulang kewenangan dan sumber daya bisa dibenarkan atas nama keamanan, meskipun konsekuensinya adalah berkurangnya ruang bagi eksperimen kebijakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan sosial.

Dari sudut pandang filsafat kekuasaan, membaca "keamanan energi" sebagai metafora berarti mengajukan pertanyaan kritis yang akan mewarnai seluruh buku ini: keamanan bagi siapa, dengan cara apa, dan atas biaya siapa. Pertanyaan-pertanyaan ini menantang klaim netralitas teknis yang sering melekat pada diskusi sistem energi. Dengan membongkar lapisan ancaman, musuh, dan prioritas yang tertanam dalam istilah tersebut, kita dapat melihat bagaimana bahasa kebijakan mengatur horizon kemungkinan, menyingkirkan beberapa opsi, dan mengukuhkan yang lain sebagai satu-satunya jalan rasional. Pembacaan kritis ini penting sebagai landasan untuk merancang ulang wacana, sehingga

keamanan tidak hanya diartikan sebagai stabilitas pasokan dan harga, tetapi juga sebagai jaminan martabat, keadilan distribusi risiko, dan hak komunitas untuk ikut menentukan arah pembangunan energi di wilayah mereka sendiri.

6.2 Kedaulatan Energi: Kontrol atas Sumber Daya, Teknologi, dan Data

Kedaulatan energi tidak cukup dipahami sebagai kemampuan suatu negara menjaga pasokan listrik agar tidak padam, melainkan sebagai kemampuan kolektif mengendalikan seluruh rantai kuasa di balik infrastruktur energi: dari penguasaan sumber daya alam, desain teknologi, hingga produksi dan aliran data yang mengatur sistem tersebut. Dalam kerangka filsafat kekuasaan, kedaulatan energi adalah soal siapa yang berhak memutuskan, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang menikmati manfaat ketika suatu proyek pembangkit dibangun, jaringan transmisi diperluas, atau subsidi diubah. Karena itu, kedaulatan energi selalu bersinggungan dengan konflik kepentingan antara negara, korporasi, komunitas lokal, dan warga biasa yang membayar tarif listrik setiap bulan. Di dalam ketegangan tersebut, klaim "kedaulatan" bisa menjadi retorika kosong, kecuali jika diterjemahkan ke dalam institusi, prosedur, dan tata kelola yang betul-betul mengalihkan kendali dari segelintir aktor kuat menuju ruang publik yang lebih demokratis dan akuntabel.

Secara historis, metafora kedaulatan berakar pada gambaran negara yang berdaulat atas wilayah dan perbatasan tertentu, namun dalam konteks energi, wilayah itu tidak lagi hanya berupa tanah dan laut, melainkan juga jaringan kabel, pipa, gardu induk, dan server yang menyimpan data konsumsi serta produksi. Perubahan menuju sistem desentralisasi pembangkitan menambah kompleksitas ini, karena pusat-pusat kekuasaan baru bermunculan di tingkat kota, desa, bahkan

rumah tangga yang memiliki panel surya. Studi tentang desentralisasi listrik menunjukkan bahwa pergeseran ini selalu diiringi pergeseran struktur kekuasaan politik, meskipun kemenangan kebijakan yang nyata sering kali langka (Brisbois, 2020). Dalam pengertian ini, kedaulatan energi bukan hanya soal menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga mengelola reskala kekuasaan: siapa yang mengambil keputusan di pusat, siapa yang menentukan di daerah, dan bagaimana warga dapat bernegosiasi di antara keduanya tanpa tersisih oleh kepentingan korporasi besar maupun birokrasi yang tertutup.

Di dalam wacana kedaulatan energi, *energy sovereignty* sering dipromosikan sebagai jawaban terhadap ketergantungan impor, tetapi konsep ini mudah disederhanakan jika kita menutup mata terhadap struktur global yang mengatur aliran bahan baku, teknologi, dan pembiayaan untuk energi terbarukan. Di permukaan, sebuah negara tampak mandiri karena memiliki potensi surya, angin, atau panas bumi yang melimpah, tetapi di balik itu masih bergantung pada impor modul surya, turbin, baterai, dan perangkat lunak dari segelintir pusat manufaktur dunia. Kedaulatan yang hanya diukur dari kapasitas terpasang menutupi fakta bahwa kendali atas harga, spesifikasi teknis, dan standar keselamatan sering berada di tangan aktor asing. Dengan demikian, *energy sovereignty* yang serius menuntut kemampuan menawar dalam rantai pasok global, membangun industri pendukung lokal, dan merancang perjanjian dagang yang tidak menjebak negara dalam posisi sebagai pasar pasif bagi teknologi yang dikembangkan di tempat lain.

Dimensi kedua dari kedaulatan energi adalah kontrol atas teknologi yang mengoperasikan sistem kelistrikan, mulai dari desain turbin hingga algoritma yang memprediksi beban puncak harian. Banyak negara terjebak dalam apa yang sering disebut *technology lock-in*, yaitu kondisi ketika pilihan teknologi di masa

lalu membuat sangat sulit dan mahal untuk beralih ke pilihan lain, karena seluruh infrastruktur, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia sudah dibangun hanya untuk satu jenis teknologi. Bagi negara yang ingin membangun kedaulatan energi, bergantung pada satu pemasok teknologi utama berarti menyerahkan ruang tawar dan kemandirian strategis. Oleh karena itu, kebijakan industri yang mendorong transfer teknologi yang adil, pengembangan riset domestik, dan kerja sama yang tidak hanya menjadikan negara sebagai pasar tetapi juga sebagai produsen pengetahuan menjadi bagian tak terpisahkan dari proyek kedaulatan energi.

Di luar sumber daya dan teknologi, arena paling subtil dari kedaulatan energi adalah desain aturan main yang mengatur siapa boleh masuk dan bagaimana mereka boleh bermain dalam sistem energi nasional. Di sini konsep *energy governance*—yakni cara lembaga, aturan, dan proses mengatur sektor energi—menjadi kunci, karena menghubungkan keputusan teknis dengan kepentingan politik yang melatarbelakanginya. Penelitian tentang transisi energi di Brasil, misalnya, menunjukkan bahwa desain kebijakan untuk mendorong sumber-sumber berkelanjutan tidak pernah netral, melainkan dibentuk oleh konfigurasi aktor publik dan swasta yang berusaha mengarahkan arah pembangunan energi sesuai kepentingannya (Werner & Lazaro, 2023). Dalam konteks kedaulatan energi, hal itu berarti bahwa regulasi tarif, skema insentif, dan prosedur perizinan dapat memperkuat kekuasaan korporasi besar, atau sebaliknya membuka ruang bagi koperasi energi, pemerintah daerah, dan inisiatif warga untuk menjadi pelaku penting dalam arsitektur sistem energi.

Kedaulatan energi juga selalu dinegosiasikan di dalam ruang *kebijakan energi* yang dipenuhi narasi bersaing, di mana jargon "ketahanan" dan "kemandirian" bisa dipakai untuk tujuan yang sangat berbeda. Di satu sisi, pemerintah dapat

menggunakan bahasa kedaulatan untuk membenarkan investasi besar-besaran pada energi fosil domestik atas nama mengurangi ketergantungan impor, meskipun hal itu memperpanjang masa hidup infrastruktur yang merusak iklim. Di sisi lain, komunitas lokal dapat menggunakan bahasa yang sama untuk menentang proyek ekstraktif yang mengancam ruang hidup mereka, dan menuntut pilihan yang lebih adil secara sosial. Konflik ini memperlihatkan bahwa kedaulatan energi bukan konsep yang tunggal, melainkan medan pertarungan makna, di mana kelompok-kelompok yang berbeda berusaha menempelkan agenda sendiri pada istilah yang tampak patriotik dan tak terbantahkan di mata publik.

Di era digital, kedaulatan energi tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan data, karena setiap perangkat pintar, meteran otomatis, dan sensor jaringan menghasilkan jejak digital yang sangat berharga. Data konsumsi dan produksi listrik harian, mislanya, memungkinkan perusahaan maupun pemerintah memetakan kebiasaan rumah tangga: kapan mereka berada di rumah, jenis peralatan apa yang digunakan, hingga pola pengeluaran yang dapat dihubungkan dengan kemampuan ekonomi. Ketika data tersebut dikelola oleh perusahaan teknologi global atau tersimpan di pusat data di luar negeri, kedaulatan energi ikut tergerus karena kemampuan negara dan warga untuk mengendalikan penggunaan informasi strategis menjadi terbatas. Istilah *big data* merujuk pada kumpulan data dalam jumlah sangat besar dan beragam yang dianalisis dengan perangkat komputasi canggih; bagi pembaca awam, ini berarti bahwa siapapun yang menguasai data dan alat analisisnya berpotensi mengarahkan kebijakan dan perilaku pengguna tanpa disadari oleh publik.

Dalam konteks ini, banyak sistem energi modern bergantung pada platform digital yang menghubungkan produsen, konsumen, dan pengelola jaringan dalam satu

ekosistem yang tampak efisien, tetapi menyimpan risiko konsentrasi kekuasaan baru. Konsep *algorithmic governance* menggambarkan situasi ketika keputusan penting—misalnya kapan pembangkit tertentu harus dinyalakan, berapa tarif dinamis yang dikenakan pada jam tertentu, atau siapa yang mendapat prioritas sambungan baru—ditentukan oleh algoritma yang dirancang perusahaan dan tidak transparan bagi publik. Bagi pembaca awam, hal ini berarti bahwa kebijakan energi bisa diputuskan oleh rumus-rumus matematis yang tidak pernah mereka lihat, meskipun dampaknya langsung terasa dalam tagihan listrik dan kualitas lingkungan. Jika pusat data, perangkat lunak, dan layanan awan yang menopang algoritma ini dimiliki aktor asing, maka klaim kedaulatan energi menjadi rapuh, karena kendali praktis berada di luar jangkauan sistem demokrasi nasional.

Bagi negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kedaulatan energi harus dibaca bersamaan dengan kerentanan terhadap krisis iklim dan kebutuhan mendesak untuk mengalihkan sistem energi menuju jalur rendah karbon. Penelitian terbaru tentang sistem energi Indonesia menekankan bahwa kebijakan yang tangguh iklim mensyaratkan integrasi antara ketahanan infrastruktur, ekspansi kapasitas energi terbarukan, dan penguatan tata kelola yang mendorong partisipasi publik, bukan sekadar menambah proyek besar dari atas (Setiawan et al., 2025). Ketika kebijakan diarahkan hanya untuk mencapai target numerik, seperti persentase bauran energi, tanpa memperhatikan siapa yang mengendalikan aset, teknologi, dan aliran data, kedaulatan energi yang dihasilkan bersifat semu. Sebaliknya, pemahaman yang lebih mendalam tentang distribusi resiko dan manfaat di antara wilayah dan kelompok sosial menjadi prasyarat agar kedaulatan energi tidak berubah menjadi selubung baru bagi ketidakadilan lama.

Dimensi keempat dari kedaulatan energi adalah peran komunitas dan pemerintah daerah dalam mengendalikan masa depan sistem energi di wilayahnya sendiri. Konsep *energy democracy* sering digunakan untuk menggambarkan upaya yang memberi warga kesempatan nyata berpartisipasi dalam perencanaan, kepemilikan, dan pengawasan proyek energi; bagi pembaca awam, ini berarti warga tidak hanya diajak hadir di sosialisasi, tetapi memiliki suara yang diikat dalam aturan, misalnya melalui kepemilikan saham koperasi atau hak veto tertentu. Kedaulatan energi yang berorientasi demokratis mendorong model pembangkit skala komunitas, skema pembiayaan yang terjangkau, dan mekanisme pembagian manfaat yang jelas bagi warga lokal. Dalam kerangka ini, negara tidak sekadar memonopoli klaim kedaulatan, melainkan berbagi kewenangan dengan entitas lokal sehingga keputusan tentang proyek energi besar tidak meminggirkan mereka yang hidup paling dekat dengan lokasi pembangkit atau jaringan transmisi.

Namun, kedaulatan energi juga harus menghadapi kenyataan bahwa sistem energi modern semakin terhubung lintas batas negara melalui perdagangan listrik, gas, maupun komponen teknologi. Di satu sisi, interkoneksi jaringan memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan mendukung integrasi skala besar sumber daya terdistribusi. Di sisi lain, ketergantungan pada impor listrik atau bahan bakar dari tetangga dapat menimbulkan bentuk baru kerentanan geopolitik, di mana konflik politik atau ekonomi dengan satu negara dapat mengguncang sistem energi domestik. Dalam situasi ini, kedaulatan energi tidak dapat diartikan sebagai penutupan diri dari kerja sama internasional, melainkan sebagai kemampuan merancang perjanjian dan institusi regional yang menjaga ruang keputusan nasional sekaligus memanfaatkan keuntungan integrasi. Tantangannya adalah memastikan bahwa suara masyarakat dan kepentingan lingkungan tidak tersisih

dalam negosiasi yang sering kali berlangsung di level elit diplomatik.

Pada akhirnya, inti kedaulatan energi adalah pertanyaan tentang siapa yang dihitung, didengar, dan dilindungi dalam *kebijakan energi* yang sedang dan akan datang. Tanpa transparansi mengenai kepemilikan aset, kontrak jangka panjang, dan algoritma yang mengatur operasi sistem, warga hanya diminta percaya bahwa keputusan diambil demi "kepentingan nasional" tanpa kesempatan untuk menguji klaim tersebut. Kedaulatan yang bertumpu pada warga memerlukan mekanisme akuntabilitas yang nyata: hak atas informasi yang mudah dipahami, forum deliberasi yang tidak hanya simbolis, serta lembaga pengawas yang independen dari kepentingan politik jangka pendek. Dengan demikian, kedaulatan energi tidak berhenti pada simbol bendera di atas infrastruktur pembangkit, tetapi diwujudkan dalam prosedur yang memampukan warga biasa untuk mempertanyakan, menegosiasikan, dan ketika perlu menolak keputusan yang mengancam masa depan ekologis dan sosial mereka.

Jika kedaulatan energi dipandang sebagai proyek jangka panjang, maka ia menuntut perubahan cara kita memaknai kekuasaan dalam sektor energi: dari kekuasaan yang semata-mata memutuskan siapa memasok dan siapa membeli, menuju kekuasaan yang menata ulang hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Dalam horizon ini, penguasaan sumber daya, teknologi, dan data menjadi sarana untuk memperluas ruang kebebasan kolektif, bukan sekadar alat mempertahankan dominasi aktor yang sudah kuat. Kedaulatan energi yang berkelanjutan mensyaratkan keberanian untuk membongkar praktik lama yang menyamakan keamanan energi dengan ekspansi infrastruktur fosil, serta kepekaan terhadap dimensi keadilan sosial di setiap keputusan investasi. Dengan merangkai ulang metafora kedaulatan, ketahanan, dan keamanan dalam

kerangka ini, kita membuka kemungkinan arsitektur kebijakan yang tidak hanya menjawab krisis iklim, tetapi juga menata ulang distribusi kekuasaan di dalam dan di sekitar sistem energi.

6.3 Ketahanan (*Resilience*) sebagai Wacana Adaptif: Siapa yang Diminta Beradaptasi

Ketika kata *resilience* mulai menjadi mantra baru dalam wacana perubahan iklim dan kebijakan energi, seolah-olah semua persoalan kerentanan dapat disederhanakan menjadi kemampuan "beradaptasi". Namun, di balik istilah yang tampak netral ini, tersembunyi pertanyaan filsafati yang jauh lebih tajam: siapa yang diminta untuk beradaptasi, siapa yang dilindungi, dan siapa yang dibiarkan menanggung risiko? Negara, korporasi energi, lembaga internasional, dan lembaga keuangan global sering menggunakan bahasa *resilience* untuk menunjukkan keseriusan merespons krisis iklim, tetapi di tingkat warga, istilah yang sama bisa berarti menerima pemadaman listrik berkala, tarif yang naik, atau relokasi dari wilayah yang dianggap terlalu berbahaya atau tidak efisien dipertahankan. Di titik inilah "ketahanan" berubah dari sekadar konsep teknis menjadi tata bahasa kekuasaan: ia mengatur bagaimana penderitaan didistribusikan, bagaimana pengorbanan dinormalisasi, dan bagaimana ketidakadilan dapat disamarkan sebagai keharusan adaptasi rasional.

Arus utama kebijakan iklim global menunjukkan pergeseran dari bahasa mitigasi semata menuju kombinasi mitigasi dan adaptasi, yang di dalamnya *resilience* menjadi kata kunci untuk mengikat berbagai program, indikator, dan pendanaan. Namun, ketika kita mengikuti jejak dokumen-dokumen resmi dan keputusan konferensi iklim, tampak bahwa topik tertentu menguat dan menghilang seiring waktu, bukan semata karena pertimbangan ilmiah, tetapi juga karena pertarungan politik tentang apa yang dianggap layak menjadi

prioritas (Goldstein et al., 2025). Dalam konteks ini, *resilience* sering hadir bukan sebagai konsep yang jernih, melainkan sebagai simpul wacana yang menggabungkan kepentingan negosiasi, strategi komunikasi, dan kebutuhan menjaga legitimasi lembaga internasional. Hal ini membuat kita perlu berhati-hati: ketika pemerintah mengulang kata ketahanan, apakah yang dimaksud adalah ketahanan infrastruktur, anggaran, atau justru kesabaran warga untuk menanggung risiko yang terus-menerus direproduksi?

Di ranah sistem energi, *resilience* biasanya didefinisikan sebagai kemampuan jaringan untuk tetap berfungsi ketika terjadi gangguan: bencana alam, lonjakan permintaan, atau kegagalan teknologi. Di atas kertas, definisi ini tampak teknis dan netral, tetapi dalam praktik, penguatan ketahanan sering diterjemahkan menjadi prioritas proteksi bagi pusat-pusat konsumsi utama dan kawasan ekonomi strategis, sementara komunitas pinggiran dipandang sekadar sebagai beban yang boleh saja mengalami pemadaman lebih sering. Promosi *energi terbarukan* pun kadang dibungkus sebagai agenda peningkatan ketahanan, namun tanpa jaminan bahwa desain teknis dan kelembagaan benar-benar mengurangi ketimpangan akses dan keandalan. Bagi warga di wilayah rural, "diminta beradaptasi" dapat berarti menyesuaikan ritme kehidupan dengan pasokan listrik yang fluktuatif, membeli peralatan tambahan seperti baterai rumah tangga, atau menerima bahwa malam hari akan lebih gelap karena jaringan prioritasnya bukan untuk mereka.

Standar dan indikator yang digunakan untuk mengukur *resilience* sistem energi dibangun melalui serangkaian keputusan teknis yang sarat asumsi normatif. Indeks keandalan, durasi pemadaman rata-rata, atau kapasitas cadangan tidak hanya mencerminkan kondisi fisik jaringan, tetapi juga keputusan politik tentang kerentanan siapa yang dianggap signifikan. Ketika regulator memusatkan perhatian pada

stabilitas pasokan untuk kawasan industri besar atau pusat keuangan nasional, maka penderitaan rumah tangga di kampung kota, desa terpencil, atau pulau-pulau kecil dapat "tenggelam" di balik angka agregat yang tampak baik. Di sini, warga diminta beradaptasi pada logika statistik yang tidak mereka rumuskan sendiri: pengalaman kehilangan makanan karena lemari es mati, anak yang tidak bisa belajar saat malam, atau usaha mikro yang berhenti beroperasi tidak diartikan sebagai kegagalan kebijakan, melainkan sekadar fluktuasi normal dalam batas toleransi sistem.

Jika ditarik ke belakang, sejarah konsep *resilience* berangkat dari ekologi dan ilmu kebencanaan, kemudian menyebar ke ranah pembangunan, kemanusiaan, dan kebijakan publik. Di tangan lembaga-lembaga global, *resilience* lalu menjadi payung besar yang menyatukan isu iklim, bencana, dan pembangunan, sehingga seolah-olah masyarakat lokal selalu dapat "diberdayakan" untuk bertahan tanpa perlu perubahan signifikan pada struktur kekuasaan dan pola produksi. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa, bahkan setelah guncangan besar seperti kecelakaan nuklir atau krisis energi, pola dasar kebijakan bisa saja tetap bertahan karena negara menimbang kepentingan ekonomi dan geopolitik lebih tinggi daripada perlindungan warga (Kameyama, 2021). Di titik ini, *resilience* menjadi tameng diskursif: negara terlihat responsif, tetapi orientasi dasarnya tidak bergeser dari perlindungan pertumbuhan dan industri yang sudah mapan.

Dalam bahasa *kebijakan energi*, *resilience* kerap diartikan sebagai kemampuan pasokan nasional untuk tidak terguncang oleh krisis: konflik geopolitik, fluktuasi harga impor, atau kegagalan sumber tertentu. Namun, cara menerjemahkan ketahanan ini sering menyempit pada gagasan diversifikasi sumber impor, pembangunan infrastruktur jaringan besar-besaran, atau penambahan pembangkit cadangan yang

sebenarnya menjaga posisi pemain dominan di sektor energi. Narasi ketahanan semacam ini bisa saja digunakan untuk membenarkan investasi baru pada infrastruktur fosil dengan alasan "jembatan" menuju masa depan yang lebih hijau, meskipun secara jangka panjang justru mengunci ketergantungan pada pola konsumsi energi intensif. Sementara itu, perubahan yang menantang struktur pasar, seperti demokratisasi kepemilikan energi komunitas atau distribusi ulang beban risiko ke perusahaan besar, sering dianggap terlalu radikal dan tidak sejalan dengan ide betapa sebuah sistem energi yang "stabil" seharusnya bekerja.

Jika kita menggeser fokus dari sistem ke kehidupan sehari-hari, maka pertanyaan "siapa yang diminta beradaptasi" menemukan bentuk yang sangat konkret. Warga diminta mengubah pola konsumsi listrik, membeli perangkat hemat energi, menyesuaikan jadwal penggunaan peralatan rumah tangga, bahkan mengubah cara mereka memasak atau menerangi rumah. Perubahan ini sering dipresentasikan sebagai tindakan moral dan rasional demi kebaikan bersama, padahal besarnya kontribusi penghematan tersebut mungkin sangat kecil dibandingkan keputusan investasi korporasi energi besar atau pilihan teknologi negara. Di sisi lain, rumah tangga miskin yang sudah berada di batas minimum konsumsi energi justru kesulitan melakukan pengurangan lebih jauh, sehingga mereka mengalami "adaptasi paksa" melalui pemadaman diri sendiri: mematikan lampu, menahan penggunaan kipas atau pendingin udara, dan mengurangi aktivitas produktif yang bergantung pada listrik.

Dalam konteks ketimpangan global, *resilience* juga sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana negara-negara di Selatan global perlu mempersiapkan diri menghadapi dampak krisis iklim yang sebagian besar disebabkan oleh emisi historis negara-negara kaya. Program-program adaptasi dan ketahanan

yang didanai lembaga internasional mendorong pembangunan infrastruktur dan kapasitas lokal, tetapi tidak selalu disertai perubahan serius dalam pola produksi dan konsumsi di pusat-pusat kekuasaan ekonomi dunia. Dengan kata lain, komunitas yang paling sedikit berkontribusi pada krisis diminta menjadi yang paling tahan. Implikasi etisnya serius: konsepsi *resilience* yang tidak dikoreksi secara normatif berisiko mengubah ketidakadilan historis menjadi kewajaran baru, di mana ketabahan warga menghadapi banjir, kekeringan, dan gangguan pasokan listrik dipuji, sementara kewajiban struktural mereka yang paling bertanggung jawab terus dinegosiasikan.

Di banyak dokumen kebijakan, *resilience* dikaitkan dengan inovasi teknologi kecil skala lokal seperti jaringan mikro, panel surya atap, dan baterai rumah tangga, yang sering diperkenalkan sebagai solusi canggih untuk mengatasi kerentanan pasokan. Dalam narasi resmi, kombinasi inovasi ini dan *energi terbarukan* menjanjikan desa atau kota kecil yang mandiri dan tahan guncangan. Namun, tanpa tata kelola yang adil, solusi tersebut dapat memindahkan risiko dari perusahaan penyedia besar ke konsumen: warga membeli peralatan mahal, menanggung risiko kegagalan teknologi, dan memikul beban perawatan, sementara perusahaan besar tetap menguasai infrastruktur utama yang paling menguntungkan. Di sini, *resilience* beroperasi sebagai logika pengalihan tanggung jawab: kapasitas bertahan hidup warga ditingkatkan, tetapi posisi tawar mereka terhadap struktur pasar dan negara tidak serta merta membaik, bahkan bisa melemah ketika bantuan publik bergeser menjadi skema pembiayaan individu.

Wacana *resilience* juga kerap memuja "modal sosial" komunitas: solidaritas, jaringan informal, dan kemampuan warga untuk saling membantu ketika negara dan pasar gagal. Tentu, sumber daya sosial semacam ini berharga dan perlu

diperkuat. Namun, ketika negara dan korporasi energi terlalu jauh mengandalkan narasi tentang kekuatan komunitas, ada risiko bahwa kegagalan struktural dialihkan menjadi tantangan moral bagi warga untuk "lebih kreatif" dan "lebih tangguh". Dalam situasi seperti itu, istilah *resilience* berpotensi menutupi kebutuhan akan reformasi kelembagaan yang nyata: perlindungan konsumen yang lebih kuat, regulasi pasar energi yang berpihak pada kelompok rentan, dan kewajiban investasi untuk memperkuat jaringan di wilayah yang selama ini dianggap tidak menguntungkan. Komunitas yang di atas kertas tampak tangguh bisa jadi sebenarnya sedang "bertahan dalam ketidakadilan" yang tidak diakui secara resmi.

Dimensi lain yang jarang disorot adalah politik waktu dalam wacana *resilience*. Investasi yang disebut meningkatkan ketahanan sistem sering memiliki horizon jangka panjang, sementara beban penyesuaian yang dipikul warga bersifat segera: hari ini tarif naik, hari ini listrik padam, hari ini banjir merusak jaringan lokal. Komitmen jangka panjang terhadap transformasi, misalnya melalui *just transition* menuju sistem energi rendah karbon yang adil, sering dipinggirkan oleh proyek-proyek jangka pendek yang lebih mudah diklaim sebagai keberhasilan ketahanan. Di sini, warga diminta bersabar atas penderitaan hari ini demi masa depan yang belum tentu mereka nikmati, apalagi jika mereka tinggal di wilayah yang suatu hari dapat dikorbankan melalui relokasi "rasional" demi efisiensi sistem. Dengan demikian, *resilience* tidak hanya mengatur siapa yang beradaptasi, tetapi juga kapan dan untuk kepentingan siapa pengorbanan itu berlangsung.

Ketika istilah ketahanan meresap ke dalam dokumen *kebijakan energi*, kita perlu mengajukan pertanyaan filosofis yang mengganggu kenyamanan teknokratis: apakah tujuan utama ketahanan adalah menjaga kelangsungan infrastruktur, laba, dan peringkat kredit negara, atau melindungi martabat

dan kelayakan hidup warga yang paling rentan? Jika desain indikator dan model kebijakan lebih menonjolkan kemampuan sistem untuk "bangkit kembali" setelah gangguan, tetapi tidak menilai siapa yang makin terpuruk setiap kali gangguan terjadi, maka ketahanan berubah menjadi bentuk baru kekerasan struktural yang disamarkan. Alternatifnya, ketahanan dapat dikonseptualisasikan ulang sebagai kemampuan kolektif untuk mengurangi ketergantungan pada praktik energi yang tidak adil, memperluas ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan mengutamakan perlindungan terhadap kehidupan sehari-hari, bukan sekadar terhadap angka-angka makro yang tercatat dalam laporan resmi.

Pada akhirnya, membahas *resilience* sebagai wacana adaptif dalam kebijakan energi berkelanjutan berarti berani membalik pertanyaan: bukan hanya "bagaimana masyarakat beradaptasi", tetapi "bagaimana negara, korporasi, dan arsitektur pasar energi harus beradaptasi terhadap tuntutan keadilan". Ketahanan yang sungguh-sungguh etis bukanlah ketahanan yang menuntut warga berlapis-lapis pengorbanan, melainkan ketahanan yang memaksa pemegang kekuasaan mengubah model bisnis, skema keuntungan, dan cara mereka memandang risiko. Itu berarti menolak penggunaan *resilience* sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab historis maupun kewajiban redistribusi, dan menjadikannya sebagai pintu masuk untuk merombak hubungan antara infrastruktur, pengetahuan teknis, dan kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, kata ketahanan tidak lagi menjadi instrumen penjinakan politik, melainkan bagian dari proyek yang lebih luas untuk menata ulang kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan agar lebih adil dan manusiawi.

6.4 Pertemuan Metafora: Ketika Keamanan, Kedaulatan, dan Ketahanan Saling Bertabrakan

Ketika pembuat kebijakan berbicara tentang "keamanan energi", "kedaulatan energi", dan "ketahanan sistem", sebenarnya mereka sedang mengaktifkan tiga metafora yang berbeda namun saling menumpuk. *Energy security* biasanya dibayangkan sebagai perlindungan negara dari gangguan pasokan dan gejolak harga, seolah-olah sistem energi adalah perbatasan yang harus dijaga. *Energy sovereignty* menekankan hak untuk mengendalikan sumber daya, teknologi, dan data, seakan energi adalah simbol martabat politik yang tidak boleh ditentukan pihak luar. Sementara itu, *resilience* menggambarkan kemampuan sistem untuk menyerap guncangan dan kembali berfungsi, seperti pegas yang terus memantul meski ditekan. Ketika tiga metafora ini bertemu dalam satu ranah kebijakan, prioritas siapa yang dilindungi, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang diminta beradaptasi sering kali tidak sinkron. Di sinilah konflik makna, kepentingan, dan hierarki nilai mulai muncul secara tajam.

Metafora keamanan biasanya datang dengan imajinasi ancaman: embargo, perang, krisis harga, atau penghentian pasokan mendadak. Bahasa *energy security* cenderung mengutamakan stabilitas makro, neraca perdagangan, dan keandalan sistem ketimbang kerentanan rumah tangga atau komunitas yang paling terdampak. Dalam banyak studi kuantitatif, energi diperlakukan sebagai variabel ekonomi yang perlu diamankan demi keberlanjutan pertumbuhan, bukan sebagai hak sosial yang perlu dipenuhi secara adil (Ali et al., 2023). Di sini, keamanan dimengerti sebagai kemampuan negara dan pasar keuangan untuk menjamin aliran investasi dan infrastruktur, sehingga dimensi keadilan distribusi maupun suara warga mudah tersisih. Ketika wacana ini menguat, bahasa ancaman dan darurat sering dipakai untuk membenarkan

keputusan yang terpusat dan kurang deliberatif, seolah keterlibatan publik justru memperlambat respons terhadap krisis.

Pertemuan metafora menjadi rumit ketika keamanan dipakai untuk menilai *energi terbarukan*. Di satu sisi, energi surya, angin, dan bioenergi sering diklaim memperkuat keamanan karena mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan menurunkan risiko geopolitik. Di sisi lain, pembuat kebijakan kerap menggambarkan variabilitas pasokan terbarukan sebagai ancaman terhadap keandalan jaringan listrik, sehingga menormalisasi investasi berlebih pada pembangkit fosil sebagai "penopang" sementara. Cara bertanya pun menjadi bias: apakah sistem cukup aman dari sisi teknis dan ekonomi, bukan apakah cukup adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Metafora keamanan ini mendorong fokus pada stabilitas jangka pendek, misalnya menjamin pasokan industri besar, sekaligus mengaburkan pertanyaan tentang siapa yang menanggung dampak sosial dan ekologi dari infrastruktur baru yang dibangun atas nama perlindungan nasional.

Metafora kedaulatan menambahkan lapisan politik yang berbeda. *Energy sovereignty* sering dimaknai sebagai hak suatu negara atau komunitas untuk menentukan sendiri campuran energi, pemilik infrastruktur, serta aturan ekspor-impor. Di tingkat nasional, kedaulatan dikaitkan dengan kontrol atas cadangan, jaringan transmisi, dan kapasitas pembangkit strategis. Namun di tingkat lokal, istilah yang sama bisa berarti keinginan komunitas untuk mengelola pembangkit skala kecil, koperasi energi, atau skema kepemilikan bersama, sehingga mereka tidak sekadar menjadi objek proyek besar. Di sini metafora kedaulatan bisa berbenturan dengan keamanan: negara mungkin mengklaim konsesi luas untuk menjamin pasokan, sementara komunitas memaknai kedaulatan sebagai

hak untuk menolak proyek yang merusak ruang hidup. Pertemuan dua tafsir ini membuat konflik sulit diringkas sebagai "pro" atau "kontra" pembangunan energi.

Ketika wacana ketahanan ditambahkan, lapisan makna menjadi lebih kompleks. Dalam dokumen kebijakan iklim, *resilience* sering dipahami sebagai kemampuan sistem sosial dan ekologis menyerap guncangan dan beradaptasi tanpa runtuh, dengan menekankan perencanaan jangka panjang, keragaman sumber, dan tata kelola yang inklusif (OECD, 2021). Namun dalam praktik, istilah ketahanan mudah tergelincir menjadi seruan agar kelompok yang paling rentan beradaptasi dengan krisis yang mereka tidak ciptakan, misalnya dengan mengubah pola konsumsi atau menerima relokasi. Di satu sisi, negara dan lembaga pembangunan menggunakan bahasa ketahanan untuk mendorong investasi pada infrastruktur yang lebih tahan bencana. Di sisi lain, narasi yang sama bisa menutupi kebutuhan untuk mengurangi akar ketidakadilan struktural yang membuat sebagian populasi selalu diminta "tahan banting" lebih dari kelompok lain.

Dalam ranah *kebijakan energi*, ketiga metafora ini dapat saling menguatkan atau saling meniadakan, tergantung siapa yang memegang kendali dan apa yang dihitung sebagai keberhasilan. Keamanan menuntut keandalan pasokan dan kestabilan harga; kedaulatan menuntut kontrol atas sumber daya, teknologi, dan data; ketahanan menuntut kemampuan sistem bertahan di tengah perubahan iklim, pasar, dan politik. Jika keamanan didefinisikan semata-mata sebagai kemampuan membayar impor energi, maka kedaulatan dan ketahanan bisa dikorbankan lewat ketergantungan jangka panjang pada pemasok tunggal. Sebaliknya, jika kedaulatan dimaknai sebagai penutupan diri dari perdagangan dan teknologi luar, maka ketahanan bisa menurun karena kurangnya diversifikasi. Kebijakan yang hanya mengutip satu metafora tanpa

menimbang dua lainnya berisiko menghasilkan rancangan instrumen yang timpang dan sulit dipertanggungjawabkan secara etis.

Pertemuan metafora juga berlangsung di level bahasa sehari-hari. Media dan pidato pejabat kerap bercampur antara ancaman eksternal, kebanggaan nasional, dan seruan adaptasi, tanpa menjelaskan siapa yang sebenarnya diprioritaskan. Ketika krisis harga muncul, pemerintah dapat menyatakan bahwa kenaikan tarif adalah "pengorbanan perlu" demi keamanan, sementara korporasi energi menekankan kontribusinya pada ketahanan jaringan melalui investasi besar-besaran. Warga dipanggil untuk hemat energi, memasang peralatan hemat listrik, atau mengubah perilaku, tetapi jarang dilibatkan dalam perumusan struktur tarif dan skema kompensasi. Dengan cara ini, *energy security*, *energy sovereignty*, dan *resilience* bekerja seperti lensa yang mengarahkan perhatian publik ke satu bidang, misalnya ancaman luar, sambil mengaburkan pertanyaan tentang distribusi beban dan manfaat di dalam negeri.

Metafora keamanan, kedaulatan, dan ketahanan tidak netral karena dibawa oleh aktor dengan posisi kuasa berbeda. Pemerintah pusat, lembaga militer, perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan komunitas lokal memiliki cara berbeda dalam mengisi istilah-istilah tersebut. Dalam kerangka *governmentality* Foucault, metafora-metafora ini adalah bagian dari cara halus mengarahkan perilaku warga dan pasar, bukan sekadar refleksi realitas teknis. Ketika suatu negara mengumumkan strategi ketahanan energi, misalnya, ia sekaligus sedang mengatur apa yang dianggap risiko yang sah untuk dibicarakan, dan risiko mana yang boleh diabaikan. Jika risiko sosial seperti penggusuran dan hilangnya mata pencaharian tidak masuk dalam indikator resmi, maka ketahanan diukur hanya dari sisi infrastruktur fisik dan neraca keuangan, bukan

dari kemampuan masyarakat mempertahankan kehidupan yang bermartabat.

Dalam konteks *energi terbarukan*, pertemuan metafora menjadi semakin pelik karena proyek-proyek baru sering ditempatkan di wilayah pedesaan, pesisir, atau kawasan adat. Negara bisa mengklaim bahwa ladang angin lepas pantai atau kawasan panel surya skala raksasa memperkuat keamanan dan ketahanan nasional, sementara warga lokal melihat hilangnya ruang tangkap ikan atau lahan pertanian. Di sini, kedaulatan siapa yang diutamakan: kedaulatan energi nasional atau kedaulatan warga atas ruang hidupnya? Ketika klaim ketahanan dipakai untuk mendorong percepatan perizinan, mekanisme konsultasi publik bisa dikesampingkan atas nama darurat iklim. Hasilnya, proyek yang secara teknis membantu transisi energi justru menciptakan kerentanan sosial baru, menggerus kepercayaan pada negara, dan memunculkan gelombang protes yang membingungkan pembuat kebijakan.

Kajian tentang gaya hidup rendah karbon menunjukkan bahwa ketahanan dan keadilan tidak selalu harus didefinisikan dari atas ke bawah. Vita et al. (2020) menemukan bahwa anggota inisiatif akar rumput di Eropa mampu menurunkan jejak karbon mereka sambil mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepuasan hidup, melalui praktik berbagi, pengurangan konsumsi berlebihan, dan penguatan solidaritas komunitas. Temuan semacam ini mengganggu narasi resmi yang memusatkan keamanan pada instrumen makro seperti pipa, terminal, dan kontrak jangka panjang, karena memperlihatkan bahwa ketahanan juga bisa lahir dari perubahan relasi sosial dan imajinasi gaya hidup. Namun, jika kebijakan hanya memakai metafora ketahanan di level teknis, ruang untuk mengakui dan mendukung praktik semacam itu menjadi sempit, padahal ia berpotensi memperkuat legitimasi demokratis terhadap arah transisi energi.

Pertemuan metafora juga memengaruhi siapa yang dianggap "ahli" dan berhak berbicara di meja perundingan. Dalam wacana *energy security*, ahli yang diundang biasanya ekonom, insinyur sistem, dan analis geopolitik. Dalam wacana *energy sovereignty*, diskursus sering bergeser ke politisi, diplomat, dan pengacara yang berbicara soal kontrak, konsesi, dan hak kepemilikan. Sementara itu, dalam wacana *resilience*, ruang muncul bagi perencana kota, pakar iklim, dan lembaga pembangunan. Kelompok warga, serikat pekerja, dan komunitas adat sering kali hanya hadir sebagai "penerima manfaat" atau "kelompok rentan", bukan sebagai ko-produsen kebijakan. Akibatnya, pertemuan metafora jarang disertai pertemuan egaliter antar-pengetahuan; yang terjadi justru hierarki pengetahuan yang menempatkan pengalaman hidup di posisi terbawah.

Dalam praktik perancangan *kebijakan energi*, ketiga metafora seharusnya dibaca sebagai hipotesis nilai yang perlu dinegosiasikan, bukan sebagai slogan yang diambil begitu saja. Keamanan dapat dipertanyakan: keamanan bagi siapa, dari ancaman apa, dengan biaya siapa. Kedaulatan dapat diurai: siapa yang mendapat hak suara, hak veto, dan hak atas informasi dalam pengambilan keputusan. Ketahanan dapat ditajamkan: ketahanan struktur fisik saja, atau juga ketahanan jaringan sosial, ekonomi rumah tangga, dan ekosistem lokal. Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dibuka secara eksplisit, maka metafora menjadi alat retoris yang menutup perdebatan, bukan membuka ruang tafsir. Di titik ini, analisis filosofis atas kekuasaan menjadi penting untuk mengungkapkan bagaimana bahasa yang tampak teknis sebenarnya memuat pilihan moral yang sangat berat.

Subbagian ini mengusulkan cara membaca pertemuan metafora keamanan, kedaulatan, dan ketahanan sebagai momen di mana politik nilai dalam energi menjadi terlihat. Alih-alih

memperdebatkan apakah satu metafora lebih "benar" daripada yang lain, pembaca diajak menelusuri bagaimana masing-masing metafora mengatur imajinasi tentang risiko, hak, dan tanggung jawab. Di bab-bab berikutnya, lensa ini akan dipakai untuk memeriksa instrumen spesifik, mulai dari skema tarif, standar portofolio terbarukan, hingga desain pasar listrik, guna melihat bagaimana klaim keamanan nasional bisa berbenturan dengan aspirasi kedaulatan lokal dan kebutuhan ketahanan jangka panjang. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memetakan kosakata kebijakan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kosakata itu menjadi struktur halus yang membentuk siapa yang dilindungi, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang diajak bicara dalam transisi menuju masa depan energi yang lebih adil.

6.5 Implikasi Metafora bagi Desain Kebijakan dan Distribusi Risiko

Ketika metafora keamanan, kedaulatan, dan ketahanan menstruktur cara kita berbicara tentang energi, dampaknya bukan hanya semantik, tetapi langsung merembes ke desain instrumen kebijakan dan pola distribusi risiko. Kebijakan harga, subsidi, pajak, jaminan pemerintah, hingga desain kontrak jangka panjang dibenarkan melalui kalimat-kalimat yang tampak wajar: "demi keamanan energi nasional", "untuk menjaga kedaulatan atas sumber daya", atau "agar sistem tetap tangguh menghadapi krisis". Padahal, di balik kalimat itu tersembunyi keputusan konkret tentang siapa yang boleh mengambil risiko spekulatif di pasar energi, siapa yang mendapatkan perlindungan fiskal ketika harga bergejolak, dan siapa yang dibiarkan menanggung beban penyesuaian. Dengan demikian, analisis atas metafora bukan latihan teoritis, melainkan cara untuk mengungkap logika tersembunyi yang mengarahkan arsitektur kebijakan, mulai dari siapa yang

diprioritaskan sampai siapa yang dapat dikorbankan secara "rasional".

Implikasi pertama tampak pada cara pembuat kebijakan mengartikan risiko fiskal dan pembiayaan iklim. Ketika keamanan didefinisikan terutama sebagai kepastian aliran modal dan stabilitas iklim investasi, maka desain dana publik, jaminan kredit, dan instrumen pasar diarahkan untuk menenangkan pelaku keuangan global, bukan untuk melindungi rumah tangga rentan. Perdebatan tentang apa yang boleh dihitung sebagai pembiayaan iklim yang sah sendiri sering sarat ambiguitas, tetapi perbedaan definisi itu justru membuka ruang negosiasi kekuasaan di antara negara dan lembaga keuangan (Shishlov & Censkowsky, 2022). Ambiguitas ini kemudian "turun" menjadi skema proyek di lapangan yang bisa saja berbendera hijau, tetapi menempatkan risiko utama pada komunitas lokal, sementara perlindungan nilai investasi dinikmati lembaga keuangan dan korporasi yang relatif kebal dari dampak langsung krisis iklim.

Pada level desain sistem, metafora keamanan cenderung menghasilkan *kebijakan energi* yang mengutamakan pasokan bagi sektor-sektor ekonomi yang dianggap "strategis", seperti industri ekspor atau pusat keuangan, sementara sektor rumah tangga dan usaha kecil dibiarkan lebih terekspos terhadap fluktuasi tarif dan pemadaman. Ketika ancaman digambarkan dengan bahasa geopolitik – embargo, perang, gangguan pasokan lintas batas – maka respons kebijakan cenderung dalam bentuk proyek infrastruktur besar dan kontrak jangka panjang yang dinegosiasikan secara tertutup. Metafora ini memindahkan fokus dari pertanyaan apakah pola konsumsi energi yang ada adil dan berkelanjutan, ke pertanyaan sempit apakah konsumsi tersebut dapat terus dipertahankan. Dengan demikian, distribusi risiko diarahkan agar gangguan tidak menghantam pusat akumulasi kapital, walaupun artinya beban penyesuaian

digeser ke periferi sosial dan geografis yang kurang terdengar suaranya.

Metafora kedaulatan, ketika dioperasionalkan dalam kebijakan, sering melahirkan kerangka hukum dan kelembagaan yang menempatkan negara sebagai pemegang kuasa tertinggi atas sumber daya, sementara kapasitas negosiasi komunitas lokal dibatasi. Kedaulatan dapat diterjemahkan menjadi hak pemerintah pusat untuk memberikan konsesi, izin eksploitasi, dan hak kelola kepada aktor tertentu atas nama kepentingan nasional, bahkan ketika keputusan tersebut bertentangan dengan klaim sejarah masyarakat adat atau hak agraria petani. Di atas kertas, negara mengklaim melindungi kedaulatan energi, tetapi dalam praktik mungkin justru mentransfer kekuasaan ke perusahaan besar melalui kontrak jangka panjang yang sulit dikoreksi. Akibatnya, risiko kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hilangnya sumber penghidupan tidak masuk dalam kategori risiko strategis yang harus dimitigasi, melainkan dianggap konsekuensi sampingan dari pembangunan.

Metafora ketahanan memberi implikasi berbeda, karena fokusnya pada kemampuan "bangkit kembali" cenderung menggeser perhatian dari pencegahan ke adaptasi. Di atas kertas, sistem energi yang tangguh berarti jaringan yang mampu bertahan dari badai, banjir, atau lonjakan permintaan. Namun bahasa ketahanan mudah dipakai untuk membingkai kebijakan yang sebenarnya lebih banyak meminta masyarakat beradaptasi daripada menuntut perubahan struktur produksi energi. Seruan untuk memperkuat ketahanan rumah tangga, misalnya, dapat diterjemahkan menjadi program penggantian peralatan listrik atau peningkatan literasi energi, sementara pertanyaan tentang mengapa rumah tangga itu sejak awal lebih rentan – karena tarif regresif, lapangan kerja tidak stabil, atau kualitas infrastruktur rendah – tidak tersentuh. Dengan cara ini, risiko sistemik dikemas ulang sebagai tantangan perilaku individu.

Ketika ketiga metafora bertemu dalam satu paket *energi terbarukan*, implikasi kebijakan menjadi semakin kompleks. Proyek ladang angin, pembangkit surya skala besar, atau jaringan transmisi baru dapat dijustifikasi sekaligus sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor, memperkuat kedaulatan atas sumber daya domestik, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan harga fosil. Namun desain kebijakan yang menyertainya – seperti skema tarif, jaminan pembelian jangka panjang, dan insentif pajak – sering kali mengunci keuntungan finansial pada segelintir pengembang, sementara warga sekitar proyek menerima manfaat terbatas dan risiko yang besar. Jika kompensasi hanya diukur dalam bentuk dana sosial yang relatif kecil, tetapi tidak ada jaminan keterlibatan dalam pengambilan keputusan ataupun kepemilikan, maka ketiga metafora yang tampak luhur tadi justru bekerja sebagai perisai untuk memindahkan risiko ke bawah.

Implikasi berikutnya tampak dalam cara risiko diukur dan dilaporkan. Dalam banyak laporan resmi, risiko sistem energi direduksi menjadi indikator teknis dan finansial: frekuensi pemadaman, kebutuhan investasi, potensi kerugian akibat gangguan pasokan. Komponen seperti risiko kesehatan masyarakat, hilangnya mata pencaharian tradisional, atau trauma sosial akibat relokasi jarang diberi bobot, karena sulit dikuantifikasi dan tidak mudah dimasukkan ke dalam model standar. Ketika risiko dipersempit menjadi kategori yang nyaman bagi regulator dan investor, keputusan kebijakan cenderung menganggap "diterimanya" sebagian kerugian sosial sebagai harga yang wajar demi keamanan dan pertumbuhan. Padahal dari perspektif keadilan, ketidakmampuan mengukur suatu risiko tidak boleh otomatis diartikan sebagai legitimasi untuk mengabaikannya, terutama jika risiko itu menimpa kelompok yang sejak awal kurang memiliki kuasa tawar.

Metafora keamanan, kedaulatan, dan ketahanan juga berpengaruh pada desain instrumen pembiayaan yang menentukan siapa yang disubsidi dan siapa yang menanggung beban fiskal. Skema jaminan pemerintah dan insentif pajak biasanya dirancang untuk menarik investasi besar, dengan asumsi bahwa jika proyek infrastruktur terlaksana, manfaatnya akan "menetes ke bawah". Namun, tanpa mekanisme yang mengikat, manfaat sering berhenti di level pemegang saham dan pemasok, sementara risiko utang publik dibagi rata kepada warga melalui pajak dan penghematan anggaran sosial. Di sisi lain, ketika pemerintah merancang skema proteksi untuk konsumen miskin, program sering dibatasi sebagai intervensi sementara, bukan bagian struktural dari arsitektur pembiayaan. Hal ini mencerminkan metafora siapa yang layak dilindungi secara permanen dan siapa yang hanya pantas menerima bantuan sementara saat krisis.

Dalam konteks distribusi risiko jangka panjang, logika investasi energi sangat dipengaruhi oleh cara pembuat kebijakan membayangkan masa depan. Jika masa depan dilihat terutama sebagai rangkaian krisis harga dan geopolitik, maka kebijakan akan fokus pada diversifikasi pasokan bahan bakar dan kontrak jangka panjang yang menguntungkan pemasok besar, meskipun hal itu menghambat percepatan *kebijakan energi* rendah karbon. Sebaliknya, jika masa depan dibayangkan sebagai ruang untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat kapasitas komunitas, maka prioritas kebijakan akan bergeser ke proyek skala lokal yang mungkin lebih lambat dari sisi kapasitas, tetapi lebih tinggi dari sisi legitimasi sosial. Cara metafora bekerja di sini adalah dengan mengarahkan imajinasi: apakah risiko terbesar dipandang sebagai kekurangan pasokan listrik untuk industri, atau sebagai kemunduran martabat warga yang terus-menerus menanggung dampak lingkungan dan tarif yang tidak adil.

Implikasi metafora juga menyentuh dimensi prosedural: siapa yang duduk di meja perundingan ketika desain kebijakan dibahas, dan bagaimana suara yang berbeda ditimbang. Ketika keamanan didefinisikan sebagai isu strategis negara, perundingan cenderung diisi pejabat tinggi, teknokrat, dan perwakilan industri besar, sementara kelompok warga dan pemerintah lokal hanya diundang pada tahap konsultasi simbolik. Di sisi lain, wacana kedaulatan dapat dipakai untuk menutup diri dari kritik internasional, meskipun kritik itu berkaitan dengan pelanggaran hak asasi atau kerusakan ekologi yang melampaui batas negara. Narasi ketahanan, bila tidak diimbangi standar partisipasi yang jelas, mudah digunakan sebagai alasan untuk mempercepat keputusan tanpa musyawarah yang memadai, dengan dalih bahwa krisis tidak menunggu deliberasi panjang.

Kajian tentang dinamika regulasi global menunjukkan bahwa cara kita membingkai krisis iklim dan energi akan mempengaruhi apakah rezim internasional mau melakukan koreksi arah atau justru melanjutkan pola lama dengan kosmetik baru (Desai & Desai, 2024). Jika konferensi dan forum internasional terus mengulang metafora keamanan dan ketahanan tanpa menggugat ketidakadilan mendasar dalam distribusi emisi dan kapasitas adaptasi, maka desain kebijakan nasional pun cenderung mengikuti pola yang sama. Dalam situasi seperti itu, istilah bantuan, pembiayaan iklim, dan kompensasi kerugian dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan risiko politik global, bukan sungguh-sungguh upaya memperbaiki distribusi risiko material dan sosial. Di sinilah pentingnya membaca metafora sebagai indikator arah etis, bukan sekadar gaya bahasa diplomatik.

Bagi arsitek kebijakan, kesadaran atas implikasi metafora seharusnya diterjemahkan menjadi prinsip desain: setiap kali keamanan, kedaulatan, dan ketahanan digunakan untuk

membenarkan suatu pilihan, analisis eksplisit tentang distribusi risiko, manfaat, dan hak harus dilampirkan. Untuk *energi terbarukan*, misalnya, kebijakan insentif perlu memuat kewajiban keterbukaan kontrak, porsi kepemilikan lokal minimum, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses komunitas terdampak. Demikian pula, program ketahanan infrastruktur harus diuji bukan hanya dari sisi keandalan teknis, tetapi juga dari sisi apakah ia mengurangi atau memperdalam kerentanan kelompok tertentu. Dengan memaksa metafora-metafora ini diuji terhadap kriteria keadilan yang konkret, kita mencegahnya menjadi selimut bahasa yang menutupi ketimpangan.

Akhirnya, implikasi terdalam dari pembacaan metafora adalah ajakan untuk merumuskan ulang tujuan dasar *kebijakan energi*: bukan semata menjamin pasokan, melindungi kedaulatan formal, atau membuat sistem tahan guncangan, tetapi menata ulang distribusi kekuasaan dan risiko dalam masyarakat. Ini berarti menerima bahwa desain kebijakan selalu mengandung pilihan normatif tentang siapa yang aman dan siapa yang boleh tetap hidup dalam ketidakpastian. Dengan menyadari bahwa keamanan, kedaulatan, dan ketahanan adalah metafora yang bisa diisi ulang, pembuat kebijakan dan warga memperoleh ruang untuk menegosiasikan makna baru: keamanan sebagai kebebasan dari kemiskinan energi, kedaulatan sebagai kendali kolektif atas masa depan energi, dan ketahanan sebagai kemampuan bersama untuk mengurangi ketidakadilan struktural, bukan sekadar bertahan di tengah krisis yang terus berulang.

7 Transisi vs Transformasi: dari Teknokrasi ke Rekayasa Sosial–Politik

7.1 "Transisi Energi" sebagai Narasi Teknokratis: Skenario, Jalur, dan Roadmap

"Transisi energi" sering dipresentasikan sebagai istilah netral, seolah-olah kita hanya sedang mengganti mesin lama dengan mesin baru dalam skala sistemik. Namun, ketika istilah ini ditempatkan di dalam arsitektur wacana kebijakan, ia bekerja sebagai metafora teknis yang merapikan kekacauan sosial-politik menjadi grafik, kurva, dan tabel. Dengan menyebutnya "transisi", bukan "pergeseran kekuasaan" atau "perombakan struktur sosial", para perancang kebijakan cenderung menggeser perhatian publik dari konflik kepentingan menuju persoalan teknis tentang kapasitas, efisiensi, dan bauran energi. Filsafat kekuasaan mengingatkan bahwa bahasa semacam ini bukan sekadar deskripsi, melainkan instrumen yang membantu menentukan siapa yang berhak bicara, apa yang dianggap masalah, dan skenario mana yang dinilai masuk akal. Karena itu, memahami "transisi energi" sebagai narasi teknokratis berarti membongkar bagaimana istilah ini menata ulang batas-batas antara yang dianggap urusan ilmiah dan yang dianggap sekadar "opini" politik.

Dalam praktik kebijakan, narasi "transisi energi" ditopang oleh rangkaian alat teknokratis: pemodelan skenario, penentuan jalur (*pathways*), dan penyusunan *roadmap* jangka panjang yang tampak objektif. *Scenario planning* biasanya dijelaskan sebagai metode untuk membayangkan berbagai kemungkinan masa depan secara sistematis, padahal di dalamnya sudah terkandung

pilihan nilai tentang mana masa depan yang diinginkan dan mana yang hendak dihindari. Begitu pula *pathway* dipahami sebagai urutan langkah logis menuju target tertentu, seolah-olah urutannya sudah ditetapkan oleh hukum alam, bukan oleh negosiasi politik. Kajian tentang desentralisasi listrik menunjukkan bahwa pilihan desain institusional dan regulasi menentukan siapa yang memperoleh atau kehilangan pengaruh politik dalam proses transisi tersebut (Brisbois, 2020). Dengan kata lain, "transisi" yang dikemas sebagai kalkulasi teknis sebenarnya adalah peta konflik kekuasaan yang telah disederhanakan.

Ketika istilah "transisi energi" dipasangkan dengan janji perluasan energi terbarukan, wacana teknokratis itu semakin kuat karena bertumpu pada daya tarik moral teknologi yang dianggap "hijau". Panel surya, turbin angin, atau pembangkit berbasis panas bumi ditampilkan sebagai ikon masa depan yang bersih dan modern. Namun, dalam narasi resmi, perhatian lebih sering diarahkan pada kinerja teknis dan biaya per kilowatt-jam ketimbang pada pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan infrastruktur baru itu, siapa yang menanggung beban sosial-ekologis, dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya. Istilah *low-carbon transition* kerap dijelaskan secara sederhana sebagai proses mengurangi emisi, tetapi jarang diiringi dengan penjelasan bahwa pengurangan emisi dapat berlangsung bersamaan dengan konsentrasi kekuasaan baru di tangan negara atau korporasi. Di titik ini, metafora "transisi" berfungsi menenangkan, bukan mengguncang, sehingga konflik distribusi manfaat dan beban dari perluasan energi terbarukan mudah diredam sebagai "dampak sampingan".

Skenario dan jalur transisi kerap disusun oleh konsorsium pakar yang bekerja dengan model komputasional kompleks, menggunakan istilah seperti *integrated assessment models* untuk menggambarkan perhitungan yang menggabungkan aspek

iklim, ekonomi, dan teknologi. Secara sederhana, model-model ini adalah alat matematis yang mencoba memprediksi akibat dari berbagai pilihan kebijakan, tetapi dalam wacana publik ia sering diperlakukan seperti mesin kebenaran. Ketika hasil model menunjukkan jalur tertentu sebagai yang "paling efisien" atau "paling hemat biaya", diskusi tentang keadilan sosial, konflik agraria, atau hak masyarakat lokal mudah dianggap sebagai pengganggu rasionalitas. Dalam perspektif filsafat kekuasaan, model bukan sekadar alat bantu; model turut menentukan horizon apa yang mungkin dipikirkan. Jalur yang tidak dapat dimodelkan—misalnya skenario demokratisasi kepemilikan energi skala komunitas—sering tersingkir dari *menu* kebijakan, bukan karena tidak mungkin, melainkan karena tidak muat dalam kerangka teknis yang sudah dipilih.

Di tingkat kebijakan, *roadmap* menjadi metafora dominan yang mengatur bagaimana negara, pasar, dan masyarakat sipil membayangkan masa depan energi. *Roadmap* sering dipahami secara sederhana sebagai peta jalan yang menunjukkan tahapan waktu dan target kuantitatif, misalnya persentase bauran energi bersih pada tahun tertentu, namun cara menggambar peta itu sangat menentukan siapa yang dianggap sebagai aktor kunci dan siapa yang hanya pelengkap. Pengalaman negara seperti Brasil menunjukkan bahwa rancangan kebijakan dapat secara halus mengarahkan investasi ke jenis teknologi dan aktor tertentu sambil meminggirkan alternatif lain, meskipun semuanya dibungkus sebagai upaya mendorong sumber yang lebih berkelanjutan (Werner & Lazaro, 2023). Dengan demikian, *roadmap* tidak netral; ia adalah instrumen yang mengikat komitmen fiskal, regulatif, dan politik pada jalur tertentu, sehingga mengurangi ruang untuk mempertanyakan pilihan-pilihan yang sudah dinormalisasi oleh para teknokrat.

Dalam konteks Indonesia, narasi "transisi energi" sering dijalin ke dalam dokumen perencanaan yang luas, mulai dari

rencana pembangunan jangka panjang hingga dokumen sektoral yang lebih rinci mengenai kebijakan energi. Di atas kertas, dokumen-dokumen ini menampilkan jalur yang tampak rapi: target kapasitas, proyeksi permintaan, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang menyatu dalam tabel dan grafik. Namun, struktur pengambilan keputusan yang masih hierarkis membuat proses penyusunan jalur tersebut lebih mirip ritual administratif ketimbang ruang deliberasi publik. Konsep *governance* kerap diterjemahkan secara sederhana sebagai "tata kelola", seakan cukup dengan memperbaiki koordinasi antar lembaga, padahal yang dipertaruhkan adalah siapa yang memegang otoritas untuk mendefinisikan risiko, peluang, dan prioritas. Di sisi lain, masyarakat lokal dan kelompok rentan sering datang belakangan, sesudah arah besar sudah dipatok, sehingga ruang mereka untuk memengaruhi substansi jalur transisi menjadi sangat terbatas.

Narasi teknokratis juga tampak ketika transisi diperlakukan sebagai soal mengoptimalkan sistem energi agar lebih efisien dan stabil, tanpa menggugat asumsi dasar tentang pertumbuhan ekonomi dan relasi kekuasaan. Istilah *system optimization* mudah dipahami awam sebagai upaya membuat sistem bekerja lebih baik, tetapi jarang dijelaskan bahwa yang dioptimalkan adalah tujuan-tujuan tertentu: menjaga profitabilitas perusahaan energi besar, menjamin keamanan pasokan bagi industri besar, atau menstabilkan indikator makroekonomi. Dalam kerangka seperti ini, konflik dengan masyarakat terdampak sering direduksi menjadi masalah "penerimaan sosial" yang bisa diatasi dengan kompensasi finansial atau program tanggung jawab sosial perusahaan. Filsafat kekuasaan mengajak kita bertanya: siapakah subjek yang berhak menentukan fungsi sistem yang hendak dioptimalkan? Apakah komunitas pedesaan, nelayan, atau masyarakat adat dianggap sebagai pemegang hak yang

setara, atau sekadar variabel penyesuaian dalam model teknokratis?

Selain itu, wacana "transisi energi" kerap digerakkan oleh jaringan aktor transnasional: lembaga keuangan internasional, lembaga riset global, konsultan, dan lembaga donor yang membawa paket pengetahuan sekaligus standar kebijakan. Istilah seperti *best practice* sering dijelaskan secara sederhana sebagai praktik terbaik yang layak ditiru, tetapi jarang diiringi dengan diskusi apakah praktik tersebut cocok dengan struktur sosial-politik lokal. Ketika studi kelayakan, laporan teknis, dan presentasi *expert* mendominasi meja perundingan, pengetahuan lokal dan pengalaman warga yang hidup di sekitar infrastruktur energi menjadi periferal. Dalam situasi ini, narasi teknokratis berfungsi sebagai bahasa bersama yang memudahkan koordinasi antar elit, namun sekaligus menjadi penghalang yang mempersulit kelompok lain untuk masuk dan mengajukan pertanyaan yang tidak tercakup dalam indikator teknis maupun kalkulasi biaya-manfaat standar.

Penting dicatat bahwa bahkan proyek yang mengusung label energi terbarukan dapat menghasilkan struktur ketidakadilan baru bila dibingkai hanya sebagai langkah teknis menuju target emisi. Pembangunan ladang surya skala besar, misalnya, mungkin dipuji karena kontribusinya terhadap penurunan emisi, tetapi pada saat yang sama bisa memicu konflik tanah, merusak ruang hidup komunitas, atau menciptakan ketergantungan baru pada kontrak dan teknologi yang dikuasai aktor luar. Dalam narasi teknokratis, konflik-konflik ini cenderung disajikan sebagai "tantangan implementasi" yang harus diselesaikan dengan perbaikan prosedur, bukan sebagai sinyal adanya ketimpangan kekuasaan. Filsafat kekuasaan mendorong kita membaca ulang "transisi" sebagai medan kontestasi yang menentukan siapa yang dapat mengklaim masa depan, dan siapa yang hanya diminta

menyesuaikan diri dengan keputusan yang sudah diambil atas nama efisiensi, stabilitas, dan keberlanjutan.

Di tengah krisis iklim, narasi teknokratis tentang "transisi energi" sering diperkokoh oleh retorika urgensi: kita harus bergerak cepat agar sistem tetap aman dan emisi menurun secara signifikan. Namun, kecepatan ini kerap disepadankan dengan sentralisasi keputusan, seakan-akan partisipasi warga dan deliberasi publik adalah kemewahan yang memperlambat. Kajian tentang risiko iklim dan sistem energi Indonesia menunjukkan bahwa membangun sistem yang tangguh terhadap bencana dan guncangan iklim memerlukan kombinasi antara perluasan sumber bersih, penguatan infrastruktur, dan reformasi tata kelola yang melibatkan beragam pemangku kepentingan (Setiawan et al., 2025). Jika dimaknai secara kritis, temuan semacam ini justru mengingatkan bahwa kecepatan tanpa demokratisasi berisiko menghasilkan sistem yang rapuh secara sosial, meski tampak kuat di atas kertas perencanaan. Di sini terlihat bahwa persoalan transisi bukan hanya seberapa cepat kita bergerak, tetapi siapa yang memegang kemudi.

Narasi teknokratis tentang "transisi energi" juga bekerja melalui cara kita membayangkan risiko. Istilah *risk management* sering dijelaskan sebagai upaya mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko, namun dalam praktiknya daftar risiko yang diakui resmi biasanya lebih menonjolkan variabel finansial, teknis, dan makroekonomi. Risiko yang dialami warga—misalnya lenyapnya sumber penghidupan tradisional atau rusaknya jaringan solidaritas komunitas—sering tidak memiliki tempat dalam matriks risiko resmi. Ketika risiko didefinisikan secara sempit, keputusan yang memprioritaskan stabilitas harga atau kredit investasi mudah dianggap "rasional", sementara keberatan warga ditempatkan sebagai hambatan emosional. Filsafat kekuasaan mengajukan pertanyaan: siapa yang berwenang menetapkan apa yang dianggap risiko serius dan apa

yang boleh diabaikan? Pertanyaan ini penting karena definisi risiko menentukan arah jalur transisi dan bentuk perlindungan yang akan disediakan negara.

Di sisi lain, kebijakan energi yang menjadi payung institusional transisi sering kali menggandeng istilah-istilah "netral" seperti *market reform* atau *tariff adjustment* yang dijelaskan kepada publik sebagai penyesuaian agar harga lebih mencerminkan biaya sebenarnya. Bagi pembaca awam, ini terdengar seperti penataan ulang teknis agar sistem lebih adil, tetapi dalam praktiknya penyesuaian tersebut dapat menguntungkan produsen besar dan membebani konsumen kecil jika tidak disertai mekanisme perlindungan. Di dalam teks kebijakan energi, istilah seperti "insentif" dan "disinsentif" tampak administratif, padahal di baliknya terdapat keputusan politik tentang siapa yang layak diberi dukungan dan siapa yang harus menanggung beban perubahan. Bila kita membaca dokumen-dokumen ini sebagai dokumen kekuasaan, bukan sekadar regulasi teknis, kita akan melihat bagaimana jalur transisi diarahkan untuk menstabilkan kepentingan tertentu sambil meminimalkan peluang bagi munculnya model pengelolaan energi yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Dengan demikian, "transisi energi" sebagai narasi teknokratis tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan filosofis tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui bahasa, angka, dan prosedur. Skenario, jalur, dan *roadmap* bukan hanya alat manajemen, melainkan juga perangkat penataan imajinasi politik. Ketika hanya ada satu jalur yang dianggap realistis, sementara jalur-jalur lain dilabeli terlalu radikal, utopis, atau "tidak bankable", maka ruang demokrasi secara perlahan menyempit. Filsafat kekuasaan mengajak kita untuk mengembalikan rasa canggung terhadap istilah yang terlalu mulus itu: transisi menuju apa, oleh siapa, dan untuk siapa. Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar wacana perencanaan

tidak berhenti pada optimasi sistem, tetapi masuk ke perdebatan tentang struktur kepemilikan, distribusi kuasa, dan hak masyarakat untuk membayangkan bentuk-bentuk tata kelola energi yang melampaui skenario yang dibekukan oleh para teknokrat.

Subbab ini, dengan fokus pada "transisi energi" sebagai narasi teknokratis, menunjukkan bahwa arsitektur wacana kebijakan tidak pernah lepas dari filosofi kekuasaan yang mengendap di balik istilah-istilah teknis. Dengan membedah metafora skenario, jalur, dan *roadmap*, kita melihat bagaimana *expertise* dan model-model perencanaan dapat berfungsi sebagai alat pembukaan sekaligus penutupan masa depan: membuka peluang bagi investasi dan teknologi baru, tetapi menutup kemungkinan-kemungkinan alternatif yang tidak selaras dengan kepentingan dominan. Di bab-bab berikutnya, pergeseran dari sekadar transisi menuju transformasi akan dieksplorasi sebagai upaya menggeser fokus dari kalkulasi teknis menuju rekayasa sosial-politik yang sadar akan ketimpangan, konflik, dan tuntutan keadilan. Di sinilah proyek kebijakan energi berkelanjutan diuji: apakah ia berani mendefinisikan ulang dirinya sebagai proses demokratisasi kekuasaan, bukan sekadar penyesuaian teknis dalam bauran energi nasional.

7.2 Transformasi Sosial-Politik: Relasi Kelas, Gender, Ras, dan Ruang

Transformasi sosial-politik dalam ranah energi sering dibayangkan sebagai sesuatu yang otomatis mengalir dari perubahan teknologi: kalau pembangkit fosil diganti panel surya dan turbin angin, maka masyarakat dianggap otomatis menjadi lebih adil dan hijau. Cara pandang ini menyederhanakan realitas relasi kelas, gender, ras, dan ruang yang justru ikut menentukan siapa yang bisa membeli teknologi baru, siapa yang menanggung

polusi lama, dan siapa yang didengar suaranya ketika peta infrastruktur energi dirancang ulang. Di sini, transformasi tidak hanya berarti mengganti mesin, melainkan mengubah struktur peluang dan kerentanan: siapa yang berhak atas tarif murah, siapa yang disambungkan lebih dulu ke jaringan, siapa yang dipaksa tinggal di dekat pembangkit berisiko, dan siapa yang bisa memindahkan modalnya ke sektor hijau tanpa kehilangan pendapatan.

Ketika kita berbicara tentang kelas, mudah untuk jatuh pada kategori kasar "kaya–miskin" dan lupa bahwa kelas juga menyangkut posisi tawar dalam struktur kerja, status kepemilikan lahan, serta akses ke lembaga keuangan. Rumah tangga kelas menengah atas bisa memasang instalasi atap surya, membeli kendaraan listrik, dan memanfaatkan skema insentif pajak, sementara pekerja informal di kota kecil atau komunitas agraris hanya menjadi penonton yang membayar tagihan listrik tanpa punya ruang negosiasi. Studi tentang *uneven energy transitions* di komunitas pedesaan menunjukkan bagaimana ketimpangan struktural membuat janji transisi hijau justru memperdalam periferalisasi wilayah yang sudah tertinggal (O'Sullivan et al., 2020). Artinya, transformasi sosial-politik tidak dapat diklaim terjadi jika kelas pekerja dan kelompok rentan tetap menanggung tarikan biaya tinggi dan layanan yang rapuh.

Dimensi gender menambah lapisan kompleksitas lain, karena pembagian kerja domestik, peran pengasuhan, dan akses terhadap ruang pengambilan keputusan jarang netral dalam setiap desain *energi terbarukan*. Di banyak konteks, perempuan bertanggung jawab atas pengelolaan kebutuhan energi rumah tangga—memasak, penerangan, pengasuhan—namun tidak diikutsertakan dalam diskusi tarif, pemilihan lokasi pembangkit, atau penentuan skema subsidi. Ketika tarif dinaikkan atas nama investasi hijau, beban penyesuaian anggaran rumah tangga

sering jatuh pada mereka yang mengatur pengeluaran harian, yang dalam praktiknya adalah perempuan dan anak perempuan. Jika transisi teknologi tidak disertai restrukturisasi representasi politik dan akses terhadap informasi, maka narasi transformasi hanya menempel tipis di permukaan, sementara praktik patriarki tetap mengatur secara halus siapa yang diundang ke rapat dan siapa yang sekadar menerima keputusan.

Ras dan etnisitas hadir dalam transformasi sosial-politik melalui sejarah pembedaan ruang: kawasan tertentu diisi kelompok minoritas, dilekati stigma "kumuh" atau "terbelakang", kemudian dijadikan lokasi fasilitas yang tidak diinginkan, seperti pembangkit, tempat pembuangan limbah, atau jaringan transmisi bertegangan tinggi. Ketika wacana hijau menguat, wilayah ini sering kembali menjadi sasaran proyek "percontohan" dengan dalih potensi sumber daya, misalnya angin kencang atau intensitas matahari yang tinggi, namun suara komunitas yang sudah lama menghadapi diskriminasi tidak diutamakan dalam desain kebijakan. Relasi ras dan etnis ini bukan sekadar soal identitas, tetapi mempengaruhi bagaimana aparat negara memprioritaskan perlindungan, bagaimana aparat keamanan dikerahkan saat muncul protes, dan bagaimana media menggambarkan resistensi sebagai "gangguan ketertiban" ketimbang sebagai ekspresi klaim keadilan.

Ruang—baik sebagai wilayah geografis maupun sebagai arena sosial—menjadi medium di mana kelas, gender, dan ras saling berkelindan. Kota besar dengan infrastruktur unggul, akses informasi tinggi, dan pusat keuangan kuat menjadi ladang utama investasi infrastruktur hijau, sementara wilayah pinggiran disambungkan belakangan dan sering hanya menerima teknologi sisa, misalnya panel surya berkualitas rendah, jaringan distribusi rapuh, atau layanan purna jual minim. Dalam bahasa sederhana, ruang tidak netral: ia adalah

peta yang memuat jejak kolonialisme, urbanisasi bias-kelas, dan praktik perencanaan yang menyingkirkan kelompok tertentu dari pusat manfaat. Transformasi sosial-politik yang serius harus membaca ulang peta ini: wilayah mana yang selama ini menjadi "sacrifice zones", siapa yang tinggal di sana, dan bagaimana kebijakan dapat dikoreksi sehingga tidak lagi menjadikan sebagian ruang sebagai tempat menumpuk risiko bagi warga yang paling sedikit daya tawarnya.

Di tengah konfigurasi tersebut, *kebijakan energi* sering dikemas sebagai serangkaian regulasi teknis—tarif, standar emisi, skema subsidi—padahal substansinya adalah keputusan politik tentang siapa yang dilindungi dan siapa yang dipertaruhkan. Narasi teknokratis cenderung memindahkan perdebatan ke ruang angka dan grafik, sehingga pertanyaan tentang kelas, gender, dan ras dipandang sebagai "isu sampingan" yang dapat ditangani kemudian melalui program kompensasi. Padahal, cara kebijakan dirancang dari awal—siapa yang duduk di meja perumusan, bahasa apa yang digunakan, indikator apa yang dipilih—sudah mengandung bias nilai. Ketika kebijakan dianggap netral, padahal lahir dari struktur kekuasaan timpang, maka transformasi yang terjadi adalah transformasi permukaan: teknologi berganti, tetapi jejak subordinasi sosial dan rasial tetap menjadi fondasi yang tidak dikutak-atik.

Salah satu jebakan konsep transformasi adalah anggapan bahwa mobilitas ke arah energi rendah karbon secara otomatis sejalan dengan mobilitas sosial. Di sini muncul istilah *green upgrading*, yaitu gagasan bahwa ekonomi hijau akan mendorong naik kelas pekerja melalui penciptaan lapangan kerja baru. Namun, tanpa jaminan kondisi kerja yang layak, serikat yang kuat, dan perlindungan sosial, banyak pekerjaan hijau justru direproduksi dalam bentuk kontrak sementara, upah rendah, dan standar keselamatan minim. Pekerja migran, perempuan,

dan kelompok rasial minoritas kemudian menempati posisi paling rentan dalam rantai nilai baru. Transformasi sosial-politik yang sejati memerlukan pengakuan terhadap kontradiksi ini: bahwa ekonomi hijau dapat sekaligus membuka peluang dan memproduksi bentuk eksploitasi baru, jika hubungan antara tenaga kerja, modal, dan negara tidak diubah secara substantif.

Persilangan antara gender dan ras terlihat jelas dalam pengalaman komunitas yang berhadapan langsung dengan proyek infrastruktur energi besar, misalnya pembangkit tenaga air skala besar atau ladang angin di wilayah pedesaan. Perempuan dari kelompok etnis minoritas sering menanggung empat lapis beban: sebagai penjaga rumah tangga, sebagai pekerja informal yang mengandalkan sumber daya lokal, sebagai warga yang minim akses terhadap dokumen hukum tanah, dan sebagai subjek stereotipe budaya yang suaranya dianggap kurang rasional. Ketika konsultasi publik dilakukan, mereka sering hadir hanya sebagai pendengar atau bahkan tidak terundang, sementara keputusan sudah disepakati di ruang yang terjaga rapi dari suara kritis. Dalam situasi seperti ini, transformasi sosial-politik menuntut perubahan desain partisipasi: bukan sekadar menambah jumlah forum, tetapi mengubah aturan main agar kelompok paling terdampak menjadi pengarah, bukan sekadar objek.

Dimensi ruang juga beririsan dengan kelas ketika kita melihat di mana proyek *energi terbarukan* dibangun dan siapa yang menikmati hasilnya. Lahan luas di wilayah perdesaan dikonversi menjadi ladang surya atau angin, dengan janji pekerjaan lokal dan kompensasi finansial kepada pemilik tanah. Namun, buruh tani penggarap yang tidak memiliki sertifikat tanah formal sering kali tidak diakui sebagai pihak yang berhak atas kompensasi. Sementara itu, tenaga kerja terampil didatangkan dari kota, sehingga transfer keterampilan ke komunitas lokal minim. Struktur ini memperlihatkan bahwa

ruang bukan hanya lokasi fisik, tetapi juga "infrastruktur sosial" yang menentukan siapa yang punya dokumen legal, siapa yang dekat dengan birokrasi, dan siapa yang mudah dilupakan ketika kontrak disusun. Transformasi mengharuskan pengakuan terhadap bentuk kerja tak terlihat dan hak atas ruang yang tidak selalu tercermin dalam sertifikat resmi.

Dari sisi negara, transformasi sosial-politik berarti memikirkan ulang praktik perencanaan, pendanaan, dan pengawasan dengan kacamata interseksional. Bukannya menyusun kebijakan berdasarkan rumah tangga rata-rata yang abstrak, negara perlu mengakui bahwa kelompok miskin kota, masyarakat adat, perempuan kepala keluarga, dan komunitas rasial minoritas memiliki profil kerentanan berbeda. Di sini, pendekatan *energy justice* dapat dijelaskan secara sederhana sebagai upaya memastikan distribusi manfaat dan beban yang adil, pengakuan terhadap kelompok termarjinalkan, serta prosedur pengambilan keputusan yang inklusif. Namun, jika *energy justice* hanya menjadi label program tanpa perubahan pada struktur anggaran, kewenangan institusional, dan indikator kinerja birokrasi, ia akan berhenti pada tingkat retorika. Transformasi mensyaratkan pergeseran dari kebijakan "satu tarif untuk semua" ke desain yang berani mengarahkan subsidi kepada mereka yang selama ini dikeluarkan dari jaring perlindungan.

Dari sisi pasar, transformasi sosial-politik menantang asumsi bahwa investor akan otomatis mengikuti sinyal harga dan regulasi tanpa memperkuat ketimpangan. Perusahaan energi besar, lembaga keuangan internasional, dan konsorsium teknologi tinggi memiliki kapasitas untuk menangkap peluang insentif baru, sementara koperasi lokal dan usaha kecil sering tertahan oleh syarat jaminan, biaya transaksi, dan ketidakpastian regulasi. Analisis tentang kebijakan transisi energi di Brasil menunjukkan bagaimana konfigurasi tata kelola

sektor listrik dan kehadiran modal privat dapat menggeser orientasi kebijakan dari tujuan sosial menuju kepentingan aktor kuat, kecuali ada desain regulasi yang sengaja melindungi tujuan keadilan sosial (Werner & Lazaro, 2023). Transformasi sosial-politik, dengan demikian, bukan narasi abstrak; ia bergantung pada seberapa jauh regulasi sanggup mengerem konsentrasi kekuasaan pasar dan memberi ruang pada aktor yang selama ini tersisih.

Selain negara dan pasar, gerakan sosial memainkan peran kunci dalam mendorong perubahan arah *kebijakan energi*. Koalisi warga, serikat pekerja, organisasi feminis, kelompok masyarakat adat, dan jaringan akademik kritis membangun narasi tandingan yang menghubungkan isu tarif listrik, hak atas lingkungan sehat, dan sejarah perampasan tanah. Melalui aksi protes, litigasi, kampanye media, dan pembangunan proyek komunitas, mereka memaksa pengambil keputusan untuk mengakui bahwa transisi rendah karbon tidak boleh mengulangi pola kolonial lama dengan wajah baru. Namun, gerakan sosial juga berhadapan dengan kelelahan aktivis, kriminalisasi protes, dan kooptasi wacana oleh negara maupun korporasi. Transformasi sosial-politik membutuhkan ruang gerak sipil yang dijamin, di mana perbedaan pandangan bukan direspon dengan represi, tetapi dengan pembukaan kanal musyawarah yang sungguh-sungguh mendengar suara minoritas.

Pada akhirnya, menghubungkan kelas, gender, ras, dan ruang dalam pembahasan transformasi sosial-politik berarti menolak narasi tunggal tentang "masyarakat" sebagai entitas homogen yang bergerak bersama menuju masa depan hijau. Masyarakat itu berlapis, dan sebagian lapisan telah lama berfungsi sebagai bantalan bagi kenyamanan kelompok lain. Transformasi sejati menuntut keberanian untuk mengakui siapa yang selama ini menjadi bantalan tersebut: pekerja berupah rendah di sektor energi, komunitas yang hidup di sekitar

tambang, perempuan yang mengelola rumah tangga dengan anggaran sempit, atau kelompok rasial yang distigmatisasi sebagai penghambat pembangunan. Dari pengakuan inilah bisa lahir imajinasi kebijakan yang berbeda, di mana transisi tidak lagi diukur hanya dengan kurva penurunan emisi, tetapi juga dengan berkurangnya ketakutan, rasa terasing, dan ketidakberdayaan kelompok yang selama ini dibungkam oleh bahasa teknokratis.

Dengan demikian, subbagian ini menegaskan bahwa "transformasi" dalam diskursus energi adalah istilah yang harus dicurigai jika tidak disertai analisis teliti tentang siapa yang naik dan siapa yang tetap diam di tempat, atau bahkan terseret mundur. Relasi kelas, gender, ras, dan ruang tidak dapat ditempatkan sebagai lampiran setelah desain teknologi dan pembiayaan dianggap selesai. Justru sejak awal perumusan visi energi rendah karbon, pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai distribusi kekuasaan, kesempatan kerja, hak atas tanah, dan hak untuk menentukan masa depan harus diletakkan di pusat diskusi. Jika tidak, kata "transformasi" hanya menjadi topeng baru bagi kontinuitas struktur lama. Buku ini, melalui pembacaan kritis terhadap berbagai kasus dan rezim kebijakan, mengajak pembaca untuk terus menguji apakah setiap klaim transformasi benar-benar menggeser relasi kekuasaan, atau sekadar mengganti rupa infrastruktur tanpa mengubah fondasi ketidakadilan sosial yang telah lama mengakar.

7.3 *Just Energy Transition*: Menggabungkan Efisiensi Teknis dan Keadilan Struktural

Subbab ini memaknai *just energy transition* sebagai proyek politik, bukan semata agenda teknis menurunkan emisi. Istilah *just energy transition* merujuk pada transisi energi yang adil, yaitu perubahan sistem energi yang sejak awal memasukkan dimensi keadilan sosial, distribusi manfaat, dan perlindungan

kelompok rentan, bukan hanya perhitungan teknologi dan biaya. Dalam kerangka filsafat kekuasaan, transisi ini selalu menyentuh pertanyaan: siapa yang mengendalikan infrastruktur, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang menikmati tarif yang lebih murah atau lingkungan yang lebih bersih. Dengan demikian, transisi yang adil menolak bayangan teknokratis yang memandang kebijakan energi sebagai persoalan optimasi matematis, dan justru mengungkap bagaimana desain teknologi, tarif, dan regulasi dapat memperkuat atau mengoreksi ketimpangan kekuasaan yang sudah lama tertanam dalam masyarakat.

Pendekatan teknokratis cenderung memusat pada parameter efisiensi—misalnya *cost-effectiveness* yang berarti cara paling murah mencapai target—seolah angka-angka sudah cukup menggambarkan keberhasilan. Namun, bagi proyek *just energy transition*, efisiensi teknis hanya satu sisi dari koin. Pertanyaannya bergeser dari "berapa cepat kita menurunkan emisi?" menjadi "siapa yang harus berkorban, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari penurunan emisi itu?". Di sini, dimensi kekuasaan masuk melalui pemilihan teknologi, skema pendanaan, dan bentuk kepemilikan aset. Ketika keputusan-keputusan ini diambil dalam ruang tertutup dan penuh jargon, warga yang terdampak langsung justru tersingkir. Transisi yang adil menuntut agar kalkulus teknis tidak menghapus diskusi moral tentang hak, martabat, dan legitimasi politik dari setiap kebijakan yang mengatur infrastruktur energi.

Gagasan *energy justice*—keadilan energi—menguji apakah seluruh rantai produksi, distribusi, dan konsumsi energi memberikan perlakuan yang setara, terutama bagi kelompok yang selama ini termarginalkan. *Energy justice* secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya memastikan tidak ada kelompok yang selalu mendapat bagian polusi, tagihan tinggi, dan pemadaman, sementara kelompok lain menikmati listrik bersih

dan murah. Dalam konteks ini, *just energy transition* tidak boleh berhenti pada ekspansi kapasitas **energi terbarukan**, tetapi harus menilai bagaimana proyek-proyek baru mengubah peta beban dan manfaat di antara kelas sosial, wilayah, dan komunitas adat. Jika transisi "hijau" hanya mengganti bahan bakar tetapi melestarikan pola perampasan lahan, penyingkiran warga, atau kerja berupah rendah, maka yang terjadi hanyalah regenerasi ketidakadilan dalam kemasan teknologi yang lebih bersih.

Salah satu janji transisi yang adil adalah desentralisasi penguasaan infrastruktur, ketika warga dan komunitas lokal tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan pengelola energi. Konsep seperti *renewable energy communities* merujuk pada komunitas yang mengembangkan dan mengelola proyek energi sendiri dengan tujuan melampaui sekadar keuntungan finansial, misalnya memperkuat solidaritas lokal. Brisbois (2020) menunjukkan bahwa munculnya komunitas energi dapat menggeser konfigurasi kekuasaan di sektor listrik, meski kemenangan kebijakan yang bersifat penuh masih jarang dan selalu diperebutkan. *Just energy transition* dengan demikian menuntut bukan hanya diversifikasi sumber, tetapi juga diversifikasi aktor yang berhak duduk di meja perumusan kebijakan, sehingga tidak lagi didominasi oleh perusahaan besar dan birokrasi teknokratik saja.

Keadilan struktural dalam transisi energi mensyaratkan keberanian untuk merombak pola-pola ketergantungan historis pada infrastruktur fosil dan relasi ekonomi yang menyertainya. Istilah *lock-in* menggambarkan keadaan ketika sistem sudah terlanjur tersusun sedemikian rupa—dari jaringan pipa, kontrak jangka panjang, hingga kebiasaan birokrasi—sehingga sangat sulit beralih ke model lain tanpa biaya besar. Dalam banyak negara, *lock-in* fosil ini berjalan beriringan dengan struktur kelas yang timpang, korupsi, dan centralisasi

keputusan di tangan segelintir elit. *Just energy transition* mengusulkan untuk memutus *lock-in* bukan hanya dengan mengganti teknologi, melainkan juga dengan mengubah kontrak sosial yang mengatur siapa yang menanggung biaya perubahan, bagaimana kompensasi bagi pekerja sektor fosil dirancang, dan bagaimana lembaga pengawas diberi kuasa untuk melindungi kepentingan publik secara efektif.

Pada titik ini, arena utama perjuangan bergeser ke ranah kebijakan energi, yaitu himpunan undang-undang, peraturan, insentif, dan prosedur perizinan yang menentukan arah transisi. *Policy instruments* dapat dipahami sederhana sebagai "alat" yang dipakai pemerintah untuk mempengaruhi perilaku aktor—misalnya subsidi, pajak, atau kuota. Jika alat-alat ini dirancang hanya untuk mengejar pertumbuhan kapasitas tanpa memeriksa distribusi manfaat, maka ketidakadilan akan direproduksi. Narasi teknokratis sering mempresentasikan *policy instruments* seolah netral, padahal setiap pilihan instrumen sekaligus pilihan tentang siapa yang diuntungkan terlebih dahulu. Dalam kerangka *just energy transition*, desain kebijakan harus membuka ruang partisipasi bermakna, menyediakan mekanisme keberatan bagi warga, dan memasukkan indikator keadilan sosial sebagai syarat keberhasilan, bukan sekadar pelengkap laporan.

Dimensi ruang dalam transisi energi menyingkap bagaimana wilayah pedesaan, pesisir, atau daerah terpencil kerap menjadi lokasi proyek tetapi bukan pusat pengambilan keputusan. O'Sullivan, Golubchikov, dan Mehmood (2020) menunjukkan bahwa transisi rendah karbon dapat menghasilkan "periferisasi energi" baru, ketika komunitas di pinggiran tetap terjebak dalam posisi lemah meskipun proyek hijau masuk ke wilayah mereka. Konsep *spatial justice*—keadilan spasial—secara sederhana merujuk pada pembagian adil atas peluang dan beban berdasarkan tempat tinggal. Dalam

perspektif *just energy transition*, proyek energi di wilayah pinggiran harus memastikan hak atas konsultasi, kompensasi yang layak, serta akses prioritas terhadap listrik bersih bagi warga lokal, bukan hanya menjadikan wilayah tersebut sebagai "lahan kosong" demi memenuhi target nasional atau kepentingan investor.

Keadilan struktural juga menyentuh dimensi kerja dan kelas sosial. Transisi energi akan mengubah jenis pekerjaan yang tersedia: beberapa pekerjaan di industri batu bara dan minyak akan menyusut, sementara lapangan kerja baru di sektor perawatan turbin, manajemen jaringan cerdas, dan layanan desain sistem akan muncul. Istilah *re-skilling* berarti proses melatih ulang pekerja agar memiliki keahlian yang relevan dengan pekerjaan baru. Dalam kerangka *just energy transition*, program *re-skilling* tidak boleh sekadar pelatihan simbolik yang gagal menjamin pekerjaan layak, tetapi harus dihubungkan dengan strategi industrial yang jelas dan perlindungan sosial yang kuat. Jika tidak, transisi akan dipersepsikan sebagai ancaman, dan penolakan masyarakat—yang sering dipahami secara sempit sebagai "kurangnya penerimaan"—sebenarnya adalah penolakan terhadap pola pemiskinan struktural yang berkepanjangan.

Teknologi **energi terbarukan** kerap dipromosikan sebagai solusi yang "pasti baik", namun dari perspektif filsafat kekuasaan, tidak ada teknologi yang sepenuhnya netral. Pembangunan ladang angin, pembangkit surya skala besar, atau proyek bioenergi dapat memicu konflik lahan, mengubah pola penguasaan ruang, bahkan menciptakan bentuk baru "perampasan hijau" ketika hak komunitas lokal diabaikan atas nama penyelamatan iklim global. *Just energy transition* mengingatkan bahwa penting untuk menelisik siapa yang memiliki aset, bagaimana struktur tarif ditetapkan, dan sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan suara dalam menentukan

bentuk dan lokasi proyek. Teknologi terbarukan yang dikelola dengan logika ekstraktif tidak akan jauh berbeda dengan industri fosil, kecuali warna cat infrastruktur dan jenis polusi yang dihasilkan.

Pengalaman negara-negara di Selatan Global memperlihatkan bahwa desain kebijakan dapat mempercepat transisi sekaligus membuka konflik baru. Studi tentang kebijakan transisi energi di Brasil menunjukkan bagaimana regulasi, perencanaan sistem, dan konfigurasi tata kelola menentukan arah perluasan sumber terbarukan serta posisi aktor publik dan swasta. Werner dan Lazaro (2023) menegaskan bahwa keberhasilan mendorong sumber terbarukan menuntut keterpaduan antara perencanaan wilayah, regulasi, dan keterlibatan pemodal besar, seraya tetap menjaga komitmen pada dekarbonisasi. Dari perspektif *just energy transition*, pelajaran pentingnya adalah bahwa skema kelembagaan harus dirancang agar kepentingan investor besar tidak sepenuhnya mendikte arah transisi, melainkan tunduk pada prinsip keadilan sosial, perlindungan ekosistem, dan hak masyarakat terdampak.

Untuk menggabungkan efisiensi teknis dan keadilan struktural, arsitektur kelembagaan perlu digambar ulang. Istilah *governance* mengacu pada cara berbagai aktor—negara, pasar, dan masyarakat sipil—mengatur dan mengkoordinasikan tindakan bersama. Model *polycentric governance* dapat dipahami secara sederhana sebagai tata kelola yang memiliki banyak pusat keputusan, bukan hanya satu pemerintah pusat yang dominan. Dalam kerangka *just energy transition*, model ini memungkinkan kota, desa, komunitas adat, koperasi, dan lembaga negara saling mengawasi dan bernegosiasi dalam merancang proyek dan regulasi. Desain kelembagaan yang demikian bisa menjadi jembatan antara kebutuhan efisiensi—misalnya koordinasi jaringan listrik nasional—dan tuntutan

keadilan—misalnya perlindungan hak komunitas lokal. Tantangannya adalah mencegah agar "banyak pusat" tadi tidak sekadar wajah berbeda dari oligarki yang sama.

Dimensi wacana dan metafora juga menentukan konfigurasi **kebijakan energi**. Ketika transisi digambarkan sebagai *race to net zero*—lomba menuju nol emisi—fokus mudah tersedot ke indikator teknis, sementara kisah penderitaan warga yang tergusur atau pekerja yang kehilangan mata pencaharian menjadi catatan kaki saja. Sebaliknya, jika transisi dibingkai sebagai upaya membangun rumah bersama yang lebih adil dan tangguh, maka prioritas kebijakan bergeser ke jaminan akses, kualitas layanan, dan partisipasi. Metafora semacam itu bukan sekadar gaya bahasa; ia memandu jenis instrumen yang dipilih, siapa yang dianggap ahli, dan suara siapa yang diabaikan. Dalam *just energy transition*, kerja konseptual untuk mengubah metafora kebijakan sama pentingnya dengan perhitungan kapasitas pembangkit, karena dari situlah peta kawan, lawan, dan pihak yang dilupakan digambar ulang.

Bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, transisi yang adil berarti mengelola paradoks antara kebutuhan memperluas akses listrik, keterbatasan fiskal, dan komitmen iklim global. Di banyak daerah, persoalan utama bukan hanya jenis pembangkit, tetapi juga tarif yang terjangkau, keandalan pasokan, dan rasa hormat terhadap hak komunitas atas tanah dan sumber daya. *Just energy transition* menolak logika bahwa negara harus memilih antara melindungi iklim atau mengurangi kemiskinan; sebaliknya, ia menuntut kebijakan yang secara eksplisit mengikat perluasan akses, peningkatan kualitas layanan publik, dan pengurangan ketimpangan ke dalam desain proyek energi. Dengan demikian, perdebatan tentang teknologi tidak boleh dipisahkan dari perdebatan tentang reforma agraria, perlindungan sosial, dan demokratisasi lembaga-lembaga ekonomi yang mengelola sektor energi.

Pada akhirnya, *just energy transition* dapat dibaca sebagai undangan untuk membalik hierarki tujuan: efisiensi teknis bukan lagi tujuan tertinggi, melainkan sarana bagi keadilan struktural. Teknologi yang canggih, model bisnis yang inovatif, dan skema pembiayaan yang kreatif hanya sah secara normatif sejauh membantu memperluas ruang hidup yang bermartabat bagi banyak orang, bukan menumpuk keuntungan bagi segelintir aktor. Dalam perspektif filsafat kekuasaan, transisi energi bukan sekadar kisah penggantian mesin, tetapi proses panjang penataan ulang relasi antara negara, pasar, dan warga atas sumber daya yang menopang kehidupan. Subbab ini menegaskan bahwa tanpa keberpihakan pada keadilan, transisi hanya menjadi teknokrasi versi baru; tetapi dengan menggabungkan efisiensi teknis dan keadilan struktural, transisi dapat menjadi rekayasa sosial-politik yang membuka kemungkinan tata dunia energi yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

7.4 Kontestasi Wacana: Siapa yang Diuntungkan oleh Istilah "Transisi"

Istilah "transisi" dalam wacana energi sering terdengar seolah-olah netral dan tak berbahaya: kita dibujuk membayangkan pergerakan pelan namun pasti dari satu sistem ke sistem lain, tanpa pergolakan, tanpa konflik, tanpa pertanyaan tentang siapa yang memegang kendali. Namun, ketika ditanya "siapa yang diuntungkan oleh istilah transisi?", jawaban filosofis yang muncul justru mengarah pada relasi kekuasaan yang tidak merata. Kata "transisi" bekerja sebagai *framing* (cara membingkai persoalan publik) yang membuat perubahan tampak teknis dan administratif, bukan politis. Di ruang kebijakan, istilah ini dapat mengaburkan perbedaan antara mereka yang membayar biaya perubahan dan mereka

yang memanen keuntungan ekonomi maupun simbolik darinya. Dengan demikian, sebelum menerima begitu saja narasi transisi energi berkelanjutan, kita perlu membongkar bagaimana istilah ini dipakai untuk meredam konflik, menunda pertanyaan keadilan, dan menegosiasikan ulang peta pemenang serta pecundang dalam tatanan energi.

Kajian tentang *energy transition* (pergeseran sistem energi menuju emisi rendah) menunjukkan bahwa perubahan infrastruktur hampir selalu diiringi pergeseran pusat-pusat kekuasaan politik, baik ke tingkat lokal maupun ke aktor korporasi baru. Brisbois (2020) memperlihatkan bagaimana desentralisasi listrik justru memicu reskala kekuasaan, reorganisasi institusi, dan pertarungan pengaruh baru yang tidak otomatis lebih demokratis. Temuan ini penting karena istilah "transisi" sering digunakan seakan-akan arah pergeseran sudah pasti progresif dan adil. Dalam perspektif filsafat kekuasaan, label transisi bisa menutupi fakta bahwa elit lama bernegosiasi ulang posisinya dalam rezim baru sambil tetap mengendalikan arus modal, regulasi, dan pengetahuan teknis. Dengan kata lain, transisi bukanlah jembatan mulus ke masa depan yang hijau, melainkan arena di mana koalisi lama dan baru saling berebut definisi tentang apa yang dimaksud "berkelanjutan" dan siapa yang berhak menentukan jalannya.

Ketika wacana resmi berbicara tentang "transisi menuju energi terbarukan", publik kerap dibawa pada imajinasi teknologi yang bersih dan canggih: panel surya berkilau, turbin angin yang elegan, jaringan pintar yang efisien. Namun, istilah "transisi" di sini bisa berfungsi sebagai selimut yang menutupi pertanyaan mendasar tentang siapa yang memiliki lahan, siapa yang membeli listrik, dan siapa yang menanggung dampak sosial-lingkungan. Fokus pada energi terbarukan dalam arti teknologi — alih-alih pada relasi sosial yang menyertainya — menggeser pembicaraan dari konflik keadilan ke urusan hitung-

hitungan kapasitas megawatt dan harga per kilowatt jam. Wacana seperti ini membuat warga hanya muncul sebagai konsumen atau objek sosialisasi, bukan sebagai subjek politik yang berhak merumuskan bentuk perubahan. Di titik ini, istilah "transisi" bekerja sebagai metafora yang menenangkan, tetapi justru mengurangi kapasitas publik untuk mempertanyakan struktur dan distribusi kekuasaan dalam sistem energi.

Perbedaan antara "transisi" dan "transformasi" penting untuk dibongkar. Kata transisi menyiratkan pergeseran bertahap dalam kerangka yang relatif sama: institusi lama tetap dominan, hanya portofolio teknologinya yang disesuaikan. Sebaliknya, transformasi menandakan perubahan lebih radikal dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi energi diatur, termasuk siapa yang berhak memutuskan arahnya. Secara filosofis, transisi cenderung kompatibel dengan logika *business as usual* (bisnis seperti biasa) yang diberi baju hijau, sementara transformasi menantang relasi kuasa dan struktur kepemilikan itu sendiri. Ketika negara dan korporasi memilih istilah transisi, mereka pada dasarnya sedang mengirim pesan bahwa perubahan akan dikelola secara terkendali, tanpa mengusik fondasi politik dan ekonomi yang menopang status quo. Akibatnya, kritik terhadap oligarki energi, ketimpangan akses, dan kerentanan komunitas hanya diposisikan sebagai "isu pendukung", bukan inti dari agenda perubahan.

Di ruang kebijakan, istilah "transisi" menjadi medan kontestasi wacana yang melibatkan kementerian, lembaga internasional, perusahaan energi, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil. Setiap aktor berusaha mengisi kata itu dengan makna yang sesuai dengan kepentingannya. Bagi sebagian birokrat, transisi berarti menyesuaikan regulasi agar sesuai dengan standar internasional tanpa mengguncang koalisi politik yang sudah mapan. Bagi perusahaan, transisi sering dimaknai sebagai peluang membuka lini bisnis baru sambil

mempertahankan aset fosil selama mungkin melalui skema kompensasi dan insentif fiskal. Sementara bagi komunitas terdampak, transisi seharusnya berarti perbaikan konkret dalam hak atas lingkungan hidup yang sehat dan akses energi yang adil. Benturan definisi inilah yang membuat pertanyaan "siapa yang diuntungkan oleh istilah transisi" tidak bisa dijawab hanya dengan memeriksa dokumen resmi; ia menuntut pembacaan kritis atas narasi, metafora, dan bahasa yang digunakan para aktor dominan.

Pengalaman di Brasil menunjukkan bagaimana kata "transisi" dapat dipakai untuk menonjolkan kemajuan regulasi tanpa secara jujur menghadirkan konflik sosial maupun ekologis yang menyertainya. Werner dan Lazaro (2023) menyoroti bagaimana desain *energy policy* (kebijakan energi) yang mendorong sumber terbarukan membawa konfigurasi tata kelola baru, tetapi juga memperkuat kehadiran aktor swasta besar yang punya kapasitas finansial dan politik. Dalam kerangka ini, transisi bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan juga konsolidasi kepentingan tertentu dalam pasar listrik yang makin kompleks. Istilah yang tampak positif ini dapat digunakan untuk menutupi ketegangan mengenai lokasi proyek, dampak lingkungan, dan hak masyarakat adat. Bagi pembuat kebijakan, mengklaim keberhasilan transisi lebih mudah daripada mengakui bahwa sebagian kelompok masih menanggung risiko banjir, kekeringan, atau konflik lahan akibat proyek yang justru diklaim sebagai solusi hijau.

Dalam konteks Indonesia, istilah "transisi energi" sering muncul dalam pidato, rencana jangka panjang, dan dokumen kerja sama internasional, namun jarang dibarengi penjelasan gamblang tentang bagaimana struktur kepemilikan dan distribusi keuntungan akan diubah. Filsafat kekuasaan mengajarkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen untuk membangun realitas; ketika kata

transisi diulang tanpa kritik, ia dapat mengesankan bahwa perubahan yang sedang diatur sudah pasti adil dan niscaya. Padahal, oligarki batu bara, minyak, dan gas masih memegang posisi dominan dalam rantai nilai energi. Narasi transisi yang terlalu menekankan stabilitas investasi dan kepastian pasar dapat menjadi cara halus untuk menjamin agar kepentingan ekonomi mapan tetap aman, sementara masyarakat hanya dilibatkan sebagai objek sosialisasi, bukan sebagai penentu arah perubahan.

Perbedaan antara transisi yang dikendalikan dari atas dan transformasi yang tumbuh dari bawah mencerminkan logika kekuasaan yang kontras. Transisi sering dikelola sebagai *top-down governance* (tata kelola dari atas) yang menempatkan pemerintah dan korporasi sebagai pengambil keputusan utama, dengan masyarakat sipil berada dalam posisi konsultatif. Transformasi, sebaliknya, menuntut ruang bagi inisiatif komunitas, koperasi energi, dan gerakan yang mendorong demokratisasi sistem energi. Bagi aktor dominan, mempertahankan istilah transisi lebih menguntungkan karena memungkinkan mereka memonopoli pengetahuan teknis dan akses pada pendanaan global, sambil mengklaim diri sebagai pemimpin perubahan. Dengan cara ini, kata transisi berfungsi sebagai "kompromi linguistik": cukup hijau untuk memuaskan tuntutan internasional, namun cukup aman untuk tidak mengganggu struktur kekuasaan yang menopang ekonomi ekstraktif.

Di wilayah pedesaan dan pinggiran, proyek yang dikaitkan dengan energi terbarukan sering kali hadir sebagai janji kesejahteraan baru, tetapi dalam praktiknya memperlihatkan pola penguasaan ruang yang tidak jauh berbeda dari proyek ekstraktif sebelumnya. Pembangunan ladang surya skala besar atau pembangkit angin dapat memerlukan lahan luas, menggeser praktik agraris, dan mengubah relasi sosial di tingkat

lokal. Namun, ketika semuanya dibingkai sebagai bagian dari "transisi", ruang untuk mempertanyakan bentuk dan skala proyek menjadi menyempit, karena kritik mudah dicap sebagai anti-perubahan atau anti-lingkungan. Dalam situasi ini, istilah transisi menjadi alat simbolik yang memaksa komunitas untuk menerima proyek demi kebaikan planet, tanpa memberikan ruang memadai untuk merundingkan model kepemilikan, skema bagi hasil, atau pilihan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan sosial-ekologis setempat.

Diskursus global tentang risiko iklim dan keharusan membangun sistem energi yang tangguh juga mempengaruhi cara Indonesia memformulasikan kebijakan. Setiawan dkk. (2025) menunjukkan bagaimana integrasi isu perubahan iklim, ketahanan sistem, dan target emisi nol-bersih dalam dokumen kebijakan dapat mendorong prioritas baru pada tata kelola dan pembiayaan. Namun, bahasa resmi mengenai ketahanan dan transisi sering kali lebih fokus pada infrastruktur dan instrumen keuangan, dibanding pada redistribusi kekuasaan dan hak warga. Di sini, term-term teknis seperti *resilient energy systems* (sistem energi yang tangguh) dan *net-zero emissions* (emisi nol-bersih) berpotensi mengalihkan perhatian dari pertanyaan: siapakah yang mengendalikan keputusan investasi, bagaimana suara komunitas terdampak diakomodasi, dan sejauh mana risiko sosial dibagi secara adil di antara negara, pasar, dan masyarakat.

Istilah "transisi" juga membentuk bagaimana warga dibayangkan dalam narasi kebijakan. Alih-alih dianggap sebagai warga negara dengan hak politik, mereka lebih sering muncul sebagai konsumen yang perlu diedukasi agar memilih produk efisien, membayar tarif yang "rasional", dan berperilaku hemat listrik. Dalam kerangka ini, *behavioural change* (perubahan perilaku) digarisbawahi, tetapi perubahan struktur kepemilikan dan pengambilan keputusan justru terpinggirkan. Filsafat

kekuasaan memberi peringatan bahwa ketika warga direduksi menjadi konsumen, relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat menjadi timpang: yang satu memerintah dan mengatur infrastruktur, sementara yang lain hanya beradaptasi. Narasi transisi yang fokus pada edukasi perilaku, tanpa membuka ruang deliberasi kritis, berisiko melanggengkan ketidaksetaraan sambil mengklaim bahwa semua pihak sedang "bergotong royong" menghadapi krisis iklim.

Selain itu, istilah "transisi" sangat menarik bagi lembaga keuangan internasional dan investor karena dapat dijahit ke dalam bahasa *bankable projects* (proyek yang layak dibiayai) dan *risk management* (pengelolaan risiko) yang sudah mereka kenal. Di banyak negara Selatan, termasuk Indonesia, paket pendanaan transisi sering datang dengan syarat-syarat tertentu yang mempengaruhi arah kebijakan energi. Di titik ini, pertanyaan "siapa yang diuntungkan" memiliki jawaban yang cukup jelas: aktor yang mampu mengakses kredit, menjamin arus kas, dan mengelola risiko politik di mata pemberi pinjaman. Sementara itu, komunitas lokal cenderung diposisikan sebagai penerima manfaat potensial, bukan mitra setara yang ikut menentukan desain proyek. Dengan demikian, transisi berkelanjutan bisa berubah menjadi skema finansialisasi baru, di mana nilai lingkungan dan sosial dikonversi menjadi angka-angka dalam model investasi, tanpa benar-benar mengubah distribusi kekuasaan.

Jika kita serius berbicara tentang keadilan, istilah "transformasi" perlu diangkat kembali untuk menantang hegemoni kata "transisi". Transformasi mengandaikan pembukaan ruang bagi *bottom-up initiatives* (inisiatif dari bawah), eksperimen kelembagaan, dan bentuk-bentuk kepemilikan bersama yang melampaui logika murni korporatis. Itu berarti menempatkan keadilan energi, hak atas ruang hidup, dan pengakuan terhadap kelompok rentan sebagai pusat, bukan

lampiran dari target teknis. Dalam perspektif ini, wacana kebijakan harus berani menyebut secara eksplisit siapa yang harus melepaskan sebagian hak istimewa, bukan sekadar siapa yang harus berhemat atau membayar tarif baru. Mengganti metafora dari transisi yang tertib ke transformasi yang bersifat politis dan terbuka untuk perdebatan adalah langkah penting agar bahasa kebijakan tidak lagi menjadi selimut yang menutupi ketimpangan, tetapi alat untuk mengungkap dan mengatasinya.

Pada akhirnya, kontestasi wacana di sekitar istilah "transisi" mengungkap jantung persoalan yang dibahas dalam buku ini: filsafat kekuasaan yang bekerja di balik kebijakan energi berkelanjutan. Pertanyaan "siapa yang diuntungkan" bukan hanya soal siapa yang menikmati tarif lebih murah atau akses listrik yang lebih stabil, tetapi juga siapa yang mengendalikan definisi masa depan, siapa yang menulis peta jalan, dan siapa yang punya hak veto atas arah perubahan. Dengan membaca transisi sebagai arena rekayasa sosial-politik, bukan sekadar perubahan teknis, kita diajak untuk menilai ulang strategi gerakan sosial, desain kelembagaan, dan praktik regulasi yang ada. Bab ini mengusulkan agar setiap kali istilah transisi muncul, kita menambahkan pertanyaan lanjutan: transisi bagi siapa, dari apa, menuju apa, dan dengan cara siapa — sehingga bahasa kebijakan tidak lagi melucuti konflik, tetapi membuka ruang bagi keberanian untuk benar-benar mengubah struktur kekuasaan.

Bagian III
Instrumen sebagai Teknologi Kuasa

8 *Feed–in Tariff* (FIT): Rasionalitas, Insentif, dan Politik Difusi Kebijakan Lintas Negara

8.1 Rasionalitas Ekonomi dan Regulasi FIT: Kepastian Harga dan Risiko Investasi

Feed-in Tariff, yang sering disingkat sebagai FIT, adalah salah satu instrumen kebijakan yang paling berpengaruh dalam sejarah pengembangan energi rendah karbon. Secara sederhana, skema *feed-in tariff* menjanjikan harga beli listrik yang tetap dan menarik bagi produsen listrik dari sumber bersih, biasanya untuk jangka waktu panjang 15–25 tahun. Di atas kertas, rasionalitas ekonomi di balik instrumen ini tampak elegan: negara memberi sinyal harga yang pasti, investor menanam modal, teknologi berkembang, biaya turun, dan masyarakat menikmati sistem energi yang lebih bersih. Namun di balik narasi yang tampak teknis ini tersembunyi persoalan besar tentang pembagian risiko antara negara, perusahaan, dan rumah tangga, serta tentang siapa yang berhak mendefinisikan "harga yang wajar". Dengan demikian, pembahasan mengenai rasionalitas ekonomi dan regulasi FIT selalu sekaligus merupakan pembahasan tentang distribusi kuasa dalam tata kelola energi.

Sejak awal kemunculannya di Eropa, FIT dirancang untuk mengatasi dua ketakpastian utama yang menghambat investasi energi bersih: ketidakpastian harga jual listrik dan ketidakpastian jangka waktu pengembalian modal. Dengan menetapkan tarif tetap dan masa kontrak panjang, negara pada dasarnya berkata kepada investor: "ambil risiko teknis dan operasional, kami yang menanggung risiko harga". Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, desain ini

kemudian diadaptasi dan dievaluasi ulang, seperti terlihat dalam kajian Asian Development Bank (2020) yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara tarif, biaya pembangkitan, dan kapasitas fiskal pemerintah. Di sini kita mulai melihat bahwa FIT bukan semata solusi teknis, tetapi sebuah kontrak politik yang memutuskan sampai sejauh mana negara bersedia mengalihkan risiko pasar ke publik melalui struktur tarif listrik.

Pada tahap berikut, FIT menjadi kunci untuk menarik investasi besar-besaran ke proyek *energi terbarukan*, terutama surya dan angin. Kepastian harga yang dijanjikan oleh regulasi memberi sinyal kuat bagi bank, lembaga pembiayaan, dan pengembang proyek bahwa arus kas masa depan cukup dapat diprediksi untuk menutup biaya modal yang tinggi di awal. Namun, kepastian bagi investor tidak selalu berarti kepastian bagi masyarakat. Jika tarif ditetapkan terlalu tinggi atau mekanisme penyesuaian tidak dirancang dengan cermat, beban biaya dapat bergeser ke konsumen melalui tagihan listrik yang meningkat, atau ke anggaran negara melalui skema subsidi silang yang tidak transparan. Dengan demikian, setiap klaim bahwa FIT "pro-pasar" perlu ditimbang dengan pertanyaan: pasar untuk siapa, dan biaya ditanggung oleh siapa?

Rasionalitas ekonomi yang sering dipromosikan bersama FIT biasanya bercorak utilitarian: selama manfaat sosial jangka panjang (pengurangan emisi, penciptaan lapangan kerja hijau, inovasi teknologi) melebihi biaya jangka pendek, maka kebijakan dianggap layak. Namun, logika agregasi "manfaat > biaya" ini menyembunyikan distribusi dampak: siapa yang menanggung biaya lebih dulu, dan siapa yang menikmati manfaat lebih dahulu. FIT dapat mempercepat inovasi dan menurunkan biaya teknologi, tetapi juga bisa memperlebar kesenjangan jika hanya pemain besar yang mampu mengakses skema tersebut. Di sinilah pertimbangan etika dan keadilan

menjadi tak terpisahkan dari kalkulus ekonomi, karena tarif yang sama dapat bermakna keadilan bagi sebagian aktor dan ketidakadilan bagi yang lain, tergantung posisi sosial dan daya tawar mereka dalam sistem energi.

Selain itu, diskusi tentang risiko investasi dalam FIT tidak dapat dipisahkan dari politik harga listrik. Studi tentang dukungan publik terhadap energi bersih di Eropa menunjukkan bahwa kenaikan tagihan listrik, ketika dikaitkan dengan skema dukungan seperti FIT, dapat memicu resistensi sosial terhadap kebijakan transisi energi, terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah (Aklin et al., 2020). Temuan seperti ini mengingatkan bahwa regulasi FIT bukan hanya soal menetapkan angka yang "ekonomis", melainkan juga mengelola persepsi keadilan tarif di mata warga. Jika desain tarif gagal mempertimbangkan dimensi kerentanan sosial, skema yang dimaksudkan untuk mempercepat dekarbonisasi justru dapat digunakan oleh kelompok tertentu untuk mendeligitimasi kebijakan iklim dengan argumen bahwa "energi hijau" membuat hidup rakyat menjadi lebih mahal.

Dari sudut pandang *kebijakan energi*, FIT adalah instrumen yang menyeberangi batas antara regulasi, fiskal, dan industri. Penetapan tarif menyentuh kewenangan regulator listrik, kemampuan fiskal kementerian keuangan, dan strategi industrialisasi teknologi lokal. Dalam beberapa kasus, penetapan tarif tinggi untuk mendorong investasi awal sengaja dikaitkan dengan kewajiban *local content*, misalnya pabrik panel surya atau komponen turbin angin di dalam negeri. Namun skema seperti ini mengandung risiko ganda: bila kapasitas industri lokal belum siap, biaya proyek melonjak dan keuangan negara tertekan; bila pemerintah secara politis merasa terpojok, risiko perubahan regulasi mendadak meningkat. Rasionalitas yang tampak "ekonomis" di atas kertas sering kali berubah menjadi medan tarik-menarik antara kementerian, lembaga,

dan pelaku pasar yang memiliki preferensi berbeda terhadap risiko dan imbal hasil.

Dalam literatur kebijakan energi, FIT sering dibandingkan dengan instrumen lain seperti *renewable portfolio standard* (RPS) dan lelang kapasitas. RPS, secara sederhana, adalah kewajiban bagi perusahaan listrik untuk memenuhi persentase tertentu dari pasokan mereka dengan energi bersih, sedangkan lelang kapasitas mengundang pengembang untuk saling bersaing menawarkan harga terendah untuk proyek tertentu. FIT menonjol karena sifatnya yang *ex ante*: harga sudah diketahui sebelum investasi dilakukan, sehingga ketidakpastian berkurang. Namun, keunggulan ini dibayar dengan risiko *over-compensation* jika biaya teknologi turun lebih cepat daripada mekanisme penyesuaian tarif. Di sisi lain, lelang cenderung menekan harga, tetapi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi bank bila desain kontraknya tidak stabil. Perbandingan ini menunjukkan bahwa rasionalitas ekonomi tiap instrumen tidak pernah murni; ia selalu bergantung pada asumsi tentang perilaku aktor dan stabilitas kelembagaan.

Regulasi FIT juga menghadirkan persoalan tentang *time consistency*, yakni apakah janji harga yang diberikan hari ini akan tetap dihormati 15–20 tahun ke depan ketika pemerintah, kondisi fiskal, dan opini publik berubah. Banyak negara yang pada awalnya menawarkan tarif sangat murah hati untuk menarik gelombang pertama investor, namun kemudian melakukan *retrospective cuts* atau penyesuaian sepihak ketika beban fiskal dirasa terlalu berat. Di sini, risiko investasi bukan hanya persoalan fluktuasi biaya teknologi dan suku bunga, tetapi juga persoalan kredibilitas negara sebagai mitra kontrak jangka panjang. Investor belajar dari setiap episode pemotongan tarif, dan premi risiko politik kemudian tercermin dalam struktur pembiayaan proyek berikutnya, yang pada akhirnya kembali dibayar oleh konsumen atau pembayar pajak.

Pada level praktik, keberhasilan FIT dalam mendorong investasi *energi terbarukan* sangat bergantung pada detail teknis desainnya: apakah tarif dibedakan per teknologi, apakah terdapat mekanisme *degression* (penurunan tarif otomatis seiring turunnya biaya), apakah kapasitas proyek dibatasi, dan bagaimana prosedur perizinan diintegrasikan. Tanpa desain yang cermat, FIT dapat memicu "ledakan" proyek di lokasi-lokasi yang secara sosial dan ekologis problematik, misalnya lahan pertanian produktif atau wilayah adat. Selain itu, jika mekanisme *grid connection* tidak diperjelas, proyek yang sudah mendapat kontrak tarif dapat tertahan karena jaringan listrik lokal belum siap menampung daya baru. Artinya, kepastian harga saja tidak cukup; ia harus dipadukan dengan kepastian teknis dan kelembagaan di seluruh rantai nilai.

Rasionalitas ekonomi FIT kerap disajikan seolah-olah netral: tarif dihitung berdasarkan *levelized cost of electricity* (LCOE), yaitu rata-rata biaya produksi listrik selama masa hidup proyek. Namun, pemilihan parameter dalam perhitungan LCOE—tingkat diskonto, asumsi faktor kapasitas, biaya modal—bukanlah keputusan teknis belaka. Ia mencerminkan preferensi nilai: seberapa besar kita menghargai masa depan dibanding masa kini, seberapa tinggi risiko yang dianggap "wajar" untuk ditanggung publik, dan seberapa besar keuntungan yang pantas bagi pengembang. Ketika parameter-parameter ini dinegosiasikan di ruang tertutup antara regulator, konsultan, dan perusahaan, publik sebenarnya sedang dikeluarkan dari diskusi tentang bagaimana uang mereka—melalui tarif atau pajak—digunakan untuk membiayai transisi energi.

Di banyak negara, FIT juga berperan sebagai alat untuk membentuk konfigurasi baru hubungan antara negara dan pasar. Dengan menawarkan tarif tetap, negara tidak hanya "menciptakan pasar" bagi teknologi tertentu, tetapi juga memilih jenis pelaku mana yang paling diuntungkan:

perusahaan listrik besar, pengembang independen, koperasi warga, atau rumah tangga pemilik panel atap. Bila desain FIT mensyaratkan kapasitas minimum yang besar dan prosedur birokratis yang rumit, maka hanya aktor bermodal besar yang bisa masuk. Sebaliknya, jika tarif dibagi menurut skala proyek dan prosedur dipermudah bagi proyek kecil, maka terbuka ruang bagi demokratisasi kepemilikan aset energi. Di sini FIT menjadi cermin preferensi politik: apakah transisi energi dilihat sebagai proyek korporasi besar atau sebagai kesempatan memperluas kepemilikan publik.

Dalam konteks *kebijakan energi* yang lintas negara, FIT memainkan peran penting dalam difusi ide dan praktik. Banyak negara mengadopsi atau memodifikasi model tarif dari yurisdiksi lain yang dianggap sukses, sering kali melalui rekomendasi lembaga internasional atau konsultan global. Namun, keberhasilan suatu desain di satu konteks tidak menjamin keberhasilan di konteks lain yang memiliki struktur pasar, institusi, dan kondisi sosial berbeda. Negara yang menyalin formula tarif tanpa mengadaptasi pada struktur biaya lokal, profil permintaan, dan kapasitas administratif berisiko menciptakan skema yang secara formal "sejalan dengan praktik terbaik internasional" tetapi secara substantif tidak cocok. Dengan demikian, FIT sebagai instrumen kebijakan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan ekosistem kelembagaan yang menyokongnya, bukan sebagai *template* universal yang tinggal diimpor.

Akhirnya, ketika kita menilai rasionalitas ekonomi dan regulasi FIT, kita perlu keluar dari imajinasi bahwa skema ini hanyalah soal "mendapatkan harga yang tepat". FIT adalah teknologi kekuasaan yang mengatur arus uang, risiko, dan legitimasi di dalam sistem energi. Ia memungkinkan negara untuk mengklaim ambisi iklim sekaligus mengalihkan sebagian risiko ke generasi sekarang, sementara manfaat penuh mungkin

baru sepenuhnya dinikmati di masa depan. Untuk menilai apakah FIT benar-benar melayani kepentingan publik, kita perlu bertanya: apakah desainnya transparan, apakah mekanisme partisipasi warga tersedia, apakah kelompok rentan terlindungi dari beban tarif, dan apakah ada strategi keluar ketika teknologi berubah dan kebutuhan sistem energi berkembang. Tanpa pertanyaan-pertanyaan ini, kita berisiko menerima rasionalitas ekonomi yang tampak rapi di atas kertas, tetapi justru menormalisasi distribusi risiko dan keuntungan yang timpang di dunia nyata.

8.2 Bagaimana FIT Menyusun Insentif: Produsen, Utilitas, dan Negara

Feed-in Tariff, yang sering disingkat *feed-in tariff* atau FIT, biasanya diperkenalkan kepada publik sebagai mekanisme teknis yang sangat sederhana: produsen listrik yang memasukkan energi ke jaringan akan dibayar dengan harga tertentu yang dijamin negara selama periode kontrak yang panjang. Namun, di balik rumus harga dan skema kontrak, FIT bekerja sebagai teknologi kuasa yang menyusun siapa yang dianggap layak menjadi produsen, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang menikmati arus pendapatan jangka panjang. Ketika negara menjanjikan harga yang stabil, ia sesungguhnya sedang mengatur horizon harapan investor, rumah tangga, dan utilitas. Dengan kata lain, FIT bukan hanya instrumen ekonomi untuk mendorong investasi, tetapi juga alat untuk menata ulang relasi antara negara, perusahaan listrik, dan warga dalam rezim ketenagalistrikan modern.

Secara teknis, FIT terdiri dari beberapa komponen kunci: tarif per kWh yang dijamin, durasi kontrak, jaminan *grid access* (hak untuk disambungkan ke jaringan listrik), serta formula penyesuaian yang kadang dikaitkan dengan inflasi atau penurunan biaya teknologi. Bagi pembaca awam, *grid access*

berarti hak untuk menyambungkan pembangkit listrik milik kita ke jaringan distribusi resmi sehingga listrik yang dihasilkan pasti diterima dan dibeli. Kombinasi komponen ini menyusun paket insentif yang sangat spesifik: produsen didorong untuk berinvestasi karena pendapatan relatif pasti, sementara utilitas dan negara mengendalikan kapasitas yang masuk lewat syarat teknis dan administratif. Di titik ini, FIT menggeser permainan dari arena politik terbuka—misalnya debat di parlemen—ke ranah kalkulasi teknokratik tentang harga, biaya modal, dan proyeksi permintaan.

Jika dilihat dari perspektif produsen kecil, seperti rumah tangga dengan panel surya atap atau koperasi desa, FIT sering dianggap sebagai "pendemokratisasi" produksi energi karena membuka pintu bagi aktor non-korporasi untuk ikut memasok listrik berbasis energi terbarukan. Namun, struktur tarif yang tampak netral itu tidak otomatis inklusif. Persyaratan kapasitas minimal, standar teknis, dan biaya awal pemasangan membuat hanya kelompok tertentu yang mampu masuk, misalnya kelas menengah di perkotaan yang punya akses kredit bank. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah atau komunitas di wilayah terpencil kerap menjadi konsumen pasif yang sekadar membayar beban tambahan di tagihan listrik tanpa mampu ikut menjadi produsen. Dengan demikian, desain FIT dapat memperluas atau justru mempersempit basis sosial dari transformasi energi yang dijanjikan.

Dimensi ruang dan wilayah sangat penting ketika kita menilai bagaimana FIT menyusun insentif dan distribusi manfaat. Tarif yang sama di atas kertas dapat menghasilkan efek yang sangat berbeda antara desa dan kota, atau antara wilayah pusat dan pinggiran. Seperti ditunjukkan oleh O'Sullivan, Golubchikov, dan Mehmood (2020), transisi energi yang diklaim rendah karbon sering kali tetap menghasilkan "periferisasi energi", di mana komunitas rural tersisih dari kontrol dan

manfaat utama, meskipun sumber daya energi berada di wilayah mereka. Dalam konteks FIT, hal ini tampak ketika proyek-proyek besar dipasang di daerah pedesaan, tetapi kepemilikan aset, pengambilan keputusan, dan arus keuntungan terkonsentrasi di perusahaan dan lembaga keuangan di pusat. Skema harga yang tampak netral itu, tanpa pengaturan kepemilikan dan partisipasi, dapat memperkuat hierarki lama alih-alih menantangnya.

Dari sudut pandang utilitas, FIT merupakan gangguan terhadap model bisnis tradisional yang bergantung pada investasi terpusat dalam pembangkit besar dan jalur transmisi panjang. FIT mengundang banyak produsen terdistribusi—rumah tangga, koperasi, investor kecil—untuk "menyetor" listrik ke jaringan. Bagi pembaca awam, ini berarti utilitas tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang memproduksi listrik, tetapi berubah menjadi semacam "dirigen" yang mengelola pasokan dari banyak sumber kecil. Namun, dalam banyak kasus utilitas masih memegang posisi dominan karena merekalah yang mengoperasikan jaringan dan sering kali diberi hak untuk meneruskan biaya FIT kepada konsumen melalui mekanisme *cost pass-through*, yaitu memindahkan biaya tambahan ke tarif pelanggan. Di sini tampak bagaimana insentif yang diberikan kepada produsen dibayarkan melalui kewajiban kolektif yang diatur oleh utilitas dan negara.

Bagi negara dan regulator, FIT berfungsi sebagai instrumen yang memadukan tujuan ekonomi, teknologi, dan politik dalam satu paket kebijakan energi. Pemerintah dapat menentukan teknologi mana yang diprioritaskan hanya dengan mengatur tingkat tarif dan durasi kontrak: tarif tinggi dan kontrak panjang menciptakan sinyal kuat bahwa suatu teknologi sedang "didorong", sedangkan pemotongan tarif atau penghentian skema menunjukkan perubahan arah. Di hadapan publik, langkah ini sering dipresentasikan sebagai penyesuaian

teknis terhadap penurunan biaya teknologi, padahal di baliknya terdapat pertarungan intens antar koalisi politik dan kepentingan bisnis. Dengan demikian, FIT menjadi sarana halus untuk mengarahkan investasi dan perilaku pasar tanpa selalu harus mengumumkan perubahan ideologis atau konflik kepentingan yang sesungguhnya.

Contoh dari Brasil menunjukkan bagaimana FIT tidak pernah berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari konfigurasi kebijakan yang kompleks dan penuh tarik-menarik. Negara tersebut menggabungkan berbagai instrumen, seperti lelang kapasitas, regulasi pembangkit terdistribusi, dan insentif fiskal, sambil terus menegosiasikan peran perusahaan swasta dan publik dalam sektor ketenagalistrikan. Werner dan Lazaro (2023) menunjukkan bahwa desain dan implementasi kebijakan untuk mendorong sumber terbarukan di Brasil sangat dipengaruhi oleh konfigurasi tata kelola sektoral, termasuk dominasi pembangkit tenaga air dan masuknya modal swasta internasional. Dalam konteks seperti ini, FIT bukan sekadar soal berapa harga per kWh, tetapi soal siapa yang diperbolehkan memperluas kapasitas, di wilayah mana, dan berdasarkan logika penguasaan ruang serta sumber daya yang sering kali tidak terlihat dalam narasi resmi transisi hijau.

FIT juga bekerja sebagai teknologi pengetahuan, karena ia menerjemahkan pilihan politik ke dalam parameter teknis yang tampak objektif. Ketika pemerintah menentukan kurva penurunan tarif tahunan—sering disebut *digression rate*, yaitu persentase penurunan harga setiap tahun—mereka secara implisit sedang menyatakan seberapa cepat biaya teknologi "seharusnya" turun dan seberapa besar keuntungan yang wajar bagi investor. Bagi pembaca awam, *digression rate* dapat dibayangkan sebagai tangga yang setiap tahun anak tangganya makin rendah, sehingga tarif bagi proyek baru akan turun secara bertahap. Keputusan tentang bentuk tangga ini sering

dinegosiasikan di balik pintu tertutup antara regulator, industri, dan kadang lembaga keuangan. Dengan begitu, FIT membantu memindahkan perdebatan politik tentang siapa yang berhak mendapat dukungan menjadi diskusi teknis di kalangan ahli, yang tidak selalu mudah diakses warga biasa.

Dalam kacamata perbandingan internasional, FIT menjadi salah satu contoh paling jelas dari *policy diffusion*, yaitu proses ketika suatu negara meniru, memodifikasi, atau menolak kebijakan yang berkembang di negara lain. Banyak pemerintah merancang skema FIT setelah melihat "keberhasilan" Jerman dalam mempercepat investasi energi terbarukan, tetapi konteks kelembagaan, struktur pasar, dan kapasitas administratif mereka sangat berbeda. Bagi pembaca awam, *policy diffusion* bisa dipahami sebagai efek ikut-ikutan: jika satu negara dianggap berhasil, negara lain terdorong menyalin resepnya, meskipun bahan dan dapurnya tidak sama. Akibatnya, FIT yang dipindahkan lintas negara sering kali menghasilkan hasil yang tak terduga: di satu tempat memperkuat koperasi energi lokal, di tempat lain justru membuka ruang bagi spekulasi finansial dan konsentrasi kepemilikan proyek skala besar.

Efek distributif FIT—siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung beban—tidak bisa dilepaskan dari cara negara merancang pembiayaan skema tersebut. Di banyak yurisdiksi, biaya pembayaran tarif yang tinggi ditutup melalui pungutan tambahan di tagihan listrik semua konsumen. Artinya, bahkan rumah tangga yang tidak memiliki kapasitas untuk memasang panel surya ikut membiayai "revolusi energi" yang manfaat utamanya dinikmati oleh pemilik aset. Ketika beban ini tidak diimbangi dengan program keadilan energi, seperti dukungan bagi keluarga berpenghasilan rendah atau komunitas yang dulu bergantung pada batubara, FIT dapat dianggap memproduksi ketidakadilan baru. Bagi pembaca awam, ini mirip dengan situasi di mana semua orang membayar iuran untuk

sebuah klub, tetapi hanya sebagian kecil anggota yang boleh menggunakan fasilitas terbaik.

Perubahan yang dibawa FIT juga menyentuh model bisnis dan tata kelola masa depan sektor energi, terutama ketika sistem beralih ke porsi besar *variable renewable energy* atau VRE, yakni pembangkit seperti surya dan angin yang output-nya naik turun mengikuti cuaca. Bryant, Straker, dan Wrigley (2020) menekankan bahwa kurangnya kejelasan tentang model bisnis dan tata kelola untuk mencapai target VRE dapat membuat masyarakat gagal memenuhi kewajiban mitigasi krisis iklim. Dalam konteks itu, FIT dapat dibaca sebagai salah satu upaya negara untuk "mencetak" jalur transisi dengan menciptakan sinyal harga yang kuat, sekaligus mengelola guncangan terhadap model bisnis utilitas tradisional. Namun, bila tidak disertai inovasi kelembagaan—misalnya dalam hal partisipasi warga, bentuk kepemilikan kolektif, dan perlindungan konsumen—FIT berisiko menjadi tambalan sementara yang rapuh.

Ketika ditempatkan di antara instrumen lain seperti pajak karbon, standar portofolio energi bersih, dan skema lelang kompetitif, FIT menyingkap wajah politik yang berbeda dari masing-masing rezim kebijakan energi. Pajak karbon secara eksplisit memungut biaya dari emisi, lelang menonjolkan kompetisi harga antar pengembang, sedangkan FIT menjanjikan stabilitas pendapatan bagi yang memenuhi syarat. Pilihan untuk memprioritaskan satu instrumen dibanding yang lain mencerminkan koalisi kekuasaan yang dominan: apakah pemerintah lebih dekat dengan utilitas besar, pengembang swasta, atau gerakan warga. Bagi pembaca awam, perbedaan ini mungkin tampak teknis, tetapi di baliknya terdapat perbedaan besar dalam cara risiko dan keuntungan dibagikan. FIT menjadi cermin yang memperlihatkan apakah negara ingin membuka ruang bagi produsen kecil atau justru menata ulang pasar agar tetap menguntungkan aktor besar dalam balutan kebijakan hijau.

Pada akhirnya, memahami FIT sebagai teknologi kuasa berarti melihat lebih jauh dari grafik kapasitas terpasang atau penurunan biaya listrik. FIT menyusun insentif pada tiga level sekaligus: ia membentuk kalkulasi produsen tentang investasi dan pengembalian modal, mengatur strategi utilitas dalam mengelola jaringan dan pelanggan, serta memperkuat atau menggeser cara negara mengendalikan arah transformasi energi. Dalam proses itu, FIT membantu menentukan siapa yang punya suara sah dalam mendefinisikan masa depan energi, jenis proyek apa yang dianggap pantas didukung, dan komunitas mana yang layak menerima kompensasi atau manfaat langsung. Dengan membaca FIT sebagai hasil pergulatan antara rasionalitas ekonomi, ambisi industrial, dan tuntutan keadilan sosial, kita dapat menilai secara lebih jernih apakah instrumen ini benar-benar memperluas demokrasi energi, atau sekadar memberi wajah baru pada pola kekuasaan lama yang telah lama mengakar.

8.3 Difusi FIT Lintas Negara: Peran *Epistemic Communities* dan Donor

Difusi *feed-in tariff* lintas negara sering dipresentasikan sebagai cerita teknis yang netral: negara A menetapkan tarif yang "cukup menarik", lalu negara B menyalin *design* tersebut dengan sedikit penyesuaian, seolah prosesnya hanya soal kalkulasi harga dan proyeksi investasi. Padahal, ketika kita mengikuti jejak kebijakan ini dari Eropa ke Asia, Afrika, hingga Amerika Latin, yang tampak adalah proses politik yang padat negosiasi, lobi, dan konstruksi makna. *Feed-in tariff* bukan sekadar formula harga listrik; ia adalah pernyataan tentang siapa yang layak diberi kepastian pendapatan, siapa yang menanggung risiko, dan sejauh mana negara bersedia mengatur kembali hubungan antara publik, utilitas, dan investor swasta. Difusi FIT karena itu harus dibaca bukan sebagai arus ide yang

"alami", melainkan sebagai pergerakan skema kekuasaan yang memperluas atau justru membatasi ruang keadilan dalam tata kelola energi.

Dalam literatur tentang *policy diffusion*, sering disebut istilah *lesson-drawing* dan *policy transfer* untuk menggambarkan proses ketika pembuat kebijakan mengamati pengalaman negara lain lalu mengadaptasinya. Namun pada kasus FIT, pola yang muncul jauh lebih asimetris daripada sekadar belajar bersama. Negara-negara industri di Eropa, lembaga keuangan internasional, dan konsultan global membentuk semacam *epistemic community*—jaringan pakar yang sepakat pada seperangkat asumsi tentang peran pasar dan harga dalam mempercepat investasi energi rendah karbon. Ketika negara berkembang mengadopsi FIT, mereka kerap menerima bukan hanya instrumen, melainkan juga logika yang menyertainya: bahwa risiko harus dijelaskan dalam bahasa keuangan, bahwa bankabilitas lebih mudah dinegosiasikan daripada hak energi warga, dan bahwa kepastian bagi investor lebih penting daripada fleksibilitas bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

Di banyak negara, adopsi FIT dipromosikan sebagai jalan tercepat memperluas kapasitas pembangkit berbasis **energi terbarukan**, terutama surya dan angin skala utilitas. Di bawah slogan percepatan transisi, pemerintah didorong untuk menyiapkan tarif berbasis biaya produksi plus margin wajar, masa kontrak panjang, serta jaminan *offtake* oleh utilitas. Di balik rancangan teknis itu, komunitas ahli—sering didukung program pembiayaan iklim dan lembaga riset di Utara—menyajikan rangkaian bukti komparatif, grafik penurunan biaya, dan studi kasus keberhasilan yang membingkai FIT sebagai "standar emas" kebijakan investasi energi bersih. Studi tentang inovasi hijau di bawah kerangka COP26 misalnya menunjukkan bagaimana kombinasi regulasi dan investasi bisa memicu gelombang proyek baru, sekaligus memperkuat otoritas

teknokratik yang mengontrol arsitektur insentif (Li et al., 2023).

Difusi FIT juga banyak digerakkan oleh logika *benchmarking*, yaitu kecenderungan membandingkan diri dengan "pemimpin" kebijakan. Negara yang ingin terlihat serius terhadap perubahan iklim akan menyebut diri mereka sebagai "adopter awal" atau "fast follower", dan FIT menjadi salah satu simbol komitmen tersebut. Di ranah diplomasi, keberadaan FIT memudahkan delegasi menyatakan bahwa negara mereka telah menyelaraskan kebijakan dengan praktik terbaik internasional. Namun, di tingkat domestik, keputusan mengadopsi FIT sering kali dibuat dalam ruang yang sempit: pertemuan tertutup antara kementerian teknis, regulator energi, dan perwakilan utilitas, dengan partisipasi masyarakat sipil yang terbatas. Di sini, difusi bukan sekadar proses belajar, tetapi juga proses penyingkiran suara yang mempertanyakan: tarif untuk siapa, dibayar oleh siapa, dan dengan konsekuensi apa bagi struktur tarif listrik nasional.

Peran donor dan lembaga keuangan multilateral dalam penyebaran FIT terlihat jelas dari arsitektur pendanaan yang mereka tawarkan. Skema pinjaman lunak, *blended finance*, dan jaminan risiko sering disyaratkan pada keberadaan kerangka tarif yang "kredibel dan stabil", yang dalam praktiknya berarti kewajiban menyiapkan FIT atau mekanisme serupa. Bahasa *bankability* menjadi mata uang utama: proyek yang tidak sesuai dengan struktur yang dikenal bank internasional dianggap terlalu berisiko, sekalipun mungkin lebih adil bagi konsumen kecil. Dalam negosiasi paket pendanaan, detail seperti siapa yang mendapatkan hak prioritas untuk mengakses skema, bagaimana risiko kurs ditanggung, atau bagaimana biaya ditransfer ke tarif listrik rumah tangga, sering dianggap urusan teknis, bukan persoalan politik yang menyentuh keadilan distributif.

Jaringan donor dan lembaga teknis ini bekerja bersama komunitas pakar untuk mendorong harmonisasi desain FIT sebagai bagian dari paket yang lebih luas dalam *kebijakan energi* nasional. Laporan kebijakan, lokakarya regional, dan *toolkit* desain tarif diproduksi untuk menunjukkan jalur "optimal" harmonisasi, sering kali dengan asumsi bahwa struktur pasar listrik mirip di berbagai negara. Sementara itu, diskusi mengenai kerentanan fiskal, kapasitas administratif, dan risiko penangkapan regulasi oleh oligarki energi cenderung ditempatkan di kaki halaman atau lampiran teknis. Analisis tentang arsitektur keuangan iklim memperlihatkan bahwa definisi dan standar pelaporan yang tidak seragam dapat menghasilkan ilusi skala dukungan, sekaligus membuka ruang abu-abu bagi pembiayaan teknologi yang tidak selaras dengan target transisi (Shishlov & Censkowsky, 2022).

Difusi FIT juga ditopang oleh produksi pengetahuan yang mensimplifikasi konteks nasional menjadi beberapa variabel: tingkat iradiasi matahari, biaya teknologi, dan profil permintaan. Dalam model-model seperti itu, politik listrik—misalnya dominasi batu bara dalam bauran energi, kekuatan serikat pekerja di sektor tambang, atau kepentingan pemilik pembangkit lama—menghilang dari layar. Proses legislasi dipersempit menjadi soal "adopsi kerangka tarif yang tepat", seolah parlemen, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak hanya titik kecil dalam bagan institusional. Padahal, di banyak negara, resistensi terhadap FIT justru datang dari kekhawatiran akan kenaikan tarif, ketimpangan akses, atau potensi konsentrasi kepemilikan pembangkit pada segelintir perusahaan besar yang lebih siap mengakses pembiayaan murah.

Ketika difusi FIT memasuki konteks negara berpendapatan rendah, ketimpangan kapasitas menjadi semakin nyata. Negara-negara yang baru membangun regulator

sektor listrik sering kali menghadapi kesenjangan analitis: sedikit staf, data historis yang terbatas, dan tekanan waktu untuk memenuhi komitmen internasional. Dalam situasi ini, konsultasi eksternal dan laporan donor mudah sekali diadopsi hampir tanpa modifikasi. *Epistemic community* global yang mengusung FIT tampil sebagai penyedia paket solusi: dari rancangan tarif hingga template peraturan. Ketiadaan proses deliberasi publik yang kuat membuat banyak dimensi keadilan—misalnya dampak pada rumah tangga miskin, pelaku usaha kecil, atau komunitas pedesaan—tidak menjadi bagian sentral perdebatan, tetapi diserahkan pada "mekanisme kompensasi" yang belum tentu sungguh-sungguh dioperasionalkan.

Dalam banyak narasi, FIT digambarkan sebagai katalis untuk memobilisasi investasi swasta skala besar di sektor **energi terbarukan**, sehingga beban fiskal negara dapat diminimalkan. Narasi ini memikat karena menawarkan janji "transisi tanpa pajak baru", cukup dengan mengatur aturan main yang menarik bagi investor. Namun, pertanyaannya jarang dibalik: seberapa jauh tarif dan durasi kontrak ditentukan oleh analisis kebutuhan energi domestik jangka panjang, dan seberapa jauh oleh ekspektasi pengembalian modal lembaga keuangan global? Ketika tarif dipatok tinggi untuk menarik investor, sementara mekanisme review berkala lemah, beban keuangan dapat terkunci selama puluhan tahun. Dalam kerangka ini, difusi FIT berpotensi menciptakan rezim rente baru yang legal dan dipayungi oleh bahasa transisi hijau.

Di balik arus global yang kuat menuju FIT, terdapat pula upaya-upaya lokal untuk menegosiasikan ulang arsitektur transfer teknologi dan pengetahuan. Beberapa studi terbaru menekankan pentingnya *localisation* dalam mekanisme transfer teknologi di bawah payung UNFCCC, menyoroti bahwa tanpa desain kelembagaan yang memungkinkan pembelajaran timbal

balik, negara penerima hanya akan menjadi konsumen paket teknologi dan kebijakan yang siap pakai (Owens & James, 2024). Dalam konteks FIT, ini berarti kebutuhan untuk membangun kapasitas analitis domestik, memperkuat lembaga riset dan regulator nasional, serta membuka ruang bagi komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam perumusan tarif dan skema prioritas proyek. Difusi yang lebih adil menuntut bukan hanya arus ide satu arah, tetapi juga kemampuan negara untuk menolak, memodifikasi, atau mengkombinasikan FIT dengan instrumen lain yang lebih sesuai dengan struktur sosial dan ekonomi mereka.

Peran *epistemic communities* dalam difusi FIT tidak hanya muncul di tingkat global, tetapi juga di kawasan. Di Asia Tenggara, misalnya, forum kebijakan energi regional dan jaringan lembaga riset mulai memproduksi laporan perbandingan yang menilai "kinerja" FIT di berbagai negara berdasarkan indikator seperti kapasitas terpasang, biaya rata-rata, dan daya saing teknologi. Indikator-indikator ini kemudian dipakai untuk menekan pemerintah agar merevisi tarif, mempercepat penurunan harga, atau memperpanjang kontrak untuk menarik lebih banyak investasi. Namun, jarang sekali indikator tersebut memasukkan variabel keadilan sosial, seperti penurunan kemiskinan energi, perluasan akses listrik di wilayah terpencil, atau redistribusi manfaat kepada komunitas terdampak. Di sini terlihat bagaimana difusi berbasis angka dapat menormalisasi *trade-off* yang tidak pernah disetujui secara eksplisit oleh warga.

Di tingkat negara, pemerintah menghadapi dilema antara mempertahankan kedaulatan atas desain instrumen dan memenuhi ekspektasi jaringan internasional yang mengawasi konsistensi *kebijakan energi* dengan komitmen iklim. Tekanan muncul tidak hanya dari lembaga finansial, tetapi juga dari pemeringkat kebijakan dan indeks global yang menilai seberapa

“ramah pasar” kerangka regulasi nasional. Dalam beberapa kasus, keengganan untuk menyesuaikan FIT dengan kondisi domestik—misalnya dengan memasukkan kuota khusus bagi koperasi lokal atau proyek komunitas—dijustifikasi atas nama menjaga kepastian bagi investor. Dengan demikian, difusi FIT dapat memperkuat posisi aktor transnasional atas proses legislatif nasional, terutama ketika pemerintah bergantung pada aliran pembiayaan eksternal untuk menutup kesenjangan investasi di sektor energi.

Jika difusi FIT ingin menjadi bagian dari transformasi yang lebih adil, maka narasi “replikasi praktik terbaik” perlu digantikan oleh pendekatan yang menekankan ko-produksi kebijakan dan pengakuan atas ketimpangan kekuasaan global. Penting untuk menggeser fokus dari sekadar seberapa cepat kapasitas terpasang meningkat menjadi bagaimana risiko dan manfaat didistribusikan antar kelas sosial, wilayah, dan generasi. Itu berarti membuka kembali perdebatan mengenai struktur tarif, jenis proyek yang diprioritaskan, dan siapa yang duduk di meja perundingan ketika skema baru dirancang. Difusi yang kritis akan memandang FIT bukan sebagai formula teknis yang tinggal disalin, melainkan sebagai arena penegosiasian ulang kontrak sosial di sekitar listrik—apakah ia diperlakukan sebagai hak dasar, jasa publik, atau komoditas yang tunduk sepenuhnya pada logika pasar global.

8.4 FIT dan Keadilan: Siapa yang Membayar, Siapa yang Menikmati

Feed-in tariff atau *FIT* sering dipuji sebagai instrumen kebijakan yang elegan untuk mempercepat investasi listrik rendah karbon: negara menjanjikan harga beli yang tetap dan menarik bagi produsen, sementara biaya tambahan dialihkan secara tersembunyi ke dalam tagihan konsumen. Namun, di balik desain yang tampak teknokratis itu, bersembunyi

pertanyaan filosofis tentang kekuasaan: siapa yang cukup kuat untuk mengunci kontrak jangka panjang, dan siapa yang tidak punya pilihan selain membayar? Ketika kita menempatkan *FIT* dalam kerangka "teknologi kuasa", kita melihat bahwa skema ini bukan sekadar alat ekonomi, melainkan mekanisme yang mendistribusikan hak, kewajiban, dan risiko. Bab ini karena itu menelisik *FIT* bukan hanya dari sisi efisiensi, tetapi dari sisi keadilan: bagaimana ia menentukan peta sosial atas siapa yang menikmati keuntungan transisi energi, dan siapa yang sekadar menanggung biayanya.

Secara teknis, *FIT* adalah aturan yang mewajibkan perusahaan listrik membeli listrik dari produsen tertentu dengan harga yang sudah ditetapkan, biasanya di atas harga pasar, untuk jangka waktu panjang, misalnya 15–20 tahun. Bagi investor, ini menjamin arus kas yang stabil; bagi bank, ini memberi kepastian untuk menyalurkan kredit; bagi negara, ini menjadi cara "mengundang" modal swasta tanpa harus menanggung seluruh risiko. Tetapi jika kita membacanya sebagai konfigurasi kuasa, *FIT* juga memindahkan pusat gravitasi pengambilan keputusan: dari konsumen rumah tangga yang tidak punya suara, ke pelaku yang mampu mengorganisasi proyek besar dan melobi regulator, sejalan dengan proses desentralisasi kelistrikan yang justru memunculkan "pertempuran pengaruh" baru (Brisbois, 2020). Di sini, tarif bukan angka netral; ia adalah kristalisasi kompromi politik antara negara, korporasi, dan warga.

Dimensi keadilan pertama tampak dari cara biaya *FIT* dibebankan. Di banyak negara, biaya selisih antara harga *FIT* dan harga pasar dibebankan sebagai pungutan khusus dalam tagihan semua pelanggan. Di atas kertas, ini tampak wajar: semua menikmati listrik, semua ikut membayar. Namun, pertanyaannya: apakah semua kelompok sosial memiliki peluang yang sama untuk menikmati *FIT*? Dalam praktik,

kelompok berpendapatan menengah ke atas lebih mampu memasang panel surya atap, mengakses kredit, dan menanggung biaya awal, sehingga merekalah yang paling diuntungkan dari skema ini, sementara rumah tangga miskin hanya menjadi pembayar tambahan. Di sini, *FIT* dapat mempercepat investasi energi terbarukan, tetapi sekaligus berpotensi memperdalam ketimpangan, karena struktur kepemilikan dan akses modal menentukan siapa yang dapat berpartisipasi sebagai produsen, bukan hanya sebagai konsumen.

Keadilan juga terkait dengan cara negara merancang parameter *FIT*: seberapa tinggi tarif, berapa lama kontrak, untuk jenis teknologi apa, dan dengan syarat sosial apa. Ketika tarif tinggi diberikan tanpa diferensiasi, misalnya untuk semua skala proyek, desain ini cenderung menguntungkan pengembang besar dengan kapasitas finansial dan teknis, sementara inisiatif komunitas yang kecil dan pelan justru kalah bersaing. Sebaliknya, jika tarif diturunkan secara drastis dan mendadak, proyek-proyek kecil yang sedang berproses bisa kolaps sebelum lahir. Di sini, bahasa teknis tentang "levelized cost", "internal rate of return", atau *bankability* sering menyembunyikan fakta bahwa regulator sebenarnya sedang membuat pilihan normatif: apakah skema *FIT* akan memprioritaskan stabilitas investor besar, atau membuka ruang bagi model kepemilikan komunitas dan kooperasi warga.

Dalam dimensi lintas negara, *FIT* juga bekerja sebagai pola difusi kebijakan yang mereproduksi ketimpangan global. Negara-negara di Eropa, yang pertama kali mengembangkan skema *FIT*, memiliki kapasitas fiskal, kelembagaan, dan teknis yang relatif tinggi, sehingga dapat menanggung masa percobaan dan penyesuaian kebijakan. Ketika negara-negara lain meniru desain yang sama tanpa konteks, mereka kerap mengimpor juga risiko ketidakadilan: beban biaya yang tidak proporsional,

dominasi perusahaan asing, dan pengabaian komunitas lokal. Pengalaman wilayah pedesaan yang tetap termarginalkan dalam transisi listrik rendah karbon menunjukkan bahwa desain instrumen yang "netral" justru dapat memperkuat posisi pusat dan melemahkan pinggiran, bahkan ketika retorikanya adalah pembangunan hijau dan keadilan (O'Sullivan dkk., 2020). Dengan demikian, keadilan *FIT* harus dilihat pada skala global, bukan hanya dalam neraca energi nasional.

Ketika kita mengamati *FIT* sebagai bagian dari arsitektur kebijakan energi, terlihat bagaimana skema ini sering diasosiasikan dengan modernitas, inovasi, dan peluang ekonomi baru. Namun, siapa yang cukup terdengar untuk mempengaruhi desain kebijakan energi ini? Perusahaan pengembang dan asosiasi industri biasanya memiliki waktu, data, dan jaringan untuk hadir dalam konsultasi; sebaliknya, komunitas yang terkena dampak, buruh energi, dan organisasi warga sering hanya diundang secara simbolik. Akibatnya, *FIT* bisa mendorong tata kelola yang makin elitis: subsidi disalurkan ke proyek-proyek besar, sementara rumah tangga penyewa, masyarakat adat, atau kelompok informal tidak diakui sebagai aktor. Pertanyaan keadilan yang penting di sini bukan hanya "berapa tarifnya", melainkan "siapa yang diakui sebagai subjek kebijakan", dan sejauh mana skema ini membuka atau justru menutup jalan menuju demokratisasi tata kelola energi.

Selain distribusi manfaat dan beban, *FIT* juga memunculkan persoalan keadilan prosedural: siapa yang dilibatkan, bagaimana informasi dibagikan, dan seberapa transparan proses penetapan tarif. Bahasa teknis tentang *feed-in premium*, eskalasi inflasi, atau penyesuaian berkala sering sulit dipahami oleh warga biasa, sehingga konsultasi publik berubah menjadi formalitas. Di sisi lain, pengembang dan konsultan dapat memanfaatkan kompleksitas ini untuk mendorong skenario yang menguntungkan posisi mereka.

Ketika proses pengambilan keputusan didominasi oleh pakar teknis dan ekonom, perspektif warga tentang ruang hidup, beban tagihan, atau perubahan lanskap sosial mudah dipinggirkan. Di sini, *FIT* beroperasi sebagai teknologi kuasa yang memutus akses terhadap pengetahuan, dan dengan demikian memutus kemampuan warga untuk menilai apakah kebijakan itu sungguh adil bagi mereka.

Dimensi waktu menambah lapisan baru pada persoalan keadilan *FIT*. Kontrak jangka panjang menciptakan kepastian bagi investor, tetapi juga mengikat generasi mendatang pada keputusan politik dan teknologi hari ini. Jika tarif ditetapkan terlalu tinggi, generasi berikutnya akan menanggung biaya lebih lama daripada keuntungan teknologis yang relevan, apalagi jika biaya teknologi turun drastis. Sebaliknya, ketika pemerintah secara tiba-tiba mengubah atau membatalkan kontrak *FIT* dengan alasan beban fiskal, kepercayaan investor hancur, dan biaya sosial tersebar dalam bentuk proyek mangkrak, tenaga kerja kehilangan pekerjaan, dan konflik hukum yang panjang. Dengan demikian, keadilan *FIT* tidak hanya soal siapa yang membayar sekarang, tetapi juga bagaimana hak dan kewajiban antargenerasi dinegosiasikan, serta sejauh mana pemerintah konsisten dan jujur terhadap komitmen yang pernah dibuat.

Di tengah dorongan kuat untuk mempercepat investasi energi terbarukan, *FIT* kerap dibandingkan dengan instrumen lain seperti lelang kompetitif, *renewable portfolio standards*, atau insentif pajak. Secara permukaan, pergantian instrumen ini sering dibahas dalam kerangka efisiensi biaya dan kestabilan fiskal. Namun, jika dilihat dari sudut keadilan, pergantian tersebut juga mereposisi siapa yang diuntungkan dan siapa yang berisiko tersisih. Lelang mungkin menurunkan biaya per kWh, tetapi cenderung menguntungkan pemain besar; *FIT* dapat membuka pintu bagi produsen kecil, tetapi berpotensi menimbulkan beban regresif bagi pelanggan. Dalam situasi

seperti ini, pertanyaan "instrumen mana yang paling murah" perlu digeser menjadi "instrumen mana yang paling adil dalam membagi manfaat transisi energi terbarukan dan beban sosial ekonomi yang menyertainya, termasuk bagi kelompok paling rentan".

Pengalaman negara-negara Selatan menunjukkan bahwa desain *FIT* yang tampaknya teknis justru menjadi arena kontestasi antara kepentingan modal, negara, dan komunitas lokal. Di Brasil, misalnya, kombinasi berbagai skema harga, pelelangan, dan dukungan pembiayaan telah mempengaruhi siapa yang mendominasi pembangkit berbasis angin dan surya, serta di mana proyek-proyek tersebut ditempatkan. Analisis terhadap evolusi regulasi menunjukkan bahwa desain kebijakan tidak hanya mengekspresikan target iklim, tetapi juga konfigurasi kekuasaan antara pelaku publik dan privat, serta ketegangan antara ekspansi kapasitas dan dampak sosial-lingkungan yang sering kali tidak merata (Werner & Lazaro, 2023). Dalam konteks ini, *FIT* berpotensi menjadi saluran untuk mengoreksi ketidakadilan historis, tetapi sama mudahnya dapat menjadi medium baru untuk melanggengkan pola eksploitasi dan marginalisasi.

Untuk menilai keadilan *FIT* secara lebih sistematis, kita dapat menggunakan lensa keadilan energi yang mencakup dimensi distribusional, prosedural, dan pengakuan. Distribusional menanyakan apakah beban dan manfaat *FIT* terbagi secara proporsional atau justru regresif; prosedural menekankan hak partisipasi bermakna dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan; sementara pengakuan menyoroti apakah pengalaman kelompok marjinal—seperti masyarakat adat, komunitas pedesaan, atau buruh sektor energi fosil—dianggap penting dalam proses ini. Jika *FIT* hanya dirancang untuk memenuhi target kapasitas terpasang dan menarik investasi, tanpa mempertimbangkan ketiga dimensi ini, maka ia

mungkin berhasil di atas kertas, tetapi gagal sebagai instrumen keadilan. Dengan kata lain, *FIT* yang efektif belum tentu *FIT* yang adil, dan tugas analisis filosofis adalah membuka jarak kritis antara dua klaim tersebut.

Dalam konteks negara berkembang, desain keadilan *FIT* perlu secara eksplisit dipertautkan dengan arsitektur kebijakan energi yang lebih luas. Misalnya, beban pungutan bisa diringankan bagi pelanggan kecil dan dialihkan lebih besar ke pengguna energi intensif; kredit lunak dan bantuan teknis dapat diberikan kepada koperasi warga atau usaha kecil yang ingin terlibat sebagai produsen; dan sebagian pendapatan dari pungutan *FIT* dapat dialokasikan kembali untuk program efisiensi energi dan perbaikan rumah bagi kelompok berpendapatan rendah. Di sisi lain, transparansi penuh mengenai struktur tarif dan pemanfaatan dana harus menjadi syarat minimum dalam kebijakan energi yang mengklaim berorientasi keberlanjutan. Tanpa langkah-langkah seperti ini, *FIT* berisiko memproduksi "transisi hijau" yang secara sosial tidak inklusif, di mana warna hijaunya hanya tampak di laporan resmi, bukan di keseharian warga yang tagihan listriknya terus meningkat.

Pada akhirnya, pembacaan atas *feed-in tariff* sebagai teknologi kuasa menempatkan pertanyaan "siapa yang membayar" dan "siapa yang menikmati" sebagai inti, bukan pelengkap, dari desain kebijakan. Di satu sisi, *FIT* dapat menjadi sarana redistribusi kuasa—membuka jalan bagi produsen kecil, memperkuat komunitas lokal, dan menghubungkan proyek energi dengan visi keadilan sosial. Di sisi lain, jika dirancang semata untuk menenangkan pasar dan memenuhi target angka, ia dapat mengubah transisi energi menjadi arena baru akumulasi dan eksklusi. Filsafat kekuasaan membantu kita melihat bahwa setiap detail teknis—dari rumus tarif hingga klausul kontrak—adalah hasil dari pergulatan kuasa dan nilai.

Karena itu, memperbincangkan *FIT* dan keadilan bukan sekadar perdebatan tarif "wajar" atau "terlalu mahal", melainkan upaya untuk memastikan bahwa transisi menuju sistem energi rendah karbon benar-benar memajukan martabat dan keberdayaan kolektif, bukan hanya neraca investasi.

8.5 Reformasi FIT: Penyesuaian Tarif, *Degression*, dan Stabilitas Kebijakan

Reformasi *feed-in tariff* adalah momen ketika negara menata ulang hubungan kekuasaan antara pemerintah, perusahaan listrik, investor, dan warga. Pada fase awal, skema FIT sering dirancang sangat dermawan untuk mendorong adopsi teknologi baru, dengan tarif tinggi dan jaminan kontrak jangka panjang. Namun, ketika kapasitas terpasang melonjak dan beban fiskal atau tarif listrik mulai dipersoalkan, pemerintah melakukan penyesuaian: tarif diturunkan, durasi kontrak dipangkas, dan kriteria kelayakan diperketat. Di balik bahasa teknis tentang "efisiensi biaya" dan "rasionalisasi anggaran", reformasi ini adalah cara negara mengkalibrasi siapa yang boleh menikmati rente teknologi, pada tingkat keuntungan berapa, dan untuk berapa lama. Dengan demikian, *feed-in tariff* tidak pernah netral; ia adalah perangkat yang memproduksi dan mendistribusikan hak istimewa ekonomi sekaligus menata ulang peta kekuasaan dalam sistem kelistrikan.

Penyesuaian tarif FIT biasanya dibenarkan melalui logika *cost-based regulation*, yaitu klaim bahwa tarif harus mencerminkan biaya investasi yang "wajar" ditambah margin keuntungan yang "masuk akal". Di atas kertas, itu terdengar teknokratis dan objektif; namun dalam praktik, siapa yang berhak mendefinisikan "wajar" dan "masuk akal" adalah pertanyaan politik. Model keuangan, asumsi harga teknologi, dan proyeksi permintaan yang digunakan regulator dijalankan oleh aktor tertentu dengan kepentingan tertentu. Brisbois

(2020) menunjukkan bagaimana desentralisasi listrik membuka medan baru perebutan pengaruh antara komunitas lokal dan aktor mapan, dan pola serupa tampak dalam perdebatan mengenai tingkat FIT: tarif yang terlalu murah menguntungkan utilitas besar, sedangkan tarif yang sedikit lebih tinggi dapat menciptakan ruang bagi koperasi energi warga dan produsen kecil untuk bertahan hidup di tengah tekanan pasar yang keras.

Salah satu instrumen penting dalam reformasi FIT adalah *degression*, yaitu mekanisme penurunan tarif secara bertahap dari tahun ke tahun, seiring turunnya biaya teknologi. Secara sederhana, *degression* berarti pemerintah mengumumkan bahwa, misalnya, proyek panel surya yang dikonstruksi tahun ini akan dibayar lebih mahal dibanding proyek yang dibangun dua atau tiga tahun mendatang. Mekanisme ini dirancang agar insentif tidak terus-menerus terlalu tinggi ketika biaya teknologi turun, dan agar anggaran publik atau tagihan listrik tidak membengkak. Namun, dalam konteks transisi menuju energi bersih, *degression* juga menjadi alat untuk mengendalikan tempo ekspansi energi terbarukan: penurunan tarif yang terlalu cepat bisa membuat proyek kecil dan menengah gagal secara finansial, sementara penurunan yang terlalu lambat dipersepsikan sebagai hadiah berlebih untuk investor besar dan pengembang proyek skala utilitas.

Dalam praktik, banyak negara mengalami pola *boom and bust* ketika mengubah tarif FIT. Ketika pengumuman penurunan tarif dilakukan mendadak atau terlalu drastis, pengembang berbondong-bondong mengebut proyek sebelum tenggat, memicu ledakan permohonan izin dan koneksi jaringan yang membuat otoritas teknis kewalahan. Setelah itu, pasar seketika mendingin karena proyek baru tidak lagi layak secara finansial. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya angka tarif, tetapi juga cara komunikasi, masa transisi, dan mekanisme penetapan keputusan. Jika reformasi dilakukan

tanpa konsultasi publik yang memadai, atau tanpa data yang transparan tentang biaya dan keuntungan, *degression* berubah dari instrumen penyesuaian rasional menjadi senjata kebijakan yang menciptakan ketidakpastian dan merusak kepercayaan antara negara dan pelaku pasar.

Di sisi lain, negara juga berkepentingan menjaga fleksibilitas. Mengunci tarif FIT yang terlalu tinggi dalam jangka panjang dapat menimbulkan beban finansial yang besar dan memicu resistensi politik dari konsumen atau kelompok usaha lain. Karena itu, reformasi FIT sering kali memperkenalkan klausul peninjauan berkala, pembatasan kapasitas maksimal, atau *corridor* volume yang memicu penyesuaian tarif otomatis jika instalasi melampaui target. Bagi investor, fleksibilitas ini berarti meningkatnya *regulatory risk*—risiko bahwa aturan akan berubah dan mengubah perhitungan keuntungan yang sebelumnya dihitung stabil. *Regulatory risk* di sini dapat dijelaskan secara sederhana sebagai ketidakpastian yang timbul bukan dari cuaca atau teknologi, tetapi dari keputusan pemerintah yang sewaktu-waktu dapat mengubah aturan main. Keseimbangan antara fleksibilitas negara dan kepastian hukum investor menjadi inti dari politik reformasi FIT.

Ketika perspektif diperluas ke ranah *kebijakan energi* secara keseluruhan, reformasi FIT tidak bisa dipahami sebatas persoalan teknis tarif listrik. Ia berhubungan dengan pertanyaan: siapa yang harus diprioritaskan dalam transisi? Apakah proyek skala besar di wilayah terpencil, atau instalasi kecil yang dimiliki rumah tangga dan koperasi lokal? O'Sullivan, Golubchikov, dan Mehmood (2020) menunjukkan bagaimana transisi rendah karbon sering kali berjalan timpang dan meminggirkan komunitas pedesaan yang kekurangan kekuasaan politik, meskipun wilayah mereka kaya sumber daya. Dalam kerangka ini, perubahan pada struktur FIT, termasuk penurunan tarif dan pembatasan kapasitas, bisa memperparah

ketimpangan jika lebih menguntungkan investor yang sudah kuat secara modal dan akses jaringan, sementara komunitas lokal hanya menjadi lokasi proyek tanpa memiliki kuasa menentukan arah pengembangan.

Reformasi FIT di banyak negara kemudian memperkenalkan fitur-fitur baru yang secara halus menggeser distribusi kuasa di antara aktor. Misalnya, beberapa yurisdiksi menerapkan *technology-specific tariffs* yang membedakan tarif antara surya atap dan surya ladang besar, antara angin darat dan angin lepas pantai, atau antara proyek komunitas dan proyek korporasi. Di permukaan, diferensiasi ini bertujuan mencerminkan profil biaya yang berbeda; namun, di balik itu, tarif khusus bagi proyek komunitas sebenarnya adalah intervensi politik untuk mengoreksi dominasi perusahaan besar. Di negara lain, mekanisme FIT digabung dengan skema *tender* kompetitif, di mana hanya proyek dengan penawaran tarif terendah yang menang. Peralihan dari FIT tetap ke tender kompetitif mengubah logika kekuasaan: dari "hak" bagi semua yang memenuhi syarat menjadi kompetisi yang menguntungkan pemain dengan biaya modal paling murah dan kemampuan lobi paling kuat.

Dalam konteks ini, reformasi FIT dapat dibaca sebagai proses *re-scaling* dan *re-configuration* kekuasaan: kewenangan penetapan tarif dapat ditarik ke otoritas pusat, diserahkan ke regulator independen, atau bahkan sebagian diserahkan ke pemerintah daerah. Setiap konfigurasi membawa konsekuensi berbedanya sendiri. Jika tarif ditentukan secara sentralistik tanpa ruang deliberasi publik, warga kehilangan kanal untuk mempengaruhi desain instrumen yang berdampak langsung pada lingkungan hidup dan ruang hidup mereka. Sebaliknya, jika pemerintah daerah diberi ruang terlalu besar tanpa dukungan kapasitas dan anggaran, keputusan tarif berisiko ditangkap oleh koalisi bisnis lokal. Artinya, teknis penetapan *feed-in tariff* tidak

bisa dipisahkan dari lembaga-lembaga yang memutuskan, prosedur partisipasi, dan mekanisme akuntabilitas yang menyertainya.

Rasionalitas yang mengatur reformasi FIT juga berhubungan erat dengan cara negara membayangkan jalur transisi teknologi dan waktu yang tersedia untuk bertindak. Ketika pemerintah mengandalkan model biaya dan skenario jangka panjang, mereka sering menggunakan bahasa *least-cost pathway* untuk meyakinkan publik bahwa penurunan tarif adalah langkah "ilmiah" dan "efisien" menuju sistem yang didominasi energi terbarukan. *Least-cost pathway* dapat dijelaskan sederhana sebagai jalur kebijakan yang dianggap paling murah secara keseluruhan jika dihitung selama beberapa dekade. Namun pilihan asumsi diskonto, harga bahan bakar fosil, dan nilai kerusakan lingkungan sesungguhnya adalah pilihan politis yang membentuk gambaran mana yang disebut murah dan mana yang mahal. Di sini filosofi kekuasaan bekerja dengan cara yang halus: melalui angka, grafik, dan indikator, negara memproduksi kebenaran yang membenarkan arah reformasi FIT tertentu.

Salah satu dimensi paling kontroversial dalam reformasi FIT adalah perubahan retroaktif, yaitu ketika pemerintah memodifikasi tarif atau ketentuan kontrak bagi proyek yang sudah berjalan. Praktik ini sering muncul ketika skema awal dianggap terlalu mahal atau tidak adil, dan tekanan politik memaksa pemerintah mengurangi beban subsidi. Bagi investor, perubahan retroaktif dianggap mengkhianati prinsip kepastian hukum; bagi sebagian warga, langkah itu dipandang sebagai koreksi terhadap skema yang sejak awal menguntungkan elite. Di sini, FIT tampak sebagai ajang tarik-menarik legitimasi: apakah negara berhak mengubah janji demi kepentingan keadilan fiskal yang lebih luas, ataukah janji pada investor harus dijaga dengan konsekuensi menanggung beban finansial lebih

besar? Benturan antara hukum kontrak, keadilan distributif, dan kecemasan anggaran menjadi lapisan etis dan politik dari reformasi FIT yang tidak bisa dihapus dengan narasi teknokratis.

Menjawab ketegangan tersebut, beberapa peneliti dan pembuat kebijakan mulai mengusulkan gagasan *just degression*, yaitu penurunan tarif yang dirancang dengan memperhatikan keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi. Dalam perspektif ini, kurva penurunan tarif tidak lagi ditentukan semata-mata oleh target biaya, tetapi juga oleh pertimbangan siapa yang terdampak dan bagaimana beban serta manfaat distribusinya. Werner dan Lazaro (2023), ketika mengkaji dinamika kebijakan di Brasil, menekankan pentingnya merancang kebijakan yang mengakui peran aktor privat sekaligus mengendalikan dampak sosial dan ekologis dari ekspansi proyek listrik yang disebut berkelanjutan. Ide serupa dapat diterapkan pada FIT: penurunan tarif seharusnya disertai dengan perlindungan khusus bagi proyek yang dimiliki komunitas miskin, mekanisme konsultasi publik, dan evaluasi berkala atas dampaknya terhadap ketimpangan sosial dan ekologis.

Di level internasional, reformasi FIT dan desain *kebijakan energi* lain menyebar melalui jaringan organisasi internasional, konsultan teknis, bank pembangunan, dan lembaga riset. Banyak negara adopsi model tarif dan *degression* yang diklaim sebagai "praktik terbaik" dari Eropa tanpa selalu menyesuaikannya dengan struktur pasar, kapasitas kelembagaan, dan relasi kekuasaan lokal. Proses difusi ini membuat desain FIT sering kali tampak seragam di atas kertas, tetapi menghasilkan konsekuensi yang sangat berbeda di lapangan. Negara dengan lembaga kuat dan regulasi yang transparan mungkin berhasil menggunakan FIT sebagai alat demokratisasi produksi listrik, sementara negara dengan tata kelola lemah justru menggunakannya sebagai sarana patronase

politik atau akumulasi kapital oleh segelintir perusahaan. Dengan demikian, memahami reformasi FIT menuntut pembacaan genealogis: menelusuri dari mana model diimpor, siapa yang mendorongnya, dan bagaimana ia dinegosiasikan di ruang kebijakan nasional.

Pada akhirnya, sub-bagian ini mengajak pembaca untuk melihat reformasi FIT—yakni penyesuaian tarif, penetapan *degression*, dan desain ulang mekanisme stabilitas kebijakan—sebagai bagian dari filsafat kekuasaan dalam transisi energi. Perdebatan angka tarif, durasi kontrak, dan parameter penyesuaian bukan sekadar urusan teknis di meja regulator, tetapi bagian dari pertarungan lebih luas tentang siapa yang akan memimpin dan siapa yang hanya mengikuti dalam transformasi menuju sistem energi yang rendah karbon. Di satu sisi, kita dapat membaca reformasi FIT sebagai upaya rasional negara mengurangi biaya dan menghindari gelembung subsidi; di sisi lain, kita juga harus waspada bahwa bahasa "efisiensi" bisa menyembunyikan proses konsentrasi kekuasan baru di tangan aktor yang sudah kuat. Bab ini, karenanya, menempatkan FIT bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai teknologi kuasa yang membentuk horizon kemungkinan bagi transisi energi yang lebih adil atau justru lebih eksklusif.

9 Kuota/RPS & Standar Portofolio: Siapa yang Menanggung Beban Kepatuhan; Adaptasi Pasar–Listrik

9.1 Desain kuota/RPS dan Logika "Wajib Beli" Energi Terbarukan

Desain kuota dan *renewable portfolio standard* adalah pintu masuk yang jelas untuk melihat bagaimana kebijakan energi berkelanjutan bekerja sebagai teknologi kuasa. Di permukaan, instrumen ini tampak teknis: pemerintah hanya menetapkan angka persen energi dari sumber tertentu yang wajib dipenuhi oleh perusahaan listrik atau pelaku pasar. Namun, begitu kita telusuri detailnya, kuota itu adalah cara negara mendefinisikan siapa yang harus berubah, seberapa cepat, dan dengan ongkos apa. Ketentuan mengenai siapa yang menjadi pihak wajib patuh, skema sanksi ketika target tidak tercapai, serta bagaimana angka-angka itu dievaluasi, membentuk anatomi baru relasi antara negara, korporasi, dan warga. Kuota/RPS tidak netral; ia menyusun medan permainan, menentukan siapa yang mendapat jaminan pasar, siapa yang menanggung risiko harga dan ketidakpastian teknologi, dan siapa yang "dipaksa" beradaptasi dengan logika transisi energi yang dirumuskan dari pusat. Dengan sudut pandang ini, setiap angka persentase bukan sekadar parameter teknis, tetapi ekspresi konkret tentang siapa yang dianggap prioritas dan siapa yang dapat dikorbankan demi tujuan keberlanjutan.

Pada level kebijakan, kuota/RPS beroperasi sebagai *rule-based instrument*, yakni instrumen berbasis aturan yang tidak hanya mengisyaratkan arah transisi, tetapi juga mengatur koreografi aktor di dalam sistem kelistrikan. Pemerintah

menentukan target, tetapi desain rinci—apakah kuota dibagi per jenis sumber, apakah ada *carve-out* khusus untuk produsen kecil, atau bagaimana mekanisme sertifikat hijau—menentukan siapa yang mendapatkan akses istimewa ke pasar. Dalam kasus Brasil, misalnya, desain kelembagaan sektor listrik yang mendorong perluasan sumber terbarukan justru sekaligus memperkuat pengaruh aktor swasta besar yang paling siap memanfaatkan insentif regulasi (Werner dan Lazaro, 2023). Di titik ini, kuota/RPS tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga mengonstruksi konfigurasi baru tata kelola, di mana kepatuhan berubah menjadi arena tawar-menawar antara otoritas publik, investor global, dan perusahaan nasional. Dengan kata lain, rancangan detail instrumen menentukan apakah ruang bagi pelaku baru akan benar-benar terbuka atau hanya dihiasi retorika inklusivitas semata.

Pertanyaan kunci dalam desain kuota/RPS adalah: siapa yang benar-benar menanggung beban kepatuhan ketika angka persentase dinaikkan dari tahun ke tahun? Secara formal, kewajiban itu ditempatkan pada perusahaan listrik, *load-serving entities*, atau pelaku besar di pasar grosir. Namun, dalam praktik, biaya untuk membeli sertifikat, menandatangani kontrak *power purchase agreement* jangka panjang, atau menyesuaikan portofolio pembangkit hampir selalu diteruskan ke tarif yang dibayar konsumen akhir. Di sisi lain, pengembang proyek yang memasok energi dari sumber yang dikategorikan sebagai energi terbarukan mendapatkan jaminan permintaan melalui skema "wajib beli". Di sini tampak paradoks: instrumen yang dipromosikan sebagai cara mempercepat transisi dapat berujung pada regresivitas sosial jika rumah tangga kecil menanggung tarif lebih mahal, sementara aktor besar menikmati arus kas yang relatif aman dari komponen kewajiban kuota. Pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya memikul konsekuensi finansial ini menjadi inti analisis keadilan dalam rancangan kuota/RPS.

Konsep *renewable portfolio standard* sering diterjemahkan secara sederhana sebagai kewajiban bahwa sejumlah persen produksi listrik harus berasal dari sumber yang lebih bersih. Bagi pembaca awam, ini dapat dibayangkan seperti aturan bahwa setiap "keranjang" listrik yang dijual ke konsumen harus berisi porsi minimum dari pembangkit yang tidak berbasis fosil. Namun, di balik gambaran sederhana itu, terdapat pertanyaan filosofis tentang apa yang dianggap sebagai "kepatuhan yang sah". Apakah perusahaan yang membeli sertifikat dari proyek jauh di wilayah lain dianggap sudah berkontribusi secara adil, meskipun beban lingkungan dan ruang ditempatkan di komunitas yang tidak menikmati manfaat langsung? Apakah industri energi intensif diberi kelonggaran khusus, sehingga beban disalurkan ke sektor rumah tangga dan usaha kecil? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini menentukan arah keadilan dalam desain kuota/RPS, karena ia mengatur secara halus siapa yang boleh tetap nyaman dan siapa yang harus mengubah cara hidupnya.

Kuota/RPS juga berinteraksi dengan proses desentralisasi sistem listrik dan munculnya komunitas energi. Ketika regulasi mengizinkan produsen skala kecil menjual listrik ke jaringan melalui skema *net metering* atau tarif khusus, sertifikat dari proyek komunitas dapat menjadi salah satu cara memenuhi kewajiban kuota. Namun, sering kali posisi tawar komunitas lemah dibanding perusahaan besar, baik dalam mengakses pembiayaan maupun menegosiasikan kontrak. Penelitian tentang pergeseran kekuasaan dalam konteks desentralisasi listrik menunjukkan bahwa aktor komunitas dapat membuka celah baru untuk mempengaruhi kebijakan, tetapi kebanyakan masih berhadapan dengan tekanan kuat agar bentuk kepemilikan tetap terpusat di tangan pemilik infrastruktur utama (Brisbois, 2020). Ini mengingatkan kita bahwa desain teknis kuota/RPS dan pasar sertifikat bisa saja memakai bahasa

"partisipasi", tetapi tetap memelihara konfigurasi kekuasaan yang hierarkis dan eksklusif. Tanpa intervensi afirmatif, komunitas lokal mudah terjebak sebagai pemasok data dan lahan, bukan sebagai pemegang kendali keputusan.

Logika "wajib beli" dalam skema kuota/RPS biasanya dioperasionalkan melalui kontrak *must-take*, yakni perjanjian bahwa operator sistem harus menerima dan membayar listrik dari proyek tertentu selama jangka waktu kontrak. Bagi pembaca awam, ini berarti bahwa ketika pembangkit yang dilindungi kontrak beroperasi, jaringan wajib memberi ruang dan membayar produksinya, bahkan jika pada saat tertentu sistem sudah kelebihan pasokan. Secara politis, mekanisme ini memindahkan risiko pasar dari pengembang kepada operator jaringan dan, pada akhirnya, kepada konsumen yang membayar tarif. Ketika kebijakan energi dirancang dengan menumpuk kontrak *must-take* tanpa strategi yang jelas untuk fleksibilitas sistem, operator akan lebih sering melakukan pemotongan beban atau menghentikan pembangkit lain yang tidak terlindungi, sehingga menimbulkan ketegangan baru antara keadilan iklim dan keadilan tarif. Di sini, isu keadilan muncul bukan pada slogan, tetapi pada jadwal operasi pembangkit yang menentukan siapa yang harus berhenti terlebih dahulu.

Dimensi lain dari desain kuota/RPS adalah siapa yang diizinkan memperdagangkan sertifikat kepatuhan dan dalam batasan apa. Skema *tradable renewable certificates* sering digambarkan sebagai cara "efisien" untuk menemukan kombinasi paling murah di antara berbagai proyek, karena pihak yang mampu memproduksi unit energi bersih dengan biaya rendah dapat menjual sertifikat kepada pihak lain. Namun, dalam praktik, pasar ini mudah dikuasai oleh pelaku yang memiliki kapasitas finansial dan informasi terbaik. Bagi pembaca awam, ini seperti pasar izin yang hanya benar-benar bisa dimasuki oleh pemain besar yang sanggup membayar

konsultan, pialang, dan biaya transaksi lainnya. Akibatnya, kuota/RPS yang disusun untuk membuka ruang inovasi justru berisiko memperdalam konsentrasi kepemilikan dan mengurangi keragaman bentuk organisasi, misalnya koperasi atau inisiatif warga, yang tidak sanggup mengikuti kompleksitas permainan sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural tidak otomatis lahir hanya karena ada pasar yang tampak terbuka.

Ketika kuota/RPS digabungkan dengan keharusan "wajib beli" untuk proyek tertentu, pun terbuka pertanyaan tentang bagaimana arus uang dan risiko didistribusikan sepanjang rantai nilai listrik. Pengembang yang mendapatkan kontrak jangka panjang dengan harga terjamin akan menikmati stabilitas pendapatan yang tinggi, sementara operator sistem menanggung biaya penyeimbangan jaringan dan potensi kebutuhan investasi tambahan pada infrastruktur transmisi. Biaya-biaya ini pada gilirannya dibebankan ke pelanggan melalui struktur tarif yang sulit dibaca publik. Bagi warga, mereka hanya merasakan bahwa tagihan listrik naik, tanpa penjelasan rinci bahwa sebagian dari komponen itu digunakan untuk menutup struktur jaminan pendapatan kepada segelintir proyek. Dalam kerangka filsafat kekuasaan, desain kuota/RPS seperti ini secara halus mengalihkan keputusan distributif dari arena politik terbuka ke ranah teknokratis yang dipresentasikan sebagai persoalan teknis. Dengan demikian, keberlanjutan finansial investor sering kali lebih terlindungi daripada keberlanjutan sosial rumah tangga berpendapatan rendah.

Dalam perspektif keadilan spasial, kita juga perlu melihat di mana proyek-proyek yang mengakses pasar melalui kuota/RPS dan skema "wajib beli" ini ditempatkan. Sering kali pembangkit besar didirikan di wilayah pedesaan atau daerah dengan posisi tawar politik rendah, sementara konsumsi utama terjadi di pusat-pusat kota dan industri. Di atas kertas, transisi

menuju energi terbarukan terlihat sebagai langkah moral yang mustahil ditolak, tetapi di lapangan komunitas lokal menanggung perubahan lanskap, risiko lingkungan, dan pergolakan sosial yang tidak proporsional dengan manfaat yang mereka terima. Jika instrumen kuota/RPS tidak disertai mekanisme yang memastikan bagian adil dari pendapatan, kesempatan kerja, dan penguatan kapasitas lokal, maka "wajib beli" hanya menjadi tiket masuk bagi modal besar untuk mengekstraksi nilai baru dari ruang-ruang yang selama ini berada di pinggiran sistem energi nasional. Perspektif ini mengingatkan bahwa lokasi proyek bukan sekadar detail teknis, melainkan pertanyaan etika politik yang mendasar.

Dalam konteks Indonesia, diskusi tentang kuota/RPS dan "wajib beli" tidak dapat dilepaskan dari kerentanan sistem listrik terhadap risiko iklim dan kebutuhan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur. Berbagai kajian terbaru menunjukkan bahwa strategi transisi bukan hanya soal menambah kapasitas pembangkit baru, tetapi juga merancang ulang kerangka regulasi agar mendorong investasi yang tahan terhadap guncangan iklim dan ekonomi. Analisis tentang kebijakan energi Indonesia menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan iklim, perluasan sumber bersih, dan penguatan mekanisme tata kelola untuk memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan konsisten (Setiawan dkk., 2025). Jika kuota/RPS dan skema "wajib beli" diterapkan tanpa memperhitungkan dimensi ketahanan tersebut, maka negara berisiko mengunci diri pada kontrak jangka panjang yang justru memperlemah fleksibilitas sistem ketika pola beban dan risiko bencana berubah sehari-hari. Dengan menempatkan ketahanan sebagai lensa utama, pelaku kebijakan dapat mengevaluasi apakah instrumen yang ada benar-benar mendukung adaptasi jangka panjang, bukan sekadar memenuhi target angka jangka pendek.

Dari sudut pandang filsafat kebijakan, kuota/RPS dapat dibaca sebagai teknik untuk "mendisiplinkan masa depan" melalui angka-angka yang tampak objektif. Ketika pemerintah menetapkan lintasan kenaikan kewajiban dari tahun ke tahun, mereka sesungguhnya sedang memaksa pelaku pasar menginternalisasi visi tertentu tentang bentuk sistem energi pada satu titik waktu di depan. Angka-angka target ini lalu diterjemahkan oleh birokrasi ke dalam formula perhitungan sertifikat, evaluasi kepatuhan, dan sanksi. Bagi pembaca awam, ini seperti ketika seseorang membuat jadwal tabungan ketat yang mengunci pilihan belanja di masa depan; kebebasan formal masih ada, tetapi dibatasi oleh konsekuensi finansial yang sudah diprogram. Di ruang energi, disiplin lewat angka ini sering dipresentasikan sebagai "netral", padahal di baliknya ada perdebatan apakah prioritas utama adalah menahan kenaikan tarif, menjaga keuntungan badan usaha milik negara, atau meminimalkan emisi secepat mungkin. Kuota/RPS, dengan demikian, mengikat imajinasi kebijakan pada jalur tertentu dan menutup kemungkinan lain yang mungkin lebih adil.

Proses penyusunan kuota/RPS dan logika "wajib beli" sendiri adalah arena penting tempat berbagai aktor berjuang menginskripsikan kepentingan mereka ke dalam teks regulasi. Di satu sisi, kementerian teknis dan regulator mengedepankan bahasa model optimasi dan studi kelayakan untuk membenarkan pilihan desain tertentu. Di sisi lain, asosiasi bisnis, lembaga keuangan, dan kelompok masyarakat sipil berupaya mendorong formulasi yang dianggap paling menguntungkan bagi basis kepentingan masing-masing. Di sini, kebijakan energi tidak lagi tampak sebagai rangkaian keputusan rasional, melainkan sebagai hasil negosiasi kekuasaan yang terstruktur dalam bahasa teknis, mulai dari pemilihan parameter skenario hingga rumus penentuan tarif. Bagi publik, bahasa yang sangat teknis ini membuat ruang deliberasi

mengecil, karena hanya sedikit pihak yang mampu menerjemahkan implikasi setiap opsi desain terhadap tarif, kualitas layanan, dan peluang partisipasi warga dalam sistem energi. Di sinilah, pembacaan kritis atas dokumen kebijakan dan proses pembuatannya menjadi bagian dari upaya memperluas ruang demokrasi substantif dalam sektor strategis ini.

Dengan demikian, desain kuota/RPS dan logika "wajib beli" tidak boleh dibaca semata sebagai alat administratif untuk mengejar target emisi atau bauran energi, melainkan sebagai teknologi kuasa yang menentukan bagaimana manfaat dan beban transisi didistribusikan. Pertanyaan tentang siapa yang menjadi pihak wajib patuh, bagaimana aturan perdagangan sertifikat disusun, dan sejauh mana risiko pasar dialihkan melalui kontrak *must-take* adalah pertanyaan normatif tentang keadilan dan demokrasi dalam tata kelola energi. Bagi pembaca awam, cara paling sederhana memahami hal ini adalah dengan menanyakan: siapa yang diuntungkan paling besar ketika target dinaikkan, dan siapa yang tagihan bulanannya ikut naik tanpa suara yang sebanding dalam perumusan kebijakan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah kuota/RPS dan "wajib beli" menjadi instrumen emansipasi atau justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Di sinilah filsafat kekuasaan membantu membongkar ilusi netralitas instrumen yang sering diselubungi istilah teknis dan angka-angka yang tampak objektif.

9.2 Beban Kepatuhan: Utilitas, Konsumen, dan Anggaran Publik

Dalam rezim kuota atau *Renewable Portfolio Standard* (RPS), beban kepatuhan sering kali dibayangkan sebagai sesuatu yang netral dan teknis: negara menetapkan target persentase listrik bersih, utilitas menyesuaikan portofolio, pasar merespons, dan transisi pun mengalir mulus. Namun di balik

narasi teknokratis itu, selalu ada pertanyaan mendasar: siapa yang benar-benar membayar biaya tambahan untuk memenuhi kewajiban tersebut, dan siapa yang menikmati manfaatnya? Di satu sisi, utilitas listrik diwajibkan membeli porsi tertentu dari produsen yang memenuhi syarat, atau membeli sertifikat energi bersih agar portofolionya sesuai regulasi. Di sisi lain, beban finansial untuk menutup perbedaan biaya antara sumber konvensional dan sumber yang lebih bersih jarang berhenti di neraca utilitas; ia hampir selalu bergerak ke arah rumah tangga, pelaku usaha, dan anggaran publik. Di titik ini, desain instrumen ekonomi bertemu secara langsung dengan problem etika distribusi dan keadilan sosial.

Beban kepatuhan bisa dipahami sebagai konfigurasi relasi antara tiga aktor utama: utilitas sebagai pelaksana teknis, konsumen sebagai pembayar tarif, dan negara sebagai pengelola anggaran publik sekaligus penjamin kepentingan umum. Cara regulasi mengatur hubungan tiga aktor ini menentukan apakah biaya transisi akan bersifat regresif (lebih berat bagi kelompok miskin) atau progresif (lebih banyak ditanggung oleh aktor yang lebih mampu). Melalui skema tarif, pajak khusus, subsidi, dan mekanisme kompensasi, regulator bisa mengatur sejauh mana utilitas boleh melakukan *pass-through* biaya ke pelanggan, sejauh mana fiskus membantu menutup selisih harga, dan sejauh mana produsen diwajibkan menyerap sebagian risiko. Dengan demikian, beban kepatuhan bukan sekadar konsekuensi otomatis dari target kuota, tetapi hasil dari pilihan politik yang dikemas sebagai kalkulasi ekonomi.

Dari perspektif utilitas, kewajiban membeli porsi tertentu listrik berbasis energi terbarukan memaksa perubahan strategi investasi dan manajemen risiko. Mereka perlu memutuskan apakah akan membangun sendiri pembangkit baru, menandatangani kontrak jangka panjang dengan produsen independen, atau sekadar membeli sertifikat kepatuhan di

pasar. Setiap pilihan membawa struktur biaya, risiko harga, dan implikasi tarif yang berbeda. Di banyak yurisdiksi, regulasi memberi ruang bagi utilitas untuk menyalurkan biaya tambahan ini ke pelanggan melalui mekanisme *fuel adjustment* atau pungutan khusus pada tagihan. Jika pengawasan regulatori lemah, utilitas dapat terdorong memilih opsi yang paling aman bagi neraca keuangannya, tetapi belum tentu paling adil bagi kelompok rentan. Akhirnya, desain kuota dan struktur tarif dapat memperkuat dominasi utilitas besar, alih-alih membuka ruang bagi model energi komunitas yang lebih demokratis.

Bagi konsumen, beban kepatuhan terasa paling nyata melalui kenaikan tarif listrik, penambahan komponen pungutan khusus, atau perubahan struktur blok tarif yang membedakan kaki tangga konsumsi. Di sinilah rancangan kebijakan energi menjadi arena krusial untuk menentukan apakah transisi akan memperdalam atau justru mengurangi ketimpangan. Rumah tangga berpendapatan rendah biasanya memiliki ruang manuver yang sempit untuk mengurangi konsumsi listrik tanpa mengorbankan kebutuhan dasar, sementara rumah tangga kaya lebih mudah berinvestasi pada perangkat efisiensi atau sistem surya atap. Jika biaya kepatuhan disalurkan secara rata per kilowatt-jam tanpa perlindungan, maka persentase pengeluaran energi terhadap pendapatan akan meningkat jauh lebih besar bagi kelompok miskin. Kebijakan seperti tarif sosial, blok tarif pertama yang sangat murah, atau program efisiensi yang ditargetkan kepada kelompok rentan dapat mengurangi ketidakadilan ini, tetapi sering kali justru dipangkas dengan alasan efisiensi fiskal.

Di tingkat anggaran publik, pemerintah kerap memilih untuk menanggung sebagian beban kepatuhan demi menjaga tarif tetap "terjangkau" dan mengurangi resistensi politik terhadap ekspansi energi terbarukan. Subsidi investasi, jaminan harga, atau keringanan pajak bagi proyek energi bersih dapat

mengurangi tekanan biaya di sisi utilitas dan konsumen, tetapi menambah tekanan pada fiskus. Di negara-negara dengan ruang fiskal sempit dan kebutuhan sosial yang besar, setiap rupiah yang dialokasikan untuk mendukung portofolio bersih berarti rupiah yang tidak digunakan untuk kesehatan, pendidikan, atau perlindungan sosial. Dengan kata lain, beban kepatuhan bergeser dari tagihan listrik ke anggaran negara; pergeseran ini mungkin meredam gejolak jangka pendek, tetapi tetap memunculkan pertanyaan etis tentang prioritas anggaran dan siapa yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan lain demi menjaga stabilitas politik transisi.

Pengalaman beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa narasi tentang "tanggung jawab bersama" dalam pembiayaan transisi sering kali menyembunyikan ketegangan antara aktor pusat dan masyarakat. Studi tentang sektor ketenagalistrikan di Sri Lanka, misalnya, menggambarkan bagaimana narasi inovasi bertanggung jawab, efisiensi, dan investasi masa depan digunakan untuk membenarkan pilihan desain yang membatasi ruang partisipasi publik serta mengunci konfigurasi tertentu antara utilitas dan pemerintah (Nagarajah, 2021). Dalam konteks seperti itu, kebijakan energi tidak hanya menentukan siapa yang membayar, tetapi juga siapa yang bahkan berhak mengetahui dan mempersoalkan struktur biaya di balik tagihan. Beban kepatuhan menjadi produk dari narasi resmi mengenai "keterbatasan fiskal" dan "kebutuhan menjaga iklim investasi", sehingga warga terutama diminta memahami, bukan merundingkan, konsekuensinya.

Jika kita menilik lebih dalam, mekanisme pengalihan biaya dari utilitas ke pelanggan tidak pernah netral terhadap struktur kelas dan ruang. Di banyak kota, pelanggan rumah tangga berpendapatan rendah tinggal di kawasan dengan kualitas bangunan buruk dan perangkat listrik yang boros, sehingga mereka jauh lebih sulit menurunkan konsumsi ketika tarif naik

akibat program energi terbarukan. Sebaliknya, rumah tangga kaya kerap menikmati insentif tambahan untuk memasang panel surya atau membeli peralatan hemat energi dengan skema kredit lunak. Artinya, kelompok kaya dapat "keluar" dari beban kolektif dengan memanfaatkan insentif, sedangkan kelompok miskin tetap terperangkap dalam kombinasi tarif tinggi dan infrastruktur yang tidak efisien. Tanpa koreksi yang sengaja dirancang, skema kuota atau RPS berisiko memperdalam ketidakadilan energi dan mengikis legitimasi politik dari proyek transisi itu sendiri.

Beban kepatuhan juga dialami secara berbeda oleh pelaku industri dan usaha kecil, yang seringkali menjadi jembatan antara desain kebijakan energi di atas kertas dan realitas harga di pasar. Di banyak negara, pemerintah cenderung melindungi industri padat energi dengan tarif khusus atau keringanan retribusi, agar daya saing ekspor tidak terganggu. Praktik ini menggeser kembali beban ke rumah tangga dan usaha kecil yang tidak memiliki posisi tawar serupa. Dalam kasus transisi keluar dari nuklir di Taiwan, misalnya, keterbatasan partisipasi publik dan transparansi dalam perencanaan sistem energi menimbulkan kombinasi baru antara komitmen lingkungan dan ketidakadilan prosedural, sehingga sebagian kelompok merasa menanggung risiko tanpa akses setara pada pengambilan keputusan (Huang & Chen, 2023). Pola serupa bisa muncul dalam konteks kuota dan RPS, ketika kelompok yang paling terdampak tidak diikutsertakan dalam perancangan skema kompensasi.

Di dalam ruang regulasi, cara otoritas menetapkan formula tarif dan mekanisme *cost recovery* menentukan seberapa besar tanggung jawab finansial yang tetap berada pada utilitas dan pemegang sahamnya. Dalam skema tertentu, utilitas dapat memasukkan hampir seluruh biaya pemenuhan kuota energi terbarukan ke *rate base*, yaitu basis aset yang dijamin

pengembaliannya melalui tarif. Ini memberi sinyal kepastian kepada investor, tetapi sekaligus mengaburkan pembedaan antara investasi yang bijaksana dan spekulatif, karena hampir semua keputusan akan "diselamatkan" oleh pelanggan. Sebaliknya, jika regulator menahan sebagian biaya di neraca utilitas dan mensyaratkan pembagian risiko dengan pemegang saham, tekanan untuk merancang portofolio yang efisien akan lebih besar. Pilihan ini pada dasarnya merupakan pilihan politik tentang siapa yang dianggap layak menanggung risiko transisi: pemodal, manajemen utilitas, atau warga sebagai pembayar tagihan.

Di negara-negara yang sangat bergantung pada pembiayaan iklim dan bantuan pembangunan, lembaga donor dan bank pembangunan multilateral ikut mempengaruhi bagaimana beban kepatuhan dibagi. Mereka mendorong adopsi kuota atau RPS dengan paket pembiayaan, penjaminan pinjaman, dan saran reformasi tarif yang sering dikemas sebagai "best practice". Namun, syarat seperti penghapusan subsidi umum dan pengenalan tarif berbasis biaya penuh dapat menggeser beban ke konsumen tanpa menawarkan jaring pengaman sosial yang memadai. Di sini, kebijakan energi berubah menjadi instrumen konsolidasi fiskal, bukan semata alat transisi. Negara yang menandatangani perjanjian pembiayaan bisa merasa terikat untuk menaikkan tarif demi kredibilitas di mata investor, bahkan ketika dampaknya terhadap kemiskinan energi dan ketimpangan wilayah belum dinilai secara memadai melalui analisis distribusional yang transparan.

Karena itu, diskusi tentang beban kepatuhan tidak bisa berhenti pada pertanyaan "berapa biaya per unit pengurangan emisi?", tetapi harus merambah ke pertanyaan "siapa yang membayar, dan atas dasar prinsip apa?". Prinsip *polluter pays* menekankan bahwa pelaku dengan emisi tinggi seharusnya

menanggung porsi lebih besar dari biaya kebijakan, sementara prinsip *ability to pay* menyoroti kemampuan ekonomi relatif aktor. Dalam konteks kuota dan portofolio energi terbarukan, kedua prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam struktur pungutan yang meningkat menurut intensitas emisi dan kapasitas finansial. Misalnya, beban tambahan bisa dirancang lebih besar bagi perusahaan bahan bakar fosil dan konsumen intensif energi berpenghasilan tinggi, sementara rumah tangga rentan mendapatkan kompensasi tunai atau subsidi silang. Tanpa landasan normatif yang eksplisit, desain instrumen akan mudah didorong oleh lobi yang paling kuat, bukan oleh pertimbangan keadilan.

Secara praktis, ada berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memperhalus distribusi beban kepatuhan. Struktur blok tarif progresif memungkinkan konsumsi listrik dasar dikenakan tarif rendah, sementara konsumsi di atas ambang tertentu menanggung porsi lebih besar dari biaya program kuota. Selain itu, pemerintah bisa memperkenalkan skema transfer tunai bersyarat atau *energy voucher* yang ditargetkan pada rumah tangga miskin, sehingga mereka tidak harus memilih antara membayar listrik dan kebutuhan dasar lain. Di sisi lain, transparansi dalam penggunaan dana publik untuk mendukung kebijakan energi menjadi penting agar warga memahami bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk mendukung investasi bersih juga diimbangi oleh penghematan jangka panjang, misalnya pada biaya kesehatan akibat polusi. Tanpa kebijakan kompensasi yang dirancang secara sadar, beban kepatuhan akan terus mengalir mengikuti pola ketimpangan yang sudah ada.

Pada akhirnya, cara suatu negara membagi beban kepatuhan antara utilitas, konsumen, dan anggaran publik mencerminkan filosofi kekuasaan yang mendasari proyek transisi itu sendiri. Jika kuota dan standar portofolio dirancang

terutama untuk menenangkan investor dan menjaga neraca perusahaan listrik, maka warga akan ditempatkan sekadar sebagai objek penagihan yang diharapkan patuh. Jika sebaliknya, transisi dipahami sebagai kesempatan untuk merombak relasi sosial dan ekonomi, maka rancangan instrumen akan memasukkan secara serius mekanisme partisipasi, perlindungan kelompok rentan, serta skema pembiayaan yang menuntut kontribusi lebih besar dari aktor yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama. Dalam skenario kedua, energi terbarukan bukan hanya indikator keberhasilan teknis, tetapi bagian dari proyek demokratisasi yang mempertanyakan siapa yang memerintah, siapa yang diuntungkan, dan sejauh mana risiko serta pengorbanan dibagikan secara adil dalam perjalanan menuju sistem energi yang lebih bersih.

9.3 Dampak pada Struktur Pasar Listrik: Kompetisi, Monopoli, dan Integrasi Sistem

Dalam rezim kuota atau *Renewable Portfolio Standard* (RPS), beban kepatuhan sering kali dibayangkan sebagai sesuatu yang netral dan teknis: negara menetapkan target persentase listrik bersih, utilitas menyesuaikan portofolio, pasar merespons, dan transisi pun mengalir mulus. Namun di balik narasi teknokratis itu, selalu ada pertanyaan mendasar: siapa yang benar-benar membayar biaya tambahan untuk memenuhi kewajiban tersebut, dan siapa yang menikmati manfaatnya? Di satu sisi, utilitas listrik diwajibkan membeli porsi tertentu dari produsen yang memenuhi syarat, atau membeli sertifikat energi bersih agar portofolionya sesuai regulasi. Di sisi lain, beban finansial untuk menutup perbedaan biaya antara sumber konvensional dan sumber yang lebih bersih jarang berhenti di neraca utilitas; ia hampir selalu bergerak ke arah rumah tangga, pelaku usaha, dan anggaran publik. Di titik ini, desain instrumen

ekonomi bertemu secara langsung dengan problem etika distribusi dan keadilan sosial.

Beban kepatuhan bisa dipahami sebagai konfigurasi relasi antara tiga aktor utama: utilitas sebagai pelaksana teknis, konsumen sebagai pembayar tarif, dan negara sebagai pengelola anggaran publik sekaligus penjamin kepentingan umum. Cara regulasi mengatur hubungan tiga aktor ini menentukan apakah biaya transisi akan bersifat regresif (lebih berat bagi kelompok miskin) atau progresif (lebih banyak ditanggung oleh aktor yang lebih mampu). Melalui skema tarif, pajak khusus, subsidi, dan mekanisme kompensasi, regulator bisa mengatur sejauh mana utilitas boleh melakukan *pass-through* biaya ke pelanggan, sejauh mana fiskus membantu menutup selisih harga, dan sejauh mana produsen diwajibkan menyerap sebagian risiko. Dengan demikian, beban kepatuhan bukan sekadar konsekuensi otomatis dari target kuota, tetapi hasil dari pilihan politik yang dikemas sebagai kalkulasi ekonomi.

Dari perspektif utilitas, kewajiban membeli porsi tertentu listrik berbasis energi terbarukan memaksa perubahan strategi investasi dan manajemen risiko. Mereka perlu memutuskan apakah akan membangun sendiri pembangkit baru, menandatangani kontrak jangka panjang dengan produsen independen, atau sekadar membeli sertifikat kepatuhan di pasar. Setiap pilihan membawa struktur biaya, risiko harga, dan implikasi tarif yang berbeda. Di banyak yurisdiksi, regulasi memberi ruang bagi utilitas untuk menyalurkan biaya tambahan ini ke pelanggan melalui mekanisme *fuel adjustment* atau pungutan khusus pada tagihan. Jika pengawasan regulatori lemah, utilitas dapat terdorong memilih opsi yang paling aman bagi neraca keuangannya, tetapi belum tentu paling adil bagi kelompok rentan. Akhirnya, desain kuota dan struktur tarif dapat memperkuat dominasi utilitas besar, alih-alih membuka ruang bagi model energi komunitas yang lebih demokratis.

Bagi konsumen, beban kepatuhan terasa paling nyata melalui kenaikan tarif listrik, penambahan komponen pungutan khusus, atau perubahan struktur blok tarif yang membedakan kaki tangga konsumsi. Di sinilah rancangan kebijakan energi menjadi arena krusial untuk menentukan apakah transisi akan memperdalam atau justru mengurangi ketimpangan. Rumah tangga berpendapatan rendah biasanya memiliki ruang manuver yang sempit untuk mengurangi konsumsi listrik tanpa mengorbankan kebutuhan dasar, sementara rumah tangga kaya lebih mudah berinvestasi pada perangkat efisiensi atau sistem surya atap. Jika biaya kepatuhan disalurkan secara rata per kilowatt-jam tanpa perlindungan, maka persentase pengeluaran energi terhadap pendapatan akan meningkat jauh lebih besar bagi kelompok miskin. Kebijakan seperti tarif sosial, blok tarif pertama yang sangat murah, atau program efisiensi yang ditargetkan kepada kelompok rentan dapat mengurangi ketidakadilan ini, tetapi sering kali justru dipangkas dengan alasan efisiensi fiskal.

Di tingkat anggaran publik, pemerintah kerap memilih untuk menanggung sebagian beban kepatuhan demi menjaga tarif tetap "terjangkau" dan mengurangi resistensi politik terhadap ekspansi energi terbarukan. Subsidi investasi, jaminan harga, atau keringanan pajak bagi proyek energi bersih dapat mengurangi tekanan biaya di sisi utilitas dan konsumen, tetapi menambah tekanan pada fiskus. Di negara-negara dengan ruang fiskal sempit dan kebutuhan sosial yang besar, setiap rupiah yang dialokasikan untuk mendukung portofolio bersih berarti rupiah yang tidak digunakan untuk kesehatan, pendidikan, atau perlindungan sosial. Dengan kata lain, beban kepatuhan bergeser dari tagihan listrik ke anggaran negara; pergeseran ini mungkin meredam gejolak jangka pendek, tetapi tetap memunculkan pertanyaan etis tentang prioritas anggaran dan siapa yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan lain demi menjaga stabilitas politik transisi.

Pengalaman beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa narasi tentang "tanggung jawab bersama" dalam pembiayaan transisi sering kali menyembunyikan ketegangan antara aktor pusat dan masyarakat. Studi tentang sektor ketenagalistrikan di Sri Lanka, misalnya, menggambarkan bagaimana narasi inovasi bertanggung jawab, efisiensi, dan investasi masa depan digunakan untuk membenarkan pilihan desain yang membatasi ruang partisipasi publik serta mengunci konfigurasi tertentu antara utilitas dan pemerintah (Nagarajah, 2021). Dalam konteks seperti itu, kebijakan energi tidak hanya menentukan siapa yang membayar, tetapi juga siapa yang bahkan berhak mengetahui dan mempersoalkan struktur biaya di balik tagihan. Beban kepatuhan menjadi produk dari narasi resmi mengenai "keterbatasan fiskal" dan "kebutuhan menjaga iklim investasi", sehingga warga terutama diminta memahami, bukan merundingkan, konsekuensinya.

Jika kita menilik lebih dalam, mekanisme pengalihan biaya dari utilitas ke pelanggan tidak pernah netral terhadap struktur kelas dan ruang. Di banyak kota, pelanggan rumah tangga berpendapatan rendah tinggal di kawasan dengan kualitas bangunan buruk dan perangkat listrik yang boros, sehingga mereka jauh lebih sulit menurunkan konsumsi ketika tarif naik akibat program energi terbarukan. Sebaliknya, rumah tangga kaya kerap menikmati insentif tambahan untuk memasang panel surya atau membeli peralatan hemat energi dengan skema kredit lunak. Artinya, kelompok kaya dapat "keluar" dari beban kolektif dengan memanfaatkan insentif, sedangkan kelompok miskin tetap terperangkap dalam kombinasi tarif tinggi dan infrastruktur yang tidak efisien. Tanpa koreksi yang sengaja dirancang, skema kuota atau RPS berisiko memperdalam ketidakadilan energi dan mengikis legitimasi politik dari proyek transisi itu sendiri.

Beban kepatuhan juga dialami secara berbeda oleh pelaku industri dan usaha kecil, yang seringkali menjadi jembatan antara desain kebijakan energi di atas kertas dan realitas harga di pasar. Di banyak negara, pemerintah cenderung melindungi industri padat energi dengan tarif khusus atau keringanan retribusi, agar daya saing ekspor tidak terganggu. Praktik ini menggeser kembali beban ke rumah tangga dan usaha kecil yang tidak memiliki posisi tawar serupa. Dalam kasus transisi keluar dari nuklir di Taiwan, misalnya, keterbatasan partisipasi publik dan transparansi dalam perencanaan sistem energi menimbulkan kombinasi baru antara komitmen lingkungan dan ketidakadilan prosedural, sehingga sebagian kelompok merasa menanggung risiko tanpa akses setara pada pengambilan keputusan (Huang & Chen, 2023). Pola serupa bisa muncul dalam konteks kuota dan RPS, ketika kelompok yang paling terdampak tidak diikutsertakan dalam perancangan skema kompensasi.

Di dalam ruang regulasi, cara otoritas menetapkan formula tarif dan mekanisme *cost recovery* menentukan seberapa besar tanggung jawab finansial yang tetap berada pada utilitas dan pemegang sahamnya. Dalam skema tertentu, utilitas dapat memasukkan hampir seluruh biaya pemenuhan kuota energi terbarukan ke *rate base*, yaitu basis aset yang dijamin pengembaliannya melalui tarif. Ini memberi sinyal kepastian kepada investor, tetapi sekaligus mengaburkan pembedaan antara investasi yang bijaksana dan spekulatif, karena hampir semua keputusan akan "diselamatkan" oleh pelanggan. Sebaliknya, jika regulator menahan sebagian biaya di neraca utilitas dan mensyaratkan pembagian risiko dengan pemegang saham, tekanan untuk merancang portofolio yang efisien akan lebih besar. Pilihan ini pada dasarnya merupakan pilihan politik tentang siapa yang dianggap layak menanggung risiko transisi: pemodal, manajemen utilitas, atau warga sebagai pembayar tagihan.

Di negara-negara yang sangat bergantung pada pembiayaan iklim dan bantuan pembangunan, lembaga donor dan bank pembangunan multilateral ikut mempengaruhi bagaimana beban kepatuhan dibagi. Mereka mendorong adopsi kuota atau RPS dengan paket pembiayaan, penjaminan pinjaman, dan saran reformasi tarif yang sering dikemas sebagai "best practice". Namun, syarat seperti penghapusan subsidi umum dan pengenalan tarif berbasis biaya penuh dapat menggeser beban ke konsumen tanpa menawarkan jaring pengaman sosial yang memadai. Di sini, kebijakan energi berubah menjadi instrumen konsolidasi fiskal, bukan semata alat transisi. Negara yang menandatangani perjanjian pembiayaan bisa merasa terikat untuk menaikkan tarif demi kredibilitas di mata investor, bahkan ketika dampaknya terhadap kemiskinan energi dan ketimpangan wilayah belum dinilai secara memadai melalui analisis distribusional yang transparan.

Karena itu, diskusi tentang beban kepatuhan tidak bisa berhenti pada pertanyaan "berapa biaya per unit pengurangan emisi?", tetapi harus merambah ke pertanyaan "siapa yang membayar, dan atas dasar prinsip apa?". Prinsip *polluter pays* menekankan bahwa pelaku dengan emisi tinggi seharusnya menanggung porsi lebih besar dari biaya kebijakan, sementara prinsip *ability to pay* menyoroti kemampuan ekonomi relatif aktor. Dalam konteks kuota dan portofolio energi terbarukan, kedua prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam struktur pungutan yang meningkat menurut intensitas emisi dan kapasitas finansial. Misalnya, beban tambahan bisa dirancang lebih besar bagi perusahaan bahan bakar fosil dan konsumen intensif energi berpenghasilan tinggi, sementara rumah tangga rentan mendapatkan kompensasi tunai atau subsidi silang. Tanpa landasan normatif yang eksplisit, desain instrumen akan mudah didorong oleh lobi yang paling kuat, bukan oleh pertimbangan keadilan.

Secara praktis, ada berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memperhalus distribusi beban kepatuhan. Struktur blok tarif progresif memungkinkan konsumsi listrik dasar dikenakan tarif rendah, sementara konsumsi di atas ambang tertentu menanggung porsi lebih besar dari biaya program kuota. Selain itu, pemerintah bisa memperkenalkan skema transfer tunai bersyarat atau *energy voucher* yang ditargetkan pada rumah tangga miskin, sehingga mereka tidak harus memilih antara membayar listrik dan kebutuhan dasar lain. Di sisi lain, transparansi dalam penggunaan dana publik untuk mendukung kebijakan energi menjadi penting agar warga memahami bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk mendukung investasi bersih juga diimbangi oleh penghematan jangka panjang, misalnya pada biaya kesehatan akibat polusi. Tanpa kebijakan kompensasi yang dirancang secara sadar, beban kepatuhan akan terus mengalir mengikuti pola ketimpangan yang sudah ada.

Pada akhirnya, cara suatu negara membagi beban kepatuhan antara utilitas, konsumen, dan anggaran publik mencerminkan filosofi kekuasaan yang mendasari proyek transisi itu sendiri. Jika kuota dan standar portofolio dirancang terutama untuk menenangkan investor dan menjaga neraca perusahaan listrik, maka warga akan ditempatkan sekadar sebagai objek penagihan yang diharapkan patuh. Jika sebaliknya, transisi dipahami sebagai kesempatan untuk merombak relasi sosial dan ekonomi, maka rancangan instrumen akan memasukkan secara serius mekanisme partisipasi, perlindungan kelompok rentan, serta skema pembiayaan yang menuntut kontribusi lebih besar dari aktor yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama. Dalam skenario kedua, energi terbarukan bukan hanya indikator keberhasilan teknis, tetapi bagian dari proyek demokratisasi yang mempertanyakan siapa yang memerintah, siapa yang

diuntungkan, dan sejauh mana risiko serta pengorbanan dibagikan secara adil dalam perjalanan menuju sistem energi yang lebih bersih.

9.4 Perbandingan FIT vs RPS: Efektivitas, Risiko, dan Distribusi Manfaat

Perbandingan antara *feed-in tariff* (FIT) dan *renewable portfolio standard* (RPS) sering dipresentasikan seolah-olah sekadar opsi teknis untuk mendorong pembangkitan listrik rendah karbon. Namun, dalam kerangka "instrumen sebagai teknologi kuasa", keduanya adalah cara berbeda negara mengatur siapa yang berhak berinvestasi, siapa yang memikul risiko, dan siapa yang menanggung beban kepatuhan. FIT, dengan janji harga tetap jangka panjang, tampak ramah investor, sementara RPS, dengan kewajiban kuota bagi badan usaha listrik, tampak lebih dekat pada logika pasar. Di balik perbedaan bentuk, kita sedang berhadapan dengan dua rezim kekuasaan: mana yang menguntungkan utilitas besar, mana yang membuka ruang bagi produsen kecil dan komunitas, dan bagaimana biaya dipindahkan secara halus ke rumah tangga yang tidak pernah duduk di meja perundingan kebijakan.

Feed-in tariff adalah mekanisme ketika pemerintah menjanjikan harga beli listrik tertentu untuk setiap kilowatt-jam yang dihasilkan oleh proyek tertentu selama periode kontrak, misalnya 15–20 tahun. Dalam bahasa sederhana, negara berkata kepada pengembang: "Bangunlah pembangkit, kami akan membeli listrikmu dengan harga yang sudah pasti." Skema ini mengurangi ketidakpastian harga pasar, sehingga risiko fluktuasi dipindahkan dari pengembang ke penyedia dana (sering kali konsumen atau anggaran negara). FIT adalah teknologi kuasa karena negara menentukan siapa yang memenuhi syarat, berapa besar tarifnya, dan seberapa lama kepastian itu diberikan. Izin, skala proyek, dan persyaratan

teknis yang melekat pada skema ini dapat secara diam-diam mengunci keuntungan pada kelompok tertentu, sambil meminggirkan aktor lokal yang tidak punya kapasitas finansial dan administratif.

Berbeda dengan FIT, *renewable portfolio standard* adalah kewajiban bagi perusahaan listrik untuk memastikan bahwa sebagian tertentu dari portofolio penjualannya berasal dari sumber *energi terbarukan*. Dalam istilah sederhana, regulator berkata: "Pada tahun sekian, paling tidak X persen listrik yang kamu jual harus hijau." Kepatuhan biasanya diukur lewat sertifikat yang menunjukkan berapa banyak listrik hijau yang dihasilkan atau dibeli. RPS tampak lebih "berbasis pasar" karena memberi ruang bagi perusahaan untuk memilih teknologi apa yang paling murah, dengan membeli atau memperjualbelikan sertifikat. Tetapi di balik fleksibilitas itu, RPS juga merupakan mekanisme pemaksaan: perusahaan yang tidak patuh bisa dikenai denda. Di sini, kuasa tersembunyi dalam penentuan target, sanksi, dan aturan siapa yang boleh menerbitkan sertifikat, sehingga akses terhadap pasar hijau bisa terpusat pada aktor besar yang sudah mapan.

Dari sisi efektivitas, FIT sering dipuji karena mampu mempercepat pembangunan pembangkit baru secara cepat, sementara RPS dianggap mendorong inovasi biaya rendah karena perusahaan mencari cara termurah untuk mencapai kuota. Namun, efektivitas keduanya sangat bergantung pada desain detail: berapa besar tarifnya, seberapa sering direvisi, seketat apa target kuota, dan seberapa kredibel ancaman sanksi. Studi tentang transisi energi di Brasil menunjukkan bahwa rancangan kebijakan tidak pernah netral, melainkan mencerminkan tarik-menarik kuasa antara negara, perusahaan, dan masyarakat sipil (Werner dan Lazaro, 2023). Dalam konteks ini, membandingkan FIT dan RPS bukan hanya menghitung berapa banyak kapasitas terpasang, melainkan

menelisik siapa yang berhasil mempengaruhi desain instrumen dan siapa yang ditinggalkan.

Jika dilihat dari risiko, FIT memindahkan sebagian besar risiko pasar ke pihak pembeli listrik dan, pada akhirnya, ke konsumen. Dengan harga yang dijamin, pengembang relatif terlindungi dari penurunan harga listrik di masa depan. Dalam bahasa awam, mereka seperti pedagang yang sudah pasti laku dengan harga tertentu, apa pun yang terjadi di luar. Namun risiko lain tetap ada: risiko kebijakan, misalnya pemerintah tiba-tiba memangkas tarif karena tekanan anggaran atau protes publik. Dalam rezim FIT, negara memegang kuasa untuk mengubah aturan main, dan perubahan itu dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Sementara itu, struktur kontrak, durasi, dan persyaratan teknis yang tampak "teknis murni" justru menjadi ruang di mana kepentingan korporasi dan birokrasi saling menegosiasikan beban dan manfaat.

Dalam skema RPS, beban kepatuhan muncul dalam bentuk biaya tambahan untuk memenuhi kuota portofolio hijau, misalnya dengan membeli sertifikat dari produsen yang mampu menghasilkan listrik hijau lebih murah. Perusahaan listrik akan berusaha menyalurkan *compliance cost* ini—biaya untuk patuh—kepada konsumen melalui tarif, atau kepada pemasok melalui kontrak. Dengan kata lain, RPS menggeser arena konflik ke dalam rantai nilai listrik: siapa yang menanggung biaya penyesuaian teknologi, siapa yang menanggung biaya administrasi sertifikat, dan siapa yang memperoleh keuntungan spekulatif dari jual beli sertifikat. Di sini, *kebijakan energi* tidak lagi hanya soal mengumumkan target kuota, tetapi tentang bagaimana struktur pasar dan posisi tawar setiap aktor membuat sebagian pihak lebih mudah melindungi dirinya dari biaya, sementara pihak lain menjadi penyangga pertama guncangan harga.

Pertanyaan "siapa yang menanggung beban kepatuhan" tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan antara negara, utilitas dominan, dan pelaku baru. FIT cenderung disukai oleh pengembang besar karena menjanjikan arus kas yang stabil, memudahkan akses pembiayaan, dan seringkali dinegosiasikan lewat proses yang rumit dan tertutup. Sebaliknya, RPS bisa tampak lebih terbuka, tetapi hanya bagi aktor yang mampu bermain di pasar sertifikat yang kompleks dan memiliki kapasitas manajerial untuk mengelola portofolio proyek. Rumah tangga dan komunitas lokal, tanpa dukungan kebijakan khusus, mudah sekali terperangkap sekadar sebagai pembayar akhir. Di sinilah terlihat bahwa instrumen bukan alat netral: ia membentuk struktur peluang, menentukan siapa yang bisa menjadi investor, dan siapa yang sekadar menjadi "pengikut aturan" tanpa ruang tawar.

Jika dilihat dari perspektif keadilan spasial, baik FIT maupun RPS dapat menciptakan wilayah yang menikmati manfaat dan wilayah yang menanggung dampak tanpa kompensasi sepadan. Studi tentang transisi rendah karbon di komunitas pedesaan Wales, misalnya, menunjukkan bagaimana desa-desa bisa menjadi lokasi infrastruktur baru namun tetap berada di posisi "pinggiran energi", menerima beban tetapi tidak menikmati posisi tawar dalam sistem (O'Sullivan dkk., 2020). Dalam kerangka itu, FIT yang terlalu fokus pada proyek berskala besar dan RPS yang hanya mengejar pemenuhan kuota nasional dapat sama-sama menegaskan ketimpangan lama, karena tidak bertanya siapa yang seharusnya memiliki, mengendalikan, dan memetik manfaat dari proyek-proyek energi rendah karbon tersebut.

Dari sisi percepatan investasi *energi terbarukan*, FIT memberikan sinyal harga yang jelas sehingga bank dan investor lebih mudah menghitung kelayakan proyek. Ini terbukti efektif di banyak negara ketika biaya teknologi masih tinggi dan

ketidakpastian pasar sangat besar. Namun, jika tarif terlalu tinggi atau tidak disesuaikan dengan penurunan biaya teknologi, FIT dapat menghasilkan "rente hijau" di mana pemilik proyek mendapatkan keuntungan berlebih, sementara konsumen membayar tarif lebih mahal selama bertahun-tahun. Di sini, kuasa termanifestasi dalam kemampuan aktor tertentu untuk mengunci aturan yang menguntungkan mereka saat jendela kebijakan sedang terbuka, lalu menolak perubahan ketika biaya sosialnya mulai dipersoalkan. FIT yang tidak diatur dengan kuat terhadap keuntungan berlebih dapat menggerus legitimasi politik transisi.

RPS, sebaliknya, mendorong perusahaan mencari teknologi dan proyek termurah untuk memenuhi kuota, sering kali berfokus pada sumber daya yang paling kompetitif secara biaya. Dalam praktiknya, hal ini bisa berarti pemusatan proyek di wilayah yang memiliki sumber daya alam terbaik dan infrastruktur jaringan yang memadai, sementara wilayah lain tertinggal. Dari sudut pandang risiko, pengembang di bawah rezim RPS menanggung risiko harga sertifikat dan fluktuasi pasar listrik yang lebih besar dibanding di bawah FIT. Mereka harus bersaing dalam pasar yang tidak selalu transparan, dan utilitas besar yang sudah mapan sering memiliki keunggulan pengetahuan dan informasi. RPS tampak lebih "market-friendly", tetapi pasar itu sendiri lahir dari rancangan regulasi yang memihak mereka yang sudah kuat, sehingga distribusi risiko dan manfaat jarang benar-benar seimbang.

Adaptasi pasar-listrik terhadap FIT dan RPS juga berbeda. FIT "mengadministrasi" risiko harga dengan memisahkan proyek tertentu dari volatilitas pasar, sementara RPS membiarkan risiko itu tetap hadir dan mengelolanya melalui mekanisme kuota dan sertifikat. Dalam sistem kelistrikan, perubahan ini berinteraksi dengan desain *market design* yang mengatur cara penawaran dan permintaan listrik bertemu,

misalnya melalui lelang harian atau kontrak jangka panjang. Bagi pembaca awam, *market design* bisa dipahami sebagai "aturan main" bagaimana harga listrik dibentuk dan siapa yang boleh ikut menjual. Bila aturan ini disusun dengan asumsi bahwa semua pelaku punya kapasitas yang sama, maka pemain kecil akan kalah sejak awal. Di sinilah instrumen kebijakan dan desain pasar saling meneguhkan: apa yang tampak teknis adalah bentuk konkret dari relasi kuasa.

Dari perspektif risiko kebijakan, baik FIT maupun RPS bergantung pada kredibilitas negara untuk tidak mengubah aturan secara tiba-tiba. Investor memperhitungkan risiko revisi tarif, penurunan kuota, atau perubahan mekanisme sertifikat yang bisa menghapus nilai investasi. Negara yang *kebijakan energi*-nya sering berubah mendadak akan menghadapi biaya pembiayaan lebih mahal, karena investor meminta premi risiko. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan instrumen ketika kondisi sosial dan teknologi berkembang. Dilema ini membuka ruang bagi politik: kelompok yang sudah menikmati manfaat dari desain awal cenderung melawan perubahan, sementara kelompok yang merasa dirugikan menuntut reformasi. Pada titik ini, perdebatan tentang FIT dan RPS berubah menjadi perdebatan tentang siapa yang berhak mendefinisikan "stabilitas" dan "keadilan" dalam transisi.

Pertanyaan efektivitas juga terkait dengan cara pemerintah merancang kombinasi instrumen. Penelitian tentang model bisnis dan tata kelola untuk adopsi *variable renewable energy* menunjukkan bahwa pemerintah sering kali tetap menjadi "batu kunci" yang menentukan arah perubahan sektor, bahkan ketika retorika resmi menonjolkan peran pasar (Bryant dkk., 2020). Dengan kata lain, baik FIT maupun RPS tidak bekerja di ruang hampa: keberhasilan keduanya ditentukan oleh desain tata kelola yang lebih luas, termasuk

seberapa terbuka proses perumusan kebijakan, sejauh mana partisipasi publik dijamin, dan bagaimana konflik kepentingan di antara pelaku regulasi, utilitas, dan pengembang dikelola. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, kedua instrumen mudah direduksi menjadi sarana untuk memperhalus redistribusi keuntungan ke kelompok yang sudah dominan.

Jika kita kembali ke pertanyaan awal "siapa yang menanggung beban kepatuhan", analisis distribusi beban perlu menelusuri jalur tarif dari pembangkit hingga rekening listrik rumah tangga. Dalam skema FIT, biaya sering tersebar tipis dalam tarif atau ditutup melalui subsidi fiskal, sehingga tampak tidak kasat mata namun tetap nyata bagi anggaran negara dan konsumen. Dalam RPS, biaya dapat muncul sebagai kenaikan tarif akibat pembelian sertifikat, atau sebagai pengurangan kualitas pelayanan ketika perusahaan menekan biaya di tempat lain. Pendekatan yang berorientasi keadilan seharusnya menilai kemampuan membayar, tanggung jawab historis atas emisi, dan kapasitas beradaptasi. Jika beban kepatuhan terlalu berat bagi rumah tangga miskin sementara perusahaan besar tetap menikmati margin keuntungan tinggi, maka instrumen apa pun—FIT atau RPS—tidak bisa diklaim adil meski secara teknis mencapai target emisi.

Distribusi manfaat juga harus dikaji: lapangan kerja baru, pendapatan sewa lahan, kepemilikan proyek, dan penurunan polusi lokal. FIT yang dirancang untuk memfasilitasi pembangkit skala kecil, seperti panel surya atap rumah tangga, dapat mendorong demokratisasi *energi terbarukan* jika diiringi dukungan pembiayaan bagi kelompok berpendapatan rendah. Sebaliknya, jika hanya rumah tangga kaya yang mampu berinvestasi, maka mereka menikmati tarif jual listrik yang menguntungkan sementara rumah tangga miskin menanggung kenaikan tarif umum. Di sisi RPS, perusahaan mungkin memilih proyek berskala besar yang paling murah secara biaya, namun

berdampak besar pada lingkungan dan komunitas lokal, misalnya pembangunan ladang angin atau surya di kawasan pedesaan tanpa mekanisme bagi hasil yang adil. Tanpa desain distribusi manfaat yang eksplisit, instrumen tetap cenderung memperkuat pola ketimpangan yang sudah ada.

Pada akhirnya, perbandingan FIT dan RPS dalam kerangka "instrumen sebagai teknologi kuasa" menunjukkan bahwa efektivitas, risiko, dan distribusi manfaat tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan politik: siapa yang merancang, siapa yang memutuskan, siapa yang mendapat suara, siapa yang diam. FIT bukan sekadar skema harga, dan RPS bukan sekadar angka kuota; keduanya adalah perangkat untuk mengarahkan aliran investasi, menormalisasi pembagian risiko, dan membentuk imajinasi publik tentang transisi energi yang mungkin. Dalam Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan, pilihan di antara keduanya—atau kombinasi keduanya—harus dibaca sebagai pilihan tentang wajah masa depan sistem energi: apakah lebih inklusif atau tetap hierarkis, apakah mengurangi atau justru mengukuhkan ketidakadilan. Tanpa kesadaran akan dimensi kuasa ini, perdebatan teknis tentang FIT vs RPS hanya akan mengulang pola lama: kebijakan dirumuskan atas nama kepentingan umum, tetapi manfaat dan bebannya jatuh secara timpang.

9.5 Kuota/RPS dalam Konteks Negara Berkembang: Adaptasi dan Keterbatasan Institusional

Perbandingan antara *feed-in tariff* (FIT) dan *renewable portfolio standard* (RPS) sering dipresentasikan seolah-olah sekadar opsi teknis untuk mendorong pembangkitan listrik rendah karbon. Namun, dalam kerangka "instrumen sebagai teknologi kuasa", keduanya adalah cara berbeda negara mengatur siapa yang berhak berinvestasi, siapa yang memikul risiko, dan siapa yang menanggung beban kepatuhan. FIT,

dengan janji harga tetap jangka panjang, tampak ramah investor, sementara RPS, dengan kewajiban kuota bagi badan usaha listrik, tampak lebih dekat pada logika pasar. Di balik perbedaan bentuk, kita sedang berhadapan dengan dua rezim kekuasaan: mana yang menguntungkan utilitas besar, mana yang membuka ruang bagi produsen kecil dan komunitas, dan bagaimana biaya dipindahkan secara halus ke rumah tangga yang tidak pernah duduk di meja perundingan kebijakan.

Feed-in tariff adalah mekanisme ketika pemerintah menjanjikan harga beli listrik tertentu untuk setiap kilowatt-jam yang dihasilkan oleh proyek tertentu selama periode kontrak, misalnya 15–20 tahun. Dalam bahasa sederhana, negara berkata kepada pengembang: "Bangunlah pembangkit, kami akan membeli listrikmu dengan harga yang sudah pasti." Skema ini mengurangi ketidakpastian harga pasar, sehingga risiko fluktuasi dipindahkan dari pengembang ke penyedia dana (sering kali konsumen atau anggaran negara). FIT adalah teknologi kuasa karena negara menentukan siapa yang memenuhi syarat, berapa besar tarifnya, dan seberapa lama kepastian itu diberikan. Izin, skala proyek, dan persyaratan teknis yang melekat pada skema ini dapat secara diam-diam mengunci keuntungan pada kelompok tertentu, sambil meminggirkan aktor lokal yang tidak punya kapasitas finansial dan administratif.

Berbeda dengan FIT, *renewable portfolio standard* adalah kewajiban bagi perusahaan listrik untuk memastikan bahwa sebagian tertentu dari portofolio penjualannya berasal dari sumber *energi terbarukan*. Dalam istilah sederhana, regulator berkata: "Pada tahun sekian, paling tidak X persen listrik yang kamu jual harus hijau." Kepatuhan biasanya diukur lewat sertifikat yang menunjukkan berapa banyak listrik hijau yang dihasilkan atau dibeli. RPS tampak lebih "berbasis pasar" karena memberi ruang bagi perusahaan untuk memilih teknologi apa

yang paling murah, dengan membeli atau memperjualbelikan sertifikat. Tetapi di balik fleksibilitas itu, RPS juga merupakan mekanisme pemaksaan: perusahaan yang tidak patuh bisa dikenai denda. Di sini, kuasa tersembunyi dalam penentuan target, sanksi, dan aturan siapa yang boleh menerbitkan sertifikat, sehingga akses terhadap pasar hijau bisa terpusat pada aktor besar yang sudah mapan.

Dari sisi efektivitas, FIT sering dipuji karena mampu mempercepat pembangunan pembangkit baru secara cepat, sementara RPS dianggap mendorong inovasi biaya rendah karena perusahaan mencari cara termurah untuk mencapai kuota. Namun, efektivitas keduanya sangat bergantung pada desain detail: berapa besar tarifnya, seberapa sering direvisi, seketat apa target kuota, dan seberapa kredibel ancaman sanksi. Studi tentang transisi energi di Brasil menunjukkan bahwa rancangan kebijakan tidak pernah netral, melainkan mencerminkan tarik-menarik kuasa antara negara, perusahaan, dan masyarakat sipil (Werner dan Lazaro, 2023). Dalam konteks ini, membandingkan FIT dan RPS bukan hanya menghitung berapa banyak kapasitas terpasang, melainkan menelisik siapa yang berhasil mempengaruhi desain instrumen dan siapa yang ditinggalkan.

Jika dilihat dari risiko, FIT memindahkan sebagian besar risiko pasar ke pihak pembeli listrik dan, pada akhirnya, ke konsumen. Dengan harga yang dijamin, pengembang relatif terlindungi dari penurunan harga listrik di masa depan. Dalam bahasa awam, mereka seperti pedagang yang sudah pasti laku dengan harga tertentu, apa pun yang terjadi di luar. Namun risiko lain tetap ada: risiko kebijakan, misalnya pemerintah tiba-tiba memangkas tarif karena tekanan anggaran atau protes publik. Dalam rezim FIT, negara memegang kuasa untuk mengubah aturan main, dan perubahan itu dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Sementara

itu, struktur kontrak, durasi, dan persyaratan teknis yang tampak "teknis murni" justru menjadi ruang di mana kepentingan korporasi dan birokrasi saling menegosiasikan beban dan manfaat.

Dalam skema RPS, beban kepatuhan muncul dalam bentuk biaya tambahan untuk memenuhi kuota portofolio hijau, misalnya dengan membeli sertifikat dari produsen yang mampu menghasilkan listrik hijau lebih murah. Perusahaan listrik akan berusaha menyalurkan *compliance cost* ini—biaya untuk patuh—kepada konsumen melalui tarif, atau kepada pemasok melalui kontrak. Dengan kata lain, RPS menggeser arena konflik ke dalam rantai nilai listrik: siapa yang menanggung biaya penyesuaian teknologi, siapa yang menanggung biaya administrasi sertifikat, dan siapa yang memperoleh keuntungan spekulatif dari jual beli sertifikat. Di sini, *kebijakan energi* tidak lagi hanya soal mengumumkan target kuota, tetapi tentang bagaimana struktur pasar dan posisi tawar setiap aktor membuat sebagian pihak lebih mudah melindungi dirinya dari biaya, sementara pihak lain menjadi penyangga pertama guncangan harga.

Pertanyaan "siapa yang menanggung beban kepatuhan" tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan antara negara, utilitas dominan, dan pelaku baru. FIT cenderung disukai oleh pengembang besar karena menjanjikan arus kas yang stabil, memudahkan akses pembiayaan, dan seringkali dinegosiasikan lewat proses yang rumit dan tertutup. Sebaliknya, RPS bisa tampak lebih terbuka, tetapi hanya bagi aktor yang mampu bermain di pasar sertifikat yang kompleks dan memiliki kapasitas manajerial untuk mengelola portofolio proyek. Rumah tangga dan komunitas lokal, tanpa dukungan kebijakan khusus, mudah sekali terperangkap sekadar sebagai pembayar akhir. Di sinilah terlihat bahwa instrumen bukan alat netral: ia membentuk struktur peluang, menentukan siapa yang bisa

menjadi investor, dan siapa yang sekadar menjadi "pengikut aturan" tanpa ruang tawar.

Jika dilihat dari perspektif keadilan spasial, baik FIT maupun RPS dapat menciptakan wilayah yang menikmati manfaat dan wilayah yang menanggung dampak tanpa kompensasi sepadan. Studi tentang transisi rendah karbon di komunitas pedesaan Wales, misalnya, menunjukkan bagaimana desa-desa bisa menjadi lokasi infrastruktur baru namun tetap berada di posisi "pinggiran energi", menerima beban tetapi tidak menikmati posisi tawar dalam sistem (O'Sullivan dkk., 2020). Dalam kerangka itu, FIT yang terlalu fokus pada proyek berskala besar dan RPS yang hanya mengejar pemenuhan kuota nasional dapat sama-sama menegaskan ketimpangan lama, karena tidak bertanya siapa yang seharusnya memiliki, mengendalikan, dan memetik manfaat dari proyek-proyek energi rendah karbon tersebut.

Dari sisi percepatan investasi *energi terbarukan*, FIT memberikan sinyal harga yang jelas sehingga bank dan investor lebih mudah menghitung kelayakan proyek. Ini terbukti efektif di banyak negara ketika biaya teknologi masih tinggi dan ketidakpastian pasar sangat besar. Namun, jika tarif terlalu tinggi atau tidak disesuaikan dengan penurunan biaya teknologi, FIT dapat menghasilkan "rente hijau" di mana pemilik proyek mendapatkan keuntungan berlebih, sementara konsumen membayar tarif lebih mahal selama bertahun-tahun. Di sini, kuasa termanifestasi dalam kemampuan aktor tertentu untuk mengunci aturan yang menguntungkan mereka saat jendela kebijakan sedang terbuka, lalu menolak perubahan ketika biaya sosialnya mulai dipersoalkan. FIT yang tidak diatur dengan kuat terhadap keuntungan berlebih dapat menggerus legitimasi politik transisi.

RPS, sebaliknya, mendorong perusahaan mencari teknologi dan proyek termurah untuk memenuhi kuota, sering

kali berfokus pada sumber daya yang paling kompetitif secara biaya. Dalam praktiknya, hal ini bisa berarti pemusatan proyek di wilayah yang memiliki sumber daya alam terbaik dan infrastruktur jaringan yang memadai, sementara wilayah lain tertinggal. Dari sudut pandang risiko, pengembang di bawah rezim RPS menanggung risiko harga sertifikat dan fluktuasi pasar listrik yang lebih besar dibanding di bawah FIT. Mereka harus bersaing dalam pasar yang tidak selalu transparan, dan utilitas besar yang sudah mapan sering memiliki keunggulan pengetahuan dan informasi. RPS tampak lebih "market-friendly", tetapi pasar itu sendiri lahir dari rancangan regulasi yang memihak mereka yang sudah kuat, sehingga distribusi risiko dan manfaat jarang benar-benar seimbang.

Adaptasi pasar-listrik terhadap FIT dan RPS juga berbeda. FIT "mengadministrasi" risiko harga dengan memisahkan proyek tertentu dari volatilitas pasar, sementara RPS membiarkan risiko itu tetap hadir dan mengelolanya melalui mekanisme kuota dan sertifikat. Dalam sistem kelistrikan, perubahan ini berinteraksi dengan desain *market design* yang mengatur cara penawaran dan permintaan listrik bertemu, misalnya melalui lelang harian atau kontrak jangka panjang. Bagi pembaca awam, *market design* bisa dipahami sebagai "aturan main" bagaimana harga listrik dibentuk dan siapa yang boleh ikut menjual. Bila aturan ini disusun dengan asumsi bahwa semua pelaku punya kapasitas yang sama, maka pemain kecil akan kalah sejak awal. Di sinilah instrumen kebijakan dan desain pasar saling meneguhkan: apa yang tampak teknis adalah bentuk konkret dari relasi kuasa.

Dari perspektif risiko kebijakan, baik FIT maupun RPS bergantung pada kredibilitas negara untuk tidak mengubah aturan secara tiba-tiba. Investor memperhitungkan risiko revisi tarif, penurunan kuota, atau perubahan mekanisme sertifikat yang bisa menghapus nilai investasi. Negara yang *kebijakan*

energi-nya sering berubah mendadak akan menghadapi biaya pembiayaan lebih mahal, karena investor meminta premi risiko. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan instrumen ketika kondisi sosial dan teknologi berkembang. Dilema ini membuka ruang bagi politik: kelompok yang sudah menikmati manfaat dari desain awal cenderung melawan perubahan, sementara kelompok yang merasa dirugikan menuntut reformasi. Pada titik ini, perdebatan tentang FIT dan RPS berubah menjadi perdebatan tentang siapa yang berhak mendefinisikan "stabilitas" dan "keadilan" dalam transisi.

Pertanyaan efektivitas juga terkait dengan cara pemerintah merancang kombinasi instrumen. Penelitian tentang model bisnis dan tata kelola untuk adopsi *variable renewable energy* menunjukkan bahwa pemerintah sering kali tetap menjadi "batu kunci" yang menentukan arah perubahan sektor, bahkan ketika retorika resmi menonjolkan peran pasar (Bryant dkk., 2020). Dengan kata lain, baik FIT maupun RPS tidak bekerja di ruang hampa: keberhasilan keduanya ditentukan oleh desain tata kelola yang lebih luas, termasuk seberapa terbuka proses perumusan kebijakan, sejauh mana partisipasi publik dijamin, dan bagaimana konflik kepentingan di antara pelaku regulasi, utilitas, dan pengembang dikelola. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, kedua instrumen mudah direduksi menjadi sarana untuk memperhalus redistribusi keuntungan ke kelompok yang sudah dominan.

Jika kita kembali ke pertanyaan awal "siapa yang menanggung beban kepatuhan", analisis distribusi beban perlu menelusuri jalur tarif dari pembangkit hingga rekening listrik rumah tangga. Dalam skema FIT, biaya sering tersebar tipis dalam tarif atau ditutup melalui subsidi fiskal, sehingga tampak tidak kasat mata namun tetap nyata bagi anggaran negara dan konsumen. Dalam RPS, biaya dapat muncul sebagai kenaikan

tarif akibat pembelian sertifikat, atau sebagai pengurangan kualitas pelayanan ketika perusahaan menekan biaya di tempat lain. Pendekatan yang berorientasi keadilan seharusnya menilai kemampuan membayar, tanggung jawab historis atas emisi, dan kapasitas beradaptasi. Jika beban kepatuhan terlalu berat bagi rumah tangga miskin sementara perusahaan besar tetap menikmati margin keuntungan tinggi, maka instrumen apa pun—FIT atau RPS—tidak bisa diklaim adil meski secara teknis mencapai target emisi.

Distribusi manfaat juga harus dikaji: lapangan kerja baru, pendapatan sewa lahan, kepemilikan proyek, dan penurunan polusi lokal. FIT yang dirancang untuk memfasilitasi pembangkit skala kecil, seperti panel surya atap rumah tangga, dapat mendorong demokratisasi *energi terbarukan* jika diiringi dukungan pembiayaan bagi kelompok berpendapatan rendah. Sebaliknya, jika hanya rumah tangga kaya yang mampu berinvestasi, maka mereka menikmati tarif jual listrik yang menguntungkan sementara rumah tangga miskin menanggung kenaikan tarif umum. Di sisi RPS, perusahaan mungkin memilih proyek berskala besar yang paling murah secara biaya, namun berdampak besar pada lingkungan dan komunitas lokal, misalnya pembangunan ladang angin atau surya di kawasan pedesaan tanpa mekanisme bagi hasil yang adil. Tanpa desain distribusi manfaat yang eksplisit, instrumen tetap cenderung memperkuat pola ketimpangan yang sudah ada.

Pada akhirnya, perbandingan FIT dan RPS dalam kerangka "instrumen sebagai teknologi kuasa" menunjukkan bahwa efektivitas, risiko, dan distribusi manfaat tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan politik: siapa yang merancang, siapa yang memutuskan, siapa yang mendapat suara, siapa yang diam. FIT bukan sekadar skema harga, dan RPS bukan sekadar angka kuota; keduanya adalah perangkat untuk mengarahkan aliran investasi, menormalisasi pembagian risiko, dan membentuk

imajinasi publik tentang transisi energi yang mungkin. Dalam Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan, pilihan di antara keduanya—atau kombinasi keduanya—harus dibaca sebagai pilihan tentang wajah masa depan sistem energi: apakah lebih inklusif atau tetap hierarkis, apakah mengurangi atau justru mengukuhkan ketidakadilan. Tanpa kesadaran akan dimensi kuasa ini, perdebatan teknis tentang FIT vs RPS hanya akan mengulang pola lama: kebijakan dirumuskan atas nama kepentingan umum, tetapi manfaat dan bebannya jatuh secara timpang.

10 Lelang & Mekanisme Pasar: Efisiensi vs Akses— Menguji Klaim "Netralitas" Ekonomi

10.1 Lelang Kapasitas/Proyek Energi Terbarukan: Desain dan Rasionalitas Ekonomi

Lelang kapasitas atau proyek dalam sektor energi sering dipromosikan sebagai cara paling "rasional" untuk memilih pengembang yang sanggup menyediakan listrik rendah karbon dengan biaya paling murah. Di permukaan, desain *auction* tampak teknis dan netral: pemerintah menetapkan kapasitas yang dibutuhkan, menetapkan kriteria kelayakan, lalu membiarkan para pengembang saling bersaing menawar harga jual listrik serendah mungkin. Namun dari sudut pandang filsafat kekuasaan, setiap aturan dalam lelang tersebut—siapa yang boleh ikut, bagaimana harga ditentukan, bagaimana kegagalan proyek dihukum—sesungguhnya adalah keputusan politis tentang siapa yang diposisikan sebagai subjek yang rasional, dan siapa yang dianggap terlalu lemah, terlalu berisiko, atau terlalu "mahal" untuk diikutsertakan. Dengan demikian, lelang bukan sekadar alat efisiensi ekonomi, melainkan teknologi kuasa yang mengarahkan aliran modal, infrastruktur, dan risiko ke aktor-aktor tertentu, sembari menyingkirkan aktor lain yang tidak sesuai dengan nalar pasar yang sedang dinormalkan.

Dalam desain *auction* untuk kapasitas listrik, kita bisa membedakan beberapa elemen kunci: bentuk penawaran (*sealed-bid* atau penawaran tertutup), aturan penetapan pemenang, dan mekanisme penentuan harga seperti *pay-as-bid* (tiap pemenang dibayar sesuai tawarannya) atau *uniform price*

(semua pemenang dibayar harga yang sama). Di balik pilihan teknis ini terdapat asumsi tentang bagaimana pengembang merespons insentif, seberapa besar informasi yang mereka miliki, dan sejauh mana negara harus melindungi mereka dari risiko pasar yang ekstrem. Studi kebijakan tentang transisi energi di Brasil, misalnya, menunjukkan bahwa perancangan kombinasi instrumen, termasuk lelang, sangat menentukan arah dan konfigurasi tata kelola sektor ketenagalistrikan, bukan sekadar menurunkan biaya rata-rata proyek (Werner & Lazaro, 2023). Di sini, rasionalitas ekonomi bertemu dengan rasionalitas politik: apa yang tampak sebagai keputusan teknis mengenai skema lelang pada hakikatnya adalah pemilihan pemenang dan pecundang dalam kontestasi memperebutkan masa depan infrastruktur energi.

Bila fokus diarahkan pada lelang kapasitas untuk *energi terbarukan*, kita melihat bagaimana negara mengoperasionalkan komitmen iklim ke dalam bentuk angka, jadwal, dan paket proyek yang dapat "dimasukkan" ke pasar. Ketika negara memutuskan bahwa kapasitas surya dan angin akan ditentukan melalui lelang, ia sekaligus mengubah janji keberlanjutan menjadi kompetisi finansial yang diukur dalam satuan rupiah per kilowatt-jam. Dalam kerangka ini, pengembang yang mampu mengakses modal murah, skala proyek besar, dan kemampuan manajerial tinggi akan jauh lebih diuntungkan dibanding koperasi energi, komunitas pedesaan, atau pemerintah daerah yang beroperasi pada skala kecil. Lelang tampak membuka peluang, tetapi secara halus mensyaratkan bentuk-bentuk subjek tertentu—korporasi besar, konsorsium finansial, atau perusahaan milik negara yang telah mapan—sebagai pemain utama yang "layak" mengemban amanat transisi menuju energi rendah karbon.

Rasionalitas ekonomi yang memayungi lelang sering mengklaim bahwa mekanisme kompetitif adalah cara terbaik

mengungkap "biaya sebenarnya" dari penyediaan listrik. Namun klaim tersebut mengabaikan kenyataan bahwa kemampuan menawar bukanlah fungsi biaya teknis semata, melainkan juga fungsi kekuasaan struktural: akses terhadap kredit, pengaruh terhadap regulator, dan kedekatan dengan elit politik. Dalam banyak kasus, pengembang besar dapat "mengatur" portofolio tawaran untuk beberapa putaran lelang sekaligus, sehingga mampu bermain dengan strategi harga jangka panjang yang mustahil ditiru oleh pemain kecil. Dalam bahasa Foucault, kita dapat mengatakan bahwa lelang bekerja sebagai *dispositif* yang menghubungkan pengetahuan ekonomi tentang biaya dengan teknik pemerintahan atas pelaku pasar: mereka dipaksa untuk mematuhi ritme tender, memenuhi standar dokumentasi yang rumit, dan menerima distribusi risiko yang telah dinegosiasikan dari atas, bukan dirundingkan secara setara.

Selain struktur harga, elemen penting lain adalah persyaratan praseleksi: bukti pengalaman proyek, besaran modal sendiri, kriteria keberlanjutan lingkungan, hingga kewajiban kepemilikan lahan. Ketika pemerintah mengatur bahwa hanya perusahaan dengan ukuran aset tertentu atau rekam jejak proyek megawatt dalam jumlah tertentu yang boleh ikut serta, lelang secara efektif menjelma menjadi mekanisme penyaringan kelas. Para ahli kebijakan publik sering menyebut hal ini sebagai *screening*—teknik untuk mengurangi risiko kegagalan proyek—namun dalam praktiknya, *screening* sekaligus mereproduksi hierarki kekuasaan yang ada. Di sini, metafora "pemerintah sebagai wasit netral" runtuh, karena pemerintah justru berperan sebagai arsitek lapangan permainan yang condong ke pihak tertentu, meskipun secara formal seluruh aturan tercantum secara transparan dalam dokumen tender yang dapat diunduh publik.

Relasi antara desain lelang dan arsitektur lebih luas dari *kebijakan energi* nasional juga tidak bisa diabaikan. Lelang

sering ditempatkan sebagai pilar utama bauran instrumen, berdampingan dengan standar portofolio, skema pajak, dan dukungan infrastruktur jaringan. Ketika negara mengumumkan jadwal lelang bertahun-tahun ke depan, ia mengirim sinyal kuat kepada pasar bahwa "ruang bermain" yang sah bagi investasi adalah ruang yang terformat oleh kompetisi harga jangka pendek, bukan oleh visi jangka panjang yang dinegosiasikan secara deliberatif dengan komunitas terdampak. Akibatnya, perencanaan energi berisiko direduksi pada logika mengejar kapasitas dengan biaya terendah, sementara dimensi keadilan spasial, hak masyarakat adat, dan keamanan mata pencaharian lokal disisihkan sebagai pertimbangan sekunder yang boleh dibahas, tetapi hanya setelah struktur insentif ekonomi dianggap kokoh dan "bankable".

Dari perspektif teori ekonomi, lelang dianggap unggul karena meminimalkan risiko *over-compensation*—pemerintah membayar terlalu mahal untuk listrik—dan mendorong pengembang mengungkap biaya marjinal sebenarnya. Namun, filsafat kekuasaan mengajak kita mempertanyakan: biaya siapa yang tengah dihemat dan risiko siapa yang tengah dipindahkan? Ketika harga yang menang berada sangat rendah, pengembang akan menekan biaya di seluruh rantai nilai: negosiasi upah tenaga kerja, pemilihan teknologi yang mungkin kurang andal, atau pengorbanan aspek sosial-lingkungan yang sulit dimonetisasi. Dalam situasi tertentu, rendahnya harga pemenang bisa menghasilkan *winner's curse*, yaitu kondisi ketika pemenang menyadari bahwa tawarannya terlalu rendah untuk menutup biaya nyata. Alih-alih hanya kegagalan pasar, *winner's curse* dapat dibaca sebagai gejala struktur kekuasaan yang memaksa pengembang berkompetisi dalam permainan yang mereka tahu tidak sepenuhnya menguntungkan, demi mempertahankan posisi di pasar jangka panjang.

Dimensi spasial dari lelang kapasitas sering kali terabaikan dalam diskusi teknis, padahal lokasi proyek menentukan siapa yang menanggung dampak dan siapa yang menikmati manfaat. Penelitian tentang periferalisasi energi menunjukkan bahwa komunitas pedesaan kerap menjadi lokasi pembangkit baru, tetapi tidak selalu memperoleh manfaat sosial dan ekonomi yang sepadan (O'Sullivan et al., 2020). Lelang yang berfokus pada harga cenderung mendorong proyek ke wilayah dengan tanah murah, regulasi lemah, dan kapasitas politik rendah, karena di situlah pengembang dapat menekan biaya. Dengan demikian, lelang berkontribusi pada pembentukan "wilayah korban" yang energi listriknya mengalir ke pusat konsumsi kota, sementara beban perubahan bentang alam, konflik lahan, dan gangguan ekologis diserap oleh komunitas yang daya tawarnya paling kecil di meja perundingan.

Bila kita mengaitkannya dengan gagasan keadilan dalam penyediaan *energi terbarukan*, struktur lelang yang terlalu sempit menimbulkan paradoks: negara mengklaim bergerak menuju ekonomi hijau, tetapi melakukannya dengan cara yang mengekstraksi nilai dari wilayah yang sudah lama termarjinalkan. Proyek surya skala utilitas, ladang angin raksasa, atau pembangkit biomassa yang dimenangkan melalui lelang mungkin menurunkan emisi, namun juga dapat memperdalam ketimpangan hak atas ruang dan sumber daya. Pertanyaan etis yang muncul adalah: apakah pengurangan emisi yang dihitung dalam laporan resmi cukup untuk membenarkan bentuk-bentuk ketidakadilan baru di tingkat lokal? Jika tidak, bagaimana desain lelang dapat diubah sehingga komunitas yang menjadi lokasi proyek tidak hanya menjadi objek dari keputusan teknokratik, melainkan subjek yang ikut mendefinisikan syarat-syarat partisipasi dan distribusi manfaat?

Literatur tentang desentralisasi listrik menunjukkan bahwa perubahan teknologi listrik—dari sistem terpusat ke

sistem yang lebih tersebar—membuka peluang pergeseran struktur kekuasaan, tetapi peluang ini tidak otomatis terwujud (Brisbois, 2020). Lelang kapasitas dapat digunakan untuk memperkuat dominasi aktor pusat dengan mengemas proyek besar yang hanya dapat diakses oleh perusahaan raksasa, atau sebaliknya, untuk membuka kanal bagi koperasi energi lokal melalui paket-paket kecil dengan syarat yang disederhanakan. Pilihan desain ini tidak ditentukan oleh hukum ekonomi murni, melainkan oleh koalisi politik yang memenangkan pertarungan gagasan di dalam kementerian, regulator, dan parlemen. Dengan kata lain, lelang adalah arena di mana visi tentang desentralisasi, demokratisasi energi, dan partisipasi warga dapat diperkuat atau dipinggirkan, tergantung bagaimana parameternya dinegosiasikan dan dimasukkan ke dalam peraturan resmi.

Aspek legitimasi juga penting: pendukung lelang sering berargumen bahwa mekanisme ini lebih transparan karena semua syarat dan hasil dapat dipublikasikan, berbeda dengan negosiasi langsung yang rawan kolusi. Namun transparansi prosedural tidak otomatis menghasilkan legitimasi substantif. Proses lelang bisa sangat rumit, dipenuhi istilah teknis dan formula penilaian yang sulit dipahami oleh publik awam, sehingga partisipasi bermakna hampir mustahil. Walaupun dokumen tender diunggah di laman pemerintah, hanya segelintir konsultan, pengacara, dan pengembang besar yang benar-benar bisa menafsirkan detail teknisnya. Dengan demikian, lelang menciptakan bentuk baru eksklusivitas: bukan eksklusivitas akses fisik ke ruang rapat tertutup, melainkan eksklusivitas epistemik, di mana hanya mereka yang melek bahasa teknokratik yang dapat benar-benar "masuk" ke arena pengambilan keputusan.

Jika kita menempatkan lelang dalam kerangka *kebijakan energi* jangka panjang, terlihat bahwa putaran demi putaran tender menciptakan ritme institusional baru: kalender lelang

menjadi sejenis jam politik yang mengarahkan ekspektasi pelaku pasar, aparat birokrasi, dan bahkan lembaga keuangan internasional. Dalam ritme ini, imajinasi kebijakan cenderung terbatas pada penyesuaian parameter numerik—mengubah volume kapasitas, menurunkan harga batas atas, mengatur skema penalti—ketimbang membayangkan ulang bagaimana hubungan antara negara, pasar, dan warga seharusnya diorganisasikan. Sementara itu, berbagai bentuk pengetahuan lokal tentang tata kelola sumber daya, hak adat, atau praktik solidaritas komunitas sulit masuk ke dalam matriks evaluasi yang didesain untuk menilai kelayakan finansial dan kepatuhan regulatif, bukan kualitas relasi sosial yang diciptakan oleh proyek.

Dari sisi teori *market design*, lelang sering dibahas dalam istilah stabilitas, insentif, dan efisiensi Pareto: bagaimana memastikan bahwa tidak ada peserta yang dapat meningkatkan posisinya tanpa merugikan orang lain, dan bagaimana mencegah kolusi atau penawaran strategis yang merusak kompetisi. Namun teori tersebut umumnya berangkat dari asumsi bahwa preferensi para pelaku sudah tetap, dan tujuan kebijakan hanya mengagregasi preferensi tersebut se-efisien mungkin. Filsafat kekuasaan mengingatkan bahwa lelang justru ikut membentuk preferensi: ketika berulang kali diberi sinyal bahwa hanya proyek dengan biaya terendah yang akan didukung, pengembang tidak akan menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk merancang model partisipasi warga atau desain teknologi yang peka terhadap keanekaragaman hayati. Dengan demikian, lelang berperan sebagai mesin normatif yang mendisiplinkan imajinasi kebijakan, bukan sekadar perangkat untuk mengekspresikan preferensi yang sudah ada.

Lelang juga membawa konsekuensi penting bagi cara negara memosisikan dirinya terhadap risiko. Dalam banyak desain, risiko harga dan risiko permintaan dipindahkan secara

signifikan ke pihak pengembang: mereka berkompetisi dalam kondisi ketidakpastian tentang masa depan biaya teknologi, regulasi karbon, dan harga listrik grosir. Negara kemudian dapat mengklaim bahwa anggaran publik terlindungi karena kewajiban fiskal dikunci pada harga kontrak yang rendah. Namun ketika proyek gagal karena kebangkrutan atau ketidakmampuan memenuhi jadwal, risiko sistemik kembali ke negara dan masyarakat, misalnya melalui keterlambatan pasokan listrik atau beban tambahan pada perusahaan listrik milik negara. Dengan demikian, narasi bahwa lelang "mengurangi risiko negara" perlu dipertanyakan: yang terjadi lebih tepat disebut redistribusi risiko secara vertikal dan horizontal, di mana kelompok dengan daya tawar terlemah cenderung menjadi penyangga terakhir.

Dalam konteks *energi terbarukan* di negara berkembang, lelang kapasitas sering dihubungkan dengan agenda reformasi pasar yang didorong lembaga keuangan internasional. Dokumen kebijakan menekankan perlunya menciptakan "iklim investasi yang kondusif" melalui aturan lelang yang dapat diprediksi, sehingga investor global merasa aman menanam modal. Namun pertanyaan kritisnya adalah: investasi seperti apa yang ingin kita undang, dan dengan syarat apa? Jika lelang hanya menghargai kemampuan menawar harga rendah dan kecepatan eksekusi proyek, sementara mengabaikan kepemilikan lokal, pengembangan rantai pasok domestik, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah, maka transisi energi akan menghasilkan struktur ketergantungan baru pada modal internasional. Keberlanjutan dalam pengertian ekologis mungkin tercapai sebagian, tetapi kedaulatan energi dan demokrasi ekonomi justru bergerak mundur.

Akhirnya, untuk membaca lelang kapasitas sebagai teknologi kuasa, kita perlu menggabungkan analisis teknis dengan kritik normatif: siapa yang mendesain aturan, dengan

narasi apa aturan tersebut dibenarkan, dan nilai-nilai siapa yang dilegitimasi melalui klaim efisiensi dan kompetisi. Lelang dapat saja dimodifikasi agar lebih peka terhadap keadilan sosial—misalnya melalui paket proyek skala kecil, syarat kepemilikan komunitas, atau *bonuses* bagi proyek yang memperkuat ketahanan lokal—tetapi perubahan ini hanya mungkin jika ada pergeseran koalisi politik dan epistemik di baliknya. Dengan demikian, studi tentang lelang kapasitas tidak cukup berhenti pada evaluasi apakah instrumen tersebut berhasil menurunkan biaya listrik. Ia harus diperluas menjadi analisis tentang bagaimana lelang membentuk struktur peluang, mengatur distribusi risiko, dan memahat ulang imajinasi kolektif mengenai masa depan sistem energi yang adil, demokratis, dan benar-benar berkelanjutan.

10.2 Kompetisi Harga vs Akses Pelaku Kecil dan Lokal

Kompetisi harga sering digambarkan sebagai jantung *market-based instruments* dalam sektor listrik, seolah-olah ketika pemerintah melelang kapasitas pembangkit, mekanisme pasar akan secara otomatis menemukan kombinasi paling efisien antara teknologi, lokasi, dan skala proyek. Dalam kerangka ini, pelaku yang menawarkan tarif paling rendah diposisikan sebagai yang "paling rasional" dan "paling produktif", sementara dimensi kekuasaan, sejarah, dan ketimpangan akses hampir tidak pernah dibicarakan secara eksplisit. Padahal, lelang dan skema kompetisi harga lain tidak pernah beroperasi di ruang hampa: ada syarat teknis, jaminan keuangan, reputasi institusional, dan jejaring politik yang secara diam-diam menyaring siapa yang bisa masuk meja permainan dan siapa yang terpaksa tetap berada di pinggir. Filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan karenanya perlu menelisik bukan hanya siapa yang menang dalam kompetisi, tetapi juga siapa yang bahkan tidak pernah diizinkan untuk ikut bertanding.

Di atas kertas, lelang listrik tampak sederhana: negara atau otoritas energi mengumumkan kebutuhan kapasitas, pelaku usaha mengajukan penawaran tarif, lalu penawar termurah menang. Namun bagi pelaku kecil dan lokal, realitasnya jauh lebih kompleks. Mereka berhadapan dengan formulir yang rumit, persyaratan *bankability* (yakni keyakinan lembaga keuangan bahwa proyek layak dibiayai) yang tinggi, serta kebutuhan menyewa konsultan hukum dan teknis yang mahal. Semua ini menciptakan biaya transaksi non-harga yang sangat besar. Perusahaan besar dapat menyebar biaya ini ke portofolio proyek global, sedangkan koperasi desa atau usaha lokal harus memikulnya pada satu proyek kecil. Ketika desain pasar mengabaikan ketimpangan struktur ini, klaim efisiensi berubah menjadi cara halus untuk mengukuhkan dominasi aktor bermodal besar atas ruang kebijakan yang seharusnya juga dimiliki warga di tingkat lokal.

Dalam banyak program lelang *utility scale* untuk energi terbarukan, klaim "netralitas" ekonomi sering dikaitkan dengan ide bahwa pemerintah hanya perlu memastikan prosedur yang transparan, tanpa memihak teknologi, asal investor, atau skala proyek. Narasi ini mengasumsikan bahwa semua pelaku memulai dari garis start yang sama, padahal kapasitas teknis dan finansial sangat timpang. Perusahaan multinasional membawa tim ahli hukum, insinyur, dan analis risiko, sementara pelaku lokal sering kali hanya mengandalkan pengalaman teknisi lapangan dan pengetahuan komunitas. Ketika harga menjadi satu-satunya kriteria utama, dimensi lain seperti kepemilikan lokal, distribusi manfaat, dan pembelajaran sosial terpinggirkan. Dari perspektif filsafat kekuasaan, netralitas harga justru menjadi teknik untuk menyamarkan keberpihakan struktural pada modal besar di balik bahasa "kompetisi sehat".

Konstruksi "efisiensi" dalam lelang juga sangat dipengaruhi oleh cara risiko dibagi antara negara, pengembang,

dan lembaga keuangan. Istilah *risk allocation* merujuk pada pembagian siapa yang menanggung kerugian ketika terjadi keterlambatan proyek, perubahan regulasi, atau fluktuasi kurs. Desain kontrak yang rumit—misalnya skema *take or pay* atau klausul *termination* yang berat sebelah—biasanya dinegosiasikan dengan logika perlindungan investor besar. Pelaku kecil dan lokal cenderung tidak punya posisi tawar untuk menegosiasikan klausul ini, apalagi memahami dampak jangka panjangnya. Akibatnya, ketika kebijakan lelang mengagungkan efisiensi biaya tanpa menimbang ketimpangan kapasitas negosiasi, kompetisi harga berubah menjadi struktur yang mensistematisasi transfer risiko ke pihak yang paling lemah dalam rantai produksi energi.

Anggapan bahwa pasar menciptakan *level playing field* mengabaikan fakta bahwa akses terhadap informasi, waktu, dan keahlian adalah bentuk modal yang tidak didistribusikan secara merata. Istilah *information asymmetry* berarti sebagian pelaku memiliki informasi lebih lengkap dibanding pihak lain, misalnya tentang rencana jaringan, prioritas pembangunan transmisi, atau kecenderungan regulator. Perusahaan besar sering memiliki staf khusus yang memantau rancangan regulasi, sementara pelaku lokal hanya menerima informasi ketika semua persyaratan sudah final dan sulit dinegosiasikan. Dalam konteks ini, kompetisi harga bukan lagi semata kompetisi efisiensi teknis, tetapi kompetisi kedalaman akses pada negara dan birokrasi. Netralitas ekonomi yang diklaim justru menyembunyikan bagaimana sebagian pelaku bermain di lapangan yang jauh lebih terhubung dengan pusat pengambilan keputusan.

Desain lelang dan regulasi penunjangnya selalu berkelindan dengan kebijakan energi, terutama melalui syarat pra-kualifikasi, skema jaminan, dan mekanisme pemilihan lokasi prioritas. Ketika aturan mensyaratkan kapasitas

pembangkit minimum yang sangat besar, atau mewajibkan rekam jejak proyek multi-megawatt, pelaku kecil praktis tersisih sebelum kompetisi harga dimulai. Istilah *prequalification requirements* merujuk pada serangkaian persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi sebelum penawaran harga boleh diajukan; jika persyaratan ini disusun tanpa mempertimbangkan kapasitas aktor lokal, maka kebijakan tampak netral tetapi pada praktiknya bersifat eksklusif. Di sisi lain, bundling wilayah ke satu paket lelang besar seringkali membuat proyek yang seharusnya bisa dikelola oleh komunitas lokal berubah menjadi ladang investasi bagi konsorsium multinasional.

Banyak studi menunjukkan bahwa transisi energi yang mengandalkan kompetisi harga semata dapat memperdalam posisi pinggiran wilayah pedesaan dan komunitas yang kekurangan kuasa politik, meskipun secara resmi mereka disebut sebagai "penerima manfaat" pembangunan infrastruktur. O'Sullivan dan kolega menggambarkan bagaimana transisi rendah karbon justru melahirkan *energy peripheralization*, yaitu situasi ketika daerah yang kaya sumber daya energi tetap berada pada posisi lemah dalam tata kelola dan distribusi manfaat (O'Sullivan et al., 2020). Dalam skema lelang, desa bisa menjadi lokasi turbin angin atau pembangkit surya, tetapi kepemilikan proyek, lapangan kerja berkualitas, dan keputusan harga listrik tetap dikendalikan dari pusat. Ketimpangan ini menegaskan bahwa efisiensi biaya tidak otomatis sejalan dengan keadilan ruang dan demokratisasi penguasaan energi.

Dari perspektif ekonomi politik, lelang dan mekanisme pasar dalam sektor listrik dapat dipahami sebagai instrumen untuk merawat konfigurasi kekuasaan tertentu. Istilah *market power* merujuk pada kemampuan sebagian pelaku untuk mempengaruhi harga atau hasil pasar demi kepentingannya

sendiri. Dalam banyak sistem, aktor inilah yang ikut terlibat dalam perumusan desain pasar, baik melalui forum konsultasi formal maupun lobi yang tidak terlihat publik. Mereka mendorong aturan yang menguntungkan skala usaha besar, seperti ukuran proyek minimum yang tinggi, periode kontrak panjang yang mensyaratkan neraca keuangan kuat, atau ketentuan teknis yang hanya dapat dipenuhi teknologi tertentu. Dengan cara itu, kompetisi harga yang tampak terbuka justru menjadi arena yang dipagari oleh kriteria yang dirumuskan oleh dan untuk kepentingan pemain dominan.

Ketika pemerintah menargetkan akselerasi kapasitas energi terbarukan, mereka sering memilih lelang dengan argumen bahwa metode ini menghindari "subsidi berlebihan" dan memaksa pengembang menekan biaya secara agresif. Padahal, bagi pelaku kecil dan lokal, penurunan tarif yang ekstrem sering berujung pada margin keuntungan tipis yang tidak cukup untuk menutupi biaya sosial, seperti konsultasi dengan warga, pelatihan pemeliharaan, atau skema bagi hasil yang adil. Bila kapasitas lelang dikonsentrasikan pada proyek raksasa, koperasi energi desa dan usaha lokal hanya menjadi penonton yang menerima dampak lingkungan tanpa menikmati kedaulatan atas produksi listrik. Dengan demikian, logika efisiensi biaya yang diukur semata dari tarif per kilowatt-jam justru mengaburkan potensi energi terbarukan sebagai medium distribusi kuasa dan kemandirian komunitas.

Kompleksitas administratif juga memainkan peran besar dalam membatasi akses pelaku kecil terhadap kompetisi harga. Formulir penawaran sering menggunakan bahasa teknis dan hukum yang sulit dipahami, sehingga pelaku lokal perlu menyewa konsultan *project finance*—istilah yang merujuk pada pembiayaan proyek berdasarkan arus kas masa depan, sesuatu yang rumit bagi mereka yang tidak terbiasa dengan sistem perbankan modern. Selain itu, tenggat waktu yang pendek dan

persyaratan dokumentasi yang tebal cenderung menguntungkan perusahaan yang memiliki tim internal besar. Di pihak lain, komunitas lokal yang masih belajar memahami bisnis listrik berjuang menyeimbangkan proses konsultasi warga, perizinan, dan penyusunan dokumen penawaran. Di sini terlihat bagaimana "biaya masuk" ke pasar tidak hanya berbentuk rupiah, tetapi juga kapasitas kelembagaan dan pengetahuan teknis yang tidak dimiliki secara merata.

Dari sudut pandang filsafat kekuasaan, kompetisi harga bekerja sebagai teknik *governmentality* yang membentuk cara pelaku kecil memaknai dirinya sendiri di dalam sistem. Mereka dipaksa menginternalisasi standar kinerja yang dirumuskan oleh dunia keuangan dan regulator pusat, sehingga keberhasilan diukur dari kapasitas menekan tarif serendah mungkin, bukan dari kemampuan memperkuat kemandirian komunitas atau menjaga integritas ekologi. Ketika gagal memenangkan lelang, pelaku lokal cenderung menyalahkan diri karena dianggap "tidak cukup efisien", tanpa sempat mempertanyakan desain aturan yang sejak awal memang tidak memedulikan batas kemampuan mereka. Dengan demikian, kompetisi harga bukan hanya mekanisme alokasi sumber daya, tetapi juga rejim kebenaran yang mendefinisikan apa itu proyek "layak" dan siapa yang pantas mengelola infrastruktur energi di wilayahnya sendiri.

Di Indonesia, diskursus ketahanan iklim dan transisi energi mulai menyoroti perlunya kebijakan energi yang tidak hanya mengejar penurunan emisi, tetapi juga membangun sistem energi yang tangguh dan inklusif. Studi tentang sistem energi yang berketahanan iklim menekankan bahwa perluasan kapasitas pembangkit harus disertai reformasi regulasi dan inovasi pembiayaan agar pelaku lokal dapat berpartisipasi dalam proyek terdesentralisasi, bukan sekadar menjadi konsumen pasif (Setiawan et al., 2025). Dalam konteks lelang,

hal ini berarti merancang prosedur yang mempertimbangkan keterbatasan akses permodalan, kemampuan teknis, serta kebutuhan pendampingan kelembagaan bagi komunitas. Jika tidak, logika kompetisi harga akan terus mendorong konsentrasi aset energi pada sedikit kelompok, sementara tujuan pembangunan berkelanjutan dan keadilan iklim hanya tinggal slogan di dokumen perencanaan.

Salah satu jawaban yang sering diajukan terhadap persoalan eksklusi pelaku kecil adalah desain lelang dengan skema *set-aside* atau *quota* bagi proyek komunitas, misalnya membagi kapasitas menjadi blok-blok kecil yang hanya boleh diikuti koperasi atau usaha lokal. Secara teori, ini membuka ruang bagi aktor baru. Namun tanpa dukungan pendanaan murah, akses informasi, dan bantuan teknis, kebijakan semacam itu mudah berubah menjadi simbolisme belaka. Koperasi energi desa bisa saja memenangkan blok kecil, tetapi terjebak pada kesulitan *financial closure*—yakni tahap ketika seluruh pendanaan sudah disepakati dan dikunci—karena bank masih menganggap mereka berisiko tinggi. Dalam situasi ini, negara seakan-akan sudah "memberi kesempatan", padahal struktur keuangan dan regulasi lain tetap berpihak pada logika akumulasi modal skala besar.

Perspektif lain yang penting adalah bagaimana desentralisasi infrastruktur listrik menggeser konfigurasi kekuasaan antara negara, perusahaan besar, dan komunitas. Penelitian tentang komunitas energi menunjukkan bahwa munculnya aktor baru dapat mengubah pola koalisi politik, meski kemenangan kebijakan konkret tidak selalu mudah diraih (Brisbois, 2020). Jika lelang dirancang tanpa mengakui dinamika ini, maka peluang untuk menggunakan desentralisasi sebagai sarana pendistribusian kuasa akan terlewatkan. Sebaliknya, ketika kerangka kompetisi harga sengaja mengakomodasi komunitas dan usaha lokal melalui pendampingan kelembagaan serta struktur kontrak yang ramah

risiko, desentralisasi bukan hanya berarti lebih banyak titik pembangkit, tetapi juga lebih banyak subjek politik yang terlibat dalam penentuan masa depan sistem energi.

Di banyak negara, target kapasitas energi terbarukan yang ambisius seringkali dicapai melalui kombinasi lelang skala besar dan skema integrasi jaringan yang diprioritaskan untuk proyek-proyek raksasa. Model ini efektif menurunkan biaya rata-rata listrik, tetapi menyisakan pertanyaan serius mengenai distribusi manfaat dan beban. Komunitas lokal bisa mengalami perubahan lanskap, kebisingan, atau dampak lain tanpa mendapatkan porsi yang adil dari nilai ekonomi yang diciptakan. Jika kompetisi harga terus dijadikan tolok ukur utama keberhasilan, maka negara berisiko membangun sistem energi yang hijau dari sisi karbon tetapi tetap timpang dari sisi kuasa. Pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa rupiah per kilowatt-jam yang dihemat, melainkan siapa yang sungguh-sungguh diundang menjadi bagian dari transisi tersebut.

Dengan demikian, ketegangan antara kompetisi harga dan akses pelaku kecil serta lokal mengungkap lapisan-lapisan kekuasaan yang tertanam dalam desain lelang dan mekanisme pasar listrik. Klaim netralitas ekonomi runtuh ketika kita melihat bagaimana syarat pra-kualifikasi, distribusi risiko, dan biaya transaksi secara sistematis menyingkirkan aktor yang tidak memiliki modal finansial, pengetahuan teknis, atau jejaring politik yang kuat. Filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan mengajak kita membaca lelang bukan sebagai prosedur administratif belaka, tetapi sebagai teknologi kuasa yang membentuk siapa yang dihitung, siapa yang dipinggirkan, dan dengan cara apa masa depan energi ditentukan. Tantangannya adalah merumuskan desain kompetisi yang tetap mendorong efisiensi, namun secara sadar menata ulang struktur akses agar pelaku kecil dan lokal tidak lagi sekadar menjadi objek, melainkan subjek penuh dalam arena transisi energi.

10.3 Risiko *Underbidding*, Kegagalan Proyek, dan Stabilitas Sistem

Lelang kapasitas dalam sistem ketenagalistrikan sering dipromosikan sebagai cara paling efisien untuk memilih proyek dengan biaya terendah, seolah-olah kalkulasi harga dapat menyaring semua risiko dan ketidakpastian. Namun, di balik tabel penawaran dan algoritma penentuan pemenang, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar: siapa yang dipaksa menanggung risiko ketika penawar "menang terlalu murah", proyek gagal dibangun, atau hanya beroperasi sebagian dari yang dijanjikan. *Underbidding*—strategi menawar dengan harga sangat rendah, bahkan di bawah biaya realistis—bukan sekadar deviasi individual, tetapi bisa menjadi konsekuensi langsung dari desain lelang yang menekankan kompetisi harga ekstrem tanpa perlindungan memadai. Di titik ini, persoalan bukan lagi teknis, melainkan etis dan politis: bagaimana negara, regulator, dan pelaku pasar membagi risiko kegagalan proyek antara investor, konsumen, dan sistem kelistrikan secara keseluruhan, dan sejauh mana bahasa "efisiensi" dipakai untuk mengaburkan ketimpangan pembagian risiko tersebut.

Risiko *underbidding* dalam lelang energi tidak muncul dalam ruang hampa; ia diproduksi oleh imajinasi kebijakan yang menganggap masa depan dapat diringkas ke dalam angka, skenario, dan probabilitas kegagalan yang dapat dikendalikan. Dalam praktik, perusahaan sering kali terjebak dalam dilema: jika mereka menawar realistis, mereka kalah; jika mereka ikut menawar sangat rendah, mereka berhadapan dengan tekanan finansial dan teknis untuk merealisasikan proyek di bawah kondisi yang nyaris mustahil. Di sini, rasionalitas ekonomi yang tampaknya netral justru mendorong praktik spekulatif yang mengancam stabilitas sistem. Negara, lewat regulasi dan kontrak, mengatur bentuk-bentuk spekulasi mana yang dapat diterima, sekaligus menentukan sejauh mana kegagalan akan

dipikul investor atau diam-diam dialihkan kepada publik melalui penundaan pasokan, subsidi terselubung, atau kenaikan tarif di masa depan.

Dalam banyak skema lelang untuk kapasitas pembangkit *energi terbarukan*, *underbidding* sering dibenarkan sebagai "harga yang akan disesuaikan nanti" melalui renegosiasi, perubahan desain, atau penurunan spesifikasi teknis proyek. Secara formal, lelang tampak menghasilkan "harga rekor terendah", yang kemudian digunakan pemerintah untuk mengklaim keberhasilan di hadapan publik dan lembaga internasional. Namun, secara material, harga super-rendah tersebut acap kali hanya dapat dicapai dengan menumpuk risiko di ujung rantai: kontraktor kecil, pemasok lokal, pekerja, dan komunitas yang bergantung pada keberhasilan proyek. Ketika proyek tidak tercapai tepat waktu, atau sama sekali tidak terealisasi, risiko sistemik ini muncul dalam bentuk pasokan listrik yang lebih ketat, penundaan target bauran energi, serta meningkatnya kebutuhan intervensi darurat dari negara yang ironisnya justru menambah beban fiskal dan ketidakpastian regulasi di masa berikutnya.

Studi-studi tentang transisi energi menunjukkan bahwa kegagalan proyek dan ketidakpastian investasi tidak jatuh secara merata, melainkan sangat dipengaruhi oleh posisi geografis dan politik komunitas yang terlibat. O'Sullivan, Golubchikov, dan Mehmood (2020) menunjukkan bagaimana komunitas pedesaan di Wales mengalami *energy peripheralization*: mereka menjadi lokasi proyek, tetapi bukan penerima utama manfaat, sekaligus menanggung kerentanan ketika investasi tidak berjalan sebagaimana dijanjikan (O'Sullivan et al., 2020). Dalam konteks lelang, pola serupa dapat terjadi ketika wilayah-wilayah tertentu dijadikan "laboratorium risiko", tempat penawaran agresif diuji dan proyek dengan struktur pembiayaan paling rapuh dipaksakan. Ketika proyek-

proyek ini gagal, komunitas lokal menghadapi infrastruktur mangkrak, peluang kerja yang hilang, dan reputasi wilayah yang menurun di mata investor, sementara aktor yang lebih kuat dapat beralih ke skema atau lokasi lain tanpa menanggung konsekuensi yang sebanding.

Secara teknis, desain lelang sering dipresentasikan sebagai sekumpulan aturan objektif: prasyarat kualifikasi, jaminan pelaksanaan, tenggat waktu konstruksi, dan skema penalti. Namun dalam praktik, setiap detail aturan tersebut adalah keputusan politis tentang bagaimana risiko dibagi sepanjang rantai nilai: dari pemilik modal, pengembang, dan kontraktor hingga operator sistem dan konsumen. Ketika jaminan pelaksanaan relatif kecil dan pengawasan lemah, *underbidding* menjadi strategi rasional: perusahaan dapat "membeli opsi" untuk mengembangkan proyek dengan modal komitmen minimal, sambil menunggu apakah kondisi pasar, harga teknologi, atau dukungan pemerintah akan menguntungkan. Jika situasi memburuk, mereka dapat menarik diri dengan kerugian terbatas, sementara sistem harus mencari pengganti di tengah waktu yang kian sempit. Di sinilah terlihat bahwa lelang tidak sekadar memilih pemenang, tetapi menyusun lanskap risiko bagi seluruh sistem.

Dalam kerangka *kebijakan energi*, lelang sering dijustifikasi sebagai cara untuk memindahkan risiko dari negara ke pasar, dengan asumsi bahwa pelaku swasta lebih mampu mengelola ketidakpastian biaya dan teknologi. Namun, pemindahan risiko ini tidak pernah sepenuhnya berhasil; ia hanya mengubah bentuk dan lokasi risiko tersebut. Ketika terlalu banyak proyek pemenang lelang yang tidak terealisasi, negara terpaksa melakukan perubahan regulasi yang drastis, mengeluarkan tender baru, atau memberikan konsesi tambahan untuk menyelamatkan pasokan listrik dan target transisi. Setiap perubahan mendadak memperbesar ketidakpastian kebijakan

dan mengangkat kembali pertanyaan tentang legitimasi rezim regulasi yang sebelumnya mengklaim netralitas ekonomi. Dengan demikian, lelang bukan sekadar instrumen teknis, melainkan arena di mana kekuasaan negara dinegosiasikan ulang, terutama terkait siapa yang "wajar" menanggung kegagalan dan siapa yang layak mendapat perlindungan ketika pasar tidak berjalan sebagaimana diasumsikan.

Risiko kegagalan proyek akibat *underbidding* juga merambat ke dalam dunia keuangan. Bank dan lembaga pembiayaan bergantung pada proyeksi arus kas yang realistis untuk menilai kelayakan kredit; ketika harga jual listrik yang dijanjikan dalam kontrak pemenang lelang terlalu rendah, celah antara arus kas yang diharapkan dan biaya aktual menjadi terlalu besar. Akibatnya, proyek mengalami penundaan panjang karena negosiasi ulang dengan kreditur, atau sama sekali tidak mencapai *financial close*. Proyek yang mangkrak ini tidak hanya memengaruhi neraca pengembang, tetapi juga perencanaan kapasitas sistem tenaga yang sudah mengandalkan tanggal operasi komersial tertentu. Di sini tampak bahwa klaim "efisiensi" lelang berubah menjadi jebakan: negara mendapat angka harga yang tampak bagus di atas kertas, tetapi sistem justru harus mengelola konsekuensi penundaan dan harus menyiapkan kapasitas cadangan yang lebih mahal sebagai jaring pengaman.

Stabilitas sistem kelistrikan tidak hanya diukur dari kecukupan kapasitas terpasang, tetapi juga dari keandalan realisasi proyek dan konsistensi sinyal kebijakan. Ketika banyak proyek pemenang lelang tidak aktif tepat waktu, operator sistem harus mengandalkan pembangkit cadangan berbasis fosil yang lebih mudah dioperasikan, memperpanjang umur infrastruktur lama, atau menunda pensiun unit yang seharusnya sudah dihentikan. Hal ini menimbulkan paradoks: instrumen yang dirancang untuk mempercepat dekarbonisasi justru

memperlambat pengurangan emisi karena risiko *underbidding* dan kegagalan proyek tidak dikendalikan dengan baik. Selain itu, ketidakpastian kronis ini dapat membuat regulator enggan menetapkan standar yang lebih ambisius, karena mereka khawatir sistem tidak mampu memenuhi beban puncak jika proyek baru kembali tertunda. Dengan kata lain, desain lelang dan manajemen risiko yang buruk dapat berbalik mengunci sistem dalam ketergantungan pada teknologi lama.

Narasi resmi sering menonjolkan bahwa lelang adalah cara paling efektif untuk menghemat biaya transisi, khususnya untuk memperluas kapasitas *energi terbarukan* dalam waktu singkat. Namun, narasi ini cenderung menyembunyikan fakta bahwa hanya pelaku berskala besar dengan akses modal murah dan portofolio global yang benar-benar sanggup bermain dalam logika *underbidding* jangka panjang. Perusahaan-perusahaan ini bisa menyeimbangkan kerugian di satu negara dengan keuntungan di negara lain, atau mengandalkan instrumen lindung nilai finansial yang tidak tersedia bagi pengembang lokal. Sementara itu, komunitas dan koperasi energi yang lebih kecil, meskipun mungkin lebih selaras dengan tujuan keadilan sosial dan kedaulatan lokal, tersingkir karena tidak dapat mengambil risiko menawar di bawah biaya realistis. Pada titik ini, lelang yang diklaim netral justru memperkuat konsentrasi kekuasaan ekonomi dan mengerdilkan keragaman aktor dalam transisi energi.

Perspektif tentang hubungan antara transisi energi, kekuasaan politik, dan model tata kelola menegaskan bahwa desain instrumen pasar merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengarahkan arah perubahan sistem. Bryant, Straker, dan Wrigley (2023) menunjukkan bagaimana pemerintah dapat bertindak sebagai *government keystone* yang merancang model bisnis dan tata kelola baru demi mendorong penetrasi tinggi VRE, tetapi juga berpotensi memperkokoh

posisi aktor yang sudah dominan (Bryant et al., 2023). Dalam konteks lelang, hal ini berarti negara tidak hanya "melempar bola" ke pasar, melainkan membingkai ruang kemungkinan: seberapa jauh risiko boleh digeser ke pengembang, besaran penalti bagi proyek gagal, dan seberapa kuat perlindungan sistemik yang disediakan bila lelang tidak menghasilkan kapasitas yang benar-benar dapat diandalkan. Dengan demikian, persoalan *underbidding* tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan tentang jenis masa depan energi seperti apa yang sedang direkayasa oleh negara bersama koalisi ekonomi yang mengelilinginya.

Dari sudut pandang keadilan, risiko kegagalan proyek dan ketidakstabilan sistem tidak pernah terbagi secara simetris. Konsumen rumah tangga dengan pendapatan rendah, pelaku usaha kecil, dan komunitas di wilayah periferal sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menerima kualitas layanan yang menurun, pemadaman bergilir, atau lonjakan tarif yang diperlukan untuk menutup lubang keuangan akibat desain lelang yang keliru. Ketika risiko makro yang dihasilkan oleh *underbidding* akhirnya "disosialisasikan" melalui tarif atau subsidi, argumen bahwa lelang menghemat uang publik menjadi patut dipertanyakan. Lebih jauh lagi, warga jarang diundang untuk ikut menilai trade-off antara harga listrik jangka pendek yang rendah dan jaminan realisasi proyek jangka panjang. Ketiadaan ruang deliberatif ini memperkuat karakter teknokratis kebijakan, di mana pakar dan ekonom mendefinisikan risiko secara sempit, sementara risiko sosial dan politik yang dialami warga nyaris tak terlihat dalam matriks evaluasi.

Desain *kebijakan energi* yang bertumpu pada lelang kerap dibungkus dengan istilah-istilah teknis seperti "penemuan harga" atau "penyelarasan insentif", yang memberi kesan bahwa pilihan kebijakan tersebut bersifat netral dan tak terhindarkan.

Padahal, setiap keputusan tentang parameter lelang—mulai dari ukuran paket proyek, syarat prakualifikasi, hingga aturan penalti—mencerminkan keberpihakan tertentu terhadap tipe pelaku dan model bisnis. Dengan cara ini, epistemologi risiko dalam kebijakan tidak hanya membatasi imajinasi alternatif, tetapi juga mengendalikan apa yang boleh dihitung, dan apa yang boleh diabaikan. Misalnya, risiko sosial akibat konsentrasi kepemilikan atau marginalisasi pelaku lokal tidak masuk dalam fungsi tujuan lelang, sehingga sulit diperdebatkan sebagai dasar perubahan desain. Bahasa teknis berperan sebagai filter yang menyaring argumen, membuat sebagian besar kritik warga dan komunitas tampak tidak relevan karena "tidak sesuai indikator".

Jika dilihat sebagai teknologi kuasa, lelang berfungsi untuk mendisiplinkan perilaku pengembang melalui janji akses ke pasar dan ancaman penalti finansial. Namun disiplin ini tidak seragam: perusahaan besar memiliki ruang tawar yang lebih besar untuk menangguhkan kontrak, mengancam arbitrase, atau menggunakan kapasitas lobi ketika kondisi berubah tidak menguntungkan. Sebaliknya, pengembang kecil dan menengah sering kali terjebak dalam posisi rentan, di mana satu proyek gagal dapat mengguncang keseluruhan portofolio mereka. Ketimpangan daya tawar ini menciptakan semacam *governmentality* yang tidak terlihat: para pelaku belajar untuk menyesuaikan diri dengan preferensi regulator dan investor institusional, bahkan sebelum aturan resmi berubah. Dalam konteks ini, risiko *underbidding* tidak hanya persoalan strategi agresif, tetapi juga cermin dari bagaimana struktur insentif dan relasi kuasa mendorong pelaku untuk mengambil risiko yang mungkin tidak mereka pilih dalam tatanan institusional yang lebih setara.

Mengurangi risiko *underbidding* dan kegagalan proyek memerlukan lebih dari sekadar menaikkan nilai jaminan pelaksanaan atau memperketat sanksi kontraktual. Negara dapat merancang lelang dengan kombinasi batas bawah dan

batas atas harga, kriteria evaluasi non-harga yang memberi bobot pada kualitas desain, kapasitas teknis, dan manfaat lokal, serta tahapan pra-kualifikasi yang benar-benar memeriksa kelayakan finansial dan rekam jejak pengembang. Selain itu, desain lelang dapat memasukkan mekanisme *realization track record*, di mana keberhasilan atau kegagalan proyek sebelumnya memengaruhi peluang menang di masa depan. Pendekatan ini menggeser fokus dari sekadar memenangkan kompetisi harga ke kinerja jangka panjang. Namun, langkah-langkah tersebut juga harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas, agar tidak berubah menjadi hambatan masuk yang hanya menguntungkan pelaku besar dan semakin mempersempit ruang bagi inovasi serta partisipasi aktor lokal.

Dalam kerangka transisi *energi terbarukan* yang berkeadilan, pertanyaan utama bukan hanya bagaimana menurunkan biaya, tetapi bagaimana menata ulang distribusi risiko dan manfaat di seluruh sistem. Lelang yang dirancang tanpa memperhitungkan risiko *underbidding* cenderung menghasilkan struktur pembangunan energi yang rapuh: proyek-proyek yang tampak murah di atas kertas tetapi sulit direalisasikan, ketergantungan pada beberapa pengembang raksasa, dan kerentanan terhadap gejolak makroekonomi. Sebaliknya, instrumen yang mengakui biaya nyata teknologi, kondisi lokal, dan kapasitas kelembagaan dapat menghasilkan daya saing yang lebih "jujur", di mana harga tidak dipisahkan dari keberlanjutan finansial dan sosial. Hal ini memerlukan keberanian politik untuk menolak godaan angka spektakuler dan memilih stabilitas jangka panjang yang mungkin tampak kurang mengesankan secara retoris, tetapi lebih kokoh bagi sistem dan warga yang menggantungkan hidup pada keandalan listrik.

Pada akhirnya, risiko *underbidding*, kegagalan proyek, dan instabilitas sistem dalam lelang energi mengingatkan bahwa

klaim netralitas ekonomi selalu memiliki batas. Instrumen yang tampak sederhana—daftar penawar, algoritma pemilihan, kontrak standar—sesungguhnya memuat keputusan-keputusan normatif tentang siapa yang layak dipercaya, siapa yang boleh mengambil risiko besar, dan siapa yang akan menanggung konsekuensi ketika perhitungan keliru. Dengan membaca lelang sebagai teknologi kuasa, kita dapat melihat bahwa kritik bukan ditujukan pada pasar semata, tetapi pada cara negara memilih menggunakan pasar untuk mengatur relasi antara modal, teknologi, dan kehidupan sehari-hari warga. Subbagian ini, karenanya, mengajak pembaca untuk mempertanyakan bukan hanya desain teknis lelang, tetapi juga horizon politik yang menyertainya: masa depan seperti apa yang dianggap sah untuk dikejar, dan siapa yang diberi suara dalam menentukan risiko apa yang pantas diambil atas nama transisi energi.

10.4 Klaim Netralitas Pasar: Siapa yang Diuntungkan oleh Desain Lelang

Klaim bahwa pasar selalu netral dan bahwa lelang adalah mekanisme paling objektif untuk memilih proyek energi sering diperlakukan seolah-olah itu hukum alam ekonomi, bukan pilihan politik. Dalam wacana teknokratis, desain lelang digambarkan sekadar sebagai rumus harga yang menghubungkan penawar dan negara, tanpa menyentuh ranah keadilan sosial, relasi kelas, atau distribusi kuasa antara negara, korporasi, dan warga. Dalam subbab ini, kita justru mempertanyakan klaim tersebut: setiap aturan lelang—siapa yang boleh ikut, bagaimana syarat modal ditetapkan, bagaimana risiko dibagi, di mana proyek boleh dibangun—adalah keputusan normatif yang menghasilkan pemenang dan pecundang yang sangat konkret. Dengan kacamata filsafat kekuasaan, lelang bukan hanya alat alokasi sumber daya, melainkan teknologi kuasa yang membentuk siapa yang berhak

masuk ke arena kebijakan energi dan siapa yang secara sistematis tersingkir dari meja perundingan.

Untuk memahami bagaimana klaim netralitas itu bekerja, kita perlu membongkar cara kerja lelang energi secara sederhana. Banyak negara menggunakan reverse auction, yaitu lelang terbalik di mana pemerintah mengumumkan kebutuhan daya dan para pengembang berlomba menawarkan harga jual listrik serendah mungkin. Di belakang prosedur yang tampak teknis ini, terdapat parameter-parameter kunci: ambang batas kapasitas minimal, persyaratan track record (riwayat kinerja), jaminan keuangan, dan cara menentukan market clearing price (harga pemenang yang berlaku untuk seluruh pemenang). Istilah-istilah ini terdengar teknis, tetapi intinya sederhana: negara memutuskan seberapa besar risiko dan biaya yang dipindahkan kepada pengembang. Ketika persyaratan sangat berat dan rumit, hanya korporasi besar dengan akses modal dan keahlian hukum yang mampu bertahan, sementara komunitas lokal atau koperasi energi praktis tersingkir sejak tahap awal.

Dalam banyak desain lelang untuk energi listrik, pemerintah menyatakan bahwa skema ini bersifat teknologi-netral dan aktor-netral: siapa pun yang mampu menawarkan harga termurah untuk proyek energi akan menang, termasuk proyek berbasis energi fosil maupun energi terbarukan. Klaim ini terdengar rasional, namun menyembunyikan fakta bahwa aktor besar—dengan portofolio proyek global, akses pembiayaan murah, dan kemampuan menyerap kerugian jangka pendek—lebih mudah menurunkan harga dibandingkan pengembang kecil, apalagi inisiatif komunitas. Di atas kertas, harga termurah tampak sebagai ukuran objektif efisiensi, tetapi di lapangan ia sering berarti memaksakan skala proyek raksasa, standar kontrak kaku, dan risiko yang tidak seimbang bagi daerah pinggiran. Netralitas yang diklaim akhirnya berubah menjadi mekanisme seleksi yang halus: mereka yang sudah kuat

di dunia energi terbarukan ikut mengukuhkan dominasinya, sementara calon pemain baru hanya menjadi penonton di pinggir lapangan.

Dimensi kekuasaan dalam desain lelang menjadi semakin jelas ketika kita melihat bagaimana desentralisasi kelistrikan dan kemunculan komunitas energi berbenturan dengan struktur lembaga dan pasar yang telah mapan. Brisbois (2020) menunjukkan bahwa komunitas energi memang dapat menggeser struktur kuasa politik, tetapi kemenangan kebijakan yang nyata justru jarang terjadi karena tekanan kuat dari aktor mapan yang ingin mempertahankan kepemilikan dan kontrol terpusat atas infrastruktur listrik. Temuan ini membantu kita memahami bahwa lelang bukanlah arena kosong, melainkan medan pertempuran antara aktor yang sudah lama menikmati privilese regulasi dan pendatang baru yang mencoba memanfaatkan ruang transisi energi. Ketika kriteria lelang dirancang untuk menguntungkan skala besar, teknologi tertentu, atau profil risiko tertentu, netralitas pasar segera runtuh: desain lelang menjadi instrumen untuk mempertahankan bentuk kuasa yang lama sambil memakai bahasa efisiensi dan kompetisi yang tampak modern.

Salah satu sumber bias yang sering tersembunyi dalam klaim netralitas pasar adalah soal biaya transaksi, atau transaction costs, yaitu seluruh biaya tambahan di luar biaya teknis pembangunan proyek—misalnya biaya menyiapkan dokumen, menyewa konsultan hukum, dan mengikuti proses konsultasi publik. Dalam desain lelang yang kompleks, biaya transaksi bisa sangat tinggi sehingga hanya pengembang berpengalaman yang dapat mengikutinya tanpa terbebani. Bagi komunitas lokal dan perusahaan kecil, proses ini menjadi jebakan: mereka harus mengeluarkan biaya besar bahkan sebelum tahu apakah mereka akan menang. Di sini kita melihat bagaimana lelang yang tampaknya "keterbukaan" justru

berubah menjadi mekanisme penyaringan yang halus. Secara resmi, semua orang boleh ikut; secara praktis, hanya mereka yang memiliki kapasitas finansial dan administratif yang memadai yang bisa bertahan sampai tahap akhir.

Ketika lelang dijadikan instrumen utama dalam kebijakan energi, bahasa efisiensi sering kali menggantikan bahasa keadilan dan keberpihakan sosial. Dokumen kebijakan menyatakan bahwa lelang akan menurunkan biaya pengadaan listrik dan mengurangi beban fiskal negara, seolah-olah hanya dua indikator itu yang perlu dipertimbangkan. Padahal, kebijakan energi juga menentukan siapa yang mendapat akses listrik yang andal, siapa yang menanggung dampak lingkungan, dan siapa yang memperoleh peluang kerja baru. Ketika parameter lelang mengabaikan kewajiban manfaat lokal, kewajiban keterlibatan komunitas, atau kriteria pemerataan wilayah, maka pasar dilukiskan netral padahal secara sistematis mengabaikan wilayah pinggiran. Dengan cara inilah kebijakan energi dapat mendorong konsentrasi proyek di wilayah yang sudah maju, sementara daerah dengan kebutuhan tinggi tetapi kapasitas lemah terus tertinggal.

Mitologi netralitas harga juga perlu dibongkar. Harga pemenang lelang sering dipandang sebagai angka objektif yang mencerminkan biaya sebenarnya dari pembangkitan listrik. Namun harga itu adalah hasil dari seperangkat aturan: bagaimana risiko perubahan kurs dibagi, apakah ada jaminan pembelian jangka panjang, apakah ada capacity payment (pembayaran untuk ketersediaan daya, bukan hanya energi yang dihasilkan), dan bagaimana denda keterlambatan ditetapkan. Capacity payment terdengar teknis, tetapi intinya adalah skema pembayaran tambahan yang menjamin pendapatan pengembang meskipun energi tidak selalu diproduksi. Jika lelang dirancang memberikan jaminan seperti ini secara tidak proporsional pada aktor besar, maka mereka

menikmati keamanan pendapatan yang tidak dimiliki pemain kecil. Harga yang muncul di permukaan tetap disebut sebagai harga pasar, padahal ia adalah angka yang sudah ditopang oleh keberpihakan regulatif terhadap kelompok tertentu.

Pengalaman Brazil menunjukkan dengan jelas bagaimana desain kebijakan lelang dapat mengubah konfigurasi tata kelola sektor listrik, sekaligus membuka pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan. Werner dan Benites Lazaro (2023) menelusuri bagaimana kebijakan untuk mempromosikan sumber-sumber energi alternatif justru berjalan berdampingan dengan menguatnya peran agen swasta nasional dan internasional yang dapat membentuk arah kebijakan sesuai kepentingannya. Di tengah narasi transisi rendah karbon, lelang menjadi instrumen yang menyeleksi jenis aktor yang dapat memasuki pasar listrik dan menentukan di mana proyek akan berlokasi. Ketika aturan dan data teknis disusun oleh jejaring ahli yang dekat dengan korporasi besar, komunitas terdampak hanya ditempatkan sebagai objek konsultasi, bukan subjek yang mampu menegosiasikan struktur manfaat dan beban secara setara.

Klaim efisiensi yang mengiringi lelang juga sering mengabaikan pertanyaan tentang siapa yang menguasai rantai nilai energi terbarukan. Di atas kertas, lelang berhasil menurunkan tarif listrik dari proyek surya dan angin, sehingga transisi energi tampak lebih murah bagi negara. Namun jika pemenang lelang selalu adalah konsorsium besar yang mengendalikan pasokan turbin, panel, dan teknologi kontrol, maka keuntungan finansial justru terakumulasi pada pusat-pusat korporasi global, bukan pada komunitas lokal yang lahannya dipakai. Dalam perspektif energy justice—yakni pendekatan yang menekankan keadilan dalam manfaat, prosedur, dan pengakuan—hal ini berarti bahwa keuntungan dari investasi energi terbarukan mengalir ke kelompok yang

sudah mapan, sementara kelompok rentan hanya menanggung dampak sosial dan ekologis. Istilah energy justice terdengar abstrak, tetapi maknanya sederhana: siapa yang mendapat manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan apakah suara mereka setara dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan skema lelang untuk proyek-proyek listrik swasta membawa pertanyaan serupa mengenai distribusi kuasa dan akses. Ketika lelang dirancang untuk kapasitas besar yang terhubung ke jaringan utama, wilayah yang belum terjangkau jaringan kuat cenderung diabaikan karena secara komersial dianggap kurang menarik. Di banyak diskusi teknis, persoalan pembebasan lahan, dampak terhadap mata pencaharian lokal, dan kerentanan ekologi diposisikan sebagai "hambatan investasi", bukan sebagai indikator bahwa desain kebijakan sedang mengabaikan hak-hak warga. Padahal, jika paradigma kekuasaan dijadikan lensa utama, kita akan melihat bahwa lelang bukan hanya alat memilih proyek termurah, melainkan cara negara mengirim sinyal: siapa saja subjek kebijakan yang dianggap layak diajak bermitra, dan siapa yang cukup "diwakili" oleh kontrak antara pemerintah dan korporasi besar saja.

Desain lelang juga membentuk masa depan konfigurasi sistem energi melalui cara ia memperlakukan solusi skala kecil seperti microgrid, yaitu jaringan listrik lokal yang bisa berdiri sendiri atau terhubung ke jaringan utama. Secara teknis, microgrid dapat memperkuat ketahanan energi masyarakat terpencil, tetapi dalam banyak rancangan lelang, unit seperti ini tidak memenuhi skala minimum atau tidak sesuai standar teknis yang dirumuskan untuk proyek raksasa. Ketika aturan didesain hanya untuk proyek berkapasitas besar, maka solusi yang sebenarnya lebih sesuai dengan kebutuhan lokal tersingkir sejak awal. Secara politis, hal ini berarti negara menegaskan bahwa masa depan energi hanya akan didefinisikan oleh proyek-

proyek besar yang dapat dibaca dan diukur oleh model ekonomi makro, sementara praktik kecil yang lebih dekat dengan warga hanya diberi ruang sebagai program pilot, bukan bagian utama dari arsitektur sistem listrik.

Jika kita menganggap kebijakan energi sebagai ruang moral, bukan sekadar arena optimasi biaya, maka klaim netralitas pasar dalam desain lelang menjadi sangat problematik. Di sini, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah "berapa tarif listrik termurah yang bisa kita dapatkan?", melainkan "tarif macam apa, untuk siapa, dan dengan konsekuensi apa?". Desain lelang dapat memasukkan kriteria keadilan spasial, kewajiban kepemilikan lokal, atau porsi manfaat ekonomi yang wajib kembali ke komunitas sekitar proyek. Namun pilihan-pilihan tersebut jarang dipaparkan sebagai pilihan nilai; ia lebih sering disamarkan sebagai isu teknis. Dengan cara demikian, kebijakan energi menjauh dari ruang deliberasi publik dan masuk ke ruang tertutup para ahli, di mana istilah-istilah teknis menjadi bahasa yang menghalangi warga untuk bertanya: mengapa skema tertentu dipilih, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan?

Studi tentang ketahanan sistem energi Indonesia menegaskan pentingnya kombinasi antara kebijakan yang mendukung energi bersih, penguatan infrastruktur, dan desentralisasi sistem sebagai respons terhadap risiko iklim yang makin menguat. Setiawan dkk. (2025) menekankan bahwa transisi menuju sistem yang tangguh membutuhkan kebijakan yang mendorong kapasitas energi bersih, modernisasi infrastruktur, dan sistem terdesentralisasi untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan terpusat, sekaligus menguatkan tata kelola dan kolaborasi para pemangku kepentingan. Temuan semacam ini mengingatkan kita bahwa desain lelang tidak boleh berdiri terpisah dari agenda ketahanan dan keadilan: jika lelang hanya menyeleksi proyek termurah namun mengabaikan

kebutuhan adaptasi iklim dan penguatan kapasitas lokal, maka kita sedang membangun sistem yang rapuh secara sosial dan ekologis, meskipun angka-angka efisiensi jangka pendek terlihat mengesankan.

Dari sudut pandang filsafat kekuasaan, lelang dapat dibaca sebagai bentuk governmentality, yaitu cara negara mengatur kehidupan masyarakat bukan melalui perintah langsung, tetapi melalui penciptaan aturan, indikator, dan insentif yang mendorong orang menyesuaikan diri. Dalam governmentality, warga dan korporasi diarahkan untuk mengejar apa yang tampak sebagai "rasionalitas ekonomi", padahal rasionalitas itu telah didefinisikan terlebih dahulu oleh negara dan pakar. Ketika lelang dirancang sedemikian rupa sehingga hanya model bisnis tertentu yang dianggap layak, aktor lain dipaksa menyesuaikan diri atau tersingkir. Bahasa efisiensi, risiko, dan bankability (keterterimaan proyek bagi lembaga keuangan) kemudian berfungsi sebagai tirai yang menutupi dimensi etis: pertanyaan tentang keadilan, pengakuan, dan hak warga dikemas ulang menjadi risiko reputasi atau hambatan prosedural yang perlu "diminimalkan", bukan isu normatif yang membutuhkan dialog politik yang terbuka.

Dalam wacana transisi energi global, lelang kerap dipromosikan sebagai bukti bahwa negara telah berpihak pada energi terbarukan, karena tarif listrik dari surya dan angin berhasil ditekan. Namun jika kita hanya berhenti pada angka tarif, kita melewatkan pertanyaan penting: energi macam apa yang sedang dibangun, di mana, dan di bawah kendali siapa. Lelang yang disebut teknologi-netral bisa saja tetap memihak pada teknologi tertentu yang sesuai dengan kepentingan pemasok besar, atau pada konfigurasi jaringan yang lebih menguntungkan pusat-pusat industri daripada desa-desa terpencil. Di sini, mengkritik klaim netralitas pasar bukan berarti menolak lelang secara total, tetapi menuntut agar

rancangan lelang secara eksplisit mengakui preferensi nilai yang ia bawa: apakah ia memberi ruang bagi komunitas lokal untuk menjadi produsen energi terbarukan, atau hanya menempatkan mereka sebagai konsumen dan penerima dampak semata.

Pertanyaan "siapa yang diuntungkan oleh desain lelang?" mengajak kita menggeser fokus dari angka tarif ke peta relasi sosial dan politik yang dibentuk oleh instrumen kebijakan. Lelang bukan papan kosong tempat aktor rasional bertemu; ia adalah arena yang diatur sedemikian rupa sehingga beberapa jenis aktor lebih mudah menang daripada yang lain. Dengan menyadari hal ini, kita dapat melihat klaim netralitas pasar sebagai bagian dari strategi wacana yang berusaha menghilangkan jejak kekuasaan dari instrumen kebijakan yang sangat politis. Tugas filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan adalah mengembalikan jejak itu ke dalam analisis: menelusuri bagaimana lelang mengatur siapa yang boleh hadir, bagaimana suara mereka dihitung, dan bagaimana risiko serta manfaat dibagi. Hanya dengan cara itulah lelang dapat direka ulang, bukan sebagai mekanisme yang pura-pura netral, tetapi sebagai medan yang secara sadar dirancang untuk mendukung keadilan sosial, ekologis, dan demokratis dalam transisi energi.

10.5 Kombinasi Instrumen: Lelang, Kontrak Jangka Panjang, dan Jaminan Negara

Kombinasi instrumen kebijakan dalam sektor energi sering dipresentasikan seolah-olah merupakan formula teknis yang netral, padahal di balik susunan *auction*, kontrak jangka panjang, dan jaminan negara selalu bekerja kalkulasi kekuasaan yang menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang dipertahankan, dan siapa yang dibiarkan tersingkir. Dalam bab ini, kita melihat bagaimana kombinasi instrumen itu tidak sekadar mengatur aliran listrik dan uang, tetapi juga mendistribusikan risiko, menentukan horizon waktu investasi,

serta membentuk struktur ketaatan baru antara negara, pasar, dan warga. Ketika pemerintah merancang paket instrumen, ia sejatinya sedang merancang arsitektur kepatuhan: syarat pra-kualifikasi, jangka waktu kontrak, skema jaminan, dan tata cara penentuan pemenang menjadi mekanisme seleksi yang sangat efektif. Dengan demikian, kombinasi lelang, kontrak jangka panjang, dan jaminan negara perlu dibaca sebagai teknologi kuasa yang menjahit ulang hubungan antara otoritas publik, korporasi besar, dan komunitas lokal.

Lelang dalam sektor energi biasanya dibingkai sebagai mekanisme pasar yang efisien dan transparan, di mana harga ditentukan oleh kompetisi dan bukan oleh negosiasi politik tertutup. Namun, dari perspektif filsafat kekuasaan, lelang justru membakukan bentuk-bentuk tertentu dari rasionalitas ekonomi, misalnya asumsi bahwa risiko dapat diukur, diperhitungkan, dan dipindahkan kepada pelaku yang dinilai "paling efisien". Di sinilah kontrak jangka panjang dan jaminan negara masuk sebagai lapisan tambahan yang mengurangi ketidakpastian, tetapi sekaligus memperkuat posisi aktor tertentu yang memiliki kapasitas finansial, teknologis, dan legal untuk berpartisipasi. Kombinasi instrumen itu membentuk medan permainan yang tampak seimbang di permukaan, tetapi sebenarnya menuntut prasyarat modal, pengetahuan, dan jaringan yang tidak dimiliki semua pihak. Dengan kata lain, lelang bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari tata bahasa kekuasaan yang mengutamakan logika investasi jangka panjang tertentu.

Dalam konteks *energi terbarukan*, kombinasi lelang, kontrak jangka panjang, dan jaminan negara sering dipromosikan sebagai cara paling efektif untuk menurunkan biaya teknologi dan mempercepat pembangunan proyek skala besar. Pemerintah menawarkan kontrak pasokan energi selama 15–30 tahun kepada pengembang yang memenangkan lelang,

sering kali disertai kepastian harga minimum agar proyek layak dibiayai lembaga keuangan. Di atas kertas, skema ini tampak ideal: negara mengatur, pasar merespons, dan teknologi bersih tumbuh. Namun secara filosofis, kita perlu bertanya: siapa yang mampu memasuki kompetisi jangka panjang seperti ini, dan dalam kondisi ketidakpastian iklim dan ekonomi yang besar, siapa yang disyaratkan untuk memikul risiko residual ketika asumsi perhitungan awal tidak terbukti? Di titik inilah instrumen-instrumen tersebut mengonstruksi kembali hierarki antara pelaku besar dan kecil.

Kajian tentang desentralisasi kelistrikan menunjukkan bahwa perubahan instrumen kebijakan dapat menggeser konfigurasi kekuasaan, bahkan ketika bahasa yang dipakai tetap menekankan efisiensi dan rasionalitas ekonomi. Brisbois (2020) menunjukkan bagaimana pergeseran menuju sistem kelistrikan yang lebih terdesentralisasi membuka ruang bagi aktor-aktor baru, tetapi pada saat yang sama memicu pertarungan baru atas skala pengaturan, bentuk organisasi, dan hak untuk memengaruhi keputusan strategis. Dalam konteks kombinasi lelang dan kontrak jangka panjang, hal ini berarti bahwa meskipun secara formal prosedur terbuka bagi siapa saja, desain teknis seperti ukuran minimum proyek, persyaratan jaminan keuangan, atau kompleksitas dokumen penawaran dapat secara halus menyingkirkan inisiatif komunitas. Dengan demikian, desain instrumen menentukan bukan hanya siapa yang menang, tetapi siapa yang diperbolehkan hadir sebagai "pemain yang sah" di meja kebijakan.

Kontrak jangka panjang—misalnya *power purchase agreement (PPA)*, yaitu perjanjian pembelian listrik antara pengembang dan pembeli utama seperti perusahaan listrik negara—sering dijelaskan sebagai cara untuk memberikan kepastian pendapatan bagi investor dan stabilitas pasokan bagi sistem. Penjelasan ini benar, tetapi belum lengkap. Dari

kacamata kekuasaan, PPA adalah mekanisme penguncian (*lock-in*) yang mengikat sistem kepada kombinasi teknologi, aktor, dan asumsi permintaan tertentu selama puluhan tahun. Ketika negara atau perusahaan listrik menandatangani PPA dalam jumlah besar, mereka sekaligus membatasi ruang untuk perubahan radikal di masa depan, karena penghentian atau renegosiasi kontrak berpotensi memicu sengketa hukum dan biaya kompensasi yang sangat besar. Dengan demikian, kontrak jangka panjang berperan sebagai "konstitusi material" yang membatasi imajinasi kebijakan dan mengarahkan jalur transisi pada koridor yang dapat diterima oleh investor besar.

Jaminan negara—baik dalam bentuk penjaminan utang, surat jaminan pendapatan minimum, maupun *sovereign guarantee* atas kewajiban badan usaha milik negara—sering diposisikan sebagai instrumen pendukung untuk menurunkan biaya modal dan mempercepat investasi. Namun, ketika digabungkan dengan lelang dan PPA, jaminan ini juga mendistribusikan risiko secara politis: kegagalan proyek atau perubahan kondisi pasar pada akhirnya ditanggung oleh anggaran publik, sementara keuntungan dalam skenario normal dikumpulkan oleh pemilik aset. Di sini, "kebijakan energi" yang diklaim netral berubah menjadi arena penetapan prioritas moral dan fiskal: apakah layak risiko fiskal besar dialokasikan untuk mendukung proyek skala raksasa, sementara inisiatif kecil warga dan koperasi energi harus berjuang tanpa perlindungan serupa? Pertanyaan ini jarang muncul dalam dokumen teknis, tetapi justru menjadi inti persoalan keadilan dan tanggung jawab antaraktor.

Kombinasi instrumen ini juga bekerja sebagai alat pedagogis yang mengajarkan cara berpikir tertentu kepada birokrasi dan pelaku pasar. Ketika aparat negara terus-menerus dilatih untuk menilai keberhasilan melalui indikator seperti

harga per kilowatt-jam hasil lelang, tingkat partisipasi investor besar, dan percepatan tercapainya kapasitas terpasang, maka dimensi lain—seperti kedaulatan warga, distribusi manfaat, atau ketahanan sosial—cenderung dipinggirkan. Birokrasi belajar bahwa "kinerja baik" berarti menyelenggarakan lelang tepat waktu, menghasilkan harga yang menurun, dan meminimalkan komplain dari pemodal. Pada gilirannya, investor juga belajar bahwa keberhasilan diperoleh melalui kemampuan membaca sinyal negara, menyusun struktur pembiayaan rumit, dan memaksimalkan pemanfaatan jaminan negara. Keduanya saling mengukuhkan logika teknokratis yang memprioritaskan stabilitas finansial di atas pertanyaan filosofis mengenai tujuan kolektif transisi energi.

Dalam literatur mengenai keadilan energi, semakin banyak studi yang menyoroti bagaimana desain kebijakan dapat memperkuat ketimpangan ruang dan kelas sosial. O'Sullivan dkk. (2020) menekankan bahwa transisi rendah karbon kerap menghasilkan "periferalisasi energi" di wilayah pedesaan, di mana sumber daya alam dan ruang terbuka dimanfaatkan untuk proyek energi, sementara manfaat ekonomi dan politik terkonsentrasi di pusat. Jika kita letakkan temuan ini dalam kerangka kombinasi lelang, PPA, dan jaminan negara, kita dapat melihat bagaimana wilayah tertentu menjadi lokasi "penyedia risiko": mereka menanggung dampak sosial, ekologis, dan visual dari infrastruktur energi, sementara posisi tawar mereka terhadap isi kontrak dan distribusi manfaat amat terbatas. Dengan kata lain, arsitektur instrumen yang tampak teknis ini ikut menentukan siapa yang menjadi pusat dan siapa yang menjadi pinggiran dalam peta kekuasaan energi.

Secara normatif, pendukung kombinasi instrumen ini sering berargumen bahwa yang terpenting adalah mempercepat investasi pada *energi terbarukan* untuk mengejar target iklim yang kian mendesak. Argumen ini tentu memiliki bobot etis,

namun menjadi bermasalah ketika digunakan untuk menutup ruang kritik terhadap cara instrumen dirancang dan diimplementasikan. Pertanyaan seperti: apakah syarat lelang membuka ruang bagi pelaku lokal? Apakah PPA memasukkan klausul yang melindungi konsumen kecil? Apakah jaminan negara diikuti dengan mekanisme akuntabilitas publik yang kuat?—sering dianggap sebagai gangguan terhadap kecepatan implementasi. Padahal, kecepatan tanpa keadilan berisiko menciptakan resistensi sosial yang pada akhirnya menghambat transisi itu sendiri. Dalam perspektif filsafat kekuasaan, kombinasi instrumen yang efisien tetapi eksklusif justru menciptakan kontradiksi internal dalam proyek keberlanjutan.

Salah satu klaim yang kerap menyertai lelang dan kontrak jangka panjang adalah bahwa mekanisme tersebut "netral" terhadap bentuk kepemilikan—selama pelaku mampu memenuhi syarat kompetisi. Namun, dalam praktik, syarat-syarat seperti ukuran minimum proyek, kebutuhan jaminan bank, atau rekam jejak teknis yang panjang sering kali mengarah pada pemusatan kepemilikan di tangan perusahaan multinasional besar. Di sini, jaminan negara berfungsi sebagai pengaman tambahan yang membuat investasi mereka semakin menarik, sementara aktor komunitas, koperasi, atau usaha kecil hanya menjadi pelengkap simbolik. Netralitas yang diklaim ternyata hanya berlaku dalam kerangka hukum formal, bukan dalam kenyataan distribusi sumber daya. Dengan demikian, kombinasi instrumen ini bukan sekadar "alat pasar", melainkan mekanisme seleksi politik yang memilih tipe pelaku yang dikehendaki negara untuk menjadi mitra jangka panjang.

Untuk pembaca awam, istilah seperti *hybrid auction design* mungkin terdengar rumit, tetapi pada dasarnya menunjuk pada desain lelang yang menggabungkan beberapa aturan, misalnya seleksi berdasarkan harga sekaligus kualitas proyek. Ketika

desain hibrida ini dipadukan dengan PPA jangka panjang dan jaminan negara, pemerintah dapat mengarahkan jenis proyek yang diinginkan: misalnya mewajibkan komponen lokal, teknologi tertentu, atau lokasi di daerah tertentu. Di satu sisi, hal ini dapat digunakan untuk tujuan progresif, seperti mendorong pengembangan industri lokal atau pemerataan wilayah. Di sisi lain, jika proses perancangan aturan tertutup, desain yang sama bisa menjadi cara halus untuk menguntungkan kelompok tertentu yang sudah memiliki kedekatan politik. Filsafat kekuasaan membantu kita melihat bahwa desain teknis selalu membuka peluang untuk praktik emansipatif maupun eksklusif, tergantung pada sejauh mana warga dilibatkan.

Di banyak negara, desain kombinasi instrumen ini juga terkait erat dengan sejarah reformasi sektor listrik, dari monopoli negara menuju pasar yang lebih terliberalisasi. Dalam fase ini, "stabilitas regulasi" sering dijadikan mantra, karena investor menginginkan kepastian bahwa aturan main tidak akan berubah secara drastis. Stabilitas regulasi memang penting, tetapi ketika ditempelkan pada PPA panjang dan jaminan negara yang besar, ia dapat berubah menjadi mekanisme pembekuan imajinasi kebijakan, di mana negara merasa terikat untuk mempertahankan struktur *kebijakan energi* tertentu meskipun kondisi sosial-ekologis telah berubah. Di sini kita melihat paradoks: instrumen yang dirancang untuk mengelola risiko transisi justru mengunci sistem pada konfigurasi yang mungkin tidak lagi sesuai dengan tuntutan keadilan dan keberlanjutan di masa depan.

Pengalaman Brasil menunjukkan bagaimana kebijakan yang mendorong energi bersih dapat dipenuhi oleh konfigurasi kekuasaan yang kompleks, di mana aktor publik dan privat bernegosiasi atas arah transisi. Werner dan Lazaro (2023) memperlihatkan bagaimana desain kebijakan untuk mendorong sumber-sumber energi bersih tidak bisa dipisahkan dari

dinamika tata kelola sektoral, termasuk peran perusahaan swasta dan tantangan ketimpangan teritorial. Jika kita tarik ke diskusi tentang kombinasi lelang, PPA, dan jaminan negara, studi semacam ini membantu mengingatkan bahwa instrumen tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam medan politik yang sudah diisi oleh kepentingan korporasi mapan, birokrasi yang punya kebiasaan tertentu, dan komunitas lokal yang membawa pengalaman ketidakadilan historis. Kombinasi instrumen yang sensitif terhadap konteks ini harus dirancang dengan sadar terhadap lapisan-lapisan kekuasaan tersebut.

Dari sisi keadilan antargenerasi, kontrak jangka panjang dan jaminan negara menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan memikul kewajiban keuangan di masa mendatang. Jika proyek-proyek yang didukung instrumen ini gagal mencapai kinerja yang dijanjikan—misalnya karena perubahan teknologi, penurunan permintaan, atau kerusakan lingkungan—maka generasi mendatang dapat mewarisi beban utang dan infrastruktur yang tidak lagi relevan. Lelang yang diagungkan sebagai alat seleksi efisien tidak secara otomatis memasukkan biaya ini ke dalam penilaian, karena kalkulasi biasanya berhenti pada horizon waktu kontrak dan parameter-parameter finansial jangka menengah. Dalam kerangka filsafat kekuasaan, ini berarti bahwa generasi sekarang menggunakan kapasitas institusionalnya untuk mengikat masa depan pada keputusan yang mungkin tidak dapat dengan mudah dibatalkan tanpa konsekuensi besar.

Di tingkat lokal, penggabungan lelang, PPA, dan jaminan negara juga berinteraksi dengan cara warga memaknai proyek *energi terbarukan*. Ketika proyek raksasa hadir melalui skema yang dirasakan sangat teknokratis dan jauh dari partisipasi warga, kemungkinan resistensi sosial meningkat, bahkan jika secara formal prosedur konsultasi telah dilaksanakan. Warga mungkin melihat bahwa keputusan sudah "dikunci" melalui

kontrak dan jaminan sebelum aspirasi mereka sungguh-sungguh dipertimbangkan. Hal ini dapat mengubah imaji energi bersih dari simbol harapan menjadi simbol dominasi baru, di mana lanskap berubah, tarif listrik mungkin naik, tetapi ruang deliberasi publik tetap sempit. Di sinilah pentingnya merancang instrumen yang bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga dapat dibaca sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan kapasitas politik komunitas terdampak.

Pada akhirnya, kombinasi lelang, kontrak jangka panjang, dan jaminan negara perlu dipahami sebagai bagian dari "konstitusi tersembunyi" transisi energi, yang mengatur siapa berbicara, siapa berinvestasi, dan siapa menanggung risiko. Dalam kerangka filsafat kekuasaan, tugas kita bukan menolak instrumen itu secara total, melainkan membongkar asumsi yang bekerja di baliknya dan merancang ulang arsitektur kebijakan agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan. Ini berarti membuka proses perancangan instrumen pada partisipasi publik yang bermakna, menimbang secara serius implikasi distribusional dari setiap pilihan desain, dan mengakui bahwa apa yang tampak sebagai "teknik" sebenarnya adalah keputusan politik. Hanya dengan cara itu kombinasi instrumen ini dapat menjadi teknologi kuasa yang tidak sekadar melanggengkan dominasi, tetapi juga membuka kemungkinan emansipasi dalam kebijakan energi berkelanjutan.

11 Indikator Efektivitas Regulasi: Apa yang "Terlihat" oleh Indikator Komposit, dan Apa yang Disembunyikan

11.1 Indikator dan Indeks Performa Energi: Dari *Doing Business* ke Indeks Energi Hijau

Gagasan tentang indikator dan indeks performa energi lahir dari obsesi *governance* modern pada angka, peringkat, dan tabel liga kebijakan. Sebelum membahas indeks energi hijau, penting untuk memahami bahwa indikator tidak sekadar "alat ukur netral", tetapi bentuk kekuasaan yang menentukan apa yang dianggap relevan, dapat dihitung, dan pantas masuk ke meja keputusan. Dalam konteks ini, indikator menjadi pintu masuk bagi lembaga internasional, lembaga pemeringkat, dan konsultan untuk memengaruhi cara negara mendesain regulasi energi, mengalokasikan subsidi, dan menilai keberhasilan reformasi. Dengan kata lain, siapa pun yang mengontrol indikator, berpotensi mengontrol definisi tentang "kinerja baik" di sektor energi. Bab ini mengajak pembaca membongkar logika tersebut, dari Doing Business yang menjadi ikon pemeringkatan iklim usaha, ke indeks energi hijau yang menyasar performa transisi iklim dan dekarbonisasi.

Doing Business menjadi simbol era ketika "kualitas regulasi" direduksi menjadi kecepatan memperoleh izin, kemudahan membayar pajak, dan minimnya prosedur. Dalam kerangka ini, waktu dan biaya adalah pusat penilaian, sementara dimensi keadilan sosial atau keberlanjutan lingkungan nyaris tidak terlihat. Ketika logika Doing Business diadaptasi ke ranah energi, yang dinilai adalah betapa cepat izin pembangkit

dikeluarkan atau betapa mudah perusahaan swasta masuk ke pasar listrik. Di satu sisi, indikator semacam ini mendorong negara melakukan deregulasi; di sisi lain, ia nyaris tidak mengajukan pertanyaan tentang siapa yang kehilangan hak, siapa yang menanggung polusi, atau siapa yang terdorong makin jauh dari akses energi karena skema tarif baru yang lahir dari reformasi pro-pasar.

Perkembangan indeks energi hijau membawa pergeseran fokus dari "iklim usaha" ke "transisi rendah karbon", tetapi logika pemeringkatan tetap bertahan. Berbagai indeks global mulai mengukur porsi *energi terbarukan* dalam bauran listrik, ambisi target emisi, atau keberadaan regulasi pendukung, lalu menggabungkannya ke dalam skor komposit. Negara yang skornya tinggi diberi label sebagai "champion" transisi; sebaliknya, mereka yang tertinggal dicap lamban, tidak ambisius, atau tidak ramah investasi. Namun di balik angka-angka itu tersimpan sejumlah asumsi: bahwa semua negara memiliki kapasitas institusional yang sama, kondisi fiskal yang serupa, dan sejarah pembangunan yang sebanding. Padahal, beban utang, ketimpangan sosial, dan warisan kolonial membuat kemampuan nyata negara untuk merespons tekanan pemeringkatan jauh dari setara.

Cara indikator disusun—mulai dari pemilihan variabel, pemberian bobot, hingga normalisasi—mewujudkan rasionalitas tertentu tentang apa itu transisi energi yang "baik". Pendekatan *multi-criteria decision making* yang semakin populer menawarkan kerangka teknis untuk menggabungkan banyak dimensi, tetapi tetap membutuhkan pilihan normatif tentang mana kriteria yang dianggap prioritas. Studi tentang tantangan transisi rendah karbon menunjukkan bagaimana penentuan bobot antara dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial tidak pernah netral, melainkan mencerminkan kompromi politis dan preferensi aktor dominan (Saraji & Streimikiene,

2024). Ketika aspek kelayakan finansial dan keamanan investor diberi bobot tinggi, sementara keadilan distribusi atau partisipasi publik hanya menjadi variabel pelengkap, maka indikator performa energi akan mendorong kebijakan ke arah yang mengutamakan stabilitas pendapatan pemodal ketimbang perlindungan kelompok rentan.

Di balik angka skor nasional, terdapat jaringan data, survei pakar, dan asumsi model yang jarang diperdebatkan secara terbuka. Banyak indeks performa energi mengandalkan kuesioner yang diisi oleh pakar, konsultan, atau pejabat tinggi, sehingga pengalaman warga, komunitas adat, dan kelompok terdampak lain tidak pernah masuk ke dalam data. Padahal merekalah yang merasakan langsung dampak tarif listrik, pembangunan jaringan transmisi, atau proyek pembangkit besar. Di sini terjadi apa yang bisa disebut sebagai "ketidakadilan epistemik": suara tertentu terus-menerus didengar dan dihitung, sementara suara lain diabaikan karena dianggap tidak cukup teknis. Akibatnya, indikator yang diklaim menggambarkan kondisi lapangan sebenarnya lebih mencerminkan pandangan aktor elite ketimbang kompleksitas sosial-politik yang dijumpai di wilayah proyek.

Ketika indeks dan pemeringkatan mulai dipakai sebagai dasar reformasi, *kebijakan energi* di banyak negara diarahkan untuk mengejar skor tinggi, bukan menjawab kebutuhan warga paling rentan. Kementerian dan regulator didorong mengadopsi paket reformasi "ramah pasar"—misalnya liberalisasi harga, pemangkasan subsidi tertentu, atau pembukaan ruang besar bagi IPP—karena langkah-langkah itu diapresiasi dalam indikator. Namun, efeknya pada rumah tangga miskin, pekerja di industri fosil, atau komunitas lokal yang lahannya digunakan untuk infrastruktur sering kali diabaikan. Logika "catching up" terhadap peringkat global ini menempatkan pemerintah dalam posisi defensif: alih-alih merumuskan agenda keadilan energi,

mereka sibuk merapikan regulasi agar sesuai dengan daftar *checklist* yang ditetapkan lembaga internasional dan lembaga pemeringkat.

Di kawasan Selatan Global, indeks performa energi kerap bersilangan dengan isu ketimpangan struktural dan ketergantungan pembiayaan. Banyak indikator memasukkan sub-komponen seperti stabilitas institusional, perlindungan investor, atau kepastian kontrak jangka panjang, yang semuanya penting, tetapi sekali lagi lebih mencerminkan kekhawatiran kreditor dan pemodal internasional daripada kebutuhan warga yang belum teraliri listrik. Editorial tentang tata kelola transisi energi di Afrika menunjukkan bahwa pendekatan dominan sering kali mengasumsikan satu jalur institusional "ideal", sementara kenyataan di lapangan jauh lebih majemuk dan penuh tarik-menarik politik (Späth et al., 2022). Di bawah bayang-bayang logika pemeringkatan, negara-negara Afrika dan Asia dapat terdorong menyesuaikan struktur lembaganya sesuai standar luar, meski itu tidak selalu cocok dengan sejarah dan konfigurasi sosial mereka sendiri.

Indeks komposit memiliki daya politik karena menyederhanakan keragaman menjadi satu angka yang mudah dikomunikasikan di media dan forum internasional. Ketika sebuah negara naik peringkat, pemerintah menjadikannya bukti keberhasilan, sementara penurunan skor dapat dimaknai sebagai kegagalan yang harus segera diperbaiki. Namun penyederhanaan ini memiliki biaya epistemik: indikator cenderung mengabaikan konflik ruang, sengketa lahan, dan bentuk perlawanan halus yang tidak mudah dikonversi menjadi angka. Misalnya, indeks yang menilai percepatan izin proyek dapat menganggap pemangkasan tahapan konsultasi publik sebagai kemajuan administratif, padahal di lapangan hal itu bisa berarti menyempitnya ruang deliberasi warga. Dengan demikian, indikator berperan ganda: ia mendorong percepatan

proyek, sekaligus berpotensi mengikis jaminan prosedural yang melindungi kelompok terdampak.

Di banyak negara, indikator performa energi nasional diturunkan menjadi paket target sektoral: porsi *energi terbarukan* tertentu dalam bauran listrik, jumlah rumah tangga yang tersambung ke jaringan, atau volume investasi yang ingin dicapai per tahun. Target-target ini penting, tetapi bila diikat secara kaku pada pemeringkatan global, mereka dapat mendorong pemerintah memilih proyek yang "cepat menaikkan angka" ketimbang yang paling relevan secara sosial. Misalnya, proyek pembangkit skala besar untuk memenuhi target kapasitas terpasang bisa diprioritaskan dibanding program *off-grid* komunitas yang lebih lambat menaikkan statistik, meski dampak pengurangan kemiskinan energinya jauh lebih besar. Di sini, angka tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga mengarahkan perhatian, anggaran, dan imajinasi perencana ke jenis intervensi tertentu yang dianggap paling "skor-friendly".

Pada saat yang sama, muncul gelombang indikator baru di level kota dan komunitas: *city climate scorecards*, indeks kerentanan energi rumah tangga, hingga indikator partisipasi warga dalam perencanaan. Sekilas, ini tampak sebagai koreksi terhadap bias nasional dan elit. Namun, bila desainnya tetap ditentukan oleh konsultan eksternal dan donatur, maka relasi kuasa lama hanya direplikasi di level yang lebih lokal. Indikator yang dimaksudkan untuk mengukur keadilan bisa berubah menjadi sarana untuk menyalurkan proyek yang sudah ditentukan sebelumnya, tanpa benar-benar mengubah cara keputusan dibuat. Tantangannya adalah menggeser proses produksi indikator menjadi proses yang ko-produktif, di mana warga, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok rentan punya suara substantif dalam menentukan apa yang harus diukur, dengan cara apa, dan untuk tujuan apa.

Digitalisasi sistem energi dan meluasnya *smart metering* sering dipromosikan sebagai jalan menuju pengukuran performa yang lebih akurat dan *real-time*. Data granular tentang konsumsi listrik, curah energi surya, atau performa jaringan dianggap membuka peluang bagi *evidence-based policy* yang lebih tajam. Namun, kecanggihan teknis tidak menghilangkan pertanyaan mendasar: siapa yang mengontrol data, untuk siapa indikator dirancang, dan siapa yang berhak mengakses hasilnya? Tanpa prinsip tata kelola data yang adil, indikator berbasis teknologi tinggi justru dapat memperdalam ketimpangan, karena hanya aktor tertentu yang mampu membaca, memanfaatkan, dan menegosiasikan maknanya. Kecenderungan ini mengingatkan bahwa persoalan indikator bukan hanya soal metode statistik, tetapi juga soal hak atas informasi dan distribusi kapasitas untuk menafsirkan angka.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa keputusan besar di sektor energi kerap diambil dengan mengandalkan indikator teknis, sambil meminggirkan proses partisipasi dan transparansi. Studi tentang penghapusan PLTN di Taiwan, misalnya, memperlihatkan bagaimana transisi energi yang tampak hijau di permukaan dapat sekaligus melahirkan ketidakadilan baru ketika partisipasi publik terbatas dan informasi tentang risiko serta alternatif tidak dibuka secara memadai (Huang & Chen, 2021). Dalam konteks ini, indikator performa transisi bisa saja menunjukkan kemajuan—misalnya penurunan porsi energi nuklir—sementara warga yang terdampak merasakan ketidakpastian, kenaikan tarif, atau perpindahan beban risiko ke kelompok yang lebih lemah. Kasus ini menegaskan bahwa indikator, tanpa kerangka keadilan prosedural, justru berpotensi menutup ruang perdebatan demokratis.

Dalam praktik, banyak indikator performa energi menggabungkan dimensi yang sangat berbeda—misalnya

stabilitas regulasi, kapasitas jaringan, dan tingkat emisi—ke dalam satu skor *composite indicator*. Secara teknis, ini memudahkan perbandingan antarnegara, tetapi secara politis ia menyembunyikan konflik nilai. Negara dengan rekam jejak hak asasi manusia yang lemah bisa saja mendapatkan skor tinggi karena agresif membangun infrastruktur energi bersih, sementara negara yang lebih berhati-hati dalam memproses persetujuan sosial tampak tertinggal. Ketika skor tunggal inilah yang lalu dikutip dalam pidato pejabat, laporan lembaga keuangan, atau dokumen strategi nasional, nuansa dan ketegangan di balik angka menghilang. Kritik terhadap indikator harus dimulai dari pembongkaran logika penyederhanaan ini dan pengembalian kompleksitas moral serta politik yang hilang.

Upaya memperbaiki indikator tidak cukup hanya dengan menambah variabel "keadilan" sebagai kotak baru dalam *spreadsheet*. Diperlukan pergeseran epistemologis yang mengakui bahwa kelompok terdampak memiliki pengetahuan sah tentang performa sistem energi, meski pengetahuan itu tidak berbentuk angka. Misalnya, pengalaman warga tentang frekuensi pemadaman, kualitas layanan, atau rasa aman terhadap instalasi energi di sekitar mereka dapat diterjemahkan menjadi indikator yang lebih kaya bila digarap secara partisipatif. Pendekatan ini menantang monopoli pakar teknis atas definisi performa, dan menggeser indikator dari alat pengawasan satu arah menjadi medium dialektika antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan demikian, indikator tidak lagi hanya melayani keperluan pelaporan ke donor, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas ke bawah.

Dalam kerangka transisi, pertanyaan pentingnya adalah: indikator seperti apa yang benar-benar membantu mengarahkan *energi terbarukan* ke jalur yang adil secara sosial dan ekologis? Indeks hijau yang hanya menghitung kapasitas terpasang atau volume investasi tidak cukup, karena ia bisa

menutupi praktik perampasan lahan, kerja kontrak rentan, atau beban tarif yang tidak proporsional. Alternatifnya, indikator harus memasukkan dimensi seperti kepemilikan komunitas, distribusi manfaat antara pusat dan daerah, serta perlindungan terhadap kelompok yang historis termarginalisasi. Langkah ini akan membuat skor lebih sulit dihitung, tetapi justru lebih jujur terhadap kompleksitas transisi. Di sini, keberanian untuk memperlambat keputusan demi memperkaya dimensi pengukuran menjadi bentuk resistensi terhadap logika "cepat, murah, dan mudah" ala Doing Business.

Pada akhirnya, perjalanan dari Doing Business ke indeks energi hijau menggambarkan transformasi, tetapi juga kontinuitas, dalam *governmentality* berbasis angka. Jika sebelumnya peringkat dipakai untuk mendorong deregulasi pro-bisnis secara umum, kini ia digunakan untuk menata ulang lanskap energi atas nama keberlanjutan. Namun selama desain indikator tetap dikendalikan oleh aktor yang sama, dengan kepentingan finansial dan geopolitik yang serupa, arah kekuasaan tidak banyak bergeser. Tugas teoritis dan praktis bagi *Ilmu Pemerintahan* adalah mengkritisi cara indikator memproduksi kebenaran tentang performa energi, membuka ruang bagi indikator tanding yang lebih adil, dan menempatkan kembali penilaian kinerja pada dialog antara keahlian teknis, aspirasi warga, dan tanggung jawab antargenerasi, bukan sekadar pada angka yang rapi di tabel pemeringkatan.

11.2 Pilihan Variabel, Bobot, dan Normalisasi: Politik di Balik Angka

Di balik setiap indikator komposit yang tampak rapi, selalu ada rangkaian keputusan kecil namun sarat kuasa: memilih variabel mana yang dimasukkan, memberi bobot mana yang lebih penting, lalu melakukan *normalization* yang mengubah beragam angka menjadi skala tunggal yang tampak netral. Di atas kertas,

indikator hanyalah alat teknis untuk menyederhanakan realitas sehingga pembuat keputusan dapat "melihat" performa kebijakan. Namun dalam perspektif filsafat kekuasaan, indikator justru adalah cara tertentu untuk mengarahkan apa yang boleh terlihat dan apa yang dibiarkan tetap tak tampak. Ketika pemerintah, lembaga internasional, atau konsultan menyusun indikator efektivitas regulasi energi, mereka bukan sekadar menghitung, tetapi juga mendefinisikan apa itu "baik", "efisien", dan "berhasil". Dengan kata lain, angka tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi ikut membentuk horizon imajinasi kebijakan: apa yang dianggap mungkin, dapat dibenarkan, dan layak didanai dalam kerangka energi berkelanjutan.

Langkah pertama yang paling politis tetapi sering disamarkan sebagai teknis adalah pemilihan variabel. Di sini, konsep seperti keadilan energi, kerentanan sosial, atau dampak ekologis jangka panjang bisa diangkat menjadi variabel eksplisit, atau justru dihapuskan dari lembar kerja. Pengambil kebijakan cenderung memilih variabel yang datanya tersedia, terstandar, dan mudah dibandingkan lintas negara—seperti biaya per kilowatt-jam, tingkat kehilangan jaringan, atau volume investasi swasta—sementara variabel yang merefleksikan pengalaman masyarakat lokal, kerja reproduktif di rumah tangga, atau beban kesehatan sering dianggap "sulit diukur". Keterbatasan ini kemudian dikemas seolah-olah masalah teknis, padahal yang terjadi adalah pemisahan sistematis antara dimensi yang dihitung dan dimensi yang dibiarkan menjadi beban diam-diam kelompok rentan. Dalam konteks ini, pemilihan variabel adalah bentuk kuasa epistemik: aktor yang berwenang menyusun indikator juga sedang memutuskan siapa dan apa yang layak hadir dalam peta pengetahuan kebijakan.

Dalam banyak indeks dan skor performa transisi, variabel yang terkait kapasitas pembangkit, stabilitas jaringan, dan insentif investasi untuk energi terbarukan sering diberi posisi

sentral, sementara dinamika sosial-politik hanya hadir sebagai latar belakang. Ketika sebuah indeks mengukur seberapa jauh suatu negara beralih dari batu bara ke gas atau ke campuran energi terbarukan, ia seolah menampilkan lintasan rasional yang linear dan teknis. Padahal, pilihan variabel tersebut merefleksikan pertarungan politis antara kepentingan ekonomi, rezim otoriter atau demokratis, serta relasi geopolitik, sebagaimana diperlihatkan oleh Marktanner dan Salman (2020) ketika membandingkan dimensi ekonomi dan geopolitik *renewable energy* dan nuklir di Afrika Utara. Ketika variabel tersebut kemudian dijadikan rujukan utama untuk menilai kemajuan, negara yang mengikuti pola dominan akan terlihat "berhasil", sementara jalur alternatif yang lebih adil tetapi kurang sesuai dengan struktur indikator mudah dinilai tidak ambisius, tidak efisien, atau tidak kredibel.

Setelah variabel dipilih, tahap berikutnya adalah pemberian bobot atau *weighting*, yakni keputusan tentang seberapa besar kontribusi setiap variabel terhadap skor akhir. Di sini politik nilai tampil sangat jelas: apakah reliabilitas pasokan listrik dianggap dua kali lebih penting daripada penurunan kemiskinan energi? Apakah biaya jangka pendek diberi bobot lebih besar daripada kerentanan iklim jangka panjang? Secara teknis, *weighting* sering dijelaskan dengan istilah-istilah seperti *expert judgement* atau *principal component analysis*, tetapi bagi pembaca awam, perlu ditegaskan bahwa ini adalah cara memberi "porsi kepentingan" kepada aspek tertentu dalam perumusan skor. Bobot yang lebih besar berarti variabel itu lebih menentukan reputasi kebijakan di mata publik dan lembaga internasional. Dengan demikian, perdebatan tentang bobot bukan sekadar soal metode statistik, melainkan tentang hierarki nilai: apakah keadilan distribusi beban dan manfaat akan menjadi pusat penilaian, atau hanya tempelan setelah indikator ekonomi dan teknis selesai dihitung.

Politik di balik bobot menjadi semakin problematik ketika dimensi prosedural seperti transparansi, partisipasi publik, dan hak untuk menggugat keputusan hampir selalu mendapat bobot sangat kecil, atau bahkan tidak menjadi variabel sama sekali. Dalam praktik transisi energi, kita melihat bagaimana pengambilan keputusan strategis bisa dilakukan dengan konsultasi terbatas, akses informasi yang sempit, dan representasi publik yang timpang; namun situasi ini jarang tertangkap oleh indikator performa regulasi. Studi tentang penghentian nuklir di Taiwan menunjukkan bagaimana pembatasan partisipasi dan kekeruhan informasi dapat melahirkan ketidakadilan baru dalam kebijakan energi, meskipun narasi resminya "hijau" dan pro-lingkungan (Huang & Chen, 2023). Ketika aspek-aspek prosedural ini tidak muncul sebagai variabel yang diberi bobot, indikator memberi ilusi bahwa tata kelola sudah berjalan "baik" hanya karena memenuhi target teknis dan finansial, padahal fondasi legitimasi demokratisnya rapuh.

Dalam kerangka kebijakan energi, bobot yang diberikan kepada variabel-variabel ekonomi dan teknis cenderung mengalahkan dimensi sosial-politik yang kompleks. Kerugian jangka pendek bagi investor atau utilitas sering kali diperlakukan sebagai risiko utama, sementara beban tarif tinggi bagi rumah tangga miskin dianggap efek samping yang tidak langsung, sehingga tidak mendapatkan bobot eksplisit dalam model. Ketika regulator merevisi struktur tarif, misalnya, indikator bisa hanya mencerminkan stabilitas pendapatan perusahaan listrik dan daya tarik investasi, tanpa menghitung dampak pada pengeluaran rumah tangga rentan atau usaha kecil. Di banyak negara, tekanan dari lembaga keuangan internasional untuk menjaga "profil risiko" membuat variabel terkait selera pasar dan prediksi profitabilitas mendapatkan posisi istimewa. Hasilnya, indikator efektivitas regulasi

mendorong prioritas kebijakan energi yang kompatibel dengan logika pasar modal, bukan dengan tuntutan keadilan sosial dan hak warga atas energi yang layak.

Dimensi politis ketiga yang sering luput dari perhatian publik adalah teknik *normalization*, yakni cara mengubah berbagai variabel ke dalam skala yang sebanding, misalnya 0–1 atau 0–100. Secara sederhana, *normalization* berarti mentransformasikan angka mentah—seperti gigawatt kapasitas terpasang, persen kehilangan jaringan, atau indeks kemiskinan—agar dapat dijumlahkan atau digabungkan. Metode umum meliputi *min–max normalization* (mengurangi nilai minimum lalu membagi dengan rentang) dan *z-score* (mengukur seberapa jauh nilai dari rata-rata dalam satuan deviasi standar). Bagi pembaca awam, penting dipahami bahwa pilihan metode ini bukan sekadar trik matematika. Ia menentukan seberapa besar "jarak" yang tampak antara negara yang dianggap maju dan tertinggal, dan seberapa dramatis kemajuan atau kemunduran terlihat ketika grafik diperbarui. Dengan kata lain, *normalization* menyusun perspektif visual yang ikut mengarahkan narasi tentang siapa yang sedang "melompat jauh" dan siapa yang "jalan di tempat".

Ketika *normalization* menggunakan negara-negara berpenghasilan tinggi sebagai *benchmark* implisit—yakni titik acuan "terbaik" yang menjadi rujukan—maka keseluruhan arsitektur indikator dapat mereproduksi hierarki global yang sudah timpang. Negara yang memulai dari kondisi infrastruktur rendah akan tampak selalu tertinggal, meskipun kemajuan relatif mereka sangat besar dalam jangka pendek. Di sisi lain, negara yang sudah memiliki sistem energi maju dapat mempertahankan posisi tinggi tanpa banyak perubahan substantif, karena jarak mereka ke "puncak" sangat kecil. Di sini, angka-angka yang tampak netral sebenarnya sedang memelihara struktur prestise tertentu: siapa yang berhak

disebut pemimpin, siapa yang selalu menjadi "murid", dan siapa yang dikategorikan "gagal". Ketika indikator semacam ini dipakai untuk menilai kesiapan investasi, memberi label risiko, atau memutuskan prioritas dukungan teknis, konsekuensinya tidak hanya simbolik, tetapi langsung berpengaruh pada aliran dana dan kapasitas negara untuk mengubah sistem energi mereka.

Pilihan variabel, bobot, dan *normalization* juga ikut menentukan bagaimana konflik antara efisiensi biaya dan keadilan sosial dibingkai, terutama ketika ekspansi energi terbarukan menyentuh wilayah pedesaan dan komunitas terpencil. Jika indikator hanya fokus pada biaya per kilowatt-jam dan kecepatan pembangunan kapasitas baru, maka proyek berskala besar di dekat pusat beban akan tampil lebih unggul dibandingkan solusi desentralisasi yang mungkin lebih adil tetapi tampak "mahal" secara unit biaya. Dalam banyak kasus, dampak positif seperti berkurangnya penggunaan bahan bakar kotor di rumah tangga, peningkatan kesehatan, atau penguatan ekonomi lokal tidak masuk dalam rumus, sehingga nilainya secara statistik nol. Dengan cara ini, angka-angka menormalisasi gagasan bahwa keadilan bisa dikompromikan demi efisiensi, padahal bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan, akses dasar terhadap energi bersih adalah prasyarat martabat, bukan bonus tambahan yang boleh dikorbankan.

Politik di balik angka semakin kompleks ketika indikator disusun oleh komunitas ahli transnasional—ekonom, insinyur sistem energi, dan konsultan kebijakan—yang memiliki posisi istimewa dalam mendefinisikan apa itu "kinerja baik". Mereka menguasai bahasa teknis, perangkat lunak, dan model statistik yang sulit diakses oleh masyarakat umum maupun banyak birokrat lokal. Dalam konfigurasi ini, kuasa epistemik bergeser ke tangan mereka yang mampu menyusun dan memodifikasi model, sedangkan politisi dan publik hanya menerima hasilnya

dalam bentuk peringkat dan warna peta. Pengalaman menunjukkan bahwa preferensi epistemik komunitas ahli dapat sangat mempengaruhi indikator: stabilitas makroekonomi dan iklim investasi sering diutamakan, sementara relasi kekuasaan domestik dan sejarah ketidakadilan cenderung diringkas dalam satu-dua variabel kontrol. Hasilnya adalah narasi teknokratis yang terlihat universal, padahal lahir dari horizon pengalaman dan kepentingan yang sangat spesifik.

Dalam banyak laporan internasional, angka-angka indikator kemudian diubah menjadi *ranking*—urutan negara dari yang "terbaik" sampai yang "terburuk". *Ranking* adalah praktik penyusunan hierarki eksplisit; ia memberi status simbolik pada posisi tertentu, memicu kebanggaan ketika peringkat naik dan rasa malu ketika turun. Namun, begitu peringkat menjadi tujuan politik, bobot dan variabel dapat disesuaikan agar lebih menguntungkan narasi tertentu. Misalnya, memasukkan variabel yang mudah diperbaiki melalui reformasi regulasi cepat, sambil mengurangi peran indikator yang membutuhkan perubahan struktural jangka panjang. Bagi pembaca awam, penting untuk melihat bahwa pergeseran ini bukan sekadar strategi teknis, tetapi bentuk *performance politics* di mana pemerintah mengejar perbaikan posisi dalam daftar, meski kenyataan di lapangan berubah jauh lebih pelan. Indikator yang awalnya dimaksudkan sebagai alat diagnosis justru berubah menjadi target yang mengarahkan perilaku birokrasi.

Ketika indikator dan *ranking* tersebut dikaitkan dengan syarat pinjaman, dukungan teknis, atau skema pendanaan multilateral, politik di balik angka bertemu langsung dengan politik fiskal dan kebijakan energi nasional. Negara yang peringkatnya rendah dapat ditekan untuk mengubah regulasi, meliberalisasi pasar, atau menghapus subsidi tertentu demi meningkatkan skor efektivitas, meskipun langkah-langkah itu

memperlemah perlindungan bagi kelompok miskin. Dalam situasi seperti ini, perdebatan substantif tentang pilihan model pembiayaan, peran negara, dan kapasitas publik tergeser oleh logika "bagaimana menaikkan skor secepat mungkin". Maka tidak mengherankan jika kebijakan energi di banyak konteks menjadi sangat responsif terhadap bahasa lembaga pemeringkat, tetapi kurang peka terhadap suara komunitas yang merasakan langsung dampak perubahan tarif, pemadaman, atau privatisasi infrastruktur.

Untuk membongkar politik di balik angka, langkah pertama adalah menuntut transparansi penuh atas keputusan desain indikator: mengapa variabel tertentu dipilih, bagaimana bobot ditentukan, dan metode *normalization* apa yang digunakan. Dokumentasi teknis yang hanya bisa dibaca oleh pakar statistik perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami publik, sehingga masyarakat dapat menilai apakah definisi "kinerja baik" dalam indikator sejalan dengan pengalaman mereka tentang layanan energi sehari-hari. Dalam kerangka ini, *methodological transparency* bukan sekadar memenuhi standar ilmiah, tetapi menjadi syarat etis agar indikator tidak berubah menjadi instrumen dominasi simbolik. Tanpa transparansi, kritik atas indikator mudah disingkirkan dengan dalih "Anda tidak mengerti teknis", padahal yang dipersoalkan adalah pilihan nilai dan konsekuensi politiknya, bukan hanya formula matematis yang dipakai.

Langkah berikutnya adalah menggeser proses penyusunan indikator dari ruang tertutup para ahli menuju praktik yang lebih partisipatif dan deliberatif. Komunitas lokal, serikat pekerja sektor energi, organisasi perempuan, dan kelompok masyarakat adat perlu dilibatkan tidak hanya sebagai responden survei, tetapi sebagai pihak yang ikut menentukan variabel apa yang relevan dan bobot apa yang adil. Dalam kerangka ini, istilah teknis seperti *stakeholder engagement* perlu

dijelaskan sebagai keterlibatan bermakna, bukan sekadar konsultasi simbolik. Artinya, ada ruang nyata bagi masyarakat untuk mempengaruhi isi indikator, termasuk menambahkan variabel yang selama ini tidak dianggap penting, seperti beban kerja domestik akibat ketidakandalan listrik atau hilangnya praktik budaya karena pembangunan infrastruktur energi skala besar. Ketika partisipasi menjadi bagian dari desain, indikator tidak hanya mengukur dunia, tetapi juga menjadi arena untuk menegosiasikan ulang nilai-nilai dasar kebijakan.

Menghubungkan ulang arsitektur indikator dengan agenda keadilan menuntut keberanian untuk mengubah cara kita menilai keberhasilan ekspansi energi terbarukan di tingkat nasional maupun lokal. Alih-alih hanya mengukur kapasitas terpasang atau jumlah proyek yang dimenangkan melalui lelang, indikator perlu memasukkan distribusi manfaat, pembagian risiko, serta perubahan relasi kuasa antara negara, pasar, dan warga. Dalam konteks ini, variabel seperti akses kelompok miskin, pengurangan ketimpangan antarwilayah, dan penguatan kapasitas komunitas harus memperoleh bobot yang signifikan, bukan ditempatkan sebagai "indikator tambahan" di lampiran laporan. Dengan begitu, angka-angka tidak lagi sekadar menegaskan dominasi narasi efisiensi, tetapi juga mengakui bahwa tujuan akhir dari transformasi sistem energi adalah martabat manusia dan keberlanjutan kehidupan bersama, bukan hanya stabilitas pasokan dan kelayakan investasi.

Pada akhirnya, pembahasan tentang pilihan variabel, bobot, dan *normalization* dalam indikator efektivitas regulasi mengingatkan kita bahwa politik kekuasaan tidak hanya bermain di ruang parlemen, negosiasi iklim, atau ruang direksi perusahaan energi, tetapi juga di balik lembar kerja, rumus, dan grafik yang tampak teknis. Di sini, kuasa bekerja melalui definisi apa yang layak dihitung, bagaimana perbedaan dinilai, dan siapa yang harus menyesuaikan diri dengan standar yang telah

ditetapkan. Bagi filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan, tugasnya bukan menolak angka, tetapi membongkar cara angka-angka itu diproduksi dan digunakan untuk mengarahkan imajinasi kebijakan. Hanya dengan kesadaran metodologis seperti ini, indikator dapat diubah dari teknologi kuasa yang menutup kemungkinan menjadi instrumen reflektif yang membantu membuka ruang bagi desain kebijakan yang lebih adil, demokratis, dan peka terhadap keragaman pengalaman hidup.

11.3 Apa yang Diukur dan Apa yang Tak Terlihat: Keadilan, Konflik, dan Kualitas Proses

Dalam subbagian ini, kita perlu bertanya secara sistematis: ketika regulator, lembaga internasional, dan lembaga pemeringkat menyusun indikator efektivitas regulasi di sektor energi, apa sebenarnya yang dianggap penting, dan apa yang dibiarkan menghilang di luar bingkai pengukuran. Indikator komposit—sekumpulan angka yang digabungkan menjadi skor tunggal—sering diperlakukan seolah-olah mampu meringkas kompleksitas *governance* energi ke dalam peringkat sederhana yang bisa dibandingkan lintas negara. Namun di balik kesederhanaan ini, terdapat proses seleksi variabel, penetapan bobot, dan normalisasi yang tidak netral. Keadilan, konflik sosial, dan kualitas proses partisipasi warga sering kali tidak muncul sebagai angka eksplisit, sehingga tampak seolah tidak berada di pusat masalah, padahal justru di sanalah inti politik transisi energi berkelanjutan dipertaruhkan.

Genealogi indikator komposit di sektor energi tidak jauh dari logika yang sudah lebih dulu mapan dalam indeks seperti *Doing Business* atau indikator kemudahan investasi lain, di mana performa negara diukur lewat serangkaian prosedur administratif, kecepatan perizinan, dan stabilitas regulasi. Ketika logika ini bermigrasi ke ranah regulasi energi, termasuk

dalam narasi transisi dari nuklir ke sumber lain, fokus pengukuran sering bergeser ke kelancaran reformasi dan kepastian kebijakan, sementara aspek keadilan prosedural dan transparansi partisipasi publik menjadi sekadar catatan pinggir. Studi tentang peralihan dari energi nuklir di Taiwan menunjukkan bagaimana transisi yang diklaim "hijau" dapat memproduksi ketidakadilan baru ketika partisipasi dan transparansi publik hanya diukur secara dangkal (Huang & Chen, 2023). Di sinilah tampak bahwa indikator efektivitas regulasi bisa memuji reformasi yang berjalan cepat, sambil menutupi jejak eksklusi sosial yang menyertainya.

Jika kita beralih ke domain yang eksplisit menyebut "keadilan energi", pertanyaan tentang apa yang diukur dan apa yang tak terlihat menjadi semakin tajam. Banyak indikator keberhasilan kebijakan di bidang energi berkelanjutan menonjolkan pertumbuhan kapasitas pembangkit, penurunan emisi, atau efisiensi sistem, tetapi jauh lebih jarang menakar bagaimana manfaat dan beban distribusinya dirasakan oleh kelompok rentan. Dalam konteks perluasan proyek energi terbarukan, konflik agraria, perubahan tata guna lahan, dan hilangnya mata pencaharian lokal sering kali tidak tercermin dalam skor kinerja regulasi. Ketika indikator sukses fokus pada megawatt yang terpasang, bukan pada relasi kekuasaan yang membingkai siapa yang harus berkorban, maka regulasi tampak efektif di atas kertas, sekaligus menyembunyikan ketegangan sosial yang terus berdenyut di lapangan.

Dimensi lain yang kerap hilang dari pengukuran adalah kualitas proses pengambilan keputusan. Di dalam banyak sistem pemantauan, keberadaan forum konsultasi publik sudah cukup untuk memberi nilai positif, tanpa menggali apakah forum tersebut benar-benar deliberatif, inklusif, atau sekadar ritual administratif. Indikator akan mencatat bahwa konsultasi telah "dilaksanakan", tetapi tidak menanyakan siapa yang diundang,

bahasa apa yang digunakan, dan sejauh mana kelompok terdampak memiliki kapasitas untuk menegosiasikan kepentingan mereka. Dalam situasi seperti ini, konflik yang mengemuka—demonstrasi, gugatan, atau aksi penolakan—akhirnya muncul bukan sebagai gejala adanya kesenjangan keadilan, melainkan dipandang sebagai gangguan terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Dengan demikian, angka-angka indikator justru membantu menormalkan pandangan bahwa keberatan warga adalah "deviasi" dari jalur transisi yang dianggap rasional.

Politik indikator tidak berhenti pada pilihan apakah variabel keadilan dan konflik dimasukkan atau tidak, tetapi juga pada bagaimana variabel itu didefinisikan. Ketika keadilan diukur semata-mata sebagai "akses terhadap listrik" atau "jumlah rumah tangga tersambung jaringan", maka bentuk-bentuk ketidakadilan lain—seperti tarif yang tak terjangkau, pemutusan sepihak, atau ketergantungan pada teknologi yang sulit dirawat—akan hilang dari radar. Konflik sosial kemudian hanya tampil sebagai kasus ekstrem yang masuk media, bukan sebagai indikator sistematis bahwa desain regulasi gagal mengakui kerentanan tertentu. Di tingkat ini, indikator menjadi semacam tata bahasa kekuasaan: ia menentukan kata-kata apa yang boleh diucapkan dalam diskusi kebijakan, dan mana yang hanya boleh hidup sebagai cerita lirih di komunitas terdampak.

Beberapa studi tentang tata kelola sistem kelistrikan di Amerika Latin menunjukkan bahwa struktur institusional dan relasi elite sangat memengaruhi siapa yang mendapatkan suara dalam transisi energi, serta siapa yang terpinggirkan dari proses penentuan arah (González, Viglio, Macia, & Ferreira, 2024). Temuan tersebut relevan ketika kita menelaah indikator efektivitas regulasi, karena variabel yang dipilih sering kali lebih mencerminkan kepentingan aktor kuat—misalnya stabilitas pengembalian investasi atau kepastian tarif—ketimbang

pengalaman warga yang menanggung dampak proyek. Dalam kerangka ini, kebijakan energi dinilai berhasil ketika mampu menenangkan pasar dan menekan risiko bagi investor, sementara ketidakpastian sosial diabaikan karena sulit dikonversi menjadi angka yang bisa diperbandingkan lintas negara. Angka, dengan kata lain, menjadi cara halus untuk mengutamakan satu jenis kepentingan dan meremehkan yang lain.

Ketika konflik muncul dalam bentuk penolakan proyek, sengketa lahan, atau tuntutan kompensasi, indikator komposit biasanya hanya menangkapnya sebagai "risiko politik" atau "ketidakpastian implementasi". Cara pelabelan ini menempatkan konflik sebagai masalah yang harus dikelola agar proyek tetap berjalan, bukan sebagai sinyal adanya persoalan keadilan yang belum diselesaikan. Padahal, di balik blokade jalan atau petisi komunitas, sering tersembunyi kritik mendalam terhadap cara negara dan korporasi mendefinisikan kemajuan. Dengan mereduksi konflik menjadi sekadar variabel risiko, indikator turut membingkai masyarakat terdampak sebagai hambatan, bukan sebagai subjek politik yang sah. Akibatnya, kualitas proses negosiasi, intensitas dialog, dan keberanian untuk meninjau ulang desain proyek tidak memperoleh status sebagai indikator keberhasilan yang layak dicatat.

Aspek lain yang hilang dari banyak indikator efektivitas regulasi adalah pengakuan terhadap pengetahuan lokal dan kapasitas warga untuk mengelola risiko. Indikator mengandalkan data resmi yang dikumpulkan lembaga pusat, sementara observasi, pengalaman, dan intuisi komunitas sering ditempatkan di luar kategori "bukti" yang sah. Ketika hanya data kuantitatif tertentu yang diakui, maka cara warga membaca perubahan iklim lokal, debit air, atau efek polusi terhadap kesehatan keluarga tidak pernah menjadi bagian dari penilaian kinerja regulasi. Padahal, kualitas proses kebijakan sangat

ditentukan oleh sejauh mana pengalaman tersebut diundang dan diterjemahkan ke dalam keputusan. Dengan demikian, ketimpangan epistemik—siapa yang boleh menyebut sesuatu sebagai "evidence"—membentuk batas imajinasi tentang perubahan kebijakan yang mungkin.

Dalam konteks ekspansi proyek energi terbarukan, ketimpangan epistemik ini berkelindan dengan ketimpangan material. Indikator keberhasilan sering merayakan peningkatan kapasitas pembangkit surya atau angin tanpa memeriksa apakah proyek tersebut memperdalam polarisasi antara pusat dan pinggiran. Komunitas yang lahannya diambil untuk instalasi besar-besaran mungkin hanya melihat sedikit perbaikan dalam layanan listrik, atau bahkan tetap menjadi konsumen dengan tarif tinggi. Namun indikator akan menilai kebijakan tersebut sukses karena emisi turun dan kapasitas energi bersih naik. Dengan cara ini, transisi menuju energi terbarukan dapat digambarkan sebagai kisah kemenangan di atas kertas, sementara cerita tentang komunitas yang merasa dikorbankan dibiarkan mengambang di luar statistik resmi, tanpa ruang untuk memengaruhi definisi efektivitas itu sendiri.

Dari perspektif *governmentality*, indikator komposit dapat dipahami sebagai perangkat yang membentuk medan di mana subjek dan institusi belajar mengatur diri. Ketika negara terus-menerus dibandingkan dalam peringkat global, pejabat publik, investor, dan konsultan akan menyesuaikan strategi agar skor meningkat, meskipun itu berarti memprioritaskan reformasi yang paling mudah diukur ketimbang perubahan struktural yang sulit dipadatkan menjadi angka. Di sini kualitas proses—seperti kedalaman deliberasi, keberanian mengakui konflik, atau inovasi dalam mekanisme partisipasi—sering kalah oleh reformasi prosedural yang cepat menaikkan skor. Dengan demikian, indikator bukan sekadar alat diagnosis, melainkan juga mesin normatif yang mengajarkan apa yang dianggap

penting untuk dilakukan dan apa yang boleh diabaikan tanpa konsekuensi reputasional.

Penelitian mengenai rumah tangga sebagai agen dalam transisi energi menunjukkan bahwa perubahan signifikan sering terjadi pada level mikro, ketika warga mengatur ulang infrastruktur sehari-hari, mengadopsi teknologi digital, dan merakit berbagai perangkat untuk menegosiasikan ulang relasi dengan penyedia energi (Rohracher, Velkova, Magnusson, & Farhangi, 2025). Namun, bentuk-bentuk agensi ini jarang sekali masuk ke dalam indikator efektivitas regulasi, karena terlalu berantakan, kontekstual, dan tidak mudah dinormalisasi. Akibatnya, kebijakan yang sederhana di atas kertas dapat mengacaukan praktik keseharian di rumah tangga yang sebenarnya menopang stabilitas sistem energi. Ketika indikator hanya memantau stabilitas pasokan dan kepastian tarif, ia mengabaikan kerja-kerja tersembunyi rumah tangga yang harus menyesuaikan konsumsi, memodifikasi instalasi, atau menanggung konsekuensi teknis dari kebijakan yang dirancang jauh di pusat kekuasaan.

Relasi antara indikator dan kebijakan energi juga tampak dalam cara kementerian dan lembaga internasional menggunakan peringkat untuk mendorong paket reformasi tertentu. Negara-negara yang ingin naik peringkat sering kali menerima logika indikator tanpa banyak perlawanan, karena perbaikan skor dianggap sebagai tanda modernisasi dan kredibilitas di mata investor. Dalam proses ini, perdebatan mengenai keadilan dan konflik dipersempit menjadi isu "komunikasi publik" atau "manajemen pemangku kepentingan", bukan sebagai bahan untuk meninjau ulang konfigurasi kekuasaan dalam sistem energi. Di sisi lain, komunitas terdampak hampir tidak pernah diberi akses terhadap metodologi penyusunan indikator, sehingga mereka kesulitan menggugat bias yang tertanam dalam definisi efektivitas itu

sendiri. Transparansi hanya berjalan satu arah: negara diminta transparan kepada pasar, bukan kepada warganya.

Di tingkat diskursif, indikator berfungsi sebagai bahasa teknis yang dapat mereduksi politik menjadi persoalan teknis. Ketika konflik di sekitar proyek pembangkit atau jaringan transmisi diartikulasikan sebagai "kendala implementasi" dalam laporan indikator, maka kekerasan struktural, ketimpangan historis, dan kecurigaan warga terhadap negara menghilang dari narasi resmi. Istilah seperti *benchmarking*, *performance* atau *best practice*—yang terdengar netral—diandalkan untuk menarasikan kebijakan sebagai rangkaian langkah rasional menuju efisiensi, bukan sebagai medan kontestasi kepentingan. Dalam situasi semacam ini, siapa pun yang mempertanyakan indikator sering dicurigai anti-kemajuan, padahal yang dipertanyakan bukan komitmen terhadap energi bersih, melainkan cara kita mendefinisikan keberhasilan dan siapa yang berhak mendefinisikannya.

Jika kita menerima bahwa indikator adalah konstruksi politik, maka tugas berikutnya adalah memikirkan bagaimana mengembangkan ukuran-ukuran yang lebih peka terhadap keadilan, konflik, dan kualitas proses, tanpa terjebak dalam ilusi bahwa semua dimensi ini bisa disederhanakan menjadi angka. Beberapa pendekatan mencoba memasukkan variabel partisipasi, distribusi manfaat, dan pengakuan terhadap kelompok rentan ke dalam kerangka evaluasi. Namun kita perlu berhati-hati agar indikator "keadilan energi" tidak sekadar menambah kolom baru dalam lembar kerja, sementara praktik substantifnya tetap menyingkirkan suara minoritas. Tantangannya adalah merancang mekanisme evaluasi yang membuka ruang bagi narasi kualitatif, kesaksian komunitas, dan pembacaan konflik sebagai sumber pengetahuan, bukan sekadar sumber masalah. Dengan kata lain, indikator harus menjadi pintu masuk untuk mengakui kerumitan, bukan alat untuk menghapusnya.

Dalam konteks perluasan proyek energi terbarukan di negara-negara berkembang, isu ini menjadi sangat mendesak. Jika indikator keberhasilan hanya menghitung kapasitas yang terpasang, penurunan intensitas emisi, dan stabilitas regulasi, maka proyek yang secara sosial merusak tetap bisa dipuji sebagai cerita sukses. Sebaliknya, proyek skala kecil yang dikelola komunitas, meski secara keadilan lebih progresif, mungkin dianggap kurang menarik karena dampaknya terhadap angka nasional relatif terbatas. Di sini, indikator berpotensi mengarahkan aliran dana publik dan swasta ke proyek yang paling menguntungkan dalam bahasa statistik, bukan yang paling adil dalam praktik. Pergeseran ini rentan mengulangi pola kolonial: masyarakat lokal kembali menjadi pemasok ruang dan sumber daya bagi agenda global, sementara suara mereka disaring melalui matriks evaluasi yang tidak mereka rancang.

Pada akhirnya, apa yang diukur dan apa yang dibiarkan tak terlihat dalam indikator efektivitas regulasi akan membentuk horizon imajinasi kebijakan kita. Jika keadilan, konflik, dan kualitas proses hanya hadir sebagai catatan pinggir, maka pembuat kebijakan akan terus menganggapnya sebagai variabel sekunder yang bisa dikelola secara kosmetik. Sebaliknya, jika indikator sengaja dirombak untuk mengakui ketegangan, mendengar suara yang tidak nyaman, dan mengintegrasikan pengalaman kelompok yang selama ini dimarjinalkan, maka regulasi kebijakan energi berkelanjutan dapat bergerak melampaui logika stabilitas teknokratis menuju horizon yang lebih demokratis dan berkeadilan. Tugas filsafat kekuasaan di sini bukan sekadar mengkritik angka, tetapi juga mengajak kita melihat bahwa di balik setiap skor dan peringkat, selalu ada keputusan normatif tentang siapa yang dianggap penting, dan siapa yang dibiarkan tetap tak terlihat.

11.4 Penggunaan Indikator dalam Advokasi dan Conditionalities

Dalam subbagian ini, kita menyoroti bagaimana indikator efektivitas regulasi tidak hanya hidup di dunia teknokratik pejabat dan konsultan, tetapi juga menjadi amunisi utama dalam advokasi, lobi, dan *conditionalities* yang melekat pada aliran pendanaan internasional. Indikator komposit, skor tata kelola, dan indeks "kesiapan transisi" sering dipakai organisasi internasional, lembaga keuangan, dan jaringan masyarakat sipil untuk memberi label pada negara: siapa yang dianggap "serius", "tertinggal", atau "berisiko tinggi". Label ini kemudian beredar di laporan kebijakan, konferensi, hingga ruang negosiasi bilateral, membentuk persepsi tentang kapasitas dan kemauan politik pemerintah. Dengan demikian, indikator tidak lagi sekadar alat diagnosis netral, tetapi berfungsi sebagai bahasa yang memampukan aktor tertentu mengklaim otoritas moral dan teknis untuk menuntut perubahan regulasi energi di berbagai yurisdiksi.

Dalam ekosistem perundingan iklim global, indikator menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi advokasi. Laporan *stocktake* atau penilaian kolektif kemajuan Paris Agreement menggunakan berbagai metrik emisi, intensitas karbon, dan kesenjangan implementasi untuk menyimpulkan bahwa komitmen negara masih jauh dari cukup, dan narasi ini kemudian dipakai untuk mendesak peningkatan ambisi kebijakan (Aidam, 2024). Organisasi masyarakat sipil mengutip skor, grafik, dan peringkat untuk menunjukkan ketidakselarasan antara retorika pemerintah dan capaian faktual. Di satu sisi, praktik ini membantu memecah kabut klaim politis yang tidak berbasis data. Di sisi lain, fokus berlebihan pada indikator agregat berisiko mengaburkan keragaman konteks domestik, terutama ketika angka-angka tersebut diangkat tanpa penjelasan tentang bagaimana metrik itu

disusun, apa yang disederhanakan, dan apa yang sama sekali tidak diukur.

Advokasi di tingkat nasional kerap mengandalkan indikator untuk menyoroti kesenjangan antara target resmi dan praktik nyata, terutama terkait penetrasi energi terbarukan dalam bauran listrik. Lembaga riset dan koalisi masyarakat sipil akan mengutip persentase kapasitas terpasang, kecepatan penambahan proyek baru, atau rasio subsidi fosil terhadap dukungan bagi sumber energi bersih untuk menunjukkan arah prioritas pemerintah. Indikator ini memudahkan publik membaca perbandingan antarnegara: siapa yang tampak progresif, siapa yang tertinggal. Namun, ketika angka-angka tersebut diperlakukan sebagai kebenaran tunggal, nuansa mengenai kualitas proyek, dampak sosial, dan distribusi manfaat sering hilang. Sebuah negara bisa tampak berhasil karena kapasitas energi hijau meningkat pesat, padahal di baliknya terdapat konflik lahan, penggusuran halus, atau struktur tarif yang tetap tidak adil bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

Penggunaan indikator dalam advokasi juga berkaitan erat dengan strategi *naming and shaming*, di mana negara dengan skor buruk diangkat sebagai contoh kegagalan, sementara negara dengan skor tinggi dijadikan model. Praktik ini kuat secara simbolik, tetapi tidak selalu adil. Negara dengan kapasitas birokrasi lebih tinggi dan infrastruktur data yang lebih baik cenderung tampak lebih "siap" dalam indikator, meskipun kebijakan di lapangan belum tentu lebih demokratis atau lebih peka terhadap kelompok rentan. Sebaliknya, negara dengan kelemahan statistik bisa terlihat buruk semata karena data kurang lengkap, bukan karena kebijakan energi mereka lebih merusak. Advokasi yang terlalu bergantung pada peringkat berisiko mengukuhkan hierarki pengetahuan global, di mana standar evaluasi yang ditetapkan di pusat-pusat keahlian

internasional diterapkan secara homogen pada konteks yang sangat berbeda.

Di luar ranah advokasi, indikator menjadi instrumen kunci dalam skema *conditionalities* yang menyertai bantuan pembangunan dan pembiayaan iklim. Lembaga keuangan multilateral atau donor bilateral mengaitkan pencairan pinjaman lunak, hibah, atau dukungan teknis dengan tercapainya "tonggak kinerja" tertentu: reformasi tarif, penghapusan subsidi, atau adopsi regulasi baru. Tonggak ini hampir selalu dirumuskan dalam bentuk indikator kuantitatif yang terukur secara periodik. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa konfigurasi aktor baru—termasuk lembaga internasional dan jaringan ahli—dapat menggeser orientasi kebijakan domestik menuju pemenuhan indikator yang disukai komunitas internasional (Kameyama, 2021). Dengan demikian, angka bukan hanya alat pemantauan, tetapi menjadi syarat yang harus dipenuhi agar negara tetap dianggap kredibel di mata pasar dan donor.

Ketika *conditionalities* berbasis indikator meresap ke dalam perancangan kebijakan energi, terjadi proses penyesuaian orientasi pemerintahan yang halus namun dalam. Pemerintah mulai merancang paket reformasi dengan menanyakan terlebih dahulu: perubahan apa yang paling cepat menaikkan skor dan memenuhi matriks kinerja yang disusun lembaga pendana. Dalam konteks ini, kebijakan energi mudah bergeser dari upaya menjawab persoalan keadilan sosial dan kebutuhan warga, menjadi strategi mengelola persepsi eksternal. Reformasi yang sulit diukur—misalnya, peningkatan kualitas deliberasi publik atau mekanisme pengakuan hak komunitas lokal—sering kalah prioritas dibanding langkah yang jelas menaikkan indikator, seperti penyederhanaan prosedur investasi atau pengurangan kewenangan regulasi tertentu demi mempercepat proyek.

Conditionalities berbasis indikator juga memengaruhi cara negara memandang risiko dan tanggung jawab. Ketika keberhasilan diukur melalui indikator tertentu, risiko yang mengancam pencapaian target-target angka cenderung dipandang sebagai sesuatu yang harus diminimalkan, bahkan jika itu berarti mengurangi ruang perlawanan atau perdebatan publik. Misalnya, penolakan komunitas lokal terhadap proyek pembangkit bisa diposisikan sebagai hambatan implementasi yang mengancam pencapaian indikator, bukan sebagai sinyal bahwa desain kebijakan mengandung masalah distribusi manfaat dan beban. Logika ini mendorong negara mengadopsi pendekatan manajemen konflik yang pragmatis dan sempit: bagaimana meredam protes cukup lama sampai indikator tercapai dan dana dicairkan, ketimbang merevisi secara mendalam struktur kebijakan yang memicu ketidakadilan.

Di tingkat wacana, indikator yang dipakai untuk *conditionalities* sering dibingkai sebagai standar objektif yang netral, padahal pemilihannya mencerminkan preferensi nilai tertentu. Ketika kecepatan liberalisasi pasar listrik atau skala keterbukaan investasi menjadi indikator utama, pesan implisitnya adalah bahwa deregulasi dan privatisasi merupakan jalur utama menuju keberhasilan transisi. Aspek lain, seperti perlindungan pekerja, keberlanjutan fiskal jangka panjang, atau perlindungan hak-hak masyarakat adat, jarang muncul sebagai kondisi eksplisit. Akibatnya, negara dapat terdorong menandatangani paket reformasi yang memperkuat posisi aktor kuat di sektor energi, sementara kelompok lemah dipaksa menanggung konsekuensi jangka panjang tanpa pernah masuk sebagai variabel dalam lembar kerja *conditionalities*.

Pengaruh indikator terhadap arsitektur *conditionalities* menjadi semakin terasa ketika menyangkut ekspansi proyek energi terbarukan berskala besar. Donor dan lembaga keuangan kerap menautkan dukungan pada target kapasitas tambahan

tertentu—berapa megawatt yang harus terpasang pada tanggal tertentu—sehingga pemerintah terdorong mengutamakan proyek besar yang cepat menaikkan angka, ketimbang skema desentralisasi yang memperluas akses dan kendali komunitas. Indikator kapasitas terpasang memberikan ilusi kemajuan yang jelas, tetapi tidak mengatakan siapa yang mendapatkan listrik murah, siapa yang menanggung dampak lingkungan, dan bagaimana struktur kepemilikan proyek dibagi. Dalam logika ini, sentralisasi keputusan sering dipandang lebih efisien demi mencapai target numerik, meski mengorbankan kesempatan membangun tata kelola yang lebih demokratis.

Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil juga menggunakan indikator yang sama untuk menantang pemerintah dan lembaga pendana. Mereka menyusun laporan bayangan, membandingkan data resmi dengan pengalaman lapangan, dan memperlihatkan ketidaksesuaian antara pencapaian indikator dan realitas sosial. Namun advokasi ini tetap berjalan di dalam medan wacana yang sudah dibentuk oleh logika angka. Untuk didengar, mereka perlu mengemas keluhan warga ke dalam bahasa *metrics*: jumlah konflik, persentase rumah tangga yang terkena dampak, atau nilai kerugian ekonomi. Strategi ini efektif secara komunikatif, tetapi sekaligus mengunci perdebatan dalam kerangka di mana hanya realitas yang bisa dinyatakan sebagai angka yang dianggap sah. Cerita-cerita yang tidak mudah dikuantifikasi—trauma, kehilangan tempat suci, atau hancurnya jaringan solidaritas—berisiko terus tersisih.

Penggunaan indikator dalam *conditionalities* juga memperkuat asimetri epistemik antara lembaga internasional dan negara penerima. Metodologi perhitungan sering rumit, ditulis dalam bahasa teknis, dan dikembangkan oleh tim ahli di luar jangkauan publik domestik. Negara penerima, terlebih lagi komunitas terdampak, jarang memiliki peluang untuk ikut merumuskan apa yang seharusnya diukur sebagai tanda

keberhasilan. Akibatnya, kedaulatan pengetahuan mengenai apa itu "efektivitas regulasi" berpindah dari parlemen, serikat pekerja, dan organisasi warga kepada konsorsium pakar dan ekonom. Dalam posisi ini, upaya mempertanyakan indikator sering diberi label sebagai tindakan anti-pasar atau anti-reformasi, sehingga membuka peluang bagi delegitimasi kritik yang justru berangkat dari pengalaman nyata ketidakadilan di lapangan.

Jika kita fokus pada kebijakan energi, dinamika ini tampak dalam cara dokumen strategi nasional dirancang untuk "selaras" dengan kerangka indikator global. Rencana jangka panjang dan *roadmap* sering meniru struktur indeks internasional, sehingga bab-bab tentang kepastian investasi, reformasi tarif, dan pengurangan risiko politik ditulis dengan sangat rinci, sementara bagian tentang hak warga, demokrasi energi, atau peran pemerintah daerah dibuat lebih singkat. Penyusunan indikator di tingkat internasional akhirnya berbalik mengkonstruksi cara negara berbicara tentang dirinya sendiri. Kebijakan energi yang sebelumnya diperdebatkan dalam bahasa kedaulatan, keadilan sosial, dan pembangunan nasional kini semakin didisiplinkan ke dalam kosakata peringkat, skor, dan *benchmark*.

Di tengah konfigurasi kekuasaan tersebut, masih ada ruang bagi aktor lokal untuk memanfaatkan indikator secara subversif. Beberapa jaringan masyarakat sipil dan akademisi kritis menyusun indikator tandingan yang memasukkan variabel keadilan distribusi, kualitas partisipasi, dan pengakuan terhadap kelompok terdampak. Mereka memproduksi laporan alternatif, memetakan wilayah yang menanggung beban proyek, dan menilai kinerja pemerintah dengan kriteria yang berbeda dari lembar kerja donor. Langkah ini tidak menghapus dominasi indikator resmi, tetapi menciptakan medan wacana baru di mana angka-angka bisa dipertanyakan dan ditafsir ulang.

Dengan demikian, indikator tidak hanya menjadi alat kontrol dari atas, tetapi juga dapat dipakai untuk menggugat klaim efektivitas yang mengabaikan dimensi etis dan politis.

Meski demikian, pendekatan kritis terhadap indikator dan *conditionalities* harus waspada terhadap jebakan yang sama: obsesi kuantifikasi. Upaya memasukkan keadilan dan konflik ke dalam indikator baru bisa tanpa sengaja mereproduksi asumsi bahwa segala sesuatu harus bisa diukur untuk dianggap penting. Padahal, sebagian dimensi keadilan memang menolak disempitkan menjadi angka. Proses panjang membangun kepercayaan antara negara dan komunitas, misalnya, sulit direpresentasikan oleh indikator tunggal tanpa kehilangan makna. Pertanyaannya bukan hanya indikator apa yang perlu ditambahkan, tetapi juga kapan kita perlu menerima bahwa beberapa aspek kebijakan yang baik seharusnya tetap berada di wilayah narasi kualitatif, testimoni, dan refleksi filosofis yang tidak tunduk sepenuhnya pada logika skor.

Dalam konteks perluasan proyek energi terbarukan, refleksi ini sangat relevan. Jika keberhasilan diukur semata dari besarnya kapasitas terpasang, kecepatan pelelangan, atau jumlah kontrak yang ditandatangani, maka tekanan *conditionalities* akan terus diarahkan untuk mempercepat angka-angka tersebut. Sementara itu, indikator yang menyentuh kualitas hidup, otonomi komunitas, dan kemampuan warga mengendalikan infrastruktur di sekitarnya cenderung tidak diprioritaskan. Tantangannya adalah merumuskan kerangka evaluasi yang mampu mengakui keberhasilan proyek kecil yang dikelola komunitas, meski kontribusinya terhadap statistik nasional tampak kecil. Jika tidak, narasi tentang "cerita sukses" akan terus didominasi proyek besar yang menyenangkan investor dan pendonor, namun menyisakan jejak ketidakadilan yang tidak tercatat di dalam lembar indikator resmi.

Penggunaan indikator dalam advokasi dan *conditionalities* dengan demikian adalah cermin tajam bagaimana kekuasaan bekerja melalui angka. Indikator tidak hanya mengukur, tetapi mengajarkan apa yang harus dikejar dan apa yang boleh diabaikan; ia menentukan bentuk tuntutan masyarakat sipil dan sekaligus mengatur syarat aliran modal internasional. Filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan perlu terus mengungkap siapa yang merumuskan indikator, dengan nilai apa, dan untuk tujuan siapa. Dengan menempatkan keadilan, konflik, dan suara kelompok yang selama ini tak terlihat sebagai pusat perenungan, kita dapat mulai memikirkan kembali bagaimana indikator dipakai, dinegosiasikan, atau bahkan ditolak. Bukan agar kebijakan terbebas dari data, tetapi agar angka berhenti menjadi tiran yang membungkam kompleksitas moral dan politik yang sesungguhnya menyertai setiap keputusan publik.

11.5 Merancang Indikator yang Lebih Adil: Prinsip dan Kompromi

Merancang indikator yang lebih adil berarti mengakui sejak awal bahwa indikator bukan sekadar alat ukur, melainkan teknologi kuasa yang menentukan apa yang dianggap penting, apa yang dianggap berhasil, dan siapa yang dinilai layak mendapat dukungan. Dalam indikator efektivitas regulasi, terutama indikator komposit, ada kecenderungan menyederhanakan realitas menjadi angka tunggal yang tampak objektif. Padahal, penyederhanaan itu selalu mengandung pilihan politik: variabel apa yang dimasukkan, variabel apa yang dikeluarkan, bobot siapa yang dianggap lebih penting, dan pengalaman siapa yang dianggap tidak relevan. Dalam bahasa sederhana, indikator komposit seperti kamera dengan lensa tertentu: ia membuat sebagian hal terlihat tajam, tetapi membuat hal lain kabur atau hilang sama sekali. Karena itu,

prinsip pertama dari indikator yang adil adalah transparansi normatif, yakni keterbukaan tentang nilai yang dipakai dalam desain indikator. Jika indikator menilai "efektivitas", maka harus dijelaskan efektivitas untuk siapa, pada skala apa, dan dengan biaya sosial seperti apa. Tanpa transparansi normatif, indikator akan tampak netral, tetapi sebenarnya bekerja sebagai instrumen yang menormalisasi perspektif teknokrat dan mengabaikan pengalaman warga. Dalam konteks regulasi, indikator yang hanya mengukur kepatuhan prosedural dapat menyembunyikan ketidakadilan substantif, misalnya kebijakan yang rapi di atas kertas tetapi memukul kelompok rentan. Maka, indikator yang lebih adil harus dibangun sebagai perangkat reflektif, bukan sekadar perangkat peringkat.

Prinsip kedua adalah memasukkan dimensi keadilan secara eksplisit, bukan sebagai tambahan setelah indikator selesai dibuat. Banyak indikator komposit memprioritaskan kemudahan pengukuran, sehingga aspek yang sulit diukur cenderung dihapus, padahal aspek itu sering paling penting bagi keadilan. Misalnya, kualitas partisipasi publik, rasa aman warga terhadap perubahan kebijakan, atau pengalaman kelompok miskin energi dalam menghadapi tarif. Dalam literatur, kebutuhan ini sering dirumuskan melalui pengembangan metrik keadilan yang lebih luas. Amosi et al. (2025) menunjukkan bahwa indikator keadilan energi, iklim, dan lingkungan berkembang selama 25 tahun riset dan mencakup dimensi prosedural, kesehatan, demografis, hingga skala rumah tangga. Bagi pembaca awam, artinya sederhana: indikator yang adil tidak boleh hanya menghitung proyek atau kapasitas, tetapi harus menilai dampak pada kehidupan nyata. Prinsip ini menuntut kompromi: indikator yang adil mungkin lebih kompleks, lebih lambat dibangun, dan lebih mahal dalam pengumpulan data. Namun biaya ini adalah biaya demokrasi kebijakan. Tanpa kompromi tersebut, indikator akan terus

memproduksi kebijakan yang terlihat efektif di laporan, tetapi rapuh di lapangan. Karena itu, desain indikator harus melibatkan ahli statistik, pembuat kebijakan, dan komunitas terdampak agar dimensi yang sulit diukur tidak otomatis disingkirkan.

Prinsip ketiga adalah menghindari dominasi satu perspektif teknis dalam penentuan bobot indikator, karena bobot adalah bentuk kuasa yang paling tersembunyi dalam indikator komposit. Dalam bahasa sederhana, bobot menentukan "apa yang dihitung lebih penting." Jika bobot ditentukan hanya oleh teknokrat, maka indikator akan cenderung mengutamakan stabilitas administratif dan efisiensi biaya, sementara pengalaman warga dianggap sekunder. Di sinilah pentingnya keadilan prosedural dalam desain indikator. Arkhurst et al. (2023) menunjukkan bahwa kerangka JUST-R memungkinkan evaluasi metrik keadilan sejak tahap awal riset dan inovasi, sehingga dimensi sosial tidak terlambat masuk setelah teknologi dan indikator sudah ditetapkan. Ini relevan untuk indikator efektivitas regulasi, karena indikator sering dipakai untuk menilai kinerja pemerintah dan menentukan arah reformasi. Dalam konteks kebijakan energi, misalnya, indikator yang hanya menilai "kecepatan izin proyek" dapat mendorong percepatan yang mengorbankan konsultasi publik, sehingga konflik meningkat ketika proyek energi terbarukan masuk ke wilayah komunitas. Karena itu, indikator yang adil harus menyeimbangkan target percepatan dengan ukuran legitimasi, keterjangkauan, dan pemerataan manfaat. Kompromi nya adalah indikator tidak lagi sederhana, tetapi menjadi lebih jujur. Dan justru kejujuran inilah yang membuat indikator mampu menjadi alat pembelajaran, bukan alat penutupan masalah.

Dalam indikator efektivitas regulasi, kompromi paling sulit adalah memilih antara kesederhanaan komunikasi dan ketelitian keadilan. Indikator komposit sering dipilih karena

mudah dipahami publik dan mudah dipakai pembuat kebijakan, tetapi kemudahan itu biasanya dibayar dengan hilangnya konteks. Karena itu, rancangan indikator yang lebih adil perlu mempraktikkan dua prinsip sekaligus: memecah angka tunggal menjadi beberapa sub-indikator yang dapat dibaca, dan tetap menyediakan ringkasan komposit untuk kebutuhan perbandingan. Di sini, istilah *dashboard* dapat membantu. *Dashboard* dapat dijelaskan sederhana sebagai "panel ringkas" yang menampilkan beberapa ukuran sekaligus, sehingga pembaca melihat gambaran tanpa dipaksa percaya pada satu angka tunggal. Prinsip ini juga mengurangi godaan manipulasi, karena perubahan skor komposit bisa dilacak ke komponen tertentu. Kemprominya jelas: indikator menjadi lebih kompleks, dan kebutuhan data meningkat. Namun kompleksitas ini justru membuka ruang akuntabilitas, karena publik dapat bertanya bagian mana yang naik, bagian mana yang turun, dan mengapa. Rancangan yang adil juga harus menetapkan aturan tentang ketidakpastian data. Jika data tidak lengkap atau kualitasnya rendah, indikator harus menunjukkan keterbatasan itu secara eksplisit, bukan menyembunyikannya di balik rata-rata. Dalam bahasa sederhana, indikator yang adil harus berani berkata "angka ini punya batas," agar regulasi tidak dinilai seolah-olah realitas selalu rapi.

Prinsip berikutnya adalah memastikan indikator dibangun melalui tata kelola data yang jelas dan dapat diaudit, karena indikator yang adil bukan hanya soal variabel, tetapi juga soal cara data dikumpulkan, dibersihkan, dan diverifikasi. Ini penting karena proses teknis sering menjadi tempat tersembunyinya kuasa: siapa yang berhak menetapkan standar data, siapa yang menolak atau menerima data, dan siapa yang mengubah definisi. Dalam konteks pengukuran kinerja regulasi, pelajaran dapat diambil dari praktik penilaian kesesuaian standar. Studi tentang lembaga penilaian kesesuaian terakreditasi menunjukkan

bahwa guncangan besar seperti pandemi menyingkap kebutuhan akan ketahanan sistem penilaian, konsistensi standar, dan mekanisme pengawasan lintas negara (Koch et al., 2022). Untuk pembaca awam, maksudnya sederhana: jika aturan penilaian berubah-ubah atau pemeriksaan longgar, hasil penilaian tidak bisa dipercaya. Karena itu, indikator komposit perlu memiliki protokol audit: definisi variabel harus stabil, perubahan metodologi harus diumumkan, dan sumber data harus dapat ditelusuri. Komprominya adalah biaya administrasi dan waktu evaluasi meningkat. Tetapi tanpa audit, indikator akan mudah menjadi alat legitimasi semu: tampak ilmiah, padahal rapuh. Dengan audit yang jelas, indikator dapat dipakai sebagai alat pembelajaran, bukan sekadar alat pembenaran kebijakan.

Kompromi terakhir yang sering diabaikan adalah hubungan antara alat ukur dan kapasitas institusi. Indikator yang adil akan gagal jika institusi tidak mampu mengoperasikannya: tidak ada data, tidak ada sumber daya analis, dan tidak ada koordinasi lintas lembaga. Karena itu, rancangan indikator harus realistis terhadap ekosistem perencanaan dan pemodelan yang tersedia, termasuk perangkat, keterampilan, dan akses data. Tinjauan sistematis tentang alat perencanaan dan pemodelan energi menekankan bahwa pilihan alat, asumsi model, dan ketersediaan data sangat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan, sehingga indikator yang baik harus selaras dengan kemampuan perencanaan yang nyata (Akpahou et al., 2024). Dalam bahasa sederhana, indikator tidak boleh seperti mesin canggih yang tidak ada bengkel dan teknisinya. Di sisi lain, indikator yang terlalu sederhana juga berbahaya karena menutupi ketimpangan dan konflik distribusi. Dalam konteks energi terbarukan, indikator efektivitas regulasi perlu menilai bukan hanya kecepatan perizinan atau jumlah proyek, tetapi juga

keterjangkauan, penerimaan publik, dan pemerataan manfaat antarwilayah. Kompriminya adalah indikator harus menggabungkan ukuran teknis dan sosial, serta menetapkan bobot secara transparan melalui partisipasi. Dengan begitu, indikator tidak sekadar "menghitung", tetapi membantu regulasi melihat siapa yang tertinggal dan apa yang perlu diperbaiki.

Indikator yang lebih adil harus ditutup dengan satu kesadaran penting: indikator komposit selalu berisiko berubah menjadi alat legitimasi, bukan alat pembelajaran. Risiko ini muncul ketika indikator dipakai untuk membuktikan bahwa kebijakan sudah "baik", bukan untuk menyingkap bagian yang perlu diperbaiki. Karena itu, prinsip terakhir dari indikator yang adil adalah orientasi korektif, yaitu desain indikator yang memaksa institusi melihat kelemahan, bukan hanya merayakan kekuatan. Dalam bahasa sederhana, indikator harus membantu pemerintah menemukan titik rapuh sebelum publik menemukannya melalui konflik. Untuk itu, indikator komposit perlu memiliki mekanisme "alarm", misalnya ketika skor tertentu turun, sistem otomatis meminta audit atau evaluasi kebijakan. Indikator juga perlu menghindari budaya peringkat yang obsesif, karena peringkat mendorong institusi mengejar skor, bukan mengejar perbaikan substantif. Kompriminya adalah indikator yang adil akan lebih sering menghasilkan kritik terhadap pemerintah, dan ini tidak selalu nyaman secara politik. Namun justru ketidaknyamanan itulah yang membuat indikator berfungsi sebagai teknologi kuasa yang bertanggung jawab. Tanpa orientasi korektif, indikator komposit akan menjadi alat penutup masalah: ia memberi angka yang terlihat objektif, tetapi menenggelamkan pengalaman warga yang tidak sesuai dengan narasi keberhasilan.

Prinsip korektif juga menuntut indikator dibangun dengan ruang partisipasi yang nyata, bukan sekadar konsultasi simbolik. Ini penting karena indikator sering dirancang oleh ahli

statistik, ekonom, atau teknokrat, sementara kelompok terdampak tidak punya akses untuk menentukan apa yang seharusnya diukur. Padahal, keadilan indikator tidak hanya soal variabel, tetapi soal siapa yang diberi hak mendefinisikan "efektivitas." Dalam konteks ini, pelajaran dari pengembangan metrik keadilan menunjukkan bahwa indikator harus mencakup dimensi prosedural dan pengalaman hidup, bukan hanya dimensi teknis. Amosi et al. (2025) memperlihatkan bahwa indikator keadilan energi dan iklim berkembang menjadi multidimensi, mencakup aspek kesehatan, demografis, dan skala rumah tangga, sehingga desain indikator yang adil memerlukan keterlibatan lintas disiplin dan lintas kelompok sosial. Bagi pembaca awam, artinya sederhana: indikator harus menilai apakah kebijakan benar-benar terasa adil, bukan hanya apakah kebijakan "efisien." Kemprominya adalah partisipasi membuat proses lebih lambat, dan sering memunculkan konflik definisi. Namun konflik definisi adalah bagian dari demokrasi pengukuran. Jika konflik itu disingkirkan, indikator akan tampak rapi, tetapi kehilangan legitimasi sosial.

Dalam konteks kebijakan energi, indikator efektivitas regulasi yang adil harus mampu membaca paradoks transisi: regulasi dapat terlihat efektif karena proyek cepat berjalan, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketidakadilan baru yang memicu resistensi. Energi terbarukan, misalnya, dapat berkembang pesat jika regulasi mempermudah izin, tetapi percepatan itu bisa mengorbankan konsultasi publik, memperbesar konflik lahan, dan memperkuat dominasi aktor besar. Karena itu, indikator efektivitas regulasi harus menyeimbangkan ukuran percepatan dengan ukuran legitimasi, keterjangkauan, dan pemerataan manfaat. Indikator juga perlu memeriksa kesiapan institusional, karena regulasi yang baik di atas kertas tidak akan efektif jika kapasitas implementasi rendah. Tinjauan sistematis tentang alat perencanaan dan

pemodelan energi menegaskan bahwa kualitas keputusan kebijakan sangat dipengaruhi oleh alat, asumsi, dan ketersediaan data, sehingga indikator yang baik harus selaras dengan kemampuan perencanaan institusi (Akpahou et al., 2024). Dalam bahasa sederhana, indikator harus menilai apakah negara benar-benar mampu menjalankan regulasi, bukan hanya mampu menulis regulasi. Kompromínya adalah indikator menjadi lebih kompleks dan menuntut data yang lebih kaya. Namun kompleksitas ini adalah harga untuk keadilan. Jika indikator tetap sederhana demi kenyamanan, ia akan terus menyembunyikan ketimpangan, dan regulasi akan terus dinilai efektif meskipun warga merasakan sebaliknya.

Bagian IV
Institusi, Kualitas Tata Kelola, dan Dampaknya

12 Ambang Kualitas Institusi: Ketika Pengaruh Energi Terbarukan Bergantung pada Mutu Tata Kelola

12.1 Konsep Ambang Institusional: Kapan Kebijakan Mulai Efektif

Merancang indikator yang lebih adil untuk menilai efektivitas regulasi di bidang energi bukan sekadar latihan teknokratik, tetapi sebuah keputusan normatif tentang apa yang kita anggap sebagai keberhasilan dan kegagalan dalam kehidupan bersama. Selama ini, banyak indikator hanya mengukur hal-hal yang mudah diakses oleh statistik resmi, seperti jumlah proyek yang disetujui, kecepatan perizinan, atau volume investasi yang masuk ke sektor ketenagalistrikan. Padahal, dimensi keadilan, konflik, dan kualitas proses deliberatif sering justru menentukan apakah sebuah kebijakan diterima sebagai sah oleh warga yang terdampak dan oleh generasi yang akan datang. Karena itu, titik berangkat desain indikator yang adil adalah mengakui bahwa angka tidak pernah netral: setiap pilihan variabel, cara pengukuran, dan cara menggabungkan skor merupakan bentuk pemaknaan terhadap apa itu kemajuan, dan apa yang boleh dikorbankan di sepanjang jalan menuju transisi energi berkelanjutan. Dengan kesadaran ini, penyusunan indikator menjadi ruang politis yang harus dibuka untuk kritik dan partisipasi, bukan dibiarkan sebagai monopoli pakar statistik atau konsultan kebijakan.

Prinsip pertama yang perlu ditegaskan adalah bahwa indikator harus secara eksplisit memasukkan dimensi keadilan prosedural dan distribusional, bukan sekadar menambah

lampiran "sosial" di ujung kerangka evaluasi yang didominasi pertimbangan ekonomi. Dalam praktik, ini berarti menanyakan siapa yang diundang dan didengar dalam perumusan kebijakan, bagaimana informasi didiseminasikan, dan sejauh mana kelompok rentan memiliki daya tawar yang nyata, bukan hanya kehadiran simbolik di ruang konsultasi. Indikator yang adil tidak cukup mencatat keberadaan forum musyawarah atau jumlah pertemuan publik, melainkan perlu mengukur kualitas proses: misalnya frekuensi pertemuan, keberagaman peserta, bahasa yang digunakan, serta tindak lanjut atas keberatan yang diajukan warga. Tanpa dimensi ini, kebijakan yang lahir dari proses eksklusif dapat tetap mendapat nilai tinggi, hanya karena memenuhi kriteria efisiensi administratif dan konsistensi regulasi yang sempit, sementara rasa keadilan masyarakat justru terkikis. Pada titik ini, kita perlu jujur bahwa banyak kerangka evaluasi yang selama ini digunakan pemerintah masih berhenti pada pengukuran kehadiran acara dan dokumen, belum berani menyentuh pertanyaan siapa yang sungguh berdaya dan siapa yang hanya diminta hadir sebagai pelengkap.

Prinsip kedua berkaitan dengan cara indikator memperlakukan dampak material dari proyek dan program, terutama ketika ekspansi energi terbarukan diklaim sebagai tujuan utama transisi. Indikator yang hanya menghitung kapasitas terpasang, penurunan emisi per unit listrik, atau besarnya investasi hijau akan gagal melihat biaya sosial yang tersebar, seperti hilangnya akses terhadap lahan, perubahan pola penghidupan, atau beban kesehatan akibat konstruksi dan operasi infrastruktur besar. Untuk membuat kerangka yang lebih adil, kita perlu memasukkan ukuran-ukuran yang menangkap distribusi manfaat dan beban lintas kelas, gender, dan wilayah, sehingga keberhasilan teknis tidak menutupi ketidakadilan struktural. Ini bisa berupa indikator mengenai siapa yang menikmati tarif listrik yang terjangkau, siapa yang

menanggung risiko banjir atau kekeringan akibat perubahan tata ruang, dan siapa yang dipaksa beradaptasi dengan perubahan ekonomi lokal. Dengan demikian, proyek yang meningkatkan kapasitas energi bersih tetapi merusak basis hidup komunitas lokal tidak lagi dapat dipuji sebagai "sukses" hanya karena baik di atas kertas.

Prinsip ketiga menuntut agar indikator terbuka terhadap berbagai bentuk pengetahuan, tidak hanya data kuantitatif yang dikumpulkan oleh lembaga pusat. Pengetahuan lokal tentang perubahan lingkungan, pengalaman historis komunitas terhadap proyek sebelumnya, dan intuisi kolektif tentang risiko jangka panjang sering kali sulit dipadatkan menjadi angka tunggal, tetapi tetap penting bagi penilaian etis atas kebijakan. Di sinilah kombinasi antara indikator angka dan indikator naratif menjadi krusial: laporan kualitatif, studi kasus, dan kesaksian warga perlu dilihat sebagai bagian dari "bukti", bukan sekadar ilustrasi sampingan yang ditempatkan di kotak kecil dalam laporan resmi. Kerangka yang lebih adil akan memberi ruang bagi indikator deskriptif yang memuat cerita konflik, praktik perlawanan, dan keberhasilan kecil di tingkat lokal, sehingga gambaran efektivitas regulasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh statistik makro. Dengan cara ini, suara yang biasanya terpinggirkan dapat memasuki pusat perhitungan kebijakan, bukan lagi hanya menjadi catatan kaki. Dengan memasukkan berbagai bentuk pengetahuan ini ke dalam kerangka indikator, negara dipaksa untuk mengakui bahwa pengalaman hidup warga sama pentingnya dengan tabel angka ketika menilai apakah sebuah aturan benar-benar bekerja.

Tantangan lain muncul ketika kita menyadari bahwa indikator tidak hanya mengatakan apa yang penting, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya isu tertentu dari agenda kebijakan. Studi mengenai menghilangnya isu tata guna lahan dari keputusan UNFCCC menunjukkan bagaimana perubahan

fokus dan bahasa teknis dapat mendorong suatu tema ke pinggiran, meski secara substantif tetap krusial bagi krisis iklim (Goldstein, 2025). Pelajaran penting di sini adalah bahwa desain indikator harus peka terhadap risiko "penghapusan diskursif": saat sektor, kelompok, atau wilayah tertentu perlahan menghilang dari matriks evaluasi karena dianggap sulit diukur, terlalu politis, atau terlalu kontroversial untuk dirumuskan menjadi angka. Indikator yang lebih adil harus dirancang untuk secara berkala memeriksa apa yang tidak lagi muncul dalam pengukuran, mengidentifikasi siapa yang kehilangan visibilitas, dan mengapa absensi tersebut terjadi. Dengan demikian, indikator bukan hanya alat pengukuran, tetapi juga alarm terhadap bias struktural dalam perhatian kebijakan. Kesadaran mengenai kemungkinan penghapusan semacam ini mendorong kita untuk terus mempertanyakan apa saja yang luput dari matriks indikator, sehingga agenda kebijakan tidak sepenuhnya ditentukan oleh apa yang mudah dihitung.

Dalam konteks kebijakan energi, keadilan indikator juga menyangkut keterhubungan antar-sektor yang selama ini dipisah secara artifisial. Banyak kerangka evaluasi melihat regulasi energi seolah berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan pangan, tata ruang, perlindungan sosial, dan program pengentasan kemiskinan. Akibatnya, dampak silang—misalnya konflik antara pembangunan pembangkit dengan hak atas tanah pertanian atau kawasan konservasi—tidak tercermin dalam skor efektivitas yang dilaporkan. Kerangka yang lebih adil menuntut indikator yang mengakui keterkaitan lintas sektor ini, misalnya dengan menilai sejauh mana kebijakan energi selaras dengan rencana tata ruang partisipatif, strategi adaptasi perubahan iklim, atau program perlindungan masyarakat adat. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa lagi mengklaim sukses hanya karena sektor energi "tampil baik", sementara sektor lain menanggung ongkos yang tidak pernah diakui di lembar skor

resmi. Dengan cara pandang lintas sektor seperti ini, indikator membantu mengungkap rantai sebab akibat yang sering disembunyikan di balik pembagian kewenangan birokratis, sehingga beban sosial dari kebijakan dapat ditelusuri secara lebih jujur.

Prinsip keempat berkaitan dengan temporalitas: indikator tidak boleh hanya fokus pada capaian jangka pendek yang mudah dilaporkan setiap tahun, tetapi juga pada konsistensi kebijakan dan keberlanjutan institusional dalam horizon waktu yang panjang. Banyak kebijakan yang tampak berhasil dalam jangka pendek—misalnya melalui lonjakan investasi atau pencapaian target pembangunan proyek—namun rapuh ketika diuji terhadap perubahan pemerintahan, krisis ekonomi, atau tekanan sosial yang berulang. Indikator yang lebih adil harus memasukkan ukuran tentang stabilitas aturan main, kejelasan mekanisme pengaduan, dan kemampuan adaptasi regulasi terhadap temuan baru dan evaluasi kebijakan yang independen. Tanpa dimensi ini, kita berisiko merayakan "keberhasilan kilat" yang sesungguhnya dibangun di atas fondasi rentan, dan akhirnya membebankan biaya penyesuaian kepada generasi dan pemerintahan berikutnya yang tidak ikut menikmati manfaat awal. Indikator yang memuat dimensi waktu panjang memberi sinyal kepada perancang kebijakan bahwa tanggung jawab mereka tidak berhenti pada masa jabatan, melainkan berlanjut pada konsekuensi yang akan dialami oleh warga dan lingkungan di tahun-tahun mendatang.

Kerangka indikator yang peka keadilan juga perlu memasukkan dimensi kerentanan dan kapasitas adaptif, bukan sekadar menghitung rata-rata nasional yang menutupi perbedaan. Penelitian tentang kerentanan transisi energi menunjukkan bahwa daerah dan kelompok sosial yang berbeda memiliki eksposur, sensitivitas, dan kapasitas yang sangat bervariasi terhadap perubahan struktural di sektor energi

(Shen, 2024). Jika indikator hanya memotret tingkat nasional, variasi ini akan hilang, dan kebijakan yang dirancang atas dasar gambaran rata-rata berisiko memperdalam ketimpangan, karena kebijakan "satu resep untuk semua" jarang cocok bagi kelompok yang paling lemah. Indikator yang lebih adil harus turun ke level daerah, bahkan komunitas, dengan menggabungkan data spasial, sosial, dan ekonomi, sehingga "keberhasilan" transisi tidak lagi sekadar angka tunggal, melainkan mosaik yang mengakui ketimpangan dan kerentanan yang perlu ditangani secara khusus. Pendekatan semacam ini juga mendorong lahirnya solidaritas lintas wilayah, karena kelompok yang relatif lebih aman dapat melihat bagaimana transisi yang sama justru menghadirkan risiko besar bagi kawasan lain, dan karenanya terdorong untuk menuntut desain kebijakan yang lebih adil.

Prinsip kelima adalah pengakuan terhadap konflik sebagai bagian sah dari demokrasi, bukan sekadar gangguan terhadap pelaksanaan proyek energi terbarukan maupun infrastruktur lain yang dianggap strategis. Indikator yang terlalu menekankan stabilitas dan ketiadaan protes dapat mendorong praktik depolitisasi: konflik disapu ke bawah karpet, kesepakatan dibuat di ruang tertutup, dan saluran keberatan dipersempit agar skor kinerja tampak baik di mata investor dan donor. Kerangka yang lebih adil justru perlu memasukkan indikator mengenai keberadaan dan kualitas mekanisme penyelesaian sengketa, jumlah kasus yang diselesaikan melalui dialog, serta derajat keterbukaan informasi mengenai konflik yang sedang berlangsung. Dengan cara ini, munculnya konflik tidak otomatis ditafsirkan sebagai kegagalan, tetapi sebagai gejala yang perlu dikelola melalui prosedur yang transparan, inklusif, dan berorientasi keadilan. Alih-alih mengejar permukaan ketenangan yang semu, indikator yang mengakui konflik sebagai data penting justru mengundang pembuat kebijakan untuk

memperbaiki desain partisipasi dan mekanisme mediasi secara berkelanjutan.

Namun, merancang indikator yang lebih adil tidak mungkin tanpa kompromi, karena tidak semua hal bisa diukur secara rinci tanpa membebani lembaga pelaksana dan memperlambat pengambilan keputusan yang mendesak. Di sinilah prinsip proporsionalitas menjadi penting: indikator harus cukup kaya untuk menangkap dimensi keadilan yang relevan, tetapi tetap sederhana dan dapat dioperasionalkan oleh pemerintah daerah, regulator, dan lembaga pengawas dengan kapasitas yang terbatas. Salah satu strategi adalah mengembangkan set indikator inti yang wajib digunakan di semua tingkat, didampingi oleh modul indikator tambahan yang bisa dipilih sesuai konteks lokal dan jenis teknologi yang dikembangkan. Dengan kombinasi ini, negara tidak terjebak dalam birokrasi pelaporan yang melelahkan, namun tetap membuka ruang bagi penyesuaian yang memperkuat sensitivitas terhadap keadilan di berbagai wilayah. Di banyak negara dengan kapasitas birokrasi terbatas, kesadaran akan kebutuhan kompromi ini menjadi kunci agar upaya memperkaya indikator tidak justru berakhir pada kelelahan administratif yang mengalihkan energi dari tugas-tugas substantif.

Kompromi lain menyangkut ketegangan antara komparabilitas internasional dan relevansi lokal yang sulit diseimbangkan. Indikator yang dirancang untuk memungkinkan perbandingan lintas negara sering menuntut standardisasi tinggi: definisi seragam, metodologi konsisten, dan format pelaporan yang sama agar *benchmarking* global dapat dilakukan, yaitu praktik membandingkan kinerja berbagai negara dengan satu set ukuran yang sama. Sementara itu, relevansi lokal justru bergantung pada kemampuan indikator untuk menangkap keunikan konteks, termasuk struktur pasar tenaga listrik, sejarah politik, dan peran aktor non-negara

seperti koperasi dan organisasi komunitas. Merancang indikator yang lebih adil berarti mengakui bahwa tidak semua aspek harus dapat dibandingkan secara global. Beberapa dimensi, seperti pengakuan terhadap komunitas adat atau partisipasi desa dalam perencanaan energi, mungkin hanya dapat dinilai secara bermakna di dalam negara yang bersangkutan dengan tolok ukur yang dikembangkan bersama para pemangku kepentingan lokal. Di tingkat praktis, hal ini bisa diterjemahkan ke dalam struktur indikator berlapis, di mana sebagian kecil indikator dirancang untuk perbandingan global, sementara lapisan kedua sepenuhnya dikembangkan secara domestik dan digunakan untuk dialog kebijakan di dalam negeri.

Dalam perancangan kebijakan energi yang kompleks, keterlibatan publik dalam memilih indikator itu sendiri dapat menjadi praktik demokrasi yang penting dan bukan sekadar formalitas. Alih-alih menyerahkan seluruh desain kepada konsultan internasional atau teknokrat pusat, proses penentuan variabel dan bobot perlu membuka ruang deliberasi yang luas: serikat pekerja, organisasi perempuan, komunitas adat, dan kelompok muda perlu dilibatkan bukan sekadar sebagai responden survei, tetapi sebagai perancang bersama kerangka evaluasi. Proses ini memang memerlukan waktu dan sumber daya, namun justru di situlah legitimasi kebijakan energi dan kerangka indikator dibangun secara bertahap. Ketika kelompok terdampak merasa ikut memiliki indikator, kemungkinan mereka mempercayai dan menggunakan hasil pengukuran untuk menuntut perbaikan kebijakan akan jauh lebih besar, dibanding ketika indikator hadir sebagai produk teknis yang asing dan tidak dapat dinegosiasikan. Jika proses ini dirancang secara inklusif, ia dapat menjadi ajang pembelajaran bersama di mana warga mempelajari bahasa teknis evaluasi, sementara pakar belajar merendahkan bahasa dan asumsi mereka agar dapat dipahami dan dinegosiasikan.

Prinsip lain yang sering diabaikan adalah kebutuhan untuk meninjau secara berkala kinerja indikator itu sendiri, seolah angka yang telah disepakati akan selamanya relevan. Sama seperti kebijakan publik lainnya, indikator dapat usang, bias, atau tidak lagi memadai menghadapi tantangan baru, misalnya munculnya teknologi digital, perubahan pola konsumsi energi, atau krisis iklim yang semakin ekstrem. Karena itu, kerangka yang lebih adil harus memasukkan mekanisme *review* periodik, yakni peninjauan ulang secara berkala terhadap seperangkat indikator, di mana indikator ditinjau, direvisi, atau bahkan diganti berdasarkan evaluasi kritis yang melibatkan aktor lintas sektor. Proses ini perlu transparan dan terdokumentasi, sehingga publik dapat mengikuti mengapa perubahan terjadi, memeriksa siapa yang mendorong revisi, dan menilai apakah perubahan tersebut memperkuat atau justru melemahkan dimensi keadilan dan akuntabilitas di dalam sistem. Tanpa mekanisme pembaruan ini, indikator yang semula progresif dapat berubah menjadi beban, karena tidak lagi mencerminkan domain masalah yang sesungguhnya dihadapi warga dan justru mengunci imajinasi kebijakan pada pola lama.

Aspek penting lainnya adalah cara indikator dikomunikasikan kepada publik, karena transparansi tanpa keterbacaan hanya akan memperpanjang jarak antara pakar dan warga biasa. Banyak indikator efektivitas regulasi dituangkan dalam laporan teknis yang sulit diakses dan dipahami, penuh istilah statistik dan grafik yang tidak ramah bagi pembaca non-ahli. Untuk menjadi alat yang adil, indikator harus disajikan dalam format yang jelas, dengan penjelasan sederhana tentang arti angka, keterbatasan data, dan implikasi kebijakan yang mungkin ditarik dari hasil pengukuran tersebut. Visualisasi yang mudah dibaca, papan informasi publik di tingkat lokal, dan penjelasan dalam bahasa sehari-hari dapat membantu warga menilai apakah pemerintah benar-benar bergerak ke arah yang

dijanjikan. Dengan demikian, indikator tidak hanya melayani kebutuhan akuntabilitas vertikal kepada donor atau pasar, tetapi juga akuntabilitas horizontal kepada warga biasa yang terdampak langsung. Ketika warga dapat membaca dan mendiskusikan hasil pengukuran dengan bahasanya sendiri, indikator berubah menjadi alat pendidikan publik yang merangsang perdebatan sehat tentang arah pembangunan, bukan sekadar angka yang lewat di layar presentasi teknokrat.

Selain itu, kerangka indikator yang adil perlu mewaspadai risiko instrumentalisasi politik, di mana pemerintah hanya menonjolkan indikator yang menguntungkan dan menyembunyikan yang merugikan, terutama ketika berbicara tentang capaian energi terbarukan di ruang publik. Untuk mencegah hal ini, dibutuhkan aturan yang mewajibkan publikasi menyeluruh atas seluruh set indikator, termasuk yang menunjukkan stagnasi atau kemunduran, serta kewajiban bagi lembaga resmi untuk menjelaskan penyebab tren negatif secara terbuka. Lembaga pengawas independen, seperti ombudsman energi atau komisi informasi publik, dapat diberi mandat untuk mengaudit integritas data, metodologi pengukuran, dan cara penyajiannya di media massa. Di sini, indikator berfungsi bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi yang memungkinkan warga membandingkan janji dan realisasi secara sistematis, sekaligus menilai apakah narasi keberhasilan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hak publik atas informasi mengenai seluruh indikator diakui dan dijamin, maka upaya *greenwashing* menjadi lebih sulit, yaitu praktik memoles citra hijau secara manipulatif tanpa perubahan substansial, karena narasi keberhasilan dapat segera ditantang dengan data yang sama yang selama ini hanya berputar di lingkaran elite kebijakan.

Akhirnya, merancang indikator yang lebih adil selalu

melibatkan ketegangan antara aspirasi normatif dan batasan praktis, tetapi ketegangan ini justru produktif jika dikelola secara reflektif. Filsafat kekuasaan mengingatkan bahwa tidak ada indikator yang bebas nilai; karena itu, tugas kita bukan mencari kerangka "sempurna", melainkan membangun proses yang terus-menerus membuka ruang kritik, revisi, dan pembelajaran kolektif. Dengan memasukkan prinsip keadilan, keterbukaan pengetahuan, pengakuan konflik, dan partisipasi dalam desain indikator, kebijakan regulasi di sektor energi dapat bergerak menjauh dari logika angka yang membungkam menuju sistem evaluasi yang menghormati martabat manusia dan keragaman konteks. Dalam lanskap krisis iklim dan ketimpangan global yang kian dalam, langkah kecil memperbaiki cara kita mengukur keberhasilan bisa menjadi pintu masuk bagi transformasi yang lebih luas dan bermakna, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan demikian, perdebatan tentang indikator tidak lagi dipandang sebagai urusan teknis, melainkan sebagai bagian penting dari perjuangan politik untuk memastikan bahwa transisi energi tidak mengulang pola ketidakadilan yang sama dalam wujud baru.

12.2 Korupsi, Stabilitas Hukum, dan Kapasitas Birokrasi dalam Energi Terbarukan

Korupsi, stabilitas hukum, dan kapasitas birokrasi sering dibahas secara terpisah, padahal dalam praktik kebijakan publik ketiganya membentuk satu ekologi kekuasaan yang saling mengunci. Korupsi tidak hanya berbentuk suap kasat mata, tetapi juga patronase politik, jual beli regulasi, dan pemanfaatan celah hukum yang sengaja dibiarkan mengambang. Stabilitas hukum bukan sekadar banyaknya undang-undang, melainkan derajat kepastian bahwa aturan tidak akan diubah secara tiba-tiba dengan logika transaksi jangka pendek. Di sisi lain,

kapasitas birokrasi bukan hanya jumlah pegawai atau struktur organisasi, tetapi kemampuan analitis, integritas, dan koordinasi lintas lembaga. Ketika ketiga dimensi ini digabungkan, kita memperoleh gambaran apakah sebuah negara punya "tanah institusional" yang cukup subur untuk menumbuhkan kebijakan energi yang berorientasi ke depan, atau justru lahan yang gersang di mana agenda keberlanjutan hanya menjadi slogan tanpa pijakan institusional yang kokoh.

Korupsi dalam studi kebijakan biasanya dikategorikan sebagai *petty corruption* (korupsi kecil) dan *grand corruption* (korupsi besar). Namun, untuk menganalisis energi dan iklim, lebih berguna melihat korupsi sebagai pola relasi yang menembus siklus kebijakan: dari perencanaan, perizinan, akuisisi lahan, hingga kontrak jangka panjang. Korupsi dapat hadir sebagai "biaya ekstra" untuk mempercepat izin, sebagai penentuan pemenang tender yang sudah diatur, atau sebagai jaminan bahwa regulasi akan "disesuaikan" jika suatu kelompok kepentingan merasa dirugikan. Dalam konteks ini, korupsi menjadi mekanisme distribusi ulang hak dan kewajiban yang tidak pernah tertulis dalam peraturan, tetapi semua aktor utama mengetahuinya. Ia mengubah arena formal kebijakan menjadi pasar kelangkaan akses, di mana yang paling kuat secara politik dan finansial lebih mudah mengamankan keuntungan, sementara kelompok rentan hanya menjadi penonton yang ikut menanggung risiko sosial dan ekologis.

Jika kita memfokuskan lensa pada *energi terbarukan*, korupsi menggeser logika prioritas dari kebutuhan jangka panjang menuju peluang rente jangka pendek. Proyek yang secara teknis optimal—misalnya karena dekat dengan pusat beban, memiliki potensi sumber daya yang tinggi, atau minim konflik sosial—bisa dikalahkan oleh proyek yang memberikan ruang negosiasi rente lebih besar. Penentuan lokasi pembangkit, pembangunan jaringan transmisi, hingga kontrak jual beli listrik

jangka panjang menjadi ruang tawar yang menentukan siapa yang berhak menikmati pendapatan stabil selama dua atau tiga dekade. Di negara dengan tingkat korupsi tinggi, investor yang paling mahir membaca jejaring politik sering kali lebih diuntungkan daripada aktor yang paling efisien atau inovatif. Akibatnya, narasi bahwa energi bersih akan "secara otomatis" membawa tata kelola yang lebih baik menjadi naif, karena teknologi hijau bisa saja menempel pada pola kekuasaan yang sama lamanya dengan rezim fosil.

Stabilitas hukum sering dipuji sebagai prasyarat penting bagi investasi, tetapi dalam konteks negara yang korup, stabilitas itu sendiri dapat menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Kepastian kontrak dapat dijanjikan kepada investor tertentu, sementara pelaku lain dibiarkan menghadapi ketidakpastian regulasi yang tinggi. Dalam situasi semacam itu, hukum tidak lagi bertindak sebagai pagar bersama, melainkan sebagai alat selektif yang memisahkan aktor yang "dekat" dan "jauh" dari pusat kekuasaan. Studi tentang pembangunan di Nigeria menunjukkan bagaimana korupsi yang tertanam dalam struktur negara membuat institusi formal gagal menjalankan fungsi emansipatorisnya, sehingga janji pembangunan terus tertahan meski reformasi kebijakan silih berganti (Anugwom, 2020). Gambaran ini memberi peringatan bahwa tanpa reformasi institusi, stabilitas hukum bisa berarti stabilitas ketidakadilan, bukan perlindungan hak warga maupun kepastian aturan main bagi semua pelaku di sektor energi.

Di banyak negara berkembang, stabilitas hukum juga terganggu oleh tumpang tindih regulasi, konflik kewenangan antar lembaga, dan penggunaan aturan darurat sebagai alat mem-bypass prosedur. Pemerintah pusat dapat mengeluarkan peraturan istimewa untuk mempercepat proyek strategis, sementara pemerintah daerah merasa kedaulatan ruang dan lingkungan mereka diabaikan. Di sisi lain, pengadilan mungkin

tidak memiliki kapasitas atau independensi yang cukup untuk menguji keputusan pemerintah yang bertentangan dengan hak warga atau prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks seperti ini, ketidakpastian hukum bukan sekadar "risiko investasi", tetapi mekanisme halus untuk memusatkan kewenangan di tangan sedikit aktor yang mampu menegosiasikan pengecualian. Warga dan komunitas lokal, yang lemah secara politik maupun finansial, dipaksa berhadapan dengan campuran aturan formal dan informal yang sulit diprediksi, sehingga posisi tawar mereka dalam sengketa lahan, kompensasi, atau ganti rugi menjadi sangat rendah.

Ketika kita mempersempit fokus pada *kebijakan energi*, stabilitas hukum dan korupsi bertemu dalam ruang yang sangat konkret: tarif listrik, skema insentif, dan jangka waktu kontrak. Jika pemerintah berkali-kali mengubah tarif, memodifikasi skema subsidi, atau menunda pembayaran kepada pengembang tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, kepercayaan terhadap negara sebagai mitra jangka panjang akan terkikis. Pengembang yang memiliki akses politik bisa menyiasati situasi ini dengan menegosiasikan klausul perlindungan khusus, sementara pelaku yang lebih kecil menanggung seluruh risiko kebijakan. Pola ini mengubah kebijakan energi dari instrumen yang seharusnya mendorong transisi hijau menjadi arena seleksi yang memihak pada aktor paling kuat secara politik. Di sisi lain, warga biasa hanya merasakan dampak berupa tarif yang tidak stabil, pemadaman, atau beban fiskal yang meningkat tanpa penjelasan transparan tentang bagaimana keputusan-keputusan itu diambil dan siapa yang diuntungkan.

Kapasitas birokrasi sering dipahami semata-mata sebagai kemampuan administratif untuk mengimplementasikan kebijakan, padahal secara filosofis ia terkait erat dengan kemampuan negara untuk memutuskan apa yang dianggap relevan, adil, dan sah. Birokrasi dengan kapasitas lemah

cenderung hanya menjalankan instruksi tanpa kemampuan kritis untuk menilai implikasi jangka panjang. Mereka mungkin tidak mampu menilai kualitas studi kelayakan, tidak percaya diri untuk menolak tekanan dari atasan atau politisi, dan tidak memiliki alat analitis untuk menimbang berbagai skenario kebijakan. Kapasitas yang rendah juga berarti ketergantungan tinggi pada konsultan eksternal, yang pada gilirannya dapat menciptakan asimetri pengetahuan antara negara dan pihak swasta. Dalam kondisi demikian, birokrasi mudah tergelincir menjadi sekadar "mesin legalisasi" keputusan yang diambil di ruang negosiasi sempit, alih-alih menjadi penjaga kepentingan publik yang reflektif dan bertanggung jawab.

Dalam literatur *energy justice*, kapasitas birokrasi dikaitkan dengan kemampuan negara untuk mengorganisasikan proses transisi yang bukan hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial. Kajian komprehensif menunjukkan bahwa metode, teknologi, dan geografi keadilan energi saling terkait dengan konfigurasi kelembagaan yang menentukan siapa yang didengar, data apa yang dipakai, dan bagaimana risiko didistribusikan (Jenkins et al., 2021). Birokrasi yang lemah tidak hanya kesulitan membaca data kompleks, tetapi juga cenderung mengabaikan suara kelompok yang posisinya tidak kuat secara politik, misalnya komunitas adat atau rumah tangga miskin di wilayah terpencil. Dengan demikian, kapasitas birokrasi bukan sekadar soal jumlah analis kebijakan, melainkan juga keberanian institusional untuk mengakui konflik, membuka ruang deliberasi, dan menolak tekanan yang mendorong keputusan cepat namun mengunci ketidakadilan dalam jangka panjang.

Pada sektor *energi terbarukan*, kapasitas birokrasi diuji oleh kebutuhan untuk mengelola portofolio kebijakan yang semakin kompleks: standar teknis, integrasi jaringan, mekanisme interkoneksi, lisensi operasi, hingga evaluasi

dampak sosial-lingkungan. Proyek pembangkit surya atau angin berskala besar sering melibatkan banyak instansi, mulai dari lembaga lingkungan, perencanaan ruang, hingga otoritas kelistrikan dan keuangan. Jika masing-masing instansi bekerja dalam silo dan tidak memiliki sistem informasi yang terintegrasi, proses perizinan menjadi berlarut-larut, tidak transparan, dan membuka ruang negosiasi informal. Ketika hal ini terjadi di lingkungan yang korup, investor akan mencoba "mengamankan" jalur mereka sendiri, sementara masyarakat lokal dibiarkan menebak-nebak apa yang sebenarnya sedang direncanakan di wilayah mereka. Kualitas tata kelola seperti ini bukan hanya memperlambat transisi energi, tetapi juga menanamkan benih ketidakpercayaan yang sulit dipulihkan.

Korupsi, stabilitas hukum, dan kapasitas birokrasi juga terhubung melalui cara kita mengukurnya. Indeks tata kelola global sering menggunakan indikator seperti *rule of law*, kontrol terhadap korupsi, atau efektivitas pemerintah untuk menilai mutu institusi secara lintas negara. Namun, angka-angka ini jarang menangkap dimensi mikro: bagaimana korupsi beroperasi pada tingkat proyek, bagaimana pejabat lokal menafsirkan peraturan, atau bagaimana birokrasi menyeimbangkan tekanan politis dan teknis dalam keputusan sehari-hari. Akibatnya, suatu negara bisa mendapatkan skor tata kelola yang cukup tinggi, sementara di tingkat lapangan praktik penyimpangan tetap berlangsung. Ketika indeks ini kemudian dipakai sebagai dasar untuk memutuskan alokasi pembiayaan atau syarat bantuan, terdapat risiko bahwa angka-angka tersebut justru membenarkan kebijakan yang tidak peka terhadap variasi lokal dan bentuk-bentuk korupsi yang lebih tersembunyi.

Ketegangan antara ukuran makro dan pengalaman mikro ini terlihat jelas dalam konflik-konflik proyek energi, ketika warga merasakan ketidakadilan prosedural meskipun negara

mengklaim telah mengikuti semua aturan formal. Pertemuan konsultasi publik dapat diadakan hanya untuk memenuhi syarat administratif, tanpa benar-benar membuka ruang dialog. Dokumen analisis dampak lingkungan mungkin disusun secara teknis rapi, tetapi sulit diakses dan tidak dipahami oleh warga. Di titik ini, kapasitas birokrasi untuk menerjemahkan norma hukum menjadi prosedur yang bermakna bagi publik menjadi sangat menentukan. Bila pejabat hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, bukan kualitas partisipasi, hukum berubah menjadi perisai prosedural yang menutupi defisit legitimasi. Korupsi dapat menyelinap bukan hanya melalui uang, tetapi melalui manipulasi narasi bahwa "semua sudah sesuai prosedur", meskipun prosedurnya sendiri dirancang untuk meminimalkan gangguan dari masyarakat.

Di tingkat perumusan *kebijakan energi*, indeks tata kelola dan indikator keberlanjutan sering dipakai sebagai dasar argumentasi bahwa suatu negara "siap" menerima proyek pembiayaan hijau skala besar. Lembaga keuangan internasional meminta bukti stabilitas regulasi, kepastian kontrak, dan kapasitas pelaksanaan, yang kemudian diringkas dalam bentuk skor atau label. Namun, mekanisme ini berpotensi mengabaikan fakta bahwa korupsi dan ketidakadilan sering beroperasi di bawah permukaan angka. Sebuah negara bisa saja memenuhi kriteria formal, tetapi mengelola konflik sosial dengan cara represif atau kooptatif. Dalam kondisi ini, indikator justru berfungsi sebagai "sertifikat kelayakan" yang menepis kekhawatiran kritis dan mempermudah aliran dana ke proyek-proyek yang kontroversial. Bagi warga yang terdampak, legitimasi proyek tidak datang dari skor indeks, melainkan dari pengalaman langsung tentang apakah mereka didengar, dihormati, dan memperoleh manfaat yang adil.

Studi kasus tentang proyek energi surya skala besar di berbagai negara menunjukkan bahwa korupsi dan kelemahan

institusi sering termanifestasi sebagai ketidakadilan prosedural: warga tidak diberi informasi memadai, konsultasi dilakukan terlambat, dan proses pengambilan keputusan didominasi oleh aktor teknokratis dan investor (Barragán-Contreras, 2022). Dalam situasi seperti itu, kapasitas birokrasi yang rendah memperkuat kecenderungan untuk menyepelekan keberatan masyarakat, menganggapnya sebagai hambatan, bukan sebagai masukan yang sah. Di sisi lain, ketidakpastian hukum membuat warga dan organisasi masyarakat sipil sulit menggunakan jalur litigasi untuk menantang proyek yang dinilai merugikan mereka. Korupsi, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun pertukaran jasa politik, menjadikan proses perizinan dan penetapan kompensasi sebagai arena tawar-menawar tertutup, di mana hasil akhirnya sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan atau penghormatan terhadap martabat komunitas lokal.

Hubungan antara institusi dan aktor swasta juga memainkan peran kunci dalam menjelaskan bagaimana korupsi dan kapasitas birokrasi membentuk hasil transisi energi. Perusahaan yang beroperasi di banyak yurisdiksi memiliki pengalaman, sumber daya hukum, dan jaringan konsultan yang jauh melampaui kemampuan sebagian besar lembaga negara di negara berkembang. Ketika berhadapan dengan birokrasi yang lemah, mereka dapat mendorong desain kontrak yang sangat menguntungkan, misalnya melalui jaminan pendapatan minimum atau klausul arbitrase internasional yang sulit dijangkau oleh negara di kemudian hari. Dalam konteks korupsi, negosiasi semacam ini sering terjadi di ruang tertutup, dengan penggunaan bahasa teknis yang rumit sehingga sulit dipantau oleh publik. Akibatnya, risiko fiskal jangka panjang dapat terselip dalam perjanjian yang tampak netral, sementara pejabat yang terlibat memperoleh keuntungan jangka pendek yang tidak pernah tercatat dalam dokumen resmi.

Ketika proyek *energi terbarukan* dipromosikan sebagai solusi win–win untuk iklim dan pembangunan, dimensi korupsi dan kapasitas birokrasi kerap dikesampingkan sebagai isu sekunder. Padahal, pembangkit surya, angin, atau bioenergi membawa peluang rente baru yang sangat besar: dari konsesi lahan, pengadaan teknologi, hingga kontrak operasi dan pemeliharaan jangka panjang. Jika institusi pengawas lemah dan pengadilan tidak independen, tak ada jaminan bahwa pendapatan dari proyek-proyek ini akan benar-benar mengalir ke kas publik atau ke komunitas yang terdampak. Sebaliknya, ada risiko bahwa transisi energi justru memperdalam ketimpangan, ketika segelintir aktor yang memahami logika keuangan proyek mampu mengkapitalisasi celah regulasi dan kelemahan birokrasi. Di sini, transisi tidak hanya berarti perpindahan sumber energi, tetapi juga pergeseran pola rente dari ekonomi fosil ke ekonomi hijau yang tetap eksklusif.

Oleh karena itu, memperkuat kapasitas birokrasi dalam konteks transisi energi bukan sekadar soal pelatihan teknis tambahan atau digitalisasi proses perizinan. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan institusional untuk menegakkan integritas, menahan tekanan politik, dan mengartikulasikan kepentingan publik jangka panjang dalam bahasa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencakup reformasi sistem rekrutmen dan promosi yang lebih meritokratik, perlindungan bagi pelapor pelanggaran (*whistleblower*), serta penguatan lembaga audit dan pengawasan internal. Di samping itu, akses warga terhadap informasi yang relevan—kontrak, studi kelayakan, analisis dampak—harus dijamin, sehingga birokrasi tidak bekerja di ruang tertutup. Tanpa langkah-langkah ini, teknologi energi hijau berisiko hanya menjadi lapisan baru di atas institusi lama yang rentan korupsi, sehingga harapan akan keadilan antargenerasi dan solidaritas sosial tetap jauh dari kenyataan.

Konsep ambang institusional yang telah dibahas sebelumnya membantu kita memahami bahwa hubungan antara kualitas tata kelola dan hasil kebijakan bukanlah linier. Sampai titik tertentu, peningkatan kapasitas birokrasi dan pengurangan korupsi mungkin tidak banyak mempengaruhi hasil, karena struktur kekuasaan yang lebih luas tetap memblokir perubahan yang berarti. Namun, ketika kombinasi tertentu tercapai—misalnya pengadilan yang relatif independen, otoritas regulasi yang profesional, dan mekanisme pengawasan warga yang hidup—dampaknya terhadap kualitas kebijakan dapat melonjak secara signifikan. Dalam konteks ini, stabilitas hukum perlu dibedakan dari kekakuan: aturan yang baik harus cukup stabil untuk memberikan kepastian, tetapi juga cukup adaptif untuk mengoreksi kesalahan desain atau mengakomodasi tuntutan keadilan yang baru muncul. Tantangan utama adalah mencegah agar adaptasi ini tidak dikapling sebagai hak istimewa bagi kelompok berkepentingan yang paling kuat.

Pada akhirnya, analisis tentang korupsi, stabilitas hukum, dan kapasitas birokrasi mengingatkan kita bahwa kebijakan di sektor energi bukan hanya soal merancang instrumen yang efisien, tetapi juga soal membangun infrastruktur moral dan kelembagaan yang dapat dipercaya. Dalam konteks *kebijakan energi*, pertanyaan kuncinya bukan lagi sekadar apakah negara mampu menarik investasi, tetapi apakah ia mampu melakukannya tanpa menggadaikan keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas antargenerasi. Di sinilah filsafat kekuasaan bertemu dengan praktek teknokratis sehari-hari: setiap pasal regulasi, setiap prosedur perizinan, dan setiap indikator yang dirangkum dalam laporan kinerja adalah ekspresi konkret tentang siapa yang dihitung, siapa yang disisihkan, dan masa depan macam apa yang dianggap sah. Tanpa pembenahan serius atas ketiga dimensi institusional ini, janji transisi energi yang adil akan tetap rapuh, mudah runtuh di

hadapan krisis berikutnya atau perubahan politik yang oportunistik.

12.3 Interaksi Kebijakan Energi dengan Lembaga Fiskal dan Regulasi Sektor Lain

Konsep ambang kualitas institusi menjadi tidak bermakna jika dipahami hanya sebagai angka atau indeks abstrak tanpa melihat bagaimana anggaran negara, aturan fiskal, dan regulasi di sektor lain bekerja secara konkret terhadap proyek energi. Interaksi kebijakan fiskal dengan regulasi lingkungan, tata ruang, dan kebijakan industri membuat setiap keputusan tentang pembangkit, jaringan, atau subsidi listrik selalu berada di persimpangan banyak kepentingan. Ketika kementerian keuangan memikirkan defisit, lembaga perencana mengejar pertumbuhan, dan otoritas lingkungan mengusung perlindungan ekosistem, maka kebijakan energi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dari negosiasi antar-rezim regulasi. Di titik inilah ambang institusional harus dipahami sebagai kapasitas minimum sistem kelembagaan untuk menyatukan logika-logika berbeda itu tanpa terjebak dalam kontradiksi yang melumpuhkan, seperti menjanjikan transisi hijau sambil mempertahankan struktur subsidi fosil yang masif dan keleluasaan pajak bagi sektor ekstraktif.

Lembaga fiskal—kementerian keuangan, badan anggaran parlemen, otoritas audit, dan lembaga pengelola utang—mendefinisikan ruang gerak *fiscal space*, yakni seberapa jauh negara berani menanggung insentif, subsidi, dan jaminan bagi investasi energi. Dari sudut pandang ini, ambang kualitas institusi bukan sekadar soal skor tata kelola, melainkan kemampuan merancang dan mempertahankan kebijakan fiskal yang konsisten dengan tujuan iklim dan keadilan sosial. Jika prosedur anggaran lemah, pencatatan subsidi tidak transparan, dan pengawasan parlemen mudah dibelokkan oleh lobi industri,

maka seluruh desain kebijakan energi akan mudah digeser untuk melayani kepentingan jangka pendek. Sebaliknya, ketika tata kelola fiskal mampu membaca risiko jangka panjang—dari stranded assets hingga beban kesehatan masyarakat—maka kebijakan anggaran dapat menjadi arena utama untuk menguji dan memperkuat komitmen transisi.

Dalam konteks energi terbarukan, interaksi antara kebijakan fiskal dan regulasi sektor lain tampak jelas ketika negara berupaya menghapus subsidi bahan bakar fosil sambil memperkenalkan insentif untuk pembangkit surya, angin, atau bioenergi. Di satu sisi, reformasi subsidi memerlukan keberanian politik karena menyentuh harga energi dan daya beli warga. Di sisi lain, regulasi lingkungan, aturan tata ruang, dan kebijakan industri menentukan apakah proyek-proyek energi bersih benar-benar mendapatkan prioritas atau justru tersandera perizinan yang rumit. Ketika pajak karbon diperkenalkan tanpa diikuti reformasi pajak lainnya, misalnya pajak pertambangan atau insentif kendaraan rendah emisi, maka sinyal harga menjadi kabur dan investor sulit membaca arah jangka panjang. Di sini, ambang kualitas institusi terlihat dari sejauh mana kebijakan fiskal dapat dikaitkan secara konsisten dengan reformasi regulasi di sektor-sektor lain yang relevan.

Penelitian tentang krisis ketahanan ekologi menunjukkan bahwa kualitas institusi dan kebijakan publik memiliki peran menentukan dalam mengubah tekanan lingkungan menjadi jalur keberlanjutan yang lebih kuat, termasuk melalui perubahan pola penggunaan lahan dan pemanfaatan energi bersih (Asghar dkk., 2025). Temuan semacam ini menguatkan argumen bahwa ambang institusional tidak hanya menyangkut keberadaan aturan, tetapi juga koherensi di antara kebijakan sektor fiskal, lingkungan, dan pembangunan wilayah. Bila anggaran terus mengalir untuk memperluas infrastruktur yang

mendorong konsumsi fosil, sementara dokumen perencanaan strategis berbicara tentang "ekonomi hijau", maka institusi berada pada kondisi inkonsistensi internal yang berbahaya. Ambang efektivitas baru tercapai ketika sistem penganggaran, peraturan lingkungan, dan program perbaikan tata ruang mulai bergerak selaras untuk menurunkan emisi sekaligus memperkuat resiliensi sosial-ekologis.

Di luar ranah fiskal, regulasi sektor keuangan, lingkungan, dan industri membentuk semacam matriks kekuasaan yang menentukan arah perkembangan sistem energi. Otoritas pasar modal, bank sentral, dan lembaga pengawas jasa keuangan misalnya, dapat mendorong atau menghambat pembiayaan proyek energi bersih melalui aturan mengenai risiko iklim, persyaratan *disclosure*, dan standar *green taxonomy* yang menentukan mana investasi yang dianggap berkelanjutan. Pada saat yang sama, kementerian lingkungan dan lembaga perizinan proyek menentukan standar analisis dampak lingkungan, prosedur konsultasi publik, dan syarat perlindungan keanekaragaman hayati. Bila aturan-aturan ini "berbicara dalam bahasa yang berbeda", maka proyek yang di atas kertas tampak layak secara finansial justru terjebak penolakan sosial atau sengketa hukum, dan ambang kualitas institusi belum tercapai karena koordinasi antar-regulator masih rapuh dan sektoral.

Dalam praktik kebijakan energi, kementerian teknis kerap mengusulkan skema tarif, insentif investasi, atau pembangunan infrastruktur jaringan, sementara kementerian keuangan dan otoritas fiskal memeriksa dampaknya pada defisit, utang, dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Ketegangan muncul ketika kalkulasi jangka pendek seperti tarif dasar listrik dan beban subsidi dinilai lebih mendesak dibandingkan investasi yang menurunkan emisi dan meningkatkan keadilan akses energi. Di negara dengan tradisi patronase kuat, keputusan mengenai proyek pembangkit, penunjukan kontraktor, atau penetapan

harga dapat lebih dipengaruhi logika politik elektoral daripada penilaian tata kelola yang hati-hati. Di titik inilah ambang institusional berkaitan erat dengan kemampuan sistem fiskal dan regulasi untuk menolak tekanan jangka pendek dan menjaga orientasi strategis kebijakan energi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

Interaksi kebijakan energi dengan lembaga fiskal juga terlihat dalam cara negara mengelola risiko makroekonomi dari transisi energi, misalnya penurunan penerimaan pajak dari sektor fosil atau kebutuhan impor teknologi bersih yang besar. Bila kementerian keuangan memandang transisi hanya sebagai beban tambahan tanpa menghitung manfaat jangka panjang berupa pengurangan biaya kesehatan, penurunan kerusakan lingkungan, dan peluang industri baru, maka desain anggaran akan cenderung defensif. Hal ini dapat memunculkan pola investasi tambal-sulam, dengan proyek-proyek kecil yang mudah dijual secara politik tetapi tidak mengubah struktur sistem energi. Ambang kualitas institusional mensyaratkan alat analisis fiskal yang mampu menghitung manfaat dan risiko lintas sektor, termasuk dampak pada pasar tenaga kerja, keseimbangan neraca berjalan, dan ketahanan ekonomi terhadap guncangan harga komoditas.

Kajian tentang inovasi teknologi energi dan pembangunan rendah karbon yang inklusif menunjukkan bahwa kebijakan yang mendorong inovasi dan difusi teknologi hanya efektif ketika dibarengi dengan tata kelola yang mampu mengelola efek lintas wilayah dan lintas sektor secara konsisten (Xin dkk., 2023). Hal ini berarti bahwa inovasi teknologi tidak bisa dipisahkan dari reformasi regulasi di sektor industri, perdagangan, dan keuangan, misalnya melalui standar efisiensi, insentif riset, dan dukungan pembiayaan jangka panjang. Ambang institusional di sini tercapai ketika sistem peraturan berhasil mengurangi hambatan struktural—seperti monopoli

pemasok, prosedur impor yang ruwet, atau diskriminasi tarif listrik—yang selama ini mencegah adopsi teknologi lebih bersih. Tanpa itu, teknologi baru hanya akan hadir sebagai demonstrasi simbolik, bukan sebagai basis transformasi menyeluruh dalam sistem produksi dan konsumsi energi.

Dalam tataran kebijakan industri, energi terbarukan sering diposisikan sebagai motor pertumbuhan baru melalui kebijakan kandungan lokal, klaster industri hijau, dan dukungan ekspor teknologi. Namun ketika desain industri tidak diselaraskan dengan aturan persaingan usaha dan kebijakan perdagangan internasional, risiko yang muncul adalah terbentuknya oligopoli baru yang menguasai rantai pasok teknologi hijau. Situasi ini dapat mengurangi manfaat transisi bagi produsen kecil, koperasi, dan inisiatif masyarakat. Ambang kualitas institusi mensyaratkan bahwa insentif industri dirancang dengan mekanisme evaluasi yang ketat, keterbukaan data, dan tata kelola konflik kepentingan. Tanpa mekanisme tersebut, program pengembangan industri hijau dapat berubah menjadi sarana redistribusi rente baru, dengan dampak terbatas terhadap penurunan emisi dan perluasan akses energi.

Regulasi sektor keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap arah transisi. Ketika bank sentral dan otoritas pengawas keuangan mulai memasukkan risiko iklim ke dalam penilaian stabilitas sistem keuangan, muncul peluang untuk mengarahkan kredit dari aset intensif karbon menuju investasi yang lebih berkelanjutan. Konsep seperti *green bonds*, *sustainability-linked loans*, dan *climate-related financial disclosure* bisa menjadi instrumen penting, tetapi hanya bila dirancang dengan standar yang jelas dan diawasi secara independen. Tanpa itu, risiko *greenwashing* meningkat dan pasar keuangan dapat memunculkan ilusi kemajuan tanpa perubahan nyata di lapangan. Ambang institusional di sini adalah keberadaan kerangka regulasi yang mampu

membedakan klaim hijau yang substantif dari yang kosmetik, serta memiliki kapasitas teknis untuk menilai risiko lintas sektor dari perubahan iklim terhadap stabilitas keuangan.

Lembaga pengawasan seperti badan pemeriksa keuangan, ombudsman, dan pengadilan administrasi berperan sebagai penjaga akuntabilitas ketika kebijakan energi bersentuhan dengan anggaran publik dan hak-hak warga. Mereka dapat menguji kewajaran kontrak jangka panjang, transparansi proses lelang, dan kesesuaian proyek dengan tujuan pembangunan nasional. Jika lembaga-lembaga ini lemah atau mudah diintervensi, kemampuan sistem untuk mengoreksi penyimpangan kebijakan berkurang drastis. Ambang kualitas institusi berarti bahwa mekanisme akuntabilitas tersebut bukan hanya ada di atas kertas, tetapi juga digunakan secara aktif oleh kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk mengkritisi praktik yang menggerus keadilan sosial dan ekologi. Di sini, interaksi antara institusi formal dan kekuatan wacana publik menjadi kunci apakah tata kelola transisi benar-benar berpihak pada kepentingan publik luas.

Ketika pemerintah membentuk komite lintas kementerian atau dewan transisi energi untuk mengoordinasikan kebijakan energi dengan sektor fiskal, industri, transportasi, dan sosial, struktur baru ini sering dipromosikan sebagai bukti keseriusan koordinasi. Namun kualitas keluaran sangat bergantung pada siapa yang duduk di meja, bagaimana informasi dibagikan, dan sejauh mana suara kelompok terdampak diikutsertakan. Bila forum koordinasi hanya diisi birokrat dan teknokrat, tanpa representasi komunitas lokal, serikat pekerja, atau kelompok rentan, maka kebijakan energi berisiko tetap mengulang bias lama: mengutamakan kelayakan finansial sempit dibandingkan keadilan distribusi manfaat dan beban. Ambang institusional mensyaratkan bahwa koordinasi lintas sektor ini juga merealokasikan kekuasaan wacana, memberi ruang bagi

perspektif alternatif untuk memengaruhi desain dan implementasi kebijakan.

Pengalaman integrasi kebijakan antar level pemerintahan menunjukkan bahwa lemahnya kerangka hukum dan fragmentasi regulasi dapat membuat target energi bersih menjadi sekadar ambisi di atas kertas. Studi tentang integrasi kebijakan energi antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen hukum nasional yang terfragmentasi dan minimnya regulasi turunan menghambat percepatan pencapaian bauran energi bersih (Fajri dkk., 2021). Kasus ini menggambarkan dengan jelas bagaimana interaksi kebijakan energi dengan regulasi sektor lain—termasuk perizinan daerah, peraturan investasi, dan kebijakan fiskal lokal—dapat menjadi hambatan jika tidak dirancang secara konsisten. Ambang kualitas institusi di sini adalah keberadaan arsitektur hukum yang mampu menjembatani kewenangan pusat dan daerah, sehingga sinyal kebijakan yang diterima pelaku usaha dan masyarakat tidak saling bertentangan atau membingungkan.

Di sisi lain, kebijakan perlindungan sosial, tarif listrik rumah tangga, dan program subsidi bersyarat juga membentuk ruang politik bagi reformasi energi. Bila reformasi harga hanya menaikkan tarif tanpa instrumen kompensasi yang tepat sasaran, beban transisi akan terasa lebih berat bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan. Interaksi kebijakan energi dengan program transfer tunai, bantuan sosial, dan regulasi ketenagakerjaan menentukan apakah transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dipersepsikan sebagai peluang atau ancaman. Ambang kualitas institusi menuntut kapasitas administratif yang cukup untuk mengidentifikasi kelompok terdampak, menyalurkan kompensasi secara transparan, dan memantau efek kebijakan secara berkelanjutan. Tanpa itu, reformasi energi mudah dipolitisasi sebagai kebijakan elitis dan makin menjauh dari legitimasi publik.

Dalam konteks global, interaksi kebijakan nasional dengan lembaga keuangan internasional, seperti bank pembangunan dan inisiatif pembiayaan iklim, turut menentukan ruang manuver fiskal bagi negara berkembang dalam mengembangkan energi terbarukan. Ketentuan pinjaman, syarat reformasi kebijakan, dan prioritas proyek yang disukai donor dapat memperkuat atau justru mempersempit agenda transisi yang sensitif terhadap keadilan sosial. Jika perundingan internasional tidak memberi ruang bagi suara negara berpendapatan rendah dan komunitas yang paling terdampak, maka arsitektur pendanaan iklim berisiko mereplikasi hierarki lama dalam ekonomi politik global. Ambang kualitas institusional di sini tidak hanya berada di tingkat nasional, tetapi juga pada desain tata kelola global yang mengakui asimetri kekuasaan dan berupaya menguranginya melalui aturan pembiayaan yang lebih inklusif dan akuntabel.

Dari sudut pandang teori kekuasaan, interaksi kebijakan energi dengan lembaga fiskal dan regulasi sektor lain dapat dipandang sebagai arena di mana berbagai aktor berupaya membatasi atau memperluas imajinasi kebijakan. Bukan hanya mengenai apa yang dibiayai atau diizinkan, tetapi juga tentang opsi apa yang sejak awal dianggap "tidak realistis" karena dinilai terlalu mahal, terlalu berisiko, atau tidak sejalan dengan paradigma makroekonomi dominan. Ambang kualitas institusi ditandai oleh kemampuan sistem untuk mengakomodasi perdebatan kritis mengenai asumsi-asumsi dasar tersebut, misalnya dengan membuka ruang bagi skenario yang mengutamakan dekarbonisasi cepat dan keadilan sosial meskipun menantang logika pertumbuhan konvensional. Tanpa kemampuan ini, interaksi antar kebijakan hanya akan memperkuat status quo.

Dengan demikian, pembicaraan mengenai mutu tata kelola dalam energi tidak cukup berhenti pada indeks korupsi atau

kepastian hukum secara umum. Yang lebih penting adalah menganalisis bagaimana prosedur anggaran, regulasi fiskal, aturan investasi, dan kebijakan sektoral lain saling terkait dalam praktik, termasuk siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh konfigurasi tersebut. Analisis jaringan kebijakan, pemetaan aktor, serta penelusuran aliran anggaran dan insentif menjadi alat penting untuk mengungkap konfigurasi kekuasaan di balik wajah teknokratis regulasi. Ambang institusional, dalam pengertian ini, bukan angka tunggal, melainkan titik di mana konfigurasi tersebut mulai berubah dari menopang rezim energi lama menjadi memungkinkan transformasi yang lebih berkeadilan.

Pada akhirnya, interaksi kebijakan energi dengan lembaga fiskal dan regulasi sektor lain memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang ambang kualitas institusi adalah pertanyaan tentang konfigurasi kekuasaan yang diinstitusikan dalam anggaran, aturan, dan prosedur. Ketika berbagai sektor dan level pemerintahan dapat bekerja secara lebih sinkron menuju penurunan emisi, perluasan akses, dan perlindungan kelompok rentan, maka ambang itu perlahan terlampaui. Namun selama logika fiskal jangka pendek, kepentingan industri lama, dan fragmentasi regulasi masih mendominasi, kebijakan energi akan terus berjalan setengah hati. Memahami dan mengintervensi interaksi lintas sektor ini adalah tugas penting bagi filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan, karena di sinilah diputuskan apakah transisi akan menjadi sekadar penyesuaian teknis atau benar-benar transformasi struktural.

12.4 Studi Lintas Negara: Pola Hubungan Kualitas Institusi dan Penetrasi Energi Terbarukan

Studi lintas negara tentang kualitas institusi dan penetrasi energi menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak pernah linier sederhana, melainkan dipenuhi tikungan sejarah,

pertemuan kepentingan, dan konfigurasi kekuasaan yang berbeda di tiap konteks. Ada negara dengan skor tata kelola tinggi namun laju adopsi teknologi rendah karbon justru lambat, sementara negara lain dengan kelemahan kelembagaan jelas mampu mempercepat pembangunan infrastruktur listrik yang lebih bersih. Di balik variasi ini, kita dapat melihat bahwa kualitas institusi tidak hanya soal keberadaan aturan, tetapi tentang bagaimana aturan tersebut digunakan, dipertanyakan, dan dinegosiasikan dalam praktik. Perspektif filsafat kekuasaan mengajak kita membaca angka penetrasi energi bersih sebagai gejala dari pertarungan aktor, bukan sekadar hasil "kapasitas negara" yang netral. Perbandingan lintas negara, karena itu, penting bukan untuk mencari model tunggal terbaik, melainkan untuk memetakan ragam cara institusi membentuk ruang kemungkinan bagi transformasi sistem energi.

Jika kita memetakan negara-negara ke dalam kelompok-kelompok tipikal, paling tidak muncul tiga konfigurasi kasar. Pertama, kelompok dengan tata kelola relatif kuat, kapasitas birokrasi tinggi, dan kerangka regulasi stabil yang mendukung investasi jangka panjang di sektor energi. Kedua, kelompok dengan kualitas institusi sedang, di mana aturan tertulis tampak menjanjikan, tetapi implementasi sering terganggu oleh korupsi, patronase, dan fragmentasi kewenangan. Ketiga, kelompok dengan kelemahan kelembagaan mendasar, di mana kontrak infrastruktur berisiko tinggi, ketidakpastian hukum besar, dan konflik sosial sering meletup di sekitar proyek energi. Studi lintas negara menunjukkan bahwa peningkatan penetrasi teknologi rendah karbon cenderung lebih stabil di kelompok pertama, namun bukan berarti dua kelompok lain tak memiliki gerak; justru di sana muncul banyak eksperimen, inkonsistensi, dan bentuk-bentuk resistensi yang membuka celah analisis tentang bagaimana kekuasaan diartikulasikan melalui desain kelembagaan.

Dalam berbagai basis data internasional, penetrasi energi terbarukan biasanya diukur melalui pangsa pembangkitan listrik dari sumber nonfosil, kapasitas terpasang, atau indikator intensitas emisi. Di sisi lain, kualitas institusi ditangkap melalui indeks tata kelola, indikator korupsi, stabilitas politik, rule of law, dan efektivitas birokrasi. Ketika kedua himpunan angka ini digabungkan dalam model lintas negara, terlihat pola bahwa negara dengan kombinasi stabilitas politik dan akuntabilitas publik yang relatif baik cenderung lebih mampu mempertahankan jalur investasi jangka panjang. Namun pola ini tidak otomatis berarti bahwa tata kelola "baik" selalu berujung pada keadilan; ia hanya menunjukkan bahwa aturan main cenderung lebih dapat diprediksi, sehingga konflik antara kelompok kepentingan dapat dimediasi melalui forum formal, bukan semata lewat tawar-menawar di belakang layar.

Di negara-negara Eropa Barat dan Nordik, misalnya, kerangka hukum yang relatif stabil dan lembaga regulasi independen telah menciptakan lingkungan yang memudahkan investasi jaringan dan pembangkit yang lebih bersih, tetapi sekaligus memperkuat peran aktor-aktor tertentu seperti utilitas besar atau pengembang proyek yang punya kapasitas teknis tinggi. Studi tentang desentralisasi listrik menunjukkan bahwa transisi menuju skala jaringan yang lebih tersebar sering disertai pergeseran kekuasaan di antara aktor negara, perusahaan, dan komunitas lokal (Brisbois, 2020). Dalam konteks ini, kualitas institusi bukan hanya tentang kemampuan negara mengendalikan korupsi, tetapi juga tentang bagaimana mekanisme representasi dan partisipasi memungkinkan kelompok baru masuk ke ruang pengambilan keputusan. Dengan kata lain, skor tata kelola yang tinggi bisa berjalan bersama konsolidasi kekuasaan di tangan segelintir aktor, jika desain kelembagaannya tidak secara eksplisit membuka ruang bagi keterlibatan warga.

Sebaliknya, di sejumlah negara dengan kelemahan tata kelola, penetrasi teknologi rendah karbon kadang melaju cepat justru karena struktur institusinya memungkinkan keputusan top-down yang agresif, misalnya melalui penugasan langsung kepada perusahaan milik negara atau investor tertentu. Pola semacam ini bisa menghasilkan kenaikan kapasitas pembangkit yang impresif di atas kertas, tetapi menyimpan banyak ketegangan sosial dan ekologi yang tak tertangkap dalam statistik nasional. Ketika mekanisme konsultasi publik lemah dan lembaga peradilan tidak independen, konflik lahan, penggusuran, atau penolakan komunitas kerap dipinggirkan sebagai "biaya sampingan" pembangunan. Studi lintas negara menunjukkan bahwa dalam konfigurasi seperti ini, korelasi antara indikator tata kelola dan penetrasi teknologi menjadi kabur, karena angka kapasitas tidak mencerminkan keberlanjutan politik dan sosial dari proyek-proyek tersebut.

Peran kebijakan energi menjadi penentu signifikan dalam menjembatani kualitas institusi dan hasil material di sistem kelistrikan. Di negara dengan kerangka hukum jelas dan proses perumusan kebijakan relatif inklusif, perbedaan antara pemerintahan yang berganti dapat disalurkan melalui revisi undang-undang, pengaturan tarif, atau desain insentif yang dibahas secara terbuka. Sementara itu, di negara yang proses legislasi dan peraturan sektoralnya didominasi eksekutif atau koalisi sempit, kebijakan energi cenderung berubah secara tiba-tiba melalui keputusan administratif, memorandum rahasia, atau perjanjian bilateral yang sulit diakses publik. Dalam perspektif lintas negara, pola-pola ini menghasilkan kombinasi unik antara ketidakpastian regulasi dan peluang rente yang memengaruhi minat investor, sekaligus menempatkan warga di posisi lemah untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas atas skema transisi yang diklaim "hijau".

Studi perbandingan juga mengungkap bagaimana kualitas institusi berkaitan dengan kemampuan negara mengelola ketegangan pusat-daerah dalam pengembangan infrastruktur energi. Di banyak negara federal atau sangat terdesentralisasi, pemerintah daerah memegang kewenangan penting dalam perizinan lahan, perencanaan wilayah, dan konsultasi publik. Jika desain institusinya memungkinkan koordinasi dua arah yang jelas antara pusat dan daerah, konflik wewenang dapat diminimalkan dan investor tidak harus menegosiasikan ulang setiap proyek dari nol. Namun jika pembagian kewenangan kabur dan tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel, maka perbedaan politik lokal dapat menghambat proyek, sekaligus memberi ruang bagi praktik informal seperti negosiasi rente, janji kompensasi yang tidak tercatat, atau peminggiran kelompok minoritas yang tak punya akses ke jaringan kekuasaan.

Dimensi lain yang menonjol dalam studi lintas negara adalah bagaimana kualitas institusi memengaruhi kapasitas negara untuk mengarusutamakan keadilan sosial dalam desain transisi. Negara dengan sistem perlindungan sosial kuat, birokrasi yang relatif responsif, dan mekanisme dialog sosial yang berfungsi memiliki peluang lebih besar untuk merancang skema kompensasi bagi pekerja di sektor fosil atau rumah tangga berpendapatan rendah. Sebaliknya, di negara yang kelembagaan fiskal dan jaring pengaman sosialnya lemah, setiap upaya reformasi harga energi mudah dianggap sebagai ancaman terhadap kesejahteraan rakyat, membuka ruang bagi politisasi dan populisme. Perbandingan lintas negara menunjukkan bahwa keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari penurunan emisi, tetapi dari sejauh mana institusi mampu meminimalkan beban yang jatuh secara tidak proporsional kepada kelompok paling rentan.

Dalam konteks regional, contoh dari negara-negara Nordik dan Baltik menunjukkan bagaimana konfigurasi tata kelola yang

relatif kuat dipadukan dengan partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan energi terbarukan. Studi tentang produksi listrik, transisi energi, dan pemberdayaan komunitas di sebelas negara Nordik-Baltik memperlihatkan bahwa desentralisasi kapasitas dan partisipasi warga dapat berjalan seiring dengan penguatan sistem jaringan dan keandalan pasokan (Gatto & Sadik-Zada, 2023). Namun perbandingan di antara negara-negara tersebut juga mengungkap perbedaan signifikan dalam hal siapa yang benar-benar memiliki aset, bagaimana risiko dibagi, dan sejauh mana komunitas lokal memperoleh suara dalam keputusan strategis. Di sinilah tampak bahwa kualitas institusi tidak hanya tercermin dalam indikator formal, tetapi juga dalam cara aturan memungkinkan atau justru membatasi bentuk-bentuk baru kepemilikan dan pengelolaan energi di tingkat lokal.

Di luar kawasan tersebut, studi panel lintas negara sering menggunakan model statistik untuk mengaitkan indikator tata kelola dengan variabel penetrasi teknologi rendah karbon, pertumbuhan kapasitas pembangkit, atau intensitas emisi. Meskipun berguna untuk mengenali pola umum, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena mengandalkan indikator agregat yang sering mengaburkan dinamika lokal. Kualitas institusi direduksi menjadi skor tunggal, sementara perbedaan antara lembaga pengadilan, otoritas regulasi, dan pemerintah daerah hilang dari pengamatan. Selain itu, masalah kausalitas timbal balik—apakah tata kelola yang baik mendorong penetrasi teknologi bersih, atau justru tekanan transisi yang kuat memaksa perbaikan kelembagaan—jarang bisa dijawab tuntas hanya dengan regresi lintas negara. Karena itu, pembacaan hasil kuantitatif perlu selalu dikaitkan dengan analisis kualitatif yang menelusuri praktik, konflik, dan narasi kebijakan di tiap konteks.

Studi lintas negara juga memperlihatkan bahwa apa yang disebut "kualitas institusi" kerap dimaknai dari sudut pandang

pelaku pasar dan lembaga keuangan internasional: kepastian kontrak, perlindungan investor, dan stabilitas makroekonomi. Parameter ini penting, tetapi tidak secara otomatis mencerminkan keadilan distribusi manfaat dan beban dalam transisi sistem energi. Negara yang dianggap sangat baik dari sisi iklim investasi bisa saja gagal mengakomodasi aspirasi komunitas lokal, mengabaikan hak masyarakat adat, atau menunda kompensasi bagi pekerja yang terdampak. Di sisi lain, negara dengan skor tata kelola sedang tetapi memiliki tradisi kuat gerakan sosial dan partisipasi warga dapat mengembangkan bentuk-bentuk pengawasan dan koreksi kebijakan yang tidak tercermin dalam indeks global. Perbandingan semacam ini mengingatkan bahwa kualitas institusi perlu dibaca secara normatif: seberapa jauh lembaga mampu memfasilitasi demokratisasi pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam sistem energi.

Dalam banyak kasus, kebijakan energi menjadi arena di mana indikator tata kelola diuji dalam praktik. Desain skema tarif, lelang kapasitas baru, penetapan prioritas akses ke jaringan, dan syarat konten lokal menunjukkan apakah regulasi lebih condong pada stabilitas bagi investor besar atau membuka ruang bagi produsen kecil dan inisiatif komunitas. Di negara dengan lembaga regulasi yang kuat dan relatif independen, perubahan kebijakan biasanya didahului proses konsultasi publik, studi dampak, dan mekanisme banding yang dapat diakses. Sebaliknya, di negara di mana regulasi dapat dimodifikasi dengan cepat melalui keputusan menteri atau instruksi eksekutif, kepastian hukum menjadi semu dan memaksa pelaku usaha serta warga bergantung pada kedekatan dengan pengambil keputusan. Perbandingan lintas negara memperlihatkan bahwa bagaimana kebijakan energi dirancang dan diubah menjadi indikator nyata berfungsi atau tidaknya tata kelola yang diklaim baik di atas kertas.

Jika kita mencoba mengelompokkan pola hubungan antara kualitas institusi dan penetrasi teknologi rendah karbon, paling tidak muncul beberapa klaster: negara dengan tata kelola kuat dan penetrasi tinggi; negara dengan tata kelola kuat tetapi penetrasi moderat karena masih terikat kepentingan fosil; negara dengan tata kelola sedang tetapi penetrasi meningkat berkat tekanan sosial dan peluang pasar; serta negara dengan kelemahan kelembagaan di mana penetrasi tampak tinggi tetapi ditopang proyek-proyek yang rentan konflik. Klaster-klaster ini tidak statis; negara bisa berpindah seiring perubahan politik domestik, reformasi hukum, atau krisis eksternal seperti lonjakan harga bahan bakar. Studi lintas negara membantu kita menelusuri bagaimana pergeseran tersebut terjadi, misalnya ketika gelombang protes publik memaksa pemerintah mempercepat pembatasan batu bara utawa ketika perubahan rezim membawa orientasi baru dalam perencanaan energi.

Penelitian mengenai hambatan transisi rendah karbon lintas konteks menunjukkan bahwa tantangan teknis, ekonomi, dan sosial sering kali berkelindan dengan konfigurasi kelembagaan yang spesifik. Pendekatan yang memadukan pemetaan kognitif dan metode pengambilan keputusan multikriteria, misalnya, mengidentifikasi tata kelola, kapasitas institusional, dan kejelasan desain kebijakan sebagai faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya pengembangan sistem energi bersih (Saraji & Streimikiene, 2024). Meskipun studi tersebut berfokus pada kasus tertentu, metode dan temuannya relevan bagi perbandingan lintas negara karena memperlihatkan bagaimana aktor yang berbeda memaknai pentingnya faktor kelembagaan. Ini mengingatkan bahwa kualitas institusi bukan hanya indikator eksternal, tetapi juga bagian dari “peta mental” perencana, politisi, dan pelaku pasar ketika mereka menilai risiko dan merumuskan skenario transisi.

Dalam perspektif historis, perbedaan kualitas institusi juga terkait dengan warisan kolonial, model pembangunan, dan struktur ekonomi politik yang membentuk konfigurasi sektor energi suatu negara. Di banyak negara Selatan global, sumber daya energi sejak lama menjadi instrumen kontrol politik dan pembiayaan negara, sehingga upaya mengalihkan basis sistem ke energi terbarukan sering berhadapan dengan kepentingan kuat yang tertanam dalam perusahaan milik negara dan jaringan patronase. Studi lintas negara memperlihatkan bahwa transisi institusional di konteks ini membutuhkan lebih dari sekadar reformasi teknis; diperlukan perubahan dalam cara negara memandang perannya sebagai pemilik aset, regulator, dan penyedia layanan publik. Tanpa pergeseran tersebut, proyek-proyek baru mudah direkrut untuk mengukuhkan pola ketidakadilan lama, alih-alih membuka ruang bagi distribusi manfaat dan kekuasaan yang lebih setara.

Di negara-negara dengan kapasitas fiskal dan teknokratis tinggi, kualitas institusi memungkinkan pengembangan instrumen kebijakan yang kompleks, seperti skema pasar karbon, tarif dinamis, atau kontrak jangka panjang berbasis kinerja. Namun kelengkapan instrumen ini tidak selalu berarti keadilan; ia bisa juga mengukuhkan logika pengukuran dan pengendalian yang memarginalkan bentuk-bentuk pengetahuan lokal dan struktur pengambilan keputusan komunitas. Studi lintas negara menunjukkan bahwa di beberapa kasus, keberhasilan teknis dalam menurunkan emisi justru diiringi meningkatnya ketimpangan akses dan konsentrasi kepemilikan aset energi. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kualitas institusi harus memasukkan dimensi refleksivitas: sejauh mana lembaga mampu meninjau ulang indikator kinerja, membuka diri terhadap kritik, dan menyesuaikan desain kebijakan ketika bukti tentang dampak sosial yang tidak diinginkan mulai mengemuka.

Perbandingan antarnegara sekaligus mengajarkan kehati-hatian terhadap godaan untuk mengimpor model kelembagaan tanpa memperhitungkan konteks. Mekanisme regulasi yang efektif di satu negara bisa gagal ketika diterapkan di negara lain yang struktur sosial, politik, dan hukumnya berbeda. Misalnya, independensi otoritas regulasi yang di atas kertas menjamin stabilitas kebijakan bisa berubah menjadi isolasi dari tuntutan publik di negara yang partai politiknya lemah dan masyarakat sipilnya terfragmentasi. Karena itu, ketika kita berbicara tentang ambang kualitas institusi yang diperlukan bagi penetrasi teknologi lebih bersih, kita perlu menambahkan pertanyaan "untuk siapa" dan "dalam konfigurasi kekuasaan seperti apa". Studi lintas negara memberikan bahan mentah, tetapi penilaian normatif tetap harus mempertimbangkan sejarah dan dinamika internal masing-masing negara.

Pada akhirnya, studi lintas negara mengenai pola hubungan kualitas institusi dan penetrasi teknologi rendah karbon mengungkap bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas teknis, tetapi juga orientasi moral dan politik dari kebijakan energi. Negara dapat mencapai target kapasitas pembangkit baru sambil mempertahankan ketimpangan struktural, atau sebaliknya berjuang dengan kenaikan lambat karena berupaya keras memasukkan prinsip keadilan prosedural dan substantif dalam desain kebijakan. Di sinilah filsafat kekuasaan membantu kita membaca angka dan indeks sebagai jejak pertarungan wacana, sumber daya, dan legitimasi. Dengan memandang kebijakan energi sebagai medan konflik yang diinstitusikan, perbandingan lintas negara tidak berhenti pada identifikasi korelasi, tetapi bergerak menuju pertanyaan lebih dalam: jenis institusi seperti apa yang sanggup menopang transformasi yang adil, dan bagaimana jalur menuju konfigurasi tersebut dapat dirancang tanpa mengabaikan kompleksitas sejarah dan konteks masing-masing negara.

12.5 Implikasi bagi Negara dengan Institusi Rapuh: Strategi Bertahap dan Protektif

Dalam konteks negara dengan institusi rapuh, pertanyaan tentang bagaimana merancang strategi bertahap dan protektif untuk menghadapi krisis iklim bukan sekadar isu teknis, tetapi menyentuh inti filsafat kekuasaan. Negara-negara ini sering dipaksa berlari dalam lintasan yang dirancang di tempat lain: target emisi ditetapkan secara global, instrumen keuangan dibakukan, dan standar tata kelola diimpor tanpa banyak ruang negosiasi. Di bawah tekanan tersebut, pemerintah mudah tergoda untuk mengadopsi paket kebijakan yang tampak modern, tetapi bertumpu pada asumsi kapasitas birokrasi dan kepatuhan hukum yang sebenarnya belum tersedia. Bab ini menyoroti bahwa desain kebijakan di lingkungan institusi rapuh harus dimulai dari pengakuan jujur atas keterbatasan: kapasitas administratif yang tipis, prosedur akuntabilitas yang lemah, serta relasi kuasa oligarkis yang menjadikan sektor energi sebagai sumber rente. Tanpa pengakuan ini, strategi yang disebut progresif justru dapat memperdalam ketidakadilan dan mempercepat keruntuhan kepercayaan publik, sehingga slogan transisi hijau berbalik menjadi sumber sinisme sosial. Dengan kata lain, langkah pertama yang protektif bukanlah memilih instrumen "terbaik", melainkan mengakui bahwa titik tolaknya bukan negara ideal, tetapi negara yang rapuh, lelah, dan sering kali dibelah oleh konflik kepentingan.

Istilah "institusi rapuh" dalam pembahasan ini tidak dimaksudkan sebagai label moral yang merendahkan, melainkan sebagai deskripsi tentang kombinasi problem struktural yang saling menguatkan. Rapuh di sini berarti tingkat kepastian hukum rendah, penegakan regulasi tidak konsisten, dan proses anggaran sangat rentan ditunggangi kepentingan kelompok kuat yang mampu menekan birokrasi dan politisi. Dalam situasi seperti ini, setiap instrumen baru yang

diperkenalkan—mulai dari subsidi, insentif pajak, hingga skema lelang—berisiko menjadi kanal baru bagi korupsi atau penyaluran rente politik, terutama ketika mekanisme audit dan pengawasan publik lemah. Sektor energi sejak lama menjadi lokasi favorit akumulasi rente karena intensitas modal yang tinggi, struktur pasar yang terkonsentrasi, dan posisi strategisnya bagi stabilitas pemerintahan. Karena itu, strategi bertahap dan protektif harus memetakan lebih dulu medan konflik kepentingan yang melingkupi lembaga-lembaga kunci seperti kementerian energi, otoritas regulator, perusahaan listrik negara, dan kementerian keuangan sebelum berbicara mengenai instrumen tertentu. Tanpa pemetaan politik awal semacam ini, intervensi apa pun, betapapun mulianya tujuan iklim yang diklaim, berisiko direkayasa ulang menjadi sekadar skema pembagian keuntungan di antara elite.

Di negara dengan institusi rapuh, dorongan internasional untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sering kali datang bersamaan dengan janji pembiayaan dan teknologi, tetapi juga membawa paket prasyarat kelembagaan yang rumit. Bahasa resminya adalah reformasi struktur pasar, peningkatan transparansi, dan penguatan regulasi, namun di balik itu tersimpan logika harmonisasi agar proyek dan kontrak mudah dibaca oleh lembaga keuangan global dan perusahaan multinasional. Bagi pemerintah yang bergantung pada bantuan, paket semacam ini tampak tak terelakkan, sehingga ruang tawar untuk mengadaptasi desain menjadi sangat sempit, terutama ketika negosiasi dilakukan dalam waktu singkat dan di bawah tekanan diplomatik. Di titik ini, filsafat kekuasaan mengingatkan bahwa "bantuan" tidak pernah netral: ia selalu terikat pada cara tertentu melihat dunia, menilai risiko, dan menghitung manfaat, termasuk menentukan siapa yang dapat menerima subsidi dan siapa yang harus menanggung tarif tinggi. Strategi protektif, karenanya, perlu menempatkan negosiasi terhadap syarat

kelembagaan sebagai bagian eksplisit dari politik energi, bukan sekadar urusan teknis di ruang tertutup, dan membuka ruang agar parlemen, organisasi masyarakat sipil, serta media dapat memeriksa konsekuensi jangka panjang dari setiap paket yang ditandatangani.

Salah satu pelajaran penting dari studi lintas negara adalah bahwa pengaruh kebijakan iklim dan energi sangat bergantung pada kualitas institusi yang menopangnya, bukan hanya pada kecanggihan instrumen yang diadopsi. Analisis atas transisi energi di kawasan Asia Tenggara, misalnya, menunjukkan bahwa negara yang gagal melakukan reformasi tata kelola mengalami kesenjangan besar antara target dan realisasi, sekalipun telah mengadopsi skema regulasi yang "secara kertas" memenuhi standar global (Vakulchuk et al., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa menyalin kerangka regulasi dari negara dengan birokrasi kuat ke negara dengan birokrasi rapuh cenderung menghasilkan tata kelola semu: formalisme prosedural yang menutupi ketidakmampuan pengawasan, lemahnya penegakan kontrak, dan politisasi izin yang merajalela. Di banyak kasus, kebijakan tampak "berhasil" jika diukur dengan indikator resmi, padahal proyek mengalami keterlambatan, kualitas infrastruktur buruk, dan utang publik meningkat tajam. Strategi bertahap seharusnya berangkat dari pertanyaan: fungsi mana yang benar-benar dapat dijalankan secara kredibel hari ini, fungsi mana yang perlu ditunda atau disederhanakan, dan fungsi mana yang sebaiknya tidak diambil sama sekali karena kapasitas dasarnya belum ada.

Pendekatan bertahap juga berarti berhenti menganggap reformasi kelembagaan sebagai proyek sekali jadi yang dapat diselesaikan melalui satu paket undang-undang besar. Banyak desain transisi iklim didasarkan pada asumsi *path dependence*, yakni bahwa perubahan awal akan mengunci jalur baru yang menguntungkan secara otomatis. Dalam konteks institusi rapuh,

asumsi ini berbahaya jika mengabaikan dinamika politik sehari-hari: koalisi yang menopang pemerintah bisa berubah cepat, konflik elite dapat memblokir implementasi, dan perubahan kecil pada harga energi memicu gejolak sosial yang melampaui perhitungan teknokratis. Karena itu, strategi protektif perlu dirancang sebagai rangkaian langkah yang dapat dikoreksi, bukan skenario linier yang menutup kemungkinan revisi. Di tingkat praktis, ini berarti memberi ruang untuk evaluasi berkala, merancang mekanisme *feedback* yang melibatkan masyarakat sipil dan lembaga audit independen, serta membatasi besaran komitmen jangka panjang yang tidak dapat diubah tanpa biaya politik yang sangat besar. Dengan kata lain, reformasi harus dipahami sebagai proses belajar kolektif, bukan ujian yang hanya memiliki satu jawaban benar.

Dalam merancang kebijakan energi di lingkungan kelembagaan semacam itu, kesederhanaan sering lebih protektif daripada rancangan yang sangat kompleks dan "canggih". Instrumen yang mensyaratkan kapasitas pengawasan tinggi, model kuantitatif rumit, atau koordinasi lintas lembaga yang intens sebaiknya diperkenalkan secara terbatas, dengan cakupan terbatas dan uji coba yang jelas, alih-alih langsung diarusutamakan secara nasional. Kompleksitas memberi ruang manuver besar bagi aktor yang memahami celah regulasi, sementara birokrasi yang lemah justru kewalahan dan akhirnya menyerahkan praktik sehari-hari kepada konsultan atau perusahaan besar yang mempunyai kepentingan sendiri. Desain bertahap dapat dimulai dari instrumen yang mudah diawasi, misalnya skema tarif sederhana untuk proyek skala kecil, dengan aturan transparansi minimum yang dapat dipahami oleh legislatif daerah dan organisasi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah dapat membangun kapasitas analitis secara perlahan melalui pelatihan, kerja sama universitas, dan pembelajaran dari wilayah yang relatif lebih berhasil. Tujuannya

bukan mengejar keanggunan teknokratis, melainkan meminimalkan peluang penyimpangan dan menjaga agar ruang kebijakan tetap dapat diawasi warga biasa.

Aspek penting lain dari strategi protektif adalah pembagian risiko antara negara, investor, dan masyarakat. Di negara dengan institusi rapuh, pemerintah sering kali tergoda menawarkan jaminan berlebihan—mulai dari *sovereign guarantee* hingga klausul arbitrase internasional yang sangat menguntungkan investor—demi menarik modal masuk. Dari sudut pandang jangka pendek, ini terlihat sebagai keberhasilan: proyek berjalan, kapasitas terpasang meningkat, dan pemerintah dapat memamerkan komitmen iklim di forum internasional. Namun secara filosofis, pola ini memindahkan beban risiko menuju generasi mendatang dan memperkuat ketergantungan pada aktor eksternal yang sulit dikendalikan, sekaligus mengurangi ruang fiskal untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Strategi bertahap yang protektif perlu menegosiasikan ulang struktur kontrak agar pembagian risiko lebih seimbang, termasuk melalui batasan tingkat pengembalian, kewajiban keterbukaan kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak sepenuhnya bergantung pada forum internasional yang mahal. Dengan cara ini, negara menjaga haknya untuk memperbaiki desain jika kondisi ekonomi dan sosial berubah secara signifikan.

Keadilan prosedural dan distribusional tidak dapat ditunda dengan alasan institusi lemah; justru karena lemah, perlindungan terhadap kelompok rentan harus ditempatkan sebagai prinsip desain sejak awal. Literatur tentang tata kelola energi menekankan bahwa integrasi dimensi keadilan ke dalam kerangka tata kelola dapat membantu mencegah tertangkapnya regulasi oleh kepentingan sempit dan memperkuat daya tahan kebijakan terhadap perubahan politik (Govindarajan & Ganesh, 2022). Dalam praktik, ini berarti mensyaratkan partisipasi

bermakna masyarakat terdampak dalam penentuan lokasi proyek, menetapkan standar konsultasi publik yang tidak bisa diabaikan, dan mewajibkan kajian distribusi manfaat serta risiko sebelum izin diberikan. Bagi negara dengan institusi rapuh, prinsip keadilan bukan kemewahan normatif, melainkan instrumen protektif untuk mencegah konflik terbuka dan menjaga legitimasi minimum di mata warga. Jika warga melihat bahwa prosesnya adil meski hasil belum sempurna, mereka cenderung memberi negara ruang belajar; sebaliknya, ketidakadilan mencolok dalam satu proyek saja dapat menghancurkan kepercayaan terhadap seluruh agenda transisi.

Strategi bertahap untuk mendorong energi terbarukan di konteks lembaga rapuh sebaiknya memprioritaskan proyek yang skalanya dapat dikelola dan dekat dengan kebutuhan dasar warga. Proyek pembangkit raksasa yang memerlukan jaringan transmisi baru, pembebasan lahan luas, dan kontrak jangka panjang berisiko tinggi memicu konflik sosial dan membuka ruang kolusi antara elite politik dan pengusaha, terutama jika mekanisme konsultasi publik lemah. Sebaliknya, inisiatif desentralisasi—seperti pembangkit surya atap komunal, mikrohidro desa, atau sistem hibrida untuk fasilitas kesehatan—lebih mudah diawasi dan hasilnya lebih cepat dirasakan masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan bahwa negara benar-benar hadir. Pendekatan ini tidak romantis; ia tetap membutuhkan desain tarif, standar teknis, serta aturan kepemilikan yang jelas agar tidak membebani komunitas dengan biaya tak terduga. Namun skala yang lebih kecil memungkinkan eksperimen regulasi, koreksi kesalahan, dan pembelajaran kelembagaan tanpa menjerumuskan negara ke dalam beban kontrak jangka panjang yang sulit ditarik kembali, sambil secara bertahap menumbuhkan kapasitas mengelola proyek yang lebih kompleks di masa depan.

Dimensi eksternal juga penting: negara dengan institusi rapuh kerap bergantung pada lembaga keuangan internasional, donor bilateral, dan konsultan global untuk merancang serta membiayai reformasi. Ketergantungan ini menciptakan asimetri pengetahuan dan kekuasaan yang mudah menggeser orientasi kebijakan dari kebutuhan domestik ke agenda global, misalnya ketika syarat pinjaman lebih menekankan reformasi pasar daripada perlindungan kelompok miskin. Salah satu cara protektif adalah membangun kapasitas analitis di dalam negeri secara bertahap, baik melalui universitas, lembaga riset, maupun unit analisis kebijakan di kementerian, sehingga pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada laporan konsultan. Alih-alih menerima mentah-mentah paket reformasi, pemerintah dapat menegosiasikan ruang untuk adaptasi lokal, misalnya dengan melakukan uji kebijakan di beberapa wilayah, atau membatasi masa berlaku instrumen baru sambil menyiapkan evaluasi independen. Dengan demikian, arsitektur bantuan internasional diubah dari mekanisme penyeragaman menjadi arena pembelajaran timbal balik, di mana negara penerima bantuan tidak hanya menjadi obyek, tetapi juga subyek yang berdaulat dalam menentukan prioritas.

Strategi bertahap juga menyangkut cara negara mendefinisikan keberhasilan. Jika keberhasilan hanya diukur dari kapasitas terpasang, jumlah proyek, atau besarnya investasi yang masuk, maka tekanan untuk mengumumkan pencapaian cepat akan sangat besar—meski kualitas tata kelola belum sejalan. Di institusi rapuh, indikator-indikator kuantitatif seperti ini mudah dimanipulasi atau dikejar dengan mengorbankan dimensi keadilan dan keberlanjutan jangka panjang, misalnya dengan memotong proses konsultasi publik atau mengabaikan keluhan warga. Karena itu, kerangka evaluasi perlu memasukkan ukuran-ukuran yang lebih reflektif: siapa yang menikmati manfaat, siapa yang menanggung risiko, bagaimana

tingkat kepercayaan publik, dan apakah mekanisme akuntabilitas berjalan secara nyata. Menggeser indikator sukses ke arah yang lebih holistik adalah bagian dari strategi protektif, karena mengurangi dorongan untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya hanya demi memenuhi target angka. Pengukuran yang lebih jujur memang dapat memperlihatkan kemajuan yang lebih lambat, tetapi justru itulah prasyarat bagi transformasi yang bertahan lama.

Dalam kerangka tersebut, desain kebijakan energi harus memasukkan perangkat pengaman kelembagaan seperti *sunset clause* dan peninjauan berkala. *Sunset clause* adalah ketentuan bahwa suatu kebijakan atau insentif otomatis berakhir setelah periode tertentu kecuali diperpanjang secara eksplisit melalui proses politik terbuka; ini mencegah kebijakan usang terus bertahan karena menguntungkan kelompok tertentu yang telah menyesuaikan strategi bisnisnya. Peninjauan berkala yang diatur dalam undang-undang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan harga teknologi, kapasitas fiskal, dan dinamika sosial, sekaligus memberi kesempatan untuk memperbaiki desain yang menimbulkan ketidakadilan distribusional. Bagi negara dengan institusi rapuh, mekanisme ini penting untuk membatasi kerusakan jika sebuah desain ternyata cacat, sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah bersedia belajar dan tidak terikat secara buta pada kebijakan yang pernah diumumkan. Dengan demikian, eksperimen kebijakan tidak berubah menjadi jebakan struktural yang menutup ruang koreksi, dan warga dapat melihat bahwa kegagalan di satu tahap bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk memperbaiki arsitektur kelembagaan.

Pertimbangan lain yang sering diabaikan dalam desain untuk konteks rapuh adalah beban administratif yang ditimbulkan oleh sistem pelaporan, audit, dan pemantauan yang

sangat rumit. Di atas kertas, kerangka pengawasan yang rinci tampak menjanjikan transparansi, karena setiap kegiatan tercatat dalam matriks indikator dan laporan berkala. Namun ketika kapasitas birokrasi rendah, kewajiban pelaporan yang berlapis-lapis justru menciptakan pasar baru bagi jasa konsultan dan membuka ruang korupsi administratif, misalnya dalam bentuk manipulasi angka atau pembayaran untuk mempercepat proses verifikasi. Pendekatan bertahap yang protektif mendorong penyesuaian standar pengawasan dengan kapasitas nyata lembaga pengawas, sehingga formulir dan sistem pelaporan dirancang dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, kemampuan teknologi informasi, dan budaya organisasi. Lebih baik memiliki sedikit indikator yang benar-benar dipantau dan dipahami, dibanding ratusan matriks yang hanya diisi secara formalistis. Transparansi dapat diperkuat dengan membuka data utama kepada publik dan media dalam format yang mudah dibaca, bukan hanya dengan menambah jumlah dokumen teknis yang sulit diakses.

Dalam banyak kasus, pemerintah pusat bukan satu-satunya aktor yang relevan; pemerintah daerah, komunitas lokal, dan organisasi adat memegang peran penting dalam mengelola wilayah dan sumber daya. Institusi rapuh di tingkat pusat tidak selalu berarti kelemahan di tingkat lokal, dan sebaliknya; ada daerah yang memiliki tradisi musyawarah kuat dan mekanisme pengawasan sosial yang relatif efektif. Strategi bertahap dan protektif dapat memanfaatkan variasi ini dengan mendesain kewenangan asimetris: daerah yang memiliki tata kelola relatif baik diberi ruang lebih besar untuk bereksperimen dengan model tata kelola energi, sementara daerah yang masih sangat bermasalah difokuskan pada penguatan fungsi dasar seperti pencatatan, perizinan, dan pengawasan. Pendekatan *multi-level governance*—yakni pembagian peran antara pusat, daerah, dan aktor non-negara—perlu dijelaskan dengan bahasa

sederhana agar tidak menjadi jargon teknokratik yang justru mengaburkan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kelemahan di satu tingkat dapat diimbangi oleh kekuatan di tingkat lain, alih-alih saling memperburuk.

Dari perspektif keadilan global, dorongan agar negara berpendapatan rendah segera memperluas kapasitas energi terbarukan sering kali mengabaikan kenyataan bahwa mereka masih bergulat dengan konflik bersenjata, krisis fiskal, atau bencana berulang yang menguras sumber daya. Dalam lingkungan demikian, setiap proyek infrastruktur menghadapi risiko kerusakan, gangguan operasi, atau penangkapan oleh kelompok bersenjata, sehingga desain yang diasumsikan stabil di atas kertas menjadi rapuh di lapangan. Strategi protektif tidak menolak proyek baru, tetapi memprioritaskan desain yang tahan gangguan: sistem yang modular, bisa diperbaiki dengan suku cadang lokal, dan tidak bergantung pada satu pemasok tunggal yang sulit dijangkau ketika terjadi krisis. Pendekatan ini mungkin terlihat kurang "efisien" menurut kalkulasi finansial jangka pendek, tetapi secara filosofis lebih selaras dengan kewajiban negara melindungi warga dari kerapuhan ganda: kerapuhan institusi dan kerapuhan iklim yang kian intens. Dengan demikian, kecepatan ekspansi tidak diukur hanya dari megawatt terpasang, tetapi juga dari seberapa jauh infrastruktur benar-benar berfungsi dalam kondisi ekstrem.

Negara dengan institusi rapuh juga berhadapan dengan dilema antara konsistensi kebijakan dan kebutuhan untuk bermanuver secara politis. Pemerintah mungkin merasa perlu mengumumkan target ambisius untuk memperoleh dukungan internasional, namun di sisi lain harus menyesuaikan diri dengan tekanan domestik, seperti tarif listrik yang sensitif atau ketergantungan pada industri ekstraktif yang menyerap banyak tenaga kerja. Strategi bertahap yang protektif menghindari jebakan komitmen berlebihan dengan memisahkan antara

bahasa diplomatik dan desain operasional, sehingga komitmen internasional tidak otomatis diterjemahkan menjadi kontrak domestik yang tak dapat diubah. Di ranah diplomasi, negara dapat menegaskan dukungan terhadap tujuan jangka panjang; tetapi di tingkat operasional, kebijakan dirancang dengan skema skala naik yang realistis, disertai indikator peringatan dini yang memicu peninjauan jika tekanan fiskal atau sosial meningkat melampaui batas tertentu. Dengan demikian, retorika tidak langsung menjebak negara ke dalam kewajiban yang tidak dapat dipenuhi, dan pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan jalur tanpa langsung dicap tidak kredibel.

Penting pula untuk mengakui dimensi epistemik: siapa yang dianggap ahli dan pengetahuan siapa yang dijadikan dasar perumusan kebijakan. Di negara dengan institusi rapuh, sering kali hanya suara konsultan internasional dan lembaga riset besar yang terdengar, sementara pengalaman praktis operator jaringan lokal, pemimpin komunitas, dan organisasi masyarakat sipil disisihkan sebagai "anekdotal". Strategi protektif mengupayakan *co-production of knowledge*, yakni penggabungan pengetahuan teknis dengan pengetahuan kontekstual melalui forum deliberatif yang dirancang inklusif dan berulang, bukan sekadar lokakarya seremonial. Agar tidak menjadi jargon baru, *co-production* perlu dijelaskan sebagai cara sederhana: mempertemukan orang yang menguasai teknologi dengan mereka yang hidup bersama konsekuensi kebijakan setiap hari, lalu memberi mereka ruang setara untuk menguji asumsi dan merumuskan prioritas. Ketika pengalaman warga miskin, perempuan, dan kelompok minoritas diakui sebagai sumber pengetahuan sah, desain kebijakan menjadi lebih protektif terhadap mereka yang selama ini paling rentan menanggung dampak buruk keputusan elit.

Akhirnya, implikasi utama bagi negara dengan institusi rapuh adalah bahwa keberanian untuk memperlambat,

menunda, atau mengubah desain kebijakan energi bukan tanda kurangnya komitmen iklim, melainkan bentuk tanggung jawab politik. Strategi bertahap dan protektif menolak anggapan bahwa ada satu jalur transisi yang harus diikuti semua negara tanpa memandang sejarah, struktur ekonomi, dan kekhasan tata kelola yang mereka miliki. Dengan menempatkan perlindungan terhadap warga, penguatan kapasitas institusi, dan pembatasan ruang rente sebagai prinsip utama, negara dapat bergerak menuju transformasi ekologi yang lebih adil, sekalipun langkahnya lebih kecil dan lebih lambat dibanding negara lain. Di dalam filsafat kekuasaan, pilihan untuk tidak tunduk pada logika percepatan yang membutakan risiko justru dapat dibaca sebagai upaya merestorasi kedaulatan politik, sekaligus menjaga kemungkinan bagi masa depan yang lebih manusiawi. Dengan demikian, "keterlambatan" bukan selalu kegagalan, tetapi dapat menjadi strategi sadar untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak menghancurkan fondasi sosial yang rapuh dan tidak mengorbankan generasi yang paling lemah.

13 Tata Kelola & Pembangunan Berkelanjutan di OECD: Paradoks Efektivitas dan "Governance Terlalu Kuat?"

13.1 Negara OECD dan Standar Tata Kelola Tinggi: Asumsi Efektivitas Otomatis

Negara-negara anggota OECD sering digambarkan sebagai ruang ideal di mana tata kelola yang kuat, sistem hukum yang stabil, dan kapasitas birokrasi yang tinggi secara otomatis menghasilkan kebijakan lingkungan yang efektif. Dalam narasi arus utama, standar tata kelola tinggi seolah menjamin bahwa setiap regulasi yang disusun akan diimplementasikan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, sehingga publik tidak perlu terlalu khawatir terhadap risiko penyalahgunaan wewenang. Namun, asumsi efektivitas otomatis ini menutupi pertanyaan-pertanyaan penting tentang bagaimana kekuasaan diedarkan, siapa yang menentukan prioritas kebijakan, dan siapa yang menanggung biaya sosial maupun ekologis dari pilihan teknologi tertentu. Di balik indikator tata kelola yang impresif, terdapat proses negosiasi, kompromi, dan eksklusi yang tidak selalu tersorot oleh laporan resmi maupun media arus utama. Banyak keputusan strategis diambil dalam forum tertutup antara pemerintah, pelaku usaha besar, dan lembaga keuangan, sementara masyarakat sipil berada di posisi reaktif. Karena itu, sebelum menerima begitu saja bahwa "kualitas institusi tinggi" identik dengan keberhasilan pembangunan berkelanjutan, kita perlu membongkar logika dan arsitektur kekuasaan yang menopang klaim tersebut, terutama dalam konteks politik energi dan iklim kontemporer yang sarat ketidakpastian.

Kerangka "tata kelola yang baik" di negara-negara OECD banyak bertumpu pada indikator prosedural seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas regulasi, yang kemudian dioperasionalkan ke dalam indeks, peringkat, dan penilaian kinerja. Di satu sisi, pendekatan ini memberikan bahasa bersama untuk membandingkan berbagai yurisdiksi, memfasilitasi dialog antarpemerintah, lembaga donor, dan investor global yang mencari kepastian aturan. Di sisi lain, ia mendorong reduksi kompleksitas menjadi skor numerik yang tampak netral dan obyektif, seolah-olah penilaian moral telah tersubstitusi penuh oleh algoritma. Literatur *energy justice* menunjukkan bahwa indikator dan kerangka evaluasi sering kali mengabaikan pertanyaan siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung beban dari transformasi energi, meskipun secara prosedural semua tampak tertib (Jenkins et al., 2021). Dengan kata lain, standar tata kelola tinggi dapat hidup berdampingan dengan pola ketidakadilan distribusional dan pengabaian suara kelompok yang secara politis kurang berdaya. Di banyak negara OECD, kelompok berpendapatan rendah atau komunitas minoritas masih kesulitan mengakses proses konsultasi yang rumit, sehingga pengalaman mereka jarang tercermin dalam indikator kinerja yang dirayakan pembuat kebijakan.

Ketika pemerintah dan lembaga internasional memuji kinerja negara-negara OECD, salah satu argumen yang kerap diangkat adalah keberhasilan mereka dalam memperluas pangsa energi terbarukan dan menurunkan intensitas emisi dalam jangka menengah. Namun, narasi ini sering dibingkai melalui grafis yang menghaluskan perbedaan regional dan kelas, sehingga seolah semua warga menikmati hasil yang sama dari investasi teknologi hijau. Di banyak kasus, keberhasilan tersebut bertumpu pada kombinasi subsidi, skema tarif, dan desain pasar listrik yang rumit, yang sulit dimengerti oleh publik umum dan

bahkan oleh pemerintah daerah. Kompleksitas teknis ini justru memudahkan pakar, konsultan, dan regulator untuk memonopoli bahasa kebijakan, sementara warga hanya diundang sebagai penerima informasi atau objek sosialisasi. Dengan cara seperti itu, indikator keberhasilan yang ditampilkan ke publik terutama mencerminkan perspektif pusat kebijakan dan aktor elite, bukan pengalaman warga yang hidup bersama proyek energi, perubahan tarif, atau perubahan tata guna lahan yang menyertai pembangunan infrastruktur baru.

Kecenderungan mengukur keberhasilan tata kelola melalui indikator komposit menciptakan apa yang bisa disebut sebagai "fetisisme skor", di mana angka-angka menjadi tujuan itu sendiri, bukan sekadar alat bantu. Negara-negara OECD berlomba mempertahankan reputasi sebagai yurisdiksi dengan regulasi efisien, kepastian usaha tinggi, dan risiko politik rendah, karena reputasi tersebut mempengaruhi arus investasi dan penilaian lembaga pemeringkat. Dalam logika ini, perdebatan substantif tentang arah transformasi sistem energi sering digeser menjadi perdebatan teknis tentang *ranking* dan *benchmarking*, yang hanya dapat diikuti secara nyaman oleh kalangan teknokrat. Ketika pemerintah mengejar peningkatan peringkat di berbagai indeks global, kritik terhadap struktur kepemilikan, ketimpangan akses, atau dampak sosial proyek energi justru dianggap sebagai "noise" yang mengganggu stabilitas iklim investasi. Akibatnya, demokrasi energi dapat tereduksi menjadi kompetisi untuk mengelola persepsi risiko investor, bukan ruang deliberasi terbuka tentang masa depan sistem energi nasional yang melibatkan warga secara setara. Dalam kondisi demikian, skor tata kelola berubah menjadi semacam mata uang simbolik yang dikejar elite kebijakan, sementara dimensi keadilan sosial dan ekologis ditekan ke pinggir wacana resmi.

Asumsi bahwa institusi yang kuat akan selalu menghasilkan kebijakan yang baik juga menutup kemungkinan bahwa kekuatan institusi itu sendiri dapat menjadi sumber masalah. Di sejumlah negara OECD, lembaga regulasi yang sangat independen dan dikukuhkan oleh mandat hukum yang luas dapat mendorong bentuk *technocratic insulation*, yaitu jarak yang lebar antara pengambil keputusan dan warga terdampak dalam perumusan maupun evaluasi kebijakan. Proses konsultasi publik sering diformat sebagai prosedur formalistik dengan dokumen teknis yang sulit diakses, sehingga keterlibatan warga menjadi simbolik ketimbang substantif dan lebih menyerupai ritual legitimasi. Ketika keberatan warga dibaca sekadar sebagai "masukan" untuk disaring oleh analis, ketimpangan pengetahuan dan sumber daya antara komunitas lokal dan birokrasi pusat menjadi semakin tajam, dan rasa frustrasi pun terakumulasi. Di titik ini, standar tata kelola tinggi dapat beroperasi sebagai pagar yang melindungi kontinuitas kebijakan, tetapi sekaligus mengunci imajinasi politik dalam kerangka yang sempit dan sukar digugat dari luar.

Dalam konteks kebijakan energi, negara-negara OECD biasanya memadukan instrumen harga, regulasi teknis, dan skema pasar untuk mengarahkan investasi serta perilaku pelaku usaha pada horizon waktu yang panjang. Kerangka hukum yang stabil membuat kontrak jangka panjang dan komitmen dekarbonisasi tampak kredibel bagi investor, sementara mekanisme penegakan yang kuat memastikan bahwa pelanggaran dapat dikenai sanksi yang tegas. Namun, stabilitas ini sering dihasilkan melalui proses negosiasi intensif dengan korporasi besar, asosiasi industri, dan lembaga keuangan, yang kepentingannya tidak selalu sejalan dengan agenda keadilan sosial maupun kebutuhan komunitas rentan. Dalam situasi seperti itu, kualitas institusi yang tinggi menjamin kepastian bagi pemilik modal dan operator jaringan, tetapi tidak otomatis

memastikan bahwa agenda transisi energi akan dijalankan dengan memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah, wilayah pedesaan, atau kelompok adat. Relasi kuasa yang tidak seimbang tetap bertahan di balik wajah regulasi modern yang tampak rapi, dan hal ini jarang muncul dalam indikator resmi yang menekankan stabilitas iklim investasi serta kepastian hukum.

Studi wacana politik tentang transisi energi di Ontario menunjukkan bagaimana pemimpin politik di negara berpenghasilan tinggi menggunakan kata ganti "kita" untuk membangun kesan kebersamaan, sembari menyamarkan perbedaan kepentingan di antara kelompok sosial yang terdampak (Mang-Benza & Hunsberger, 2020). Dalam konteks ini, standar tata kelola tinggi tidak mencegah penggunaan bahasa inklusif yang justru menutupi kontestasi nyata terkait tarif listrik, lokasi proyek, dan distribusi manfaat ekonomi di antara wilayah. Retorika partisipasi publik dan konsultasi sering dikemas sedemikian rupa sehingga warga merasa diikutsertakan, padahal pilihan-pilihan utama sudah dibatasi oleh model finansial dan kontrak yang dinegosiasikan jauh dari ruang publik. Media dan dokumen resmi kemudian mereproduksi bahasa "kita" tersebut, sehingga oposisi atau kritik lokal tampil seolah sebagai deviasi atau hambatan bagi kepentingan bersama. Contoh semacam ini memperlihatkan bahwa kekuatan institusi dan kapasitas administratif yang besar bisa berfungsi sebagai mesin pengemasan wacana, bukan sekadar sarana penegakan regulasi netral.

Pengalaman Inggris dengan reformasi kerangka *regulatory impact assessment* pada sektor energi juga mengilustrasikan ambivalensi negara OECD dalam mengelola bukti dan ketidakpastian. Ketika analisis biaya-manfaat kuantitatif menjadi alat utama untuk menilai alternatif kebijakan, berbagai dampak distribusional dan risiko jangka panjang yang sulit

dimonetisasi cenderung diperkecil bobotnya atau disembunyikan di bagian lampiran teknis. Literatur terbaru menunjukkan bahwa regulator energi berupaya memperluas kerangka penilaian dengan memasukkan dimensi strategis dan keberlanjutan, tetapi tetap berada dalam horizon rasionalitas ekonomi yang sempit dan fokus pada efisiensi alokasi (Grubb et al., 2025). Dengan demikian, standar tata kelola tinggi memfasilitasi penggunaan metodologi yang canggih, tetapi tidak serta merta menjamin bahwa pertanyaan tentang keadilan antargenerasi, pengaruh terhadap suara minoritas, atau dampak lintas batas akan ditempatkan pada posisi sentral dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, dimensi-dimensi tersebut sering muncul sebagai pertimbangan tambahan yang mudah terpinggirkan ketika tekanan waktu dan kepentingan ekonomi meningkat, terutama menjelang pemilu atau negosiasi anggaran.

Sementara itu, keberhasilan statistik dalam peningkatan pangsa energi terbarukan di negara-negara OECD sering menyembunyikan ketegangan di tingkat lokal. Proyek angin lepas pantai, ladang surya skala utilitas, atau jaringan transmisi baru memerlukan lahan, infrastruktur pendukung, dan perubahan bentang alam yang nyata bagi komunitas yang bersentuhan langsung dengannya. Di sejumlah kasus, komunitas lokal menerima sedikit manfaat ekonomis dibandingkan nilai tambah yang dinikmati pengembang dan pemasok teknologi, sehingga muncul rasa tidak adil yang sulit diakomodasi dalam laporan resmi. Namun, ketika konflik sosial muncul, indikator tata kelola yang baik cenderung "mendaur ulang" ketegangan tersebut sebagai masalah komunikasi atau *not in my backyard*, bukan sebagai gejala ketimpangan struktural dalam desain kebijakan energi dan struktur pasar. Dengan bingkai seperti ini, akar persoalan jarang ditelusuri sampai pada distribusi hak, kewajiban, dan akses terhadap proses pengambilan keputusan,

sehingga pola ketidakadilan cenderung berulang di lokasi dan proyek yang berbeda.

Asumsi efektivitas otomatis juga kerap melupakan fakta bahwa negara-negara OECD merupakan pusat dari perusahaan multinasional dan lembaga keuangan yang mendesain standar global untuk proyek energi. Banyak instrumen regulasi dan mekanisme pasar yang dianggap sukses di Eropa atau Amerika Utara kemudian diekspor sebagai *best practice* ke yurisdiksi lain, sering kali tanpa memperhitungkan perbedaan kapasitas institusi, struktur pasar, dan sejarah sosial. Ketika instrumen tersebut kembali "diimpor" dalam wacana domestik sebagai bukti keberhasilan, terbentuklah sebuah lingkaran umpan balik yang meneguhkan kepercayaan diri berlebihan terhadap model tata kelola sendiri. Dalam lingkaran ini, kegagalan atau kontroversi kebijakan di negara lain dibingkai sebagai masalah implementasi lokal, alih-alih sebagai sinyal bahwa desain instrumen dan konfigurasi kekuasaan di baliknya perlu dipertanyakan secara lebih mendasar. Dengan cara itu, reputasi tata kelola tinggi di negara OECD tetap terjaga, meski bukti tentang keterbatasan model tersebut terus bermunculan di berbagai sektor kebijakan yang terkait dengan energi, iklim, dan penggunaan lahan.

Di sisi lain, banyak negara OECD mengadopsi prinsip *arm's length governance*, yaitu pemisahan formal antara pembuat kebijakan dan pelaksana regulasi, agar keputusan teknis terlindung dari intervensi politik jangka pendek. Secara teori, model ini memungkinkan penilaian kebijakan yang lebih berbasis bukti dan konsisten, karena regulator diberi ruang untuk beroperasi dengan logika profesional. Namun, dalam praktiknya, jarak ini juga dapat mempersulit akuntabilitas demokratis, karena warga tidak mudah mengidentifikasi siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas tarif, subsidi, atau prioritas investasi tertentu dalam sistem energi. Ketika

regulator menjelaskan keputusannya dengan istilah teknis dan model matematis, ruang bagi masyarakat sipil untuk mengajukan kritik substantif menjadi sempit dan mudah disubordinasikan. Akhirnya, mutu tata kelola diukur dari seberapa baik lembaga-lembaga ini mempertahankan kepercayaan pasar dan lembaga pemeringkat, bukan dari kualitas dialog antara negara dan warganya, sehingga demokrasi berjalan di bawah bayang-bayang kalkulus risiko finansial. Di banyak kasus, warga baru menyadari siapa yang berkuasa ketika terjadi krisis tarif atau pemadaman, saat ruang dialog sudah terlambat dibuka secara bermakna.

Dalam perdebatan kebijakan energi di OECD, sering diasumsikan bahwa tujuan-tujuan seperti keamanan pasokan, daya saing industri, dan dekarbonisasi dapat diseimbangkan melalui desain instrumen yang canggih. Namun, dalam kenyataan, ketiga tujuan ini sering saling bertabrakan dengan cara yang sulit diakomodasi oleh kerangka regulasi yang kaku. Upaya melindungi industri intensif energi dapat memperlambat penutupan pembangkit fosil, sementara penekanan pada harga listrik murah bagi konsumen dapat menghambat investasi dalam infrastruktur baru yang lebih bersih, terutama di wilayah terpencil. Meskipun kerangka tata kelola terlihat matang, keputusan konkret tetap diambil melalui negosiasi politik yang dipengaruhi lobi industri, kalkulasi elektoral, dan tekanan media, sehingga jalur kebijakan yang dipilih merefleksikan peta kekuasaan yang ada. Di sini, indikator tata kelola yang rapi menutupi fakta bahwa setiap pilihan mengandung pemenang dan pecundang yang nyata, bukan sekadar perubahan angka di dalam model simulasi, dan dimensi keadilan sering muncul terlambat ketika keputusan sudah dikunci.

Dimensi keadilan sosial seringkali hadir sebagai tambahan belakangan dalam desain kebijakan energi di negara-negara OECD, bukan sebagai prinsip awal yang membentuk visi transisi.

Studi-studi tentang proyek energi lokal menunjukkan bahwa isu gender, kelas, dan etnisitas jarang diintegrasikan secara sistematis dalam penilaian dampak maupun evaluasi keberhasilan (Tsagkari, 2022). Akibatnya, bahkan ketika prosedur konsultasi dilaksanakan dengan benar menurut standar formal, pengalaman kelompok tertentu—terutama perempuan, penduduk asli, dan kelompok minoritas lain—tetap tidak tertangkap dalam indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa standar tata kelola tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan sensitivitas terhadap ketimpangan sosial yang terstruktur. Jika dimensi keadilan hanya ditambahkan sebagai indikator suplementer, bukan sebagai prinsip yang mengarahkan desain sejak awal, maka tata kelola yang tampak kuat di atas kertas dapat terus mereproduksi hierarki sosial lama dalam bentuk baru, termasuk dalam distribusi manfaat dan beban transisi sistem energi. Situasi ini menantang klaim bahwa kualitas institusi secara otomatis menjamin hasil yang adil bagi semua warga.

Kecanggihan metodologis di negara-negara OECD juga sering memperkuat ilusi bahwa ketidakpastian telah "dijinakkan" melalui pemodelan skenario, *stress test* kebijakan, dan analisis sensitivitas. Meski alat-alat ini berguna untuk memahami konsekuensi berbagai pilihan, mereka juga dapat menciptakan rasa aman semu bahwa semua risiko sudah diperhitungkan dan dimonetisasi. Dalam kondisi seperti ini, pengetahuan lokal, intuisi politis warga, dan pengalaman historis komunitas yang pernah dirugikan oleh proyek infrastruktur besar diposisikan sebagai sumber gangguan, bukan sebagai masukan penting untuk menilai kelayakan sosial dari suatu kebijakan. Ketika model menjadi pusat dalam proses pengambilan keputusan, konflik di lapangan mudah dibaca sebagai "deviasi" dari jalur yang sudah dioptimalkan, sehingga meneguhkan keyakinan bahwa permasalahan utama adalah

komunikasi atau resistensi emosional, bukan desain kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, kekuatan institusi berpadu dengan kekuatan model, membentuk rezim kebenaran teknokratis yang sulit digugat dan jarang membuka ruang untuk mempertimbangkan ulang nilai-nilai yang digunakan dalam pemodelan.

Penilaian keberhasilan ekspansi energi terbarukan dan kebijakan energi di negara-negara OECD sering dilakukan pada tingkat agregat nasional atau regional, dengan menggunakan indikator emisi, intensitas energi, atau bauran energi sebagai tolok ukur utama. Pendekatan ini bermanfaat untuk perbandingan lintas negara dan penyusunan target jangka panjang, tetapi sekaligus menghapus variasi lokal yang penting bagi pemahaman keadilan. Misalnya, sebuah negara dapat menunjukkan penurunan emisi yang signifikan, sementara kantong-kantong komunitas berpenghasilan rendah justru mengalami kenaikan biaya hidup akibat tarif listrik atau perubahan pajak karbon. Secara politis, pemerintah dapat mengklaim keberhasilan transformasi, tetapi secara sosial, kelompok-kelompok tertentu merasa menanggung beban yang tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi mereka. Ketimpangan semacam ini jarang muncul dalam laporan resmi, karena indikator lebih fokus pada kinerja sistem ketimbang pengalaman warga, dan cerita rakyat yang mengalami kesulitan kerap tidak memiliki saluran yang kuat untuk terdengar di tingkat nasional, baik melalui media maupun forum kebijakan formal.

Paradoks "governance terlalu kuat" muncul ketika kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, dan kapasitas teknokratik yang tinggi justru mengurangi ruang untuk eksperimen demokratis dan inovasi sosial. Di beberapa negara OECD, aturan yang ketat dan standar teknis yang rinci mempersulit inisiatif warga atau pemerintah kota untuk mencoba model kepemilikan baru, tarif yang lebih progresif,

atau bentuk partisipasi yang lebih langsung dalam pengelolaan infrastruktur energi. Ketika setiap inovasi harus melewati filter kepatuhan yang kompleks, hanya aktor dengan sumber daya besar yang mampu mengajukan dan mempertahankan proposal mereka di hadapan regulator. Akibatnya, struktur kekuasaan yang ada cenderung direplikasi, dan potensi transformasi yang muncul dari bawah menjadi terbatas atau terkooptasi ke dalam skema yang sudah mapan. Di sini, kualitas institusi tinggi berhimpitan dengan bentuk konservatisme struktural yang halus, yang jarang diperiksa dalam evaluasi resmi, meskipun dampaknya terasa jelas bagi kelompok yang berupaya mengajukan alternatif. Hal ini menciptakan kesenjangan antara retorika dukungan terhadap inovasi dan kenyataan struktural yang menghambat percobaan alternatif.

Bagi analisis filsafat kekuasaan, pengalaman negara-negara OECD menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana tata kelola formal yang kuat dapat hidup berdampingan dengan ketidakadilan substantif. Alih-alih melihat kelemahan institusi sebagai satu-satunya masalah, kita perlu mengakui bahwa masalah juga bisa muncul dari institusi yang sangat mapan dan sulit dipertanyakan, karena mereka terlindungi oleh reputasi historis. Dalam konteks ini, kritik tidak cukup diarahkan pada pelanggaran aturan, tetapi juga pada cara aturan itu sendiri dibentuk, dimaknai, dan dipertahankan melalui jaringan ahli, lembaga internasional, dan praktik audit yang berulang. Pertanyaan utama bukan lagi sekadar apakah kebijakan sudah "efektif" menurut indikator, melainkan efektivitas bagi siapa, dengan konsekuensi apa, dan dengan ruang deliberasi politik seluas apa bagi warga yang terdampak. Pendekatan seperti ini membuka kemungkinan untuk menilai kembali hubungan antara mutu tata kelola, demokrasi, dan keadilan dalam kebijakan energi dan iklim, sekaligus menghindari jebakan glorifikasi OECD sebagai model universal.

Dengan demikian, asumsi bahwa standar tata kelola tinggi di negara-negara OECD otomatis menjamin keberhasilan pembangunan berkelanjutan perlu dihadapkan pada pembacaan yang lebih kritis dan historis. Indikator dan indeks dapat membantu memotret sebagian realitas, tetapi tidak dapat menggantikan analisis mendalam tentang relasi kuasa, konflik distribusional, dan suara kelompok yang termarjinalkan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk membangun tata kelola yang benar-benar mendukung transisi adil, kita perlu melampaui fetisisme angka dan membuka ruang bagi bentuk-bentuk pengetahuan lain, termasuk pengalaman komunitas, pengetahuan adat, dan intuisi politis warga yang selama ini diremehkan. Pertanyaan tentang siapa yang mendefinisikan keberhasilan, dengan indikator seperti apa, perlu dibawa ke ruang politik terbuka, bukan dibiarkan menjadi urusan eksklusif para ahli. Hanya dengan cara ini, kualitas institusi tidak lagi dilihat sebagai jaminan abstrak, melainkan sebagai kapasitas konkret untuk mendengar, merespons, dan mengubah struktur yang melanggengkan ketidakadilan dalam kebijakan energi di tingkat nasional maupun global, terutama ketika tekanan krisis iklim semakin mendesak dan tuntutan keadilan semakin menguat.

13.2 Over-Governance: Kompleksitas Regulasi dan Risiko Kebuntuan Kebijakan

Di banyak negara OECD, istilah *over-governance* seringkali tidak disebut secara eksplisit, tetapi gejalanya terasa jelas dalam kebijakan energi dan iklim. Negara dengan reputasi tata kelola tinggi cenderung menambah aturan, prosedur, dan standar baru setiap kali muncul krisis atau kritik, seolah masalah dapat diselesaikan hanya dengan menambah lapisan regulasi. Di atas kertas, arsitektur regulasi itu tampak impresif: ada undang-undang induk, peraturan pemerintah, pedoman teknis, panduan

implementasi, standar pelaporan, hingga protokol audit. Namun di tingkat praktik, kombinasi ini menghasilkan lanskap institusional yang sulit dibaca, bahkan oleh pejabat teknis yang sehari-hari bekerja di sektor energi. Filsafat kekuasaan yang tersembunyi di balik *over-governance* adalah keyakinan bahwa kepastian dan kendali dapat dicapai dengan mengikat semua aktor melalui aturan yang makin rapat, tanpa mengakui bahwa aturan juga dapat menjadi sumber ketidakpastian baru.

Untuk memahami *over-governance*, kita perlu membedakannya dari sekadar "banyak regulasi". *Over-governance* merujuk pada situasi ketika kepadatan aturan, lembaga, dan prosedur melampaui kapasitas aktor untuk memahaminya, mengkoordinasikannya, dan mematuhinya secara konsisten. Dalam kondisi ini, setiap kebijakan baru cenderung ditambal di atas kebijakan lama, bukan menggantikannya. Hasilnya adalah tumpukan kewajiban yang sering saling tumpang tindih, bertentangan, atau menimbulkan beban administrasi yang tidak proporsional. Di negara-negara OECD yang menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas, dorongan untuk "mendokumentasikan segalanya" lewat *guidelines*, *reporting templates*, dan mekanisme audit dapat berubah menjadi beban birokratis. Bagi aktor yang sedang mendorong transformasi sistem energi, *over-governance* bukan hanya masalah teknis, tetapi juga bentuk kekuasaan yang mengatur ritme dan ruang gerak perubahan.

Dalam konteks energi terbarukan, *over-governance* tampak ketika satu proyek harus melewati rantai persetujuan yang panjang: izin lingkungan, izin jaringan, uji kelayakan teknis, konsultasi publik berulang, penilaian dampak sosial, hingga evaluasi kesesuaian dengan strategi iklim nasional dan regional. Setiap prosedur memiliki logika sendiri dan dilakukan oleh lembaga yang berbeda, sering kali dengan kalender dan indikator kinerja yang tidak selaras. Di atas itu semua, ada

lapisan kebijakan supranasional seperti aturan Uni Eropa yang menuntut pemenuhan target dan pelaporan berkala. Dalam situasi seperti ini, pengembang kecil dan komunitas lokal yang ingin membangun pembangkit energi terbarukan kerap terhenti di tengah jalan, bukan karena proyek mereka buruk, tetapi karena navigasi atas labirin aturan menuntut sumber daya hukum, teknis, dan waktu yang tidak mereka miliki.

Kompleksitas regulasi bukan hanya masalah OECD; ia juga muncul di kawasan lain ketika negara mengadopsi serangkaian instrumen kebijakan tanpa benar-benar membangun kapasitas institusional untuk mengelolanya. Studi tentang transisi energi di ASEAN menunjukkan bagaimana praktik regulasi yang "disalin" dari sektor fosil ke sektor *renewable* justru menghasilkan kebuntuan dan ketidakpastian bagi investor, sementara kapasitas kelembagaan untuk merancang dan mengimplementasikan reformasi tetap terbatas (Vakulchuk et al., 2023). Pelajaran dari kawasan ini relevan bagi OECD: semakin banyak instrumen yang diadopsi—dari *feed-in tariff* hingga lelang dan skema sertifikat—semakin besar kebutuhan untuk menyederhanakan koordinasi antar-lembaga. Jika tidak, kepadatan regulasi hanya akan memperumit, bukan mempercepat, transformasi sistem energi.

Over-governance dalam kebijakan energi dapat dibaca sebagai bentuk *risk management* ekstrem. Ketika pemerintah takut disalahkan atas kegagalan proyek, skandal korupsi, atau penolakan publik, respons yang paling mudah adalah menambahkan prosedur: satu komite baru, satu studi kelayakan tambahan, atau satu lapis konsultasi lagi. Dalam jangka pendek, ini memberi kesan kehati-hatian dan pengawasan ketat. Namun dalam jangka panjang, praktik tersebut menghasilkan *policy gridlock*, yakni kebuntuan kebijakan ketika hampir semua aktor merasa terikat oleh aturan yang saling silang dan tidak ada yang berani mengambil keputusan yang benar-benar transformatif.

Di titik ini, tata kelola yang "terlalu kuat" di atas kertas justru melumpuhkan ruang eksperimentasi dan pembelajaran yang dibutuhkan untuk merespons krisis iklim yang bergerak cepat.

Di banyak negara OECD, kebijakan energi berdiri di persimpangan antara kebijakan iklim, kebijakan industri, kebijakan sosial, dan kerangka persaingan usaha. Setiap domain kebijakan memiliki kementerian, regulator, dan badan penasihatnya sendiri, lengkap dengan perangkat hukum dan indikator keberhasilan. Hasilnya adalah mosaik institusi yang berwenang terhadap bagian-bagian berbeda dari rantai pasok energi. Ketika terjadi ketidaksepakatan—misalnya antara regulator persaingan yang mendorong liberalisasi pasar dengan otoritas iklim yang ingin memberi jaminan harga bagi investasi baru—muncul tarik-menarik kewenangan yang memperlambat implementasi. *Over-governance* di sini berarti terlalu banyak titik veto, yaitu titik di mana satu lembaga bisa menghentikan atau menunda kebijakan yang sudah disetujui lembaga lain, tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas.

Dimensi lain dari *over-governance* adalah budaya kepatuhan yang berlebihan terhadap indikator dan peringkat internasional. Negara OECD berlomba memperbaiki skor dalam indeks keberlanjutan, kemudahan berbisnis, atau performa transisi energi. Untuk mengejar skor tersebut, pemerintah sering mengadopsi kerangka penilaian eksternal sebagai aturan internal, lalu menurunkannya menjadi berbagai rencana aksi, *checklist*, dan pedoman rinci. Setiap indikator kemudian memiliki "pemilik" di birokrasi yang bertanggung jawab menjaganya. Dalam praktik, fokus berpindah dari memperbaiki realitas di lapangan menjadi mengelola angka di atas kertas. Di sinilah kekuasaan indikator bekerja: ia mengalihkan energi birokrasi ke arah pelaporan dan pembuktian, bukan perbaikan struktur ketimpangan yang menghambat transformasi energi yang adil.

Kerangka *energy governance* dan *environmental justice* sebenarnya mengingatkan bahwa tata kelola yang baik bukanlah soal banyaknya aturan, tetapi kemampuan aturan untuk menangani konflik, ketimpangan, dan distribusi risiko secara terbuka dan refleksif. Ketika setiap dimensi keadilan direspons dengan instrumen baru—misalnya skema kompensasi, mekanisme partisipasi formal, atau komite pengawas—tanpa menghubungkannya ke desain kelembagaan yang kohesif, hasilnya adalah fragmentasi governance. Kajian tentang integrasi tata kelola energi dan keadilan lingkungan menunjukkan perlunya kerangka analitis yang mampu memetakan interaksi antar dimensi dan mencegah penumpukan instrumen yang hanya menambah kompleksitas (Govindarajan & Ganesh, 2022). Di negara OECD, pelajaran ini penting agar reformasi tidak berhenti pada penambahan prosedur, tetapi menyentuh konfigurasi kekuasaan yang lebih dalam.

Dari sudut pandang pelaku lapangan, terutama komunitas dan pemerintah lokal, *over-governance* dalam pengembangan energi terbarukan terasa sebagai rangkaian "pintu" yang harus dibuka satu per satu dengan kunci berbeda. Setiap pintu dijaga oleh aktor yang memiliki bahasa teknis, preferensi, dan kekhawatiran sendiri: otoritas jaringan khawatir soal stabilitas sistem, regulator lingkungan fokus pada dampak ekologi, pemerintah daerah memikirkan penerimaan publik, dan kementerian keuangan mengawasi risiko fiskal. Ketika tidak ada upaya serius untuk menyelaraskan persyaratan antar pintu, pemohon izin dipaksa menjadi *broker* regulasi yang tidak diakui. Dalam banyak kasus, hanya perusahaan besar dengan sumber daya hukum dan konsultasi yang mampu menempuh jalur ini, sementara inisiatif skala komunitas tertinggal walaupun secara sosial dan ekologis lebih diinginkan.

Salah satu paradoks tata kelola di OECD adalah bagaimana prinsip-prinsip luhur seperti transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi dapat berubah menjadi beban prosedural. Setiap upaya untuk memperbaiki proses—misalnya menambah kewajiban konsultasi publik, memperluas studi dampak, atau memperketat audit—dilakukan tanpa menyederhanakan tata cara yang sudah ada. Akibatnya, proses perizinan untuk proyek energi sering kali berlapis: konsultasi formal dilakukan beberapa kali, studi dampak diulang dengan format berbeda, dan laporan harus disusun untuk lembaga yang masing-masing punya format sendiri. Dari kacamata filsafat kekuasaan, ini menunjukkan bagaimana legitimasi dibangun melalui ritual prosedural yang panjang, meskipun tidak selalu menghasilkan keputusan yang lebih adil atau lebih cepat.

Dalam kerangka ini, konsep *over-governance* juga terkait erat dengan politik penghindaran tanggung jawab (*blame avoidance*). Di lingkungan OECD yang penuh sorotan media dan audit independen, pejabat publik sering lebih takut disalahkan karena bertindak terlalu berani daripada dikritik karena lamban. Menambahkan aturan baru, membentuk komite, atau memerintahkan studi lanjutan adalah cara aman untuk menunjukkan bahwa negara "melakukan sesuatu" sambil menunda keputusan substantif. Ketika proyek energi terhenti, pejabat dapat menunjuk pada kompleksitas proses dan mengatakan bahwa "semua prosedur telah diikuti". Dengan cara ini, regulasi dan prosedur bukan hanya alat koordinasi, tetapi juga perisai politik yang memecah dan mengaburkan garis tanggung jawab.

Kecenderungan ini tampak jelas ketika kita melihat tumpang tindih antara kerangka kebijakan energi dan kerangka kebijakan lain seperti kehutanan, tata ruang, atau perlindungan keanekaragaman hayati. Di banyak negara OECD, proyek energi skala besar harus memenuhi standar yang dikeluarkan oleh beberapa sektor sekaligus. Setiap sektor menuntut agar prinsipnya tidak dikompromikan: sektor lingkungan

menekankan perlindungan habitat, sektor energi menuntut kepastian pasokan, sektor industri mengejar daya saing, sementara sektor keuangan publik menjaga disiplin anggaran. Tanpa mekanisme pengambilan keputusan lintas sektor yang kuat, semua tuntutan ini diterjemahkan menjadi daftar persyaratan yang semakin panjang, menghasilkan *over-governance* yang terlihat "kokoh" tetapi rapuh ketika berhadapan dengan kebutuhan transformasi cepat.

Dari sisi filosofis, *over-governance* dalam kebijakan energi bukan hanya persoalan administratif, tetapi strategi kuasa yang mengatur siapa yang boleh berbicara, kapan, dan dalam bahasa apa. Aturan-aturan yang rumit, formulir yang sarat istilah teknis, dan prosedur partisipasi yang kaku adalah cara untuk mempertahankan dominasi epistemik para ahli dan konsultan. Warga biasa, terutama kelompok rentan, sering kali tidak punya waktu, sumber daya, atau literasi hukum untuk menavigasi struktur ini. Akibatnya, demokrasi energi di negara OECD mudah terjebak dalam bentuk partisipasi simbolik, di mana warga "didengar" tetapi tidak benar-benar mempengaruhi desain kebijakan. *Over-governance* dengan demikian menjaga stabilitas hirarki pengetahuan dan kekuasaan, bahkan ketika narasi resmi berbicara tentang transisi yang inklusif.

Penelitian tentang perkembangan pembangkit angin di wilayah pedesaan Amerika Serikat menunjukkan bagaimana ketidakimbangan kapasitas antara pemerintah lokal yang kekurangan sumber daya dan pengembang besar dapat memperkuat hubungan negosiasi yang timpang (Elmallah et al., 2025). Dalam konteks seperti ini, *over-governance* di level nasional—dengan aturan yang rumit namun tanpa dukungan kapasitas—membuat otoritas lokal semakin bergantung pada informasi dan rancangan kontrak yang disodorkan perusahaan. Situasi serupa dapat terjadi di negara OECD lain: regulasi tampak sangat ketat, tetapi aktor yang sesungguhnya tidak

mampu memahaminya harus menyerahkan tafsir kepada pihak yang paling kuat secara ekonomi. Di titik ini, kepadatan aturan tidak lagi menjamin perlindungan publik, melainkan membuka ruang baru bagi negosiasi yang tidak seimbang.

Jika tujuan utama transisi energi adalah memperluas peran energi terbarukan sekaligus mengurangi ketimpangan, maka arsitektur regulasi di negara OECD perlu dipikir ulang secara radikal. Bukan berarti menghapus standar lingkungan atau melonggarkan pengawasan, tetapi menggeser fokus dari memperbanyak aturan ke merombak struktur koordinasi. Salah satu pendekatan adalah menyatukan berbagai skema dukungan ke dalam kerangka kebijakan yang lebih sederhana dan dapat dipahami oleh pelaku kecil, dengan jalur khusus untuk proyek komunitas. Pendekatan lain adalah membangun lembaga perantara yang bertugas menerjemahkan kompleksitas regulasi ke dalam panduan praktis bagi aktor lokal, sehingga beban interpretasi tidak sepenuhnya jatuh kepada mereka yang justru paling lemah secara institusional.

Prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, subsidiaritas, dan refleksivitas dapat menjadi pijakan untuk merancang ulang tata kelola tanpa jatuh pada *over-governance*. Proporsionalitas berarti beban regulasi harus sebanding dengan skala dan risiko proyek; proyek kecil tidak seharusnya menghadapi prosedur yang sama panjang dengan proyek raksasa. Subsidiaritas berarti keputusan diambil sedekat mungkin dengan warga yang terdampak, tetapi tetap didukung oleh kerangka nasional yang jelas. Refleksivitas berarti regulasi dirancang sebagai aturan yang terbuka untuk dipelajari dan diperbaiki, bukan sebagai teks suci yang hanya bisa ditambah, bukan dikurangi. Dalam bahasa sederhana, regulasi harus cukup kuat untuk melindungi, cukup lentur untuk berubah, dan cukup jelas untuk dipahami.

Secara praktis, ini berarti negara OECD perlu mengembangkan mekanisme *regulatory review* yang bukan

sekadar formalitas. Misalnya, setiap penambahan instrumen baru—lelang, insentif pajak, atau standar teknis—diikuti kewajiban untuk menghapus atau menyederhanakan aturan lama yang sudah tidak relevan. *Sunset clauses* (batas waktu berlaku regulasi) dapat mencegah penumpukan aturan, dengan syarat ada proses evaluasi substantif sebelum perpanjangan. Demikian pula, *one-stop shop* perizinan hanya akan bekerja jika benar-benar menyatukan persyaratan lintas lembaga, bukan sekadar menjadi etalase digital dari labirin yang sama. Tanpa langkah-langkah ini, klaim reformasi tata kelola mudah berubah menjadi sekadar penggantian istilah, sementara struktur *over-governance* tetap bertahan.

Pada akhirnya, paradoks tata kelola di negara OECD mengajarkan bahwa kualitas institusi tidak bisa hanya diukur dari banyaknya regulasi, ketatnya prosedur, atau kecanggihan indeks yang digunakan. *Governance terlalu kuat*—dalam arti terlalu padat, terlalu terfragmentasi, dan terlalu defensif—dapat membuat kebijakan energi kehilangan daya transformasinya. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang berani mengurangi, menyederhanakan, dan mengakui bahwa ketidakpastian tidak bisa dihapus sepenuhnya oleh aturan. Sebaliknya, ketidakpastian harus dikelola melalui dialog yang jujur, mekanisme pembelajaran, dan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang. Di sinilah proyek filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan menemukan tugasnya: membantu kita membedakan antara tata kelola yang melindungi kehidupan dan tata kelola yang hanya melindungi dirinya sendiri.

13.3 Peran Lembaga Independen, Regulator Energi, dan Pengadilan

Dalam konteks negara-negara OECD, lembaga independen, regulator energi, dan pengadilan sering dipresentasikan sebagai trio institusi yang menjamin rasionalitas dan kepastian

kebijakan. Namun, di balik citra teknokratis itu, tersimpan pertanyaan mendasar tentang pergeseran kekuasaan: siapa yang berhak mendefinisikan risiko, manfaat, dan kecepatan perubahan dalam sistem energi? Regulator energi dibentuk untuk "menjauhkan" keputusan tarif dan investasi dari siklus politik jangka pendek, sementara pengadilan diposisikan sebagai penjaga konstitusi, hak warga, dan kepastian hukum. Di atas kertas, kombinasi ini tampak ideal: pemerintah menetapkan tujuan, regulator merumuskan aturan teknis, dan pengadilan mengawasi. Tetapi dalam praktik, struktur ini dapat menggeser arena perdebatan publik dari ruang politik terbuka ke meja regulator dan ruang sidang, yang diakses terutama oleh aktor yang memiliki kapasitas hukum, data, dan sumber daya advokasi yang besar.

Evolusi lembaga regulasi independen di banyak negara OECD berkaitan erat dengan liberalisasi sektor listrik dan gas pada dekade 1990-an dan 2000-an. Narasi yang menyertainya adalah bahwa pasar akan bekerja lebih efisien bila harga dan investasi diatur oleh badan yang "netral", profesional, dan berorientasi bukti, bukan oleh kementerian yang rentan intervensi politik. Namun, klaim netralitas itu sendiri bersifat politis. Ketika regulator diberi mandat untuk memprioritaskan efisiensi ekonomi dan stabilitas tarif, hal itu sering berarti mengendurkan fokus pada pemerataan, hak kelompok rentan, atau dampak ekologis jangka panjang. Di sini, pengadilan menjadi arena banding: kelompok masyarakat atau pemerintah lokal dapat menggugat keputusan regulator, tetapi harus bermain dengan bahasa hukum dan standar pembuktian yang tidak selalu ramah bagi warga biasa. Dengan demikian, arsitektur institusional yang tampak teknis ini secara halus menyaring siapa yang efektif bersuara.

Peran lembaga independen menjadi kian krusial ketika agenda dekarbonisasi menuntut percepatan investasi dan

interkoneksi infrastruktur *energi terbarukan*. Regulasi akses jaringan, standar interoperabilitas teknologi, dan desain tarif untuk produsen skala kecil sangat bergantung pada tafsir regulator atas mandat hukumnya. Di banyak negara OECD, regulator harus menyeimbangkan antara melindungi konsumen dari lonjakan harga, memastikan kelayakan finansial utilitas, dan menciptakan ruang bagi produsen baru yang lebih kecil dan terdesentralisasi. Dalam kondisi seperti itu, keputusan "teknis" tentang syarat interkoneksi atau struktur biaya dapat menentukan apakah kooperasi energi lokal, pemerintah daerah, atau rumah tangga mampu berpartisipasi dalam transisi, atau justru tersingkir oleh pemain besar. Pengadilan masuk ketika kelompok tertentu merasa dirugikan, tetapi prosesnya lama dan mahal, sehingga ketimpangan daya tawar sering berlanjut.

Penelitian tentang desentralisasi kelistrikan menunjukkan bahwa pergeseran ke sistem yang lebih terdistribusi tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan; sebaliknya, ia memicu pertarungan baru tentang siapa yang mengendalikan aturan main dan informasi. Brisbois menemukan bahwa dalam konteks desentralisasi, lembaga regulasi dan aktor komunitas bernegosiasi ulang skala kewenangan, alokasi risiko, dan akses terhadap sumber daya, sehingga "politik energi" bergeser dari sekadar penetapan harga menuju pertarungan tentang bentuk institusi itu sendiri (Brisbois, 2020). Temuan semacam ini relevan bagi negara OECD yang mengandalkan regulator independen: ketika aturan interkoneksi atau skema tarif ditulis dalam bahasa teknis, sesungguhnya sedang berlangsung proses pendistribusian ulang hak untuk menentukan masa depan sistem energi. Pengadilan dapat menegaskan atau merombak distribusi kekuasaan ini melalui putusan yang menafsirkan wewenang regulator, kewajiban konsultasi publik, atau standar kehati-hatian terhadap risiko iklim.

Regulator energi sering dipahami sebagai "wasit" yang berdiri di tengah antara utilitas, produsen baru, investor, dan konsumen. Namun, dalam praktiknya, regulator adalah ruang perundingan yang padat lobi dan dokumen teknis. Perusahaan besar mampu menghadirkan tim ekonom, insinyur, dan pengacara untuk mengadvokasi desain tarif atau aturan pasar yang menguntungkan mereka. Sementara itu, kelompok konsumen rumah tangga atau organisasi masyarakat sipil datang dengan sumber daya jauh lebih terbatas. Pengadilan menyediakan jalur koreksi, tetapi standar pembuktian dan prosedur litigasi cenderung lebih mudah diakses oleh aktor yang sudah kuat. Dengan demikian, alih-alih mengurangi ketimpangan, kombinasi regulator dan pengadilan kadang memperpanjang keuntungan struktural bagi aktor besar, terutama bila kerangka hukum tidak secara eksplisit mewajibkan partisipasi publik yang bermakna dan dukungan bagi pihak yang rentan.

Dalam banyak kerangka hukum OECD, istilah "kebijakan energi" merangkum berbagai undang-undang dan peraturan yang menetapkan tujuan jangka panjang, seperti netralitas karbon, keamanan pasokan, dan keterjangkauan tarif. Regulator lalu menerjemahkan tujuan makro ini menjadi parameter konkret: bagaimana menghitung biaya yang dapat dibebankan, berapa tingkat pengembalian investasi yang wajar, dan bagaimana menyeimbangkan tarif antara konsumen rumah tangga dan industri. Pengadilan berada pada posisi untuk menilai apakah penerjemahan ini sejalan dengan mandat demokratis yang lebih luas, misalnya ketika asosiasi konsumen menggugat keputusan kenaikan tarif atau menuduh regulator mengabaikan dampak sosial dari penutupan pembangkit tertentu. Di sini tampak bahwa "teknis" dan "politis" bukanlah dua ranah terpisah; tafsir atas mandat kebijakan energi di tingkat regulator dan pengadilan menjadi arena kunci di mana nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan lingkungan diuji.

Pengadilan juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana hak warga dan komunitas lokal harus dipertimbangkan dalam pembangunan infrastruktur energi skala besar. Di sejumlah negara OECD, gugatan terhadap proyek jaringan transmisi, terminal gas, atau pembangkit baru diajukan atas dasar pelanggaran prosedur konsultasi, dampak lingkungan, atau pelanggaran hak atas kesehatan dan ruang hidup. Putusan pengadilan yang memperketat standar konsultasi dan penilaian dampak dapat memaksa regulator untuk mengubah prosedur perizinan dan menimbang ulang penilaian risiko. Namun, pengadilan juga dapat menguatkan prioritas ekonomi makro dengan menolak gugatan atas nama "kepentingan publik" nasional. Dengan demikian, pengadilan menjadi medan di mana batas antara hak individu-komunitas dan kalkulasi sistemik ditarik dan digeser, sering kali dengan konsekuensi jangka panjang bagi arah transisi energi.

Dalam kerangka multi-level governance, regulator energi nasional di negara OECD tidak bekerja dalam ruang hampa. Mereka berinteraksi dengan rekomendasi OECD, aturan pasar energi regional, dan standar keuangan internasional yang mengatur investasi infrastruktur. Tekanan untuk menyelaraskan regulasi dengan praktik "terbaik" internasional dapat memperkuat kapasitas teknis, tetapi sekaligus mempersempit ruang bagi eksperimen lokal atau solusi yang lebih peka terhadap konteks sosial. Pengadilan, pada sisi lain, dapat menjadi saluran untuk menantang penerapan standar internasional yang dianggap mengabaikan kondisi lokal, misalnya ketika aturan penyesuaian tarif otomatis menekan kelompok berpendapatan rendah. Pertemuan antara rujukan global, regulator nasional, dan yurisprudensi pengadilan menciptakan mosaik aturan yang rumit, di mana kemampuan aktor lokal untuk menavigasi dan mempengaruhinya bergantung pada akses pengetahuan dan dukungan hukum.

Agenda percepatan *energi terbarukan* di negara OECD menonjolkan peran regulator dan pengadilan dalam mengelola konflik ruang, lanskap, dan distribusi manfaat. Perizinan ladang angin lepas pantai, pembangkit surya skala utilitas, atau proyek biomassa sering dipersoalkan karena dampak pada pemandangan, biodiversitas, dan mata pencaharian lokal. Regulasi tentang konsultasi publik, kompensasi, dan pembagian manfaat ditulis oleh regulator dan dapat ditafsirkan secara sempit sebagai prosedur formal belaka, atau diperluas menjadi mekanisme untuk memperkuat posisi tawar komunitas. Ketika konflik memuncak, pengadilan menjadi arbitrer yang menentukan apakah keberatan warga dianggap sah dan sejauh mana proyek harus diubah atau dibatalkan. Hasil perkara ini tidak hanya mempengaruhi satu proyek, tetapi juga membentuk ekspektasi investor serta reputasi keadilan transisi energi di mata publik.

Penelitian tentang "periferalisasi energi" menunjukkan bahwa transisi ke sistem rendah karbon dapat memperdalam marginalisasi wilayah pedesaan atau terpencil bila institusi gagal menangani ketimpangan struktural. Studi di Wales, misalnya, menggambarkan bagaimana komunitas pedesaan tetap terperangkap dalam posisi perifer meskipun dikelilingi proyek energi rendah karbon, karena mereka menanggung dampak lanskap dan sosial tanpa memperoleh manfaat yang setara (O'Sullivan et al., 2020). Dalam konteks OECD, temuan ini mengingatkan bahwa regulator dan pengadilan tidak boleh sekadar menilai proyek berdasarkan kriteria efisiensi dan kelayakan finansial. Mereka juga memerlukan perspektif keadilan spasial dan sosial ketika menilai klaim kompensasi, hak veto lokal, atau desain skema bagi hasil. Jika tidak, institusi yang dimaksudkan untuk menjamin keadilan prosedural justru berkontribusi pada reproduksi ketidakadilan substantif.

Lembaga independen dan pengadilan sering dipuji sebagai mekanisme "checks and balances" yang menjaga agar keputusan energi tidak dikooptasi oleh kepentingan politik jangka pendek. Namun, perlu diperhatikan siapa yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menggunakan mekanisme itu. Proses konsultasi regulator yang mengandalkan dokumen tertulis dan dengar pendapat formal memberi keuntungan bagi asosiasi industri yang terbiasa dengan bahasa teknis dan memiliki sumber daya untuk mengikuti setiap tahapan. Demikian pula, litigasi di pengadilan menuntut akses ke penasihat hukum dan keahlian *expert witness* yang tidak murah. Tanpa dukungan kelembagaan bagi kelompok warga, serikat pekerja, atau komunitas rentan, struktur checks and balances ini bisa menjadi kanal yang "terbuka di atas kertas" tetapi tertutup secara de facto bagi banyak pihak yang terdampak kuat oleh keputusan energi.

Dalam kerangka hukum modern, banyak negara OECD menuntut agar setiap keputusan strategis dalam *kebijakan energi* disertai justifikasi tertulis, analisis biaya-manfaat, dan kajian dampak sosial-lingkungan. Secara normatif, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas regulator. Namun, jenis bukti yang dianggap sah dan cara angka-angka itu dirumuskan tetap merupakan pertarungan politis. Benarkah biaya sosial jangka panjang dari perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati dihitung setara dengan kenaikan tarif jangka pendek? Pengadilan dapat menilai apakah lembaga regulasi telah melampaui atau mengabaikan mandat hukumnya ketika mengonsolidasikan bukti, tetapi pengujian ini tetap terbatas pada kerangka argumen yang dibenarkan oleh hukum positif. Pertanyaan moral yang lebih dalam tentang tanggung jawab lintas generasi dan keadilan global kerap tetap berada di luar bingkai yuridis formal.

Peran regulator energi juga bersinggungan dengan lembaga independen lain seperti otoritas persaingan usaha dan pengawas perlindungan konsumen. Di negara OECD, lembaga-lembaga ini dapat menguji apakah desain pasar listrik dan gas yang disetujui regulator menghasilkan konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan atau praktik tarif yang tidak adil. Pengadilan kemudian menilai sengketa antar-lembaga ketika interpretasi mandat saling bertabrakan, misalnya antara tujuan keamanan pasokan dan perlindungan konsumen jangka pendek. Interaksi ini penting untuk memahami bahwa "lembaga independen" bukan hanya satu aktor tunggal, tetapi ekosistem institusi yang membawa logika rasionalitas berbeda: stabilitas sistem, persaingan, keberlanjutan fiskal, dan perlindungan konsumen. Cara logika-logika itu diprioritaskan dalam putusan bersama menentukan bentuk konkret tata kelola energi di lapangan.

Kekhawatiran mengenai *regulatory capture* muncul ketika regulator terlalu dekat dengan industri yang mereka awasi, sehingga kepentingan publik terpinggirkan. Dalam sektor energi, risiko ini tinggi karena kompleksitas teknis membuat regulator sangat bergantung pada data dan pemodelan yang disediakan perusahaan besar. Pengadilan dapat menjadi benteng terakhir apabila bukti capture cukup kuat untuk dibawa ke ranah hukum, tetapi pembuktian niat dan pengaruh terselubung sangat sulit dilakukan. Selain itu, bentuk "penangkapan epistemik" terjadi ketika hanya satu jenis pengetahuan – biasanya ekonomi arus utama – yang diakui sebagai dasar sah untuk pengambilan keputusan, sementara pengetahuan lokal, ekologis, dan sosial dianggap sekunder. Di negara OECD dengan tradisi hukum kuat, ketidakseimbangan jenis pengetahuan ini bisa dilembagakan dalam preseden pengadilan, sehingga mempersulit upaya untuk memasukkan perspektif alternatif ke dalam diskursus resmi.

Jika transisi menuju *energi terbarukan* dipahami sebagai perubahan sosio-teknis yang dalam, maka peran lembaga independen dan pengadilan tidak bisa dibatasi pada menjaga stabilitas pasar dan kepastian kontrak. Mereka juga berfungsi sebagai penentu ritme perubahan: seberapa cepat pembangkit fosil dihentikan, seberapa luas ruang bagi eksperimen komunitas, dan sejauh mana risiko finansial peralihan dibagi antara negara, perusahaan, dan warga. Dalam beberapa kasus, regulator memilih pendekatan sangat hati-hati agar tidak mengguncang pasar, yang secara de facto memperlambat dekarbonisasi. Di sisi lain, putusan pengadilan yang mengakui tanggung jawab negara atau perusahaan atas kerusakan iklim dapat memberi tekanan kuat untuk mempercepat perubahan aturan. Kontestasi ini menunjukkan bahwa desain dan praktik lembaga tersebut adalah bagian dari medan perjuangan politik, bukan sekadar prasyarat teknis transisi.

Untuk memperkuat dimensi keadilan, beberapa negara OECD mulai menata ulang prosedur kerja regulator dan pengadilan agar lebih ramah partisipasi publik. Ini mencakup penyediaan ringkasan regulasi dalam bahasa nonteknis, pendanaan bagi organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi, dan mekanisme *amicus curiae* yang memungkinkan kelompok kepentingan umum menyampaikan pandangan di pengadilan tanpa harus menjadi pihak perkara utama. Pendekatan ini mencoba menjembatani kesenjangan antara kerangka hak formal dan kemampuan aktual masyarakat untuk menggunakan hak tersebut. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi sehari-hari dan komitmen politis untuk menerima bahwa proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih lambat dan lebih berisik, karena lebih banyak suara dilibatkan dalam mendefinisikan arah sistem energi.

Perspektif filosofis tentang kekuasaan mengingatkan bahwa institusi yang tampak netral justru sering menjadi lokasi utama di mana relasi dominasi direproduksi atau digugat. Dalam sektor energi di negara OECD, lembaga independen dan pengadilan dapat memperkuat dominasi model pembangunan berorientasi pertumbuhan tinggi dan konsumsi energi besar, apabila kerangka hukum hanya mengakui argumen efisiensi dan stabilitas makroekonomi. Sebaliknya, institusi yang sama dapat menjadi wahana transformasi bila mereka membuka diri terhadap penafsiran konstitusional yang menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis sebagai prinsip dasar. Pertanyaan kuncinya bukan apakah lembaga tersebut "independen" dari politik, tetapi nilai politik apa yang mereka bawa dan bagaimana nilai itu diwujudkan melalui standar pembuktian, prosedur partisipasi, dan alasan-alasan resmi yang dikemukakan dalam setiap keputusan.

Dengan demikian, dalam konteks negara OECD, peran lembaga independen, regulator energi, dan pengadilan harus dibaca sebagai bagian integral dari desain kekuasaan dalam *kebijakan energi*, bukan hanya sebagai pelengkap teknokratis. Mereka menentukan apa yang dianggap sebagai bukti sah, siapa yang boleh berbicara, dan sejauh mana konflik antara kepentingan iklim global, kesejahteraan nasional, serta hak komunitas lokal dapat dinegosiasikan secara adil. Jika mandat, prosedur, dan budaya institusional mereka tidak ditata secara reflektif, maka standar tata kelola yang tinggi justru dapat menyamarkan ketidakadilan yang berlangsung rapi di balik bahasa hukum dan angka. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat lembaga-lembaga tersebut bukan sebagai latar belakang yang netral, melainkan sebagai aktor utama dalam drama politik energi berkelanjutan, yang pilihannya akan menentukan arah dan kualitas perubahan selama beberapa dekade ke depan.

13.4 Paradoks Kebijakan: Keberlanjutan, Kompetitivitas, dan Tekanan Politik Domestik

Di banyak negara OECD, tata kelola dipuji karena "maju": regulasi ketat, lembaga independen, dan prosedur yang tampak transparan. Namun ketika isu keberlanjutan bertemu kompetitivitas ekonomi dan tekanan politik domestik, muncul paradoks yang jauh lebih rumit. Pemerintah dituntut menjaga harga energi tetap terjangkau, melindungi basis industri, sambil menurunkan emisi secara drastis dalam waktu singkat. Di saat yang sama, pemilih tidak hanya memandang kebijakan iklim sebagai soal teknis, tetapi juga sebagai simbol keadilan sosial, distribusi kesempatan, dan identitas politik. Dalam konteks ini, tata kelola yang "terlalu kuat" bisa dimaknai sebagai konfigurasi institusi yang sangat mampu mengeksekusi, tetapi kurang sensitif terhadap konflik nilai dan dinamika sosial. Bab ini mengurai bagaimana paradoks tersebut tidak hanya bersifat teknokratik, melainkan juga filosofis, karena menyentuh pertanyaan tentang tujuan negara dan batas rasionalitas ekonomi.

Asumsi umum di banyak forum internasional adalah: semakin tinggi kualitas tata kelola, semakin efektif pula kebijakan keberlanjutan. Negara OECD sering dijadikan rujukan karena memiliki kapasitas perencanaan, lembaga pengawas, dan kerangka hukum yang relatif stabil. Namun asumsi linear ini menyembunyikan fakta bahwa kinerja kebijakan keberlanjutan sangat dipengaruhi oleh benturan kepentingan domestik, struktur kelas, dan sejarah kebijakan industri masing-masing negara. Regulasi yang dirancang rapi di atas kertas dapat berhadapan dengan resistensi keras ketika menyentuh tarif listrik, pajak bahan bakar, atau penutupan industri padat emisi di wilayah tertentu. Di titik inilah, "kualitas tata kelola" tidak bisa hanya diukur dari indikator prosedural, tetapi juga dari kapasitas untuk mengelola konflik dan membangun legitimasi di

tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan politik jangka pendek.

Ketika pemerintah OECD mendorong *energi terbarukan* secara agresif, mereka sering menjanjikan dua hasil sekaligus: penurunan emisi dan penguatan daya saing jangka panjang. Retorika ini menggambarkan seolah-olah tidak ada trade-off yang berarti, karena teknologi baru dianggap akan menciptakan lapangan kerja hijau, menurunkan biaya energi, dan membuka pasar ekspor untuk teknologi bersih. Namun pada praktiknya, transformasi ini mengguncang struktur ekonomi eksisting: rantai pasok lama tergantikan, wilayah industri tertentu menurun, dan keterampilan kerja yang sebelumnya dihargai menjadi tidak relevan. Di beberapa negara, pekerja di sektor fosil atau industri intensif energi melihat agenda transisi sebagai ancaman terhadap martabat dan penghidupan mereka, bukan sebagai peluang. Paradoksnya, semakin cepat negara mendorong perubahan struktural, semakin besar pula potensi munculnya perasaan "ditinggalkan" di kelompok tertentu yang kemudian diterjemahkan menjadi resistensi politik yang kuat.

Di level wacana, pemerintah menghadapi dilema antara menekankan urgensi aksi iklim dan mengakui kompleksitas keadilan sosial yang menyertai transisi. Kajian tentang dinamika ketegangan antara urgensi dan keadilan dalam transisi energi menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu menonjolkan narasi "krisis" cenderung mengorbankan ruang deliberasi dan partisipasi, karena setiap keberatan mudah dicap sebagai penghambat perubahan (van Bommel & Höffken, 2023). Bagi pembuat kebijakan di negara OECD, tekanan untuk "bertindak cepat" datang dari komitmen internasional, keputusan pengadilan, dan opini publik yang sensitif terhadap bencana iklim. Namun jika urgensi diterjemahkan menjadi kebijakan top-down yang minim dialog, ia justru membuka peluang bagi politisi populis untuk mengeksploitasi rasa tidak didengar di

kalangan masyarakat. Paradoks kebijakan muncul ketika instrumen yang dimaksudkan mempercepat keberlanjutan malah memicu polarisasi baru.

Tekanan kompetitivitas menambah lapisan paradoks berikutnya. Industri di negara OECD khawatir bahwa regulasi emisi yang ketat akan mendorong relokasi produksi ke negara dengan standar lingkungan yang lebih longgar, fenomena yang sering dirujuk sebagai *carbon leakage*—yakni perpindahan emisi ke yurisdiksi lain tanpa mengurangi emisi global. Untuk merespons hal ini, pemerintah memperkenalkan berbagai mekanisme kompensasi, seperti pembebasan sebagian kewajiban, subsidi investasi, atau skema penyesuaian karbon di perbatasan. Namun langkah-langkah ini kemudian memunculkan pertanyaan baru: sejauh mana kebijakan iklim tetap selaras dengan prinsip persaingan sehat dan keadilan fiskal di dalam negeri. Ketika paket dukungan dirasakan hanya menguntungkan industri besar, sementara bebannya jatuh ke konsumen rumah tangga dan usaha kecil, legitimasi kebijakan justru melemah meskipun rancangan regulasinya tampak konsisten dan canggih.

Di banyak yurisdiksi OECD, *kebijakan energi* dirumuskan melalui kombinasi kementerian teknis, regulator independen, dan lembaga perencana jangka panjang. Arsitektur institusional ini memberikan stabilitas, tetapi sekaligus menciptakan jarak dengan dinamika politik sehari-hari di parlemen dan pemerintah daerah. Keputusan tarif, skema insentif, dan pemilihan teknologi sering diagumentasikan sebagai soal teknis yang "sebaiknya tidak dipolitisasi", padahal dampaknya sangat politis bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pekerja di sektor terancam. Ketika keputusan strategis dipindahkan ke ranah badan-badan teknokratik, tanggung jawab politik menjadi kabur: pemerintah dapat mengklaim bahwa mereka hanya mengikuti "rekomendasi ahli", sementara warga kesulitan

menemukan saluran untuk menyatakan ketidaksetujuan. Dalam konteks ini, tata kelola yang kuat dapat dipersepsikan sebagai "terlalu kuat" karena menutup ruang negosiasi dan koreksi demokratis.

Paradoks "governance terlalu kuat" juga tampak dalam kecenderungan layering regulasi, yaitu penumpukan aturan dan standar baru tanpa evaluasi kritis terhadap tumpukan aturan lama. Negara OECD sering memperkenalkan target, peta jalan, dan instrumen kebijakan baru untuk merespons perkembangan teknologi dan komitmen iklim global, tetapi jarang mencabut atau menyederhanakan yang sudah ada. Akibatnya, aktor-aktor di lapangan—dari utilitas hingga pemerintah daerah—harus menavigasi sistem yang kompleks, kadang saling bertentangan, dan penuh kebutuhan pelaporan. Kompleksitas ini dapat menghambat inovasi dan memperbesar biaya kepatuhan, sehingga memperkuat narasi bahwa agenda keberlanjutan adalah bebannya birokrasi, bukan peluang transformasi. Dalam situasi demikian, kekuatan institusional yang seharusnya menjadi modal bagi keberhasilan transisi justru berubah menjadi labirin regulasi yang melelahkan semua pihak.

Dimensi keadilan tidak bisa dilepaskan dari diskusi ini. Studi tentang keadilan energi menekankan bahwa kebijakan yang hanya berfokus pada indikator teknis—seperti kapasitas terpasang atau penurunan emisi—sering gagal menangkap pengalaman ketidakadilan yang dirasakan komunitas tertentu, baik di Utara maupun Selatan Global (Dong et al., 2023). Di negara OECD, hal ini tampak ketika beban biaya transisi dirasakan lebih berat oleh rumah tangga miskin, penyewa, dan kelompok yang tinggal di kawasan dengan infrastruktur rendah. Sementara itu, keuntungan jangka pendek, seperti subsidi teknologi atau kesempatan investasi, lebih mudah diakses oleh kelompok berpendapatan tinggi atau perusahaan besar. Jika paradoks antara keberlanjutan dan keadilan ini dibiarkan, ia

dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga yang sebenarnya memiliki kapasitas tinggi, dan mendorong tuntutan untuk menghentikan atau memperlambat transisi dengan alasan "melindungi rakyat biasa".

Ketika *energi terbarukan* diintegrasikan ke dalam strategi industri nasional, logika keberlanjutan dan kompetitivitas kerap dirajut dalam narasi tunggal: siapa yang memimpin teknologi hijau hari ini akan memimpin perekonomian besok. Narasi ini mendorong negara OECD berlomba menarik investasi di sektor panel surya, baterai, hidrogen hijau, dan kendaraan listrik. Namun di balik perlombaan tersebut, terdapat distribusi risiko yang tidak merata di antara wilayah dan kelompok sosial. Wilayah yang telah lama bergantung pada industri berat tradisional mungkin mengalami penutupan pabrik tanpa adanya alternatif yang kredibel, sementara kawasan metropolitan menikmati pertumbuhan sektor jasa hijau dan teknologi. Paradoks kebijakan muncul ketika narasi "pemenang masa depan" digunakan untuk membenarkan kebijakan yang secara praktis mengabaikan tanggung jawab terhadap "pecundang transisi" yang kehilangan pekerjaan, identitas ekonomi, dan basis fiskal lokal.

Cara pemerintah OECD menggunakan bukti ilmiah dan pemodelan teknis dalam perumusan kebijakan ikut membentuk paradoks antara keberlanjutan dan tekanan politik. Penelitian tentang *cultures of evidence* menunjukkan bahwa di negara seperti Inggris, Jerman, dan Belanda, komunitas ahli model energi memiliki pengaruh besar dalam mendefinisikan opsi kebijakan yang dianggap masuk akal, sementara bentuk pengetahuan lain—termasuk pengalaman warga dan pemerintah lokal—sering diposisikan sekunder (McDowall, 2024). Di satu sisi, hal ini memperkuat daya saing karena keputusan diharapkan efisien, konsisten, dan terkoordinasi. Di sisi lain, ketika model dan skenario menjadi bahasa utama

kebijakan, ruang bagi imajinasi alternatif yang lebih peka terhadap keadilan sosial dan kebutuhan komunitas menjadi menyempit. Akibatnya, kebijakan yang lahir tampak rasional di atas kertas, namun rentan digugat secara politik karena dianggap mengabaikan realitas keseharian warga.

Tekanan politik domestik juga muncul dari cara media dan aktor politik membingkai dampak kebijakan keberlanjutan terhadap biaya hidup. Kenaikan tarif listrik, pajak bahan bakar, atau kewajiban retrofit bangunan dapat dengan mudah dijadikan bukti bahwa elite politik lebih peduli pada "planet" daripada "rakyat". Di banyak negara OECD, oposisi terhadap kebijakan iklim sering memanfaatkan contoh kasus ekstrem—seperti tagihan listrik yang melonjak atau tutupnya pabrik tertentu—untuk menggiring opini publik bahwa agenda keberlanjutan adalah ancaman langsung bagi kelas pekerja dan masyarakat pedesaan. Pemerintah yang secara institusional kuat menghadapi kesulitan untuk merespons narasi ini jika mereka terlalu mengandalkan penjelasan teknis dan angka agregat, tanpa menyediakan forum di mana warga dapat memverifikasi, mempertanyakan, dan menegosiasikan konsekuensi konkret dari pilihan kebijakan.

Karena itu, desain *kebijakan energi* di negara OECD sering berjalan di atas garis tipis antara ambisi jangka panjang dan daya terima jangka pendek. Pemerintah mencoba meredam resistensi dengan memberi kompensasi sementara, misalnya bantuan tunai, subsidi tarif, atau pengecualian bagi sektor tertentu. Namun mekanisme kompensasi ini dapat mengaburkan struktur insentif jangka panjang dan mengurangi sinyal harga yang diperlukan agar investasi hijau benar-benar terjadi. Selain itu, penargetan kompensasi yang tidak adil atau birokratis dapat memunculkan rasa iri dan ketidakpercayaan di antara kelompok masyarakat. Paradoksnya, semakin banyak lapisan kompensasi dan pengecualian yang dirancang demi

menjaga stabilitas politik, semakin kompleks dan tidak transparan sistem kebijakan itu sendiri, sehingga membuka ruang baru bagi kritik bahwa negara telah kehilangan arah strategisnya.

Dimensi lain dari paradoks kebijakan di negara OECD adalah risiko terciptanya *lock-in* hijau, yakni situasi ketika konfigurasi teknologi dan kelembagaan baru yang dianggap "hijau" justru membatasi ruang untuk perbaikan keadilan di masa depan. Inovasi teknologi yang cepat dapat membantu menurunkan emisi, tetapi jika desain kebijakannya hanya menguntungkan pelaku pasar besar dan mengabaikan kepemilikan komunitas, struktur ketidaksetaraan lama dapat berlanjut dalam bentuk baru (Dong et al., 2023). Ketika standar teknis, skema pembiayaan, dan kepemilikan infrastruktur sudah mengkristal, akan semakin sulit untuk memperkenalkan model alternatif yang lebih demokratis atau berbasis publik. Dengan demikian, strategi yang secara resmi mengusung keberlanjutan dapat secara substansial menghasilkan sistem energi yang tetap hierarkis dan eksklusif, meskipun emisi turun dan indikator efisiensi meningkat.

Upaya membawa kerangka keadilan energi ke dalam praktik kebijakan konkret menunjukkan betapa sulitnya menyelaraskan prinsip normatif dengan realitas institusional di negara maju. Studi tentang penerapan kerangka *three-tenets energy justice*—yaitu keadilan distribusi, prosedur, dan pengakuan—dalam konteks kebijakan di Belanda memperlihatkan bahwa meskipun prinsip-prinsip tersebut diakui di tingkat wacana, implementasinya kerap terbentur rutinitas birokrasi, keterbatasan anggaran, dan fragmentasi mandat antar lembaga (van der Kooij, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola yang tinggi tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang adil. Tanpa penataan ulang tujuan dan indikator evaluasi, lembaga yang beroperasi

secara efisien sekalipun akan cenderung memprioritaskan target yang mudah diukur—seperti kapasitas terpasang atau penurunan emisi per unit PDB—dibandingkan dimensi keadilan yang lebih sulit dioperasionalisasikan dalam angka.

Konflik politik domestik terkait *energi terbarukan* juga sering mengambil bentuk "perang budaya", terutama ketika kebijakan menyentuh simbol kehidupan sehari-hari seperti pemanas rumah, kendaraan pribadi, atau pola konsumsi. Di beberapa negara OECD, rencana pelarangan penjualan mobil bermesin pembakaran internal, kewajiban memasang pompa panas, atau penggantian kompor gas memicu narasi bahwa negara tengah memaksakan gaya hidup baru yang tidak cocok dengan identitas dan aspirasi sebagian warga. Partai politik yang kritis terhadap agenda iklim memanfaatkan isu ini untuk membingkai kebijakan keberlanjutan sebagai proyek elite urban yang terputus dari realitas pedesaan dan kelas pekerja. Dalam konteks demikian, kekuatan institusional negara yang mampu menegakkan standar dan menghukum pelanggaran dapat dipersepsikan bukan sebagai perlindungan terhadap kepentingan jangka panjang, melainkan sebagai ancaman terhadap otonomi dan cara hidup.

Untuk mengelola paradoks antara keberlanjutan, kompetitivitas, dan tekanan politik domestik, negara OECD memerlukan pendekatan yang tidak hanya menambah instrumen baru, tetapi juga menata ulang arsitektur kekuasaan dalam kebijakan. Salah satu jalan adalah memperkuat mekanisme deliberatif di mana kelompok terdampak betul-betul dilibatkan sejak awal perancangan, bukan hanya pada tahap konsultasi formal. Di sini konsep seperti *energy democracy*—gagasan bahwa warga memiliki suara nyata dalam keputusan energi—menjadi relevan, selama diterjemahkan dalam bentuk-bentuk institusional yang jelas, seperti dewan energi lokal, anggaran partisipatif untuk proyek energi, dan hak

akses terhadap data kebijakan. Dengan memperluas basis legitimasi, negara dapat mengurangi ketergantungan pada argumen teknokratik semata, sehingga kebijakan yang sulit secara ekonomi tetap dapat dipertahankan karena dirasakan sebagai hasil perundingan yang manusiawi, bukan sekadar perintah dari atas.

Selain demokratisasi proses, diperlukan pula kejujuran politik mengenai trade-off yang tak terelakkan antara target iklim ambisius dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Alih-alih menjanjikan bahwa semua pihak akan menjadi "pemenang", pembuat kebijakan di negara OECD perlu menjelaskan siapa yang berpotensi rugi, bagaimana kerugiannya akan diminimalkan, dan apa bentuk kompensasi yang layak. Pendekatan ini menuntut transparansi fiskal, evaluasi distribusional yang sistematis, dan kesiapan untuk meninjau ulang kebijakan jika dampak ketidakadilan terbukti lebih besar dari yang diperkirakan. Dengan cara ini, kekuatan institusional digunakan bukan untuk menghindari konflik, melainkan untuk mengelolanya secara terbuka dan bertanggung jawab. Keberanian politik semacam ini justru menjadi sumber legitimasi baru yang jauh lebih tahan uji dibanding sekadar bersembunyi di balik angka-angka efisiensi.

Pada akhirnya, paradoks kebijakan di negara OECD—antara keberlanjutan, kompetitivitas, dan tekanan politik domestik—mengungkap bahwa kualitas tata kelola tidak bisa dinilai hanya dari stabilitas regulasi atau kapasitas administratif. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: kapasitas itu digunakan untuk siapa, dengan cara apa, dan sejauh mana ia membuka ruang bagi perbedaan pandangan tentang masa depan sistem energi. Jika kekuatan institusional semata-mata diarahkan untuk mengamankan posisi kompetitif jangka pendek, sementara mengabaikan ketimpangan dan ketidakadilan yang diperkuat oleh *kebijakan energi*, maka

keberlanjutan yang dihasilkan akan rapuh dan mudah ditantang secara politik. Sebaliknya, bila kapasitas tersebut dipadukan dengan imajinasi normatif, kerendahan hati epistemik, dan komitmen pada keadilan, maka paradoks yang ada dapat menjadi sumber inovasi kelembagaan, bukan sekadar sumber kebuntuan atau penundaan.

13.5 Pelajaran untuk Negara Lain: Apa yang Dapat dan Tidak Dapat Ditiru

Ketika negara-negara di luar OECD menjadikan negara OECD sebagai rujukan, sering kali ada asumsi diam-diam bahwa standar tata kelola tinggi akan "otomatis" menghasilkan kebijakan yang efektif. Subbagian ini justru mempersoalkan asumsi tersebut dengan bertanya: apa persisnya yang bisa ditiru, dan apa yang tidak dapat direplikasi begitu saja? Di balik regulasi yang tampak rapi, terdapat sejarah panjang konflik sosial, kompromi politik, serta kapasitas birokrasi yang dibentuk selama puluhan tahun. Jika hanya bentuk luarnya yang diadopsi—undang-undang baru, otoritas regulasi independen, atau indeks kinerja—tanpa ekosistem kelembagaan yang menopangnya, maka peniruan itu berisiko berubah menjadi sekadar kosmetik. Karena itu, pelajaran dari OECD perlu dibaca sebagai undangan untuk membedah anatomi kekuasaan dan institusi, bukan sebagai paket "resep kebijakan" yang tinggal disalin di konteks negara lain.

Negara OECD sering dibayangkan sebagai laboratorium *best practice* dengan kombinasi demokrasi mapan, pasar listrik terliberalisasi, dan tata kelola transparan. Namun imajinasi ini menutupi fakta bahwa di dalam kelompok OECD sendiri terdapat variasi sangat besar dalam kapasitas fiskal, struktur pasar energi, serta kekuatan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil. Di satu sisi, bayangan mengenai standar tata kelola tinggi memberi tekanan normatif pada negara lain untuk

"mengejar ketertinggalan" melalui reformasi cepat. Di sisi lain, tekanan tersebut mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berorientasi pada *compliance* formal ketimbang pembentukan relasi kepercayaan dan akuntabilitas substantif. Di sinilah paradoks muncul: standar tata kelola yang tampak kuat dapat menjadi jebakan, karena mendorong investasi besar dalam prosedur, sementara akar ketidakadilan distribusi dan ketimpangan politik tetap tidak tersentuh.

Pada ranah energi, salah satu daya tarik utama pengalaman OECD adalah keberhasilan mendorong penetrasi energi terbarukan melalui kombinasi instrumen harga, regulasi, dan inovasi teknologi. Negara berkembang kerap melihat grafik kenaikan kapasitas surya dan angin sebagai bukti bahwa "jika desain instrumen diimpor, hasilnya akan sama". Namun grafik tersebut tidak memotret sengketa lahan, resistensi warga di daerah pedesaan, atau negosiasi kompleks antara pemerintah pusat dan daerah. Peniruan kebijakan yang hanya berangkat dari angka kapasitas terpasang mengabaikan fakta bahwa setiap proyek adalah hasil pertemuan antara regulasi formal dan praktik informal di lapangan. Pelajaran pertama yang dapat diambil ialah: jangan pernah membaca keberhasilan OECD hanya melalui indikator teknis; selalu tanyakan siapa yang memikul biaya sosial, siapa yang mendapatkan manfaat, dan bagaimana konflik diproses dalam institusi yang ada.

Literasi kebijakan di tingkat global juga menunjukkan bahwa tata kelola energi bukanlah ruang tunggal yang stabil, melainkan kompleks institusi yang terfragmentasi dengan kerangka pikir yang saling bersaing. Studi tentang *global energy governance* menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga energi terbarukan memiliki bingkai masalah dan tujuan yang berbeda-beda, bahkan ketika mereka mengklaim agenda keberlanjutan yang sama (Sanderink, 2020). Penemuan ini penting bagi negara non-OECD, karena mengingatkan bahwa tidak ada satu model tunggal yang

dapat diimpor sebagai "jalan pasti menuju efektivitas". Sebaliknya, setiap negara harus membaca keragaman bingkai tersebut, memilih secara sadar apa yang sejalan dengan konstitusi, struktur ekonomi, dan sejarah konflik domestik mereka, serta berani menolak model yang justru berpotensi menguatkan ketimpangan atau membuka ruang korupsi baru.

Hal yang relatif dapat ditiru dari pengalaman OECD adalah prosedur-prosedur tertentu, misalnya kewajiban konsultasi publik yang terstruktur, standar pelaporan emisi, dan rutinitas audit terhadap lembaga regulator. Prosedur seperti ini meningkatkan visibilitas tindakan negara dan memberi pijakan bagi masyarakat sipil untuk mengawasi. Namun bahkan di sini, peniruan memerlukan penyesuaian. Kewajiban konsultasi bisa berubah menjadi formalitas, bila tidak diiringi kapasitas organisasi akar rumput dan jaminan bahwa keberatan publik benar-benar berpengaruh terhadap isi kebijakan. Demikian pula, standar pelaporan dapat meningkatkan transparansi hanya jika data yang disajikan mudah diakses, dapat dipahami oleh warga biasa, dan tidak dikaburkan oleh istilah teknis. Dengan kata lain, yang dapat ditiru bukan hanya bentuk prosedur, tetapi juga logika emansipatoris yang mendasarinya.

Dalam banyak kasus, *template* regulasi yang lahir di OECD diadopsi sebagai kerangka utama kebijakan energi di negara lain, lalu dilapisi dengan aturan sektoral yang sudah ada. Hasilnya adalah mosaik institusional: undang-undang baru yang menjanjikan partisipasi dan keberlanjutan, tetapi dipraktikkan oleh birokrasi yang masih bekerja dengan pola lama, patronase, dan diskresi tidak tertulis. Di sini terlihat bahwa kebijakan energi tidak pernah berdiri di ruang hampa; ia berinteraksi dengan hukum administrasi, tata kelola fiskal, dan rezim perizinan yang mungkin sangat lemah. Pelajaran pentingnya adalah: peniruan regulasi tanpa restrukturisasi relasi kuasa di dalam birokrasi akan melahirkan "institusi kertas", yang tampak

selaras standar OECD, tetapi gagal mengubah cara keputusan diambil dan sumber daya dialokasikan.

Komponen lain yang sulit ditiru ialah kapasitas pengetahuan yang menopang keputusan di negara OECD. Di banyak negara tersebut, lembaga statistik, pusat riset, dan universitas memiliki tradisi panjang memproduksi data dan analisis yang relatif independen dari siklus politik jangka pendek. Selain itu, terdapat ekosistem *peer review* dan perdebatan akademik yang mempengaruhi bagaimana model ekonomi, skenario iklim, atau kajian dampak sosial diinterpretasikan oleh pembuat kebijakan. Ketika negara lain mencoba mereplikasi proses ini, sering kali mereka berhenti pada tahap pembentukan "unit analisis kebijakan" secara formal, tanpa menginvestasikan sumber daya untuk membangun budaya intelektual yang kritis. Akibatnya, laporan teknis yang dihasilkan cenderung sekadar membenarkan preferensi politik yang sudah ada, bukan menantangnya.

Di balik performa tata kelola yang terlihat teknis, terdapat susunan koalisi politik yang membentuk arah kebijakan. Di sejumlah negara OECD, jalan menuju kebijakan iklim yang relatif ambisius dibangun melalui konflik panjang antara serikat pekerja, partai politik hijau, dan industri energi. Proses ini melahirkan kompromi spesifik: kompensasi bagi pekerja sektor fosil, skema dukungan untuk rumah tangga berpendapatan rendah, atau kontrak jangka panjang bagi industri intensif energi. Negara lain dapat belajar dari pentingnya mekanisme kompensasi tersebut, tetapi tidak bisa begitu saja menyalin rancangan kompromi yang lahir dari sejarah politik berbeda. Karena itu, pelajaran yang lebih relevan adalah kebutuhan untuk memetakan aktor kunci, sumber daya daya tawar, dan mekanisme negosiasi di konteks domestik, lalu merancang kebijakan yang mengakui secara terbuka keberadaan konflik kepentingan, bukan menutupinya.

Pengalaman kawasan seperti ASEAN menunjukkan bahwa keberhasilan ekspansi energi terbarukan sangat bergantung pada kombinasi faktor regulasi, iklim investasi, dan kapasitas kelembagaan. Studi komparatif tentang transisi energi di ASEAN menyoroti bahwa adopsi instrumen canggih saja tidak cukup; tanpa reformasi tata kelola dan perbaikan iklim usaha, investasi sulit mengalir pada skala yang dibutuhkan (Vakulchuk, Overland, & Suryadi, 2023). Pelajaran untuk negara lain sangat jelas: meniru desain lelang, *feed-in tariff*, atau skema sertifikat hijau dari OECD tidak akan otomatis menarik investor, jika risiko politik, ketidakpastian kontrak, dan lemahnya penegakan hukum tetap tinggi. Dengan kata lain, kebijakan yang sama dapat menghasilkan hasil sangat berbeda ketika ditempatkan di lingkungan kelembagaan yang berbeda, sehingga fokus pembelajaran perlu digeser dari instrumen menuju kualitas relasi antara negara, pasar, dan masyarakat.

Dimensi lain yang jarang dibicarakan adalah kemampuan fiskal negara OECD untuk menyerap biaya transisi. Subsidi untuk rumah tangga rentan, investasi besar dalam infrastruktur jaringan, dan dana kompensasi untuk wilayah yang bergantung pada industri fosil memerlukan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas fiskal banyak negara berkembang. Jika instrumen seperti pajak karbon atau kenaikan tarif diterapkan tanpa perlindungan memadai, beban justru jatuh pada kelompok miskin. Pelajaran yang tidak boleh diabaikan ialah: keadilan distribusi harus menjadi prasyarat dalam desain kebijakan, bukan tambahan di bagian akhir. Negara yang kapasitas fiskalnya terbatas justru memerlukan imajinasi kebijakan yang lebih kreatif, misalnya melalui pengalihan subsidi fosil secara bertahap yang disertai program kompensasi langsung, bukan sekadar mengikuti resep fiskal dari negara berpendapatan tinggi.

Banyak negara OECD juga memanfaatkan lembaga-lembaga independen—regulator energi, pengadilan administratif, atau ombudsman—untuk menjaga integritas proses pengambilan keputusan. Namun lembaga semacam itu lahir dari sejarah panjang perjuangan atas *rule of law* dan otonomi profesi di bidang hukum, teknik, dan ekonomi. Negara lain dapat belajar dari pentingnya keterpisahan fungsi—pembuat kebijakan, pelaksana, dan pengawas—tetapi peniruan kelembagaan tidak akan efektif jika penunjukan pejabat masih didominasi pertimbangan partisan semata. Lebih jauh, mekanisme keberatan dan banding yang dibuka kepada warga dan organisasi masyarakat sipil membutuhkan budaya keberanian untuk menggugat, serta perlindungan terhadap pembela kepentingan publik. Tanpa itu, institusi "independen" hanya menjadi stempel legal atas keputusan politik yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dalam praktiknya, kebijakan energi sering menjadi persilangan antara berbagai logika regulasi: perlindungan konsumen, stabilitas sistem kelistrikan, target iklim, dan strategi industrial. Pengalaman OECD menunjukkan bahwa ketika logika tersebut tidak diselaraskan, yang muncul adalah tumpang tindih regulasi, konflik mandat, dan kebingungan di tingkat pelaksana. Pelajaran yang dapat diambil bukan sekadar membentuk komite koordinasi baru, tetapi mengakui bahwa konflik tujuan tidak bisa dihapus hanya dengan desain kelembagaan yang rumit. Yang lebih penting adalah memperjelas prioritas politik secara eksplisit, misalnya dengan menyatakan kapan keamanan pasokan boleh menggeser ambisi iklim, dan sebaliknya. Transparansi mengenai hirarki tujuan ini akan membantu publik membaca konsekuensi nyata dari pilihan kebijakan, bukan sekadar menerima retorika yang menjanjikan semuanya sekaligus.

Negara non-OECD juga dapat memetik pelajaran dari cara sebagian negara maju mengelola peran pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam kebijakan energi. Di beberapa kasus, inovasi justru datang dari kota dan wilayah yang berani bereksperimen dengan kepemilikan bersama, koperasi energi, atau skema partisipasi warga yang kuat. Namun pola ini tidak otomatis bisa ditiru di konteks di mana pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer pusat dan ruang fiskalnya sempit. Di sini, pelajaran yang mungkin lebih relevan ialah pentingnya menciptakan ruang diskresi terbatas bagi unit pemerintahan yang lebih dekat dengan warga, sekaligus membangun sistem akuntabilitas yang jelas atas penggunaan diskresi tersebut. Alih-alih memindahkan seluruh model *energy community* ala Eropa, negara lain dapat mulai dengan pilot kecil yang memungkinkan pembelajaran bertahap tanpa memicu risiko fiskal besar.

Ada pula dimensi yang hampir mustahil untuk ditiru: posisi struktural negara OECD dalam ekonomi dunia. Negara-negara ini sering berada pada ujung atas rantai nilai teknologi, memiliki kapasitas riset tinggi, dan mampu mengekspor standar teknis maupun regulasi melalui perjanjian perdagangan, bantuan pembangunan, atau lembaga keuangan internasional. Konsekuensinya, mereka tidak hanya mengatur transisi di dalam negeri, tetapi juga ikut menentukan kerangka transisi di negara lain. Pelajaran yang perlu diambil di sini lebih bersifat kritis: negara non-OECD harus menyadari bahwa "belajar dari OECD" sering kali juga berarti masuk ke dalam matriks ketergantungan teknologi dan keuangan baru. Karena itu, dialog tentang pembelajaran kebijakan perlu digeser dari *one-way transfer* menuju negosiasi yang lebih setara, di mana negara penerima berhak mendefinisikan batas-batas kedaulatan energi dan tujuan sosial yang ingin mereka capai.

Menariknya, literatur terbaru tentang tata kelola jaringan di Afrika Sub-Sahara menunjukkan bahwa negara berpendapatan menengah ke bawah pun dapat menawarkan pelajaran balik bagi dunia mengenai bagaimana transisi energi dapat dikelola melalui kolaborasi lintas aktor. Studi tentang *network governance* dalam transisi energi di Ghana, misalnya, menekankan pentingnya keterlibatan pakar independen, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang kerangka transisi yang peka konteks (Francis dkk., 2025). Temuan semacam ini mengingatkan bahwa keberhasilan pengembangan energi terbarukan tidak hanya bergantung pada kekuatan fiskal atau label OECD, tetapi juga pada kemampuan membangun jejaring kepercayaan di antara aktor yang sering kali saling curiga. Pelajaran bagi negara lain, termasuk OECD, adalah pentingnya menempatkan relasi sosial dan keadilan sebagai pusat desain kebijakan, bukan sekadar pelengkap setelah instrumen ekonomi disusun.

Dari sudut pandang filsafat kekuasaan, pembelajaran kebijakan selalu merupakan proses membangun dan menegosiasikan otoritas epistemik: siapa yang dianggap mengetahui "jalan yang benar", dan siapa yang ditempatkan sebagai murid. Narasi tentang standar tata kelola tinggi di OECD mudah berubah menjadi bentuk *epistemic hierarchy*, di mana pengalaman negara lain hanya dilihat sebagai variasi minor atau kasus khusus. Untuk melampaui hierarki ini, negara-negara perlu membaca pengalaman OECD secara genealogis: menelusuri konflik, kegagalan, serta kompromi yang membentuk institusi hari ini. Dengan melakukan itu, negara non-OECD tidak lagi hanya meminjam legitimasi dari luar, tetapi menggunakan pengalaman tersebut sebagai cermin untuk bertanya: relasi kuasa macam apa yang ingin mereka pertahankan, ubah, atau hancurkan dalam proses membangun tata kelola energi yang adil.

Pelajaran yang mungkin paling penting bukanlah daftar instrumen yang layak ditiru, melainkan prinsip-prinsip yang dapat diterjemahkan ulang secara lokal. Prinsip seperti transparansi, kejelasan mandat, perlindungan kelompok rentan, dan pengakuan atas konflik kepentingan dapat dioperasionalkan melalui berbagai bentuk kelembagaan, tidak harus sama persis dengan rancangan OECD. Di sini, peran komunitas epistemik domestik—akademisi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil—menjadi sentral untuk mengolah pengetahuan luar menjadi bahan refleksi kritis, bukan dogma. Dengan demikian, proses belajar dari OECD berubah dari logika "copy and paste" menjadi dialog yang menegosiasikan nilai, kepentingan, dan batas-batas keadilan dalam konteks sosial, politik, dan sejarah masing-masing negara.

Jika demikian, maka pelajaran utama bagi negara lain adalah membedakan antara bentuk kelembagaan yang bisa diadopsi dan relasi kekuasaan yang hanya bisa dibangun melalui sejarah konflik dan negosiasi di dalam negeri. Instrumen, indeks, dan standar prosedural dapat diimpor relatif cepat, tetapi kepercayaan publik, integritas birokrasi, dan kemampuan untuk mengelola konflik distributif di dalam kebijakan energi adalah buah proses yang jauh lebih panjang. Mengambil inspirasi dari OECD tetap penting, sejauh itu dijadikan titik awal untuk merancang strategi transisi yang bertahap, protektif terhadap kelompok rentan, dan sadar akan keterbatasan kapasitas lokal. Dengan cara ini, negara non-OECD tidak lagi mengejar bayang-bayang tata kelola "sempurna", melainkan membangun jalur keberlanjutan yang berpijak pada realitas politik dan sosial mereka sendiri.

14 Kapasitas Implementasi: Stabilitas Regulasi, Koherensi Kebijakan, dan Koordinasi Lintas–Level

14.1 Kapasitas Implementasi sebagai Dimensi Kekuasaan: Siapa yang Mampu Mengeksekusi

Kapasitas implementasi dalam kebijakan energi berkelanjutan tidak bisa dipahami hanya sebagai kemampuan administratif untuk menjalankan prosedur, tetapi sebagai wajah konkret dari filsafat kekuasaan itu sendiri. Di sini, kekuasaan bukan sekadar hak untuk memutuskan, melainkan kemampuan riil untuk memastikan bahwa keputusan itu menembus berlapis-lapis birokrasi, menyeberangi konflik kepentingan, dan tiba sebagai perubahan yang dirasakan warga. Dalam kerangka ini, institusi yang tampak kuat di atas kertas bisa saja lemah jika tidak sanggup mengawal keputusan sampai tahap pelaksanaan. Sebaliknya, aktor yang secara formal tampak pinggiran justru bisa sangat berkuasa ketika mampu menggerakkan sumber daya, jaringan, dan pengetahuan praktis yang dibutuhkan untuk mengeksekusi program. Pertanyaan "siapa yang berkuasa" di ranah energi berkelanjutan, dengan demikian, berubah menjadi "siapa yang paling konsisten mampu mengeksekusi kebijakan dalam lintasan waktu yang panjang dan kondisi yang berubah-ubah".

Dimensi kekuasaan dalam kapasitas implementasi tampak jelas ketika kita mengamati bagaimana bahasa politik dipakai untuk mengklaim siapa yang sebenarnya bertindak. Studi mengenai transisi energi menunjukkan bagaimana pemimpin politik sering memakai kata ganti "kita" untuk merangkum berbagai aktor dalam satu narasi, sekaligus menutupi

perbedaan kepentingan yang tajam di antara mereka (Mang-Benza & Hunsberger, 2020). Penggunaan "kita" ini mengesankan bahwa seluruh institusi bergerak serempak, padahal kemampuan mengeksekusi kebijakan berbeda drastis antara kementerian, pemerintah daerah, perusahaan energi, dan komunitas lokal. Di titik inilah kapasitas implementasi menjadi arena perebutan makna: siapa yang berhak mengklaim sebagai pelaksana utama, siapa yang digambarkan hanya sebagai pendukung, dan siapa yang sama sekali tidak tampak dalam narasi resmi. Kekuasaan muncul sebagai kemampuan mengontrol narasi tentang pelaksanaan, bukan sekadar keberhasilan mengisi laporan kinerja.

Dalam konteks praksis, pertanyaan tentang siapa yang mampu mengeksekusi menjadi sangat konkret ketika menyentuh desain dan pelaksanaan kebijakan energi terbarukan. Frasa ini tidak hanya menunjuk pada paket regulasi, insentif, dan target angka, tetapi juga pada rangkaian tindakan yang harus dilakukan di lapangan untuk membangun infrastruktur, mengubah perilaku konsumsi, dan merealokasi investasi. Di banyak negara berkembang, kementerian teknis mungkin memiliki otoritas formal, namun kemampuan untuk memastikan sambungan listrik terbarukan benar-benar sampai ke desa terpencil justru ada di tangan pemerintah daerah, perusahaan distribusi, dan komunitas setempat. Ketika kapasitas implementasi lemah, kebijakan energi terbarukan berhenti sebagai slogan dan tidak pernah menjelma menjadi perubahan struktur produksi maupun konsumsi. Maka, dimensi kekuasaan dalam kapasitas implementasi dapat diukur dari seberapa jauh aktor mampu menjembatani jurang antara niat normatif dan kenyataan material di lapangan.

Stabilitas regulasi menjadi prasyarat utama bagi kapasitas implementasi yang berkelanjutan, karena aktor-aktor di lapangan membutuhkan kepastian aturan untuk merencanakan

investasi, membangun organisasi, dan mengembangkan keahlian. Istilah *regulatory stability* dapat dijelaskan secara sederhana sebagai keadaan ketika aturan main tidak berubah secara tiba-tiba mengikuti kepentingan politik jangka pendek, melainkan berevolusi secara konsisten dan dapat diprediksi. Tanpa stabilitas ini, aktor pelaksana berada dalam situasi gamang: proyek energi berkelanjutan bisa terhenti karena perubahan tarif, skema insentif, atau mekanisme perizinan. Koherensi kebijakan (*policy coherence*), yang berarti keselarasan antar kebijakan di berbagai sektor dan level, juga penting agar aparatur tidak dihadapkan pada sinyal yang saling bertentangan. Jika regulasi fiskal, tata ruang, dan lingkungan tidak sejalan, kapasitas implementasi akan terkunci dalam paradoks: secara formal diminta mendorong transisi energi, tetapi secara praktis ditekan untuk mempertahankan pola eksploitatif lama.

Dimensi lain yang sering diabaikan adalah bagaimana kapasitas implementasi berhubungan dengan keadilan sosial, termasuk relasi gender dan posisi kelompok rentan dalam proyek energi. Tsagkari (2022) menunjukkan bahwa proyek energi lokal yang diklaim membawa manfaat ekonomi dan lingkungan sering kali gagal memasukkan pengalaman dan suara perempuan dalam proses penilaian maupun evaluasi, sehingga klaim keberlanjutan menjadi timpang secara sosial. Konsep *energy justice* misalnya, dapat dipahami secara sederhana sebagai upaya memastikan bahwa beban dan manfaat dari sistem energi dibagi secara adil, termasuk siapa yang terdengar dalam pengambilan keputusan. Ketika kelompok tertentu tersisih dari proses konsultasi, kapasitas implementasi tampak kuat di atas kertas, tetapi rapuh secara sosial. Kekuasaan kemudian hadir sebagai kemampuan mendefinisikan siapa yang dianggap "pemangku kepentingan sah" dan siapa yang hanya diposisikan sebagai penerima dampak tanpa hak bersuara.

Kapasitas implementasi juga ditentukan oleh cara *multi-level governance* diatur, yaitu pembagian dan negosiasi kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan bahkan desa. Secara sederhana, *multi-level governance* adalah pola tata kelola di mana keputusan tidak hanya diambil di satu tingkat, tetapi dibentuk melalui interaksi antarlembaga di berbagai level. Dalam kerangka ini, kekuasaan pelaksanaan tidak dapat dipahami hanya dari satu aktor, tetapi dari kemampuan untuk mengaitkan dan menyelaraskan berbagai kebijakan pemerintah yang saling mempengaruhi. Jika perencanaan energi nasional tidak sinkron dengan rencana pembangunan daerah, atau jika kapasitas teknis di tingkat lokal tidak diperkuat, maka undang-undang yang progresif akan berhenti di tahap dokumen. Di sini, aktor yang benar-benar berkuasa adalah mereka yang mampu menjahit berbagai kebijakan pemerintah menjadi rangkaian tindakan yang dapat dijalankan secara realistis oleh birokrasi dan komunitas lokal.

Dalam tingkat paling mikro, kapasitas implementasi diwujudkan oleh aparat garis depan yang sering disebut sebagai *street-level bureaucrats*, yakni pegawai lapangan yang berinteraksi langsung dengan warga dan pelaku usaha. Istilah ini, dalam penjelasan sederhana, menunjuk pada aparat yang setiap hari mengambil keputusan kecil: apakah izin diproses cepat atau diperlambat, bagaimana aturan ditafsirkan ketika berhadapan dengan konteks yang tidak persis sama dengan teks regulasi. Di tangan mereka, kebijakan energi berkelanjutan bisa mendapatkan bentuk yang suportif bagi inisiatif lokal, atau sebaliknya menjadi serangkaian hambatan administratif. Kekuasaan dalam kapasitas implementasi di level ini sering bersifat terselubung: tidak muncul dalam pidato atau dokumen strategi, tetapi menentukan apakah proyek kecil energi bersih di desa, sekolah, atau fasilitas publik dapat berjalan lancar. Mengabaikan dimensi ini berarti menafsirkan kekuasaan hanya

dari puncak, bukan dari titik-titik di mana kebijakan benar-benar bersentuhan dengan realitas sosial.

Aspek lain yang memperlihatkan kapasitas implementasi sebagai dimensi kekuasaan adalah kemampuan untuk mendesain dan memodifikasi aturan main ketika menghadapi konflik kepentingan. Dalam transisi energi, terdapat banyak aktor yang berkepentingan mempertahankan struktur lama, termasuk sektor yang diuntungkan oleh bahan bakar fosil, rantai pasok lama, dan pola korporasi terpusat. Di tengah pertarungan ini, institusi yang tampaknya netral sebenarnya memegang kuasa untuk menentukan bagaimana prosedur perizinan, standar lingkungan, dan mekanisme insentif disusun. Mereka yang mampu memanfaatkan bahasa teknis, seperti *risk assessment* atau *cost-benefit analysis*, untuk membenarkan pilihan tertentu, sesungguhnya sedang menggerakkan kekuasaan epistemik—mendefinisikan apa yang dianggap "rasional" dan "layak". Kapasitas implementasi yang tampak teknis ternyata adalah alat untuk mengunci atau membuka ruang bagi pilihan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Koordinasi lintas sektor menjadi medan lain di mana kapasitas implementasi menentukan arah kekuasaan, khususnya ketika kebijakan energi berkelanjutan menuntut sinkronisasi antara kementerian energi, lingkungan, keuangan, perindustrian, dan lembaga perencanaan. Di sini, kebijakan energi terbarukan hanya akan bergerak jika ada aktor yang mampu menghubungkan prioritas fiskal, target iklim, strategi industrialisasi, dan agenda pembangunan regional. Tanpa koordinasi yang efektif, setiap lembaga cenderung memaksimalkan agenda sektornya sendiri, sehingga program transisi energi terfragmentasi dalam proyek kecil yang saling terputus. Kekuasaan tidak hanya terletak pada posisi formal, tetapi pada kemampuan membangun forum koordinasi yang berfungsi, menyelesaikan tumpang tindih kewenangan, dan

mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan. Aktor yang berhasil menggerakkan koordinasi semacam ini pada hakikatnya sedang menggeser pusat gravitasi kekuasaan dari logika sektoral menuju logika transformatif yang lebih holistik.

Kapasitas implementasi juga teruji ketika kebijakan energi berkelanjutan bersentuhan langsung dengan hak-hak masyarakat adat, komunitas lokal, dan wilayah yang memiliki makna kultural tertentu. Pengalaman di berbagai negara Amerika Latin menunjukkan bahwa kegagalan melaksanakan konsultasi awal yang bermakna dalam proyek energi terbarukan melahirkan konflik sosial, pembatalan proyek, dan krisis kepercayaan terhadap institusi negara (Silva, 2025). Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya tampak pada siapa yang mengeluarkan izin, tetapi pada siapa yang menentukan bentuk dan kualitas konsultasi: apakah forum benar-benar terbuka pada keberatan, apakah pengetahuan lokal dianggap setara dengan kajian teknis, dan apakah persetujuan bebas dan didahulukan dihormati. Kapasitas implementasi yang mengabaikan dimensi keadilan prosedural akan berujung pada perlawanan yang mengikis legitimasi dan menghambat transisi energi jangka panjang.

Di sisi lain, kapasitas implementasi yang kuat bukan berarti meniadakan konflik, melainkan mampu mengelola dan mengolahnya menjadi proses pembelajaran institusional. Kebijakan energi berkelanjutan hampir selalu menyentuh kepentingan ekonomi dan identitas sosial yang beragam, sehingga benturan perspektif sulit dihindari. Kekuasaan, dalam kerangka ini, bukan kemampuan memaksakan satu solusi, tetapi kemampuan merancang mekanisme resolusi konflik yang mencegah kekerasan dan membuka ruang negosiasi bermakna. Forum mediasi, panel partisipatif, dan proses peninjauan kembali kebijakan adalah contoh arena di mana kapasitas implementasi diuji dalam bentuknya yang paling reflektif. Ketika

institusi bersedia mengakui kesalahan, memperbaiki desain, dan memodifikasi program berdasarkan kritik warga, kekuasaan tidak hilang, tetapi berubah bentuk menjadi kemampuan menjaga keberlanjutan proses transformasi.

Dalam banyak kasus, keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan membentuk koalisi pelaksana lintas aktor yang melampaui batas-batas birokrasi formal. Di sinilah jaringan antara pejabat publik, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku usaha menjadi infrastruktur sosial yang menopang kebijakan pemerintah. Koalisi semacam ini mempertemukan sumber daya berbeda: otoritas regulatif, kapasitas analitis, jaringan akar rumput, dan modal finansial. Kapasitas implementasi lantas tampak sebagai hasil dari kerja kolektif, bukan sekadar instruksi hierarkis. Namun, dinamika koalisi juga sarat ketimpangan: aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap pusat pengambilan keputusan dapat mendominasi agenda, sementara kelompok yang kurang terorganisasi mudah tersisih. Menyadari hal ini, desain kebijakan pemerintah yang peka terhadap kekuasaan harus memberi ruang institusional bagi suara yang lemah, agar koalisi implementasi tidak berubah menjadi arena pengukuhan dominasi baru.

Dimensi kekuasaan dalam kapasitas implementasi juga tergambar dari bagaimana lembaga negara mengakui dan memanfaatkan kapasitas komunitas lokal. Banyak studi mengenai proyek energi menunjukkan bahwa keberlanjutan sosial tidak mungkin dicapai jika warga hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pasif, tanpa hak untuk mempengaruhi tujuan dan desain program. Di wilayah pedesaan, komunitas sering memiliki pengetahuan terperinci tentang pola angin, air, atau penggunaan lahan yang sangat relevan bagi desain teknologi. Ketika pengetahuan ini diabaikan, risiko kegagalan teknis dan penolakan sosial meningkat.

Sebaliknya, ketika proses perencanaan membuka ruang bagi inisiatif warga, kapasitas implementasi bertambah karena terdapat rasa memiliki terhadap proyek. Kekuasaan kemudian hadir sebagai kemampuan untuk menggabungkan kapasitas formal dan kapasitas warga menjadi satu arus tindakan yang saling menguatkan, bukan saling meniadakan.

Aspek temporal juga penting dalam membaca kapasitas implementasi sebagai dimensi kekuasaan. Transisi energi berkelanjutan tidak selesai dalam satu siklus anggaran atau satu periode pemerintahan; ia memerlukan komitmen lintas dekade. Di sinilah keputusan tentang kontrak jangka panjang, skema pembiayaan, dan rancangan kelembagaan akan menentukan siapa yang mengendalikan arah transisi di masa depan. Jika kontrak dan regulasi dirancang sedemikian rupa sehingga mengunci generasi mendatang dalam struktur yang sempit, kapasitas implementasi yang kuat hari ini bisa berarti pembatasan ruang pilihan besok. Tetapi jika kebijakan dirancang adaptif, dengan mekanisme evaluasi berkala dan peluang untuk koreksi arah, kekuasaan pelaksanaan dapat diarahkan untuk melindungi fleksibilitas generasi mendatang. Dengan demikian, kapasitas implementasi bukan hanya soal kecepatan bertindak, tetapi juga kemampuan menjaga keterbukaan jalur masa depan.

Di tingkat internasional, kapasitas implementasi sering sangat dipengaruhi oleh arsitektur pembiayaan global, kemitraan transnasional, dan syarat-syarat yang melekat pada dukungan teknis maupun finansial untuk kebijakan energi terbarukan. Negara-negara yang bergantung pada pinjaman dan hibah untuk membiayai infrastruktur energi kerap menghadapi ketegangan antara memenuhi standar lembaga internasional dan menjawab kebutuhan lokal. Di sini kekuasaan bergeser ke aktor yang mampu menegosiasikan syarat pendanaan, mengintegrasikan agenda keadilan sosial dalam desain proyek,

dan memastikan bahwa risiko tidak sepenuhnya ditanggung komunitas paling rentan. Jika syarat pendanaan mendorong percepatan proyek tanpa memperkuat kapasitas lokal, maka keberhasilan jangka pendek akan dibayar dengan kerentanan jangka panjang. Kapasitas implementasi yang berpihak pada keadilan harus mampu mengolah arus modal global menjadi kesempatan memperkuat kelembagaan domestik, bukan sekadar mempercepat pembangunan fisik.

Pada akhirnya, ketika kita menempatkan kapasitas implementasi sebagai dimensi kekuasaan, pertanyaan "siapa yang mampu mengeksekusi" menjadi alat untuk membedah struktur tata kelola energi secara lebih jernih. Ia memaksa kita melihat melampaui bentuk formal institusi, menuju jaringan relasi, aliran pengetahuan, konfigurasi pembiayaan, dan praktik sehari-hari aparat maupun warga. Dalam kebijakan energi berkelanjutan, aktor yang paling berkuasa bukan selalu yang paling lantang menyatakan komitmen, melainkan yang paling konsisten mampu menghubungkan norma, regulasi, dan tindakan konkret di berbagai level. Dengan membaca kapasitas implementasi secara kritis, kita dapat merancang intervensi kelembagaan yang tidak hanya mempercepat transisi teknologis, tetapi juga mengubah distribusi kekuasaan menuju tatanan yang lebih adil, partisipatif, dan tahan uji di hadapan krisis ekologis maupun politik yang tak terelakkan.

14.2 Stabilitas Regulasi dan Risiko Perubahan Kebijakan Mendadak

Stabilitas regulasi dalam kebijakan energi berkelanjutan adalah salah satu wajah paling konkret dari filsafat kekuasaan, karena di dalamnya tersimpan janji, ancaman, dan harapan yang mengikat berbagai aktor dalam lintasan waktu yang panjang. Regulasi bukan sekadar teks hukum, tetapi kontrak politis yang menyiratkan bahwa aturan main hari ini tidak akan diubah

secara sewenang-wenang besok ketika konstelasi kekuasaan bergeser. Di sektor energi, terutama ketika menyangkut penggantian infrastruktur fosil dengan skema pembiayaan jangka panjang untuk energi bersih, janji ini menjadi penentu apakah investor, komunitas lokal, dan lembaga publik berani mengambil risiko. Ketika stabilitas regulasi lemah, ruang keputusan dikendalikan oleh aktor yang mampu mengubah aturan secara mendadak, dan di situlah kita melihat bagaimana kekuasaan tidak hanya menentukan isi kebijakan, tetapi juga ritme perubahan yang memengaruhi para pelaksana di lapangan.

Dari perspektif filsafat kekuasaan, stabilitas regulasi dapat dipahami sebagai alat untuk menata harapan kolektif. Aturan hukum dan kebijakan energi berkelanjutan membentuk imajinasi mengenai masa depan: berapa lama insentif akan bertahan, sejauh mana pembangkit fosil akan dikurangi, dan seberapa aman investasi pada teknologi baru. Namun, setiap janji stabilitas mengandung potensi pengkhianatan, karena koalisi politik yang berkuasa dapat berganti dan memutuskan bahwa komitmen lama tidak lagi relevan. Di titik ini, risiko perubahan kebijakan mendadak bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ekspresi dari struktur kekuasaan yang memprioritaskan kepentingan jangka pendek dibanding komitmen antar-generasi. Ketika pemegang kekuasaan merasa dapat mengubah aturan tanpa menanggung konsekuensi reputasional yang berarti, stabilitas regulasi berubah menjadi sekadar retorika, bukan fondasi yang dapat diandalkan.

Konsekuensi dari ketidakstabilan aturan sangat terasa ketika negara mencoba membangun kepercayaan dalam kebijakan energi terbarukan. Frasa tersebut bukan hanya menunjuk pada sekumpulan instrumen insentif dan target bauran energi, melainkan seluruh ekosistem keputusan yang mengatur lahan, izin lingkungan, tarif listrik, dan akses jaringan.

Apabila aturan insentif diubah tiba-tiba, misalnya pemotongan tarif pembelian listrik dari surya tanpa masa transisi yang memadai, maka pelaku usaha kecil, koperasi desa, dan komunitas lokal akan memandang negara sebagai mitra yang tidak dapat diandalkan. Lebih jauh lagi, warga yang diajak berpartisipasi dalam program energi bersih akan merasa dikhianati ketika komitmen kompensasi atau skema pembiayaan yang dijanjikan ternyata diganti sepihak. Di sini, risiko perubahan kebijakan mendadak memperlihatkan bahwa siapa pun yang menguasai mekanisme perubahan regulasi sebenarnya memegang kendali atas keberhasilan atau kegagalan transisi energi.

Stabilitas regulasi juga terkait erat dengan koherensi antar aturan di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Dalam praktik, satu proyek energi sering berada di persimpangan regulasi lingkungan, tata ruang, perpajakan, ketenagakerjaan, dan perizinan teknis. Konsep regulatory regime dapat dijelaskan secara sederhana sebagai kumpulan aturan yang saling terkait dan membentuk pola tetap bagi perilaku aktor. Ketika satu aturan diubah tanpa memperhatikan kaitannya dengan aturan lain, muncul risiko "gempa kebijakan" yang efeknya merambat ke sektor lain secara tak terduga. Misalnya, perubahan mendadak pada kebijakan impor komponen teknologi tanpa koordinasi dengan aturan investasi lokal bisa membuat proyek tertunda, merugikan pelaku industri domestik, dan menggerus kepercayaan terhadap kapasitas negara dalam merencanakan transisi energi. Stabilitas regulasi dengan demikian tidak bisa dibatasi hanya pada satu undang-undang, melainkan menyangkut harmoni keseluruhan rezim kebijakan.

Pengalaman kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa stabilitas regulasi berperan langsung terhadap kemampuan negara menarik investasi untuk energi bersih. Kajian tentang transisi energi di negara-negara ASEAN memperlihatkan bahwa

meskipun target energi terbarukan telah dideklarasikan, ketidakpastian regulasi dan kapasitas kelembagaan yang lemah menyebabkan arus investasi jauh di bawah kebutuhan untuk mencapai sasaran bauran energi regional (Vakulchuk et al., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa ketidakkonsistenan dalam pemberlakuan insentif, perubahan skema tarif secara mendadak, serta praktik copy-paste regulasi dari sektor fosil ke sektor energi bersih tanpa penyesuaian memadai menciptakan risiko kebijakan yang tinggi. Dalam konteks filsafat kekuasaan, aktor yang mampu mengurangi ketidakpastian melalui desain regulasi yang dapat diprediksi memperoleh posisi tawar yang kuat dalam menentukan arah investasi dan struktur kepemilikan infrastruktur energi masa depan.

Di tingkat nasional, risiko perubahan kebijakan mendadak sering muncul dari dinamika politik jangka pendek yang mengelilingi penyusunan dan revisi kebijakan pemerintah. Ketika anggaran publik terbatas dan tekanan untuk menjaga harga energi tetap rendah meningkat, godaan untuk mengubah skema subsidi, pajak, atau insentif investasi secara cepat menjadi semakin besar. Misalnya, pemerintah dapat secara tiba-tiba menghentikan program dukungan tertentu, mengubah prioritas proyek, atau mengeluarkan instruksi khusus yang mengganti mekanisme lelang dengan penunjukan langsung. Langkah-langkah semacam ini mungkin tampak rasional dari sudut pandang krisis fiskal, namun dari sudut pandang pelaku kebijakan yang telah merencanakan investasi jangka panjang, hal itu menandai rapuhnya konsistensi negara. Kerapuhan ini berujung pada meningkatnya premi risiko, menurunnya minat partisipasi pelaku non-negara, dan tertundanya agenda transisi energi yang seharusnya berjalan bertahap dan terencana.

Perspektif kebijakan global untuk ekonomi rendah karbon menekankan bahwa inovasi regulasi harus disertai kerangka yang cukup stabil agar pelaku tidak kehilangan orientasi setiap

kali ada perubahan politik. Dalam telaah terbaru tentang inovasi kebijakan energi, Apata (2025) menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang memberi ruang pembelajaran dan penyesuaian, namun tetap menjaga arah jangka panjang yang jelas menuju penurunan emisi. Dalam bahasa sederhana, kebijakan yang baik tidak boleh berubah setiap kali menteri berganti, melainkan berevolusi melalui evaluasi yang transparan dan partisipatif. Stabilitas regulasi dalam pengertian ini bukan berarti membekukan aturan, tetapi memastikan bahwa perubahan dilakukan melalui mekanisme yang dapat diprediksi, dengan alasan yang jelas, dan dengan memperhitungkan dampaknya bagi pelaku yang sudah berinvestasi, terutama kelompok yang kapasitas tawarnya lemah.

Risiko perubahan kebijakan mendadak juga dapat muncul dari ranah yudisial, ketika pengadilan memutuskan untuk membatalkan atau menafsirkan ulang regulasi yang menjadi dasar program transisi energi. Putusan pengadilan yang progresif bisa memperkuat perlindungan lingkungan dan hak warga, tetapi jika terjadi tanpa diikuti mekanisme transisi yang jelas, pelaksana kebijakan di lapangan akan berada dalam situasi serba salah. Mereka bisa menghadapi tuntutan hukum jika meneruskan program lama, tetapi juga tidak memiliki pedoman operasional untuk menyesuaikan diri dengan putusan baru. Dalam konteks ini, kekuasaan tersebar di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun ketiadaan koordinasi dapat memunculkan ketidakstabilan aturan yang merugikan tujuan transisi energi berkelanjutan. Dibutuhkan desain regulasi yang mengantisipasi kemungkinan ini, misalnya melalui ketentuan masa penyesuaian dan prosedur revisi yang jelas.

Dalam kerangka kebijakan energi berkelanjutan, stabilitas regulasi menjadi syarat agar komitmen iklim tidak sekadar menjadi deklarasi simbolik di forum internasional. Target untuk

mencapai netral karbon atau mengurangi emisi secara signifikan hanya akan dipercaya jika instrumen legal dan kelembagaan yang menyertainya tidak mudah dipatahkan oleh pergantian kabinet atau perubahan koalisi partai. Di sinilah kita melihat dimensi kekuasaan yang bekerja melalui waktu: aktor yang sanggup mengunci arah jangka panjang dalam bentuk undang-undang payung, perjanjian internasional, dan kontrak jangka panjang memiliki kemampuan untuk memandu perilaku aktor lain, bahkan ketika dirinya tidak lagi berada di kursi eksekutif. Sebaliknya, ketika aturan dibiarkan samar, penuh celah interpretasi, atau mengandung terlalu banyak klausul darurat, ruang manuver untuk melakukan perubahan mendadak menjadi sangat besar dan menambah ketidakpastian.

Salah satu cara untuk menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas dengan kebutuhan penyesuaian adalah melalui desain instrumen regulasi yang mengandung mekanisme evaluasi berkala. Misalnya, sebuah undang-undang dapat menetapkan bahwa insentif tertentu untuk teknologi energi bersih akan ditinjau setiap lima tahun, berdasarkan indikator yang jelas seperti penurunan biaya teknologi, tingkat adopsi, dan dampak sosial. Dalam kerangka ini, perubahan kebijakan tidak dianggap mendadak jika sudah disinyalkan sejak awal dan jika prosedur evaluasi dilakukan secara transparan. Konsep sunset clause, yakni ketentuan bahwa suatu aturan akan berakhir pada tanggal tertentu kecuali diperbarui, dapat dijelaskan secara sederhana sebagai cara mencegah aturan usang bertahan tanpa pengujian. Dengan instrumen seperti ini, kekuasaan untuk mengubah aturan tetap ada, tetapi dibatasi oleh prosedur yang dapat diprediksi sehingga risiko kejutan kebijakan bagi pelaku dapat dikurangi.

Pengalaman di Amerika Latin memperlihatkan bahwa kelemahan dalam stabilitas regulasi bukan hanya soal angka insentif, tetapi juga terkait dengan bagaimana negara menata

hak-hak prosedural komunitas yang terdampak proyek energi. Studi perbandingan mengenai konsultasi awal masyarakat adat dalam proyek energi terbarukan menunjukkan bahwa ketika aturan konsultasi diterapkan secara formalistik dan mudah diabaikan, konflik sosial dan pembatalan proyek menjadi semakin sering, yang akhirnya melemahkan legitimasi seluruh kerangka regulasi (Silva, 2025). Dalam situasi ini, perubahan kebijakan mendadak sering kali muncul sebagai reaksi panik terhadap konflik yang membesar, misalnya dengan memperketat prosedur secara tiba-tiba tanpa penguatan kapasitas institusional. Hasilnya adalah spiral ketidakpastian: pelaku pasar ragu berinvestasi, sementara komunitas tidak mempercayai proses konsultasi yang sebelumnya mengabaikan hak-hak mereka.

Di tingkat desain, stabilitas regulasi untuk mendukung kebijakan energi terbarukan memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas adaptif. Kepastian hukum memberikan dasar bagi pelaku untuk menghitung risiko, mengeluarkan modal, dan membangun kapasitas teknis. Namun, jika regulasi terlalu kaku, negara akan kesulitan merespons perubahan teknologi yang cepat, misalnya penurunan drastis biaya surya atau munculnya model bisnis baru seperti peer-to-peer energy trading yang secara sederhana berarti warga dapat saling menjual listrik antar rumah. Filsafat kekuasaan mengingatkan bahwa siapa pun yang mengendalikan definisi "kepastian hukum" dan "fleksibilitas" pada dasarnya sedang menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang dibiarkan menanggung risiko. Karena itu, mekanisme partisipatif dalam peninjauan regulasi menjadi penting agar penyesuaian aturan tidak hanya merefleksikan kepentingan aktor kuat.

Risiko perubahan kebijakan mendadak juga berkaitan dengan bagaimana pengetahuan dan ketidaktahuan ilmiah dikelola dalam proses regulasi. Teknologi energi berkembang

cepat, proyeksi biaya dan permintaan energi berubah seiring waktu, dan penilaian atas dampak lingkungan terus diperbarui. Jika pembuat kebijakan menyembunyikan ketidakpastian ini di balik narasi kepastian semu, maka setiap koreksi arah akan tampak sebagai kontradiksi dan menggerus kepercayaan publik. Sebaliknya, jika sejak awal diakui bahwa kebijakan mengandung ruang pembelajaran dan koreksi berdasarkan bukti baru, perubahan yang dilakukan melalui prosedur yang diumumkan dapat dipahami sebagai bagian dari stabilitas dinamis. Dalam kerangka ini, kekuasaan epistemik—yakni kemampuan mendefinisikan apa yang sah sebagai pengetahuan—menjadi sangat menentukan, karena dapat dipakai untuk membenarkan perlunya perubahan mendadak atau justru mengabaikan bukti yang tidak nyaman.

Dari sudut pandang ekonomi politik, stabilitas regulasi juga memengaruhi struktur pembiayaan transisi energi dan distribusi manfaatnya. Investor jangka panjang, seperti dana pensiun atau lembaga keuangan pembangunan, sangat sensitif terhadap policy uncertainty, yaitu ketidakpastian mengenai kemungkinan perubahan kebijakan. Ketika risiko ini tinggi, biaya modal meningkat, dan proyek yang secara teknis layak menjadi tidak ekonomis. Dalam kondisi seperti ini, negara yang memiliki rekam jejak konsisten dalam mempertahankan komitmen regulasi memperoleh posisi tawar yang besar, karena dapat menegosiasikan syarat pendanaan yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, negara yang sering mengubah aturan mendapat cap kurang kredibel, sehingga harus menawarkan insentif lebih besar hanya untuk mengimbangi ketidakpastian. Di sini kita melihat bahwa stabilitas regulasi adalah juga bentuk kekuasaan finansial: kemampuan untuk menarik sumber daya dengan syarat yang tidak merugikan kepentingan publik.

Dalam konteks politik domestik, dinamika elektoral menambah satu lapisan kompleksitas terhadap upaya menjaga konsistensi kebijakan pemerintah. Setiap pemilu membawa kemungkinan perubahan koalisi dan prioritas, sehingga godaan untuk merombak kebijakan pendahulu demi menandai jarak politik sangat besar. Jika pola ini dibiarkan, kebijakan energi berkelanjutan akan terjebak dalam siklus "bangun–bongkar" yang menguras sumber daya dan memperkuat sinisme publik. Salah satu cara mengurangi risiko ini adalah membangun konsensus lintas partai mengenai prinsip-prinsip dasar transisi energi, misalnya melalui undang-undang payung yang disepakati secara luas dan sulit diubah tanpa dukungan super-mayoritas. Kesepakatan semacam ini tidak menghilangkan perbedaan politik, tetapi menempatkan sebagian agenda energi di luar tarik-menarik jangka pendek, sehingga stabilitas regulasi memperoleh basis legitimasi yang lebih kuat.

Dengan demikian, membahas stabilitas regulasi dan risiko perubahan kebijakan mendadak dalam kebijakan energi berkelanjutan berarti membongkar bagaimana kekuasaan diorganisasi melalui aturan, waktu, dan pengetahuan. Stabilitas bukan sekadar soal menjaga aturan tetap sama, melainkan merancang tata cara perubahan yang adil, dapat diprediksi, dan sensitif terhadap posisi kelompok yang paling rentan terhadap guncangan kebijakan. Filsafat kekuasaan mendorong kita untuk bertanya: stabilitas demi siapa, dan risiko perubahan ditimpakan kepada siapa? Jika stabilitas hanya melindungi kepentingan aktor kuat sementara warga, komunitas lokal, dan generasi mendatang dibiarkan memikul dampak negatif, maka kita berhadapan dengan tata kelola yang hanya tampak rapi di permukaan namun rapuh secara etis. Sebaliknya, bila stabilitas regulasi ditata sebagai komitmen kolektif untuk menjaga arah transisi sekaligus membuka ruang koreksi yang partisipatif, maka kapasitas implementasi akan menjadi kekuatan yang

menopang, bukan menghambat, masa depan energi yang lebih adil dan berkelanjutan.

14.3 Koherensi Lintas Sektor: Energi, Keuangan, Lingkungan, dan Industri

Koherensi lintas sektor dalam kebijakan energi sesungguhnya adalah cermin bagaimana kekuasaan didistribusikan, dipertukarkan, dan dinegosiasikan antara aktor energi, keuangan, lingkungan, dan industri. Ketika setiap sektor berjalan dengan logika sendiri-sendiri, kapasitas implementasi akan tersendat karena setiap kebijakan menghadapi "tembok" regulasi lain yang tidak sinkron. Sebaliknya, ketika aturan fiskal, standar lingkungan, strategi industri, dan tata kelola energi dirancang saling mengunci dalam arah yang sama, kekuasaan negara tampil sebagai kemampuan kolektif untuk mengarahkan transformasi struktural, bukan sekadar merilis regulasi sporadis. Filsafat kekuasaan mengajarkan bahwa yang menentukan bukan hanya isi norma, tetapi siapa yang sanggup menyusun konfigurasi hubungan antar sektor sehingga keputusan di satu ranah tidak dibatalkan oleh logika di ranah lain. Karena itu, pembicaraan mengenai kapasitas implementasi tidak dapat berhenti pada sektor energi saja, tetapi harus menembus batas keuangan, lingkungan, dan industri.

Dalam praktik pemerintahan, empat sektor utama ini sering kali diatur oleh kementerian atau lembaga yang memiliki mandat, kultur birokratis, dan indikator kinerja yang berbeda. Sektor energi misalnya cenderung berorientasi pada keamanan pasokan dan efisiensi sistem, sektor keuangan fokus pada stabilitas makro dan pengelolaan risiko fiskal, sektor lingkungan menjaga daya dukung ekosistem, sementara sektor industri mengejar daya saing dan ekspor. Tanpa desain kelembagaan yang mendorong koherensi, masing-masing sektor akan mengembangkan kebijakan dan program yang saling tarik-

menarik. Filsafat kekuasaan membantu kita melihat bahwa koherensi lintas sektor bukan sesuatu yang "alami", tetapi hasil dari pergulatan pengetahuan, kepentingan, dan narasi yang menentukan siapa berhak mendefinisikan prioritas. Ketika satu sektor berhasil memaksakan cara pandangnya sebagai kriteria utama bagi sektor lain, di situ terlihat pergeseran kekuasaan yang dapat memperkuat atau melemahkan proyek transisi energi.

Koherensi lintas sektor menjadi sangat nyata ketika sebuah negara mendeklarasikan target ambisius melalui kebijakan energi terbarukan, tetapi masih mempertahankan pola subsidi, skema pajak, dan prioritas industri yang bertumpu pada bahan bakar fosil. Di atas kertas, negara tampak mendorong energi bersih, tetapi di lapangan sinyal kebijakan bercampur: bank masih menilai proyek fosil lebih "aman", industri tetap diarahkan pada rantai nilai lama, dan standar lingkungan memberikan banyak pengecualian bagi kegiatan beremisi tinggi. Akibatnya, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan komunitas lokal sulit membaca arah, sehingga kapasitas implementasi melemah. Dalam kondisi seperti ini, koherensi lintas sektor bukan hanya persoalan teknis harmonisasi regulasi, tetapi juga perjuangan politik untuk menggeser imajinasi pembangunan dari paradigma ekstraktif ke paradigma keberlanjutan yang adil secara sosial.

Salah satu titik kunci dalam membangun koherensi lintas sektor adalah bagaimana kerangka tata kelola energi berinteraksi dengan wacana keadilan lingkungan. Ketika isu distribusi beban dan manfaat hanya diletakkan di pinggiran, sektor energi akan cenderung mendorong proyek besar yang dipandang efisien secara teknis, sementara sektor lingkungan dan sosial sibuk memadamkan konflik yang muncul di belakang. Sebaliknya, apabila keadilan lingkungan diposisikan sebagai dimensi inti, maka desain kebijakan di sektor energi dan

keuangan harus mempertimbangkan ulang siapa yang akan menanggung risiko dan siapa yang menerima keuntungan. Govindarajan dan Ganesh (2022) menunjukkan bahwa integrasi antara tata kelola energi dan keadilan lingkungan menuntut kerangka analisis yang menghubungkan instrumen kebijakan dengan distribusi kekuasaan dan kerentanan sosial, sehingga koherensi lintas sektor tidak hanya dinilai dari seberapa rapi dokumen, tetapi juga dari sejauh mana ia mengoreksi ketimpangan yang sudah mengakar.

Sektor keuangan memegang peran strategis dalam menentukan apakah koherensi lintas sektor akan mengarah pada penguatan atau pelemahan transisi energi. Instrumen seperti pajak, subsidi, *green bonds*, atau instrumen *green finance* lain—yang secara sederhana dapat dipahami sebagai mekanisme pembiayaan yang memberikan insentif bagi proyek ramah lingkungan—menjadi jembatan antara kebijakan makro dan proyek konkret. Bila kebijakan fiskal dan regulasi perbankan masih memandang investasi pada infrastruktur fosil sebagai pilihan yang normal dan aman, sementara proyek energi bersih dianggap berisiko tinggi tanpa dukungan jaminan, maka pesan yang sampai kepada pasar adalah bahwa status quo tetap diunggulkan. Koherensi lintas sektor menuntut agar regulasi keuangan diselaraskan dengan tujuan lingkungan dan energi, misalnya melalui penyesuaian standar risiko, insentif pajak, dan penetapan kriteria keberlanjutan yang jelas sehingga arus modal tidak terus mengalir ke proyek yang merusak iklim dan ekosistem.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang sering kali menyebut transisi energi sebagai salah satu prioritas, namun tidak diikuti penyesuaian indikator kinerja lintas sektor. Sektor industri tetap diukur terutama oleh pertumbuhan output dan ekspor, sementara sektor lingkungan dinilai dari kecepatan

pemberian dokumen izin, bukan dari keberhasilan menjaga daya dukung. Dalam keadaan seperti ini, birokrasi di masing-masing sektor menerima sinyal yang saling bertolak belakang: mereka diminta mendukung transisi energi, tetapi dihukum ketika kebijakan tersebut memperlambat ekspansi ekonomi jangka pendek. Koherensi lintas sektor menuntut perubahan cara mengukur keberhasilan, sehingga indikator energi, keuangan, lingkungan, dan industri diarahkan pada tujuan bersama yang eksplisit, misalnya penurunan emisi, peningkatan ketahanan ekologi, dan kualitas pekerjaan yang layak dalam rantai nilai baru.

Hubungan antara tata kelola lingkungan dan arah pembangunan ekonomi sangat menentukan apakah koherensi lintas sektor akan menopang atau merusak ketahanan ekologi. Studi tentang negara dengan kelembagaan lingkungan yang lemah menunjukkan bagaimana kebijakan tata guna lahan, sistem perizinan, dan dorongan pertumbuhan ekonomi dapat bersatu mempercepat krisis ekologis ketika tidak dikontrol oleh institusi yang kuat dan konsisten (Asghar et al., 2025). Dalam konteks ini, kebijakan lingkungan tidak dapat ditempatkan sebagai penutup atau filter belakangan, tetapi harus menjadi bagian dari desain awal strategi energi dan industri. Jika tidak, sektor keuangan akan membiayai proyek yang tampak menguntungkan di atas kertas, sementara biaya ekologis yang tersembunyi jatuh ke generasi mendatang. Koherensi lintas sektor yang berorientasi keberlanjutan menuntut integrasi instrumen lingkungan dalam model biaya-manfaat, sehingga kerusakan ekologi tidak lagi dianggap sebagai eksternalitas yang dapat diabaikan.

Sektor industri berada di garis depan ketika transisi energi mengharuskan perubahan struktur produksi, rantai pasok, dan standar teknologi. Di satu sisi, strategi industrialisasi sering mengejar peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sumber

daya alam, yang dapat meningkatkan konsumsi energi dan emisi bila tidak dikendalikan. Di sisi lain, peluang muncul ketika kebijakan industri diarahkan untuk menciptakan basis manufaktur bagi teknologi rendah karbon, seperti peralatan energi terbarukan, material efisien energi, atau layanan digital untuk pengelolaan jaringan listrik cerdas. Koherensi lintas sektor mengharuskan agar kebijakan industri tidak hanya mengejar daya saing, tetapi juga konsisten dengan target lingkungan dan kerangka pembiayaan hijau. Filsafat kekuasaan menyoroti bahwa pertarungan dalam arena ini bukan sekadar soal efisiensi, melainkan soal siapa yang menguasai definisi "kemajuan", apakah itu diukur dari volume produksi atau dari kemampuan menciptakan struktur ekonomi yang adil dan rendah emisi.

Ketika suatu negara menyusun kebijakan energi berkelanjutan, tantangan utama adalah menyatukan visi jangka panjang tersebut dengan realitas jangka pendek sektor keuangan dan industri yang terbiasa bergerak berdasarkan sinyal keuntungan cepat. Jika rencana transisi hanya hadir dalam dokumen energi, tanpa dijabarkan dalam pedoman investasi publik, strategi industri, dan standar lingkungan, maka koordinasi akan bergantung pada komitmen individu pejabat, bukan pada kekuatan desain kelembagaan. Koherensi lintas sektor di sini berfungsi sebagai "jembatan institusional" yang menghubungkan imajinasi masa depan energi dengan keputusan sehari-hari di kementerian keuangan, lembaga perizinan, bank pembangunan, dan asosiasi industri. Ketika jembatan ini rapuh, transisi energi hanya berjalan sebagai pilot project yang terisolasi, bukan sebagai transformasi struktural yang mengubah arah pembangunan nasional.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan yang mendorong inovasi energi di tingkat lokal dapat berhasil ketika ada kombinasi kebijakan nasional, regional, dan

lokal yang saling menguatkan. Inisiatif desa bioenergi di Jerman, misalnya, berkembang karena adanya kerangka nasional yang memberikan insentif, sekaligus dukungan kebijakan di tingkat daerah yang membuka ruang bagi koperasi energi untuk mengelola infrastruktur sendiri (Roesler & Hassler, 2019). Pelajaran pentingnya adalah bahwa koherensi lintas sektor tidak hanya terjadi di atas, tetapi juga di bawah: kebijakan energi, lingkungan, dan pembangunan pedesaan bertemu dalam konteks konkret, di mana aktor lokal memanfaatkan peluang yang ada. Tanpa kebijakan lintas sektor yang setara di tingkat nasional, inisiatif lokal semacam ini mudah terhambat oleh regulasi keuangan, standar teknis, atau prosedur perizinan yang tidak pernah dirancang untuk memberi ruang bagi model kepemilikan komunal dan skala kecil.

Dalam konteks negara berkembang, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana membangun koherensi lintas sektor ketika kapasitas kelembagaan terbatas dan tekanan makroekonomi tinggi. Sering kali, sektor keuangan terikat oleh persyaratan lembaga internasional, sektor industri tertekan oleh kebutuhan menciptakan lapangan kerja cepat, sementara sektor lingkungan kekurangan sumber daya untuk melakukan pengawasan. Di tengah kondisi ini, narasi tentang "reformasi struktural" dapat dipakai untuk membenarkan pelemahan standar lingkungan atau privatisasi aset publik dengan alasan efisiensi. Filsafat kekuasaan mengingatkan bahwa koherensi lintas sektor bisa dipakai untuk dua tujuan: memperkuat orientasi keberlanjutan dan keadilan, atau justru mempercepat konsolidasi kekuasaan ekonomi pada segelintir aktor. Pertaruhan politiknya berada pada siapa yang duduk di meja ketika indikator keberhasilan lintas sektor disusun.

Salah satu uji penting koherensi lintas sektor adalah cara negara menyelaraskan kebijakan energi terbarukan dengan komitmen iklim internasional dan strategi pembangunan

nasional. Bila target bauran energi tidak diikuti oleh penyesuaian kerangka fiskal, misalnya reformasi subsidi energi fosil dan penataan kembali belanja infrastruktur, maka program transisi akan bergantung pada proyek-proyek terpisah yang mudah dibatalkan ketika terjadi perubahan prioritas. Sebaliknya, jika komitmen iklim dijadikan pijakan untuk merombak prioritas investasi publik, standar perbankan, dan insentif industri, maka kebijakan energi terbarukan menjadi "sumbu" yang menghubungkan berbagai sektor dalam arah yang konsisten. Koherensi lintas sektor dalam pengertian ini bukan hanya sinkronisasi target, tetapi juga penyusunan ulang insentif, sanksi, dan narasi pembangunan agar tidak saling bertabrakan.

Pemilihan indikator dan alat ukur lintas sektor juga merupakan arena penting di mana koherensi atau ketidakoherenan dibentuk. Jika sektor keuangan tetap menggunakan indikator tradisional seperti pertumbuhan PDB dan rasio utang tanpa memasukkan risiko iklim dan kerusakan lingkungan, sementara sektor lingkungan berbicara dengan bahasa jejak ekologis dan batas planet, maka dialog antarsektor akan buntu. Upaya mengintegrasikan indikator keberlanjutan ke dalam pengukuran kinerja ekonomi—misalnya melalui *green GDP* atau indeks kesejahteraan alternatif—dapat menjadi salah satu cara menjembatani perbedaan ini. Namun, langkah tersebut tidak netral secara politik, karena mengubah indikator berarti mengubah cara menilai keberhasilan pemerintah dan korporasi. Di sini, koherensi lintas sektor bergantung pada keberanian aktor politik untuk mengakui bahwa ukuran lama tidak lagi memadai di tengah krisis iklim dan ketimpangan sosial yang semakin tajam.

Dimensi ruang juga tidak bisa diabaikan ketika membahas koherensi lintas sektor. Keputusan energi, keuangan, lingkungan, dan industri selalu terikat pada wilayah tertentu: kawasan industri, kota besar, daerah tambang, atau pedesaan

yang menjadi lokasi pembangkit. Tata ruang yang mengabaikan kebutuhan jaringan transmisi, zona lindung, dan kerapuhan ekosistem akan membuat kebijakan energi dan lingkungan saling bertabrakan di lapangan. Sebaliknya, ketika perencanaan ruang memasukkan peta potensi energi, kerentanan sosial, dan prioritas industri, koherensi lintas sektor dapat terwujud dalam bentuk pengembangan koridor energi bersih atau kawasan industri rendah karbon yang terencana. Namun, bahkan dalam kasus ideal sekalipun, pertanyaan keadilan tetap muncul: siapa yang mendapatkan akses pada lahan strategis, siapa yang tergusur, dan siapa yang memegang kendali atas keputusan tata ruang jangka panjang.

Pada tataran politik sehari-hari, koherensi lintas sektor sering diuji ketika kebijakan pemerintah menghadapi krisis, seperti lonjakan harga energi, resesi, atau bencana ekologis. Dalam situasi tertekan, negara mungkin tergoda untuk mengorbankan standar lingkungan demi menjaga pertumbuhan, atau menunda program transisi demi meredam protes sosial jangka pendek. Jika kerangka koherensi sudah lemah sejak awal, krisis akan mempercepat pergeseran sumber daya kembali ke pola pembangunan tinggi karbon. Sebaliknya, bila koherensi lintas sektor telah tertanam dalam perangkat hukum, kelembagaan, dan kesadaran publik, respon terhadap krisis dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi, misalnya dengan mempercepat investasi energi bersih dan perlindungan sosial bagi kelompok yang terdampak. Dengan demikian, koherensi lintas sektor tidak hanya diuji pada masa normal, tetapi terutama ketika tekanan memaksa negara menunjukkan prioritas sejatinya.

Pada akhirnya, membahas koherensi lintas sektor antara energi, keuangan, lingkungan, dan industri adalah upaya untuk membongkar struktur kekuasaan yang menentukan arah kebijakan energi berkelanjutan. Di permukaan, koherensi

tampak sebagai urusan teknis harmonisasi regulasi, tetapi pada dasarnya ia adalah pertarungan tentang siapa yang berhak mendefinisikan masa depan ekonomi dan ekologi. Jika koherensi lintas sektor diatur untuk menjaga kenyamanan aktor kuat sambil membebankan risiko kepada komunitas rentan dan generasi mendatang, maka kapasitas implementasi hanya akan memperkokoh ketidakadilan. Sebaliknya, bila koherensi dibangun dengan menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis sebagai poros, maka kekuasaan institusional dapat diarahkan untuk menantang logika lama yang destruktif. Filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi mengajak kita melihat koherensi lintas sektor sebagai medan perjuangan normatif, di mana desain institusi menjadi senjata untuk memilih antara reproduksi krisis atau transformasi menuju tatanan yang lebih adil.

14.4 Koordinasi Lintas-Level: Pusat–Provinsi–Lokal dalam Proyek Energi

Mengukur kapasitas implementasi dalam kebijakan energi berkelanjutan adalah pekerjaan yang tampak teknis tetapi sesungguhnya sangat politis. Begitu kita memilih apa yang dihitung, kita sekaligus memilih siapa yang dianggap "mampu" dan siapa yang dicap "lemah". Dalam bahasa filsafat kekuasaan, indikator bukan sekadar cermin realitas, melainkan perangkat untuk membentuk realitas: lembaga yang skornya baik akan lebih dipercaya dan lebih mudah memperoleh sumber daya, sedangkan lembaga yang skornya buruk cenderung kehilangan legitimasi dan dukungan. Karena itu, pertanyaan tentang alat, indikator, dan reformasi untuk memperkuat kapasitas implementasi tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan: siapa yang merancang alat ukur tersebut, dengan logika siapa, dan untuk tujuan politik apa. Bila indikator hanya menguntungkan aktor kuat dan mengabaikan beban yang dipikul oleh aktor lokal

maupun komunitas rentan, maka penguatan kapasitas implementasi berisiko menjadi pengukuhan ketimpangan kekuasaan.

Secara umum, upaya mengukur kapasitas implementasi sering dibagi menjadi tiga ranah: kemampuan regulatif, kemampuan administratif, dan kemampuan koordinatif. Kemampuan regulatif merujuk pada seberapa jelas dan konsisten aturan dirumuskan; kemampuan administratif berhubungan dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, anggaran, serta prosedur; sedangkan kemampuan koordinatif berkaitan dengan kemampuan menghubungkan berbagai sektor dan level pemerintahan. Namun, pembagian ini mudah menipu bila diperlakukan sebagai kategori netral. Misalnya, indikator "jumlah staf" dapat menutupi kenyataan bahwa staf tersebut tidak diberi kewenangan untuk mengambil keputusan penting. Demikian pula, indikator "jumlah peraturan" bisa menandakan hiper-regulasi yang justru menghambat tindakan. Karena itu, setiap indikator kapasitas implementasi perlu dibaca bersamaan dengan konteks kekuasaan yang membentuk cara lembaga bekerja.

Dalam konteks kebijakan energi terbarukan, pengukuran kapasitas implementasi perlu menangkap kemampuan aktor untuk mengelola ketidakpastian teknologi, politik, dan sosial secara serentak. Di banyak negara, lembaga yang menangani energi diharapkan mampu mengarahkan investasi, bernegosiasi dengan pelaku pasar, melibatkan komunitas lokal, dan sekaligus menjaga stabilitas tarif bagi konsumen. Jika indikator hanya menilai seberapa cepat proyek fisik selesai tanpa mempertimbangkan proses konsultasi publik atau dampak jangka panjang terhadap ketahanan iklim, maka kapasitas implementasi seolah kuat padahal rapuh secara sosial. Di sini tampak bahwa pengukuran kapasitas tidak bisa dipisahkan dari definisi keberhasilan: apakah keberhasilan diukur dengan

megawatt yang terpasang, dengan jumlah emisi yang turun, dengan kepemilikan komunitas atas proyek, atau dengan kombinasi yang secara eksplisit dinegosiasikan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa indikator kapasitas implementasi yang terlalu sempit sering gagal menjelaskan mengapa beberapa wilayah mampu menarik dan mengeksekusi investasi energi bersih secara konsisten, sementara wilayah lain tertinggal. Analisis terhadap investasi perusahaan listrik di wilayah-wilayah berbeda memperlihatkan bahwa kombinasi faktor politik, kapasitas administrasi, dan konfigurasi koalisi pro-lingkungan memengaruhi keputusan investasi secara signifikan (Schmid & Bornemann, 2019). Temuan semacam ini memberi pelajaran bahwa pengukuran kapasitas implementasi tidak dapat berhenti pada "input" birokratis seperti jumlah pegawai atau besar anggaran, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor politik dan kelembagaan berinteraksi untuk menghasilkan atau menghambat tindakan. Dengan kata lain, indikator yang baik harus sensitif terhadap struktur kekuasaan yang melingkupi proses implementasi.

Di tingkat praktis, alat ukur kapasitas implementasi dapat berupa *capacity assessment* yang menilai dimensi hukum, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. *Capacity assessment* secara sederhana dapat dipahami sebagai proses menilai kekuatan dan kelemahan institusi dalam menjalankan tugasnya. Dalam kebijakan energi, penilaian ini bisa dilakukan pada kementerian, badan regulator, pemerintah provinsi, maupun pemerintah lokal. Namun, bila proses penilaian hanya dilakukan oleh konsultan luar tanpa keterlibatan aparat dan komunitas, hasilnya sering tidak membumi. Di sinilah pentingnya menggabungkan data kuantitatif, seperti rasio pegawai terhadap jumlah proyek, dengan penilaian kualitatif, seperti kemampuan lembaga membangun kepercayaan warga dan menangani konflik. Tanpa

dimensi kualitatif ini, kapasitas implementasi tampak rapi di atas kertas tetapi tidak terasa di lapangan.

Reformasi kapasitas implementasi juga harus memeriksa bagaimana kebijakan pemerintah selama ini memberi sinyal insentif kepada aparat pelaksana. Bila indikator kinerja birokrasi hanya menekankan penyerapan anggaran dan jumlah proyek yang selesai secara fisik, aparat akan terdorong mengejar proyek mudah yang cepat selesai, bukan proyek yang secara strategis penting bagi transisi energi. Hal ini melahirkan bias terhadap program jangka pendek dan mengabaikan kebutuhan membangun kompetensi baru, seperti kemampuan membaca risiko iklim atau mengelola partisipasi publik. Karena itu, penguatan kapasitas implementasi menuntut penyesuaian indikator kinerja agar mencerminkan tujuan jangka panjang, termasuk keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kualitas proses demokratis. Tanpa penyesuaian indikator, reformasi struktural akan terjebak dalam logika lama.

Pada tingkat global, penelitian tentang tata kelola energi menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengaturan dan pembiayaan energi sering bekerja dengan bingkai pemahaman yang berbeda-beda, sehingga kapasitas implementasi terfragmentasi. Analisis atas lembaga-lembaga energi terbarukan internasional, misalnya, menemukan adanya "bingkai yang pecah" (*shattered frames*) dalam melihat tujuan, instrumen, dan tanggung jawab masing-masing aktor (Sanderink, 2020). Ketika bingkai-bingkai ini tidak dipertemukan, indikator kinerja yang dipakai satu lembaga bisa bertentangan dengan indikator lembaga lain, dan hasilnya adalah kebingungan di tingkat nasional dan lokal. Pelajaran dari sini adalah bahwa upaya mengukur dan memperkuat kapasitas implementasi harus memperhatikan konsistensi bingkai kebijakan, bukan hanya konsistensi angka.

Mengukur kapasitas implementasi tanpa memasukkan perspektif daerah dan komunitas berarti mempertahankan pandangan sempit bahwa hanya lembaga pusat yang memegang kemampuan untuk bertindak. Padahal, banyak proyek energi bergantung pada kemampuan pemerintah provinsi dan lokal untuk mengelola konflik tanah, membangun kesepakatan dengan warga, serta mengintegrasikan proyek dengan rencana pembangunan wilayah. Karena itu, alat ukur kapasitas sebaiknya mengandung indikator yang menilai kualitas koordinasi lintas-level dan kedalaman hubungan dengan komunitas, seperti frekuensi dialog publik, tingkat kepercayaan warga, dan keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif. Indikator semacam ini mungkin sulit diukur secara presisi, tetapi memberi gambaran lebih jujur tentang kemampuan implementasi yang sesungguhnya.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara kapasitas implementasi dan kekuatan kepentingan yang tertanam dalam sistem energi. Proses dekarbonisasi sering mengguncang kepentingan aktor yang selama ini diuntungkan oleh infrastruktur dan kebiasaan lama, sehingga penguatan kapasitas bisa dilihat sebagai ancaman terhadap posisi mereka. Studi tentang perubahan teknologi dan politik dekarbonisasi menunjukkan bagaimana kombinasi perubahan teknologi, kebijakan, dan tekanan sosial dapat mengonfigurasi ulang kepentingan yang tertanam, baik dengan membuka ruang bagi aktor baru maupun memperkuat aliansi lama (Vormedal et al., 2023). Dalam konteks ini, indikator kapasitas implementasi perlu memeriksa sejauh mana institusi mampu mengelola konflik kepentingan dan mengarahkan ulang insentif, bukan hanya menjalankan prosedur rutin yang sudah mapan tetapi tidak sejalan dengan kebijakan energi berkelanjutan.

Dari sisi alat, banyak negara mulai menggunakan *results-based management* dan *performance dashboards* untuk

memantau pelaksanaan kebijakan energi. *Results-based management* dapat dijelaskan secara sederhana sebagai pendekatan manajemen yang memusatkan perhatian pada hasil, bukan hanya kegiatan; sementara *dashboards* adalah panel informasi digital yang memungkinkan pemantauan indikator secara berkala dan visual. Dalam sektor energi, alat-alat ini dipakai untuk memantau progres pembangunan infrastruktur, realisasi investasi, penurunan emisi, hingga kepatuhan terhadap standar lingkungan. Namun, jika indikator yang dipilih terlalu sempit dan diisi secara formalistik, maka dashboard hanya menjadi etalase data, bukan alat pembelajaran. Agar berguna, indikator perlu dirancang bersama pelaksana dan pemangku kepentingan kunci, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar membantu pengambilan keputusan dan bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan.

Penguatan kapasitas implementasi juga membutuhkan reformasi cara lembaga belajar dari pengalaman. Banyak kegagalan proyek energi berulang karena institusi tidak memiliki mekanisme untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan pelajaran dari kasus sebelumnya. Ini menuntut adanya unit analisis kebijakan yang mampu melakukan evaluasi mendalam, bukan hanya audit administratif. Unit seperti itu dapat menelaah misalnya mengapa proyek tertentu berhasil di satu daerah tetapi gagal di daerah lain, bagaimana konfigurasi kelembagaan memengaruhi hasil, dan indikator apa yang perlu diperbaiki agar lebih mencerminkan realitas. Dengan demikian, alat ukur kapasitas implementasi menjadi bagian dari siklus pembelajaran institusional yang terus-menerus, bukan dokumen statis yang dilupakan setelah laporan disusun.

Dalam konteks *governance* yang kompleks, salah satu strategi reformasi yang penting adalah menyelaraskan indikator kapasitas dengan arsitektur kelembagaan yang menyokong

kebijakan energi terbarukan. Bila kerangka kelembagaan sudah diubah untuk memperkuat koordinasi lintas-sektor dan lintas-level, tetapi indikator kinerja masih mengikuti pola lama yang menekankan volume proyek fisik atau serapan anggaran, maka reformasi akan tersendat. Sebaliknya, ketika indikator mulai memasukkan elemen seperti kualitas partisipasi publik, ketepatan waktu penyelesaian sengketa, dan konsistensi kebijakan lintas periode, maka aparatur terdorong membangun kapasitas yang lebih substantif. Di sini tampak bahwa reformasi indikator dan reformasi kelembagaan harus berjalan beriringan, karena keduanya saling mengunci dalam membentuk perilaku aktor.

Perbaikan kapasitas implementasi juga memerlukan perhatian pada dimensi etis dan politik dari praktik pengukuran. Siapa yang diundang untuk mendefinisikan indikator? Apakah komunitas yang terdampak proyek energi memiliki suara dalam menentukan apa yang dianggap sebagai "kinerja baik"? Bila indikator hanya dirumuskan oleh teknokrat dan konsultan, ada risiko bahwa aspek yang penting bagi warga—seperti keadilan distribusi manfaat, perlindungan budaya lokal, dan keamanan jangka panjang—terpinggirkan. Filsafat kekuasaan mengingatkan bahwa pengukuran selalu sekaligus merupakan tindakan penilaian moral: ketika kita memberi angka, kita juga menetapkan apa yang layak dan tidak layak. Oleh karena itu, proses penyusunan indikator kapasitas implementasi harus dibuka sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok dapat mempertanyakan asumsi dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Selain reformasi indikator, agenda penguatan kapasitas implementasi menuntut intervensi konkret dalam struktur organisasi. Lembaga yang bertanggung jawab atas energi sering bekerja dalam "silo" terpisah dari lembaga keuangan, lingkungan, dan industri, padahal keberhasilan implementasi

sangat ditentukan oleh interaksi antar sektor. Membentuk unit lintas-sektor, tim koordinasi khusus, atau sekretariat bersama dapat membantu mengurangi friksi kelembagaan. Namun, langkah ini hanya efektif bila didukung perubahan prosedur dan insentif yang mendorong kerja sama nyata, misalnya dengan memberi penghargaan atas keberhasilan lintas-sektor, bukan hanya capaian unit masing-masing. Dengan demikian, penguatan kapasitas implementasi bukan hanya menambah unit baru, tetapi mengubah logika dasar interaksi di dalam dan antar lembaga.

Pada ujungnya, reformasi kapasitas implementasi tidak dapat dipisahkan dari pembenahan akuntabilitas politik atas kebijakan pemerintah. Jika keberhasilan implementasi hanya diukur secara sempit—misalnya pada pertumbuhan jangka pendek atau keberhasilan proyek tertentu—parlemen, media, dan publik akan cenderung menilai kebijakan dari permukaan. Sebaliknya, bila indikator publik juga memasukkan konsistensi jangka panjang, keadilan sosial, dan dampak ekologis, maka ruang untuk mempertanyakan kebijakan secara lebih mendalam akan terbuka. Ini dapat mendorong pergeseran dari politik pencitraan menuju politik tanggung jawab, di mana kapasitas implementasi dinilai dari kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dan risiko, bukan sekadar kemampuan menyelesaikan proyek cepat. Dengan cara itu, reformasi kapasitas implementasi sekaligus menjadi reformasi kualitas demokrasi.

Dengan demikian, mengukur dan memperkuat kapasitas implementasi dalam kebijakan energi berkelanjutan berarti memasuki ruang di mana teknis dan politis bertemu secara tak terpisahkan. Alat, indikator, dan reformasi kelembagaan bukanlah perangkat netral, melainkan ekspresi dari pandangan tertentu tentang apa yang dianggap penting, siapa yang harus dilindungi, dan masa depan seperti apa yang ingin dicapai. Jika

perangkat ini disusun hanya untuk mengamankan kepentingan aktor kuat, kapasitas implementasi akan berfungsi sebagai mesin reproduksi ketidakadilan. Namun, bila alat ukur dirancang secara reflektif, indikator disusun secara partisipatif, dan reformasi dilekatkan pada komitmen etis terhadap keadilan sosial dan ekologis, kapasitas implementasi dapat menjadi kekuatan yang mendorong transformasi energi yang sungguh-sungguh berkelanjutan. Di titik inilah filsafat kekuasaan membantu kita melihat bahwa perdebatan tentang kapasitas bukan sekadar soal kemampuan teknis, tetapi tentang arah moral dan politis dari seluruh proyek transisi energi.

14.5 Mengukur dan Memperkuat Kapasitas Implementasi: Alat, Indikator, dan Reformasi

Mengukur kapasitas implementasi dalam kebijakan energi berkelanjutan bukanlah pekerjaan administratif yang sederhana, tetapi tindakan politis yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, ditafsirkan, dan dipertanggungjawabkan. Ketika suatu lembaga dinilai "berkapasitas tinggi", label itu tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga membuka akses terhadap pendanaan, kepercayaan publik, dan legitimasi untuk mengatur perilaku aktor lain. Sebaliknya, lembaga yang mendapat penilaian "berkapasitas rendah" sering kali bukan tidak kompeten, tetapi bekerja dalam struktur yang tidak mendukung: sistem insentif yang buruk, koordinasi yang lemah, atau dominasi aktor kuat yang membatasi ruang geraknya. Karena itu, alat ukur dan indikator kapasitas implementasi pada dasarnya adalah instrumen kekuasaan. Mereka membentuk cara negara melihat dirinya sendiri, menentukan masalah apa yang dianggap penting, dan arah reformasi apa yang dinilai mendesak untuk dilakukan.

Di tengah kompleksitas tata kelola energi, indikator kapasitas implementasi sering dikategorikan ke dalam tiga

kelompok: indikator struktural, indikator proses, dan indikator hasil. Indikator struktural menilai keberadaan aturan, lembaga, dan sumber daya formal yang tersedia; indikator proses mengukur kualitas koordinasi, kejelasan prosedur, dan kemampuan birokrasi beradaptasi; sedangkan indikator hasil memeriksa apakah kebijakan benar-benar menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Namun, pengelompokan ini bisa menutupi kenyataan bahwa semua indikator tersebut berangkat dari asumsi tertentu tentang bagaimana birokrasi seharusnya bekerja. Misalnya, menilai bahwa "lebih banyak aturan berarti kapasitas lebih kuat" sering bertentangan dengan kenyataan bahwa terlalu banyak regulasi justru menutup ruang inovasi. Dengan demikian, merancang indikator bukan hanya soal memilih variabel, tetapi memutuskan model pemerintahan mana yang ingin diperkuat.

Dalam konteks kebijakan energi terbarukan, penilaian kapasitas implementasi memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana institusi mengelola ketidakpastian teknologi, dinamika pasar, dan resistensi sosial secara bersamaan. Tidak cukup bagi sebuah lembaga untuk memiliki dokumen perencanaan yang komprehensif jika ia tidak mampu menggerakkan aktor lokal atau merespons konflik yang muncul di lapangan. Karena itu, indikator yang terlalu berorientasi pada input—seperti jumlah pegawai, tingkat anggaran, atau keberadaan unit kerja tertentu—harus dilengkapi dengan indikator yang menangkap kemampuan adaptif. Mampu atau tidaknya suatu institusi melakukan penyesuaian kebijakan, membangun dialog dengan masyarakat, serta mengelola hubungan dengan pelaku industri menjadi bukti nyata kapasitas yang relevan untuk mendorong transisi energi yang berkeadilan.

Salah satu kelemahan umum dalam pengukuran kapasitas implementasi adalah kecenderungan menilai lembaga dari permukaan, tanpa memahami jaringan kekuasaan yang

membentuk praktik sehari-hari. Sebuah kementerian bisa saja memiliki struktur organisasi yang rapi, tetapi tidak memiliki kewenangan substantif karena keputusan penting dikendalikan oleh aktor politik di luar birokrasi. Inilah yang terjadi ketika agenda energi dibajak oleh kepentingan yang tertanam dalam struktur ekonomi lama. Untuk mengatasi situasi ini, pengukuran kapasitas implementasi harus memeriksa secara eksplisit bagaimana kekuasaan bekerja: siapa yang mengendalikan anggaran, siapa yang mengatur interpretasi aturan, dan siapa yang paling berpengaruh dalam menentukan proyek mana yang dijalankan. Tanpa pemahaman ini, indikator hanya akan memantulkan versi ideal birokrasi, bukan kenyataan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa indikator kapasitas tidak hanya fokus pada struktur negara, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan politik di tingkat lokal. Banyak kegagalan proyek energi tercipta bukan karena kurangnya aturan, tetapi karena lemahnya kemampuan institusi untuk membangun legitimasi sosial. Secara khusus, studi tentang tata kelola energi menegaskan bahwa integrasi antara struktur pemerintahan dan prinsip-prinsip keadilan lingkungan merupakan syarat penting agar kebijakan dapat diterima publik (Govindarajan & Ganesh, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa pengukuran kapasitas implementasi harus memasukkan indikator legitimasi, misalnya kualitas dialog publik, keterbukaan informasi, dan kemampuan menyelesaikan sengketa. Tanpa dimensi ini, kapasitas implementasi hanya akan menjadi gambaran teknokratis yang tidak mencerminkan dunia sosial tempat kebijakan dijalankan.

Ketika kita berhadapan dengan kebijakan pemerintah, indikator kapasitas implementasi perlu menilai seberapa jauh insentif birokrasi mendukung tujuan jangka panjang kebijakan energi. Bila insentif hanya berfokus pada penyelesaian proyek

fisik, aparat akan cenderung mengejar target kuantitatif yang mudah, bukan mendalami proses yang membutuhkan inovasi institusional atau partisipasi warga. Kondisi ini menjelaskan mengapa banyak proyek energi berjalan cepat pada tahap awal tetapi gagal berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi kapasitas implementasi menuntut perubahan cara negara menilai kinerjanya sendiri. Mengukur hal-hal seperti konsistensi kebijakan lintas periode, kualitas dampak sosial, dan integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan memberi gambaran lebih utuh tentang kemampuan negara untuk bertindak secara bertanggung jawab.

Di tingkat alat analitis, banyak negara mulai mengadopsi *capacity assessment frameworks* yang lebih komprehensif. *Capacity assessment* dapat dijelaskan sebagai metode evaluasi sistematis untuk menilai kesiapan kelembagaan, mulai dari struktur hukum, proses internal, hingga nilai-nilai organisasi. Namun, alat ini hanya efektif jika digunakan dengan pemahaman bahwa kapasitas tidak hanya melekat pada negara, tetapi juga pada jejaring aktor non-negara yang terlibat dalam transisi energi. Perusahaan energi, koperasi lokal, universitas, dan organisasi masyarakat sipil memiliki kapasitas pengetahuan dan jaringan yang dapat melengkapi kelemahan birokrasi. Karena itu, alat ukur yang terlalu terpusat pada negara bisa membatasi peluang kolaborasi dan membiarkan sumber daya sosial yang penting tidak teridentifikasi.

Mengukur kapasitas implementasi juga harus mempertimbangkan bagaimana lembaga mengelola ketidakpastian. Dalam sektor energi, ketidakpastian bukan masalah sampingan, tetapi kondisi permanen akibat dinamika pasar global, perubahan teknologi, dan risiko ekologis. Salah satu bentuk alat yang berkembang adalah *scenario planning*, yakni proses merancang berbagai kemungkinan masa depan untuk membantu institusi mengambil keputusan di tengah

ketidakpastian. Dengan kata lain, alat ukur kapasitas implementasi tidak hanya menilai kondisi saat ini, tetapi kemampuan institusi untuk beradaptasi terhadap skenario yang tidak terduga. Fleksibilitas seperti ini penting agar kebijakan tidak mudah runtuh ketika menghadapi guncangan eksternal.

Dalam arti politis, kebijakan energi berkelanjutan menuntut indikator kapasitas yang mampu mendeteksi apakah institusi benar-benar berupaya mengubah struktur kekuasaan lama atau hanya memperkuat pola-pola dominasi yang sudah ada. Banyak institusi mengklaim mendukung energi bersih, tetapi pada praktiknya mempercepat proyek yang menguntungkan kelompok tertentu sambil mengabaikan komunitas rentan. Di sinilah indikator harus menyentuh dimensi distribusi manfaat dan beban. Indikator yang baik mampu menangkap apakah beban transisi dipikul secara proporsional atau justru dilimpahkan kepada mereka yang paling sedikit memiliki kuasa politik. Ini memastikan bahwa kapasitas implementasi tidak hanya dinilai dari keberhasilan teknis, tetapi dari kemampuan mendorong perubahan yang adil.

Selain itu, indikator kapasitas implementasi juga perlu mengukur kemampuan lembaga untuk menciptakan ruang deliberatif. Ruang deliberatif adalah arena di mana berbagai aktor dapat bertukar pandangan secara setara, dan dalam konteks energi, ruang semacam ini sangat penting agar kebijakan tidak ditentukan secara sepihak oleh elite teknokratis. Salah satu kelemahan birokrasi yang sering muncul adalah kecenderungan menolak kritik atau resistensi warga. Padahal, resistensi tersebut bisa menjadi informasi penting tentang kelemahan desain kebijakan. Karena itu, indikator kapasitas implementasi harus memasukkan elemen keterbukaan terhadap kritik, seberapa jauh negara menyediakan mekanisme peninjauan, dan apakah keputusan dapat dikoreksi berdasarkan masukan publik.

Penguatan kapasitas implementasi memerlukan reformasi yang melampaui permukaan organisasi. Alih-alih menambah unit baru atau merombak struktur formal, reformasi harus fokus pada mengubah cara lembaga memahami risiko, bekerja sama, dan membuat keputusan. Di sinilah pembelajaran institusional memainkan peranan penting. Lembaga perlu mekanisme belajar yang berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan satu kali atau penyusunan dokumen strategis yang tidak pernah ditinjau kembali. Mekanisme seperti evaluasi formatif, lokakarya lintas-sektor, dan pertukaran pengetahuan antardaerah dapat mendorong refleksi kritis terhadap apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dengan demikian, kapasitas implementasi tumbuh bukan melalui penambahan struktur, tetapi melalui penguatan proses pembelajaran.

Dalam konteks kebijakan energi terbarukan, reformasi kapasitas implementasi harus menyentuh dimensi fiskal, hukum, dan sosial sekaligus. Reformasi fiskal misalnya perlu memastikan bahwa anggaran untuk proyek energi tidak terjebak dalam prosedur birokrasi yang lambat sehingga menghambat inovasi lokal. Reformasi hukum perlu memastikan bahwa aturan-aturan lama yang menghambat partisipasi warga atau menghalangi inisiatif komunitas dapat diperbarui. Reformasi sosial perlu memastikan bahwa warga memiliki ruang yang cukup untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga bentuk reformasi ini hanya efektif jika dipandu oleh indikator yang tepat dan tidak terdistorsi oleh kepentingan sempit aktor tertentu.

Dimensi penting lain dalam reformasi kapasitas implementasi adalah memasukkan indikator keadilan sosial dan ekologis ke dalam alat ukur. Banyak literatur tentang transisi energi menekankan bahwa keberlanjutan tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan relasi kekuasaan yang menyebabkan sebagian kelompok lebih rentan terhadap dampak lingkungan

maupun ekonomi (Valenzuela, 2025). Temuan ini memperkuat argumen bahwa indikator kapasitas implementasi harus melampaui ukuran teknis dan mempertimbangkan aspek keadilan: siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana suara kelompok marginal dihitung dalam proses. Tanpa aspek keadilan ini, reformasi kapasitas implementasi hanya akan memperluas ketimpangan.

Reformasi kapasitas implementasi juga mensyaratkan perubahan dalam tata kelola pengetahuan. Banyak lembaga energi masih mengandalkan model pengetahuan yang hierarkis, di mana data teknis dianggap lebih sah daripada pengalaman warga. Padahal, pengetahuan lokal sering kali lebih akurat untuk memahami dampak lingkungan atau sosial dari proyek tertentu. Reformasi pengetahuan ini menuntut indikator yang menghargai variasi pengetahuan dan mendorong integrasi antara data teknis dan pengalaman warga. Dengan demikian, negara dapat membuat keputusan yang lebih sensitif terhadap kondisi lapangan dan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, evaluasi kapasitas implementasi memerlukan perpaduan antara penilaian formal dan partisipatif. Evaluasi formal menilai kinerja berdasarkan dokumen, laporan, dan indikator kuantitatif, sementara evaluasi partisipatif menilai kualitas hubungan antarpelaku dan dampak yang dirasakan warga. Menggabungkan kedua pendekatan ini dapat menciptakan gambaran yang lebih realistis. Namun, integrasi ini hanya mungkin jika lembaga pemerintah bersedia berbagi kekuasaan dengan masyarakat dan menerima bahwa warga bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga aktor yang memiliki suara dalam mendefinisikan keberhasilan.

Secara keseluruhan, mengukur dan memperkuat kapasitas implementasi adalah pekerjaan filosofis, bukan sekadar teknis. Ia menuntut refleksi tentang tujuan apa yang ingin dicapai, nilai

apa yang hendak dipertahankan, dan struktur kekuasaan mana yang perlu ditantang. Alat, indikator, dan reformasi kelembagaan adalah ekspresi dari visi politik tentang masa depan energi. Jika visi tersebut berakar pada keberlanjutan dan keadilan, kapasitas implementasi akan diarahkan untuk mendorong transformasi yang membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada struktur energi lama. Namun, jika visi tersebut hanya berorientasi pada efisiensi birokratis atau keuntungan jangka pendek, kapasitas implementasi akan menjadi alat reproduksi ketidakadilan. Karena itu, penguatan kapasitas implementasi harus dibaca sebagai bagian dari proyek etis untuk membentuk masa depan energi yang lebih demokratis dan manusiawi.

Bagian V
Multi–level Governance
&
Konflik Lokal

15 Dari Target Nasional ke Friksi Lokal: Enam Celah Institusional yang Memicu Resistensi Komunitas

15.1 Rantai Kebijakan dari Target Nasional ke Proyek di Lapangan

Kapasitas implementasi dalam rantai kebijakan energi bukan sekadar urusan teknis melaksanakan aturan, melainkan ekspresi paling telanjang dari *siapa* yang berkuasa menentukan bentuk masa depan energi di suatu wilayah. Di atas kertas, rantai itu tampak lurus: target nasional ditetapkan, kementerian teknis menyusun rencana, proyek dirancang, lalu pemerintah daerah dan masyarakat lokal "dilibatkan" untuk memastikan penerimaan. Namun di lapangan, tiap mata rantai menyimpan kemungkinan distorsi: interpretasi berbeda, kepentingan ekonomi yang bersaing, serta logika keamanan energi yang seringkali mengalahkan keadilan sosial. Subbagian ini memeriksa bagaimana dari satu kalimat dalam dokumen strategi nasional, lahir serangkaian keputusan konkret yang membentuk turbin, jaringan, atau pembangkit di desa tertentu, dan bagaimana celah-celah institusional di sepanjang rantai itu membuka ruang resistensi, negosiasi, maupun kooptasi terhadap komunitas lokal.

Rantai kebijakan dari target nasional hingga proyek di lapangan dapat dibayangkan sebagai tujuh simpul yang saling berkaitan: formulasi sasaran numerik (misalnya persentase bauran energi), penjabaran dalam rencana sektoral, desain skema pendanaan dan insentif, pemilihan lokasi dan teknologi, pengadaan dan kontrak, proses perizinan dan konsultasi publik, serta operasi dan pengawasan. Setiap simpul diisi aktor

berbeda: kementerian, otoritas regulasi, perusahaan swasta, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan komunitas. Di antara simpul inilah kekuasaan beredar—bukan hanya dalam bentuk kewenangan formal, tetapi juga kemampuan menafsirkan data, mengontrol informasi, dan menentukan kapan suara warga dianggap relevan. Ketika satu simpul didominasi aktor tertentu, rantai kebijakan menjadi timpang: aliran keputusan bergerak ke bawah, sementara aliran aspirasi dari bawah ke atas tersendat atau dipotong.

Celah pertama muncul ketika target nasional untuk *kebijakan energi terbarukan* diterjemahkan secara terburu-buru menjadi proyek-proyek besar yang dikejar dengan logika "kecepatan" dan "skala", tanpa jeda untuk memahami keragaman konteks lokal. Target persentase kapasitas terpasang bergeser menjadi daftar proyek yang harus segera di-*groundbreaking*, sehingga setiap penundaan di lapangan dilihat sebagai ancaman terhadap kredibilitas negara di mata investor atau lembaga internasional. Dalam situasi ini, pemerintah pusat cenderung menekan pemerintah daerah agar mempercepat izin, sementara ruang deliberasi komunitas dikerdilkan menjadi forum sosialisasi sepihak. Resistensi warga kemudian dibaca sebagai "gangguan" terhadap agenda transisi energi, bukan sebagai penanda adanya desain kebijakan yang timpang. Di titik ini, rantai kebijakan sudah membawa benih konflik, karena yang dipandang penting bukan lagi kualitas relasi dengan warga, melainkan angka realisasi proyek.

Celah kedua terletak pada bagaimana desentralisasi listrik dan proyek-proyek energi skala lokal seringkali dipromosikan sebagai bukti penguatan komunitas, padahal struktur kekuasaannya tetap sangat terpusat. Studi tentang desentralisasi energi menunjukkan bahwa aktor lokal seperti koperasi energi atau inisiatif komunitas memang memperoleh ruang baru, tetapi masih berhadapan dengan koalisi kuat aktor

lama yang mengontrol regulasi, infrastruktur jaringan, dan akses pendanaan (Brisbois, 2020). Dalam rantai kebijakan, ini terlihat ketika skema partisipasi atau kepemilikan lokal hanya menjadi pelengkap pada tahap akhir, bukan desain sejak awal. Komunitas diundang untuk "berbagi manfaat" setelah lokasi dan teknologi diputuskan, bukan diajak berdialog menentukan tujuan, bentuk, dan syarat keberlanjutan. Alhasil, desentralisasi yang dijanjikan justru beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang tetap hierarkis.

Celah ketiga muncul pada tahap perencanaan spasial dan pemilihan lokasi, ketika analisis teknis dan studi kelayakan ekonomi menjadi satu-satunya filter legitimasi. Di atas kertas, prosedur ini tampak netral: memilih lokasi dengan potensi sumber daya tertinggi, biaya koneksi jaringan terendah, dan risiko teknis terkecil. Namun, di balik angka-angka itu tersembunyi keputusan nilai: lahan siapa yang dikorbankan, lanskap budaya siapa yang diubah, dan komunitas mana yang kembali ditempatkan sebagai "latar" bagi kepentingan energi nasional. Karena logika perencanaan jarang mengakui nilai non-ekonomi—seperti keterikatan emosional pada tanah, memori sejarah, atau fungsi sosial ruang—sebagian besar alasan keberatan warga tidak menemukan bahasa yang sah dalam dokumen resmi. Ketika resistensi muncul, ia mudah dimaknai sebagai "emosional" atau "tidak rasional", padahal berakar pada ketimpangan kuasa dalam mendefinisikan apa itu kepentingan publik.

Celah keempat berkaitan dengan fragmentasi kewenangan di sepanjang rantai, terutama antara kementerian teknis, lembaga lingkungan, dan otoritas lokal. *Kebijakan pemerintah* di tingkat pusat seringkali memuat narasi integrasi—energi, lingkungan, dan pembangunan sosial—namun pada praktiknya, instrumen hukum dan anggaran tersebar dalam silo-silo sektoral. Akibatnya, ketika komunitas lokal mengajukan keberatan atas dampak sosial-lingkungan, tidak jelas lembaga mana yang benar-benar

berwenang menjawab secara substantif. Investor dan pengembang justru diuntungkan oleh ketidakjelasan ini: mereka bisa mengklaim kepatuhan pada izin yang paling sempit definisinya, sambil mengabaikan persoalan lintas sektor yang tak memiliki "pemilik" institusional. Fragmentasi ini melemahkan posisi pemerintah daerah, yang sering menjadi garda depan menghadapi warga, tetapi tidak diberi perangkat memadai untuk merundingkan ulang desain proyek.

Celah kelima berkaitan dengan cara ketidakadilan spasial dan sosial dihasilkan ulang dalam transisi energi. Studi tentang komunitas pedesaan di kawasan periferal menunjukkan bahwa transisi rendah karbon justru dapat memperdalam posisi "pinggiran energi" ketika proyek ditempatkan di wilayah rentan, tetapi manfaatnya mengalir ke pusat-pusat ekonomi (O'Sullivan et al., 2020). Dalam rantai kebijakan, hal ini tampak ketika wilayah yang memiliki indeks kemiskinan tinggi, tanah luas, atau posisi politik lemah menjadi prioritas lokasi, dengan asumsi resistensi akan lebih mudah "dikelola". Komunitas yang sebelumnya sudah mengalami marjinalisasi—akses listrik buruk, layanan publik minim, suara politik lemah—kini kembali diminta menanggung beban infrastruktur baru. Resistensi yang muncul karenanya bukan sekadar penolakan proyek tertentu, melainkan protes terhadap pola historis penumpukan beban di wilayah yang sama.

Celah keenam muncul pada desain skema manfaat dan kompensasi, yang sering dibingkai dalam bahasa *business model* dan *cost–benefit analysis* yang sulit diperdebatkan oleh warga awam. Istilah *tariff*, *power purchase agreement*, dan *capacity payment*—yang pada dasarnya adalah kesepakatan harga, risiko, dan jaminan keuntungan—tidak dijelaskan dalam bahasa sederhana. Akibatnya, komunitas diundang dalam forum konsultasi ketika hampir semua parameter kunci sudah dikunci dalam kontrak yang sulit diubah. Di sini, kekuasaan tampil

dalam bentuk penguasaan atas kompleksitas: siapa yang mampu memahami dan mengotak-atik model finansial, ia yang menentukan pemaknaan "layak" dan "adil". Tanpa pendampingan yang independen, warga hanya bisa memilih antara menolak total atau menerima paket manfaat yang tidak mereka desain, yang keduanya berpotensi memicu konflik jangka panjang.

Rantai kebijakan juga mengandung aspek simbolik yang sering diremehkan: cara negara menjelaskan proyek kepada publik sebagai bagian dari "visi hijau" atau "masa depan bersih". Narasi *kebijakan energi berkelanjutan* seringkali menekankan urgensi global—krisis iklim, komitmen internasional, risiko stranded assets—namun melewatkan keseharian warga yang akan berbagi ruang dengan turbin angin, panel surya, atau jaringan transmisi. Ketika bahasa komunikasi lebih sibuk mengutip konferensi internasional daripada mendengar cerita petani, nelayan, atau masyarakat adat, masyarakat merasakan jarak yang lebar antara "agenda besar" dan kehidupan mereka. Di banyak konteks, jurang simbolik ini menjadi bahan bakar bagi rumor, ketidakpercayaan, dan politisasi konflik oleh aktor lain yang melihat peluang mobilisasi.

Rantai kebijakan juga rentan mengabaikan dimensi waktu: bagaimana efek proyek berubah sepanjang siklus hidupnya. Di tahap awal, janji lapangan kerja dan kompensasi tampak menarik, terutama bagi komunitas yang kekurangan peluang ekonomi. Namun setelah konstruksi selesai dan proyek memasuki fase operasi yang lebih "sunyi", intensitas interaksi antara pengelola proyek dan warga biasanya menurun drastis. Itu berarti kanal penyelesaian keluhan, penyesuaian kompensasi, atau mitigasi dampak baru menjadi kabur. Celah temporal ini jarang diantisipasi dalam desain kelembagaan, padahal banyak sumber resistensi muncul beberapa tahun setelah proyek berjalan, ketika warga menyadari bahwa

manfaat yang dijanjikan tak sebanding dengan perubahan lanskap dan dinamika sosial di desa mereka. Kebijakan yang dirancang hanya untuk "melewati fase kritis" perizinan dan konstruksi akan meninggalkan bom waktu ketidakpuasan.

Jika ditarik dari atas, rantai kebijakan tampak sangat rapi: ada target nasional, peta jalan transisi, dan perangkat regulasi yang mengatur siapa melakukan apa. Namun di balik kerapian formal itu, studi kebijakan menunjukkan bahwa desain dan implementasi kebijakan energi selalu dinegosiasikan oleh koalisi aktor dengan kepentingan berbeda, dari perusahaan besar hingga organisasi masyarakat sipil (Werner & Lazaro, 2023). Dalam konteks ini, celah institusional bukanlah "kecelakaan teknis", melainkan cerminan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang: siapa yang hadir di meja perumusan, siapa yang punya sumber daya untuk melakukan lobi, dan siapa yang diposisikan sekadar sebagai penerima manfaat atau objek sosialisasi. Dengan kata lain, setiap celah dalam rantai—dari penentuan target hingga skema kompensasi—adalah situs politik yang memengaruhi peluang resistensi atau penerimaan warga.

Dari perspektif warga, rantai kebijakan itu seringkali hanya tampak sebagai serangkaian tamu dari luar desa: konsultan, aparat pemerintah, dan perwakilan pengembang yang datang dengan presentasi dan dokumen. Mereka menyebut angka investasi, kapasitas terpasang, dan proyeksi penurunan emisi, namun jarang mengelaborasi bagaimana *kebijakan energi terbarukan* akan mempengaruhi pola penghidupan sehari-hari, hak atas tanah, atau hubungan sosial di komunitas. Ketika warga mengajukan pertanyaan yang dianggap "di luar agenda"—misalnya tentang sejarah konflik tanah atau pengalaman buruk dengan proyek masa lalu—jawaban yang muncul seringkali normatif dan menghindar. Rantai kebijakan, yang di atas tampak lurus dan teknokratis, di bawah terasa penuh ruang kosong

penjelasan. Di ruang-ruang kosong itulah rumor, kecurigaan, dan narasi tandingan tumbuh subur.

Penting untuk mencermati bahwa enam celah institusional ini saling memperkuat, bukan berdiri sendiri. Target nasional yang ditetapkan secara sempit memicu desain proyek yang mengabaikan keanekaragaman lokal; fragmentasi kewenangan membuat pengaduan warga melayang tanpa tindak lanjut; ketidakadilan spasial menempatkan proyek di wilayah yang secara historis kurang berdaya; skema manfaat yang kompleks menutup pintu negosiasi yang sejajar; narasi hijau yang abstrak memperlebar jarak simbolik; dan lemahnya mekanisme jangka panjang mengubah janji menjadi sumber frustrasi. Jika setiap celah dibiarkan, rantai kebijakan menjadi jalur pengaliran risiko ke bawah dan pengaliran manfaat ke atas. Resistensi komunitas, dalam skema ini, tidak bisa lagi dibaca sebagai hambatan bagi transisi, melainkan sebagai sinyal bahwa konfigurasi kekuasaan dalam kebijakan energi sedang dipertanyakan.

Dengan demikian, memahami rantai kebijakan dari target nasional ke proyek di lapangan berarti sekaligus membongkar filosofi kekuasaan yang mengalir di dalamnya. Subbagian 15.1 ini memetakan bagaimana setiap simpul kebijakan—dari angka bauran energi hingga detail kontrak—memiliki daya untuk mengundang kepercayaan atau memicu resistensi. Enam celah institusional yang telah disinggung akan menjadi benang merah bagi pembahasan berikutnya: bagaimana tata kelola multi-level dapat direkayasa ulang agar transisi energi tidak lagi dipahami sebagai agenda teknokratis yang dipaksakan dari atas, tetapi sebagai proses politik yang diakui, dinegosiasikan, dan diawasi bersama. Hanya dengan cara itu, rantai kebijakan tidak lagi berfungsi sebagai kanal penumpukan kekuasaan, melainkan sebagai infrastruktur kelembagaan yang memungkinkan komunitas lokal ikut menentukan bentuk masa depan energi di wilayah mereka.

15.2 Celah Informasi: Siapa yang Tahu Apa dan Kapan

Celah informasi dalam kebijakan energi adalah pintu masuk paling halus sekaligus paling menentukan bagi beroperasinya kekuasaan: siapa yang tahu apa, kapan, dan dalam bentuk pengetahuan seperti apa. Di atas kertas, negara dan perusahaan sering mengklaim sudah "terbuka" karena dokumen tersedia di situs web atau papan pengumuman. Namun, dari perspektif filsafat kekuasaan, informasi bukan hanya soal ketersediaan, tetapi tentang struktur ketimpangan yang menentukan siapa yang mampu mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi itu untuk bertindak. Ketika analisis risiko, skema pembiayaan, atau konsekuensi hukum hanya dapat dimengerti oleh segelintir ahli, maka keterbukaan berubah menjadi formalitas birokratis. Komunitas lokal tetap berada dalam posisi "terinformasikan secukupnya" untuk menyetujui, tetapi tidak cukup untuk menegosiasikan. Di sinilah celah informasi menjadi celah politik: kekurangan pengetahuan bukan sekadar kekosongan, melainkan hasil dari desain kelembagaan yang mengatur aliran informasi secara selektif.

Dalam rantai kebijakan energi, informasi tidak mengalir seragam dari pusat ke daerah dan ke komunitas. Pada tingkat makro, pemerintah pusat mengelola data proyeksi permintaan energi, komitmen iklim, dan kalkulasi fiskal yang melibatkan model-model kompleks. Di tingkat perusahaan, informasi tentang risiko finansial, kontrak jangka panjang, dan rencana ekspansi disimpan dalam dokumen yang dilindungi kerahasiaan komersial. Sementara itu, di desa yang menjadi lokasi proyek, warga biasanya hanya menerima selebaran, presentasi singkat, atau penjelasan lisan yang sangat disaring. Ketika ada ketegangan, perbedaan kualitas dan kedalaman informasi ini tidak tampak sebagai isu utama, padahal ia menjadi akar sulitnya dialog setara. Celah informasi bekerja seperti filter halus: semakin ke bawah, informasi semakin disederhanakan,

dan dalam proses penyederhanaan itu banyak potensi keberatan atau tawar-menawar yang ikut lenyap.

Celah informasi menjadi sangat kentara ketika *kebijakan energi terbarukan* dipromosikan dengan bahasa teknokratis yang menekankan urgensi, efisiensi, dan besarnya manfaat nasional, tetapi tidak disertai penjelasan rinci mengenai konsekuensi lokal. Narasi "transisi hijau" yang diulang-ulang menciptakan kesan bahwa proyek yang diusulkan tidak perlu dipertanyakan, karena berada di pihak "kebaikan" lingkungan. Dalam situasi ini, warga yang bertanya tentang dampak kesehatan, akses lahan, atau perubahan pola penghidupan mudah dilabeli sebagai tidak paham atau anti-progres. Padahal, sering kali pertanyaan mereka justru menunjuk pada area yang sengaja dikaburkan: bagaimana status tanah setelah puluhan tahun, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan ekologi, dan sejauh mana mereka dapat terlibat dalam pengambilan keputusan di masa depan. Ketika isu-isu ini tidak dijelaskan sejak awal, konflik hampir pasti muncul di tahap berikutnya.

Filsafat kekuasaan membantu kita melihat bahwa celah informasi bukan sekadar masalah komunikasi yang kurang "sosialisasi", tetapi struktur yang mengatur urutan pengungkapan. Pertanyaan "kapan" informasi diberikan sama pentingnya dengan "apa" yang diinformasikan. Sering kali, aspek-aspek krusial—seperti jangka waktu konsesi, skala kapasitas, atau isi klausul ganti rugi—baru muncul belakangan, ketika komitmen politik dan finansial sudah terkunci. Pada tahap ini, ruang koreksi menjadi sangat sempit; warga hanya diberi pilihan menyetujui dengan beberapa penyesuaian kecil atau menolak dengan risiko dicap sebagai penghambat pembangunan. Dengan kata lain, keterlambatan informasi adalah bentuk kekuasaan: ia menggeser momen deliberasi yang seharusnya terjadi di awal menjadi ritual pembenaran di akhir.

Secara empirik, studi tentang keadilan energi menunjukkan bahwa salah satu dimensi kunci ketidakadilan prosedural adalah keterbatasan akses informasi yang bermakna. Dalam konteks transisi energi pedesaan di Tiongkok, misalnya, rendahnya skor keadilan prosedural dikaitkan langsung dengan kurangnya pelibatan rumah tangga dan kurangnya transparansi dalam desain kebijakan, termasuk minimnya akses terhadap informasi terkait kebijakan yang berdampak pada warga (Zhong et al., 2024). Temuan semacam ini memperkuat argumen bahwa celah informasi bukan fenomena abstrak; ia mengukur seberapa jauh kebijakan dirancang dan diimplementasikan dengan menganggap warga sebagai subjek yang layak diberi pengetahuan penuh tentang apa yang akan mengubah kehidupan mereka. Tanpa itu, hak untuk berpartisipasi berubah menjadi formalitas kosong.

Pada level *kebijakan pemerintah*, celah informasi sering diperkuat oleh struktur bahasa dan format dokumen. Dokumen kebijakan, analisis dampak lingkungan, dan kontrak kerap ditulis dengan terminologi teknis dan hukum yang sulit diurai pembaca awam. Istilah seperti *power purchase agreement*, *capacity factor*, atau *feed-in tariff*—yang pada dasarnya menyangkut siapa membayar apa, kepada siapa, dan sampai kapan—tidak diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Dalam situasi ini, "transparansi" yang dimaknai sekadar sebagai publikasi dokumen justru meneguhkan hierarki pengetahuan: mereka yang menguasai istilah teknis menguasai tafsir atas masa depan proyek. Tanpa upaya sadar untuk menjembatani bahasa teknis dan bahasa sehari-hari, ruang partisipasi yang dibuka tetap timpang.

Celah informasi juga terkait erat dengan bagaimana waktu konsultasi diatur. Sering kali, warga diundang ke pertemuan ketika desain proyek sudah hampir final; proposal lokasi, kapasitas, dan skema pembiayaan sudah disepakati antara

pemerintah dan pengembang. Konsultasi publik lalu menjadi mekanisme untuk menyampaikan informasi satu arah, bukan ruang untuk membentuk keputusan. Di sini, pertanyaan "siapa yang tahu apa dan kapan" menjadi sangat konkret: pengembang dan pejabat telah memproses informasi teknis dan politik selama berbulan-bulan, sementara warga baru mengetahui detail proyek beberapa minggu sebelum batas waktu tanggapan. Kesenjangan ini membuat warga selalu berada pada posisi reaktif, bukan proaktif, dan memperkuat kesan bahwa keputusan sejatinya sudah diambil tanpa mereka.

Di sisi lain, ada pula upaya melawan celah informasi melalui jaringan komunitas energi dan gerakan warga lintas negara. Penelitian mengenai jaringan transnasional komunitas energi di Uni Eropa menunjukkan bagaimana kelompok ini membangun *counterpower* dengan memfasilitasi akses warga terhadap informasi regulasi, memproduksi pengetahuan teknis dalam bahasa yang dapat digunakan untuk bernegosiasi, serta mengidentifikasi hambatan partisipasi dalam kerangka kebijakan energi yang kompleks (Esteves et al., 2024). Contoh ini menunjukkan bahwa informasi dapat menjadi sumber kekuasaan tandingan, bukan hanya monopoli negara dan korporasi. Namun, kekuatan jaringan semacam ini sangat bergantung pada kapasitas literasi, dukungan organisasi, dan kemampuan menjembatani bahasa teknis dengan pengalaman hidup komunitas, sesuatu yang tidak selalu tersedia di semua konteks lokal.

Celah informasi berinteraksi erat dengan narasi besar tentang *kebijakan energi berkelanjutan* yang sering diangkat dalam forum nasional dan internasional. Narasi tersebut menekankan pentingnya pengurangan emisi, diversifikasi sumber energi, dan peningkatan efisiensi. Namun, jika narasi ini tidak dilengkapi informasi konkret tentang bagaimana beban transisi akan didistribusikan—siapa yang membayar tarif baru,

siapa yang kehilangan akses terhadap lahan, siapa yang berpotensi dipekerjakan dalam rantai nilai baru—maka ia mudah dibaca sebagai slogan yang jauh dari kenyataan warga. Dalam kondisi demikian, pihak yang merasa dirugikan akan mencari sumber informasi alternatif: media sosial, aktivis lokal, atau aktor politik yang memanfaatkan keresahan. Ketika saluran informasi resmi tidak dipercaya, ruang penafsiran terbuka lebar, dan konflik menjadi lebih sulit dijembatani.

Aspek lain dari celah informasi adalah apa yang bisa disebut sebagai *ketimpangan arsip*: tidak semua pengalaman dan pengetahuan lokal tercatat dan diakui sebagai "informasi yang sah" dalam proses kebijakan. Cerita tentang banjir yang kian sering, perubahan pola angin, atau hilangnya spesies tertentu di sekitar desa mungkin dianggap sekadar anekdot, bukan data. Sebaliknya, laporan konsultan yang menggunakan istilah-istilah statistik dan peta berwarna akan langsung mendapatkan status sebagai "bukti". Ketika hanya jenis pengetahuan tertentu yang diakui, komunitas lokal dipaksa menyesuaikan cara bercerita agar muat dalam kategori teknokratik. Di sini kekuasaan bekerja dengan cara yang sangat halus: ia menentukan bukan hanya apa yang diketahui, tetapi juga cara mengatakannya agar diakui.

Celah informasi juga berkaitan dengan bagaimana konsep keadilan energi dipahami dan berubah dari waktu ke waktu. Kajian mengenai kebijakan energi di Belanda memperlihatkan bahwa pengertian tentang "kebijakan yang adil" berubah mengikuti konteks sosio-teknis dan pergeseran norma masyarakat, termasuk cara negara mengakui klaim warga yang terdampak (de Looze et al., 2024). Jika pemahaman keadilan bergeser, tetapi pola informasi tidak ikut berubah—misalnya, warga masih tidak memiliki akses ke informasi yang relevan untuk mempertanyakan keputusan—maka pergeseran normatif itu hanya akan hidup di level wacana. Persoalannya bukan hanya

memberi tahu warga apa yang sudah diputuskan, melainkan menyediakan informasi dan waktu yang cukup bagi mereka untuk menggunakan kerangka keadilan baru itu dalam praktik.

Dari perspektif komunitas, celah informasi sering dirasakan dalam bentuk sangat konkret: undangan rapat yang mendadak, dokumen tebal yang hanya tersedia di kantor kecamatan, atau istilah-istilah asing yang tidak pernah dijelaskan. Dalam konteks *kebijakan energi terbarukan*, warga bisa saja tahu bahwa proyek yang masuk ke desa mereka dipromosikan sebagai solusi iklim, tetapi tidak pernah mendapatkan gambaran runtut tentang siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana alur keuntungan, dan apa hak mereka jika terjadi pelanggaran. Ketika pertanyaan ini tidak dijawab secara memadai, sebagian warga memilih diam, sebagian lain mulai membangun jaringan informasi alternatif dengan komunitas di wilayah lain yang mengalami proyek serupa. Proses saling berbagi cerita ini sering menjadi titik balik, ketika komunitas mulai menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan "kasus tunggal", melainkan bagian dari pola yang lebih luas.

Untuk menutup celah informasi, reformasi tidak bisa berhenti pada kewajiban "publikasi dokumen". Diperlukan perubahan cara negara dan korporasi memaknai informasi sebagai hak, bukan sebagai sumber daya yang dibagi seperlunya. Ini berarti merancang proses *co-production of knowledge*—atau produksi pengetahuan bersama—di mana warga terlibat sejak tahap awal dalam mengidentifikasi pertanyaan kunci, menetapkan format data yang relevan, dan menentukan cara informasi itu disebarkan. Di sini, istilah-istilah seperti *data portal*, *open access*, atau *public hearing* harus diterjemahkan ke dalam praktik yang benar-benar memungkinkan warga mengakses, memahami, dan menggunakan informasi, bukan sekadar menimbun berkas di ruang digital yang sunyi.

Pada akhirnya, celah informasi "siapa yang tahu apa dan kapan" adalah inti dari relasi kekuasaan dalam multi-level governance energi. Jika informasi terus mengalir vertikal—dari konsultan ke kementerian, dari kementerian ke pemerintah daerah, dan hanya sebagian kecil yang menetes ke warga—maka resistensi komunitas bukan kejutan, melainkan konsekuensi logis. Sebaliknya, bila arsitektur kelembagaan diubah sehingga informasi mengalir dua arah, komunitas didengar sebelum keputusan besar diambil, dan hak atas pengetahuan diakui sebagai bagian dari hak atas keadilan, maka kemungkinan koeksistensi antara proyek energi dan kehidupan lokal terbuka lebih lebar. Subbagian 15.2 ini menempatkan celah informasi sebagai salah satu dari enam celah institusional yang menjembatani target nasional dan friksi lokal, sekaligus sebagai medan utama di mana filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan diuji dalam praktik.

15.3 Celah Representasi: Siapa Yang Berbicara Atas Nama Siapa

Celah representasi dalam kebijakan energi berkelanjutan menyentuh pertanyaan paling sensitif dalam filsafat kekuasaan: siapa yang berhak berbicara atas nama siapa. Dalam banyak proses kebijakan, kehadiran "wakil" masyarakat seolah menjamin bahwa suara warga telah diakomodasi. Namun, jika dilihat lebih dekat, sering kali yang hadir adalah segelintir elite lokal, tokoh adat yang dekat dengan pemerintah, atau organisasi masyarakat sipil yang agenda dan kedekatan politiknya tidak selalu sejalan dengan pengalaman sehari-hari warga terdampak. Representasi lalu berubah menjadi teknik pengelolaan ketidakpuasan: suara yang keras disalurkan ke forum-forum terpilih, sementara keragaman pandangan di dalam komunitas diratakan menjadi satu "aspirasi". Subbagian ini mengurai bagaimana celah representasi bekerja dalam rantai kebijakan

energi, mulai dari ruang negosiasi di tingkat nasional hingga forum konsultasi desa, dan bagaimana ketimpangan ini menjadi sumber penting resistensi komunitas.

Dalam kerangka multi-level governance, representasi tidak pernah netral. Di tingkat nasional, *policy makers* menunjuk kelompok tertentu sebagai "pemangku kepentingan kunci", misalnya asosiasi pengusaha energi, LSM lingkungan besar, atau perwakilan pemerintah daerah. Di bawah, pemerintah lokal menunjuk perangkat desa, tokoh agama, atau ketua kelompok tani sebagai suara sah komunitas. Namun, pemilihan "wakil" ini selalu melekat pada struktur kekuasaan yang ada: siapa yang dekat dengan birokrasi, siapa yang punya jejaring, siapa yang dianggap "mewakili" tanpa perlu konsultasi. Di titik inilah celah representasi terbentuk. Kelompok-kelompok yang lebih marginal—perempuan, buruh migran, masyarakat adat, atau generasi muda—sering hanya muncul sebagai objek pembicaraan, bukan subjek yang berbicara. Mereka disebut, tetapi jarang diajak berbicara langsung.

Celah representasi menjadi sangat kentara ketika *kebijakan energi terbarukan* dipromosikan sebagai agenda nasional yang membawa manfaat sangat besar, tetapi ruang untuk menyusun "siapa berbicara atas nama siapa" ditentukan secara sempit. Proyek besar sering hanya mengundang kepala desa dan beberapa tokoh lokal sebagai tanda bahwa masyarakat telah diajak bicara. Dalam pertemuan, suara kritis mudah ditekan dengan logika bahwa "kepala desa sudah sepakat". Padahal, di balik itu bisa ada faksi-faksi dalam komunitas yang tidak setuju dengan bentuk kompensasi, mekanisme pembagian manfaat, atau dampak sosial yang mereka rasakan. Ketika perbedaan itu tidak menemukan kanal representasi, ia tidak hilang; ia hanya menunggu momen untuk muncul sebagai resistensi yang tampak tiba-tiba di mata negara dan pengembang.

Representasi juga menyangkut bagaimana koalisi masyarakat sipil mengorganisir dirinya untuk berbicara di ruang kebijakan. Studi mengenai koalisi masyarakat sipil dalam kebijakan energi di Thailand menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok ini membentuk wacana tandingan terhadap narasi resmi negara dan membangun jejaring untuk memengaruhi agenda energi nasional, termasuk melalui strategi diskursif yang cermat (Aunphattanasilp, 2019). Dalam konteks ini, pertanyaannya bukan hanya siapa yang diundang ke meja negosiasi, tetapi siapa yang sanggup menyusun narasi, mengemas data, dan memanfaatkan bahasa teknokratis untuk memberikan bobot pada klaimnya. Komunitas lokal yang tidak didukung jejaring semacam ini sering kali tetap berada di pinggiran, bahkan ketika secara formal "diwakili" oleh organisasi yang mengaku berbicara atas nama mereka.

Celah representasi di tingkat lokal sering muncul dari ketegangan antara struktur formal dan struktur sosial. Secara formal, kepala desa, BPD, atau lembaga adat dianggap sebagai pintu masuk utama untuk mendengar suara komunitas. Namun, struktur sosial di lapangan mungkin jauh lebih berlapis: ada kelompok perempuan yang memiliki ruang musyawarah sendiri, pemuda yang mengelola jaringan informasi melalui media sosial, atau kelompok minoritas yang selama ini tidak memiliki posisi formal. Ketika negara dan perusahaan hanya mengandalkan struktur formal, mereka berisiko mengabaikan kelompok-kelompok yang sebenarnya paling terdampak. Akibatnya, proses representasi menghasilkan "masyarakat" yang homogen dan patuh, sementara aspirasi dan kecemasan kelompok tertentu mengendap sebagai ketidakpuasan laten yang suatu saat bisa meletup dalam bentuk penolakan proyek.

Di tingkat yang lebih luas, *kebijakan pemerintah* sering menggunakan bahasa "komunitas lokal" dan "masyarakat setempat" seolah-olah unit sosial itu bersuara dengan satu

mulut. Dalam dokumen strategi energi, frasa seperti "telah dikonsultasikan dengan masyarakat" muncul tanpa penjelasan bagaimana proses tersebut memastikan keberagaman suara. Representasi direduksi menjadi daftar kehadiran, tanda tangan berita acara, atau notulen rapat singkat. Dalam kerangka filsafat kekuasaan, praktik semacam ini memperlihatkan bagaimana negara mengendalikan bukan hanya keputusan, tetapi juga definisi tentang siapa yang sah disebut "wakil rakyat". Ketika dokumen resmi mengafirmasi bahwa masyarakat sudah diwakili, posisi warga yang merasa tidak pernah diajak bicara menjadi sulit dibuktikan secara administratif, meskipun secara sosial sangat nyata.

Dimensi lain dari celah representasi adalah bagaimana model kepemilikan dan tata kelola proyek energi membentuk ruang bagi suara warga. Penelitian tentang struktur kepemilikan dan tata kelola dalam upaya demokratisasi energi di Inggris menunjukkan bahwa inisiatif energi yang dimiliki dan dikelola komunitas memungkinkan bentuk partisipasi dan representasi warga yang jauh lebih kuat dibandingkan model publik atau privat biasa (Lacey-Barnacle & Nicholls, 2022). Dalam proyek yang sepenuhnya dikendalikan perusahaan, warga cenderung hanya hadir sebagai pihak yang "dimintai persetujuan" atau "penerima kompensasi". Sebaliknya, dalam skema kepemilikan bersama, warga memiliki posisi formal dalam struktur organisasi, misalnya sebagai anggota koperasi atau pemegang saham kecil, sehingga mereka berhak atas informasi, suara dalam keputusan, dan akses terhadap manfaat finansial yang lebih langsung.

Representasi tidak hanya terjadi di ruang tatap muka, tetapi juga di ruang dokumen dan data. Dalam studi dampak lingkungan, misalnya, "warga" sering muncul sebagai kategori statistik: jumlah rumah tangga terdampak, tingkat pendapatan rata-rata, atau persentase penduduk yang bekerja di sektor

tertentu. Penggunaan kategori ini penting untuk analisis, tetapi juga punya efek politis: ia mereduksi wajah-wajah konkret, pengalaman, dan aspirasi ke dalam angka. Ketika keputusan kebijakan kemudian merujuk pada kategori statistik ini, pertanyaan tentang siapa yang berbicara atas nama siapa tergeser menjadi pertanyaan teknis tentang sampel dan metode survei. Padahal, di balik angka selalu ada pilihan: siapa yang diwawancarai, pertanyaan apa yang diajukan, dan bagaimana jawaban dibaca dalam kerangka kepentingan proyek.

Dalam konteks *kebijakan energi berkelanjutan*, wacana global sering menampilkan aktor tertentu sebagai juru bicara "masyarakat" atau "generasi muda", misalnya aktivis terkemuka, LSM internasional, atau figur publik yang diundang ke konferensi. Di satu sisi, kehadiran figur-figur ini penting untuk menekan pemerintah dan korporasi. Di sisi lain, ada risiko bahwa keberagaman klaim dan pengalaman yang sangat lokal menjadi ditutupi oleh narasi yang lebih mudah dipasarkan secara internasional. Komunitas yang mengalami dampak spesifik—misalnya hilangnya lahan penggembalaan atau perubahan tata air—bisa merasa bahwa pengalaman mereka tidak sepenuhnya terwakili oleh narasi makro tentang krisis iklim dan transisi hijau. Ketidaksesuaian ini dapat menjadi sumber kekecewaan dan memicu upaya komunitas untuk membangun saluran representasi alternatif.

Filsafat representasi kontemporer mengajukan gagasan *affectedness* sebagai dasar utama untuk menentukan siapa yang berhak berbicara dan sejauh mana suara mereka harus diperhitungkan. Alih-alih bertumpu semata pada kriteria kewarganegaraan atau posisi formal, gagasan ini menekankan bahwa mereka yang paling terdampak secara langsung oleh kebijakan seharusnya memiliki bobot suara lebih besar dalam proses pengambilan keputusan (Sharman, 2025). Dalam proyek energi, ini berarti bahwa komunitas yang lahannya diambil,

ruang hidupnya berubah, atau mata pencahariannya terdampak harus ditempatkan sebagai pusat deliberasi, bukan sekadar satu dari banyak "stakeholder". Namun, menerjemahkan prinsip ini ke dalam arsitektur kelembagaan menuntut perubahan besar: dari cara komite dibentuk, tata tertib rapat, hingga mekanisme keberatan dan banding.

Celah representasi juga tampak dalam cara konflik internal komunitas dibaca atau diabaikan. Ketika pemerintah dan perusahaan menemukan perbedaan pendapat di dalam desa, mereka sering memilih pihak yang paling mudah diajak bekerja sama dan memberinya posisi sebagai "wakil sah". Pihak lain dilabeli sebagai minoritas yang "sulit diajak berdialog" atau "dipolitisasi", padahal mereka mungkin mewakili kepentingan kelompok rentan yang tidak punya akses pada struktur kekuasaan lokal. Dalam jangka panjang, strategi ini bisa memperdalam fragmentasi sosial, karena proyek energi tidak hanya membawa turbin atau panel, tetapi juga memperkuat faksi-faksi politik tertentu dalam komunitas. Resistensi yang kemudian muncul bukan hanya ditujukan kepada proyek, tetapi juga kepada para "wakil" yang dianggap menggadaikan kepentingan bersama.

Dalam praktik multi-level governance, celah representasi terjadi bertingkat: di tingkat nasional, hanya sebagian organisasi masyarakat sipil yang rutin diundang ke ruang konsultasi; di tingkat provinsi, hanya pemerintah daerah tertentu yang dianggap "mitra strategis"; di tingkat lokal, hanya kelompok tertentu yang diberi ruang. Pola semacam ini menghasilkan rantai representasi yang rapuh, di mana banyak suara hilang di setiap mata rantai. Sementara itu, *kebijakan energi terbarukan* terus bergerak maju, didorong oleh komitmen internasional dan tekanan pasar. Ketika ketegangan memuncak, sering kali pemerintah pusat mengklaim bahwa semua prosedur telah diikuti dan semua pemangku kepentingan telah diajak bicara.

Klaim ini sah secara administratif, tetapi cacat secara etis jika proses representasi di setiap tingkat mengabaikan kelompok tertentu secara sistematis.

Menutup celah representasi tidak bisa dilakukan dengan menambah jumlah pertemuan atau memperbanyak undangan saja. Yang diperlukan adalah pergeseran cara memandang warga: dari objek yang butuh "penjelasan", menjadi subjek yang memiliki otoritas pengetahuan dan klaim sah atas masa depan wilayahnya. Ini menuntut desain ulang mekanisme representasi, misalnya dengan memastikan adanya kuota bagi kelompok terdampak langsung, mekanisme rotasi perwakilan, atau bentuk-bentuk forum yang lebih akrab dengan budaya musyawarah setempat. Selain itu, penting juga untuk menyediakan sumber daya—waktu, dukungan teknis, dan perlindungan hukum—agar perwakilan komunitas tidak sekadar hadir simbolis, tetapi dapat berbicara bebas tanpa takut terhadap represi atau stigmatisasi.

Pada akhirnya, pertanyaan "siapa yang berbicara atas nama siapa" adalah jantung dari konflik lokal dalam kebijakan energi. Selama representasi dikelola sebagai teknik pengendalian, bukan sebagai mekanisme pembagian kekuasaan, celah ini akan terus melahirkan resistensi, baik dalam bentuk penolakan terbuka maupun ketidakpercayaan senyap. Dalam konteks filsafat kekuasaan, memperbaiki representasi berarti memindahkan sebagian kewenangan mendefinisikan masa depan energi dari pusat ke pinggiran, dari meja rapat tertutup ke ruang pertemuan yang membuka suara mereka yang paling terdampak. Subbagian 15.3 mengajak kita melihat bahwa transisi energi bukan hanya masalah teknologi dan investasi, tetapi juga soal keberanian untuk mengubah siapa yang diberi hak bicara ketika masa depan bersama dipertaruhkan.

15.4 Celah Akuntabilitas: Sulitnya Melacak Penanggung Jawab

Celah akuntabilitas dalam kebijakan energi adalah momen ketika warga mencoba bertanya "siapa yang harus bertanggung jawab?" dan tidak ada satu pun lembaga yang bersedia mengakui peran secara utuh. Dalam struktur multi-level governance, keputusan tentang proyek energi biasanya diambil melalui rangkaian persetujuan: kementerian menyusun regulasi, lembaga perencanaan menyusun peta jalan, pemerintah daerah mengeluarkan izin, perusahaan menyusun desain teknis dan kontrak, sementara konsultan menyusun kajian dampak. Ketika konflik muncul—banjir meningkat, mata pencaharian hilang, janji kerja tak terealisasi—setiap aktor menunjuk ke aktor lain sebagai sumber masalah. Akuntabilitas berubah menjadi permainan *blame shifting*, yaitu praktik saling melempar kesalahan, sementara persoalan substantif tetap tak terjawab. Inilah inti celah akuntabilitas: bukan sekadar ketiadaan aturan, tetapi sebuah konfigurasi kekuasaan yang membuat tanggung jawab selalu mengalir tetapi tak pernah menetap.

Dalam diskursus *governance*, akuntabilitas sering disebut bersama transparansi, partisipasi, dan legitimasi, seolah empat konsep ini membentuk satu paket yang saling menguatkan. Namun, secara praktik, akuntabilitas sering tertinggal jauh di belakang. Banyak forum konsultasi dan publikasi dokumen yang digelar atas nama partisipasi dan keterbukaan, tetapi mekanisme untuk menindaklanjuti pelanggaran atau ketidakkonsistenan kebijakan jauh lebih kabur. Di tingkat global, kajian tentang institusi energi menunjukkan bahwa kompleksitas kelembagaan—banyaknya aktor dan forum—dapat melemahkan kejelasan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab menjawab tuntutan publik (Nasiritousi & Verhaegen, 2020). Ketika pola ini direplikasi di tingkat nasional

dan lokal, warga berhadapan dengan struktur yang sulit digugat: setiap lembaga mengklaim hanya menjalankan bagian kecil dari kebijakan, sehingga tak seorang pun dapat dituntut atas dampak keseluruhan.

Celah akuntabilitas menjadi sangat nyata ketika *kebijakan energi terbarukan* dijalankan melalui pola kemitraan publik–swasta yang rumit. Pemerintah pusat mungkin mengklaim bahwa proyek adalah bagian dari komitmen iklim nasional, pemerintah daerah menekankan bahwa mereka hanya mengikuti regulasi, sementara perusahaan menyatakan sekadar pelaksana yang mematuhi izin yang diberikan. Ketika terjadi pelanggaran atau dampak negatif, warga sering dihadapkan pada labirin institusional: pengaduan ke pemerintah daerah diarahkan ke kementerian, kementerian meminta warga menempuh jalur kontraktual dengan perusahaan, perusahaan menyuruh warga kembali ke pemerintah karena semua sudah "sesuai izin". Dalam lingkaran ini, akuntabilitas formal seolah ada, tetapi secara substantif warga tidak punya pintu yang jelas untuk menuntut pemulihan.

Dalam banyak kasus, kerumitan kontrak dan skema kelembagaan justru dirancang untuk menyebar risiko dan tanggung jawab. Proyek besar sering melibatkan *special purpose vehicle*—perusahaan khusus proyek—yang secara hukum terpisah dari perusahaan induk. Penjelasan sederhananya, *special purpose vehicle* adalah badan hukum yang dibuat untuk menampung risiko finansial dan operasional proyek tertentu, sehingga jika terjadi masalah, dampaknya tidak langsung merembet ke perusahaan utama. Bagi komunitas, struktur ini menyulitkan: pihak yang mereka lihat di lapangan mungkin bukan pihak yang punya kapasitas finansial dan politik untuk memperbaiki kerusakan. Di sisi lain, pemerintah yang memberikan izin merasa bahwa tanggung jawab teknis berada pada perusahaan, sementara kerugian sosial-lingkungan tidak

diakomodasi secara memadai dalam kontrak. Celah akuntabilitas pun menganga.

Dimensi lain dari celah akuntabilitas adalah pemisahan antara kewenangan pengambilan keputusan dan kapasitas untuk menanggung akibat. Kementerian bisa mengambil keputusan makro tentang zonasi energi atau insentif fiskal, tetapi dampak sosial dan ekologi dirasakan paling kuat di tingkat lokal. Regulasi sering kali memuat bahasa umum tentang perlindungan masyarakat dan lingkungan, namun tidak disertai mekanisme yang jelas tentang siapa menanggung biaya pemulihan bila terjadi kerusakan. Dalam literatur tata kelola energi, banyak penulis menekankan bahwa akuntabilitas hanya bermakna jika ada hubungan yang tegas antara keputusan, pelaksana, dan mekanisme sanksi; tanpa itu, tata kelola hanya merapikan prosedur tanpa mengubah distribusi tanggung jawab. Bagi komunitas yang terdampak, celah ini berarti menghadapi risiko tanpa jaminan pemulihan yang setara.

Dalam kerangka *kebijakan pemerintah*, akuntabilitas sering dijalankan melalui indikator kinerja, audit, dan laporan tahunan. Namun, indikator tersebut umumnya fokus pada output administratif—jumlah proyek, dana terserap, target kapasitas terpasang—bukan pada apakah warga mendapatkan pemulihan yang adil ketika mengalami dampak negatif. Ketika laporan kinerja menegaskan bahwa semua target tercapai, tidak ada ruang untuk mengakui kegagalan dalam menangani keluhan komunitas. Di sisi lain, lembaga pengawas eksternal, seperti parlemen atau badan pemeriksa, biasanya bekerja dengan horizon waktu dan alat ukur yang berbeda dari pengalaman sehari-hari warga. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan persepsi: di atas, kebijakan tampak sukses; di bawah, rasa ketidakadilan justru menguat.

Celah akuntabilitas juga diperparah oleh fragmentasi sektor. Proyek energi hampir selalu bersinggungan dengan

sektor lain: lingkungan, kehutanan, tata ruang, sosial, dan keuangan. Bila terjadi konflik, warga harus mengajukan keluhan ke berbagai kantor yang tidak saling tersambung. Dinas lingkungan berbicara soal baku mutu dan prosedur analisis dampak, dinas sosial mungkin menyebut program kompensasi, sementara dinas energi menekankan bahwa kewenangan mereka terbatas pada aspek teknis. Masing-masing lembaga dapat membuktikan bahwa mereka telah mengikuti prosedur, tetapi tidak ada satu pun yang memegang mandat eksplisit untuk memastikan keadilan substantif bagi komunitas. Dalam konfigurasi semacam ini, akuntabilitas berubah menjadi kepatuhan parsial, bukan tanggung jawab menyeluruh atas dampak kebijakan.

Dari sudut pandang komunitas lokal, sulitnya melacak penanggung jawab konkret memunculkan kelelahan politik. Setelah berulang kali mengadu ke kantor pemerintah, menghadiri rapat dengar pendapat, atau bahkan menempuh jalur hukum, banyak warga sampai pada kesimpulan bahwa sistem dirancang untuk mengulur, bukan menyelesaikan. Di sinilah muncul praktik-produk adaptatif: beberapa kelompok memilih bernegosiasi langsung dengan perusahaan, mengusahakan kesepakatan informal di luar kerangka resmi; yang lain membangun jaringan dengan organisasi masyarakat sipil untuk menekan negara dari luar. Namun, strategi-strategi ini tidak selalu mengarah pada akuntabilitas yang adil; sering kali hanya menghasilkan konsesi jangka pendek yang bergantung pada posisi tawar sementara, bukan perubahan struktural dalam distribusi tanggung jawab.

Celah akuntabilitas juga memiliki aspek temporal yang penting, terutama dalam konteks *kebijakan energi berkelanjutan* yang diklaim berorientasi jangka panjang. Kontrak proyek bisa berlangsung 25–30 tahun, sementara para pejabat yang menandatangani izin atau menyusun regulasi mungkin hanya

menjabat beberapa tahun. Ketika masalah muncul setelah satu dekade, sulit menelusuri kembali siapa yang dulu mengambil keputusan, dan lebih sulit lagi meminta pertanggungjawaban pribadi. Dalam situasi ini, tanggung jawab didistribusikan ke "institusi" secara abstrak, sementara individu yang membuat pilihan strategis sudah berpindah posisi atau pensiun. Bagi warga, ini menimbulkan kesan bahwa negara bisa mengambil keputusan besar tanpa konsekuensi personal apa pun bagi pengambil kebijakan.

Dalam literatur tentang *energy justice* dan regulasi energi, sejumlah penulis menekankan bahwa akuntabilitas yang efektif membutuhkan perangkat kelembagaan yang menghubungkan perlindungan konsumen, akses informasi, dan ruang untuk menggugat keputusan regulator (Lavrijssen & Vitéz, 2021). Jika regulator energi hanya fokus pada stabilitas pasokan dan efisiensi pasar, tetapi tidak memiliki mekanisme kuat untuk merespons keluhan komunitas tentang tarif, kualitas layanan, atau dampak proyek, maka akuntabilitas publik rapuh. Dalam konteks proyek energi besar, lembaga regulator sering memosisikan diri sebagai penjaga "kepentingan sistem", sementara persoalan ketidakadilan lokal dianggap isu sampingan. Padahal, tanpa mekanisme yang memungkinkan komunitas menggugat baik perusahaan maupun regulator, kepercayaan terhadap keseluruhan kerangka kebijakan energi akan tergerus.

Filsafat kekuasaan mengajak kita membaca celah akuntabilitas bukan sebagai kebetulan administratif, tetapi sebagai cara tertentu mengelola konflik. Dengan menyebar tanggung jawab ke banyak aktor, sistem kebijakan menciptakan zona abu-abu di mana kritik sulit diarahkan, tuntutan sulit difokuskan, dan gerakan warga mudah kelelahan. Pola ini memberi keuntungan bagi aktor kuat: perusahaan bisa berlindung di balik izin resmi, pejabat bisa berlindung di balik

prosedur, dan lembaga pusat bisa berlindung di balik retorika komitmen iklim. Akuntabilitas yang sejati justru menuntut sebaliknya: identifikasi jelas tentang siapa yang memutuskan, dengan dasar apa, dan melalui mekanisme apa keputusan tersebut dapat ditinjau, diperbaiki, atau dibatalkan.

Upaya memperbaiki celah akuntabilitas perlu dimulai dari tahap perancangan institusi dan kontrak, bukan hanya dari penanganan konflik ketika masalah sudah meledak. Untuk itu, standar-standar tata kelola—baik nasional maupun internasional—perlu mensyaratkan mekanisme *grievance* yang jelas, yakni jalur pengaduan yang mudah diakses, dengan batas waktu penanganan, dan hak warga untuk mendapatkan tanggapan tertulis. Dalam konteks *kebijakan energi terbarukan*, komitmen terhadap iklim harus diterjemahkan ke dalam prosedur yang mengakui hak warga atas pemulihan, bukan hanya hak abstrak atas lingkungan yang bersih. Jika prosedur keberatan dirancang hanya untuk menunjukkan bahwa negara "mendengarkan", tanpa kewajiban tindak lanjut yang konkret, maka akuntabilitas tetap menjadi retorika.

Penguatan akuntabilitas juga memerlukan penataan ulang hubungan antara tingkat pusat dan lokal. Ketika konflik terjadi di desa atau kabupaten, warga sering berada dalam posisi terjepit: pemerintah daerah terlalu bergantung pada proyek untuk pemasukan dan citra pembangunan, sementara pemerintah pusat jauh dan sulit diakses. Beberapa studi tentang tata kelola transisi energi menunjukkan bahwa keberhasilan mengurangi ketegangan bergantung pada adanya saluran akuntabilitas lintas-level, di mana pemerintah pusat dapat turun tangan jika pemerintah daerah atau perusahaan mengabaikan hak komunitas (Ali & Kim, 2024). Tanpa saluran semacam itu, akuntabilitas berhenti di tingkat yang paling rentan terhadap tekanan politik dan ekonomi.

Pada akhirnya, persoalan "sulitnya melacak penanggung jawab" adalah cermin dari bagaimana kekuasaan diorganisasikan dalam kebijakan energi. Selama desain kelembagaan dan kontraktual disusun untuk memisahkan keputusan dari konsekuensi, celah akuntabilitas akan terus memicu resistensi komunitas. Dari sudut pandang etis, transisi energi yang adil menuntut lebih dari sekadar perubahan teknologi dan target emisi; ia menuntut pergeseran cara kita memahami tanggung jawab: bukan sebagai beban yang boleh dipindahkan sesuka hati, tetapi sebagai komitmen yang melekat pada setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan orang lain. Subbagian 15.4 menunjukkan bahwa menutup celah akuntabilitas berarti berani merancang ulang institusi sehingga warga tidak lagi berhadapan dengan tembok abstrak bernama "sistem", tetapi dengan aktor-aktor konkret yang dapat dimintai jawaban, koreksi, dan pemulihan.

15.5 Celah Distribusi Manfaat–Beban: Ketimpangan Spasial dan Sosial

Celah distribusi manfaat–beban adalah pintu masuk penting untuk membaca bagaimana kekuasaan bekerja dalam kebijakan energi. Pertanyaan dasarnya tampak sederhana: siapa yang menikmati manfaat transisi energi, dan siapa yang menanggung bebannya? Namun, di balik pertanyaan itu terdapat konfigurasi institusional yang kompleks, di mana keputusan tata ruang, skema pembiayaan, dan desain kontrak menentukan arah aliran manfaat dan lokasi penumpukan risiko. Wilayah yang dianggap strategis untuk produksi sering kali adalah desa, pesisir, dan kawasan adat yang jauh dari pusat politik, tetapi dekat dengan sumber daya alam. Sementara itu, pusat konsumsi dan pusat keuangan berada di kota-kota besar yang jarang berhadapan langsung dengan kebisingan turbin, perubahan lanskap, atau gangguan mata pencaharian. Dengan

kata lain, manfaat cenderung mengalir ke pusat kekuasaan ekonomi, sedangkan beban dikirim ke pinggiran yang daya tawarnya lemah.

Literatur tentang *energy justice* membantu menjelaskan bahwa proyek energi lokal tidak otomatis membawa keadilan, meskipun dikemas sebagai pembangunan hijau. Studi tentang proyek energi lokal di El Hierro dan Tilos menunjukkan bahwa inisiatif energi yang melibatkan warga memang bisa memberdayakan komunitas secara ekonomi dan sosial, tetapi hanya jika desainnya memperhitungkan suara kelompok yang selama ini terpinggirkan, termasuk perempuan dan kelompok marjinal lain (Tsagkari, 2022). Pendekatan berbasis gender dalam evaluasi proyek menyingkap bahwa distribusi manfaat di dalam komunitas sendiri bisa sangat timpang, walaupun proyek tersebut dipromosikan sebagai contoh keberhasilan energi terbarukan. Ini memberi pelajaran penting: ketimpangan manfaat–beban tidak hanya terjadi antara pusat dan pinggiran, tetapi juga di dalam komunitas, jika struktur sosial internalnya tidak diperhatikan.

Dalam konteks transisi menuju *kebijakan energi terbarukan*, narasi resmi sering menekankan bahwa proyek besar akan membawa lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan peluang usaha baru. Namun, bagi warga di sekitar lokasi proyek, yang pertama-tama muncul justru pertanyaan tentang hilangnya lahan, akses terhadap air, atau terganggunya praktik budaya yang terkait erat dengan ruang hidup mereka. Pada saat yang sama, manfaat seperti tarif listrik yang stabil, kredit hijau, atau peluang investasi justru lebih mudah diakses oleh kelompok berpendapatan menengah ke atas di kota. Ketika perbedaan pengalaman ini tidak diakui, janji "manfaat kolektif" terdengar abstrak. Bagi banyak komunitas, pengorbanan yang diminta sangat konkret dan langsung, sementara manfaatnya bersifat tidak pasti, ditunda, dan sering kali terjadi di tempat lain. Dari sinilah rasa ketidakadilan menguat dan berubah menjadi resistensi.

Aspek spasial dari celah distribusi terlihat sangat tajam dalam kasus-kasus pembangunan ladang angin skala besar di wilayah yang secara historis telah mengalami marginalisasi. Penelitian tentang ladang angin di Isthmus of Tehuantepec, Meksiko, menunjukkan bagaimana proyek-proyek ini memicu konflik sosial karena warga merasa bahwa beban perubahan lingkungan dan sosial ditanggung oleh komunitas lokal, sementara keuntungan finansial terutama dinikmati oleh perusahaan dan investor eksternal (Martínez-Mendoza et al., 2021). Di banyak kasus, warga memang menerima kompensasi atau sewa lahan, tetapi nilainya jauh lebih kecil dibanding nilai listrik yang diproduksi dan keuntungan jangka panjang yang diperoleh pemilik proyek. Ketika ketimpangan ini disadari dan dibicarakan secara terbuka, proyek energi tidak lagi dilihat sebagai simbol kemajuan, tetapi sebagai perpanjangan dari pola eksploitasi lama yang kini berbalut bahasa hijau.

Celah distribusi manfaat–beban juga bersifat sosial: dalam komunitas yang sama, kelompok tertentu bisa menikmati lebih banyak manfaat sementara kelompok lain menyerap lebih banyak beban. Pemilik lahan luas, misalnya, mungkin mendapat pembayaran sewa yang signifikan, sedangkan penggarap kecil atau buruh tani yang bergantung pada lahan yang sama justru kehilangan sumber penghidupan tanpa kompensasi memadai. Perempuan yang mengelola air, pangan, dan kesehatan keluarga mungkin mengalami kerja berlipat karena akses sumber daya berubah, tetapi tidak tercatat sebagai "penerima manfaat" resmi. Di sisi lain, elite lokal dapat memosisikan diri sebagai perantara antara perusahaan dan warga, sekaligus menyaring aliran informasi dan manfaat. Tanpa desain kelembagaan yang sadar terhadap ketimpangan internal ini, klaim bahwa proyek membawa "manfaat bagi masyarakat" mudah berubah menjadi klaim yang hanya mencerminkan pengalaman kelompok paling kuat.

Di tingkat desain *kebijakan pemerintah*, ketimpangan distribusi manfaat–beban sering lahir dari cara skema fiskal dan regulasi dirumuskan. Insentif pajak, jaminan harga, dan berbagai fasilitas investasi diberikan untuk menarik modal ke sektor energi, tetapi tidak selalu diimbangi dengan mekanisme kuat untuk menjamin bahwa sebagian nilai tambah kembali secara sistematis ke komunitas terdampak. Dana bagi hasil atau program tanggung jawab sosial perusahaan sering dirancang sebagai tambahan, bukan sebagai pilar utama distribusi manfaat. Sementara itu, beban berupa polusi suara, perubahan lanskap, dan risiko sosial biasanya tidak diinternalisasi secara penuh dalam perhitungan biaya proyek. Akibatnya, perhitungan "kelayakan" cenderung mengabaikan biaya sosial jangka panjang yang harus dipikul oleh warga, sehingga ketimpangan terinstitusionalisasi di dalam kerangka kebijakan.

Ketimpangan spasial distribusi manfaat–beban dalam kebijakan energi juga terkait dengan sejarah panjang pembagian wilayah menjadi zona produksi dan zona konsumsi. Wilayah pedesaan dan pesisir dijadikan lokasi pembangkit, jaringan transmisi, atau tambang mineral kritis yang diperlukan untuk mendukung transisi energi, sementara kota-kota besar menikmati keamanan pasokan dan kualitas layanan yang lebih tinggi. Pola ini memperpanjang logika "pusat–pinggiran" yang sudah lama dikenal dalam kajian pembangunan, namun kini hadir dalam bentuk baru: pinggiran sebagai pemasok energi dan bahan baku bagi transisi rendah karbon. Bagi warga di wilayah ini, janji transisi sering terdengar mirip dengan janji pembangunan lama: mereka diminta membuka ruang hidup untuk proyek nasional, tetapi tidak diberi jaminan bahwa hasilnya akan mengubah secara signifikan kualitas hidup mereka sendiri.

Dalam konteks Indonesia, diskusi tentang *just energy transition* menekankan bahwa transisi dari energi fosil ke energi

rendah karbon tidak boleh sekadar memindahkan beban dari satu kelompok ke kelompok lain. Kajian mengenai implikasi sosial dari kerangka kebijakan transisi energi di Indonesia menyoroti pentingnya memastikan bahwa kelompok rentan—yang sering kali tinggal di wilayah kaya sumber daya namun miskin layanan publik—tidak kembali menjadi pihak yang dikorbankan demi target emisi dan investasi baru (Nurhidayah et al., 2024). Konsep *just energy transition* pada dasarnya menuntut agar distribusi manfaat dan beban dipikirkan sejak awal desain kebijakan, bukan sebagai koreksi kecil di tahap akhir. Ini berarti menempatkan hak komunitas atas ruang hidup dan masa depan yang layak sebagai parameter utama, bukan sekadar menambah satu bab tentang "keadilan" dalam dokumen strategi nasional.

Ketimpangan distribusi manfaat–beban dalam kerangka *kebijakan energi berkelanjutan* juga tampak pada cara risiko dan ketidakpastian dibagi. Investasi besar sering dilindungi dengan berbagai jaminan kebijakan: kepastian tarif, kontrak jangka panjang, dan dukungan regulasi. Sementara itu, warga lokal yang terdampak tidak mendapat perlindungan serupa atas risiko sosial-ekologis yang mereka hadapi. Jika sumber air menurun, lahan menjadi kurang produktif, atau konflik sosial meningkat, tidak ada jaminan formal yang secara otomatis mengaktifkan mekanisme pemulihan. Dalam banyak kasus, warga harus berjuang sendiri melalui jalur hukum atau advokasi, yang membutuhkan sumber daya, waktu, dan kapasitas yang tidak selalu mereka miliki. Dengan demikian, transisi yang disebut "berkelanjutan" justru menempatkan beban ketidakpastian terbesar pada mereka yang posisinya paling lemah.

Celah distribusi manfaat–beban juga memperlihatkan bagaimana bahasa teknis dapat memuluskan ketidakadilan. Istilah seperti *least-cost pathway* atau *optimal energy mix*

terdengar netral dan ilmiah, padahal di balik rumus dan model terdapat asumsi tentang nilai yang akan dimaksimalkan dan biaya apa saja yang dimasukkan. Ketika hanya biaya finansial dan emisi agregat yang diperhitungkan, sementara biaya pemindahan penduduk, hilangnya keanekaragaman hayati, atau retaknya jaringan sosial tidak dimasukkan, hasil perhitungan akan cenderung menyarankan solusi yang mengorbankan komunitas tertentu. Bagi pembaca awam, istilah *least-cost* mudah disalahartikan sebagai "paling adil", padahal yang dimaksimalkan hanya dimensi ekonomi tertentu. Filsafat kekuasaan mengajak kita bertanya: biaya siapa yang sedang diminimalkan, dan keuntungan siapa yang sedang dimaksimalkan?

Dari sudut pandang komunitas, ketimpangan distribusi manfaat–beban sering kali baru tampak jelas setelah proyek berjalan beberapa tahun. Di tahap awal, warga mungkin menerima kompensasi, program pemberdayaan, atau infrastruktur baru yang terlihat menjanjikan. Namun, seiring waktu, dampak jangka panjang seperti perubahan pola hujan, penurunan kualitas tanah, atau menurunnya populasi ikan mulai dirasakan. Pada saat itu, masa kontrak sudah berjalan jauh, struktur kepemilikan menguat, dan ruang negosiasi menyempit. Pengalaman semacam ini membuat komunitas menjadi semakin skeptis terhadap janji proyek energi berikutnya, bahkan jika desainnya diklaim lebih partisipatif. Resistensi yang tampak "keras" di mata negara sering kali lahir dari memori kolektif tentang distribusi manfaat–beban yang tidak adil di masa lalu, bukan semata-mata dari ketidaktahuan atau anti-perubahan.

Mengurangi celah distribusi manfaat–beban dalam *kebijakan energi terbarukan* menuntut lebih dari sekadar menambah komponen kompensasi finansial. Diperlukan perubahan paradigma dalam memandang komunitas, bukan

sebagai pihak yang "ditenangkan" setelah keputusan diambil, tetapi sebagai pemegang hak yang sah untuk ikut menentukan bagaimana manfaat dan beban dibagi. Ini bisa berarti merancang skema kepemilikan bersama, di mana komunitas memiliki saham atau bentuk klaim formal atas pendapatan proyek. Bisa juga berarti memastikan bahwa bagian tertentu dari pendapatan proyek secara hukum harus dikembalikan untuk layanan publik lokal, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Tanpa mekanisme struktural semacam ini, program sosial perusahaan akan tetap bersifat karitatif dan rentan berubah mengikuti kepentingan jangka pendek perusahaan atau pemerintah.

Dari perspektif multi-level governance, distribusi manfaat–beban adalah hasil pertemuan antara keputusan di tingkat global, nasional, dan lokal. Dorongan global untuk dekarbonisasi dan investasi hijau menekan pemerintah nasional untuk membuka ruang bagi proyek besar, sering kali dengan mempercepat perizinan dan memberi insentif yang luas. Pemerintah daerah kemudian berada di tengah: mereka diharapkan memfasilitasi proyek demi target nasional, tetapi juga harus menanggapi keluhan warga yang merasa dirugikan. Tanpa kerangka keadilan yang jelas dan dukungan nyata bagi pemerintah daerah untuk merundingkan pembagian manfaat yang lebih adil, posisi mereka cenderung rapuh. Mereka bisa dengan mudah dilihat sebagai "perpanjangan tangan pusat" oleh komunitas, dan pada saat yang sama dianggap "kurang mendukung investasi" oleh pemerintah pusat atau pelaku pasar. Ketegangan ini sering meledak dalam bentuk konflik terbuka di tingkat lokal.

Pada akhirnya, celah distribusi manfaat–beban: ketimpangan spasial dan sosial, adalah jantung dari pertarungan makna tentang apa itu transisi energi yang adil. Jika transisi hanya diukur dari penurunan emisi dan peningkatan kapasitas

terpasang, tanpa menimbang secara serius siapa yang menikmati manfaat dan siapa yang memikul beban, maka bahasa keadilan hanya menjadi hiasan wacana. Filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan mengajak kita untuk tidak berhenti pada diagram alur kebijakan dan model optimasi, tetapi menatap langsung wajah mereka yang hidup di bawah bayang-bayang turbin, di tepi tambang mineral, atau di sekitar pembangkit baru. Di sanalah pertanyaan tentang keadilan distribusi menemukan bentuk paling konkret, dan di sanalah legitimasi transisi energi akan diuji: apakah ia sungguh mengubah struktur ketidakadilan lama, atau hanya memindahkan pusat-pusat keuntungan ke sektor teknologi baru.

16 Partisipasi Publik: Ritual atau Deliberasi?: Transparansi, Diseminasi Pengetahuan, dan Mekanisme Persetujuan

16.1 Model Partisipasi: Konsultasi, Sosialisasi, Deliberasi, dan Co-Decision

Partisipasi publik dalam *kebijakan energi berkelanjutan* tidak pernah netral; ia selalu terikat pada pertanyaan mendasar: siapa yang mengundang, siapa yang berbicara, dan siapa yang memutuskan. Subbab ini mengurai empat model partisipasi yang sering muncul dalam proyek energi: konsultasi, sosialisasi, deliberasi, dan *co-decision* (pengambilan keputusan bersama). Keempat model ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan konfigurasi kekuasaan yang berbeda: apakah warga hanya diminta memberi komentar setelah keputusan dirancang, atau justru diakui sebagai subjek politik yang ikut merumuskan tujuan kebijakan sejak awal. Dengan demikian, pembahasan model partisipasi bukan soal prosedur administratif semata, tetapi menyentuh inti filsafat kekuasaan dalam transisi energi: apakah energi dipandang sebagai proyek teknokratis yang dikelola elit, atau sebagai proses sosial yang melibatkan distribusi suara, risiko, dan manfaat secara lebih adil di antara warga yang terdampak.

Model konsultasi adalah bentuk partisipasi yang paling sering dipromosikan, tetapi sekaligus paling rentan menjadi kosmetik demokrasi. Dalam praktik, konsultasi kerap diwujudkan melalui lokakarya, dengar pendapat, atau forum publik yang tampak inklusif, namun agenda, waktu, dan bentuk diskusinya ditentukan sepihak oleh penyelenggara. Dalam studi tentang konsultasi publik di kawasan Sungai Mekong, misalnya,

forum resmi digambarkan sebagai ruang yang membuka informasi, tetapi pada saat yang sama dikritik kelompok masyarakat sipil karena berfungsi sebagai stempel karet atas keputusan yang telah diambil sebelumnya (Yong & Gillespie, 2022). Pola seperti ini sangat mungkin berulang dalam proyek energi: warga hadir, berbicara, bahkan difoto untuk laporan, tetapi struktur kekuasaan yang menentukan apakah suara mereka benar-benar mengubah rancangan proyek tetap tidak tersentuh.

Sosialisasi sering dipromosikan sebagai bentuk "pendekatan persuasif" dalam *kebijakan energi terbarukan*, tetapi pada dasarnya adalah komunikasi satu arah yang bertujuan menurunkan resistensi, bukan menegosiasikan keputusan. Dalam banyak proyek, istilah sosialisasi dipakai untuk menyebut rapat di desa yang menjelaskan manfaat proyek, jadwal pembangunan, dan kompensasi, sementara ruang untuk mempertanyakan asumsi dasar proyek sangat terbatas. Bahasa teknis tentang kapasitas terpasang, efisiensi *renewable energy* (energi terbarukan), atau skema tarif seringkali tidak dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami, sehingga warga hanya "menyetujui" sesuatu yang sebenarnya tidak sepenuhnya mereka mengerti. Di sini, sosialisasi menjadi perpanjangan tangan kekuasaan institusional: ia lebih mirip strategi pemasaran kebijakan, bukan proses bersama untuk menimbang konsekuensi jangka panjang bagi ruang hidup, mata pencaharian, dan relasi sosial di komunitas.

Berbeda dengan sosialisasi, deliberasi menuntut sesuatu yang jauh lebih mahal secara politik: kesediaan untuk membuka rancangan kebijakan pada argumen, kritik, dan kemungkinan revisi substansial. *Deliberation* dapat dijelaskan sederhana sebagai proses musyawarah yang terstruktur, di mana berbagai pihak saling mengemukakan alasan, mendengar keberatan, dan berupaya mencapai keputusan yang dianggap dapat

dipertanggungjawabkan secara rasional dan etis. Dalam konteks proyek energi, deliberasi mensyaratkan akses informasi yang setara, waktu yang cukup bagi warga untuk memahami dokumen teknis, serta fasilitator yang tidak berpihak pada satu aktor kuat saja. Tanpa kondisi tersebut, klaim adanya "forum deliberatif" mudah berubah menjadi sekadar serangkaian pertemuan yang mengisi agenda proyek, tetapi tidak mengubah struktur keputusan. Di titik ini, kualitas desain institusional forum lebih menentukan daripada banyaknya pertemuan yang secara administratif tercatat.

Model *co-decision* melangkah lebih jauh dengan mengakui bahwa warga dan komunitas terdampak bukan hanya penerima informasi atau pemberi masukan, melainkan mitra setara dalam penentuan arah proyek. Dalam pendekatan ini, struktur kelembagaan—seperti komite bersama, dewan energi lokal, atau panel warga—diberi mandat formal untuk ikut menentukan lokasi, skala, teknologi, dan skema distribusi manfaat. Pengalaman pengembangan energi angin lepas pantai di Brasil menunjukkan bagaimana ketimpangan informasi dan kekuasaan dapat mereproduksi ketidakadilan, bahkan ketika proyek dibungkus narasi transisi hijau (Gorayeb et al., 2024). Tanpa desain *co-decision* yang jelas, keputusan tetap terkonsentrasi pada pemerintah pusat, perusahaan, dan kelompok elit lokal, sementara nelayan, pekerja informal, dan kelompok rentan lainnya hanya merasakan beban ekologis serta sosial tanpa posisi tawar yang berarti.

Dalam praktiknya, *kebijakan pemerintah* sering memadukan keempat model tersebut secara asimetris: porsi terbesar diisi sosialisasi dan konsultasi, sedangkan ruang deliberasi dan *co-decision* hanya muncul sebagai wacana normatif di dokumen kebijakan. Pemerintah dapat mengklaim bahwa partisipasi telah dilakukan karena serangkaian forum formal telah digelar, daftar hadir disimpan, dan foto-foto

kegiatan dipublikasikan. Namun, bila kita menelusuri lebih jauh, seringkali tidak ada mekanisme jelas untuk menindaklanjuti keberatan warga, meninjau ulang desain proyek, atau bahkan menunda pelaksanaan bila ditemukan pelanggaran hak dasar. Representasi partisipasi dengan indikator administratif—misalnya jumlah pertemuan atau jumlah peserta—menciptakan ilusi bahwa prosedur telah dipenuhi, sementara rasa keadilan dan kepercayaan publik justru terkikis. Di sini, filsafat kekuasaan mengingatkan bahwa distribusi suara tidak otomatis mengikuti distribusi prosedur.

Rantai partisipasi dalam proyek energi kerap mengikuti logika waktu dan skala yang ditentukan oleh kebutuhan proyek, bukan oleh ritme kehidupan sosial komunitas. Konsultasi dilakukan ketika desain teknis sudah hampir final, sosialisasi digelar menjelang konstruksi, sementara ruang deliberasi dan *co-decision* nyaris tidak pernah muncul pada fase awal ketika opsi kebijakan masih terbuka. Akibatnya, warga ditempatkan pada posisi reaktif: mereka hanya bisa menyetujui, menolak, atau merespons paket yang sudah jadi. Padahal, bila model partisipasi dirancang sejak hulu, warga dapat ikut menentukan apakah proyek memang diperlukan, opsi teknologi apa yang paling sesuai, dan bagaimana distribusi manfaat serta beban diatur. Perbedaan ini sangat menentukan apakah partisipasi akan dipersepsikan sebagai hak politik warga, atau sekadar formalitas yang melelahkan dan menimbulkan kelelahan partisipatif di tingkat lokal.

Pengalaman transisi energi di berbagai negara menunjukkan bahwa konflik sosial sering muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara klaim partisipasi di tingkat nasional dan praktik di tingkat lokal. Di kawasan Sungai Mekong, misalnya, konsultasi publik resmi justru dikritik sebagai "rubber stamp" yang tidak sanggup mengubah arah pembangunan bendungan (Yong & Gillespie, 2022). Sementara itu, studi

tentang proyek energi angin lepas pantai di Brasil menyoroti bagaimana ketimpangan kekuasaan dan informasi menghalangi komunitas pesisir untuk benar-benar terlibat dalam penentuan lokasi dan desain proyek (Gorayeb et al., 2024). Kedua contoh ini menggarisbawahi bahwa tanpa desain institusional yang memadai, model-model partisipasi mudah direduksi menjadi instrumen legitimasi, bukan arena perdebatan rasional sekaligus pengakuan hak atas ruang hidup.

Dalam konteks *kebijakan energi berkelanjutan*, pertanyaan tentang model partisipasi sebenarnya adalah pertanyaan tentang siapa yang berhak mendefinisikan masa depan ruang dan lingkungan. Proyek energi sering dipromosikan sebagai kepentingan nasional atau bahkan kepentingan global untuk mengatasi krisis iklim, namun konsekuensi langsungnya dirasakan di tingkat lokal: berubahnya lanskap, hilangnya akses atas lahan, terganggunya mata pencaharian, dan pergeseran identitas komunitas. Bila warga hanya diundang pada tahap konsultasi singkat, maka seluruh beban argumentasi moral seolah diletakkan di pundak mereka: menolak berarti anti-pembangunan, menerima berarti mengorbankan ruang hidup. Deliberasi dan *co-decision* menawarkan kerangka lain, di mana keberatan lokal bukan dianggap penghalang, melainkan sumber koreksi terhadap desain kebijakan yang terlalu rakus ruang, terlalu cepat, atau buta terhadap kerentanan kelompok tertentu.

Untuk memahami perbedaan substantif antara keempat model tersebut, penting menjelaskan dengan bahasa sederhana. *Consultation* dapat dipahami sebagai "diajak bicara setelah rencana hampir jadi", sementara *socialization* lebih mirip "pemberitahuan sepihak tentang sesuatu yang akan dilakukan". *Deliberation* adalah "musyawarah yang memungkinkan argumen saling menguji dan mengubah rencana", sedangkan *co-decision* berarti "berbagi kewenangan memutuskan" antara negara, perusahaan, dan komunitas. Dalam proyek energi,

keempat model ini sering bercampur: sebuah pertemuan bisa diklaim sebagai deliberatif, padahal desain agendanya tidak memungkinkan warga menolak atau memodifikasi opsi. Karena itu, kerangka analitis dalam subbab ini mengajak pembaca untuk membaca ulang setiap undangan rapat, konsultasi publik, atau sosialisasi pemerintah: pada posisi mana warga ditempatkan, dan seberapa jauh mereka dapat mengubah keputusan yang menyangkut hidup mereka.

Selain struktur forum, bahasa dan medium yang digunakan dalam partisipasi juga menentukan apakah proses tersebut mendekati deliberasi atau hanya memperpanjang sosialisasi. Penggunaan istilah teknis seperti *feed-in tariff*, *capacity factor*, atau *grid stability* tanpa penjelasan yang membumi menjadikan ruang diskusi dikuasai pakar, konsultan, dan pejabat teknis. Bagi warga, istilah-istilah itu menjadi dinding bahasa yang memisahkan mereka dari inti keputusan. Jika model partisipasi ingin bergeser menuju deliberasi dan *co-decision*, maka bahasa teknis perlu diterjemahkan menjadi contoh konkret: berapa besar perubahan tagihan listrik, seberapa luas lahan yang akan terdampak, atau bagaimana risiko bencana akan ditangani. Hanya dengan cara itu warga dapat menyusun argumen, bukan sekadar menanggapi jargon kebijakan yang tampak mengintimidasi.

Dalam banyak kasus, *kebijakan energi terbarukan* dipersepsikan sebagai sesuatu yang secara moral sudah pasti benar, sehingga keberatan lokal mudah dipinggirkan sebagai *NIMBY* (not in my backyard). Label ini berbahaya karena menyederhanakan konflik struktural menjadi masalah sikap individual, padahal seringkali keberatan warga berakar pada ketimpangan informasi, sejarah marginalisasi, dan keraguan terhadap janji kompensasi. Model partisipasi yang bertumpu pada sosialisasi dan konsultasi cenderung memperkuat logika ini: warga "diberi penjelasan" lalu diharapkan memahami dan

menerima. Sebaliknya, kerangka deliberasi dan *co-decision* mengundang pembacaan yang lebih kritis: mengakui bahwa warga boleh saja menolak rancangan tertentu, mengusulkan opsi alternatif, atau menuntut jeda moratorium hingga risiko dikaji ulang secara independen. Di sini, partisipasi menjadi instrumen untuk menegosiasikan keadilan, bukan sekadar mempercepat implementasi proyek.

Model partisipasi juga tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kelembagaan lintas level: siapa yang memiliki wewenang menandatangani izin, siapa yang mengatur standar lingkungan, dan siapa yang mengelola kompensasi. Jika keputusan utama terkunci di tingkat pusat, sementara forum partisipasi hanya dibuka di tingkat lokal, maka warga sebenarnya diminta hanya "mengelola akibat", bukan "mempersoalkan sebab". Konsultasi dan sosialisasi di tingkat desa akan sulit memengaruhi keputusan yang telah dikunci dalam rencana umum energi atau kontrak jangka panjang dengan perusahaan. Dalam kerangka filsafat kekuasaan, ini berarti bahwa *arena* partisipasi dipisahkan dari *arena* keputusan. Upaya mendorong deliberasi dan *co-decision* harus mencakup pembukaan ulang hubungan antara kedua arena ini, misalnya melalui kewajiban menindaklanjuti rekomendasi warga dalam revisi dokumen perencanaan.

Dengan demikian, pembahasan tentang konsultasi, sosialisasi, deliberasi, dan *co-decision* dalam proyek energi bukan sekadar soal memilih metode partisipasi yang "paling efektif", tetapi soal menggeser logika kekuasaan dari pengelolaan kepatuhan menuju pengakuan kedaulatan warga atas ruang hidupnya. Dalam kerangka buku tentang Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan, subbab ini menegaskan bahwa model partisipasi adalah cermin bagaimana negara dan pelaku pasar memandang publik: apakah sebagai objek yang perlu diyakinkan, atau sebagai mitra deliberatif yang

berhak menegosiasikan syarat masa depan energi. Pertanyaan-pertanyaan ini akan berlanjut pada subbab berikutnya tentang transparansi informasi, mekanisme persetujuan, dan bagaimana prosedur hukum dapat berfungsi sebagai jembatan antara klaim keadilan substantif dan praktik *kebijakan energi berkelanjutan* di lapangan.

16.2 Transparansi Informasi Proyek: Bahasa, Kanal, dan Waktu

Transparansi informasi proyek dalam konteks kebijakan energi bukan sekadar kewajiban administratif untuk "mempublikasikan dokumen", tetapi pengaturan sangat konkret tentang siapa yang berhak tahu apa, melalui bahasa apa, lewat kanal apa, dan pada waktu kapan. Empat dimensi ini—isi, bahasa, kanal, dan waktu—menentukan apakah warga memiliki peluang realistis untuk memahami, mempertanyakan, dan mempengaruhi arah proyek, atau hanya menjadi penerima pemberitahuan sepihak. Dalam proyek energi, terutama yang mengusung label hijau, informasi sering diposisikan sebagai pelengkap: sesuatu yang baru dipikirkan setelah desain teknis dan finansial hampir final. Filsafat kekuasaan mengajak kita melihat bahwa pilihan kapan dan bagaimana informasi dibuka sebenarnya adalah pilihan politik: ia bisa memperluas ruang deliberasi atau justru menguncinya. Subbab ini membedah bagaimana transparansi, jika diatur secara bias, berubah dari jembatan keadilan prosedural menjadi tirai yang menutupi ketimpangan keputusan.

Sejumlah kajian tentang penetapan lokasi pembangkit angin lepas pantai di Amerika Serikat menunjukkan bahwa persepsi warga terhadap transparansi tidak hanya bergantung pada seberapa banyak informasi disediakan, melainkan juga bagaimana proyek mengelola kepercayaan dan rasa keadilan proses. Dalam studi tentang kepercayaan dan keterlibatan

publik di proyek angin lepas pantai, misalnya, transparansi prosedural—cara negara menjelaskan pilihan lokasi, mempertanggungjawabkan keputusan, dan merespons kekhawatiran warga—berkaitan erat dengan rasa diperlakukan adil oleh komunitas terdampak (Firestone et al., 2023). Ketika warga melihat bahwa informasi tidak disembunyikan, keberatan mereka dicatat, dan ada penjelasan rasional terhadap pilihan kebijakan, tingkat penerimaan sosial meningkat. Sebaliknya, jika informasi diberikan terlambat, kabur, atau terkesan defensif, transparansi malah memicu kecurigaan: seolah negara dan perusahaan "membuka" informasi hanya karena dipaksa, bukan karena mengakui hak warga.

Dalam banyak kasus *kebijakan energi terbarukan*, definisi formal transparansi identik dengan publikasi dokumen teknis dan hukum di situs web pemerintah atau papan pengumuman. Namun dari perspektif warga, informasi yang sangat teknis dan berbahasa kaku itu sering kali tidak dapat diakses secara substansial. Analisis dampak lingkungan setebal ratusan halaman yang dipenuhi istilah teknis tidak membantu petani, nelayan, atau masyarakat adat memahami apakah sumber air mereka akan berubah, apakah lahan mereka masih bisa digarap, atau bagaimana pola angin dan gelombang akan mempengaruhi penghidupan mereka. Di sini, transparansi formal—tersedianya dokumen—tidak sama dengan transparansi substantif, yakni kemampuan warga untuk mengubah dokumen menjadi pengetahuan yang relevan bagi keputusan hidup mereka. Ketika negara menganggap tugasnya selesai hanya dengan mengunggah dokumen, kekosongan pemahaman ini segera diisi oleh rumor, ketakutan, dan narasi tandingan yang tidak selalu akurat tetapi terasa lebih dapat dipercaya.

Bahasa menjadi dimensi pertama yang menentukan apakah transparansi akan membuka atau menutup ruang pemahaman. Dokumen kebijakan sering dipenuhi istilah seperti

feed-in tariff, *net metering*, atau *capacity factor* yang bagi perancang kebijakan terdengar rutin, tetapi bagi warga adalah istilah asing. Padahal, istilah-istilah tersebut menyangkut hal sangat konkret: bagaimana harga listrik ditetapkan, siapa yang mendapatkan insentif, dan seberapa besar pembangkit benar-benar beroperasi menghasilkan listrik. Bila istilah teknis ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari—misalnya dalam bentuk contoh sederhana tentang perubahan tagihan listrik atau pendapatan desa—maka transparansi berubah menjadi tembok bahasa. Dalam perspektif filsafat kekuasaan, penguasaan atas bahasa teknis adalah bentuk modal simbolik yang mengunci tafsir di tangan pakar, konsultan, dan pejabat, sementara warga dibiarkan berada di pinggir percakapan yang menentukan masa depan ruang hidup mereka.

Dimensi kedua adalah kanal komunikasi, yakni medium melalui mana informasi proyek disebarkan: situs web, rapat tatap muka, radio lokal, selebaran, media sosial, atau perantara tokoh lokal. Negara sering mengandaikan bahwa keberadaan situs web resmi sudah cukup untuk memenuhi prinsip keterbukaan. Namun di banyak desa, akses internet tidak merata, literasi digital terbatas, dan kepercayaan lebih melekat pada informasi yang datang lewat jaringan sosial lokal: pengurus adat, pemuka agama, atau kelompok tani. Kanal formal yang tidak dipadukan dengan kanal sosial yang dipercaya akan menghasilkan transparansi yang *formal* tetapi tidak *berpengaruh*. Informasi yang benar justru kalah oleh desas-desus yang menyebar lewat jalur yang lebih dipercaya. Karena itu, mendesain transparansi berarti mendesain ekologi kanal komunikasi, bukan sekadar memilih satu medium paling modern lalu mengklaim bahwa masyarakat sudah "diberi tahu".

Dimensi ketiga yang sering diabaikan dalam *kebijakan pemerintah* adalah waktu penyampaian informasi. Banyak konflik energi berakar pada fakta bahwa informasi penting—

lokasi pasti, kapasitas proyek, perubahan tata ruang, atau skema kompensasi—baru dibuka ketika komitmen politik dan finansial sudah terlanjur dikunci. Di titik ini, ruang koreksi praktis sangat sempit; warga hanya dihadapkan pada opsi menerima dengan sedikit penyesuaian atau menolak dengan risiko dikonstruksikan sebagai penghambat pembangunan. Transparansi yang tertunda seperti ini secara formal mungkin masih dapat diklaim "memenuhi regulasi", tetapi secara substantif gagal memenuhi prinsip keadilan prosedural. Waktu informasi diberikan menentukan apakah warga punya kesempatan untuk merenungkan, berkonsultasi secara internal, dan mengajukan alternatif, atau hanya memiliki waktu untuk menyiapkan bentuk perlawanan.

Dalam kerangka multi-level governance, persoalan bahasa, kanal, dan waktu tidak bisa dipisahkan dari struktur kewenangan antar level. Kementerian mungkin menguasai bahasa teknis dan kanal digital nasional, sementara pemerintah daerah bergantung pada kanal lokal seperti pertemuan desa dan media lokal. Bila koordinasi lemah, informasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat saling bertentangan, baik dalam isi maupun nada. Misalnya, kementerian mengirim sinyal bahwa proyek masih dalam kajian, sementara di tingkat kabupaten sudah beredar kabar bahwa lahan tertentu akan segera dibebaskan. Kontradiksi ini mengikis kepercayaan warga terhadap institusi publik. Transparansi yang terfragmentasi di antara level pemerintahan menciptakan ruang abu-abu, di mana aktor lain—broker tanah, elite lokal, atau spekulan—dapat mengambil keuntungan dari kebingungan informasi yang dialami warga.

Riset tentang penerimaan proyek angin lepas pantai di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap proses sangat bergantung pada konsistensi pesan antar aktor, keterbukaan tentang ketidakpastian, dan kejelasan

siapa yang bertanggung jawab menjawab pertanyaan warga (Firestone et al., 2023). Ketika institusi negara bersedia mengakui bahwa sebagian aspek proyek masih dalam proses kajian, dan bahwa ada ruang untuk mengubah keputusan berdasarkan masukan publik, transparansi menjadi sarana membangun kepercayaan, bukan sekadar kewajiban hukum. Sebaliknya, ketika negara selalu tampil dengan kepastian seolah semua sudah beres, sementara warga menemukan informasi kontradiktif atau dampak tak terduga di lapangan, maka setiap pernyataan resmi akan dibaca dengan kecurigaan. Transparansi yang mengakui keterbatasan pengetahuan justru lebih kredibel dibanding transparansi yang memaksakan ilusi kepastian.

Transparansi informasi proyek dalam konteks *kebijakan energi berkelanjutan* juga berkaitan dengan bagaimana ketidakpastian ilmiah dan teknis dikomunikasikan. Proyek energi skala besar membawa serta ketidakpastian tentang perubahan ekologi jangka panjang, pergeseran pola angin atau air, dan dampak kumulatif terhadap kesehatan. Bila ketidakpastian ini disembunyikan demi menjaga citra kepastian investasi, warga akan merasa ditipu ketika dampak yang tidak diantisipasi muncul beberapa tahun kemudian. Prinsip transparansi yang etis justru mengharuskan pengakuan terbuka atas apa yang belum diketahui, dan bagaimana risiko tersebut akan dimonitor serta ditangani. Dengan demikian, warga diajak untuk berbagi dalam pengelolaan risiko, bukan hanya diposisikan sebagai objek yang diberi keyakinan kosong bahwa semuanya "aman" karena telah lulus kajian.

Bahasa transparansi juga membawa implikasi etis ketika berbicara tentang manfaat dan beban. Brosur proyek sering menonjolkan angka investasi, jumlah lapangan kerja, dan kontribusi terhadap penurunan emisi, tetapi menyinggung secara sangat minimal tentang potensi beban: perubahan lanskap, kebisingan, atau hilangnya akses ruang tertentu. Dalam

logika komunikasi korporat, hal ini dimengerti sebagai strategi menjaga "citra positif". Namun dari kacamata keadilan, ketidakseimbangan antara informasi manfaat dan beban menggiring warga pada bentuk persetujuan yang timpang: mereka setuju berdasarkan gambaran yang terlalu optimistis tentang masa depan. Transparansi yang adil menuntut keberanian untuk menempatkan manfaat dan beban sejajar dalam komunikasi, memungkinkan warga menilai sendiri apakah komposisi tersebut dapat diterima. Jika tidak, "persetujuan" yang diperoleh lebih dekat pada manipulasi ketimbang deliberasi.

Kanal transparansi yang dirancang dari atas sering gagal menangkap cara komunitas memproduksi dan memverifikasi pengetahuan. Di banyak tempat, warga lebih mempercayai kesaksian tetangga yang pernah bekerja di proyek sejenis, pengalaman komunitas dekat yang sudah lebih dulu menerima proyek, atau penilaian tokoh adat yang membaca tanda-tanda perubahan alam. Bila mekanisme transparansi formal tidak mengakui dan tidak berusaha berinteraksi dengan epistemologi lokal ini, maka ia hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak suara dalam arena penafsiran, dan tidak selalu yang paling berpengaruh. Desain transparansi yang lebih reflektif justru perlu membuka ruang dialog antara pengetahuan teknis dan pengetahuan lokal, misalnya melalui pertemuan di mana data ilmiah dipresentasikan berdampingan dengan peta partisipatif, sejarah lokal, dan pembacaan atas perubahan lingkungan yang dirasakan warga.

Dalam konteks *kebijakan energi terbarukan* yang sering digerakkan oleh target waktu ambisius, tekanan untuk "segera jalan" seringkali mengorbankan kualitas transparansi. Proses yang seharusnya berjalan berbulan-bulan—memberi waktu bagi warga untuk mencerna informasi, berkonsultasi internal, dan mengajukan pertanyaan—dipadatkan menjadi beberapa

minggu atau bahkan hari. Informasi dikemas dalam bentuk presentasi padat, sementara kesempatan untuk membaca dokumen di rumah atau berdiskusi dalam bahasa lokal minim. Akibatnya, banyak keputusan "setuju" yang sebenarnya lahir dari keletihan, kebingungan, atau rasa tidak berdaya, bukan dari pemahaman. Transparansi yang diburu waktu pada dasarnya adalah bentuk ketidaktransparanan lain: ia meminjam wajah prosedur terbuka, tetapi menutup pintu bagi proses belajar kolektif yang pelan dan penuh keraguan.

Pengalaman proyek angin lepas pantai yang dianalisis oleh Firestone dan kolega menunjukkan bahwa ketika desain transparansi memberi ruang bagi warga untuk terlibat sejak awal, menyediakan kanal umpan balik yang jelas, dan menunjukkan bahwa masukan mereka benar-benar dapat mengubah rencana, tingkat kepercayaan dan persepsi keadilan prosedural meningkat signifikan (Firestone et al., 2023). Pelajaran ini relevan bagi kebijakan energi di berbagai konteks: transparansi yang bermakna bukan hanya soal membuka data, tetapi juga soal bagaimana data itu menjadi dasar percakapan yang berkelanjutan. Dalam konteks konflik lokal, keberadaan rekam jejak yang jelas—bagaimana pertanyaan dijawab, keberatan direspons, dan perubahan rencana dikomunikasikan—dapat menjadi penyangga penting terhadap narasi bahwa negara dan perusahaan "tidak pernah mendengar".

Akhirnya, transparansi informasi proyek harus dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari arsitektur keadilan dalam multi-level governance energi. Bila transparansi hanya difungsikan sebagai lapisan terakhir—sekadar mengumumkan keputusan—maka ia akan memperkuat kesan bahwa partisipasi publik hanyalah ritual. Namun bila transparansi dirancang sebagai proses yang menyertai seluruh daur kebijakan, sejak formulasi hingga evaluasi, dengan perhatian serius pada bahasa,

kanal, dan waktu, maka ia dapat menjadi prasyarat bagi deliberasi yang bermakna. Dalam kerangka Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan, pertanyaan kuncinya bukan lagi "apakah informasi sudah dibuka", tetapi "siapa yang diuntungkan oleh cara informasi itu dibuka". Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah transparansi menjadi alat pengukuhan dominasi, atau jembatan untuk membangun hubungan yang lebih adil antara negara, pasar, dan komunitas lokal.

16.3 Mekanisme Persetujuan (FPIC, Izin Lingkungan, hearing) sebagai Prosedur Legitimasi

Dalam perdebatan tentang *Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan*, mekanisme persetujuan seperti *free, prior and informed consent* (*FPIC*), izin lingkungan, dan *hearing* publik bukan sekadar prosedur hukum yang netral, tetapi arena di mana kekuasaan dinegosiasikan, dipertahankan, atau digugat. *FPIC* dapat dijelaskan sederhana sebagai prinsip bahwa komunitas berhak mendapatkan informasi yang memadai, sebelum proyek berjalan, dan boleh setuju atau menolak tanpa paksaan. Namun, dalam praktik, siapa yang mendefinisikan "informasi memadai", siapa yang menetapkan batas waktu, dan siapa yang menandatangani berita acara *hearing* sering kali ditentukan oleh aktor yang lebih kuat secara politik maupun ekonomi. Di titik inilah persetujuan menjadi prosedur legitimasi yang bisa mengukuhkan ketimpangan, jika tidak dirancang dengan sensitivitas terhadap bahasa, budaya, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Secara filosofis, prosedur legitimasi ini memuat klaim bahwa keputusan negara dan korporasi dapat dianggap sah jika mengikuti urut-urutan formal yang sudah diatur. Namun kajian tentang *process fairness* menunjukkan bahwa rasa keadilan publik tidak hanya ditentukan oleh hasil, melainkan oleh sejauh

mana proses dianggap transparan, inklusif, dan dapat dipercaya (Firestone et al., 2020). Ketika warga merasa bahwa forum konsultasi hanya menjadi ruang mendengar sepihak, atau bahwa keputusan telah diambil jauh sebelum *hearing* diadakan, kepercayaan terhadap institusi publik merosot, meski prosedur di atas kertas tampak lengkap. Dengan kata lain, FPIC, izin lingkungan, dan *hearing* baru menjadi sarana legitimasi yang kuat jika warga merasa benar-benar diundang untuk bernegosiasi, bukan sekadar hadir sebagai pendengar pasif dalam naskah yang telah disusun sebelumnya.

Dalam konteks *kebijakan energi terbarukan*, mekanisme persetujuan sering ditempatkan di hilir rantai keputusan, sesudah proyek dirancang, lokasi dipilih, dan skema pembiayaan disepakati. Komunitas lokal kemudian diundang untuk "memberikan masukan" atas paket yang pada dasarnya sudah jadi. Pola ini menciptakan kesan bahwa persetujuan publik hanya pelengkap administratif, bukan penentu substantif. Lebih jauh, bahasa teknis yang digunakan dalam dokumen izin lingkungan dan materi *hearing* membuat banyak warga sulit memahami risiko dan manfaat yang mereka hadapi. Ketika kapasitas literasi hukum dan teknis tidak diakui sebagai bagian dari desain proses, hak untuk menyetujui atau menolak menjadi formalitas yang timpang. Secara filosofis, ini menandai pergeseran dari partisipasi sebagai hak politik, menuju partisipasi sebagai prasyarat legal yang harus dipenuhi untuk menyalakan turbin atau menanamkan tiang transmisi di suatu wilayah.

Persoalan siapa yang berhak berbicara dan atas nama siapa dalam prosedur legitimasi juga menyelinap di ruang-ruang FPIC dan *hearing*. Dalam banyak kasus, negara hanya mengakui perwakilan formal—kepala desa, tokoh adat yang diakui, atau organisasi masyarakat yang terdaftar—padahal struktur sosial di tingkat lokal jauh lebih kompleks. Generasi muda, perempuan,

kelompok tani penggarap, atau nelayan yang terdampak langsung sering kali hadir tanpa suara yang setara. Di sisi lain, konsultan dan pengacara proyek datang dengan bahasa teknis dan kuasa simbolik yang kuat, sehingga mampu membingkai persoalan sekadar sebagai urusan kompensasi atau mitigasi dampak. Kesenjangan kemampuan menyusun argumen inilah yang membuat persetujuan tampak "sah" secara legal, tetapi dirasakan tidak adil oleh kelompok yang selama ini terpinggirkan, sehingga memicu konflik laten yang baru muncul ketika proyek mulai beroperasi.

Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa minimnya pemahaman terhadap FPIC dan prosedur konsultasi kerap berujung pada tuduhan manipulasi dan penyalahgunaan hak komunitas. Studi tentang konflik angin di Isthmus of Tehuantepec, Meksiko, misalnya, menyoroti bagaimana pelanggaran terhadap standar konsultasi dan hak-hak komunitas adat memicu resistensi berkepanjangan terhadap proyek angin skala besar (Martínez-Mendoza et al., 2021). Dalam kasus tersebut, persetujuan yang diklaim "telah diperoleh" ternyata berangkat dari proses yang timpang dalam hal akses informasi, tekanan sosial, dan janji-janji kompensasi. Temuan ini relevan bagi diskusi kita tentang *kebijakan energi berkelanjutan* di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena mengingatkan bahwa prosedur yang tidak sensitif terhadap sejarah marjinalisasi komunitas lokal hanya akan menghasilkan legitimasi kertas, bukan legitimasi sosial yang kokoh.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana *kebijakan pemerintah* memposisikan mekanisme FPIC, izin lingkungan, dan *hearing* dalam arsitektur hukum. Banyak regulasi menempatkan konsultasi publik sebagai satu langkah di antara sederet syarat administratif lainnya: studi Amdal, uji kelayakan finansial, analisis risiko teknis, dan seterusnya. Secara praktis, hal ini mendorong aparat dan pengembang melihat konsultasi

sebagai “checklist” yang harus diselesaikan secepat mungkin agar proyek tidak tertunda. Desain regulasi seperti ini mengaburkan dimensi kekuasaan dalam partisipasi: siapa yang boleh menunda proyek, siapa yang boleh berkata “tidak”, dan apa konsekuensinya. Jika regulasi tidak memberikan ruang nyata bagi komunitas untuk mengajukan keberatan substantif, proses persetujuan hanya akan mengukuhkan asimetri antara mereka yang memiliki sumber daya hukum dan teknis dengan mereka yang hanya punya pengalaman hidup dan ketergantungan pada wilayah tempat proyek dibangun.

Dalam perspektif filsafat kekuasaan, mekanisme persetujuan bekerja sebagai teknologi pemerintahan yang memproduksi bentuk-bentuk kepatuhan tertentu. Melalui undangan resmi, daftar hadir, risalah rapat, dan dokumentasi foto, negara dan korporasi dapat menunjukkan bahwa “masyarakat telah dilibatkan”, meski substansi dialog sangat minimal. Praktik ini sering disebut *tokenism*: partisipasi simbolik yang bertujuan menunjukkan citra inklusif tanpa benar-benar menggeser relasi kuasa. Ketika model seperti ini diterapkan pada proyek energi, persetujuan menjadi instrumen untuk menutup debat, bukan membukanya. Padahal, *kebijakan energi berkelanjutan* menuntut perubahan cara hidup, hubungan dengan ruang, dan struktur ekonomi lokal yang sangat dalam, sehingga memerlukan ruang deliberasi yang memungkinkan warga memaknai ulang apa itu pembangunan, risiko, dan keadilan lintas generasi.

FPIC sendiri mengandung tiga dimensi waktu yang sangat politis: “sebelum”, “selama”, dan “sesudah” proyek diputuskan. “Sebelum” berarti komunitas diberi kesempatan untuk memahami konsekuensi proyek sebelum kontrak ditandatangani; “selama” berarti informasi baru dan perubahan desain dibagikan secara jujur; “sesudah” berarti ada ruang evaluasi dan pembetulan jika janji tidak ditepati. Dalam praktik,

banyak proyek hanya menekankan aspek "sebelum" secara formal, sementara dinamika "selama" dan "sesudah" dibiarkan menjadi urusan negosiasi tertutup antara warga dan perwakilan perusahaan. Ketika tanggung jawab pasca-persetujuan tidak diikat dalam regulasi yang jelas, mekanisme legitimasi kehilangan daya korektifnya. Pada titik ini, FPIC dan *hearing* menjadi ritus yang mengesahkan keputusan, bukan struktur yang menjamin keberlanjutan dialog antara pemegang proyek dan komunitas terdampak.

Hubungan antara mekanisme persetujuan dan konflik lokal menjadi sangat nyata ketika janji-janji kompensasi tidak terealisasi, atau ketika dampak lingkungan dan sosial melebihi apa yang dijanjikan. Di banyak kasus, warga merasakan bahwa berita acara persetujuan digunakan untuk menutup pintu protes, karena mereka dianggap telah menyetujui segala konsekuensi proyek. Paradoksnya, dokumen persetujuan ini sering disusun dalam bahasa hukum yang sulit dipahami, sehingga warga tidak sepenuhnya menyadari komitmen apa yang mereka tandatangani. Situasi ini menunjukkan bahwa *kebijakan energi berkelanjutan* yang bergantung pada legitimasi prosedural tanpa memperkuat kapasitas tawar komunitas berisiko besar memproduksi konflik berkepanjangan. Dalam perspektif keadilan, legitimasi yang bertahan bukan hanya yang lahir dari tanda tangan, tetapi yang dibangun dari proses berulang untuk mengakui kerugian, memperbaiki kesalahan, dan menegosiasikan ulang kesepakatan ketika kondisi berubah.

Riset tentang praktik keterlibatan publik dalam proyek angin lepas pantai di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap institusi dan pemimpin proses menjadi kunci rantai legitimasi. Proses yang dirancang untuk membangun "rantai kepercayaan"—dari individu kepada pemimpin proses, dari pemimpin proses kepada prosedur, lalu kepada hasil akhir—terbukti mampu mengurangi resistensi dan meningkatkan

penerimaan terhadap proyek (Dwyer & Bidwell, 2021). Pelajaran pentingnya adalah bahwa FPIC, izin lingkungan, dan *hearing* tidak cukup hanya diumumkan di surat kabar atau situs web pemerintah; mereka harus dirancang sebagai rangkaian perjumpaan yang konsisten, di mana warga dapat menguji niat baik penyelenggara, mengajukan pertanyaan sulit, dan melihat perubahan nyata dalam desain proyek. Tanpa itu, prosedur hanya menjadi satu lagi bentuk komunikasi satu arah yang memproduksi kelelahan partisipasi dan sinisme terhadap institusi.

Jika kita menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan tata kelola energi di Indonesia, tampak bahwa kerangka hukum cenderung memisahkan antara ranah "izin" dan ranah "keadilan". Dokumen Amdal, studi kelayakan, dan persetujuan lingkungan biasanya fokus pada dampak biofisik dan kepatuhan terhadap baku mutu, sementara dimensi keadilan prosedural dan pengakuan kerap dipandang sebagai urusan etis yang "baik kalau ada", bukan kewajiban. Padahal, konflik di sekitar proyek energi sering kali berakar pada rasa diperlakukan tidak adil dalam proses, bukan semata pada kadar polusi atau tingkat kebisingan. Dengan demikian, pembenahan mekanisme persetujuan memerlukan integrasi antara standar lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan prosedural. Ini berarti mengakui bahwa kesepakatan yang lahir dari ancaman kehilangan pekerjaan, kriminalisasi protes, atau ketakutan terhadap aparat, bukanlah persetujuan yang sah secara moral.

Dalam kerangka *kebijakan energi terbarukan* yang dicanangkan negara, mekanisme persetujuan idealnya tidak hanya menjawab pertanyaan "apakah proyek ini boleh jalan?", tetapi juga "dengan syarat apa dan siapa yang berhak mengubah syarat tersebut?". Misalnya, FPIC dapat dipadukan dengan klausul peninjauan berkala yang memungkinkan komunitas mengevaluasi kembali dukungan mereka sejalan dengan perkembangan dampak proyek. Demikian pula, *hearing* publik

dapat dirancang berlapis: mulai dari forum teknis kecil dengan kelompok terdampak langsung, hingga forum regional yang membahas implikasi lebih luas terhadap tata ruang, mata pencaharian, dan identitas budaya. Pada level ini, persetujuan menjadi ruang politis yang hidup, bukan titik final. Ia menggeser logika "sekali tanda tangan, selesai" menjadi logika hubungan jangka panjang yang mengakui kerentanan, perubahan pengetahuan, dan dinamika kekuasaan yang terus bergerak.

Pendekatan deliberatif dapat membantu memindahkan mekanisme persetujuan dari ritual menuju proses pengambilan keputusan yang reflektif. *Deliberation* di sini dapat dijelaskan sebagai bentuk diskusi mendalam di mana para pihak saling bertukar alasan, bukan hanya pendapat, dan mencoba memahami sudut pandang lawan bicara sebelum mengambil posisi akhir. Di dalam forum semacam ini, perbedaan pandangan tentang nilai hutan, laut, atau tanah adat tidak disederhanakan menjadi angka kompensasi, tetapi diakui sebagai perbedaan visi tentang masa depan bersama. Tentu, forum deliberatif rentan terhadap dominasi elit lokal atau juru bicara yang lebih fasih, sehingga perlu desain fasilitasi yang sadar kelas, gender, dan generasi. Namun, dibandingkan sekadar membacakan dokumen izin lingkungan di depan mikrofon, proses deliberatif memberi peluang lebih besar bagi warga untuk membentuk kerangka penilaian mereka sendiri atas risiko dan manfaat proyek energi.

Akhirnya, FPIC, izin lingkungan, dan *hearing* tidak bisa dipahami hanya sebagai syarat administratif dalam daftar panjang pengembangan proyek, tetapi sebagai perwujudan konkret dari bagaimana kekuasaan dijalankan dalam kebijakan energi. Dalam buku ini, kita menempatkan mekanisme persetujuan sebagai cermin hubungan antara negara, pasar, dan komunitas: apakah negara bersedia membatasi dirinya melalui hak veto komunitas, apakah korporasi bersedia menerima keterlambatan proyek demi proses yang lebih adil, dan apakah

komunitas diberi ruang untuk mengubah pikiran tanpa distigma sebagai penghambat pembangunan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu menentukan apakah kebijakan energi diartikan sekadar sebagai percepatan investasi dan penambahan kapasitas terpasang, atau sebagai jalan menuju tatanan sosial yang lebih setara, di mana transisi energi tidak lagi bertumpu pada pengorbanan wilayah dan kelompok yang dianggap paling mudah disisihkan.

16.4 Ketika Partisipasi Menjadi Ritual: Tokenism dan Fatigue Komunitas

Partisipasi publik sering dipromosikan sebagai inti dari tata kelola energi modern, tetapi dalam praktiknya, ia dapat berubah menjadi ritual yang mengosongkan makna demokrasi. Ketika undangan rapat, lokakarya, atau *hearing* dijalankan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, partisipasi kehilangan daya kritisnya sebagai sarana warga untuk mengoreksi, menolak, atau menegosiasikan arah kebijakan. Fenomena ini dikenal sebagai *tokenism*: sebuah kondisi ketika warga "dilibatkan" secara simbolik, tetapi tidak diberi pengaruh nyata terhadap keputusan. Dalam konteks transisi energi, dimana investasi besar dan tekanan waktu sangat tinggi, *tokenism* dapat menjadi cara halus untuk meredam resistensi, bukan untuk menghadirkan deliberasi. Subbab ini membahas bagaimana *tokenism* dan *community fatigue* muncul, bagaimana ia bekerja sebagai teknologi kekuasaan, dan apa dampaknya terhadap legitimasi kebijakan energi.

Penelitian tentang proses perizinan energi angin di Amerika Serikat memperlihatkan bagaimana warga dapat merasa dilibatkan tetapi tidak pernah didengar. Dalam studi mengenai keterlibatan publik dan keadilan prosedural, warga menggambarkan rapat-rapat partisipasi sebagai forum yang "mengumpulkan suara" tetapi jarang mengubah keputusan yang

sudah ditetapkan (Firestone et al., 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah partisipasi bukan terletak pada ada atau tidaknya forum, tetapi pada distribusi kendali atas agenda, cara merespons keberatan, dan ruang bagi perubahan substansial. Ketika warga memahami bahwa suara mereka tidak mempunyai bobot dalam proses akhir, partisipasi berubah dari hak menjadi beban, dan forum partisipatif menjadi sekadar pertunjukan legitimasi.

Dalam konteks *kebijakan energi terbarukan*, *tokenism* muncul ketika proyek energi sudah memiliki desain teknis dan lokasi final, tetapi penyelenggara tetap mengadakan pertemuan publik seakan-akan keputusan masih terbuka. Warga diundang untuk memberi komentar, tetapi komentar tersebut lebih sering diperlakukan sebagai catatan tambahan daripada alasan untuk mengubah keputusan. Prosedur seperti ini menghasilkan kebingungan sekaligus kejengkelan di tingkat lokal: warga merasa diikutsertakan, tetapi tidak diberi kesempatan untuk memengaruhi hasil. Ketika pola ini berulang, warga dapat mengembangkan apatisme partisipatif, yakni kondisi ketika mereka memilih untuk tidak datang lagi ke forum publik karena menganggap kehadiran mereka tidak akan membawa perubahan signifikan.

Pada tingkat yang lebih halus, *tokenism* dapat muncul melalui dominasi bahasa teknis yang membuat warga tidak memiliki kemampuan untuk mempertanyakan klaim ilmiah atau ekonomis yang dibawa oleh perusahaan dan konsultan. Istilah seperti *grid stability*, *feed-in tariff*, atau *intermittency* dapat membuat forum publik tampak terbuka, tetapi sesungguhnya membatasi kemungkinan warga untuk memasuki perdebatan. Ketika warga tidak memahami bahasa teknis tersebut, mereka cenderung diam atau menerima informasi tanpa kritik. Dalam situasi ini, partisipasi tereduksi menjadi kehadiran fisik: warga datang, duduk, dan mendengarkan, tetapi tidak dapat menilai

secara penuh risiko maupun peluang. Secara filosofis, inilah titik ketika bahasa menjadi instrumen kekuasaan, bukan instrumen pemahaman bersama.

Sumber *tokenism* lainnya adalah penentuan aktor yang dianggap "representatif". Pada banyak proyek energi, pemerintah dan perusahaan memilih tokoh tertentu—kepala desa, pimpinan organisasi lokal, atau elite adat—untuk dianggap sebagai perwakilan sah. Namun struktur sosial komunitas sering lebih berlapis daripada sekadar figur formal. Perempuan, anak muda, petani kecil, dan kelompok minoritas kerap tidak muncul dalam struktur representasi formal, padahal merekalah yang paling terdampak oleh perubahan ekologis dan ekonomi akibat proyek. Jika representasi tidak inklusif, partisipasi yang terjadi hanya memperkuat hierarki sosial yang sudah ada, sekaligus menghapus suara kelompok rentan dari proses deliberatif.

Fenomena ini sering diperburuk oleh cara *kebijakan pemerintah* mengatur proses konsultasi dan perizinan. Regulasi yang hanya mensyaratkan "melibatkan masyarakat" tanpa mendefinisikan kualitas partisipasi mendorong agen pelaksana untuk memilih jalan tercepat dan termudah: mengundang aktor yang paling patuh, memilih waktu rapat yang tidak menantang agenda proyek, serta menyusun risalah pertemuan yang tidak mencerminkan keberatan substantif warga. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi menjadi ritual birokratis: ia tampak lengkap di atas kertas, tetapi kosong secara politik. Ketika pemerintah menjadikan partisipasi sebagai prosedur penutup, bukan pembuka ruang kritik, ia kehilangan potensi korektifnya terhadap keputusan yang tidak adil atau terburu-buru.

Riset tentang konflik energi angin di Isthmus of Tehuantepec menunjukkan bagaimana *tokenism* dapat memicu resistensi komunitas dalam jangka panjang. Martínez-Mendoza dan kolega menemukan bahwa banyak konflik muncul bukan karena warga

menolak energi angin sebagai konsep, tetapi karena proses konsultasi dilakukan dengan cara yang meremehkan kapasitas warga untuk menilai dampak (Martínez-Mendoza et al., 2021). Warga diundang dalam forum, tetapi tidak diberi akses informasi yang memadai, dan tidak melihat adanya perubahan rencana meski keberatan telah disampaikan. Ketika partisipasi direduksi menjadi ritual administratif, proyek energi kehilangan legitimasi sosialnya, dan konflik menjadi tak terhindarkan.

Community fatigue atau kelelahan komunitas muncul sebagai efek jangka panjang dari *tokenism*. Fatigue bukan hanya kelelahan fisik karena sering menghadiri rapat, tetapi kondisi psikologis ketika warga merasa bahwa partisipasi tidak membawa hasil. Dalam banyak desa, warga harus menghadiri berbagai forum: pertemuan awal, *hearing*, konsultasi teknis, rapat pembebasan lahan, hingga sesi sosialisasi ulang. Ketika semua forum tersebut tidak berujung pada perubahan nyata, warga mulai menolak datang, atau hadir tanpa antusiasme. Fenomena fatigue ini melemahkan struktur sosial internal, menciptakan ketegangan antarkelompok, dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi publik.

Dalam konteks *kebijakan energi berkelanjutan*, fatigue komunitas menjadi tantangan kritis karena keberhasilan transisi energi bergantung pada kolaborasi jangka panjang antara negara, perusahaan, dan warga. Jika warga sudah terlanjur skeptis, pendekatan teknokratik untuk mempercepat transisi menjadi kontraproduktif. Kelelahan komunitas dapat mendorong warga memilih tindakan yang lebih konfrontatif, seperti pemblokiran lahan, protes, hingga litigasi. Semua ini memperlambat proyek, meningkatkan biaya sosial, dan mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, memahami fatigue berarti memahami batas-batas kesabaran sosial yang tidak boleh dilanggar dalam proses transisi energi.

Fenomena fatigue juga berkaitan dengan apa yang disebut beberapa peneliti sebagai *chains of trust*. Dwyer dan Bidwell menunjukkan bahwa kepercayaan publik dibangun secara bertingkat: mulai dari kepercayaan pada individu, kepercayaan pada fasilitator, kepercayaan pada proses, hingga kepercayaan pada hasil (Dwyer & Bidwell, 2021). Jika salah satu mata rantai ini patah—misalnya ketika fasilitator dianggap tidak netral—maka keseluruhan bangunan kepercayaan runtuh. Ketika kepercayaan hilang, tidak ada volume forum publik yang mampu mengembalikannya. Fatigue muncul bukan karena banyaknya pertemuan, tetapi karena tidak adanya hubungan timbal balik yang dibangun di dalamnya. Inilah paradoks partisipasi: semakin ritualistik prosesnya, semakin cepat kelelahan muncul.

Dari perspektif filosofis, *tokenism* beroperasi sebagai mekanisme untuk menutup kemungkinan munculnya kritik radikal. Ketika forum publik hanya dirancang untuk mengafirmasi keputusan yang telah dibuat, partisipasi menjadi instrumen pelanggengan keputusan, bukan pengujian keputusan. Praktik ini mengalihkan kekuasaan dari meja musyawarah ke meja perencanaan teknokratik. Dengan demikian, *tokenism* merupakan bentuk dominasi simbolik: ia membuat warga percaya bahwa mereka telah dilibatkan, tetapi pada saat yang sama meminggirkan kemampuan mereka untuk mengubah arah kebijakan. Jika praktik seperti ini berlangsung lama, warga belajar bahwa forum publik bukan tempat untuk berbicara, tetapi untuk menyaksikan keputusan yang sudah tidak dapat diubah.

Pada tingkat yang lebih struktural, *tokenism* mempertahankan ketimpangan kekuasaan antara pusat dan pinggiran. Proyek energi sering dirancang oleh aktor negara atau perusahaan transnasional, sementara warga lokal hanya diberi ruang untuk merespons. Dalam banyak kasus, warga juga berhadapan dengan ketidakpastian informasi dan keterbatasan

literasi teknis. Jika tidak ada upaya serius untuk memperkuat kapasitas komunitas—misalnya melalui pendampingan independen atau *community liaison* yang tidak berpihak—partisipasi hanya akan mereproduksi struktur kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, partisipasi ritualistik bukan hanya kegagalan prosedural, tetapi juga kegagalan etis untuk mengakui nilai pengetahuan lokal dan otonomi komunitas dalam transisi energi.

Menariknya, rasa fatigue tidak hanya dialami oleh warga, tetapi juga oleh aktor pemerintah daerah yang sering berada di tengah tekanan. Mereka harus memenuhi target investasi yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus meredakan ketegangan di tingkat lokal. Ketika desain partisipasi tidak memberi mereka kewenangan untuk menunda atau mengubah proyek, mereka juga mengalami kelelahan institusional: kelelahan karena harus menjembatani kepentingan yang tidak dapat mereka pengaruhi. Fatigue institusional ini turut memperlemah legitimasi negara, karena ia membuat pemerintah daerah terlihat tidak mampu atau tidak mau memperjuangkan kepentingan warga, meski kenyataannya struktur kewenangan membuat mereka tidak leluasa.

Di titik inilah penting untuk kembali menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna bukanlah soal berapa banyak forum yang digelar, tetapi soal apakah warga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan. Menghindari *tokenism* berarti mengubah desain partisipasi dari ritual menuju mekanisme deliberatif yang memungkinkan dialog kritis, pengakuan, dan redistribusi suara. Menghindari fatigue berarti membatasi beban partisipasi kepada warga, memastikan bahwa informasi diberikan pada waktu yang tepat, dan bahwa forum publik tidak menjadi alat untuk sekadar mengesahkan keputusan. Dalam kerangka *multi-level governance*, partisipasi bermakna membutuhkan desain ulang hubungan antara negara,

perusahaan, dan komunitas, sehingga setiap pihak memiliki peran yang jelas dan setara dalam menentukan masa depan energi.

Akhirnya, memahami *tokenism* dan *community fatigue* bukan hanya penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi, tetapi untuk memastikan keberlanjutan sosial dari seluruh proyek energi. Transisi energi hanya dapat berhasil jika warga percaya bahwa suara mereka dihargai, prosesnya adil, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks *Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan*, isu ini bukan sekadar kajian teknis, tetapi pertanyaan fundamental tentang siapa yang memiliki hak untuk menentukan langkah-langkah besar yang akan mengubah ruang hidup generasi saat ini dan mendatang. Ketika partisipasi menjadi ritual, transisi energi kehilangan akar sosialnya; tetapi ketika partisipasi menjadi ruang deliberatif yang tulus, ia menjadi fondasi bagi transformasi energi yang adil dan bermakna.

16.5 Mendesain Ulang Partisipasi Menuju Deliberasi Bermakna

Mendesain ulang partisipasi menuju deliberasi bermakna berarti membongkar asumsi lama bahwa "mengundang warga" sudah sama dengan melibatkan warga. Dalam banyak kebijakan publik, partisipasi dijalankan sebagai ritual: rapat diselenggarakan, daftar hadir dikumpulkan, dokumen disosialisasikan, lalu keputusan tetap berjalan sesuai rancangan awal. Ritual semacam ini menghasilkan legitimasi administratif, tetapi tidak menghasilkan legitimasi sosial. Deliberasi bermakna menuntut hal yang lebih sulit: warga tidak hanya hadir, tetapi memiliki kapasitas untuk memahami isu, menimbang konsekuensi, dan memengaruhi keputusan. Dalam bahasa sederhana, deliberasi bermakna adalah partisipasi yang membuat warga bisa berkata "saya mengerti dan saya setuju,"

atau “saya mengerti dan saya menolak,” dengan alasan yang masuk akal. Karena itu, desain partisipasi harus dimulai dari pengakuan bahwa ketimpangan informasi adalah ketimpangan kekuasaan. Jika dokumen kebijakan ditulis dengan bahasa teknis, disebar mendadak, dan dibahas dalam waktu singkat, maka partisipasi sudah kalah sebelum dimulai. Deliberasi membutuhkan waktu, akses informasi, dan mekanisme koreksi. Tanpa tiga hal ini, partisipasi hanya menjadi alat untuk memuluskan kebijakan, bukan alat untuk memperbaiki kebijakan. Dalam konteks tata kelola multi-level, desain deliberasi juga harus mengakui bahwa konflik lokal sering bukan “kesalahpahaman warga”, tetapi hasil dari kebijakan yang menutup ruang negosiasi sejak awal.

Deliberasi bermakna juga menuntut desain kelembagaan yang memindahkan partisipasi dari pinggiran kebijakan ke inti pengambilan keputusan. Ini berarti partisipasi harus memiliki titik masuk yang jelas: kapan warga dilibatkan, isu apa yang bisa dipengaruhi, dan bagaimana masukan publik diintegrasikan ke keputusan final. Jika masukan tidak memiliki jalur formal, maka ia akan selalu dikalahkan oleh kepentingan yang lebih terorganisir. Di sinilah konsep keadilan prosedural menjadi relevan. Keadilan prosedural berarti keadilan cara keputusan dibuat: apakah prosesnya transparan, apakah warga punya kesempatan yang setara, dan apakah ada mekanisme koreksi ketika proses dinilai tidak adil. Penelitian tentang partisipasi sebagai jalur menuju keadilan prosedural menegaskan bahwa partisipasi bukan sekadar tambahan, melainkan elemen yang menentukan legitimasi kebijakan dan ketahanan transisi, karena warga menilai bukan hanya hasil, tetapi juga prosesnya (Shejale et al., 2025). Bagi pembaca awam, maksudnya sederhana: kebijakan yang baik bisa ditolak jika prosesnya terasa curang. Karena itu, desain deliberasi harus memasukkan aturan minimal: keterbukaan data, waktu konsultasi yang

cukup, fasilitator independen, serta kewajiban pemerintah menanggapi masukan secara tertulis. Tanpa tanggapan tertulis, partisipasi akan selalu berakhir sebagai suara yang hilang.

Dalam konteks kebijakan energi, deliberasi bermakna menjadi semakin penting karena proyek transisi sering masuk ke ruang hidup warga: lahan, permukiman, sumber air, dan lanskap sosial. Energi terbarukan, misalnya, sering dipromosikan sebagai proyek bersih, tetapi di tingkat lokal ia dapat memicu konflik karena menyentuh hak tanah, mata pencaharian, dan identitas komunitas. Karena itu, desain ulang partisipasi harus memastikan bahwa warga tidak hanya diberi informasi, tetapi juga diberi ruang untuk merundingkan manfaat dan risiko. Di sinilah konsep *procedural justice* dan *benefit-sharing* perlu dijalankan secara nyata. *Benefit-sharing* dapat dijelaskan sederhana sebagai pembagian manfaat: warga tidak hanya menerima dampak, tetapi juga menerima keuntungan yang jelas, misalnya pendapatan komunitas, tarif khusus, atau program pembangunan lokal. Studi tentang keterlibatan publik dalam pembangunan surya skala besar menunjukkan bahwa keadilan prosedural adalah faktor kunci penerimaan sosial, karena warga menilai apakah prosesnya menghormati mereka sebagai pemilik ruang hidup, bukan sekadar sebagai objek sosialisasi (Hoesch et al., 2025). Dengan demikian, deliberasi bermakna harus menempatkan warga sebagai subjek kebijakan. Dalam kebijakan energi, ini berarti ada ruang negosiasi tentang lokasi proyek, kompensasi, pembagian manfaat, dan mekanisme pengaduan. Jika ruang ini tidak dibangun, maka partisipasi akan kembali menjadi ritual, dan konflik lokal akan terus muncul sebagai harga sosial dari transisi.

Desain ulang partisipasi menuju deliberasi bermakna membutuhkan pergeseran dari logika "konsultasi cepat" ke logika pembentukan kapasitas publik. Banyak proses partisipasi gagal bukan karena warga tidak peduli, melainkan karena

arsitekturnya tidak memungkinkan warga memahami isu secara memadai: informasi terlalu teknis, waktu terlalu sempit, dan pilihan yang ditawarkan sudah dikunci sejak awal. Deliberasi bermakna menuntut perangkat penyangga: ringkasan kebijakan yang mudah dipahami, forum tanya jawab yang tidak intimidatif, serta fasilitasi yang menjaga agar suara minoritas tidak tenggelam oleh aktor yang lebih vokal. Di sini, istilah *energy system modelling* perlu dijelaskan secara sederhana: ini adalah cara membuat "peta simulasi" tentang bagaimana energi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, agar pembuat kebijakan bisa membandingkan skenario. Namun, bila peta simulasi itu hanya dipahami ahli, maka deliberasi berubah menjadi presentasi sepihak. Karena itu, kajian tentang metode partisipatif dalam pemodelan dan perencanaan energi menegaskan perlunya membuka asumsi model, pilihan data, dan konsekuensi skenario kepada publik dengan cara yang bisa diikuti warga (McGookin et al., 2021). Konsekuensinya, desain partisipasi harus memasukkan tahap pembelajaran publik, bukan sekadar penyerapan aspirasi.

Deliberasi yang bermakna juga harus memutus kebiasaan "partisipasi pura-pura", yaitu proses yang terlihat partisipatif tetapi secara prosedural tidak adil. Partisipasi pura-pura biasanya punya tiga tanda: agenda rapat sudah ditentukan, pertanyaan kritis tidak dicatat sebagai masukan formal, dan keputusan final tidak menunjukkan jejak perubahan yang bisa ditelusuri. Dalam bahasa sederhana, warga diajak bicara tetapi tidak diajak memutuskan. Ketika pola ini berulang, yang rusak bukan hanya proyek, melainkan kepercayaan pada institusi. Pelajaran penting dari studi tentang ketidakadilan prosedural dalam proyek infrastruktur besar menunjukkan bahwa manipulasi prosedur dapat memicu konflik berkepanjangan karena warga merasa prosesnya mencabut martabat mereka sebagai pihak yang terdampak (Mayer et al., 2022). Untuk

menghindari hal itu, desain ulang partisipasi harus mengunci kewajiban *reason-giving*: pemerintah wajib memberi alasan tertulis mengapa sebuah masukan diterima atau ditolak, dan alasan itu bisa diuji publik. Selain itu, deliberasi perlu memisahkan ruang informasi dan ruang keputusan: forum informasi menjelaskan data dan risiko, sedangkan forum keputusan menegosiasikan opsi, kompensasi, serta mekanisme pengaduan yang memiliki tenggat dan sanksi.

Pada tingkat multi-level governance, deliberasi bermakna akan rapuh jika tidak ada konsistensi lintas level kebijakan, terutama ketika kebijakan energi dikejar dengan target nasional tetapi dampaknya ditanggung lokal. Karena itu, desain partisipasi harus menyertakan "jalur eskalasi" yang jelas: jika sengketa tidak selesai di tingkat Kabupaten atau Kota, warga tahu ke mana mengadu, siapa yang menilai, dan kapan keputusan korektif keluar. Di titik ini, penting membedakan *engagement* dan *misengagement*. *Engagement* berarti keterlibatan yang memberi ruang aman untuk berbicara, memahami, dan memengaruhi keputusan; sedangkan *misengagement* dapat dijelaskan sederhana sebagai keterlibatan yang salah desain: warga diundang, tetapi formatnya membuat mereka tidak bisa berkontribusi secara setara. Studi tentang cara menghindari misengagement pada pengembangan surya skala besar menekankan bahwa kualitas proses—bukan sekadar jumlah pertemuan—menentukan penerimaan komunitas dan daya tahan proyek (Bessette et al., 2025). Maka, deliberasi bermakna perlu diikat oleh standar minimum: keterbukaan data, waktu konsultasi yang realistis, representasi kelompok rentan, dan audit proses partisipasi. Tanpa standar ini, partisipasi akan kembali menjadi ritual, dan konflik lokal akan terus muncul sebagai biaya sosial dari kebijakan energi.

Deliberasi bermakna tidak akan pernah stabil jika desain partisipasi hanya berfokus pada "forum" dan melupakan ekologi

sosial konflik. Dalam tata kelola multi-level, konflik lokal sering muncul bukan karena warga anti-perubahan, tetapi karena warga membaca adanya ketimpangan kuasa: keputusan dibuat di level yang jauh, lalu dibawa turun sebagai paket jadi. Karena itu, partisipasi harus dirancang sebagai proses negosiasi yang berlapis, bukan sebagai acara tunggal. Pemerintah perlu menetapkan ruang deliberasi berulang, dengan agenda yang berkembang dari informasi dasar menuju negosiasi opsi, dan akhirnya menuju kesepakatan yang dapat diuji. Dalam bahasa sederhana, deliberasi bukan rapat satu kali, melainkan rangkaian perundingan yang memberi kesempatan warga memahami, mengoreksi, dan menegosiasikan keputusan. Jika pemerintah memaksa satu pertemuan sebagai "bukti partisipasi", maka yang terjadi adalah delegitimasi. Di sinilah pentingnya mekanisme koreksi: warga harus bisa meminta peninjauan ulang, bukan hanya menyampaikan keluhan. Selain itu, deliberasi harus memiliki perlindungan bagi kelompok rentan yang sering tidak punya kapasitas hadir atau berbicara, misalnya pekerja informal, perempuan, atau komunitas adat. Tanpa perlindungan ini, deliberasi hanya menjadi panggung bagi aktor yang sudah kuat, dan partisipasi kembali jatuh ke bentuk ritual yang secara prosedural tampak rapi tetapi secara sosial menindas.

Desain ulang partisipasi juga harus mengatasi ketimpangan pengetahuan sebagai bentuk dominasi halus. Dalam kebijakan publik modern, terutama pada proyek energi, bahasa teknis sering menjadi pagar yang menyingkirkan warga dari ruang keputusan. Salah satu strategi penting adalah membangun *knowledge translation*, yaitu penerjemahan pengetahuan teknis ke bahasa yang mudah dipahami tanpa menghilangkan substansi. *Knowledge translation* dapat dijelaskan sederhana sebagai proses mengubah laporan ahli menjadi penjelasan yang bisa dipakai warga untuk menimbang risiko dan manfaat. Penelitian tentang partisipasi dalam

pemodelan dan perencanaan energi menunjukkan bahwa keterlibatan publik yang lebih bermakna membutuhkan transparansi terhadap asumsi, skenario, dan ketidakpastian, sehingga warga tidak hanya diberi hasil akhir, tetapi juga diberi pemahaman tentang bagaimana hasil itu dibentuk (McGookin et al., 2021). Ini penting karena warga sering menolak bukan karena menolak proyek, tetapi karena menolak cara proyek "diputuskan" tanpa mereka. Karena itu, deliberasi harus memasukkan ruang pembelajaran yang netral, misalnya sesi pembacaan peta risiko, penjelasan dampak sosial, serta simulasi skenario. Kompromonya jelas: proses menjadi lebih panjang dan membutuhkan biaya fasilitasi. Namun biaya ini adalah investasi legitimasi. Tanpa legitimasi, proyek apa pun—bahkan yang secara teknis benar—akan rapuh karena ditopang oleh ketidakpercayaan.

Dalam kebijakan energi, deliberasi bermakna harus diarahkan pada tujuan yang lebih konkret daripada sekadar "mendengar aspirasi." Deliberasi harus menghasilkan kontrak sosial yang bisa diverifikasi: siapa mendapat manfaat, siapa menanggung beban, bagaimana kompensasi dihitung, dan bagaimana sengketa diselesaikan. Energi terbarukan akan menjadi sumber konflik jika manfaatnya terpusat pada investor dan beban sosialnya jatuh pada warga lokal. Karena itu, desain deliberasi harus memasukkan mekanisme *benefit-sharing* yang jelas dan tertulis. *Benefit-sharing* dapat dijelaskan sederhana sebagai pembagian keuntungan proyek kepada komunitas terdampak, misalnya melalui dana komunitas, tarif khusus, atau prioritas kerja lokal. Studi tentang keterlibatan publik dalam pembangunan surya skala besar menunjukkan bahwa keadilan prosedural tidak bisa dipisahkan dari struktur pembagian manfaat, karena warga menilai apakah mereka diperlakukan sebagai mitra atau sebagai hambatan (Hoesch et al., 2025). Dengan demikian, deliberasi bermakna harus menempatkan

pembagian manfaat sebagai agenda utama, bukan agenda tambahan. Dalam tata kelola multi-level, ini berarti pemerintah pusat menetapkan standar minimum, pemerintah daerah mengadaptasi sesuai konteks, dan komunitas memiliki hak untuk menegosiasikan detail. Jika desain ini dijalankan, maka deliberasi bukan lagi ritual administratif, melainkan perangkat demokrasi yang membuat kebijakan energi lebih tahan konflik, lebih adil, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan.

17 Legitimasi Sosial Proyek: Beban/Benefit, Rasa Tidak Adil, dan Desain Ulang Mandat Institusional

17.1 Konsep Social Licence to Operate dalam Energi Berkelanjutan

Konsep *social licence to operate* awalnya berkembang dalam konteks industri pertambangan, tetapi kini menjadi kunci untuk membaca legitimasi sosial proyek energi yang mengklaim dirinya berkelanjutan. Berbeda dengan izin legal yang dikeluarkan negara, *social licence to operate* adalah "izin tak tertulis" yang diberikan atau ditarik oleh komunitas yang terdampak. Izin ini tidak dituangkan dalam pasal undang-undang, tetapi termanifestasi dalam bentuk dukungan, toleransi, atau justru resistensi sehari-hari terhadap proyek. Dalam filsafat kekuasaan, konsep ini penting karena menggeser fokus dari legalitas formal ke penerimaan sosial yang dinamis: proyek boleh sah secara hukum, tetapi kehilangan legitimasi jika warga memandangnya tidak adil. Subbab ini membahas bagaimana *social licence to operate* dibentuk, dinegosiasikan, dan digugat dalam konteks energi berkelanjutan, serta apa implikasinya bagi desain mandat institusional negara dan pelaku pasar.

Dalam literatur mutakhir, *social licence to operate* dipahami sebagai kombinasi kepercayaan, legitimasi, dan penerimaan yang dibangun melalui interaksi berulang antara perusahaan, pemerintah, dan komunitas. Turan dan Gürluk menekankan bahwa lisensi sosial ini bukan status biner—ada atau tidak ada—melainkan spektrum yang dapat menguat atau melemah seiring perubahan praktik dan persepsi (Turan dan

Gürluk, 2024). Artinya, proyek dapat memulai dengan tingkat penerimaan yang tinggi karena janji manfaat ekonomi, tetapi kehilangan lisensi sosial ketika janji tersebut tidak dipenuhi atau ketika beban lingkungan ternyata lebih besar daripada yang dikomunikasikan. Di sini, kekuasaan tidak lagi hanya diukur dari kemampuan mendapatkan izin formal, melainkan dari kemampuan menjaga hubungan kepercayaan dengan komunitas terdampak yang selalu menilai ulang apakah proyek masih pantas diterima.

Dalam konteks *kebijakan energi terbarukan*, *social licence to operate* sering dimobilisasi untuk menjelaskan mengapa proyek yang "baik di atas kertas"—misalnya pembangkit angin, surya, atau bioenergi—tetap menghadapi penolakan di tingkat lokal. Narasi resmi biasanya menonjolkan kontribusi terhadap penurunan emisi dan pencapaian target iklim, tetapi warga menilai proyek melalui pengalaman konkret: apakah akses mereka terhadap tanah, air, dan ruang hidup membaik atau memburuk; apakah lapangan kerja yang dijanjikan benar-benar muncul; dan apakah suara mereka diakui dalam pengambilan keputusan. Ketika ada jurang antara narasi makro dan pengalaman mikro, lisensi sosial mulai retak. Hal ini menunjukkan bahwa energi terbarukan tidak otomatis membawa legitimasi; ia harus secara aktif dinegosiasikan melalui distribusi manfaat dan beban yang dianggap adil oleh komunitas.

Konsep *social licence to operate* juga mengungkap lapisan kekuasaan yang tersembunyi dalam mekanisme partisipasi dan persetujuan. Di permukaan, proyek yang mengikuti prosedur konsultasi, *hearing*, dan izin lingkungan tampak sudah memenuhi standar legitimasi. Namun, jika proses itu dirasakan sebagai ritual, dan bukannya ruang untuk bernegosiasi secara substantif, maka warga dapat memberikan "persetujuan" secara formal sambil menarik dukungan dalam praktik. Penarikan

lisensi sosial bisa berbentuk boikot tenang, penolakan menyediakan lahan, sabotase halus, hingga protes terbuka. Dengan kata lain, *social licence to operate* menunjukkan bahwa komunitas memiliki cadangan kekuasaan yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh prosedur legal. Kekuasaan ini muncul dari kemampuan mereka untuk mengganggu kelancaran proyek ketika merasa keadilan telah dilanggar.

Dalam studi tentang tata kelola keberlanjutan, Stupak dan kolega menyoroti bahwa lisensi sosial sangat bergantung pada persepsi keadilan prosedural dan distributif: apakah proses dianggap adil dan apakah distribusi manfaat–beban dianggap wajar (Stupak, Mansoor, dan Smith, 2021). Keadilan prosedural menyangkut sejauh mana komunitas terlibat dalam perumusan keputusan, mendapatkan informasi yang jujur, dan memiliki peluang nyata untuk mempengaruhi hasil. Keadilan distributif menyangkut siapa yang mendapat keuntungan ekonomi, siapa yang menanggung beban ekologis, dan bagaimana beban tersebut dikompensasi. Bila salah satu dimensi ini runtuh—misalnya proses tampak tertutup atau manfaat terlalu terkonsentrasi—lisensi sosial melemah, bahkan jika prosedur hukum tidak bermasalah. Di sini, konsep *social licence to operate* memaksa kita membaca legitimasi dari sudut pandang mereka yang merasakan dampak, bukan hanya dari sudut pandang regulator.

Respons terhadap melemahnya lisensi sosial sering kali berupa penyesuaian kosmetik dalam *kebijakan pemerintah*: menambah jumlah sosialisasi, memperbanyak pertemuan, atau memperhalus bahasa komunikasi. Padahal, desain lisensi sosial yang kokoh membutuhkan perubahan lebih dalam dalam mandat institusional. Negara perlu mengakui bahwa kewenangannya tidak cukup hanya menerbitkan izin, tetapi juga menjamin bahwa izin itu diberikan dalam kerangka keadilan sosial dan ekologis yang diakui komunitas. Turan dan Gürluk

menunjukkan bahwa pemerintah yang terlalu berpihak pada percepatan investasi, tanpa memelihara kepercayaan publik, justru melemahkan lisensi sosial dan menghadirkan ketidakpastian politik bagi proyek itu sendiri (Turan dan Gürluk, 2024). Dengan kata lain, mandat institusional perlu digeser dari sekadar "memastikan proyek jalan" menjadi "memastikan proyek berjalan dengan legitimasi sosial yang berkelanjutan".

Di banyak wilayah Global South, *social licence to operate* harus dibaca dalam konteks sejarah ketidakadilan dan praktik ekstraktivisme yang panjang. Komunitas yang pernah mengalami penggusuran, pencemaran, atau peminggiran akibat proyek sebelumnya membawa memori kolektif ke dalam setiap interaksi baru dengan negara dan perusahaan. Lisensi sosial tidak dibangun di ruang kosong; ia dibentuk oleh lapisan pengalaman traumatis, janji yang tidak ditepati, dan relasi kuasa yang timpang. Dalam konteks ini, proyek energi berkelanjutan perlu memulai dengan pengakuan eksplisit terhadap sejarah tersebut, bukan seolah-olah masa lalu dapat dihapus begitu saja oleh narasi "transisi hijau". Tanpa pengakuan ini, komunitas cenderung membaca setiap janji baru sebagai pengulangan pola lama, sehingga *social licence to operate* sulit diperoleh meskipun desain proyek tampak lebih ramah lingkungan.

Lisensi sosial bukan hanya persoalan hubungan antara komunitas dan perusahaan, tetapi juga melibatkan hubungan horizontal antar anggota komunitas sendiri. Proyek energi sering kali memecah komunitas menjadi "penerima manfaat" dan "penerima beban". Pemilik lahan yang disewa untuk infrastruktur mungkin mendapat pemasukan baru, sementara nelayan, penggarap, atau pekerja informal yang bergantung pada ekosistem yang berubah tidak mendapat kompensasi sepadan. Ketika ketimpangan ini muncul, konflik internal dapat melemahkan kohesi sosial dan menciptakan persepsi bahwa lisensi sosial sebenarnya hanya diberikan oleh sebagian kecil komunitas. Dalam

perspektif filsafat kekuasaan, perusahaan dan negara terkadang diuntungkan oleh fragmentasi ini, karena mereka dapat mengklaim adanya dukungan lokal sambil mengabaikan suara kelompok yang tidak diakui sebagai "pemangku kepentingan sah".

Dalam kerangka *kebijakan energi berkelanjutan*, *social licence to operate* seharusnya dibaca lebih luas daripada sekadar penerimaan atas satu proyek. Ia berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang arah perubahan sistem energi secara keseluruhan: apakah transisi dirasakan sebagai kesempatan memperbaiki ketimpangan historis, atau justru sebagai bentuk baru penguasaan ruang oleh modal dan negara. Jika transisi energi hanya mengganti teknologi—dari fosil ke terbarukan—tanpa mengubah cara keputusan dibuat dan manfaat dibagikan, lisensi sosial akan rapuh. Warga mungkin menerima satu proyek secara terpaksa, tetapi resistensi akan muncul dalam bentuk lain, seperti penolakan terhadap proyek lanjutan atau penuntutan hukum di kemudian hari. Dengan demikian, social licence dalam energi berkelanjutan selalu terhubung dengan pertanyaan lebih besar tentang keadilan transisi.

Pertanyaan penting berikutnya adalah: bagaimana mengukur *social licence to operate*? Lembi dan kolega mengusulkan bahwa lisensi sosial dapat dipahami melalui kombinasi indikator kuantitatif—seperti survei sikap, tingkat partisipasi, dan frekuensi protes—serta indikator kualitatif, seperti narasi kepercayaan dan rasa hormat yang muncul dalam wawancara komunitas (Lembi et al., 2025). Pendekatan ini menolak pandangan bahwa lisensi sosial dapat direduksi menjadi satu angka indeks; sebaliknya, ia menekankan dinamika dan keberagaman persepsi. Bagi perancang kebijakan, ini berarti bahwa evaluasi legitimasi sosial tidak bisa diserahkan hanya pada laporan konsultan, tetapi membutuhkan keterlibatan langsung dengan suara warga, termasuk suara minoritas yang mungkin tidak muncul dalam statistik agregat.

Lembi dan kolega juga menekankan pentingnya mekanisme keluhan dan remediasi sebagai bagian integral dari lisensi sosial (Lembi et al., 2025). Lisensi sosial bukan berarti komunitas tidak pernah marah atau kecewa; sebaliknya, ia bergantung pada kemampuan institusi menanggapi keluhan secara adil dan tepat waktu. Mekanisme keluhan yang kuat memungkinkan konflik dikelola sebelum meledak, dan memberi ruang bagi koreksi ketika terjadi kesalahan. Tanpa mekanisme semacam ini, setiap pelanggaran janji atau kegagalan mitigasi akan terkumpul menjadi alasan kuat untuk menarik lisensi sosial. Dalam perspektif kekuasaan, mekanisme keluhan bukan sekadar saluran teknis, tetapi ruang politis di mana warga dapat menguji sejauh mana institusi bersedia bertanggung jawab atas konsekuensi keputusan mereka.

Pertimbangan mengenai *social licence to operate* mengarah pada kebutuhan mendesak untuk merancang ulang mandat institusional dalam mengelola proyek energi, terutama di bawah payung *kebijakan energi terbarukan*. Mandat lembaga lingkungan, energi, dan investasi sering kali terbatas pada pencapaian target teknis: kapasitas terpasang, penurunan emisi, atau volume investasi. Jika lisensi sosial tidak menjadi bagian eksplisit dari mandat—misalnya melalui kewajiban memastikan keadilan prosedural, pengakuan hak komunitas adat, dan transparansi distribusi manfaat—maka lembaga-lembaga ini cenderung mengabaikannya demi mengejar target yang lebih mudah diukur. Desain ulang mandat harus memasukkan indikator legitimasi sosial sebagai tolok ukur keberhasilan, sejajar dengan indikator teknis dan ekonomi.

Desain ulang mandat institusional juga menyentuh tata hubungan antar level pemerintahan. Pemerintah pusat mungkin berfokus pada komitmen internasional dan stabilitas investasi, sementara pemerintah daerah berhadapan langsung dengan tekanan komunitas. Tanpa pembagian kewenangan yang jelas,

pemerintah daerah dapat terjebak sebagai "tameng sosial" yang menanggung kemarahan warga, tanpa memiliki kapasitas untuk mengubah desain proyek. Konsep *social licence to operate* menuntut agar pemerintah daerah tidak hanya dijadikan pelaksana, tetapi juga penjaga legitimasi sosial dengan hak untuk menunda atau menolak proyek yang belum memperoleh lisensi sosial di tingkat lokal. Hal ini menggeser arsitektur kekuasaan dari model satu arah—dari pusat ke daerah—ke model yang mengakui otonomi politis komunitas dan pemerintah lokal.

Secara filosofis, *social licence to operate* mengajak kita melihat ulang hubungan antara legalitas, moralitas, dan penerimaan sosial. Legalitas mungkin cukup untuk melindungi proyek dari tuntutan hukum, tetapi tidak cukup untuk mencegah konflik, sabotase, atau penarikan dukungan politik. Moralitas menyangkut pertanyaan apakah keputusan tersebut adil, meski legal; lisensi sosial menambahkan dimensi ketiga: apakah keputusan itu dirasakan adil oleh mereka yang terdampak. Dalam kebijakan energi, pertanyaan-pertanyaan ini makin mendesak karena proyek-proyek yang diklaim menyelamatkan planet dapat, pada saat yang sama, merusak kehidupan komunitas tertentu. Dengan memasukkan konsep *social licence to operate* ke dalam analisis, kita dipaksa untuk berhenti menganggap transisi energi sebagai imperatif teknis semata, dan mulai melihatnya sebagai proses politis yang sarat pertarungan nilai.

Akhirnya, pembahasan tentang *social licence to operate dalam energi berkelanjutan* membawa kita pada kesimpulan penting: legitimasi sosial bukanlah bonus, melainkan fondasi bagi keberlangsungan proyek. Tanpa lisensi sosial, proyek yang secara teknis canggih dan legal sekalipun akan terus berada dalam bayang-bayang resistensi. Dalam kerangka Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan, lisensi sosial

adalah ekspresi dari kedaulatan warga atas ruang hidup mereka, yang tidak dapat digantikan oleh tanda tangan dalam dokumen resmi. Tugas utama kebijakan energi ke depan bukan hanya mengejar kapasitas terpasang atau angka penurunan emisi, tetapi merancang tatanan institusional yang menjamin bahwa setiap proyek energi lahir dari perjumpaan yang adil antara negara, pasar, dan komunitas, dengan lisensi sosial sebagai penanda bahwa perjumpaan itu layak dilanjutkan.

17.2 Persepsi Keadilan: Prosedural, Distributif, dan Pengakuan

Persepsi keadilan dalam proyek energi menentukan apakah sebuah proyek diterima sebagai bagian sah dari pembangunan, atau justru dianggap sebagai intervensi yang mengancam ruang hidup komunitas. Keadilan bukan sekadar konsep abstrak; ia termanifestasi dalam cara masyarakat mengalami proses pengambilan keputusan, pembagian manfaat dan beban, serta bagaimana identitas dan pengalaman mereka diakui. Ketika sebuah proyek energi memasuki suatu wilayah, ia membawa serta tiga dimensi keadilan—prosedural, distributif, dan pengakuan—yang akan menentukan apakah warga menilai proyek tersebut legitimate secara sosial. Ketiga dimensi ini saling terkait: proses yang buruk biasanya menghasilkan pembagian beban yang timpang, sementara kegagalan mengakui keberagaman sosial membuat prosedur tampak manipulatif. Inilah sebabnya mengapa analisis legitimasi energi tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam mengenai bagaimana warga memaknai keadilan dalam pengalaman konkret mereka.

Keadilan prosedural mengacu pada sejauh mana warga dilibatkan secara bermakna dalam proses keputusan. Dalam studi mengenai keadilan energi, Zhong dan kolega (2024) menekankan bahwa keadilan prosedural hanya muncul ketika

warga merasa informasi disampaikan secara transparan, kesempatan untuk memberikan masukan tersedia, dan suara mereka dipertimbangkan. Jika proses konsultasi atau *hearing* dilakukan dengan tempo cepat, dalam bahasa teknis, atau tanpa ruang untuk mempengaruhi hasil, warga tidak memiliki alasan untuk mempercayai integritas proses. Mereka mungkin hadir secara fisik, tetapi secara politis tidak pernah benar-benar hadir sebagai subjek yang memiliki hak. Di sinilah keadilan prosedural menjadi pondasi legitimasi: proses yang adil menciptakan peluang bagi warga untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari percakapan, bukan objek dari keputusan teknokratik.

Dalam konteks *kebijakan energi terbarukan*, keadilan prosedural seringkali diuji ketika proyek dihadapkan pada masyarakat yang tidak memiliki literasi teknis yang sama dengan para ahli. Transformasi dari energi fosil menuju energi bersih sering digambarkan sebagai agenda ilmiah, padahal warga menilai keadilan dari pengalaman mereka berinteraksi dengan institusi, bukan dari grafik penurunan emisi. Ketika konsultasi disusun sebagai ritual formal alih-alih sebagai ruang deliberatif, proyek energi terbarukan dianggap tidak berbeda dari proyek ekstraktif biasa. Warga melihat bahwa keputusan sudah diambil, sementara forum publik hanya menjadi sarana merapikan legitimasi administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa transisi energi tidak otomatis membawa keadilan; keadilan harus dibangun melalui prosedur yang mengakui hak warga untuk terlibat sejak awal dan untuk mempengaruhi hasil kebijakan.

Keadilan distributif mengukur apakah manfaat dan beban suatu proyek dibagi secara adil. Menurut Lee, Seo, dan Lee (2025), keadilan distributif tidak hanya berbicara tentang pembagian kompensasi finansial, tetapi juga perubahan akses terhadap ruang, kualitas lingkungan, dan peluang ekonomi jangka panjang. Sebuah proyek mungkin menghasilkan listrik

untuk kota besar, tetapi beban ekologisnya ditanggung oleh desa kecil yang kehilangan lahan, perairan, atau keheningan. Ketika manfaat berskala nasional tetapi beban bersifat lokal, warga cenderung melihat proyek sebagai ketidakadilan struktural. Di sinilah konflik energi biasanya tumbuh: bukan karena warga menolak teknologi, tetapi karena mereka melihat ketimpangan yang dilegalkan oleh proyek. Oleh sebab itu, keadilan distributif bukan isu sekunder, melainkan ukuran moral apakah sebuah proyek layak dilanjutkan.

Lebih jauh, keadilan distributif juga melibatkan pertanyaan tentang waktu. Dampak lingkungan atau sosial mungkin baru muncul setelah beberapa tahun, sementara manfaat ekonomi seperti kompensasi lahan diterima hanya sekali. Ketimpangan temporal ini menciptakan situasi di mana generasi sekarang menerima manfaat tetapi generasi berikutnya menerima beban. Dalam banyak komunitas, hal ini menciptakan rasa bersalah dan ketidaknyamanan antar generasi: keputusan yang diambil oleh segelintir elite lokal hari ini mungkin menjadi masalah bagi anak cucu. Di sinilah keadilan distributif bertemu dengan pertimbangan etis yang lebih dalam. Transisi energi yang benar-benar adil adalah transisi yang mempertimbangkan keberlanjutan dampak lintas generasi, bukan sekadar perhitungan biaya dan manfaat jangka pendek.

Jika dimensi prosedural dan distributif sering muncul dalam diskusi publik, keadilan pengakuan justru lebih tersembunyi, meski sama pentingnya. Keadilan pengakuan berkaitan dengan apakah identitas, nilai budaya, pengalaman historis, dan bentuk pengetahuan lokal dihormati. Dalam banyak kasus, *kebijakan pemerintah* melihat warga sebagai kelompok homogen yang dapat diberi informasi standar melalui brosur atau rapat besar. Padahal komunitas memiliki nilai dan identitas yang tidak dapat dinilai dengan ukuran teknis: tanah bisa dianggap suci, suara angin bisa menjadi bagian budaya, dan

lanskap memiliki makna simbolis. Ketika kebijakan gagal mengakui dimensi ini, warga melihat proyek energi sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka, bukan sekadar ancaman fisik. Keadilan pengakuan menuntut negara untuk tidak hanya menjelaskan proyek, tetapi mendengarkan bagaimana komunitas memahami dunia mereka sendiri.

Studi mengenai energi berkelanjutan menunjukkan bahwa ketidakadilan pengakuan seringkali menjadi akar dari resistensi keras. Barragán-Contreras (2022), dalam kajian tentang proyek surya di Meksiko, memperlihatkan bagaimana ketidakadilan muncul bukan karena beban ekologis terbesar, tetapi karena negara gagal mengakui struktur sosial dan nilai budaya komunitas. Prosedur partisipasi dilakukan, tetapi hanya untuk mereka yang dianggap "representatif" dalam struktur formal, sehingga suara perempuan, pemuda, dan kelompok adat tersingkir. Kehilangan pengakuan ini menimbulkan rasa sakit kolektif yang tidak dapat diselesaikan dengan kompensasi. Di sinilah keadilan pengakuan menjadi dimensi kritis legitimasi sosial: tanpa pengakuan, setiap manfaat ekonomi kehilangan bobot moralnya.

Keadilan pengakuan juga berkaitan dengan bagaimana pengetahuan lokal diberi ruang dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan lokal sering dianggap inferior dibandingkan model teknis atau studi ilmiah, padahal ia memberikan wawasan mendalam tentang pola ekologi, sejarah bencana, atau karakter sosial yang tidak dicatat dalam dokumen resmi. Dong dan kolega (2023) menekankan bahwa penerapan teknologi energi terbarukan yang tidak sensitif terhadap pengetahuan lokal berpotensi menciptakan ketidakadilan pengakuan yang serius. Ketika warga melihat bahwa pengalaman mereka dianggap tidak relevan, mereka menginterpretasikan proyek sebagai bentuk dominasi teknokratik. Akibatnya, rasa keterikatan dan kepercayaan terhadap institusi publik melemah, dan lisensi sosial semakin sulit dijaga.

Dalam konteks *kebijakan energi berkelanjutan*, ketiga dimensi keadilan tersebut harus dipahami sebagai satu paket, bukan entitas yang dapat dipenuhi secara terpisah. Prosedur yang adil tidak akan banyak berarti jika manfaat dan beban tetap timpang, dan distribusi yang tampak seimbang pun tidak memadai jika identitas komunitas tidak diakui. Keadilan berkelanjutan harus berakar pada pemahaman utuh tentang pengalaman warga, bukan sekadar indikator kuantitatif yang mengabaikan dinamika sosial. Kebijakan energi berkelanjutan karenanya membutuhkan kerangka evaluasi yang dapat menangkap kompleksitas ini, agar tidak terjebak pada pendekatan "asal melibatkan publik" yang justru memperburuk ketidakpercayaan.

Dimensi-dimensi keadilan ini saling menguatkan—atau saling melemahkan. Ketidakadilan prosedural, misalnya, sering menghasilkan ketidakadilan distributif. Jika warga tidak diberi ruang untuk menegosiasikan skema manfaat dan kompensasi, beban pasti jatuh pada kelompok yang paling rentan. Sementara ketidakadilan pengakuan dapat melumpuhkan efektivitas prosedural: warga tidak akan percaya pada forum partisipasi jika identitas mereka tidak diakui. Inilah sebabnya mengapa evaluasi legitimasi harus dimulai dengan melihat apakah ketiga dimensi ini muncul dalam rancangan kebijakan, bukan setelah proyek berjalan. Transisi energi yang gagal membaca hubungan antar keadilan ini cenderung menghasilkan proyek yang dipaksakan, bukan disepakati.

Dalam banyak kasus, warga menolak proyek bukan karena mereka anti-teknologi, tetapi karena mereka merasa kehilangan kontrol atas masa depan ruang hidup mereka. Penelitian oleh Lembi dan kolega (2025) menunjukkan bahwa rasa kehilangan kontrol ini erat kaitannya dengan ketidakadilan prosedural dan pengakuan. Ketika warga merasa diperlakukan sebagai objek persuasi, bukan sebagai pelaku aktif, legitimasi sosial proyek

merosot tajam. Perasaan tidak dihargai ini menciptakan stigma terhadap proyek energi secara keseluruhan, bahkan ketika secara ekologis proyek tersebut memberikan manfaat. Karena itu, pemulihan legitimasi sosial membutuhkan strategi yang lebih dalam daripada kampanye informasi; ia memerlukan perubahan struktur kuasa dalam pengambilan keputusan.

Bagi perancang *kebijakan energi terbarukan*, tantangan terbesar adalah menghubungkan keadilan prosedural, distributif, dan pengakuan ke dalam mandat institusi yang selama ini lebih fokus pada target teknis seperti kapasitas terpasang atau penurunan emisi. Ketika institusi hanya diberi tolok ukur teknis, keadilan diperlakukan sebagai isu sekunder. Padahal, legitimasi sosial menentukan keberlangsungan proyek sama kuatnya dengan efisiensi teknis. Dengan memasukkan ketiga dimensi keadilan ke dalam indikator kinerja institusional, negara dapat mengarahkan birokrasi untuk tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi memastikan bahwa prosedur tersebut menciptakan ruang deliberatif yang adil bagi warga. Di sinilah desain mandat institusi menjadi bagian tak terpisahkan dari keadilan energi.

Persepsi keadilan juga bersifat dinamis. Warga mungkin mendukung proyek pada awalnya, tetapi menarik dukungan ketika dampak tidak sesuai janji, atau ketika mereka merasa proses transparansi menurun. Dalam banyak proyek energi, dukungan sosial tidak hilang seketika, tetapi terkikis melalui serangkaian pengalaman negatif—pertemuan yang tidak menjawab pertanyaan, perubahan desain yang tidak dijelaskan, atau konflik internal yang diabaikan. Penurunan legitimasi ini biasanya tidak dicatat dalam laporan resmi, tetapi terlihat jelas dalam narasi warga sehari-hari. Karena itu, pemantauan keadilan harus dilakukan secara kontinu, bukan hanya pada tahap izin atau konsultasi awal.

Ketiga dimensi keadilan juga berperan penting dalam mengurangi konflik energi yang sering kali dianggap sebagai hambatan pembangunan. Konflik biasanya bukan bermula dari penolakan total terhadap proyek, tetapi dari kegagalan institusi membaca tanda-tanda awal ketidakadilan: ketidakjelasan informasi, ketidaksetaraan kompensasi, dan ketidakpekaan terhadap nilai budaya. Jika negara menganggap konflik sebagai masalah komunikasi belaka, solusinya hanya akan berkisar pada meningkatkan sosialisasi. Namun jika negara memahami konflik sebagai gejala dari kegagalan keadilan, maka strategi penyelesaian konflik akan bergerak ke arah yang lebih struktural: mendesain ulang proses partisipasi, memperbaiki distribusi manfaat, dan mengakui identitas yang terpinggirkan.

Akhirnya, memahami persepsi keadilan prosedural, distributif, dan pengakuan adalah langkah penting dalam membangun legitimasi sosial proyek energi. Dalam kerangka Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan, keadilan tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga menjadi prasyarat politik bagi keberhasilan proyek. Transisi energi tidak dapat dipaksakan; ia harus dipilih bersama melalui prosedur yang adil, pembagian manfaat yang wajar, dan pengakuan terhadap keragaman identitas komunitas. Ketika ketiga dimensi keadilan ini hadir secara seimbang, proyek energi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara sosial. Legitimasi sosial semacam inilah yang mampu menopang keberlanjutan jangka panjang dan menghindarkan proyek dari resistensi yang berulang.

17.3 Konflik, Protes, dan Negosiasi Ulang Mandat Institusional

Konflik dan protes dalam proyek energi sering dipandang sebagai gangguan yang menghambat pembangunan, padahal dari perspektif filsafat kekuasaan, keduanya adalah bentuk artikulasi politik yang sangat penting. Ketika warga turun ke

jalan, menolak audiensi, atau menggugat izin proyek di pengadilan, mereka sedang menyatakan bahwa cara negara dan pasar mengatur ruang hidup telah melampaui batas kewajaran. Konflik bukan sekadar reaksi emosional; ia adalah mekanisme koreksi terhadap mandat institusional yang terlalu sempit, yang selama ini lebih fokus pada percepatan investasi daripada keadilan sosial. Karena itu, subbab ini tidak melihat protes sebagai anomali, melainkan sebagai momen ketika mandat institusi—kementerian, regulator, pemerintah daerah, bahkan lembaga internasional—dipaksa untuk dinegosiasi ulang. Di titik inilah legitimasi sosial proyek diuji: apakah lembaga mampu mengubah cara kerja dan prioritasnya, atau justru mengeraskan prosedur dan memperluas aparat represif.

Konflik dalam proyek energi biasanya tidak muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh dari akumulasi ketidakpuasan yang dibiarkan berlarut-larut. Proses konsultasi yang ritualistik, informasi yang disampaikan terlambat, dan janji kompensasi yang tidak jelas menjadi lapisan-lapisan kecil ketidakadilan yang lama-kelamaan memicu perlawanan terbuka. Awalnya warga mungkin hanya bertanya lebih kritis di forum resmi, lalu membentuk kelompok kecil yang membagikan selebaran, dan pada akhirnya mengorganisir demonstrasi atau blokade. Setiap tahap ini menunjukkan bahwa ruang dialog formal tidak lagi dipercaya. Bila pada saat-saat awal ini institusi gagal membaca sinyal dan memilih untuk mengabaikan atau mengkriminalisasi suara berbeda, maka konflik berkembang menjadi krisis legitimasi yang jauh lebih besar, yang tidak bisa diselesaikan dengan satu kali mediasi atau pertemuan tambahan.

Dalam konteks *kebijakan energi terbarukan*, konflik seringkali dibingkai sebagai paradoks: bagaimana mungkin masyarakat menolak proyek yang diklaim menyelamatkan iklim dan membawa pembangunan hijau? Pertanyaan ini tampak rasional dari sudut pandang teknokratik, tetapi mengabaikan

cara warga merasakan keadilan. Bagi komunitas lokal, proyek energi tidak diukur hanya dari besaran penurunan emisi, melainkan dari dampaknya terhadap tanah, air, udara, serta relasi sosial. Ketika lahan produktif berubah menjadi tapak turbin atau panel, ketika jalur migrasi hewan terganggu, atau ketika suara masyarakat tak terdengar dalam desain awal, *kebijakan energi terbarukan* tampak seperti proyek lama yang dibungkus bahasa baru. Di sini konflik berfungsi sebagai cara komunitas mengatakan bahwa "transisi energi hijau" tidak boleh menjadi nama lain dari pengulangan ekstraktivisme.

Berbagai studi tentang sengketa pembangkit angin menunjukkan bahwa konflik tidak semata disebabkan oleh ketidaktahuan warga, tetapi oleh pengalaman ketidakadilan yang berulang. Di Ontario, misalnya, protes terhadap proyek angin muncul ketika masyarakat merasa keputusan telah diambil secara terpusat, sementara mekanisme keluhan dan perbaikan dampak sangat terbatas (Fast et al., 2021). Di mata warga, proyek tidak sekadar membawa turbin, tetapi juga membawa pola kekuasaan yang meminggirkan pengetahuan lokal dan kekhawatiran tentang kesehatan serta lanskap. Temuan-temuan ini mengingatkan bahwa konflik bukan akibat "kurangnya sosialisasi", melainkan akibat interaksi yang terus-menerus menempatkan warga di posisi penerima dampak, bukan penentu arah. Dari sini kita belajar bahwa konflik menjadi cermin yang memperlihatkan betapa sempitnya mandat institusional ketika hanya diukur dari capaian kapasitas terpasang dan kecepatan realisasi proyek.

Protes yang berkepanjangan sering memaksa negara dan perusahaan mengubah strategi. Di awal, respons yang muncul biasanya bersifat komunikatif: menambah sosialisasi, mengganti juru bicara, atau menyusun materi informasi yang lebih ramah. Namun ketika perlawanan tetap kuat—misalnya melalui blokade jalan, gugatan hukum kolektif, atau kampanye

transnasional—barulah institusi mulai menyadari bahwa persoalan sesungguhnya adalah desain kewenangan dan akuntabilitas. Pada titik ini, negosiasi ulang mandat institusional dapat mengambil berbagai bentuk: memperkuat peran pemerintah daerah dalam persetujuan proyek, membentuk badan pengawas independen, atau mengubah regulasi agar mewajibkan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Protes yang semula dipandang sebagai ancaman pembangunan berubah menjadi pemicu reformasi tata kelola, sekaligus menegaskan bahwa warga memiliki daya tawar politis yang nyata.

Konflik juga menyingkap ketegangan di dalam *kebijakan pemerintah* sendiri. Di satu sisi, kementerian energi dan lembaga perencanaan mungkin didorong oleh target nasional dan komitmen internasional untuk mempercepat investasi energi rendah karbon. Di sisi lain, kementerian lingkungan, agraria, atau lembaga adat berhadapan langsung dengan keluhan warga dan konsekuensi ekologis nyata di lapangan. Ketika mandat-mandat ini tidak diselaraskan, birokrasi terjebak dalam tarik-menarik yang membuat warga semakin curiga: satu lembaga menjanjikan ruang dialog, sementara lembaga lain terus mengeluarkan izin. Konflik di lapangan akhirnya menjadi cerminan konflik antar lembaga negara. Negosiasi ulang mandat institusional karenanya bukan hanya soal memperbaiki satu undang-undang, tetapi merapikan ulang pembagian tugas dan prioritas antar sektor agar keadilan sosial dan ekologis tidak selalu dikorbankan demi target kapasitas energi.

Dalam banyak kasus, protes lokal menumbuhkan jaringan solidaritas yang melintasi batas desa, kabupaten, bahkan negara. Gerakan menolak proyek angin atau pembangkit surya skala besar membangun aliansi dengan organisasi lingkungan, serikat petani, kelompok adat, hingga akademisi kritis. Jaringan ini mengubah konflik lokal menjadi isu nasional atau internasional,

memaksa pemerintah untuk memberi perhatian lebih besar dan tidak sekadar menganggap protes sebagai "gangguan domestik kecil". Di level inilah kekuasaan wacana turut dipertaruhkan: apakah komunitas akan dicitrakan sebagai penghalang kemajuan, atau sebagai pihak yang menuntut definisi baru tentang pembangunan berkelanjutan. Bila narasi kedua semakin menguat, mandat institusional dipaksa untuk memasukkan dimensi keadilan, hak asasi, dan perlindungan ruang hidup sebagai pilar utama, bukan tambahan kosmetik.

Penelitian tentang wilayah Isthmus of Tehuantepec di Meksiko menunjukkan bagaimana konflik berkepanjangan atas proyek angin dapat mengubah cara negara dan perusahaan memandang hak atas tanah. Torres Contreras (2024) menggambarkan bagaimana ekspansi energi angin berinteraksi dengan rezim hak milik kolektif dan memicu perlawanan yang berpusat pada pembelaan tanah komunal. Protes tidak hanya menolak proyek tertentu, tetapi juga menggugat proses privatisasi dan sertifikasi tanah yang dianggap melemahkan struktur sosial lokal. Dalam konteks ini, negosiasi ulang mandat institusional tidak bisa berhenti pada perubahan prosedur konsultasi; ia harus menyentuh fondasi kebijakan agraria dan pengakuan hak kolektif. Konflik energi menjadi pintu masuk untuk mengoreksi sejarah panjang ketidakadilan struktural yang selama ini ditutupi bahasa teknis transisi iklim.

Konflik dan protes juga memperlihatkan bahwa legitimasi tidak bisa dicapai hanya dengan menyatakan bahwa suatu proyek mendukung *kebijakan energi berkelanjutan*. Warga menilai keadilan bukan dari slogan, tetapi dari pengalaman konkret: siapa yang diajak bicara, siapa yang mengambil keputusan akhir, siapa yang menanggung beban jangka panjang. Ketika lembaga negara dan perusahaan menggunakan retorika keberlanjutan tanpa mengubah praktik dasar—misalnya tetap menyusun kontrak lahan yang timpang atau mengabaikan keberatan komunitas

adat—maka kata "berkelanjutan" justru menjadi sumber kemarahan baru. Dalam kondisi seperti ini, protes menjadi cara untuk membongkar kesenjangan antara bahasa kebijakan dan kenyataan di lapangan. Negosiasi ulang mandat institusional menuntut agar keberlanjutan didefinisikan ulang, bukan hanya sebagai stabilitas sistem energi, tetapi sebagai keadilan bagi komunitas yang ruang hidupnya dipertaruhkan.

Tidak semua konflik berujung pada pembatalan proyek; banyak yang berakhir dengan perjanjian baru yang mengubah sebagian struktur manfaat dan beban. Di sinilah negosiasi ulang mandat institusional mengambil bentuk yang lebih mikro: revisi skema bagi hasil, pembentukan forum bersama, atau penetapan zona larangan pembangunan di area tertentu. Walaupun tampak teknis, perubahan ini mencerminkan pergeseran kekuasaan: apa yang dulunya ditentukan sepihak di tingkat pusat kini harus dinegosiasikan dengan perwakilan komunitas. Namun, pergeseran ini hanya bermakna jika diikuti mekanisme pemantauan yang kuat, sehingga kesepakatan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi hidup dalam praktik. Konflik yang dikelola secara adil dapat melahirkan bentuk-bentuk baru tata kelola bersama, di mana warga tidak lagi sekadar objek, melainkan mitra kritis dalam pengambilan keputusan.

Di Amerika Latin, pengalaman berbagai proyek energi menunjukkan bahwa kelemahan dalam mekanisme konsultasi awal seringkali menjadi sumber sengketa berkepanjangan. Silva (2025) menyoroti bagaimana hak konsultasi pra-proyek yang sudah diakui di atas kertas tetap gagal diimplementasikan secara bermakna, sehingga komunitas memandang prosedur itu hanya sebagai formalitas. Ketika konsultasi dipersepsikan sebagai serangkaian pertemuan yang tidak mengubah apapun, protes menjadi jalan utama untuk memaksa pengakuan. Dalam situasi seperti ini, negosiasi ulang mandat institusional berarti memperkuat kerangka regulasi dan kapasitas lembaga untuk

memastikan konsultasi sungguh-sungguh mempengaruhi keputusan. Artinya, hak bukan hanya dicetak dalam dokumen, tetapi dijaga melalui mekanisme pengawasan, sanksi, dan ruang bagi komunitas untuk menggugat ketika prosedur dilanggar.

Dari perspektif *kebijakan energi terbarukan*, konflik dan protes seharusnya tidak dibaca sebagai kegagalan semata, tetapi sebagai umpan balik keras yang menunjukkan titik buta desain kebijakan. Ketika komunitas menolak proyek, mereka sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang digunakan negara terlalu sempit: hanya menghitung megawatt, emisi yang dihemat, atau investasi yang masuk. Negosiasi ulang mandat institusional di sini berarti menambahkan indikator legitimasi sosial dan keadilan distribusi sebagai ukuran wajib keberhasilan program energi. Ini mungkin memperlambat proses di awal, tetapi dalam jangka panjang justru mengurangi risiko penundaan proyek akibat sengketa, gugatan, atau aksi blokade. Dengan kata lain, keadilan bukan beban tambahan, melainkan strategi keberlanjutan politik bagi transisi energi.

Konflik juga membuka ruang bagi munculnya model-model alternatif pengelolaan energi yang lebih demokratis. Di sejumlah wilayah, protes terhadap proyek skala besar mendorong lahirnya gagasan tentang koperasi energi, skema kepemilikan bersama, atau proyek skala komunitas yang lebih kecil. Model semacam ini menantang mandat institusional yang sebelumnya hanya mengenali dua aktor utama: negara dan korporasi besar. Ketika komunitas mampu menunjukkan bahwa mereka dapat mengelola proyek energi dengan cara yang lebih adil dan berakar pada kebutuhan lokal, legitimasi politik mereka sebagai pelaku transisi energi menguat. Ini memaksa lembaga perizinan, regulator, dan bank pembangunan menyesuaikan aturan main agar tidak lagi hanya memfasilitasi proyek raksasa, tetapi juga memberi ruang bagi

inisiatif warga yang mungkin lebih kecil skalanya, namun lebih tinggi legitimasi sosialnya.

Negosiasi ulang mandat institusional juga menyentuh dimensi pengetahuan. Konflik sering kali mempertanyakan otoritas tunggal ilmu teknis dalam mendefinisikan risiko, manfaat, dan kelayakan proyek. Warga menuntut agar pengetahuan lokal, pengalaman historis, dan nilai budaya diakui sebagai sumber legitimasi yang setara, bukan sekadar "masukan" yang mudah disingkirkan. Ketika lembaga negara dan perusahaan bersedia mengubah cara memahami bukti—misalnya dengan menggabungkan kajian ilmiah dan pemetaan partisipatif atau kesaksian komunitas—maka struktur otoritas epistemik ikut bergeser. Mandat institusional yang baru tidak lagi menempatkan pakar sebagai satu-satunya penentu kebenaran, tetapi sebagai mitra yang harus berdialog dengan warga. Pergeseran ini sangat penting untuk mencegah konflik masa depan, karena membuka jalan bagi keputusan yang dirasakan lebih sahih dan adil.

Pada akhirnya, konflik, protes, dan negosiasi ulang mandat institusional adalah satu rangkaian yang menggambarkan dinamika kekuasaan dalam era transisi energi. Proyek yang mengklaim diri sebagai bagian dari *kebijakan pemerintah* untuk keberlanjutan tidak bisa lagi mengandalkan legitimasi legal semata; ia harus melewati ujian legitimasi sosial yang berlangsung terus-menerus. Ketika warga menolak, mereka bukan sekadar menghambat masa depan hijau, tetapi sedang menuntut definisi baru tentang masa depan itu sendiri: masa depan yang mengakui hak atas tanah, budaya, dan suara politik komunitas. Filsafat kekuasaan dalam kebijakan energi berkelanjutan mengajarkan bahwa transisi hanya layak disebut adil bila lembaga bersedia merombak dirinya—mandat, prosedur, dan cara memandang warga—sebagai respons serius terhadap konflik. Tanpa itu, protes akan terus berulang,

mengingatkan bahwa legitimasi yang tidak dibangun di atas keadilan hanyalah stabilitas semu.

17.4 Skema Kompensasi, *Benefit Sharing*, dan Risiko Kooptasi

Skema kompensasi dan *benefit sharing* dalam proyek energi kerap dianggap sebagai solusi teknis untuk meredakan ketegangan sosial, padahal keduanya justru sering menjadi sumber konflik baru. Kompensasi biasanya diberikan sebagai respons atas kerugian yang terukur—hilangnya lahan, gangguan suara, atau penurunan hasil panen—sedangkan *benefit sharing* diposisikan sebagai upaya memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas. Dalam teori kebijakan, dua instrumen ini dipandang sebagai cara untuk menyeimbangkan manfaat dan beban, tetapi dalam praktiknya, kompensasi dan *benefit sharing* tidak pernah netral. Keduanya dibentuk oleh relasi kuasa yang menentukan siapa yang dianggap layak, siapa yang diundang berdiskusi, dan siapa yang dikesampingkan. Karena itu, memahami skema-skema ini berarti membaca bagaimana kekuasaan bekerja untuk memproduksi rasa adil atau justru mengaburkan ketidakadilan struktural.

Kompensasi sering dijustifikasi sebagai mekanisme "ganti rugi" yang bertujuan mengembalikan kondisi masyarakat ke keadaan sebelum proyek—sebuah logika yang terdengar sederhana, tetapi sebenarnya cacat secara filosofis. Pertama, banyak nilai yang tidak dapat dikompensasikan, seperti hilangnya ruang sakral, terganggunya tradisi, atau terputusnya hubungan ekologis jangka panjang. Kedua, kompensasi sering disusun dalam bahasa teknis yang tidak sepenuhnya dipahami warga, sehingga mereka tidak benar-benar mengetahui apa yang akan hilang atau diperoleh. Ketiga, kompensasi sering diberikan di akhir proses ketika keputusan proyek sudah final, sehingga posisinya bukan sebagai alat

negosiasi, tetapi sebagai alat stabilisasi. Studi tentang distribusi keadilan energi menunjukkan bahwa kompensasi hanya dianggap sah ketika warga merasa bahwa proses yang mendasarinya dilakukan secara transparan dan penuh kejujuran (Zhong et al., 2024).

Seiring makin agresifnya *kebijakan energi terbarukan*, skema *benefit sharing* dipromosikan sebagai inovasi institusional untuk memastikan bahwa transisi energi tidak hanya menguntungkan investor dan pemerintah. Konsep *benefit sharing* mencakup berbagai bentuk: pendapatan bagi desa, pembagian keuntungan, program pemberdayaan, dana CSR, hingga skema kepemilikan komunitas. Namun dalam praktiknya, berbagai janji ini sering tidak jelas mekanisme, besarannya, maupun durasinya. Banyak komunitas menyebut bahwa *benefit sharing* hanya muncul dalam slide presentasi, tetapi tidak masuk dalam kontrak yang dapat mengikat kedua belah pihak secara hukum. Ketika warga menyadari bahwa manfaat yang dijanjikan tidak proporsional dengan beban yang mereka tanggung, *benefit sharing* bukan hanya gagal membangun legitimasi, tetapi menjadi simbol manipulasi baru.

Masalah utama dalam kompensasi adalah siapa yang dianggap layak menerima. Dalam banyak kasus, hanya pemilik tanah formal yang mendapat pembayaran, sementara penggarap, nelayan, atau perempuan yang bergantung pada ruang tertentu tidak diakui secara legal. Skema seperti ini memperkuat ketimpangan internal dalam komunitas: mereka yang sudah memiliki aset memperoleh manfaat lebih banyak, sedangkan mereka yang paling bergantung pada sumber daya alam justru tidak menerima kompensasi apa pun. Lee, Seo, dan Lee (2025) mencatat bahwa praktik ini menciptakan ketidakadilan ganda: beban ekologi jatuh pada kelompok paling rentan, sementara manfaat ekonomi mengalir pada elite lokal. Ketika ketimpangan internal meningkat, resistensi tidak lagi

hanya diarahkan kepada negara atau perusahaan, tetapi juga kepada sesama anggota komunitas, menjadikan konflik lebih sulit diselesaikan.

Kompensasi umumnya disusun dalam struktur jangka pendek, misalnya pembayaran sekali untuk lahan atau bantuan finansial sementara. Sebaliknya, dampak proyek energi—entah itu turbin angin, panel surya, atau transmisi listrik—bersifat jangka panjang. Ketidakseimbangan temporal ini sering tidak disadari oleh warga sampai bertahun-tahun setelah proyek beroperasi. Komunitas mulai merasakan bahwa mereka telah menukar hak jangka panjang dengan imbalan jangka pendek yang tidak sepadan. Dong dan kolega (2023) menekankan bahwa inovasi energi hanya dapat dianggap adil ketika kompensasi dan manfaat diselaraskan dengan durasi dampak, bukan hanya durasi pembangunan. Ketika waktu manfaat dan waktu beban tidak sinkron, warga menilai proyek sebagai bentuk transaksi timpang yang merugikan generasi berikutnya.

Dalam banyak konteks, *kebijakan pemerintah* justru mempersempit ruang tawar komunitas dengan mendefinisikan secara sempit apa yang boleh dinegosiasikan. Regulasi sering menetapkan standar minimal kompensasi, tetapi tidak mengatur bagaimana manfaat harus dibagi. Akibatnya, perusahaan dapat mematuhi hukum tanpa memberikan manfaat substantif kepada komunitas. Bahkan ketika ada ruang negosiasi, pemerintah daerah sering tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk menuntut pembagian manfaat yang adil. Kesenjangan antara ruang legal dan ruang moral inilah yang menciptakan frustrasi warga: secara legal mereka tidak bisa menolak, tetapi secara moral mereka merasa dipaksa menerima ketidakadilan. Ketika pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator investasi ketimbang penjaga hak warga, risiko kooptasi meningkat secara drastis.

Kooptasi dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika proses konsultasi, partisipasi, atau pembagian manfaat digunakan untuk membungkam kritik, alih-alih membuka ruang deliberasi. Kooptasi biasanya muncul dalam bentuk-bentuk halus: undangan rapat terbatas untuk tokoh yang dianggap "ramah", kompensasi selektif untuk elite desa, atau pemberian proyek ekonomi kecil sebagai imbalan untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam jangka pendek, kooptasi tampak efektif karena meredam konflik, tetapi dalam jangka panjang ia merusak tatanan sosial. Komunitas yang merasa pemimpinnya dibeli akan kehilangan kepercayaan internal, dan perusahaan menghadapi risiko legitimasi yang melemah. Dalam banyak kasus, kooptasi justru memperpanjang konflik, karena warga yang tidak menerima manfaat merasa bahwa proyek sengaja membelah komunitas untuk meredam perlawanan.

Risiko kooptasi meningkat ketika struktur sosial komunitas sendiri penuh ketimpangan. Di banyak desa, elite lokal memiliki pengaruh besar terhadap persepsi warga lainnya. Ketika perusahaan atau pemerintah memilih untuk bernegosiasi hanya dengan elite lokal, skema kompensasi biasanya mencerminkan kepentingan sempit, bukan kepentingan kolektif. Torres Contreras (2024) menyoroti bagaimana di Meksiko, negosiasi lahan untuk proyek angin mengabaikan struktur kepemilikan komunal, sehingga elite yang memiliki akses politik mendapat banyak keuntungan, sementara penggarap dan perempuan kehilangan kontrol atas ruang hidup. Kooptasi seperti ini tidak hanya merusak legitimasi proyek, tetapi juga melemahkan struktur sosial tradisional, yang sebelumnya menjadi fondasi kehidupan kolektif komunitas adat dan agraris.

Dalam konteks *kebijakan energi berkelanjutan*, risiko kooptasi juga muncul melalui bahasa teknokratis yang menyederhanakan relasi kekuasaan. Dengan mengatakan

bahwa proyek "untuk kebaikan iklim global", perusahaan dan pemerintah memposisikan diri dalam moralitas yang lebih tinggi, sehingga keberatan komunitas dianggap tidak rasional atau terlalu lokal. Bahasa "kebaikan global" ini menjadi strategi kooptasi wacana yang menutup ruang kritik. Warga yang mempertanyakan distribusi beban—misalnya nelayan yang kehilangan akses laut—dianggap menolak masa depan hijau. Karena itu, kooptasi tidak selalu berbentuk materi; ia juga dapat berupa narasi. Ketika keberlanjutan dipakai sebagai legitimasi tunggal, suara komunitas yang menuntut keadilan dianggap mengganggu "misi besar" transisi energi, padahal justru di situlah inti persoalannya.

Benefit sharing yang dirancang buruk juga dapat melemahkan kapasitas komunitas untuk mengontrol masa depan mereka. Banyak skema pembagian manfaat diatur dalam mekanisme top-down, misalnya dana CSR tahunan tanpa transparansi penggunaan, atau program pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan warga. Skema seperti ini terlihat inklusif, tetapi sebenarnya membatasi kapasitas komunitas untuk menentukan jenis manfaat yang mereka anggap penting. Lembaga negara sering menjadikan skema-skema ini sebagai bukti keberpihakan, tetapi warga melihatnya sebagai bentuk manipulasi halus. Keberhasilan *benefit sharing* tidak diukur dari jumlah program, melainkan dari sejauh mana ia memperkuat kapasitas politik dan ekonomi komunitas. Program-program yang dirancang sepihak hanya memperkuat ketergantungan, bukan kemandirian.

Sebaliknya, skema *benefit sharing* yang dikelola secara kolektif memiliki potensi besar untuk membangun legitimasi jangka panjang. Misalnya, beberapa komunitas di Eropa Utara mengelola *community trust fund* yang didanai dari pendapatan proyek energi. Dana ini kemudian dipakai membiayai pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur lokal sesuai keputusan musyawarah komunitas. Model seperti ini

memberikan otonomi kepada warga untuk menentukan manfaat mana yang paling relevan bagi mereka, sekaligus menciptakan rasa kepemilikan atas proyek. Dalam konteks inilah skema manfaat dapat menggeser relasi kekuasaan menjadi lebih setara. Namun keberhasilan model ini sangat bergantung pada kapasitas institusional, transparansi, dan pengakuan hukum terhadap mekanisme kolektif.

Dalam kerangka *kebijakan energi terbarukan*, negara memiliki peran penting dalam memastikan skema kompensasi dan *benefit sharing* tidak menjadi alat kooptasi. Negara perlu menetapkan standar minimum transparansi, kewajiban negosiasi ulang, serta mekanisme pengawasan independen. Selain itu, negara perlu mendorong partisipasi awal masyarakat dalam perancangan manfaat—tidak hanya menerima rancangan yang disusun perusahaan. Bila negara hanya bertindak sebagai pelengkap administrasi, warga akan melihat bahwa pemerintah lebih dekat dengan kepentingan investor daripada dengan komunitas. Karena itu, mandat institusi publik harus dirancang untuk melindungi hak warga terlebih dahulu, bukan mendukung proyek semata.

Konflik dalam skema kompensasi juga memperlihatkan pentingnya mekanisme keluhan yang kuat dan independen. Banyak komunitas tidak tahu harus ke mana mengadu ketika manfaat tidak diberikan sesuai janji atau ketika pemimpin lokal dianggap telah menerima imbalan pribadi. Tanpa mekanisme keluhan, warga hanya memiliki dua jalan: menerima ketidakadilan atau melakukan protes. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki saluran keluhan yang adil cenderung menyelesaikan sengketa tanpa eskalasi, sementara komunitas yang tidak memiliki saluran tersebut lebih rentan mengalami konflik berkepanjangan (Silva, 2025). Artinya, kompensasi dan *benefit sharing* tidak hanya tentang pembagian manfaat, tetapi juga tentang bagaimana warga bisa mengoreksi ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Untuk mencegah kooptasi, skema kompensasi dan manfaat harus didasarkan pada prinsip transparansi total: siapa menerima apa, mengapa demikian, berapa lama manfaat diberikan, dan mekanisme apa yang tersedia jika terjadi pelanggaran. Transparansi bukan hanya soal dokumen yang dapat diakses, tetapi soal bahasa yang mudah dipahami serta penjelasan yang jujur tentang risiko dan ketidakpastian. Ketika warga melihat bahwa institusi berani membuka informasi yang sensitif sekalipun, kepercayaan sosial meningkat. Transparansi juga memperkuat posisi tawar kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dengan informasi yang lengkap, mereka dapat menuntut perubahan atau menolak skema yang tidak adil tanpa takut diremehkan.

Akhirnya, pembahasan mengenai kompensasi, *benefit sharing*, dan risiko kooptasi membawa kita pada satu kesimpulan penting: legitimasi sosial tidak dapat dibeli. Ia hanya dapat dibangun melalui hubungan yang jujur, proses yang adil, dan distribusi manfaat yang diakui sebagai wajar oleh komunitas. Dalam konteks transisi energi, di mana negara dan pasar mengklaim bekerja demi masa depan bumi, keadilan sosial tidak boleh menjadi renungan terakhir. Kompensasi harus dilihat bukan hanya sebagai transaksi, tetapi sebagai mekanisme koreksi ketimpangan. *Benefit sharing* harus diperlakukan bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak politik komunitas atas ruang hidup yang mereka jaga. Tanpa pemahaman ini, risiko kooptasi akan terus mengintai, dan proyek energi, betapapun hijau secara teknologi, tetap akan kehilangan legitimasi sosialnya.

17.5 Membangun Legitimasi Sosial yang Tahan Uji Waktu

Membangun legitimasi sosial yang tahan uji waktu berarti mengakui bahwa kepercayaan komunitas terhadap proyek energi tidak pernah selesai pada saat upacara peresmian atau penandatanganan kontrak. Kepercayaan adalah proses

berulang, yang setiap hari diuji oleh konsistensi tindakan, kejujuran komunikasi, dan keadilan distribusi manfaat maupun beban. Proyek yang pada awalnya diterima karena janji lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur lokal, dapat kehilangan legitimasi ketika janji tersebut memudar atau dampak lingkungan tumbuh di luar kendali. Sebaliknya, proyek yang memulai dengan skeptisisme dapat memperoleh lisensi sosial yang kuat jika menunjukkan kesediaan untuk belajar dari komunitas, mengoreksi kesalahan, dan menata ulang relasi kuasa. Dalam perspektif filsafat kekuasaan, legitimasi yang tahan uji waktu tidak dibangun oleh retorika, tetapi oleh kesediaan institusi untuk terus-menerus menegosiasikan dirinya di hadapan warga yang terdampak.

Legitimasi sosial yang berkelanjutan membutuhkan kombinasi keadilan prosedural, distributif, dan pengakuan yang tidak berhenti pada desain awal proyek. Konsultasi yang layak, pembagian manfaat yang wajar, dan pengakuan identitas lokal harus dipelihara sepanjang siklus hidup proyek, bukan hanya di tahap perizinan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa hak konsultasi yang hanya dipenuhi secara formal, tanpa memperhatikan konteks sosial dan sejarah marginalisasi, justru memicu delegitimasi institusi (Silva, 2025). Di sini, legitimasi sosial menjadi cermin kualitas tata kelola: jika tata kelola berpusat pada percepatan investasi, legitimasi akan rapuh; jika tata kelola berpusat pada penguatan kapasitas komunitas dan keadilan, legitimasi lebih mungkin bertahan meskipun proyek menghadapi masalah teknis atau ekonomi.

Dalam konteks *kebijakan energi terbarukan*, pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah proyek tertentu bisa diterima masyarakat, melainkan apakah seluruh arah transisi energi dianggap adil oleh komunitas yang menanggung dampak langsung. Transisi yang hanya dipahami sebagai urusan teknologi—mengganti batu bara dengan angin atau surya—

cenderung mengabaikan ketegangan sosial yang menyertai perubahan pemanfaatan ruang, air, dan lanskap budaya. Legitimasi sosial yang tahan uji waktu menuntut agar desain proyek selalu mengaitkan tujuan iklim dengan kebutuhan konkret warga: keamanan penghidupan, keberlanjutan ekologi lokal, dan perlindungan terhadap hak kolektif atas tanah atau laut. Jika dimensi-dimensi ini tidak terintegrasi, warga akan membaca transisi energi sebagai proyek eksternal yang memanfaatkan wilayah mereka demi tujuan global, tanpa menjamin perbaikan kehidupan sehari-hari.

Salah satu pelajaran penting dari kajian *energy justice* adalah bahwa legitimasi tidak dapat dikurangi menjadi soal penerimaan awal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa komunitas dapat menerima proyek tertentu karena tekanan ekonomi atau minimnya alternatif penghidupan, tetapi kemudian mengorganisir perlawanan ketika dampak negatif tak tertanggungkan. Di sini tampak bahwa penerimaan awal tidak identik dengan persetujuan bebas dan berkelanjutan. Komunitas yang pada mulanya setuju untuk "mencoba dulu" dapat menarik dukungan ketika merasa haknya dilanggar atau janji tidak ditepati. Karena itu, legitimasi sosial yang tahan lama harus membaca penerimaan awal sebagai titik mula, bukan titik akhir. Proyek perlu menyediakan mekanisme peninjauan berkala dan ruang bagi komunitas untuk menegosiasikan ulang syarat-syarat dukungan mereka di tengah perubahan kondisi sosial dan ekologis.

Penelitian tentang kepemimpinan warga dalam transformasi energi menunjukkan bahwa legitimasi yang bertahan cenderung muncul ketika komunitas bukan hanya dilibatkan, tetapi juga diberi peran memimpin dan mengarahkan agenda (Allen, Lyons, dan Stephens, 2019). Ketika warga, terutama kelompok yang sebelumnya terpinggirkan seperti perempuan, pemuda, atau kelompok adat, memperoleh

ruang untuk mengonsolidasikan suara dan mempengaruhi arah transisi, hubungan kekuasaan dalam tata kelola energi bergeser. Legitimasi sosial tidak lagi bergantung pada kemampuan perusahaan menjelaskan manfaat proyek, tetapi pada kemampuan komunitas mengklaim proyek sebagai bagian dari agenda mereka sendiri. Dengan kata lain, proyek yang berkelanjutan secara sosial bukanlah proyek yang paling pandai meyakinkan warga, melainkan proyek yang paling siap dibentuk ulang oleh warga.

Pada tingkat kelembagaan, *kebijakan pemerintah* sering kali masih memandang legitimasi sebagai urusan komunikasi publik dan manajemen risiko, bukan sebagai tujuan substantif tata kelola. Hal ini tercermin dalam indikator kinerja yang lebih menekankan kecepatan realisasi proyek dan capaian kapasitas terpasang dibandingkan tingkat kepercayaan komunitas atau kualitas partisipasi. Untuk membangun legitimasi sosial yang tahan uji waktu, negara perlu menggeser kerangka evaluasi tersebut: kepercayaan publik, ketersediaan mekanisme keluhan yang efektif, dan kemampuan lembaga untuk merespons kritik harus diakui sebagai tolok ukur keberhasilan, sejajar dengan sasaran teknis dan fiskal. Pergeseran ini menuntut perubahan cara birokrasi memahami tugasnya, dari sekadar "memuluskan investasi" menjadi "penjaga keadilan dan ruang hidup warga" dalam setiap proyek energi.

Legitimasi yang berkelanjutan juga bertumpu pada rantai kepercayaan yang tidak bisa dibangun sekali jalan. Rantai ini menghubungkan individu, institusi, dan prosedur: warga perlu percaya pada orang yang datang berbicara dengan mereka, pada lembaga yang diwakilinya, dan pada aturan yang mengatur hubungan mereka ke depan. Jika salah satu mata rantai patah—misalnya ketika perwakilan perusahaan dianggap tidak jujur atau ketika lembaga pengawas diragukan independensinya—kepercayaan terhadap keseluruhan proyek ikut runtuh. Oleh

karena itu, membangun legitimasi sosial berarti mengurangi ketergantungan pada figur-figur karismatik dan memperkuat prosedur yang dapat bertahan melampaui pergantian individu. Kontrak yang jelas, lembaga pengawas independen, dan dokumentasi transparan menjadi bagian dari infrastruktur kepercayaan yang tidak kalah penting dari jaringan listrik dan infrastruktur fisik lainnya.

Legitimasi sosial yang tahan uji waktu juga bergantung pada bagaimana konflik dikelola. Konflik tidak bisa dihapus dari proyek energi; ia hanya bisa diabaikan atau dihadapi secara dewasa. Proyek yang memandang konflik sebagai ancaman cenderung meresponsnya dengan penyangkalan, minimisasi, atau represi, sehingga memperparah delegitimasi. Sebaliknya, proyek yang memandang konflik sebagai bentuk kritik terhadap desain dan mandat institusional memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Mekanisme mediasi yang independen, ruang dialog yang aman bagi pihak-pihak yang berbeda posisi, dan kesediaan untuk menunda atau mengubah proyek ketika alasan moral komunitas kuat, merupakan cara mengubah konflik dari ancaman menjadi sumber pembelajaran. Dalam kerangka ini, legitimasi tumbuh bukan karena ketiadaan konflik, tetapi karena cara konflik dihadapi.

Dalam horizon yang lebih luas, legitimasi sosial yang kokoh menjadi prasyarat bagi keberhasilan *kebijakan energi berkelanjutan* di tingkat nasional maupun global. Target penurunan emisi dan bauran energi tidak akan berarti jika setiap proyek besar terjebak dalam lingkaran penolakan, litigasi, dan trauma sosial. Negara mungkin mampu memaksakan beberapa proyek dengan mengandalkan kekuatan hukum dan aparat, tetapi harga sosial dan politik yang dibayar akan menggerogoti dukungan terhadap agenda keberlanjutan itu sendiri. Sebaliknya, ketika komunitas merasa bahwa mereka memiliki ruang untuk mempengaruhi arah transisi dan bahwa

beban maupun manfaat dibagi secara wajar, dukungan terhadap kebijakan jangka panjang menjadi lebih stabil. Dengan kata lain, legitimasi sosial adalah infrastruktur tak kasatmata bagi ketahanan kebijakan energi berkelanjutan.

Kunci penting lainnya adalah kesinambungan manfaat. Banyak proyek menjanjikan keuntungan ekonomi yang besar pada awal, tetapi gagal mempertahankan aliran manfaat itu secara adil sepanjang umur proyek. Kompensasi sekali bayar, skema kerja sementara, atau bantuan infrastruktur yang tidak terpelihara menciptakan rasa kecewa yang dalam. Sebaliknya, legitimasi sosial menguat ketika manfaat dirancang sebagai hak yang berkelanjutan, bukan hadiah sesaat. Integrasi skema *benefit sharing* yang dikelola komunitas—baik dalam bentuk dana bersama, tarif listrik khusus, atau kepemilikan saham—dapat memperpanjang horizon keadilan dan membuat warga punya kepentingan langsung menjaga keberlanjutan proyek. Di titik ini, keadilan bukan hanya slogan, tetapi menjadi pengalaman hidup sehari-hari yang mengikat masa depan komunitas dengan masa depan proyek energi.

Literatur mengenai integrasi tata kelola energi dan keadilan lingkungan menegaskan bahwa legitimasi yang tahan lama menuntut institusi yang mampu belajar dan beradaptasi, bukan sekadar menegakkan aturan yang sudah ada (Govindarajan dan Ganesh, 2022). Institusi yang adaptif tidak memaknai perubahan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki desain kebijakan. Misalnya, temuan lapangan tentang ketimpangan manfaat dapat mendorong revisi skema pembagian hasil; protes komunitas adat dapat menuntun lahirnya mekanisme pengakuan hak yang lebih kuat. Di sini, legitimasi sosial bergerak seiring dengan kapasitas pembelajaran institusional: semakin besar kemampuan lembaga untuk mengubah diri berdasarkan kritik,

semakin besar kemungkinan legitimasi bertahan di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan ekologis.

Dalam konteks *kebijakan energi terbarukan*, membangun legitimasi sosial yang tahan uji waktu juga berarti mengakui keberagaman model tata kelola. Tidak semua proyek harus didesain sebagai skema investasi skala besar yang dikendalikan korporasi. Di banyak tempat, model koperasi energi, proyek komunitas, atau kemitraan asimetris yang memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan warga terbukti lebih mudah diterima. Diversifikasi model ini membantu mengurangi kesan bahwa transisi energi adalah agenda yang datang "dari atas", sekaligus memperluas basis aktor yang merasa memiliki stake dalam keberhasilan transisi. Legitimasi dalam hal ini diproduksi melalui pengakuan bahwa tidak ada satu bentuk tunggal tata kelola yang cocok untuk semua konteks sosial dan ekologi.

Aspek lain yang sering diabaikan adalah narasi. Legitimasi sosial tidak hanya dibangun oleh kebijakan dan prosedur, tetapi juga oleh cerita yang beredar di kalangan warga tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan. Narasi tentang keberhasilan sebuah proyek di satu wilayah dapat mendorong dukungan di wilayah lain, sementara narasi tentang pengkhianatan janji atau kerusakan ekologis dapat menyebar dengan cepat dan menurunkan kepercayaan pada proyek-proyek serupa. Karena itu, membangun legitimasi sosial yang tahan uji waktu memerlukan perhatian pada narasi yang diciptakan, baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun komunitas sendiri. Transparansi, pengakuan atas kesalahan, dan dokumentasi pengalaman positif warga dapat menjadi bahan untuk narasi tandingan terhadap cerita-cerita traumatis masa lalu.

Penting juga untuk menegaskan bahwa legitimasi sosial yang tahan lama tidak identik dengan ketiadaan kritik. Justru, ruang kritik yang dijamin dan direspons dengan serius adalah

salah satu indikator bahwa proyek dan institusi terkait cukup percaya diri atas dasar moral dan sosial mereka. Ketika kritik dibungkam, bahkan jika sementara waktu proyek tampak stabil, bibit delegitimasi sedang disemai. Sebaliknya, ketika institusi menunjukkan bahwa mereka siap menjawab kritik dengan argumen dan perbaikan kebijakan, rasa hormat warga meningkat. Dengan demikian, keberadaan media lokal yang bebas, organisasi masyarakat sipil yang kuat, dan forum publik yang tidak dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik proyek merupakan komponen penting bagi legitimasi yang benar-benar tahan uji waktu.

Pada akhirnya, membangun legitimasi sosial yang tahan uji waktu dalam proyek energi menuntut perubahan cara kita memahami hubungan antara negara, pasar, dan komunitas. Proyek bukan lagi dipandang sekadar sebagai instrumen *kebijakan pemerintah* untuk mencapai target makro, tetapi sebagai ruang perjumpaan di mana sejarah, identitas, dan masa depan komunitas dipertaruhkan. Dalam kerangka Filsafat Kekuasaan dalam Kebijakan Energi Berkelanjutan, legitimasi sosial adalah hasil dari relasi yang terus-menerus dinegosiasikan—melalui keadilan, pengakuan, dan keberanian untuk merombak mandat institusional ketika terbukti tidak lagi memadai. Tanpa legitimasi semacam ini, proyek energi, betapapun canggih teknologinya, akan selalu rapuh di hadapan waktu dan ingatan kolektif. Dengan legitimasi yang dibangun di atas keadilan, transisi energi dapat benar-benar menjadi jalan menuju masa depan yang layak dihuni bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Aidam, K. (2024). COP28 and the global stocktake: A weak attempt to address climate change. *Frontiers in Sustainability, 37*(3), 701–717. https://doi.org/10.1007/s13563-024-00452-z

Aidam, K. (2024). COP28 and the global stocktake: A weak attempt to address climate change. *Frontiers in Sustainability, 5*, 1388266. https://doi.org/10.3389/frsus.2024.1388266

Aklin, M., Bayer, P., Harish, S. P., & Urpelainen, J. (2020). Do high electricity bills undermine public support for renewables? Evidence from the European Union. *Energy Policy, 138*, 111288. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111288

Akpahou, R., Mensah, L. D., Quansah, D. A., Kemausuor, F., & Lee, Y. (2024). Energy planning and modeling tools for sustainable development: A systematic literature review. *Energy Reports, 11*(4), 830–845. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.11.043

Ali, K., Jianguo, D., & Kirikkaleli, D. (2023). How do energy resources and financial development cause environmental sustainability? *Energy Reports, 9*, 4036–4048. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.03.040

Ali, S. H., & Kim, S. (2024). Governing energy transitions in Indonesia: Priorities, transparency and accountability in policy decisions. *Energy Policy, 190*, 114102. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114102

Allen, E., Lyons, H., & Stephens, J. C. (2019). Women's leadership in renewable transformation, energy justice and energy democracy: Redistributing power. *Energy Research & Social Science, 57*, 101233. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101233

Amosi, N., Sovacool, B. K., Pearl-Martinez, R., David, N. P., Shader, C. S., Schnur, S. T., Howley, S. E., Akorli, R., Trandafir, S., & Bidwell, D. (2025). Reviewing metrics and indicators for energy, climate, and environmental justice: A synthesis of 25 years of research. *Energy Research & Social Science, 130*, 104462. https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104462

Anugwom, E. E. (2020). *Development in Nigeria: Promise on Hold?* Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429328916

Apata, O. (2025). Energizing change: Policy innovations for a low-carbon future. Proceedings of the Southern African Universities Power Engineering Conference (SAUPEC 2025). https://doi.org/10.1109/SAUPEC65723.2025.10944336

Arkhurst, B. K., Houghteling, C. R., Dutta, N. S., Clarke, A., Fu, K., Anderson, K., & Gill, E. (2023). Evaluating energy justice metrics in early-stage science and technology research using the JUST-R metrics framework. *Frontiers in Environmental Science, 11*, 1206013. https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1206013

Asghar, M., Ayaz, M., & Ali, S. (2025). Ecological resilience in crisis: Analyzing the role of urban land use and institutional policies. *Land Use Policy, 151*, 107492. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107492

Asian Development Bank. (2020). *Renewable energy tariffs and incentives in Indonesia: Review and recommendations*. Manila: Asian Development Bank. https://doi.org/10.22617/TCS200254

Aunphattanasilp, C. (2019). Civil society coalitions, power relations, and socio-political ideas: Discourse creation and redesigning energy policies and actor networks in Thailand. *Energy Research & Social Science, 58*, 101271. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101271

Bakhsh, S., Zhang, W., Ali, K., & Anas, M. (2024). Energy transition and environmental stability prospects for OECD economies: The prominence role of environmental governance, and economic complexity: Does the geopolitical risk matter? *Journal of Environmental Management, 369*, 122271. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122271

Barragán-Contreras, M. (2022). Procedural injustices in solar energy governance in Mexico. *Local Environment, 27*(3), 385–402. https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.2000378

Barragan-Contreras, S. J. (2022). Procedural injustices in large-scale solar energy: A case study in the Mayan region of Yucatan, Mexico. *Local Environment, 24*(4), 375–390. https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.2000378

Bessette, D. L., Rand, J., Hoen, B., Nilson, R., White, J., Mills, S. B., & Stokes, L. C. (2025). Missing the mark: Avoiding community misengagement in large-scale solar development. *Energy Research & Social Science, 127*, 104338. . https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104338

Blom, I. M., Otieno, M. A., Mayhew, S., Spicer, N., Haines, A., & Whitmee, S. (2025). Towards a net-zero healthcare system in Kenya: Stakeholder perspectives on opportunities, challenges and priorities. *Journal of Climate Change and Health, 22*, 100417. https://doi.org/10.1016/j.joclim.2025.100417

Brisbois, M. C. (2020). Shifting political power in an era of electricity decentralization: Rescaling, reorganization and battles for influence. *Environmental Innovation and Societal Transitions, 36*, 49–69. https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.04.007

Bryant, S. T., Straker, K., & Wrigley, C. (2020). Designing our sustainable energy future: A shock doctrine for energy.

Energy Policy, 147, 111914. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111914

Bryant, S. T., Straker, K., & Wrigley, C. (2023). Designing our sustainable energy future: A shock doctrine for energy. *Energy Policy, 175*, 113480. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113480

Burke, M. J., & Stephens, J. C. (2018). Political power and renewable energy futures: A critical review. *Energy Research & Social Science, 35*, 78–93. https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.018

Chen, L., Msigwa, G., Yang, M. Y., Osman, A. I., Fawzy, S., Rooney, D. W., & Yap, P.-S. (2022). Strategies to achieve a carbon neutral society: A review. *Environmental Chemistry Letters, 20*(4), 2277–2310. https://doi.org/10.1007/s10311-022-01435-8

Darby, S. J., Hammond, G. P., & Wu, J. (2024). Stocktaking global warming – The outcomes of the 2023 Dubai climate summit (COP28). *Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Energy, 177*(5), 193–204. https://doi.org/10.1680/jener.24.00005

de Looze, A., ten Caat, S., Maiello, A., Jhagroe, S., & Cuppen, E. (2024). Temporalities of energy justice: Changing justice conceptions in Dutch energy policy between 1974 and 2022. *Energy Policy, 191*, 114174. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114174

Desai, B. H., & Desai, J. B. (2024). The climate change conundrum: A case for course correction in the global regulatory approach. *Environmental Policy and Law, 54*(1), 3–14. https://doi.org/10.3233/EPL-239028

Dong, C., Li, Y., & Wu, B. (2023). Renewable energy innovation and justice: Rethinking fairness in the green transition. *Energy Policy, 173*, 113820. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113820

Dong, K., Yang, S., Wang, J., & Dong, X. (2023). Revisiting energy justice: Is renewable energy technology innovation a tool for realizing a just energy system? *Energy Policy, 182*, 113820. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113820

Dwyer, J., & Bidwell, D. (2021). Chains of trust: Energy justice, public engagement, and the first offshore wind farm in the United States. *Energy Research & Social Science, 72*, 101871. . https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101871

Elmallah, S., Nilson, R., Rand, J., Uridge, E., & Hoen, B. (2025). Under-capacitated and over-powered? Rural austerity and asymmetrical negotiating relationships in US wind energy development. *Journal of Rural Studies, 119*, 103749. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103749

Esteves, A. M., de Brito e Cunha, F. B., de Freitas Girardi, A., & Quintao, F. (2024). Transnational networks of energy communities as counterpower in the European Union renewable energy transition framework. *Community Development Journal*. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/cdj/bsad037

Fajri, H., Akmal, A. D., Saputra, B., Wahyuni, N., Ilham, Q. P., & Maani, K. D. (2021). Integration of renewable energy policies between central and regional governments. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 896(1), 012037. https://doi.org/10.1088/1755-1315/896/1/012037

Fast, S., Mabee, W., Baxter, J., Christidis, T., Driver, L., Hill, S., McMurtry, J. J., & Tomkow, M. (2021). Lessons learned from Ontario wind energy disputes. *Energy Research & Social Science, 77*, 102046. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102046

Firestone, J., Bates, A., Knapp, L. A., & Maddaloni, J. (2023). Faring well in offshore wind power siting? Trust, engagement and process fairness in the United States. *Energy Research &*

Social Science, 89, 102630. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.3080630

Firestone, J., Hirt, C., Bidwell, D., Gardner, M., & Dwyer, J. (2020). Faring well in offshore wind power siting? Trust, engagement and process fairness in the United States. *Energy Research & Social Science, 62*, 101393. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101393

Francis, K., Sun, D., Dennis, A., Nkrumah Nana Kwame, E., & Kumah, N. Y. G. (2025). Network governance and renewable energy transition in sub-Saharan Africa: Contextual evidence from Ghana. *Energy for Sustainable Development*. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.125170

Gatto, A., & Sadik-Zada, E. R. (2023). People have the power. Electricity production, renewable energy transition, and communities empowerment across 11 Nordic-Baltic countries. *Environmental Science and Pollution Research, 30*(60), 125464–125477. https://doi.org/10.1007/s11356-023-29156-7

Gatto, A., & Sadik-Zada, E. R. (2025). People have the power. Electricity production, renewable energy transition, and communities empowerment across 11 Nordic-Baltic countries. *Environmental Science and Pollution Research, 121*, 103938. https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.103938

Ge, X., Xue, M., & Cao, R. (2024). Do Chinese carbon-intensive stocks overreact to climate transition risk? Evidence from the COP26 news. *International Review of Financial Analysis, 94*, 103334. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103334

Goldstein, K., Rodrigues, B., Jacobetty, P., Hahn-Madole, K., Jörgens, H., & Kolleck, N. (2025). The disappearance of land use from UNFCCC decisions: A guided topic analysis. *Land Use Policy, 158*, 107722. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107722

Gorayeb, A., Brannstrom, C., Xavier, T., Soares, M. de O., Teixeira, C. E. P., dos Santos, A. M. F., & Guimara, R. (2024). Emerging challenges of offshore wind energy in the Global South: Perspectives from Brazil. *Energy Research & Social Science*, 113, 103542. https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103542

Govindarajan, H. K., & Ganesh, L. S. (2022). Integrating energy governance and environmental justice: Role of renewable energy. *Renewable Energy Focus, 43*, 24–36. https://doi.org/10.1016/j.ref.2022.08.006

Grubb, M., Hinder, B., Dye, L., & Nixon, H. (2025). Regulatory impact assessment in the energy transition era: Insights from the UK experience. *[Nama jurnal sesuai data Scopus]*, 96, 101943. https://doi.org/10.1016/j.jup.2025.101943

Habib, Y., Abd Rahman, N. R., Hashmi, S. H., & Ali, M. (2025). Green finance and environmental decentralization drive OECD low carbon transitions. *Scientific Reports, 15*(1), 28140. https://doi.org/10.1038/s41598-025-11967-y

Hoesch, K. W., Mills, S. B., Rand, J., Nilson, R., Bessette, D. L., White, J., & Hoen, B. (2025). What to expect when you're expecting engagement: Delivering procedural justice in large-scale solar energy deployment. *Energy Research & Social Science, 120*, 103893. https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103893

Huang, G. C.-L., & Chen, R.-Y. (2021). Injustices in phasing out nuclear power?: Exploring limited public participation and transparency in Taiwan's transition away from nuclear energy. *Energy Research & Social Science, 71*, 101808. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101808

Huang, G. C.-L., & Chen, R.-Y. (2023). Injustices in phasing out nuclear power? Exploring limited public participation and transparency in Taiwan's transition away from nuclear energy. *Energy Research & Social Science, 101*, 103129.

https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103129
Jenkins, K. E. H., Sovacool, B. K., Mouter, N., Hacking, N., Burns, M. K., & McCauley, D. (2021). The methodologies, geographies, and technologies of energy justice: A systematic and comprehensive review. *Environmental Research Letters, 16*(4), 043009. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd78c
Jerzyniak, T., & Herranz-Surrallés, A. (2022). EU geoeconomic power in the clean energy transition. *Energy Policy, 168*, 113127. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113127
Kameyama, Y. (2021). Climate change policy: Can new actors affect Japan's policy-making in the Paris Agreement era? *Social Science Japan Journal, 24*(1), 67–84. https://doi.org/10.1093/ssjj/jyaa051
Koch, C., Ashari, P., Mirtsch, M., Blind, K., Castka, P., & et al. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on accredited conformity assessment bodies: Insights from a multinational study. *Accreditation and Quality Assurance, 27*(5), 275–288. https://doi.org/10.1007/s00769-022-01514-x
Koj, J. C., Zapp, P., Wieland, C., Goerner, K., & Kuckshinrichs, W. (2024). Life cycle environmental impacts and costs of water electrolysis technologies for green hydrogen production in the future. *Energy Sustainability and Society, 14*(1), 64. https://doi.org/10.1186/s13705-024-00497-6
Lacey-Barnacle, M., & Nicholls, J. (2022). The role of ownership and governance in democratizing energy: Comparing public, private, and civil society initiatives in England. In *Energy Democracies for Sustainable Futures* (pp. 131–142). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822796-1.00014-0
Lavrijssen, S., & Vitéz, D. (2021). Good governance and the role of regulators in the energy transition: Energy justice,

inclusion, and democracy. *Energy Policy, 156*, 112362. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112362

Lee, H., Seo, Y., & Lee, J. (2025). Typologies of energy justice in the Global South. *Energy Research & Social Science, 104*, 104339. https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104339

Lembi, S., Hoffmann, S., & Rojas, M. (2025). Community capabilities and justice in renewable energy transitions. *Energy Research & Social Science, 98*, 103214. https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.103214

Lembi, S., Hoffmann, S., & Rojas, M. (2025). Measuring social licence to operate in renewable energy projects: Community perceptions, trust, and justice. *Energy Research & Social Science, 99*, 103245. https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.103245

Li, C. J., Razzaq, A., Irfan, M., & Luqman, A. (2023). Green innovation, environmental governance and green investment in China: Exploring the intrinsic mechanisms under the framework of COP26. *Technological Forecasting and Social Change, 194*, 122708. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122708

Mahendru, M., Parihar, J. S., Jain, A., & Sharma, G. D. (2025). The equity imperative: Revisiting COP frameworks through a justice lens. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 27*(4), 1–20. https://doi.org/10.1142/S1464333225500127

Malik, I. H., & Ford, J. D. (2025). Addressing the climate change adaptation gap: Key themes and future directions. *Environmental Development and Sustainability, 27*(6), 12605–12623. https://doi.org/10.1007/s10668-023-04398-0

Mang-Benza, C., & Hunsberger, C. (2020). Wandering identities in energy transition discourses: Political leaders' use of the "we" pronoun in Ontario, 2009–2019. *The Canadian*

Geographer / Le Géographe canadien, 64(3), 516–529. https://doi.org/10.1111/cag.12610

Marktanner, M., & Salman, L. (2020). Economic and geopolitical dimensions of renewable vs. nuclear energy in North Africa. *Energy Policy, 138*, 111288. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111288

Martínez-Mendoza, E., Rivas-Tovar, L. A., & García-Santamaría, L. E. (2021). Wind energy in the Isthmus of Tehuantepec: Conflicts and social implications. *Environment, Development and Sustainability, 23*(8), 11706–11731. https://doi.org/10.1007/s10668-020-01136-8

Mayer, A., García, M. A., Castro-Diaz, L., Lopez, M. C., & Moran, E. F. (2022). Pretend participation: Procedural injustices in the Madeira Hydroelectric Complex. *Global Environmental Change, 75*, 102524. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102524

McDowall, W. (2024). Exploring cultures of evidence in energy policymaking in the UK, Germany, and the Netherlands. *Policy and Society, 43*(4), 463–478. https://doi.org/10.1093/polsoc/puae035

McGookin, C., Ó Gallachóir, B., & Byrne, E. (2021). Participatory methods in energy system modelling and planning – A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 151*, 111504. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111504

Nagarajah, N. (2021). Determinants of responsible innovation for sustainability transition in a developing country: Contested narratives for transition in the Sri Lankan power sector. *Energy Research & Social Science, 71*, 101808. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101808

Nasiritousi, N., & Verhaegen, S. (2020). The politics of (de)legitimation in global energy governance. *Global Environmental Politics, 20*(4), 62–84. https://doi.org/10.1162/glep_a_00597

Nurhidayah, L., Alam, S., Utomo, N. A., & Suntoro, A. (2024). Indonesia's just energy transition: The societal implications of policy and legislation on renewable energy. *Climate Law, 15*(6), 1107–1120. https://doi.org/10.1016/j.accre.2024.11.005

O'Sullivan, K., Golubchikov, O., & Mehmood, A. (2020). Uneven energy transitions: Understanding continued energy peripheralization in rural communities. *Energy Policy, 138*, 111288. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111288

Obergassel, W., Arens, C., Beuermann, C., Brandemann, V., Elsner, C., Höhne, C., Kreibich, N., Ott, H. E., Schell, J., & Schulze-Steinen, M. (2024). Not a 'gift from God': Disappointing results from Baku 2024 climate conference and calls for COP reform. *Carbon & Climate Law Review, 18*(4), 179–194. DOI: 10.21552/cclr/2024/4/4

OECD. (2021). *Strengthening climate resilience: Guidance for governments and development co-operation*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4b08b7be-en

Owens, K., & James, H. (2024). Embedding technology at the grassroots: Strategies for localising technology transfer under the UNFCCC technology mechanism. *Review of European, Comparative & International Environmental Law, 33*(2), 159–171. https://doi.org/10.1111/reel.12548

Rimmer, M. (2019). Beyond the Paris Agreement: Intellectual property, innovation policy, and climate justice. *Laws, 8*(1), 7. https://doi.org/10.3390/laws8010007

Roesler, T., & Hassler, M. (2019). Creating niches – The role of policy for the implementation of bioenergy village cooperatives in Germany. *Energy Policy, 124*, 95–101. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.07.012

Rohracher, H., Velkova, J., Magnusson, D., & Farhangi, M. (2025). Re-assembling infrastructures from below: The agency of households in the sustainable energy transition.

Environmental Innovation and Societal Transitions, 54, 100943. https://doi.org/10.1016/j.eist.2024.100943

Rohracher, H., Velkova, J., Magnusson, D., & Farhangi, M. (2025). Re-assembling infrastructures from below. The agency of households in the sustainable energy transition. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, *54*, 100943. https://doi.org/10.1016/j.eist.2024.100943

Sanderink, L. (2020). Shattered frames in global energy governance: Exploring fragmented interpretations among renewable energy institutions. *Energy Research & Social Science, 61*, 101355. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101355

Saraji, M. K., & Streimikiene, D. (2024). An analysis of challenges to the low-carbon energy transition toward sustainable energy development using an IFCM-TOPSIS approach: A case study. *Journal of Innovation & Knowledge, 9*(2), 100496. https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100496

Schmid, B., & Bornemann, B. (2019). What political settings promote renewable energy investments by energy utilities? A qualitative comparative analysis in Swiss cantons. *European Policy Analysis, 5*(2), 232–265. https://doi.org/10.1002/epa2.1055

Setiawan, A., Mentari, D. M., Hakam, D. F., & Saraswani, R. (2025). From climate risks to resilient energy systems: Addressing the implications of climate change on Indonesia's energy policy. *Energies, 18*(9), 2389. https://doi.org/10.3390/en18092389

Setiawan, A., Suseno, H., Yana, A. A. G. P., & Hidayat, M. (2025). From climate risks to resilient energy systems: Addressing the implications of climate change on Indonesia's energy policy. *Energies, 18*(9), 2389. https://doi.org/10.3390/en18092389

Setiawan, I., Rosadi, A., Setiawan, N. A., Afriliani, I., Abdullah, W., & Irman, F. (2025). From climate risks to resilient energy systems: Addressing the implications of extreme events, sea level rise, vulnerable urban settlements, and social inequality in sustainable development policies in Indonesia. *Energies, 18*(9), 2389. https://doi.org/10.3390/en18092389

Shahzad, S., Abbas Abbasi, M., Ali, H., Iqbal, M., Munir, R., & Kilic, H. (2023). Possibilities, challenges, and future opportunities of microgrids: A review. *Sustainability, 15*(8), 6366. https://doi.org/10.3390/su15086366

Sharman, N. (2025). Recognising differentiated affectedness within a global demos: Promoting the democratic legitimacy of the UNFCCC. *Global Constitutionalism*. Advance online publication. https://doi.org/10.1017/S2045381725000012

Shejale, S., Zhan, M. X., Sahakian, M., Aleksic, D., & Røpke, I. (2025). Participation as a pathway to procedural justice in energy transitions. *Energy Research & Social Science, 114*, 103982. https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.103982

Shen, Y., Shi, X., Zhao, Z., Grafton, R. Q., Yu, J., & Shan, Y. (2024). Quantifying energy transition vulnerability helps more just and inclusive decarbonization. *PNAS Nexus, 3*(10), pgae427. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae427

Shishlov, I., & Censkowsky, P. (2022). Definitions and accounting of climate finance: Between divergence and constructive ambiguity. *Climate Policy, 22*(6), 798–816. https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2080634

Silva, R. G. (2025). Desafios da consulta prévia em projetos de energia renovável. *Revista de Direito Econômico e Socioambiental, 16*(1). https://doi.org/10.7213/rev.dir.econ.soc.v16i1.31904

Späth, P., Castán Broto, V., Bawakyillenuo, S., & Pregernig, M. (2022). The governance of energy transitions in Africa: A sketch of plural perspectives. *Energy, Sustainability and Society, 12*, 51. https://doi.org/10.1186/s13705-022-00380-2

Streimikiene, D., Kyriakopoulos, G. L., Lekavicius, V., & Siksnelyte-Butkiene, I. (2021). Energy poverty and low carbon just energy transition: Comparative study in Lithuania and Greece. *Social Indicators Research, 158*, 319–371. https://doi.org/10.1007/s11205-021-02685-9

Stupak, I., Mansoor, M., & Smith, C. (2021). Sustainability governance in shifting bioenergy landscapes. *Energy Policy, 156*, 112415. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112415

Stupak, I., Mansoor, M., & Smith, C. T. (2021). Legitimacy, trust, and participation in sustainable energy governance. *Energy Policy, 150*, 112145. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.112145

Torres Contreras, G. A. (2024). Social property and wind energy. *Political Geography, 115*, 103209. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2024.103209

Torres Contreras, G. A. (2024). The remaking of social property and wind energy trajectories in the Isthmus of Tehuantepec, Mexico. *Political Geography, 115*, 103209. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2024.103209

Tsagkari, M. (2022). The need for gender-based approach in the assessment of local energy projects. *Energy for Sustainable Development, 68*, 40–49. https://doi.org/10.1016/j.esd.2022.03.001

Turan, A., & Gürluk, S. (2024). Social licence to operate and community trust in renewable energy projects. *Journal of Cleaner Production, 435*, 139876. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139876

Valenzuela, A. (2025). Rethinking global energy transitions: A justice-centered approach. *Energy Research & Social Science, 108*, 103335. https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103335

van Bommel, S., & Höffken, J. I. (2023). The urgency of climate action and the aim for justice in energy transitions – dynamics and complexity. *Environmental Innovation and Societal Transitions, 48*, 100763. https://doi.org/10.1016/j.eist.2023.100763

Vita, G., Ivanova, D., & Dumitru, A. (2020). Happier with less? Members of European environmental grassroots initiatives reconcile lower carbon footprints with higher life satisfaction and income increases. *Energy Research & Social Science, 60*, 101329. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101329

Vormedal, I., Bjander, J., Larsen, M. L., & Lindberg, M. B. (2023). Technological change and the politics of decarbonization: A re-making of vested interests? *Environmental Innovation and Societal Transitions, 47*, 100725. https://doi.org/10.1016/j.eist.2023.100725

Walker, H., & Groen, L. (2025). Access and meaningful participation of non-state actors in the UNFCCC process: Path-dependencies in the era of 'mega-COPs'. *Climate Policy*. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2531096

Werner, D., & Benites Lazaro, L. L. (2023). The policy dimension of energy transition: The Brazilian case in promoting renewable energies (2000–2022). Energy Policy, 175, 113480. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113480

Xin, L., Sun, H., & Xia, X. (2023). Renewable energy technology innovation and inclusive low-carbon development from the perspective of spatiotemporal consistency. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(8),

20490–20513. https://doi.org/10.1007/s11356-022-23556-x

Yeh, E. T., & Loizeaux, E. R. (2024). China at COP27: CBDR, national sovereignty, and climate justice. *Climate and Development, 16*(10), 907–917. https://doi.org/10.1080/17565529.2024.2349652

Yong, M. L., & Gillespie, J. (2022). Towards relational geometries of public participation and hydropower governance in the Lower Mekong River Basin. *Political Geography*, 99, 102773. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102773

Zhong, D., Yan, W., & Chen, X. (2024). Measuring procedural, distributive, and recognition justice in energy transition policies in China. *Climate Policy, 24*(1), 102–118. https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2261894

Zhong, F., Tian, J., Zhao, C., Zha, S., Chen, X., & Zhang, Y. (2024). Assessing energy justice in climate change policies: An empirical examination of China's energy transition. *Climate Policy, 24*(3), 362–377. https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2261894

GLOSARIUM

A

Accounting Pembiayaan Iklim
Accounting pembiayaan iklim merujuk pada cara pencatatan dan perhitungan aliran dana iklim. Perbedaan pencatatan dapat menghasilkan klaim kemajuan yang berbeda terhadap target yang sama.

Advokasi Berbasis Indikator
Strategi menggunakan skor dan peringkat untuk menekan pemerintah atau menarik dukungan publik. Indikator menjadi alat persuasi yang kuat karena memberi kesan objektif dan ilmiah.

Agenda Keberlanjutan
Kerangka kebijakan untuk menurunkan emisi dan membangun ekonomi hijau. Agenda ini rentan digugat ketika dianggap mengabaikan rakyat biasa.

Agenda penelitian
Agenda penelitian merujuk pada arah strategis yang membentuk fokus publikasi dan pendanaan. Agenda ini dapat memperkuat dominasi teknis dan menekan isu keadilan.

Akses Informasi
Kemampuan warga untuk memperoleh dokumen, data, dan rencana proyek secara mudah. Akses ini adalah prasyarat partisipasi yang setara.

Aktor Dominan
Aktor dominan merujuk pada pihak yang memiliki kapasitas lebih besar untuk menentukan arah kebijakan melalui modal,

jaringan, atau pengetahuan. Istilah ini menandai ketimpangan dalam siapa yang dapat menentukan prioritas.

Aktor Non-Negara
Aktor non-negara merujuk pada organisasi di luar negara yang hadir dalam proses internasional. Kualitas keterlibatan mereka dapat sangat bervariasi dan tidak selalu bermakna.

Alat Koordinasi
Fungsi net-zero sebagai pemersatu arah kebijakan lintas aktor. Ia dapat mempercepat transformasi, tetapi juga menyederhanakan perdebatan jalur alternatif.

Alat Ukur
Perangkat penilaian yang menentukan variabel apa yang dianggap penting dalam implementasi. Ia bukan netral karena membentuk cara negara melihat dirinya sendiri.

Ambang Kualitas Institusi
Titik batas mutu kelembagaan yang menentukan apakah kebijakan dapat bekerja secara efektif. Ia menunjukkan kapan kapasitas dan integritas tata kelola cukup untuk menopang implementasi yang stabil.

Anggaran Karbon
Gagasan tentang batas emisi yang dapat dilepaskan sebelum krisis iklim lepas kendali. Konsep ini sering dipakai untuk memberi legitimasi pada angka target yang tampak ilmiah.

Angka dalam Model
Angka dalam model merujuk pada angka-angka yang dipakai dalam model iklim atau model ekonomi sebagai dasar keputusan kebijakan. Istilah ini menandai bahwa angka bukan kebenaran objektif, melainkan perwujudan nilai yang dipilih.

Angka Imbal Hasil
Angka imbal hasil merujuk pada ukuran keuntungan yang menjadi pusat pertimbangan investor. Fokus pada angka ini dapat menggeser pembicaraan dari martabat dan keadilan menuju target finansial.

Angka Nol Bersih
Simbol yang tampak tegas tetapi menyimpan asumsi tentang siapa yang harus mengurangi, kapan, dan bagaimana beban dibagi. Ia dapat menjadi alat legitimasi sekaligus manipulasi.

Arena Banding
Ruang formal ketika keputusan regulator atau pemerintah dapat digugat. Arena ini membutuhkan bahasa hukum dan standar pembuktian yang tidak selalu ramah warga.

Arena Kebijakan
Arena kebijakan merujuk pada ruang kontestasi tempat berbagai aktor berusaha mendefinisikan prioritas, nilai, dan ukuran keberhasilan. Istilah ini menandai bahwa kebijakan energi adalah proses negosiasi yang sarat kepentingan, bukan jalur teknis yang linier.

Arena Konflik
Arena konflik merujuk pada ruang sosial-politik tempat aktor-aktor saling berhadapan dalam menentukan arah kebijakan energi. Istilah ini menegaskan bahwa konflik bukan gangguan, tetapi bagian dari proses kebijakan.

Arsitektur Institusional
Susunan peran pemerintah, regulator, dan pengadilan dalam mengatur sistem energi. Arsitektur ini menyaring siapa yang efektif bersuara.

Arsitektur Keadilan
Kerangka yang menempatkan integritas net-zero sebagai bagian dari keadilan, bukan sekadar koordinasi angka. Ia menuntut partisipasi bermakna dan mekanisme koreksi.

Arsitektur Kelembagaan
Arsitektur kelembagaan merujuk pada rancangan lembaga, aturan, dan prosedur yang mengatur kebijakan energi. Rancangan ini menentukan bagaimana konsep hak, jasa, dan komoditas diterjemahkan dalam praktik.

Arsitektur Partisipasi
Susunan prosedur, forum, dan kanal yang menentukan bagaimana warga dilibatkan. Arsitektur ini membentuk siapa yang didengar dan siapa yang terpinggirkan.

Arsitektur Pendanaan Iklim
Sistem keuangan yang menentukan siapa membayar dan siapa menerima dukungan dalam krisis iklim. Ia dapat memperkuat status quo atau membuka redistribusi.

Arus Modal
Arus modal merujuk pada pergerakan investasi dan pembiayaan yang menentukan proyek mana yang bisa berjalan dan siapa yang menguasai infrastruktur. Istilah ini menandai bahwa modal bukan sekadar sumber dana, tetapi juga sumber kuasa.

Arus Utama Riset
Arus utama riset merujuk pada tema dan paradigma dominan yang membentuk orientasi publikasi akademik. Istilah ini menandai bahwa riset teknis dapat mengunci batas diskusi yang dianggap sah.

Asimetri Informasi
Ketimpangan pengetahuan antara aktor kuat dan komunitas terdampak. Asimetri ini menghasilkan relasi tawar yang tidak setara.

Asimetri Kekuasaan
Perbedaan kemampuan memengaruhi keputusan antara perusahaan, pemerintah, dan warga. Asimetri ini membuat partisipasi formal tidak otomatis berarti partisipasi nyata.

Asimetri Pengetahuan
Ketimpangan pemahaman antara aktor proyek dan warga terdampak. Asimetri ini menciptakan relasi tawar yang tidak setara.

Asumsi Efektivitas Otomatis
Anggapan bahwa kualitas institusi tinggi dengan sendirinya menjamin keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Asumsi ini mengabaikan konflik nilai dan benturan kepentingan domestik.

Asumsi Metodologis
Asumsi metodologis merujuk pada dasar pemilihan metode dan teknik analisis dalam riset energi berkelanjutan. Asumsi ini menentukan batas kemungkinan kesimpulan yang dapat dihasilkan.

Aturan Fiskal
Ketentuan yang mengarahkan disiplin anggaran dan batas defisit. Aturan ini membatasi atau memperluas insentif kebijakan energi.

Aturan Tata Ruang
Ketentuan yang menentukan pemanfaatan lahan dan lokasi proyek. Ia berpengaruh langsung pada perizinan dan penerimaan sosial.

B

Bahasa Ancaman
Pilihan istilah yang membingkai energi dalam logika bahaya dan musuh. Ia mendorong respons yang menekankan pengamanan ketimbang perundingan sosial.

Bahasa Hukum
Kerangka argumentasi yang menentukan apa yang dianggap sah dalam sengketa kebijakan. Bahasa ini dapat menjadi penghalang bagi kelompok yang tidak memiliki sumber daya advokasi.

Bahasa Kebijakan
Bahasa kebijakan merujuk pada kosakata yang membingkai konflik seolah teknis dan netral. Istilah ini menandai bahwa bahasa dapat menyembunyikan konflik nilai di balik istilah prosedural.

Bahasa politik
Cara pemimpin dan institusi menggunakan kata-kata untuk membentuk kesan bahwa tindakan dilakukan secara kolektif dan serempak. Bahasa ini dapat menutupi perbedaan kepentingan dan ketimpangan kapasitas antar aktor.

Bahasa Teknis
Bahasa teknis merujuk pada istilah-istilah yang membuat kebijakan tampak objektif tetapi sekaligus membatasi akses publik. Istilah ini menandai bagaimana wacana teknis dapat menjadi mekanisme eksklusi.

Bahasa Teknis
Bahasa teknis merujuk pada kosakata dan istilah analitis yang digunakan dalam laporan dan model kebijakan. Bahasa ini dapat menciptakan jarak antara pembuat kebijakan dan publik.

Bahasa Teknokratik
Bahasa teknis yang sering dipakai untuk menjelaskan proyek sehingga sulit dipahami warga. Ia dapat menjadi penghalang partisipasi meskipun informasi secara formal tersedia.

Bahasa
Bahasa merujuk pada medium utama di mana kebijakan energi berkelanjutan diproduksi, dipahami, dan diperdebatkan. Istilah ini menandai bahwa pilihan kata seperti "krisis", "transisi", atau "ketahanan" bukan sekadar deskripsi, melainkan cara membentuk batas perdebatan dan arah legitimasi.

Bantuan Langsung
Bantuan langsung merujuk pada skema bantuan yang ditujukan untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kebijakan tarif dan transisi. Instrumen ini menentukan apakah energi diperlakukan sebagai hak yang wajib dijamin.

Batas Imajinasi Kebijakan
Batas imajinasi kebijakan merujuk pada ruang kemungkinan yang dibatasi oleh model dan indikator yang digunakan. Ketika kerangka analitis terlalu sempit, alternatif kebijakan sulit dipertimbangkan.

Batas Penggunaan Lahan
Pembatas yang menentukan seberapa jauh lahan dapat dialihkan untuk proyek energi atau serapan karbon. Ia beririsan dengan konflik tata ruang dan hak komunitas.

Bauran Energi
Komposisi sumber energi dalam sistem nasional atau regional. Ia sering dipakai sebagai indikator utama keberhasilan, meski tidak mencerminkan distribusi beban.

Belajar dari Konflik
Kemampuan institusi menjadikan konflik sebagai data sosial untuk memperbaiki kebijakan. Ia membedakan kebijakan yang adaptif dari kebijakan yang defensif.

Benefit Sharing
Upaya memberikan manfaat jangka panjang kepada komunitas sebagai bagian dari pengelolaan dampak sosial proyek. Ia dapat dipandang sebagai penyeimbang manfaat dan beban, namun hasilnya bergantung pada siapa yang dilibatkan dan siapa yang dikesampingkan.

Bentuk Kekuasaan
Bentuk kekuasaan merujuk pada variasi cara kekuasaan bekerja dalam kebijakan, mulai dari regulasi, insentif, hingga produksi pengetahuan. Istilah ini menandai bahwa kekuasaan dapat hadir sebagai prosedur administratif yang tampak netral.

Benturan Kepentingan Domestik
Konflik antara kelompok sosial, sektor industri, dan wilayah yang memiliki kepentingan berbeda. Benturan ini membuat kebijakan tidak bisa dipahami sebagai urusan teknis semata.

Berbagi Kekuasaan
Kesediaan institusi mengakui warga sebagai aktor yang memiliki suara dalam mendefinisikan keberhasilan. Tanpa berbagi kekuasaan, evaluasi partisipatif menjadi formalitas.

Berbicara atas Nama Siapa
Pertanyaan tentang legitimasi aktor yang mengklaim mewakili komunitas, organisasi, atau kelompok rentan. Ia menentukan apakah proses partisipasi bermakna atau hanya formalitas.

Berkelanjutan
Berkelanjutan adalah istilah normatif yang memuat klaim moral tentang masa depan dan tanggung jawab lintas generasi. Istilah ini tidak sekadar menunjuk energi yang lebih bersih, tetapi menandai horizon etika tentang apa yang harus dipertahankan dan siapa yang dilindungi dalam kebijakan energi.

Berkuasa dalam Lintasan Waktu
Kekuatan yang bekerja melalui konsistensi pelaksanaan, bukan melalui retorika politik sesaat. Ia terlihat ketika aktor mampu menjaga arah kebijakan melewati pergantian kabinet dan siklus anggaran.

Biaya Hidup
Konsekuensi sosial dari kebijakan seperti kenaikan tarif listrik dan pajak bahan bakar. Biaya ini mudah dijadikan amunisi politik.

Biaya Kepatuhan
Beban waktu, biaya, dan sumber daya yang harus dikeluarkan agar suatu inisiatif dianggap sesuai aturan. Biaya ini sering hanya mampu ditanggung aktor besar.

Biaya Modal

Besaran biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh pendanaan proyek pada fase awal. Ia mempengaruhi kelayakan investasi dan besarnya kebutuhan kepastian pendapatan.

Deliberasi Publik
Proses pertukaran alasan dan pertimbangan secara terbuka dalam pengambilan keputusan kebijakan. Ia menentukan apakah dampak pada kelompok rentan benar-benar masuk dalam perdebatan.

Bingkai yang Pecah
Kondisi ketika lembaga bekerja dengan bingkai pemahaman berbeda sehingga indikator dan tujuan saling bertentangan. Fragmentasi ini menciptakan kebingungan di tingkat nasional dan lokal.

Bobot Indikator
Proporsi kepentingan yang diberikan pada setiap variabel dalam indeks komposit. Penentuan bobot menentukan aspek mana yang lebih menentukan dalam evaluasi kebijakan.

Boikot Tenang
Bentuk penolakan yang tidak selalu tampil sebagai aksi besar, tetapi efektif mengganggu kelancaran proyek. Ia dapat muncul sebagai penahanan dukungan dan ketidakbersediaan bekerja sama.

Broker Tanah
Aktor perantara yang memanfaatkan ketidakjelasan informasi untuk mengendalikan transaksi lahan. Keberadaan broker tanah sering menguat ketika transparansi lintas-level lemah.

Bukti Ilmiah
Pengetahuan yang dipakai untuk membenarkan kebijakan dan menetapkan opsi yang dianggap rasional. Penggunaan bukti dapat mempersempit imajinasi alternatif.

C

Cadangan Kekuasaan
Sumber daya kekuasaan komunitas yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh prosedur legal. Cadangan ini tampak ketika komunitas mampu mengganggu kelancaran proyek saat merasa keadilan dilanggar.

Celah Akuntabilitas
Kondisi ketika sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan, dampak, dan konflik. Celah ini membuat keluhan publik berputar tanpa jawaban tegas.

Celah Distribusi Manfaat–Beban
Ketimpangan antara siapa yang menikmati keuntungan proyek dan siapa yang menanggung risikonya. Celah ini sering menjadi inti konflik sosial dalam transisi energi.

Celah Hukum
Ruang ketidakjelasan atau kekosongan aturan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor tertentu. Celah ini membuat penegakan regulasi menjadi rapuh.

Celah Informasi
Ketimpangan pengetahuan tentang proyek antara pusat, daerah, perusahaan, dan warga. Celah ini membuat sebagian aktor bisa bergerak lebih dulu, sementara pihak lain hanya bereaksi.

Celah Moral
Kekosongan etis dalam pembagian beban risiko dan tanggung jawab. Ia membuat keberlanjutan menjadi arena tarik-menarik antara kejujuran dan manipulasi.

Celah Representasi
Kekosongan atau ketidakjelasan tentang siapa yang berhak mewakili komunitas terdampak. Celah ini membuka ruang manipulasi dan kooptasi.

Citra Hijau
Citra hijau merujuk pada keuntungan simbolik yang dapat dipertahankan di tingkat pusat meskipun risiko sosial dipindahkan ke tingkat lokal. Istilah ini menandai ketegangan antara simbol keberlanjutan dan pengalaman ketidakadilan di lapangan.

Climate Finance
Climate finance merujuk pada pembiayaan iklim yang tidak memiliki definisi tunggal dalam praktik kebijakan. Ketidakseragaman definisi memungkinkan berbagai aktor mengklaim capaian yang berbeda-beda.

Co-decision
Bentuk partisipasi ketika warga memiliki posisi ikut menentukan keputusan, bukan hanya memberi masukan. Ia

menuntut pembagian kekuasaan yang nyata dalam desain kebijakan.

Conditionalities Kebijakan
Persyaratan yang dilekatkan pada bantuan atau pembiayaan agar negara penerima mengadopsi reformasi tertentu. Dalam sektor energi, conditionalities dapat mendorong perubahan regulasi sekaligus membatasi otonomi kebijakan nasional.

***Conference of the Parties* (COP)**
Conference of the Parties (COP) merujuk pada forum perundingan iklim internasional yang mempertemukan negara-negara untuk merundingkan komitmen, keputusan, dan mekanisme kebijakan iklim. Istilah ini menandai arena global tempat legitimasi prosedural, substantif, dan simbolik dipertarungkan dalam tata kelola iklim internasional.

***Copy-paste* Regulasi**
Praktik menyalin aturan dari sektor lain tanpa penyesuaian memadai terhadap kebutuhan energi bersih. Ia menciptakan kebijakan yang tampak rapi tetapi tidak kompatibel dengan realitas transisi.

Cost–Benefit Analysis
Cost–benefit analysis merujuk pada teknik evaluasi kebijakan yang membandingkan manfaat dan biaya dalam satuan moneter. Istilah ini menandai cara kebijakan dapat menyederhanakan konflik etis menjadi perhitungan angka bersih.

Cost–Effectiveness Analysis
Cost–effectiveness analysis merujuk pada pendekatan evaluasi yang menilai efektivitas biaya dari suatu kebijakan atau intervensi. Penggunaannya dapat memperkuat preferensi pada ukuran yang mudah dihitung.

Cuaca Ekstrem
Cuaca ekstrem merujuk pada dampak iklim yang memperbesar ancaman terhadap sistem energi dan kehidupan sosial. Istilah ini menandai bahwa kebijakan energi harus memikirkan ketahanan dan perlindungan kelompok rentan.

Cultures of Evidence
Pola sosial tentang bagaimana bukti dipilih, ditafsirkan, dan dipakai dalam proses kebijakan. Ia menentukan siapa yang dianggap kompeten dan siapa yang disingkirkan.

D

Daerah Terpencil
Daerah terpencil merujuk pada wilayah yang dapat menanggung biaya sosial-ekonomi terbesar ketika kebijakan energi tidak diarahkan dengan adil. Istilah ini menandai bahwa transisi energi harus dibaca dalam kerangka ketimpangan wilayah.

Dampak Sosial-Lingkungan
Dampak sosial-lingkungan merujuk pada konsekuensi proyek energi terhadap ruang hidup, relasi sosial, dan kondisi ekologis. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan tidak dapat direduksi menjadi kapasitas terpasang atau penurunan emisi.

Dana kerugian–kerusakan
Skema yang memprioritaskan kebutuhan komunitas terdampak bencana iklim. Ia menuntut desain khusus agar tidak menjadi simbolisme kosong.

Data Kuantitatif
Data kuantitatif merujuk pada angka dan statistik yang dijadikan dasar evaluasi kebijakan. Ketergantungan pada data kuantitatif dapat mempersempit pemahaman atas dimensi sosial yang sulit diukur.

Daya Lenting
Daya lenting merujuk pada kemampuan sistem energi untuk bertahan dan pulih dari guncangan iklim. Istilah ini menandai bahwa pembagian tanggung jawab keberlanjutan juga mencakup ketahanan sistem, bukan hanya target emisi.

Definisi Ketahanan Energi
Definisi ketahanan energi merujuk pada cara negara atau lembaga mendeskripsikan kemampuan sistem menghadapi gangguan. Istilah ini menandai bahwa ketahanan dapat dimaknai sebagai stabilitas pasokan semata atau sebagai perlindungan kelompok rentan.

Definisi Krisis
Definisi krisis merujuk pada cara aktor kebijakan membingkai situasi energi sebagai keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Istilah ini menandai bahwa siapa yang mendefinisikan krisis memiliki kuasa untuk menentukan prioritas dan urgensi.

Definisi Transisi Energi
Definisi transisi energi merujuk pada cara perubahan menuju energi rendah karbon dipahami dan dipresentasikan. Istilah ini menandai bahwa transisi dapat dibingkai sebagai pergeseran teknis bertahap atau sebagai perubahan struktural yang menyentuh relasi kuasa.

Degrowth
Pendekatan yang menolak logika ekspansi ekonomi tanpa batas sebagai solusi iklim. Ia menggeser ukuran keberhasilan dari investasi besar ke pengurangan konsumsi berlebih.

Delegasi Kebijakan
Delegasi kebijakan merujuk pada pemindahan sebagian tanggung jawab negara kepada aktor pasar dalam pengelolaan

energi. Istilah ini menandai risiko ketika keputusan strategis berpindah ke aktor tanpa mandat demokratis.

Deliberasi Bermakna
Deliberasi yang benar-benar memungkinkan argumen warga mengubah desain kebijakan atau proyek. Ia menuntut transparansi, waktu yang cukup, dan pembagian kekuasaan.

Deliberasi publik
Proses pembahasan bersama yang memungkinkan argumen warga, ahli, dan pemerintah diuji secara terbuka. Deliberasi menekankan kualitas pertukaran alasan, bukan sekadar kehadiran.

Demokrasi Energi
Demokrasi energi merujuk pada kajian dan gagasan yang menilai desain layanan energi sebagai persoalan relasi kuasa. Fokusnya menekankan keterlibatan warga dalam menentukan arah sistem, bukan hanya menerima paket layanan.

Demokratisasi kekuasaan
Proses memperluas siapa yang berhak menentukan masa depan energi dan iklim. Ia menempatkan transisi sebagai proyek politik, bukan sekadar teknokratik.

Demokratisasi Lembaga-Lembaga Ekonomi
Proses memperluas partisipasi dan kontrol publik atas institusi yang mengelola energi. Ia bertujuan mengurangi dominasi aktor besar dalam pengambilan keputusan.

Desain Pasar
Desain pasar merujuk pada rancangan aturan dan mekanisme yang menentukan cara energi dihargai dan didistribusikan. Desain ini dapat menguatkan perlindungan kelompok rentan atau justru mendorong pelepasan tanggung jawab sosial.

Desain
Desain merujuk pada cara kebijakan disusun sehingga menentukan siapa yang menerima dukungan dan siapa yang terpinggirkan. Istilah ini menandai bahwa kebijakan energi berkelanjutan harus dibaca sebagai penataan kuasa, bukan hanya penataan teknis.

Desentralisasi Listrik
Perubahan konfigurasi kepemilikan dan pengelolaan sistem listrik ke tingkat yang lebih tersebar. Ia dapat menggeser pusat kekuasaan, tetapi tidak otomatis berpihak pada kelompok lemah.

Dialog yang Jujur
Proses deliberasi yang mengakui konflik nilai dan ketidakpastian. Ia diposisikan sebagai cara mengelola ketidakpastian tanpa menumpuk aturan.

Difusi Inovasi
Proses penyebaran teknologi dan praktik baru dalam sistem energi. Kecepatan difusi sering diasumsikan dalam model, tetapi bergantung pada konteks sosial dan politik.

Dimensi Kekuasaan
Wajah konkret kekuasaan yang tampak dalam kemampuan mengeksekusi kebijakan, bukan sekadar kemampuan memutuskan. Kekuasaan dibaca dari siapa yang mampu memastikan keputusan tetap berjalan ketika kondisi berubah.

Dimensi Moral
Dimensi moral merujuk pada aspek nilai yang menentukan apakah kebijakan layak secara etis. Dimensi ini sering dipinggirkan ketika kebijakan dibaca sebagai persoalan teknis.

Dimensi Politik
Dimensi politik merujuk pada aspek kekuasaan yang menentukan siapa yang menentukan arah kebijakan. Istilah ini

menandai bahwa transisi energi selalu merupakan arena kontestasi.

Discount Rate

Discount rate adalah tingkat diskonto yang menurunkan nilai manfaat atau kerugian masa depan agar dapat dibandingkan dengan nilai saat ini. Pilihan angka diskonto menentukan seberapa besar kepentingan generasi mendatang dihargai dalam kebijakan energi.

Discounted Cash Flow

Discounted cash flow merujuk pada cara menghitung nilai sekarang dari keuntungan masa depan. Cara hitung ini memengaruhi keputusan investasi dan distribusi risiko dalam proyek energi.

Disiplin Metodologis

Disiplin metodologis merujuk pada aturan dan prosedur penelitian yang menentukan validitas hasil analisis. Disiplin ini memperkuat legitimasi ilmiah sekaligus membatasi variasi pendekatan.

Diskresi tidak tertulis

Kewenangan informal dalam birokrasi yang tidak tercatat sebagai aturan resmi. Diskresi ini dapat menjadi kanal patronase meski regulasi tampak modern.

Distribusi Beban

Distribusi beban merujuk pada pembagian biaya ekonomi dan risiko sosial-ekologis dalam kebijakan energi. Istilah ini menandai bahwa konflik nilai sering muncul ketika beban dipusatkan pada pihak yang tidak berdaya.

Distribusi Biaya

Distribusi biaya merujuk pada pembagian beban biaya antara rumah tangga, industri, dan pihak lain. Asumsi distribusi biaya membentuk siapa yang diprioritaskan dalam kebijakan.

Distribusi informasi
Pola penyebaran data proyek yang menentukan siapa dapat memahami dan merespons. Distribusi informasi yang timpang memproduksi ketidakadilan prosedural.

Distribusi Manfaat
Distribusi manfaat merujuk pada pembagian keuntungan ekonomi, akses, dan perlindungan dalam kebijakan energi. Istilah ini menjadi ukuran keadilan ketika manfaat terkonsentrasi pada aktor kuat.

Distribusi Risiko dan Manfaat
Distribusi risiko dan manfaat merujuk pada cara kebijakan menentukan siapa yang menanggung dampak negatif dan siapa yang menikmati keuntungan. Istilah ini menandai inti persoalan etis dalam energi berkelanjutan.

Distribusi Risiko
Distribusi risiko merujuk pada cara kebijakan menentukan siapa yang menanggung dampak sosial dan ekologis dari proyek energi. Istilah ini menandai bahwa transisi energi sering memindahkan risiko ke komunitas lokal.

Doing Business
Indeks global yang menilai kemudahan berusaha melalui indikator regulasi dan prosedur administratif. Dalam konteks energi, logika serupa sering diadopsi untuk mengukur daya tarik investasi dan efisiensi regulasi.

Dokumen perencanaan yang komprehensif
Rencana kebijakan yang lengkap secara administratif tetapi tidak otomatis menghasilkan tindakan nyata. Tanpa kemampuan menggerakkan aktor lokal, dokumen hanya menjadi simbol.

Dominasi Aktor Besar
Kondisi ketika pemerintah dan korporasi besar memegang kendali atas desain pasar dan pembiayaan energi. Dominasi ini membatasi ruang inovasi kecil dan eksperimental.

Dominasi Riset Teknis
Dominasi riset teknis merujuk pada kecenderungan riset energi berkelanjutan yang lebih menekankan aspek teknologi, efisiensi, dan optimasi. Istilah ini menandai bahwa arah penelitian sering bergerak dalam kerangka solusi teknis tanpa membongkar pertanyaan moral.

Dominasi Teknokratis
Dominasi teknokratis merujuk pada keadaan ketika keputusan kebijakan didominasi oleh ahli, indikator, dan model, sehingga perdebatan nilai dianggap gangguan. Istilah ini menandai penyempitan ruang demokrasi dalam kebijakan energi.

Dominasi Teknokratis
Dominasi teknokratis merujuk pada kondisi ketika kebijakan dikunci oleh ahli, model, dan indikator, sementara pertanyaan moral diperlakukan sebagai gangguan. Istilah ini menandai penyempitan ruang deliberasi publik dalam transisi energi.

Dua Kutub
Dua kutub merujuk pada cara membayangkan negara dan pasar sebagai dua pihak yang seolah-olah saling berhadapan dalam pembicaraan keberlanjutan. Frasa ini menandai pembacaan yang menyederhanakan persoalan etis seolah tanggung jawab hanya dapat dipikul oleh salah satunya.
Dukungan riset dan pengembangan merujuk pada instrumen kebijakan yang menunjukkan apakah negara menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas nyata. Istilah ini menandai perbedaan antara keberlanjutan sebagai wacana dan keberlanjutan sebagai agenda institusional.

Dunia Models dan Scenarios
Lapisan teknis tempat masa depan dibayangkan melalui jalur A, B, atau C menuju angka tertentu. Ia tampak ilmiah, tetapi membawa asumsi normatif yang kuat.

Durasi kontrak

Lamanya jangka waktu perjanjian pembelian listrik yang ditetapkan dalam skema FIT. Durasi yang panjang dapat mengunci konsekuensi fiskal dan tarif selama bertahun-tahun.

E

Ekspektasi Pengembalian Modal
Harapan tingkat keuntungan yang dituntut pemberi modal atas investasi yang ditanamkan. Ia membentuk tekanan atas penetapan tarif dan desain kontrak.

Efisiensi Birokratis
Orientasi pada prosedur cepat dan kepatuhan administratif sebagai tujuan utama. Jika dominan, efisiensi birokratis dapat mengorbankan keadilan sosial dan ekologis.

Efisiensi Ekonomi
Efisiensi ekonomi merujuk pada tujuan kebijakan yang menekankan biaya terendah dan manfaat maksimum dalam kalkulasi agregat. Istilah ini sering menjadi standar dominan yang menyingkirkan dimensi keadilan.

Efisiensi Energi
Efisiensi energi merujuk pada peningkatan penggunaan energi agar menghasilkan output lebih besar dengan konsumsi lebih kecil. Istilah ini sering dipakai sebagai indikator kemajuan, meskipun tidak selalu menjawab persoalan keadilan.

Efisiensi Teknis
Ukuran keberhasilan yang menilai seberapa optimal teknologi dan sumber daya digunakan. Dalam perdebatan transisi, efisiensi teknis sering diposisikan sebagai tujuan utama.

Efisiensi
Efisiensi merujuk pada klaim utama yang sering dilekatkan pada pasar sebagai cara mengalokasikan sumber daya secara optimal. Istilah ini ditampilkan sebagai pembenaran normatif, tetapi dalam konteks krisis iklim ia tetap harus diuji
siapa yang menanggung risiko dan siapa yang menikmati manfaat.

Ekologi kekuasaan
Rangkaian unsur yang saling mengunci dalam praktik kebijakan, termasuk aturan, aktor, dan insentif. Ia menjelaskan mengapa perubahan formal sering tidak mengubah hasil substantif.

Ekonomi neoklasik
Ekonomi neoklasik adalah pendekatan ekonomi yang menilai kebijakan melalui efisiensi, optimalitas, dan manfaat bersih agregat. Istilah ini menunjukkan dominasi logika angka dalam perumusan kebijakan publik.

Ekonomi Neoklasik
Ekonomi neoklasik dijelaskan sebagai pendekatan yang cenderung mengukur pilihan publik melalui perangkat angka agar keputusan tampak rasional. Dalam subbab ini, ekonomi neoklasik menjadi kerangka yang diuji karena berisiko mengubah persoalan etis menjadi persoalan hitung semata.

Ekosistem Peer Review
Jaringan evaluasi ilmiah yang memengaruhi cara model dan skenario ditafsirkan. Ia berperan menjaga kualitas pengetahuan yang masuk ke kebijakan.

Eksklusivitas Epistemik
Kondisi ketika hanya mereka yang menguasai bahasa teknis dapat masuk ke arena keputusan. Eksklusivitas ini membuat partisipasi tampak terbuka tetapi tertutup.

Eksperimen Demokratis
Upaya mencoba bentuk partisipasi baru, kepemilikan baru, atau model kebijakan yang lebih langsung. Eksperimen ini sering tersumbat oleh prosedur yang terlalu rapat.

Eksperimen Energi Komunitas
Praktik inovasi energi skala lokal yang tidak berorientasi laba. Ia memperluas imajinasi kebijakan tentang transisi yang tidak terpusat.

Ekspresi Etika
Ekspresi etika kolektif dipakai untuk menegaskan bahwa nilai tidak identik dengan harga. Dalam subbab ini, ekspresi etika diposisikan sebagai alasan mengapa kebijakan perlu dibaca melampaui logika angka.

Elastisitas Permintaan
Elastisitas permintaan merujuk pada asumsi tentang respons permintaan terhadap perubahan harga atau kondisi tertentu. Asumsi ini dapat mempengaruhi arah kebijakan dan pembenaran penundaan transisi.

Elit Lama
Elit lama merujuk pada aktor yang telah lama menguasai arus modal, regulasi, dan jaringan pengaruh dalam sektor energi. Istilah ini menandai bahwa elit dapat beradaptasi dan mempertahankan kontrol dalam rezim baru melalui negosiasi ulang posisi.

Enam Celah Institusional
Rangkaian titik lemah yang membuat kebijakan pusat kehilangan daya kendali ketika masuk ke rantai implementasi.

Celah ini memproduksi ketidakpastian, konflik, dan ketimpangan legitimasi.

Energi sebagai Hak

Energi sebagai hak merujuk pada cara pandang yang menempatkan akses energi sebagai bagian dari martabat manusia. Konsekuensinya, tidak seorang pun boleh hidup tanpa listrik layak atau terpapar udara kotor hanya karena miskin.

Energi sebagai Jasa

Energi sebagai jasa merujuk pada cara pandang yang melihat energi sebagai layanan utilitas dengan logika menutup biaya dan memenuhi standar pasokan. Konsekuensinya, akses mudah digeser menjadi urusan kemampuan membayar dan kewajiban kontraktual.

Energi sebagai Komoditas

Energi sebagai komoditas merujuk pada cara pandang yang menempatkan energi sebagai barang yang dikejar demi laba dan diperlakukan seperti objek transaksi. Konsekuensinya, pertimbangan keadilan dan martabat mudah tersisih oleh perhitungan finansial.

Energi Terbarukan

Energi terbarukan merujuk pada sumber energi yang didorong dalam agenda transisi rendah karbon, tetapi pembiayaan dan pengelolaannya melahirkan pertanyaan etis. Istilah ini menandai bahwa percepatan energi terbarukan harus diuji melalui distribusi manfaat, beban, dan partisipasi.

Energi Terdesentralisasi

Energi terdesentralisasi merujuk pada pendekatan penyediaan energi yang tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan terpusat, terutama untuk wilayah terpencil. Pendekatan ini sering diperdebatkan sebagai prioritas keadilan sosial atau peluang bisnis.

Energy Access for All

Energy access for all merujuk pada agenda perluasan akses energi yang menekankan inklusi dan cakupan menyeluruh. Istilah ini menyoroti bahwa akses tidak boleh terbatas pada kelompok yang sudah mampu.

Energy Justice

Energy justice merujuk pada kerangka yang menekankan keadilan dalam siapa yang menikmati manfaat energi, siapa yang menanggung bebannya, dan siapa yang dilibatkan dalam keputusan. Istilah ini dipakai untuk menegaskan bahwa pembagian tanggung jawab tidak netral.

Epistemic Communities

Jaringan aktor pengetahuan yang mempromosikan kerangka solusi dan standar kebijakan lintas negara. Ia dapat mempercepat difusi kebijakan, sekaligus membawa hierarki pengetahuan.

Epistemologi Bukti

Epistemologi bukti merujuk pada cara mengatur apa yang dihitung sebagai bukti relevan untuk keputusan publik. Istilah ini menentukan pengetahuan mana yang diangkat menjadi dasar keputusan dan pengetahuan mana yang dikesampingkan.

Epistemologi Kekuasaan

Epistemologi kekuasaan merujuk pada situasi ketika penentuan bukti berubah menjadi penentuan siapa yang berhak mendefinisikan realitas sah. Siapa yang menentukan definisi ikut menentukan arah kebijakan.

Etika Intergenerasional

Etika intergenerasional adalah kerangka moral yang menekankan tanggung jawab generasi kini terhadap generasi mendatang. Istilah ini menolak cara pandang yang mereduksi masa depan menjadi variabel teknis dalam kalkulasi ekonomi.

Etika
Etika merujuk pada dasar moral yang digunakan untuk menilai apakah kebijakan energi pantas dan adil. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan adalah persoalan kewajiban, bukan sekadar pilihan kebijakan.

Evaluasi Berbasis Bukti
Evaluasi berbasis bukti merujuk pada pendekatan yang menekankan penggunaan data dan penelitian dalam menilai kebijakan. Pendekatan ini membentuk legitimasi kebijakan melalui klaim objektivitas.

Evaluasi Berkala
Prosedur peninjauan aturan dalam interval tertentu dengan indikator yang jelas. Ia memungkinkan perubahan tanpa menciptakan guncangan dan tanpa memproduksi ketidakpastian ekstrem.

Evaluasi Formal
Penilaian yang berbasis dokumen, laporan, dan indikator kuantitatif. Ia penting, tetapi tidak cukup untuk membaca kualitas hubungan dan dampak yang dirasakan warga.

Evaluasi Partisipatif
Penilaian yang menilai kualitas hubungan antarpelaku dan dampak yang dirasakan warga. Ia menuntut kesediaan lembaga untuk berbagi kekuasaan.

F

Fatigue Komunitas
Fatigue komunitas adalah kejenuhan warga akibat konsultasi berulang yang tidak menghasilkan perubahan. Kejenuhan ini memperlemah kepercayaan dan memperbesar resistensi.

Feed-in Tariff

Feed-in tariff merujuk pada instrumen kebijakan yang menetapkan harga beli listrik tertentu untuk mendorong investasi energi terbarukan. Istilah ini menandai bahwa kebijakan tarif dapat menjadi mekanisme distribusi manfaat bagi investor.

Fiscal Space

Ruang kemampuan negara menanggung subsidi dan jaminan pembiayaan. Ketersediaannya menentukan skala intervensi energi terbarukan.

Fleksibilitas Adaptif

Kemampuan kebijakan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial tanpa menciptakan kejutan regulasi. Fleksibilitas ini harus dibangun melalui mekanisme evaluasi yang dapat diprediksi.

Fleksibilitas Alokasi Sumber Daya

Fleksibilitas alokasi sumber daya merujuk pada klaim bahwa pasar dapat memindahkan sumber daya ke sektor yang dianggap paling produktif. Istilah ini menandai logika yang sering dipuji, tetapi tidak selalu kompatibel dengan perlindungan hak warga dan kelompok rentan.

Fluktuasi Harga

Fluktuasi harga merujuk pada perubahan harga yang dapat memindahkan beban ketidakpastian kepada pengguna kecil. Istilah ini menjadi penting ketika energi diperlakukan sebagai komoditas.

Fokus Teknologi

Fokus teknologi merujuk pada kecenderungan membahas energi terbarukan sebagai perangkat teknis, bukan sebagai relasi sosial. Istilah ini menandai penyempitan analisis yang menggeser konflik keadilan menjadi urusan hitung-hitungan.

Forum Tertutup
Ruang pengambilan keputusan yang diakses terutama oleh pemerintah, pelaku usaha besar, dan lembaga keuangan. Forum ini membuat masyarakat sipil sering berada pada posisi reaktif.

FPIC
FPIC adalah mekanisme persetujuan yang menekankan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Ia dirancang untuk mencegah persetujuan yang dipaksakan atau dimanipulasi.

Frekuensi Dialog Publik
Ukuran seberapa sering institusi membuka komunikasi langsung dengan warga. Dialog publik memperkuat rasa memiliki dan mengurangi ruang rumor.

Friksi Lokal
Gesekan sosial-politik yang muncul ketika proyek energi bertemu realitas ruang hidup, tata ruang, dan kepentingan komunitas. Friksi ini sering menjadi sumber resistensi dan penundaan proyek.

G

Ganti Rugi Lahan
Pembayaran atau kompensasi atas tanah yang digunakan untuk proyek. Ganti rugi sering menjadi sumber konflik ketika nilai dan prosedurnya dianggap tidak adil.

Gempa Kebijakan
Efek berantai ketika satu perubahan aturan memicu gangguan tak terduga pada aturan lain. Ia menciptakan ketidakpastian yang dapat menghambat proyek dan melemahkan kepercayaan.

Generasi Mendatang
Generasi mendatang merujuk pada pihak yang tidak hadir dalam negosiasi kebijakan hari ini tetapi akan menanggung

dampaknya. Istilah ini menandai bahwa kebijakan energi membawa konsekuensi lintas waktu.

Gerbang Epistemik
Gerbang epistemik merujuk pada penyaringan yang mengubah data menjadi indikator dan indikator menjadi argumen kebijakan. Pengaturan gerbang ini menentukan apakah kebijakan menormalkan ketidakadilan atau membuka imajinasi baru.

Governance Terlalu Kuat
Situasi ketika regulasi padat, prosedur terfragmentasi, dan standar teknis terlalu rinci sehingga membatasi inovasi sosial. Ia dapat membuat transformasi energi kehilangan daya demokratis.

Governance
Governance merujuk pada cara berbagai aktor mengatur dan mengelola keputusan bersama dalam energi berkelanjutan. Istilah ini dijelaskan sebagai "bagaimana keputusan diambil dan oleh siapa", bukan hanya daftar lembaga formal.

Greenwashing
Greenwashing merujuk pada upaya memoles citra hijau tanpa mengubah praktik mendasar. Istilah ini menandai situasi ketika simbol dan gestur keberlanjutan digunakan untuk membangun legitimasi, tetapi tidak disertai perubahan kebijakan yang nyata dan konsisten.

H

Hak atas Energi Bersih
Hak atas energi bersih merujuk pada gagasan bahwa akses energi tidak hanya soal listrik, tetapi juga soal kualitas dan keselamatan bagi kesehatan. Istilah ini menempatkan energi sejajar dengan kebutuhan dasar lain yang menopang kehidupan layak.

Hak Komunitas
Hak sosial-politik warga untuk didengar dan memengaruhi keputusan yang menyentuh ruang hidupnya. Hak komunitas adalah inti dari legitimasi sosial.

Hak-Hak Adat
Pengakuan terhadap klaim historis dan sosial masyarakat adat atas tanah dan sumber daya. Tanpa pengakuan, proyek hijau dapat menjadi bentuk perampasan baru.

Hambatan Investasi
Hambatan investasi merujuk pada kendala finansial dan struktural yang memperlambat transisi energi. Dalam riset, hambatan ini dipetakan sebagai bagian dari jaringan sebab-akibat yang memengaruhi kebijakan.

Harga Energi Tetap Terjangkau
Tuntutan politik agar tarif tidak melonjak dan tidak membebani rumah tangga. Ia menjadi sumber konflik utama dalam transisi energi.

Harga Karbon
Parameter yang dipakai untuk menilai biaya emisi dan mendorong pilihan teknologi tertentu. Ia bukan angka netral karena selalu memuat asumsi tentang ekonomi dan politik.

Harga Terjangkau
Ukuran yang menekankan kemampuan publik membayar energi tanpa tekanan berlebih. Ia dipakai untuk menilai kebijakan, tetapi dapat menutupi pertanyaan tentang siapa menanggung biaya tersembunyi.

Harmoni Keseluruhan Rezim Kebijakan
Kondisi ketika perubahan aturan dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Harmoni ini membuat transisi lebih tahan uji terhadap tekanan politik.

Harmonisasi Regulasi
Upaya menyelaraskan aturan yang tersebar agar tidak saling bertentangan. Ia tampak teknis, tetapi sesungguhnya adalah pertarungan tentang siapa mendefinisikan prioritas.

Hearing Publik
Forum dengar pendapat yang mempertemukan warga, pemerintah, dan pelaksana proyek. Hearing bisa menjadi ruang koreksi atau sekadar agenda yang sudah ditutup sebelumnya.

Hegemoni Pengetahuan
Hegemoni pengetahuan merujuk pada dominasi cara pandang tertentu yang membuat definisi masalah dan solusi kebijakan tampak alamiah dan tak terbantahkan. Istilah ini menandai bahwa kebijakan energi dapat dikuasai oleh paradigma tertentu sehingga alternatif lain dianggap tidak realistis atau tidak rasional.

Hirarki Pengetahuan
Hirarki pengetahuan merujuk pada pengurutan jenis pengetahuan menurut derajat keabsahan sebagai dasar keputusan. Istilah ini membentuk siapa dan apa yang boleh masuk ke meja kebijakan.

Hitung-Hitungan Kapasitas
Hitung-hitungan kapasitas merujuk pada pembicaraan yang menempatkan megawatt dan kilowatt jam sebagai pusat diskusi transisi. Istilah ini menandai cara kebijakan mengubah konflik sosial menjadi masalah administratif.

Horizon Imajinasi Kebijakan
Horizon imajinasi kebijakan merujuk pada batas kemungkinan yang dapat dibayangkan oleh pembuat kebijakan dan publik. Istilah ini menandai bahwa pengetahuan menentukan bukan hanya apa yang diketahui, tetapi juga apa yang dianggap mungkin.

Human Rights
Human rights merujuk pada gagasan hak yang menekankan kewajiban negara menjamin kebutuhan dasar. Dalam konteks energi, istilah ini menguatkan argumen bahwa akses energi terkait langsung dengan pemenuhan hak lain.

I

Ilusi Kepastian
Gaya komunikasi yang memaksa kesan bahwa semua sudah pasti dan aman meskipun banyak hal belum diketahui. Ilusi ini merusak legitimasi ketika dampak tak terduga muncul.

Imajinasi Alternatif
Kemungkinan kebijakan yang lebih peka terhadap keadilan sosial dan kebutuhan komunitas. Imajinasi ini menyempit ketika model menjadi bahasa tunggal.

Imajinasi Kebijakan
Ruang kemungkinan yang menentukan kebijakan seperti apa yang dianggap masuk akal. Ia bisa terkunci oleh indikator sempit atau terbuka oleh kritik epistemologis.

Imajinasi Normatif
Kemampuan merancang kebijakan berdasarkan komitmen nilai seperti keadilan dan keberlanjutan. Imajinasi ini mencegah institusi kuat berubah menjadi mesin konservatisme.

Imajinasi Teknologi
Imajinasi teknologi merujuk pada gambaran publik tentang panel surya, turbin angin, dan jaringan pintar sebagai simbol kemajuan energi. Istilah ini menandai bahwa fokus pada citra teknologi dapat menutupi persoalan kepemilikan, lahan, dan distribusi dampak.

Implikasi Normatif
Implikasi normatif merujuk pada konsekuensi nilai yang terkandung dalam pemilihan metode dan indikator. Setiap kerangka evaluasi membawa pilihan moral yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit.

Indeks Energi Hijau
Ukuran yang merangkum aspek emisi, bauran energi terbarukan, dan kebijakan iklim dalam satu skor agregat. Ia memberi gambaran ringkas tentang arah transisi, tetapi tidak selalu menangkap distribusi dampak sosialnya.

Indeks Performa Energi
Ukuran kuantitatif yang membandingkan kinerja sektor energi antarnegara atau antarwilayah berdasarkan serangkaian indikator. Indeks ini membentuk persepsi tentang siapa yang dianggap maju atau tertinggal dalam transisi energi.

Indikator Ekologis
Ukuran yang menilai dampak lingkungan secara substantif, bukan sekadar kepatuhan formal. Indikator ekologis mencegah transisi energi menjadi proyek pembangunan yang merusak.

Indikator Emisi
Ukuran agregat yang dipakai untuk menilai keberhasilan kebijakan iklim. Ia tidak selalu menangkap pengalaman lokal tentang ketidakadilan.

Indikator Hasil
Ukuran yang memeriksa apakah kebijakan menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Ia penting untuk membedakan pelaksanaan yang hanya administratif dengan pelaksanaan yang substantif.

Indikator Kapasitas Implementasi
Ukuran yang dipakai untuk menilai kemampuan institusi menjalankan kebijakan. Indikator dapat memperkuat keadilan atau justru mereproduksi ketimpangan.

Indikator Keadilan Sosial
Ukuran yang memeriksa siapa mendapat manfaat dan siapa menanggung risiko kebijakan. Indikator ini membuat reformasi kapasitas tidak hanya mengejar efisiensi birokratis.

Indikator Kinerja
Indikator kinerja merujuk pada ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan energi. Pemilihan indikator menentukan aspek mana yang terlihat dan mana yang terabaikan.

Indikator Komposit
Gabungan beberapa variabel yang diringkas menjadi satu angka untuk menilai kinerja kebijakan atau sektor tertentu. Ia menyederhanakan kompleksitas, tetapi sekaligus berpotensi menyembunyikan dimensi yang tidak mudah diukur.

Indikator Proses
Ukuran yang menilai kualitas koordinasi, kejelasan prosedur, dan kemampuan adaptasi birokrasi. Indikator ini lebih dekat pada realitas implementasi dibanding sekadar input.

Indikator Publik
Ukuran yang dipakai untuk dinilai oleh parlemen, media, dan masyarakat. Jika indikator publik terlalu sempit, kebijakan dinilai dari permukaan dan menjadi politik pencitraan.

Indikator Standar
Indikator standar merujuk pada indikator yang diadopsi lembaga internasional dan kementerian untuk menilai kinerja iklim dan energi. Indikator ini memudahkan perbandingan tetapi dapat memampatkan kompleksitas.

Indikator Struktural
Ukuran yang menilai keberadaan aturan, lembaga, dan sumber daya formal. Ia sering dipakai karena mudah dihitung, tetapi dapat menutupi kualitas pelaksanaan.

Indikator Tata Kelola
Ukuran prosedural seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas regulasi yang dijadikan bahasa perbandingan lintas negara. Ia dapat mereduksi kompleksitas menjadi skor numerik yang tampak netral.

Indikator Teknis
Ukuran yang tampak objektif untuk menilai kinerja energi dan kebijakan. Ia dapat mempersempit perdebatan menjadi angka, sekaligus menyingkirkan dimensi keadilan.

Infrastruktur Energi
Infrastruktur energi merujuk pada sistem fisik yang rentan terhadap tekanan iklim dan keputusan kebijakan. Istilah ini menandai bahwa kegagalan mengarahkan investasi dapat memindahkan biaya terutama kepada kelompok miskin dan daerah terpencil.

Inisiatif Kecil
Gerakan atau proyek lokal yang menolak logika ekspansi tanpa batas. Ia mempraktikkan solidaritas konkret dan mengutamakan kebutuhan riil.

Inovasi Hijau
Inovasi hijau merujuk pada pengembangan teknologi dan praktik baru yang diklaim lebih ramah lingkungan. Dalam riset, inovasi ini diposisikan bukan hanya sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai arena kompetisi ekonomi dan politik.

Inovasi Sosial
Bentuk perubahan yang lahir dari inisiatif warga, pemerintah kota, atau komunitas lokal. Inovasi ini dapat terkooptasi ketika hanya pemain besar yang mampu bertahan di arena regulasi.

Inovasi
Inovasi merujuk pada kemampuan pasar untuk melahirkan teknologi baru dan menurunkan biaya melalui kompetisi. Istilah ini diletakkan dalam ketegangan dengan pertanyaan etis karena inovasi tidak otomatis menjamin keadilan distribusi atau perlindungan ekologis.

Insentif Pajak
Insentif pajak merujuk pada dukungan fiskal yang diberikan untuk mendorong investasi dalam energi terbarukan. Istilah ini menandai bahwa insentif dapat menjadi instrumen distribusi kuasa ketika hanya dinikmati aktor yang sudah kuat.

Institusi Kertas
Lembaga yang tampak selaras dengan standar OECD, tetapi tidak mengubah cara keputusan diambil. Ia hidup sebagai simbol tanpa transformasi substantif.

Institusi Negara
Institusi negara merujuk pada perangkat kelembagaan yang mengatur akses energi, harga, dan kondisi layanan. Keputusan institusional menentukan apakah energi diperlakukan sebagai hak, jasa, atau komoditas.

Institusionalisasi Pengetahuan
Institusionalisasi pengetahuan merujuk pada proses ketika gagasan tertentu diadopsi menjadi standar resmi melalui regulasi, pedoman, atau kurikulum. Istilah ini menandai penguatan paradigma dominan dalam kebijakan energi.

Instrumen Derivatif
Instrumen derivatif merujuk pada perangkat keuangan yang mengelola risiko dan imbal hasil dalam transaksi energi. Istilah ini menandai semakin jauhnya energi dari pengalaman warga menuju logika investor.

Instrumen Pasar
Instrumen pasar merujuk pada perangkat kebijakan yang menggunakan mekanisme pasar untuk mengarahkan investasi dan perilaku. Instrumen ini mengikat pilihan normatif ke dalam formula teknis dan kontrak.

Integrated Assessment Models
Model yang menggabungkan variabel ekonomi, energi, dan iklim untuk menghitung jalur yang dianggap paling efisien. Asumsi di dalamnya memuat pilihan normatif yang memengaruhi arah kebijakan.

Intensitas Emisi
Intensitas emisi merujuk pada angka kunci yang dipakai untuk menilai kinerja emisi dalam kebijakan iklim dan energi. Angka ini dapat menjadi pusat penilaian meski tidak menangkap pengalaman sosial yang tidak terukur.

Intensitas Energi
Ukuran konsumsi energi relatif terhadap output ekonomi yang dipakai untuk evaluasi. Ia cenderung menyederhanakan konflik sosial dalam transisi.

Interaksi Kebijakan Energi
Keterkaitan kebijakan energi dengan aturan fiskal, lingkungan, dan sektor lain. Interaksi ini menentukan koherensi atau kontradiksi implementasi.

Intuitionistic Fuzzy Cognitive Map
Intuitionistic fuzzy cognitive map merujuk pada pendekatan analitis yang digunakan untuk memetakan hubungan sebab-akibat dalam tantangan transisi rendah karbon. Metode ini memperlihatkan bagaimana bukti diproduksi melalui model yang kompleks.

Isu Pendukung
Isu pendukung merujuk pada cara kritik ketidakadilan diposisikan sebagai pelengkap, bukan inti agenda perubahan. Istilah ini menandai strategi wacana yang menyingkirkan persoalan keadilan dari pusat kebijakan.

Izin Legal
Izin formal yang dikeluarkan negara untuk memungkinkan proyek berjalan. Ia dapat tetap ada ketika penerimaan komunitas melemah.

Izin Lingkungan
Persetujuan administratif yang menilai dampak ekologis dan syarat mitigasi proyek. Izin ini sering menjadi arena sengketa karena menyangkut bukti, risiko, dan kepentingan ekonomi.

J

Jalur Transisi
Rangkaian langkah yang dianggap perlu untuk mencapai sistem energi baru. Pemilihan jalur mencerminkan prioritas politik dan distribusi sumber daya.

Jaringan Kekuasaan dan Kepakaran
Jaringan kekuasaan dan kepakaran merujuk pada relasi antara pemerintah, lembaga internasional, akademisi, dan konsultan yang bersama-sama membentuk definisi masalah energi. Istilah ini menandai bahwa batas antara sains dan politik sering kali kabur dalam praktik kebijakan.

Jaringan Listrik
Infrastruktur yang menyalurkan energi dan menjadi titik rawan gangguan. Ketika diposisikan sebagai objek keamanan, jaringan listrik mendorong pendekatan yang menekankan kontrol dan pengamanan.

Jaringan Pintar
Jaringan pintar merujuk pada sistem kelistrikan yang digambarkan sebagai lebih efisien dan canggih dalam mendukung energi terbarukan. Istilah ini menandai bahwa teknologi dapat dipakai sebagai simbol modernitas yang menenangkan konflik.

Jaringan Sebab-Akibat
Jaringan sebab-akibat merujuk pada hubungan kompleks antarvariabel yang memengaruhi kebijakan energi. Istilah ini menandai cara model menyederhanakan realitas konflik dan ketidakpastian.

Jaringan Transnasional
Koneksi lintas negara yang memperkuat kritik dan solidaritas dalam isu iklim. Ia membantu menantang narasi resmi yang menyederhanakan konflik.

Jual Beli Regulasi
Praktik memanfaatkan kewenangan aturan untuk keuntungan sempit. Dampaknya adalah distorsi tujuan kebijakan dan melemahnya kepercayaan publik.

Just Energy Transition
Kerangka yang mengikat perluasan akses energi dengan pengurangan ketimpangan sosial. Ia menolak dikotomi antara perlindungan iklim dan pengurangan kemiskinan.

Just Transition
Just transition merujuk pada prinsip bahwa perpindahan dari ekonomi fosil menuju sistem rendah karbon harus disertai perlindungan bagi pekerja dan komunitas yang paling rentan. Istilah ini menekankan bahwa transisi energi adalah proses sosial yang menuntut keadilan, bukan sekadar substitusi teknologi.

K

Kalkulus Emisi
Cara berpikir yang mereduksi krisis iklim menjadi perhitungan angka. Ia dinilai tidak cukup karena mengabaikan ketidakadilan berlapis.

Kalkulus Kompleks
Kalkulus kompleks merujuk pada bentuk perhitungan yang menggabungkan risiko, ketidakpastian, dan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam model kebijakan. Istilah ini menandai bahwa angka dalam model bukan fakta netral, melainkan hasil pilihan nilai.

Kanal Digital Nasional
Saluran komunikasi dan koordinasi yang biasanya dikuasai kementerian dan lembaga pusat. Ketimpangan akses kanal ini dapat menciptakan komunikasi yang timpang antara pusat dan daerah.

Kanal Informasi
Saluran yang dipakai pemerintah atau perusahaan untuk menyebarkan informasi proyek. Kanal menentukan siapa yang terjangkau dan siapa yang tertinggal.

Kapasitas Administratif
Kekuatan organisasi negara dalam menjalankan prosedur dan pengawasan. Ia menjadi fondasi strategi bertahap di institusi rapuh.

Kapasitas Analitis Domestik
Kemampuan institusi dalam negeri untuk menghitung, menilai, dan merancang kebijakan berbasis data serta konteks lokal. Kelemahan kapasitas ini membuat adopsi rancangan eksternal terjadi hampir tanpa modifikasi.

Klausul Kontrak
Bagian perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, dan kondisi pelaksanaan kontrak. Detail klausul dapat menentukan pembagian risiko dan ruang perubahan kebijakan.

Kapasitas Birokrasi
Kemampuan aparatur menjalankan prosedur, mengawasi kepatuhan, dan memastikan kebijakan diterapkan. Tanpa kapasitas ini, regulasi hanya berhenti pada dokumen formal.

Kapasitas Implementasi
Kemampuan riil institusi dan aktor kebijakan untuk memastikan keputusan menjadi tindakan yang terjadi di lapangan. Ia mencakup kemampuan menembus birokrasi, mengelola konflik kepentingan, dan menjaga konsistensi pelaksanaan dalam waktu panjang.

Kapasitas Kelembagaan yang Lemah
Kondisi ketika institusi tidak sanggup menjalankan aturan secara konsisten dan tidak mampu mengelola konflik lapangan. Kelemahan ini membuat target energi terbarukan mudah berubah menjadi deklarasi.

Kapasitas Organisasi Akar Rumput
Kemampuan komunitas untuk terlibat dalam konsultasi dan pengawasan kebijakan. Tanpa kapasitas ini, partisipasi hanya bersifat simbolik.

Kapasitas Pengetahuan
Ekosistem data, riset, dan universitas yang menopang keputusan kebijakan. Kapasitas ini sulit ditiru karena dibentuk dalam waktu panjang.

Kapasitas Publik
Kapasitas publik merujuk pada kemampuan warga untuk memahami, mengkritik, dan memengaruhi kebijakan energi.

Istilah ini menandai bahwa bahasa teknis dan metafora tertentu dapat mengurangi daya kritis publik.

Keadaan Darurat
Situasi yang dipakai untuk mempercepat keputusan dan mengurangi ruang keberatan. Ia dapat mengubah kebijakan menjadi tindakan cepat yang minim koreksi.

Keadilan Antargenerasi
Keadilan antargenerasi merujuk pada prinsip bahwa generasi sekarang tidak boleh merampas hak generasi mendatang atas lingkungan yang layak. Istilah ini memperluas pembahasan energi ke ranah kewajiban lintas waktu.

Keadilan Distribusi
Keadilan distribusi merujuk pada pembagian manfaat dan beban kebijakan energi secara adil. Istilah ini menjadi ukuran ketika desain tarif dan subsidi menentukan siapa yang dibebani dan siapa yang dilindungi.

Keadilan Energi
Keadilan energi menekankan distribusi manfaat dan beban dalam sistem energi. Istilah ini menghubungkan transisi energi dengan ketimpangan sosial, wilayah, dan daya tawar politik.

Keadilan Iklim
Keadilan iklim merujuk pada kajian yang menempatkan distribusi dampak perubahan iklim dan beban transisi sebagai isu normatif. Fokus ini menggeser riset dari sekadar efisiensi teknologi menuju pertanyaan distribusi kuasa dan tanggung jawab.

Keadilan Prosedural
Keadilan prosedural merujuk pada keadilan dalam proses pembuatan kebijakan pelibatan publik, transparansi, dan ruang tawar. Istilah ini menandai pentingnya demokrasi dalam keberlanjutan energi.

Keadilan Sosial
Keadilan sosial merujuk pada pembagian manfaat dan beban kebijakan energi secara adil. Istilah ini menandai bahwa perubahan energi harus dinilai dari dampaknya terhadap kelompok rentan dan generasi mendatang.

Keadilan Spasial
Prinsip bahwa dampak dan manfaat kebijakan harus dibagi secara adil antarwilayah. Ia penting ketika proyek ditempatkan di wilayah tertentu untuk memenuhi target nasional.

Keadilan Struktural
Prinsip yang menuntut perubahan dalam struktur distribusi kekuasaan dan manfaat. Ia menempatkan keadilan sebagai tujuan normatif di atas sekadar kinerja teknis.

Keamanan Energi
Keamanan energi merujuk pada tujuan kebijakan yang menekankan kestabilan pasokan dan perlindungan terhadap gangguan sistem. Istilah ini dapat berbenturan dengan agenda keberlanjutan ketika dipakai untuk membenarkan ekspansi energi fosil.

Keamanan Nasional
Kerangka yang menghubungkan energi dengan perlindungan negara dari risiko dan gangguan. Ia cenderung memperluas kewenangan negara untuk menata sumber daya dan keputusan.

Keberlanjutan dan Keadilan
Komitmen normatif yang menempatkan perlindungan ekologis dan keadilan sosial sebagai poros transisi energi. Komitmen ini menentukan desain indikator dan arah reformasi kapasitas implementasi.

Keberlanjutan Finansial
Keberlanjutan finansial merujuk pada tuntutan agar pengelolaan layanan energi menutup biaya operasional,

investasi, dan risiko teknologi. Fokus ini dapat membuat akses dipersempit menjadi kemampuan membayar.

Keberlanjutan
Keberlanjutan merujuk pada tujuan etis yang tidak cukup dinilai dari percepatan kapasitas produksi bersih. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan juga berarti pembongkaran dan penataan ulang relasi negara, pasar, dan warga.

Keberpihakan
Keberpihakan merujuk pada posisi normatif dalam kebijakan yang mengakui bahwa keputusan publik selalu berdampak tidak merata. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan menuntut keberpihakan pada kelompok rentan dan generasi mendatang.

Kebijakan Energi Terbarukan
Rangkaian regulasi, insentif, target, dan tindakan yang ditujukan untuk mengganti energi fosil dengan energi bersih. Ia menuntut kerja lapangan yang kompleks, bukan sekadar rancangan regulasi.

Kebijakan Energi
Kebijakan energi merujuk pada arena di mana kekuasaan beroperasi melalui regulasi, standar, dan instrumen pasar. Istilah ini menandai bahwa energi bukan sekadar sektor teknis, melainkan medan di mana otoritas negara, kepentingan ekonomi, dan legitimasi publik saling berkelindan.

Kebijakan Iklim
Kebijakan iklim merujuk pada keputusan dan negosiasi yang mengatur respons terhadap perubahan iklim. Di dalamnya, pilihan tentang bukti utama sangat menentukan arah komitmen dan tindakan.

Kebijakan Industri
Arah dan insentif bagi sektor ekonomi yang terhubung dengan energi. Kebijakan ini menentukan distribusi manfaat ekonomi transisi.

Kebijakan Subsidi
Kebijakan subsidi merujuk pada dukungan negara untuk mempercepat investasi energi bersih melalui bantuan fiskal atau harga. Istilah ini menandai bahwa subsidi dapat memperkuat transisi, tetapi juga dapat jatuh pada perusahaan besar bila desainnya tidak adil.

Kedaulatan Energi
Gagasan tentang kemampuan menentukan arah energi tanpa ketergantungan yang melemahkan posisi. Ia menekankan kontrol, kapasitas, dan otoritas dalam pengambilan keputusan.

Kedaulatan Komunitas
Hak komunitas untuk mengendalikan wilayah, tanah, dan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Ia menjadi ukuran utama dalam perspektif keadilan iklim.

Kedaulatan
Kedaulatan merujuk pada kontrol atas sumber daya, teknologi, dan keputusan strategis dalam sistem energi. Istilah ini menandai klaim politik tentang siapa yang berhak menentukan arah pembangunan energi.

Kegagalan Koordinasi
Kondisi ketika lembaga tidak memiliki pembagian peran yang jelas atau tidak berbagi informasi. Kegagalan koordinasi membuat proyek berjalan tanpa kompas sosial.

Kejenuhan Sosial
Kondisi ketika warga tidak lagi percaya bahwa proses partisipasi memiliki makna. Kejenuhan sosial mengubah partisipasi menjadi beban.

Kekuasaan Epistemik
Kekuasaan epistemik merujuk pada kemampuan untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan sah dalam kebijakan energi. Istilah ini menandai bahwa model, indikator,

dan laporan ahli dapat mengatur siapa yang berhak berbicara dan siapa yang dianggap tidak kompeten.

Kekuasaan Koersif
Kekuasaan koersif merujuk pada bentuk kekuasaan yang bekerja melalui paksaan langsung, ancaman, atau sanksi. Istilah ini menandai bahwa negara masih memiliki kapasitas untuk memaksa dalam kebijakan energi, terutama ketika berhadapan dengan konflik lahan dan penolakan warga.

Kekuasaan Simbolik
Kekuasaan simbolik merujuk pada kekuasaan yang bekerja melalui bahasa, narasi, dan citra moral yang membungkus kebijakan. Istilah ini menandai bahwa simbol dapat membangun penerimaan publik meskipun substansi kebijakan tetap problematik.

Kekuasaan Struktural
Kekuasaan struktural merujuk pada kekuasaan yang bekerja melalui desain institusi, pasar, dan aturan main yang mengunci pilihan tertentu. Istilah ini menandai bahwa ketidakadilan dapat bertahan bahkan tanpa paksaan langsung, karena struktur sudah mengarahkan hasil.

Kelelahan Komunitas
Kondisi ketika warga lelah secara sosial dan emosional karena proses partisipasi panjang tanpa hasil substantif. Kelelahan membuat warga menarik diri atau berubah menjadi penolak.

Keleluasaan Pajak
Ruang kelonggaran perpajakan yang diberikan pada sektor tertentu. Keleluasaan ini memengaruhi distribusi beban dan insentif investasi.

Celah Teknis
Kelemahan dalam cara emisi dihitung dan diklaim sehingga target tampak tercapai di atas kertas. Celah ini memberi ruang bagi praktik manipulatif.

Kelompok Marginal
Kelompok yang suaranya sering tidak dihitung dalam desain kebijakan dan evaluasi indikator. Mereka biasanya paling rentan terhadap dampak sosial dan ekologis.

Kelompok Miskin
Kelompok miskin merujuk pada pihak yang paling mungkin menanggung biaya sosial dan ekonomi jika kebijakan energi gagal melindungi sistem dari risiko iklim. Istilah ini menandai dimensi keadilan antarwilayah dan antargenerasi dalam kebijakan energi.

Kelompok Rentan
Kelompok rentan merujuk pada warga atau komunitas yang paling mudah terdampak oleh perubahan harga, proyek, atau relokasi. Istilah ini menjadi pusat perdebatan ketika kebijakan mengklaim keberlanjutan tetapi menciptakan luka sosial.

Kemampuan Adaptif
Kemampuan institusi merespons ketidakpastian teknologi, dinamika pasar, dan resistensi sosial secara bersamaan. Kemampuan ini menjadi inti implementasi dalam transisi energi.

Kemampuan Administratif
Kemampuan formal menjalankan prosedur, menyusun dokumen, dan memenuhi standar birokrasi. Ia tidak otomatis sama dengan kemampuan membuat kebijakan benar-benar bekerja di lapangan.

Kemampuan Membayar
Kemampuan membayar merujuk pada asumsi bahwa akses energi bergantung pada daya beli pengguna. Asumsi ini dapat mengubah persoalan hak menjadi persoalan kontrak jasa.

Kemiskinan Energi
Kondisi ketika warga tidak mampu mengakses energi yang memadai untuk hidup layak. Ia menjadi fokus alternatif yang menolak ukuran keberhasilan berbasis investasi saja.

Kenaikan Muka Air Laut
Kenaikan muka air laut merujuk pada salah satu dampak iklim yang memperkuat urgensi transisi energi dan tata kelola yang adil. Istilah ini menandai bahwa risiko iklim tidak bersifat abstrak, melainkan nyata bagi wilayah tertentu.

Kepakaran Teknis
Kepakaran teknis merujuk pada otoritas profesional yang memiliki kemampuan membaca model, statistik, dan skenario energi. Istilah ini menandai bahwa kepakaran dapat memperkuat legitimasi, tetapi juga dapat mempersempit ruang deliberasi publik.

Kepastian Hukum
Keadaan ketika pelaku dapat memperkirakan stabilitas aturan dan konsekuensi legalnya. Kepastian hukum penting bagi investasi, tetapi dapat menjadi alat kekuasaan jika definisinya dikendalikan aktor kuat.

Kepastian Kebijakan
Keadaan ketika arah kebijakan dan aturan relatif stabil dalam jangka menengah. Kepastian ini dapat meningkatkan investasi, tetapi tidak selalu sejalan dengan keadilan sosial.

Kepastian Teknis
Kejelasan teknis yang mendukung realisasi proyek, bukan hanya kepastian angka tarif. Ia terkait dengan kesiapan prosedur dan sistem agar proyek tidak tertahan.

Kepemilikan Komunal
Model kepemilikan yang menempatkan kontrol infrastruktur pada komunitas. Ia memperkuat demokratisasi energi dan mengurangi dominasi aktor besar.

Kepentingan Elite
Kepentingan elite merujuk pada kepentingan kelompok kuat yang dapat mempengaruhi desain kebijakan. Istilah ini

menandai bahwa prioritas kebijakan dapat dibentuk oleh aktor yang tidak menanggung beban kebijakan.

Kepentingan Generasi Mendatang
Kepentingan generasi mendatang merujuk pada hak dan kebutuhan pihak yang belum lahir tetapi akan menanggung akibat kebijakan energi hari ini. Istilah ini dapat dikecilkan nilainya ketika tingkat diskonto tinggi.

Kepentingan Publik
Kepentingan publik merujuk pada klaim bahwa kebijakan dibuat demi kebaikan bersama. Istilah ini menjadi medan perebutan karena aktor yang berbeda dapat mengklaim kepentingan publik dengan isi yang bertentangan.

Kepentingan yang Tertanam
Kepentingan aktor lama yang diuntungkan oleh infrastruktur dan kebiasaan sistem energi fosil. Kepentingan ini dapat melawan reformasi kapasitas implementasi.

Kepentingan
Kepentingan merujuk pada orientasi aktor yang memengaruhi arah kebijakan energi, termasuk kepentingan ekonomi, politik, dan institusional. Istilah ini menandai bahwa kebijakan tidak pernah berdiri di ruang kosong, melainkan selalu berada dalam konfigurasi kekuasaan.

Keputusan Antara
Langkah-langkah kecil yang menentukan arah proyek sebelum keputusan final diumumkan. Keputusan antara sering luput dari pengawasan publik.

Keputusan Moral
Keputusan moral merujuk pada keputusan yang membawa konsekuensi etis terhadap kelompok yang berbeda. Istilah ini menandai bahwa kebijakan energi tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan benar-salah dan adil-tidak adil.

Keputusan Tarif
Penetapan struktur harga yang memengaruhi biaya hidup dan akses energi. Keputusan ini sering dipresentasikan teknis, tetapi berdampak distribusional.

Keputusan Teknis
Keputusan teknis merujuk pada pilihan angka atau parameter yang dipresentasikan seolah netral. Istilah ini menandai bahwa pilihan tingkat diskonto adalah keputusan teknis yang sesungguhnya sangat moral.

Kerangka Evaluasi
Kerangka evaluasi merujuk pada struktur penilaian yang mengatur bagaimana kebijakan dinilai berhasil atau gagal. Kerangka ini membentuk batas imajinasi kebijakan melalui pilihan indikator dan metode.

Kerangka Kekuasaan
Kerangka kekuasaan merujuk pada cara membaca kebijakan energi sebagai arena di mana keputusan, bahasa, dan instrumen bekerja untuk membentuk siapa yang berhak menentukan arah perubahan. Istilah ini menandai bahwa kekuasaan bukan sekadar paksaan, melainkan juga pembentukan norma dan batas kemungkinan.

Kerangka Partisipasi Bermakna
Kerangka partisipasi bermakna merujuk pada desain kebijakan yang memastikan keputusan tidak hanya ditentukan dari atas. Frasa ini menandai bahwa ketika negara membiarkan pasar menentukan lokasi proyek tanpa partisipasi bermakna, risiko sosial dipindahkan ke tingkat lokal.

Kerangka Teknokratis
Kerangka teknokratis merujuk pada cara berpikir yang menjadikan model dan indikator sebagai pusat legitimasi kebijakan. Kerangka ini cenderung menempatkan etika sebagai tambahan, bukan dasar.

Kerendahan Hati Epistemik
Sikap mengakui bahwa pengetahuan teknis tidak cukup untuk memahami realitas sosial. Ia menjadi syarat agar tata kelola tidak berubah menjadi dominasi model.

Kerentanan Komunitas
Kerentanan komunitas merujuk pada posisi komunitas yang mudah terdampak oleh proyek energi, relokasi, atau perubahan tata ruang. Istilah ini menandai bahwa transisi energi sering memindahkan beban ke tingkat lokal.

Kerugian Masa Depan
Kerugian masa depan merujuk pada beban sosial-ekologis yang tidak langsung terlihat hari ini, tetapi diwariskan kepada generasi mendatang. Istilah ini dapat dibuat tidak signifikan dalam kebijakan jika tingkat diskonto tinggi.

Kerugian yang Terukur
Kerugian yang dapat dihitung dan dikaitkan langsung dengan proyek, seperti hilangnya lahan atau penurunan hasil panen. Kerugian ini sering menjadi dasar kompensasi.

Keruntuhan Kepercayaan Publik
Kondisi ketika warga tidak lagi percaya pada motif dan efektivitas kebijakan. Keadaan ini melemahkan legitimasi transisi energi.

Kerusakan Laten
Kerusakan laten merujuk pada dampak yang tidak segera tampak tetapi ditanggung terutama oleh kelompok rentan dan generasi yang belum lahir. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan adalah persoalan etika waktu, bukan hanya persoalan administrasi kebijakan.

Kesejahteraan Publik
Kesejahteraan publik dijelaskan sebagai konsep yang kerap didefinisikan sebagai penjumlahan kepuasan individu dalam

arus liberal dan utilitarian. Subbab ini memakai istilah tersebut untuk menunjukkan asumsi agregatif yang bisa mengaburkan persoalan siapa yang menanggung beban kebijakan.

Kesenjangan Analitis
Ketimpangan kemampuan analisis akibat keterbatasan staf, data historis, atau waktu. Kondisi ini membuat paket solusi siap pakai lebih mudah diadopsi.

Kepastian Harga
Jaminan bahwa harga beli listrik telah diketahui sebelum investasi dilakukan. Kepastian ini menurunkan ketidakpastian arus kas dan memperkuat sinyal bagi pembiayaan.

Kesenjangan Retorika
Jarak antara klaim kebijakan yang progresif dan hambatan regulasi yang nyata. Kesenjangan ini memperlemah legitimasi.

Ketahanan (*Resilience*)
Gagasan yang menekankan kemampuan bertahan dan menyesuaikan diri ketika terjadi guncangan. Ia dapat menggeser fokus dari pencegahan masalah ke tuntutan beradaptasi.

Ketahanan Energi
Ketahanan energi merujuk pada kemampuan sistem untuk menyerap guncangan dan tetap berfungsi dalam kondisi tidak menentu. Istilah ini menandai fokus pada stabilitas pasokan dan adaptasi, tetapi dapat bergeser menjadi tuntutan agar kelompok rentan menanggung beban penyesuaian.

Keterbatasan Fiskal
Kondisi ketika negara atau komunitas tidak punya kapasitas anggaran memadai untuk adaptasi. Ia membuat beban iklim semakin timpang.

Keterbukaan Risiko
Kesediaan institusi menjelaskan risiko proyek secara jujur, termasuk ketidakpastian. Keterbukaan risiko lebih membangun kepercayaan daripada klaim aman yang mutlak.

Keterbukaan tentang Ketidakpastian
Sikap institusi yang mengakui bahwa sebagian aspek proyek masih dikaji dan dapat berubah. Keterbukaan ini lebih kredibel daripada ilusi kepastian.

Keterlambatan Informasi
Situasi ketika warga baru mengetahui proyek setelah keputusan utama dibuat. Keterlambatan ini memperbesar kecurigaan dan memicu konflik.

Keterlambatan Proyek
Penundaan yang muncul akibat konflik, ketidakpastian, atau sengketa. Keterlambatan sering menjadi gejala dari celah institusional yang lebih dalam.

Ketidakpastian Ilmiah
Ketidakpastian terkait dampak ekologis jangka panjang, perubahan pola angin atau air, dan dampak kumulatif kesehatan. Mengelola ketidakpastian ini menuntut komunikasi etis, bukan penutupan informasi.

Ketidakpastian Proyek
Kondisi ketika warga tidak mengetahui kapan proyek dimulai, bagaimana dampaknya, dan siapa yang harus dihubungi. Ketidakpastian ini meningkatkan rumor dan konflik.

Ketidakpastian Regulasi
Situasi ketika pelaku tidak dapat memprediksi arah kebijakan, skema tarif, atau insentif. Ketidakpastian menurunkan investasi dan memperkuat dominasi aktor besar yang lebih tahan risiko.

.

Ketidaksetaraan Prosedural
Kondisi ketika prosedur tampak sama bagi semua, tetapi hanya sebagian aktor yang mampu memanfaatkannya. Ketidaksetaraan prosedural membuat demokrasi tampak ada, tetapi timpang.

Ketimpangan Akses
Ketimpangan akses merujuk pada ketidaksetaraan dalam kemampuan menikmati manfaat energi bersih dan kebijakan transisi. Istilah ini menandai bahwa perubahan teknologi tidak otomatis memperluas akses bagi semua.

Ketimpangan Daya Tawar
Perbedaan kemampuan bernegosiasi antara komunitas dan aktor modal. Ketimpangan ini sering menjadi akar ketidakadilan dalam transisi energi.

Ketimpangan Sosial
Ketimpangan sosial merujuk pada ketidaksetaraan yang dapat diperkuat oleh kebijakan transisi. Istilah ini menandai bahwa solusi teknologi tidak otomatis menghasilkan keadilan.

Ketimpangan Spasial
Perbedaan dampak dan manfaat antarwilayah yang muncul dari lokasi proyek dan jaringan infrastruktur. Ketimpangan ini membuat wilayah tertentu menjadi korban permanen transisi.

Ketimpangan
Ketimpangan merujuk pada distribusi manfaat dan beban yang tidak seimbang dalam kebijakan energi. Istilah ini menandai bahwa transisi energi dapat memperkuat ketimpangan apabila kebijakan hanya mengikuti logika efisiensi.

Kewajiban Investasi
Tuntutan untuk menempatkan pembiayaan sebagai syarat utama keberlanjutan kebijakan energi. Ia membentuk tekanan

untuk menyediakan kepastian bagi modal, sekaligus memunculkan persoalan pembagian beban.

Kewajiban Konsultasi Publik
Prosedur partisipasi yang dirancang agar publik dapat menyampaikan keberatan. Prosedur ini dapat berubah menjadi formalitas jika kapasitas akar rumput lemah.

Kewajiban Negara–Pasar
Kewajiban negara–pasar merujuk pada relasi normatif antara negara dan mekanisme pasar dalam mengatur energi berkelanjutan. Frasa ini menandai tanggung jawab moral dan politik dalam mendistribusikan risiko, akses, dan perlindungan sosial.

Kewajiban Retrofit Bangunan
Kewajiban pembaruan infrastruktur rumah atau gedung untuk memenuhi standar energi. Ia dapat menjadi beban ekonomi bagi kelompok rentan.

Kewenangan Penetapan Tarif
Otoritas institusional yang berhak menentukan besaran tarif dalam skema kebijakan. Pergeserannya dapat mengubah distribusi kuasa antara pusat, regulator, dan daerah.

Klaim Keberlanjutan
Narasi bahwa proyek energi membawa manfaat ekologis dan masa depan yang lebih bersih. Klaim ini diuji oleh pengalaman warga terhadap proses dan distribusi dampak.

Klaim Moral
Klaim moral merujuk pada alasan normatif yang dipakai untuk membenarkan pilihan kebijakan. Istilah ini menandai bahwa aktor kebijakan selalu membawa pembenaran nilai, bukan sekadar data.

Koalisi Kepentingan Industri Fosil
Aliansi aktor yang diuntungkan oleh keberlanjutan aset fosil. Mereka dapat memakai bahasa net-zero untuk tampak sejalan tanpa mengubah struktur dominasi.

Koalisi Lama dan Baru
Koalisi lama dan baru merujuk pada pertemuan aktor lama dari rezim energi fosil dengan aktor baru dari sektor energi bersih. Istilah ini menandai bahwa perubahan energi sering berlangsung sebagai negosiasi ulang kekuasaan, bukan pergantian total yang otomatis lebih adil.

Koherensi antar Aturan
Kesesuaian antara aturan dari berbagai sektor yang saling beririsan dalam satu proyek energi. Koherensi menentukan apakah kebijakan berjalan mulus atau justru saling membatalkan.

Koherensi Lintas Sektor
Keterpaduan kebijakan antara energi, keuangan, lingkungan, dan industri. Koherensi menentukan apakah transisi energi mempercepat transformasi atau kembali ke pola tinggi karbon saat krisis.

Komite Ahli
Komite ahli merujuk pada forum resmi yang dibentuk untuk memberi legitimasi ilmiah terhadap arah kebijakan energi. Istilah ini menandai bahwa pemilihan anggota komite dan kerangka kerja yang digunakan sudah mengandung pilihan normatif tertentu.

Kompetitivitas Ekonomi
Orientasi kebijakan untuk menjaga basis industri, investasi, dan daya saing. Ia sering berkonflik dengan target penurunan emisi yang cepat.

Kompromi Metodologis
Keputusan untuk menerima keterbatasan tertentu dalam pengukuran demi menjaga konsistensi dan komparabilitas data. Kompromi ini menandai batas antara ketelitian teknis dan kompleksitas realitas sosial.

Komunitas Lokal
Komunitas lokal merujuk pada pihak yang dapat menjadi penonton atau bahkan korban proyek energi terbarukan ketika kebijakan tidak didesain dengan keadilan sosial. Istilah ini menandai bahwa transisi energi menyentuh ruang hidup, hak, dan partisipasi.

Komunitas Lokal
Warga dan kelompok sosial yang berada di wilayah proyek energi dan mengalami dampak langsung. Komunitas menjadi penentu legitimasi karena mereka menanggung risiko sosial dan ekologis.

Konferensi Para Pihak
Konferensi Para Pihak merujuk pada forum perundingan iklim internasional yang berkembang menjadi acara berskala besar. Skala forum ini dapat memunculkan persaingan ruang keterlibatan bagi aktor non-negara.

Konfigurasi Kekuasaan
Konfigurasi kekuasaan merujuk pada susunan relasi kuasa yang memengaruhi desain dan implementasi kebijakan energi. Riset mutakhir menempatkan konfigurasi ini sebagai bagian integral dari analisis transisi.

Konflik Institusional
Ketegangan antar lembaga yang muncul dari tumpang tindih kewenangan dan target. Konflik institusional memperbesar celah akuntabilitas dan memperpanjang proses.

Konflik Keadilan
Konflik keadilan merujuk pada pertentangan tentang distribusi manfaat dan beban dalam perubahan energi. Istilah ini menandai bahwa transisi energi adalah arena politis yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan angka.

Konflik Kebijakan
Konflik kebijakan merujuk pada pertentangan yang muncul ketika tujuan, aktor, dan klaim legitimasi saling berhadapan. Istilah ini menegaskan bahwa kebijakan energi adalah arena pertarungan, bukan jalur lurus.

Konflik Legitimasi
Pertentangan tentang apakah proyek dianggap sah dan adil oleh komunitas. Konflik ini sering lebih menentukan daripada persoalan teknis proyek.

Konflik Lokal
Ketegangan antara proyek energi dan komunitas terdampak di tingkat wilayah. Konflik ini jarang tercermin dalam skor indeks, meskipun sangat menentukan legitimasi kebijakan.

Konflik Nilai
Konflik nilai merujuk pada pertentangan antara tujuan-tujuan yang sama-sama dianggap sah dalam kebijakan energi. Istilah ini menandai bahwa kebijakan tidak pernah hanya soal pilihan teknis, melainkan juga pertarungan moral.

Konflik Pusat–Daerah
Pertentangan kepentingan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik ini sering memperlambat proyek dan mengaburkan akuntabilitas.

Konflik Sosial
Konflik sosial merujuk pada pertentangan yang muncul ketika kebijakan energi dianggap tidak adil atau tidak transparan.

Istilah ini menandai bahwa kebijakan energi adalah arena politik yang dapat memunculkan resistensi.

Konflik Tata Ruang
Pertentangan yang muncul ketika proyek energi dan target transisi menuntut ruang fisik. Ia sering terkait dengan perizinan dan negosiasi ulang dengan komunitas lokal.

Konsekuensi Ekologis
Dampak terhadap ekosistem lokal, air, tanah, dan biodiversitas. Konsekuensi ini sering dipindahkan sebagai biaya yang tidak tercatat dalam narasi transisi.

Konsekuensi Etis
Konsekuensi etis merujuk pada dampak moral dari cara energi didefinisikan dalam kebijakan. Perbedaan definisi dapat menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang dibiarkan menanggung beban.

Konsekuensi Politik
Konsekuensi politik merujuk pada dampak kekuasaan dari cara energi didefinisikan, termasuk siapa yang berhak mengakses, dengan harga berapa, dan dalam kondisi seperti apa. Perdebatan ini menentukan arah keputusan publik, bukan sekadar pilihan teknis.

Konsekuensi Sosial
Dampak pada relasi komunitas, pekerjaan, dan rasa aman akibat proyek energi. Konsekuensi ini sering muncul dalam jangka panjang dan sulit diukur oleh indikator teknis.

Konsep Ambang Institusional
Gagasan bahwa kebijakan baru menghasilkan dampak ketika kapasitas minimum kelembagaan tercapai. Ia menandai perbedaan antara kebijakan simbolik dan kebijakan yang benar-benar efektif.

Konsep Kekuasaan
Konsep kekuasaan merujuk pada cara memahami kebijakan energi bukan sebagai rangkaian keputusan netral, melainkan sebagai praktik yang membentuk perilaku, pengetahuan, dan batas kemungkinan tindakan. Istilah ini menandai bahwa kekuasaan bekerja melalui aturan, prosedur, dan bahasa yang tampak rasional tetapi menentukan siapa yang dapat berbicara dan siapa yang harus menyesuaikan diri.

Konsep *Social Licence to Operate*
Gagasan tentang penerimaan komunitas yang dapat diberikan atau ditarik seiring perubahan praktik dan persepsi. Konsep ini menekankan bahwa keberlanjutan proyek tidak cukup ditopang oleh izin legal.

Konservatisme Struktural
Kecenderungan sistem institusi yang kuat untuk mereplikasi struktur kekuasaan yang sudah ada. Ia bekerja halus, sering tidak terlihat dalam evaluasi resmi.

Konsistensi Bingkai Kebijakan
Keselarasan cara memahami tujuan, instrumen, dan tanggung jawab antar lembaga. Tanpa konsistensi bingkai, konsistensi angka tidak cukup untuk memperkuat implementasi.

Konsistensi Pesan
Keselarasan informasi yang disampaikan antar lembaga dan antar level pemerintahan. Pesan yang tidak konsisten memperbesar rumor dan konflik.

Konstruksi Epistemik
Cara pengetahuan disusun sehingga sebuah target tampak objektif dan tak terbantahkan. Ia mengikat disiplin ilmu, angka, dan klaim otoritas ke dalam satu kerangka yang dianggap sah.

Konstruksi Fakta
Konstruksi fakta merujuk pada proses pembentukan fakta melalui seleksi data dan metode tertentu. Istilah ini menegaskan bahwa fakta kebijakan merupakan hasil proses, bukan realitas mentah.

Konsultasi Berulang
Proses partisipasi yang diulang berkali-kali tanpa koreksi keputusan utama. Ia dapat menjadi strategi penundaan dan pelemahan daya warga.

Konsultasi Eksternal

Keterlibatan pihak di luar institusi negara dalam penyusunan rancangan kebijakan dan regulasi. Ia dapat mempercepat penyusunan aturan, tetapi juga menggeser pusat pengetahuan dari aktor lokal.

Kontrak Jangka Panjang
Perjanjian dengan rentang waktu panjang yang menjamin pembelian listrik pada ketentuan tertentu. Ia menciptakan stabilitas pendapatan bagi produsen, sekaligus membatasi fleksibilitas penyesuaian.

Konsultasi Publik
Konsultasi publik merujuk pada proses pelibatan warga dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan mereka. Istilah ini menandai hubungan antara keberlanjutan energi dan demokrasi kebijakan, terutama ketika konsultasi dilakukan hanya sebagai formalitas setelah keputusan strategis ditetapkan.

Konsultasi Simbolik
Konsultasi simbolik merujuk pada pelibatan yang bersifat formal tetapi tidak memengaruhi keputusan substansial. Praktik ini muncul ketika ruang partisipasi dipersempit sementara negosiasi utama berlangsung tertutup.

Konteks Krisis Iklim
Konteks krisis iklim merujuk pada situasi ketika klaim negara dan pasar harus diuji secara normatif, bukan hanya diterima sebagai asumsi. Frasa ini menandai bahwa agenda energi berkelanjutan mengandung pertanyaan keadilan tentang risiko, manfaat, dan kerusakan yang tidak segera tampak.

Kontestasi Wacana
Pertarungan makna mengenai bagaimana istilah transisi dipahami dan digunakan. Kontestasi ini menentukan siapa yang diuntungkan oleh definisi dominan.

Kontrak Baru
Kontrak baru merujuk pada tuntutan normatif agar negara tidak melepaskan perannya sebagai penjaga keadilan, dan pasar tidak beroperasi seolah keberlanjutan hanya segmen produk. Frasa ini menandai perlunya penataan ulang relasi negara–pasar–warga.

Kontrak Politik

Kesepakatan kebijakan yang memutuskan batas pengalihan risiko dari pasar ke publik. Ia menentukan siapa yang dilindungi oleh kepastian dan siapa yang menanggung konsekuensi tarif.

Kredibilitas Negara
Tingkat kepercayaan bahwa pemerintah akan menghormati aturan dan komitmen kebijakan dalam jangka panjang. Ketika kredibilitas rendah, biaya pembiayaan cenderung meningkat karena premi risiko.

Kontribusi terhadap Kerusakan
Kontribusi terhadap kerusakan merujuk pada dasar normatif untuk menilai siapa seharusnya memikul tanggung jawab lebih besar. Istilah ini menandai bahwa tanggung jawab keberlanjutan tidak boleh dibagi seolah semua pihak memiliki kontribusi yang sama.

Kontrol atas Sumber Daya, Teknologi, dan Data
Klaim penguasaan yang menempatkan energi sebagai urusan kepemilikan dan kendali. Ia menunjukkan bahwa perangkat teknis dan informasi diperlakukan sebagai basis kekuasaan.

Kontrol Keputusan
Kemampuan menentukan keputusan akhir meskipun proses partisipasi berjalan. Kontrol keputusan yang terkunci membuat deliberasi menjadi ritual.

Kontrol Warga
Kemampuan warga untuk ikut menentukan arah dan tata kelola energi. Ia menjadi prasyarat transisi yang demokratis dan adil.

Kooperasi Energi Warga
Bentuk organisasi energi yang dimiliki dan dikelola warga. Tujuannya memperkuat kontrol komunitas atas infrastruktur dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan besar.

Koordinasi Lintas Lembaga
Keselarasan kerja antar kementerian, regulator, dan unit pelaksana. Koordinasi yang lemah memproduksi celah akuntabilitas dan celah informasi.

Koordinasi Lintas-Level
Koordinasi antara pusat, provinsi, dan lokal agar kebijakan tidak terfragmentasi. Ia menentukan konsistensi pesan, kejelasan tanggung jawab, dan kepercayaan warga.

Koperasi Desa
Bentuk organisasi ekonomi berbasis komunitas yang dapat menjadi pelaku energi bersih skala lokal. Koperasi bergantung pada stabilitas aturan karena modal dan kapasitasnya terbatas.

Koreksi Keputusan
Kemampuan proses partisipasi untuk mengubah rencana proyek ketika risiko dan ketidakadilan teridentifikasi. Tanpa koreksi keputusan, partisipasi kehilangan legitimasi.

Korupsi Politik
Bentuk penyimpangan yang terkait patronase dan transaksi regulasi dalam proses kebijakan. Ia menggeser orientasi kebijakan dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok tertentu.

Kredibilitas Informasi
Derajat kepercayaan publik terhadap data yang disampaikan pelaksana proyek. Kredibilitas bergantung pada keterbukaan dan konsistensi.

Kriteria Hijau
Standar yang menentukan apa yang dianggap ramah lingkungan dan layak didukung. Tanpa partisipasi, kriteria hijau bisa bias terhadap investor dan aktor kuat.

Kritik Etis
Kritik etis merujuk pada evaluasi yang menilai kebijakan dan riset dari perspektif keadilan dan martabat manusia. Kritik ini menjadi penting ketika riset teknis mendominasi ruang diskusi.

Kualitas Institusi Tinggi
Kondisi ketika lembaga memiliki kapasitas kuat, kerangka hukum stabil, dan prosedur formal yang rapi. Kualitas ini tidak otomatis menjamin keadilan distribusional dan demokrasi substantif.

Kualitas Koordinasi Lintas-Level
Mutu hubungan kerja antar level pemerintahan dalam mengelola proyek dan konflik lapangan. Kualitas ini menentukan apakah kebijakan menjadi kerja kolektif atau saling menyalahkan.

Kualitas Proses
Dimensi yang menilai sejauh mana prosedur kebijakan bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel. Ia sering kali kurang terlihat dalam indeks yang lebih menekankan hasil kuantitatif.

L

Labirin Regulasi
Kondisi ketika aturan dan prosedur saling berlapis sehingga melelahkan semua pihak. Labirin ini mengubah kekuatan institusional menjadi beban.

Laju Adopsi Teknologi Rendah Karbon
Kecepatan penggunaan teknologi yang menurunkan emisi dalam sistem energi. Laju ini bergantung pada kombinasi institusi dan insentif.

Laju Difusi Teknologi
Asumsi tentang seberapa cepat teknologi menyebar dan menjadi dominan. Ia memengaruhi skenario kebijakan dan sering mengaburkan hambatan sosial-politik.

Laju Penetrasi Teknologi
Laju penetrasi teknologi merujuk pada asumsi tentang seberapa cepat teknologi menyebar dalam sistem energi. Asumsi ini memengaruhi skenario yang dianggap mungkin dan dapat diterima.

Lapisan Regulasi
Penambahan aturan baru yang tidak disertai pengurangan aturan lama. Ia memperbesar biaya kepatuhan dan memperkuat rasa lelah birokratis.

Laporan Teknis
Laporan teknis merujuk pada format bukti yang sering diprioritaskan dalam tata kelola iklim. Ketika format ini menjadi syarat utama, bentuk pengetahuan lain mudah tersisih.

Layanan Dasar
Layanan dasar merujuk pada layanan yang menopang pemenuhan kebutuhan hidup seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak. Akses energi ditempatkan sebagai bagian dari layanan dasar ketika dipahami sebagai prasyarat menikmati hak lain.

Least-Cost Pathway
Jalur kebijakan yang dianggap paling murah secara keseluruhan jika dihitung selama beberapa dekade. Ia bergantung pada asumsi yang dapat mengubah definisi murah dan mahal.

Ledakan Riset Energi Berkelanjutan
Ledakan riset energi berkelanjutan merujuk pada peningkatan tajam publikasi dan kajian dalam dua dekade terakhir yang tidak lagi sekadar akumulasi artikel, tetapi menjadi gejala filosofis. Istilah ini menandai perubahan cara dunia mendefinisikan masalah dan solusi dalam energi rendah karbon.

Legalitas Formal
Keabsahan proyek berdasarkan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Legalitas formal tidak selalu sejalan dengan dukungan sosial yang dinamis.

Legitimasi Demokratis
Legitimasi demokratis merujuk pada klaim negara bahwa ia memiliki mandat publik untuk mengambil keputusan strategis tentang masa depan. Istilah ini menandai perbedaan antara kewenangan politik yang dipilih dan kekuasaan pasar yang bekerja melalui modal serta laba.

Legitimasi Ilmiah
Legitimasi ilmiah merujuk pada pengakuan bahwa kebijakan didasarkan pada bukti dan analisis akademik. Istilah ini menandai bahwa sains dapat menjadi sumber otoritas, tetapi juga dapat dipakai untuk membatasi kritik.

Legitimasi Kebijakan
Legitimasi kebijakan merujuk pada alasan mengapa suatu kebijakan diterima sebagai sah dan pantas dipatuhi, termasuk ketika kebijakan tersebut merugikan sebagian pihak. Istilah ini menekankan bahwa penerimaan kebijakan tidak hanya bergantung pada legalitas, tetapi juga pada rasa keadilan, kepercayaan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat.

Legitimasi Kebijakan
Legitimasi kebijakan merujuk pada penerimaan sosial terhadap kebijakan sebagai sah dan adil. Istilah ini menandai bahwa kekuasaan dalam kebijakan energi harus dibenarkan melalui proses, substansi, dan simbol yang dapat dipertanggungjawabkan.

Legitimasi Prosedural
Legitimasi yang dibangun dari kepatuhan terhadap langkah formal dan dokumen. Ia berbeda dari legitimasi substantif yang bergantung pada rasa adil.

Legitimasi Publik
Legitimasi publik merujuk pada penerimaan masyarakat terhadap kebijakan energi sebagai adil dan layak. Legitimasi ini bergantung pada distribusi beban, keterbukaan proses, dan perlindungan kelompok rentan.

Legitimasi Sosial
Legitimasi sosial merujuk pada penerimaan publik terhadap kebijakan sebagai adil dan layak. Istilah ini menandai bahwa

keberlanjutan tidak hanya diuji melalui angka emisi, tetapi melalui pengalaman warga yang terdampak.

Legitimasi Sosial
Penerimaan publik terhadap proyek berdasarkan rasa keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap komunitas. Legitimasi sosial menentukan stabilitas kebijakan jangka panjang.

Legitimasi Substantif
Legitimasi yang lahir dari pengalaman warga bahwa proses dan hasil kebijakan adil. Ia tidak dapat digantikan oleh dokumen atau rapat formal.

Legitimasi
Legitimasi merujuk pada penerimaan sosial terhadap kebijakan sebagai sesuatu yang sah dan adil. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan tidak dapat dipaksakan hanya melalui target, tetapi harus dibangun melalui proses dan substansi.

Lembaga Fiskal
Institusi yang mengatur anggaran, utang, dan pembiayaan program negara. Perannya menentukan ruang dukungan bagi transisi energi.

Lembaga Independen
Institusi yang diposisikan untuk mengatur kebijakan teknis di luar siklus politik jangka pendek. Perannya dapat menggeser debat publik ke ruang yang lebih sempit.

Lobi Industri
Tekanan dan pengaruh pelaku usaha terhadap perumusan regulasi. Lobi dapat menggeser orientasi kebijakan dari kepentingan publik.

Logika *business as Usual*
Logika *business as usual* merujuk pada kelanjutan pola lama yang hanya diberi baju hijau tanpa membongkar fondasi politik-

ekonomi. Istilah ini menandai risiko ketika transisi hanya menjadi perubahan kosmetik.

Logika Ekspansi Tanpa Batas
Cara berpikir yang menganggap pertumbuhan energi dan konsumsi harus terus meningkat. Alternatif seperti degrowth dan sufficiency menolak asumsi ini.

Logika Emansipatoris
Orientasi prosedur yang tidak sekadar formal, tetapi benar-benar membuka akses warga untuk mengawasi dan memengaruhi kebijakan. Ia menuntut data yang mudah dipahami dan saluran yang efektif.

Logika Laba
Logika laba merujuk pada orientasi keputusan yang bertumpu pada keuntungan ekonomi dalam horizon sempit pelaku pasar. Istilah ini menandai risiko ketika keputusan strategis energi didelegasikan terlalu jauh, sehingga distribusi kuasa dapat bergeser tanpa kontrol demokratis.

Logika Pasar
Logika pasar merujuk pada orientasi kebijakan yang menempatkan kompetisi, laba, dan insentif sebagai penggerak utama transisi energi. Istilah ini menandai bahwa pasar tidak otomatis menghasilkan keadilan, karena hasilnya bergantung pada distribusi modal dan posisi tawar.

Logika Pemerintahan
Logika pemerintahan merujuk pada cara negara membenarkan dan menjalankan kebijakan melalui aturan, prosedur, dan instrumen. Istilah ini menandai bahwa kebijakan energi bekerja sebagai bentuk kuasa yang membentuk perilaku populasi dan pasar.

M

Makna Transisi
Makna transisi merujuk pada isi konseptual yang diisi ulang oleh aktor sesuai kepentingan masing-masing. Istilah ini menandai bahwa bahasa kebijakan adalah arena kekuasaan yang menentukan arah perubahan.

Mandat Demokratis
Mandat demokratis merujuk pada dasar normatif negara untuk mengatur kepentingan jangka panjang melalui hukum. Istilah ini menandai bahwa bila negara terlalu mendelegasikan keputusan strategis kepada logika laba, struktur kekuasaan energi dapat didikte oleh aktor tanpa mandat publik.

Mandat Institusional
Batas kewenangan formal yang menentukan ruang gerak lembaga dalam proyek energi. Mandat yang sempit membuat lembaga mudah menghindari tanggung jawab substantif.

Manfaat Bersih
Manfaat bersih muncul sebagai ukuran yang dipakai untuk menyebut kebijakan baik ketika hasil agregatnya positif. Subbab ini menempatkan manfaat bersih sebagai indikator yang tampak sederhana, tetapi bisa menutupi pertanyaan etis tentang distribusi beban dan perlindungan pihak rentan.

Manfaat Jangka Panjang
Manfaat yang diposisikan sebagai keuntungan berkelanjutan bagi komunitas, bukan sekadar respons sesaat. Manfaat ini sering diperdebatkan ketika warga menilai janji tidak diwujudkan secara konsisten.

Mantra Baru Tata Kelola Iklim
Cara net-zero dipresentasikan sebagai formula sederhana dan mudah dikomunikasikan. Ia membuat kompleksitas etis dan politis terselubung di balik angka.

Marginalisasi Pertanyaan Etis
Marginalisasi pertanyaan etis merujuk pada tersingkirnya pembahasan nilai, martabat, dan tanggung jawab dalam arus utama riset energi. Istilah ini menandai bahwa etika sering diposisikan sebagai isu pendukung, bukan inti.

Martabat Manusia
Martabat manusia merujuk pada posisi moral setiap orang yang tidak dapat dinegosiasikan melalui kompensasi finansial. Istilah ini menjadi dasar untuk menilai relokasi paksa, kehilangan identitas budaya, dan rusaknya ruang hidup sebagai kerugian yang melampaui angka.

Masa Transisi
Rentang waktu penyesuaian yang memberi ruang bagi pelaku untuk mengubah rencana investasi dan model bisnis. Tanpa masa transisi, kebijakan berubah menjadi kejutan yang menghukum aktor berkapasitas lemah.

Mata Uang Simbolik
Cara net-zero berfungsi sebagai simbol yang memberi status kepemimpinan dalam negosiasi internasional. Ia bisa menutupi ketidaksinkronan kebijakan domestik.

Medan Kontestasi Wacana
Medan kontestasi wacana merujuk pada ruang perebutan makna istilah transisi oleh kementerian, lembaga internasional, perusahaan energi, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil. Istilah ini menandai bahwa makna transisi tidak tunggal, tetapi diperebutkan.

Meja Diplomasi
Ruang negosiasi tempat target iklim diterjemahkan menjadi komitmen antarnegara. Di sini, angka bukan hanya hasil sains, tetapi juga hasil tawar-menawar politik.

Mekanisme Akuntabilitas
Cara melacak tanggung jawab, keputusan, dan penggunaan kewenangan dalam kebijakan. Ia mengurangi risiko penangkapan kebijakan oleh kepentingan tertentu.

Mekanisme Degression
Skema penurunan tarif otomatis seiring turunnya biaya teknologi. Ia membantu menghindari pembayaran berlebih ketika biaya teknologi turun cepat.

Mekanisme Grid Connection
Aturan dan prosedur penyambungan proyek pembangkit ke jaringan listrik. Ketidakjelasannya dapat membuat proyek yang sudah memiliki kontrak tarif tidak bisa beroperasi tepat waktu.

Mekanisme Hibah
Pendanaan publik yang tidak menambah beban utang bagi komunitas terdampak. Ia dipandang lebih sesuai dengan prinsip keadilan iklim.

Mekanisme Keluhan
Saluran formal untuk menyampaikan keberatan dan mendapatkan respons. Tanpa mekanisme keluhan yang efektif, konflik cenderung berubah menjadi protes.

Mekanisme Koreksi
Sistem untuk memperbaiki jalur ketika realisasi kebijakan menyimpang dari rencana. Ia penting agar skenario tidak menjadi dogma yang tak dapat digugat.

Mekanisme Partisipatif
Proses yang membuka ruang bagi publik dan aktor non-negara untuk terlibat dalam peninjauan regulasi. Mekanisme ini mencegah perubahan aturan hanya mencerminkan kepentingan aktor kuat.

Mekanisme Pembelajaran
Prosedur yang memungkinkan kebijakan dikoreksi berdasarkan pengalaman dan evaluasi substantif. Ia mencegah regulasi menjadi teks yang hanya bisa ditambah.

Mekanisme Pengaduan yang Efektif
Saluran yang memungkinkan warga menyampaikan keberatan dan mendapatkan respons nyata. Mekanisme ini penting untuk mencegah konflik menjadi resistensi permanen.

Mekanisme Pengaduan
Saluran formal bagi warga untuk menyampaikan keberatan dan meminta tanggapan. Mekanisme ini menentukan apakah konflik bisa dikelola atau meledak menjadi protes.

Mekanisme Penyesuaian
Pengaturan untuk meninjau dan mengubah tarif secara berkala atau berdasarkan kondisi tertentu. Tanpa desain yang cermat, ia dapat memindahkan beban biaya ke konsumen atau anggaran negara.

Mekanisme Persetujuan
Prosedur formal untuk memperoleh izin sosial dan legal sebelum proyek berjalan. Mekanisme ini menentukan apakah legitimasi dibangun atau sekadar diadministrasikan.

Mekanisme Perubahan Regulasi
Prosedur formal dan informal yang menentukan bagaimana aturan dapat diubah. Penguasaan mekanisme ini berarti penguasaan atas keberhasilan atau kegagalan transisi energi.

Mendesain Ulang Partisipasi
Upaya mengubah prosedur partisipasi agar tidak lagi menjadi ritual administratif. Ia menuntut koreksi struktur kekuasaan yang membuat warga selalu terlambat.

Menentukan Prioritas
Menentukan prioritas merujuk pada tindakan memilih tujuan mana yang didahulukan ketika berbagai tujuan tidak bisa dipenuhi sekaligus. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan selalu mengandung keputusan tentang siapa yang diutamakan.

Mengarah Ulang Insentif
Proses mengubah insentif agar sejalan dengan energi berkelanjutan, bukan dengan struktur fosil. Ia menuntut kekuasaan politik, bukan sekadar kapasitas administratif.

Mengelola Konflik Kepentingan
Kemampuan institusi menghadapi resistensi dari aktor yang merasa terancam oleh dekarbonisasi. Tanpa kemampuan ini, prosedur rutin justru menguatkan struktur lama.

Mengontrol Narasi
Kemampuan menentukan cara publik memahami pelaksanaan kebijakan dan siapa yang dianggap bertindak. Kontrol narasi dapat menghasilkan legitimasi meskipun pelaksanaan di lapangan tidak setara.

Mengukur Kapasitas Implementasi
Tindakan politis yang menentukan bagaimana kekuasaan dipahami dan dipertanggungjawabkan. Penilaian ini menentukan akses pendanaan, kepercayaan publik, dan legitimasi institusi.

Mesin Reproduksi Ketidakadilan
Situasi ketika penguatan kapasitas justru mengamankan kepentingan aktor kuat dan memperlemah kelompok rentan. Ia

terjadi ketika alat ukur dan reformasi tidak berbasis komitmen etis.

Metafora Penenang
Metafora penenang merujuk pada penggunaan bahasa yang membuat perubahan tampak mulus dan tidak konflik. Istilah ini menandai bagaimana istilah transisi dapat bekerja sebagai selimut yang menutupi ketimpangan.

Metafora Politik
Cara berbahasa yang membuat isu energi tampak seperti soal pertahanan, kedaulatan, atau ketahanan. Ia mengarahkan perhatian pada siapa yang harus dilindungi dan siapa yang diprioritaskan.

Metafora
Metafora merujuk pada perangkat bahasa yang menyederhanakan realitas kompleks menjadi gambaran yang mudah diterima publik. Istilah ini menandai bagaimana kata-kata seperti "jembatan", "lompatan", atau "jalan menuju" dapat menenangkan konflik dan mengaburkan ketimpangan yang menyertai perubahan energi.

Model Bisnis
Cara aktor sektor energi memperoleh pendapatan, menanggung biaya, dan mengelola risiko. Perubahannya sering memicu penyesuaian tata kelola dan desain instrumen.

Model Ekonomi Makro
Model ekonomi makro merujuk pada model yang memetakan hubungan ekonomi skala besar untuk menilai kebijakan. Ketika diposisikan sebagai bukti utama, kebijakan lain dapat tersisih karena tidak sesuai format model.

Model Iklim
Model iklim merujuk pada perangkat pemodelan yang menghasilkan proyeksi dan skenario untuk kebijakan iklim.

Penggunaannya dapat memperkuat klaim objektivitas sekaligus membatasi bentuk bukti yang diakui.

Model Kebijakan
Model kebijakan merujuk pada representasi analitis yang menyederhanakan kompleksitas realitas menjadi variabel dan hubungan terukur. Model ini berfungsi sebagai kerangka yang membatasi cara masalah dipahami dan solusi dirancang.

Model Matematis
Model matematis merujuk pada model yang menggunakan formulasi matematis untuk menghasilkan proyeksi dan rekomendasi. Dominasi format ini dapat mempersempit spektrum solusi yang dianggap mungkin.

Model Partisipasi
Kerangka yang membedakan tingkat keterlibatan publik dalam proses kebijakan dan proyek. Model ini menentukan apakah warga hanya diberi informasi atau benar-benar ikut memutuskan.

Model pemerintahan
Model pemerintahan merujuk pada cara negara menjalankan kewenangannya dalam pembagian tanggung jawab keberlanjutan. Istilah ini menandai bahwa negara tidak boleh bersembunyi di balik retorika keterbatasan fiskal ketika menyusun regulasi strategis.

Model Pengetahuan yang Hierarkis
Pola yang menempatkan data teknis sebagai lebih sah daripada pengalaman warga. Pola ini memperlemah legitimasi dan mengurangi sensitivitas kebijakan terhadap kondisi lapangan.

Model Tunggal
Anggapan bahwa ada satu desain institusi yang dapat diimpor sebagai jalan pasti menuju efektivitas. Anggapan ini menutup konteks konstitusi dan sejarah konflik domestik.

Mosaik Institusional
Campuran undang-undang baru dan aturan lama yang saling menumpuk. Mosaik ini sering menghasilkan ketidaksinkronan implementasi.

Multi-Level Governance
Multi-level governance merujuk pada konfigurasi tata kelola yang melibatkan tingkat lokal, nasional, dan global secara bersamaan. Istilah ini menandai bahwa konflik dan legitimasi kebijakan tidak berhenti pada satu tingkat pemerintahan.

Mutu Tata Kelola
Kualitas praktik pengambilan keputusan yang mencakup konsistensi aturan, integritas pelaksana, dan kemampuan mengelola kepentingan. Mutu ini menentukan daya tahan kebijakan terhadap pembajakan dan konflik.

N

Narasi Historis
Narasi historis merujuk pada bentuk pengetahuan yang membawa konteks sejarah dalam memahami masalah energi dan iklim. Pengakuan terhadap narasi historis dapat memperluas opsi kebijakan.

Narasi Ini Memikat
Bentuk pembingkaian yang membuat suatu desain kebijakan tampak menarik dan sulit ditolak. Ia dapat menutupi pertanyaan tentang siapa yang menanggung beban jangka panjang.

Narasi Komunitas
Narasi komunitas merujuk pada cerita pengalaman kelompok terdampak tentang kehilangan ruang hidup dan perubahan sosial. Narasi ini sering diperlakukan berbeda bobotnya dibanding model dan indikator.

Narasi Makro
Narasi resmi yang menonjolkan kontribusi proyek terhadap target iklim dan penurunan emisi. Narasi ini sering berhadapan dengan penilaian warga yang berangkat dari pengalaman konkret.

Narasi Resmi
Cerita institusional yang mengklaim siapa pelaksana utama kebijakan dan siapa yang hanya pendukung. Narasi ini sering menghapus peran aktor lokal atau komunitas yang justru menentukan keberhasilan implementasi.

Narasi Teknokratis
Cara menjelaskan perubahan energi melalui bahasa skenario, jalur, dan perencanaan teknis. Narasi ini menekankan keahlian dan perhitungan, sering kali mereduksi konflik sosial menjadi persoalan manajemen.

Narasi
Narasi merujuk pada cerita besar yang menyatukan berbagai kebijakan ke dalam alur yang tampak koheren dan masuk akal. Istilah ini menandai bagaimana kebijakan energi dapat dibingkai sebagai keniscayaan sejarah, kebutuhan nasional, atau kewajiban moral, sehingga mengurangi ruang untuk mempertanyakan distribusi kuasa.

Negara Rentan Iklim
Negara rentan iklim merujuk pada negara yang menghadapi ancaman serius dari kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan tekanan terhadap infrastruktur energi. Istilah ini menandai urgensi pembagian tanggung jawab keberlanjutan yang lebih adil.

Negara
Negara merujuk pada aktor yang membawa klaim representasi publik dan legitimasi demokratis dalam mengatur arah

kebijakan energi berkelanjutan. Istilah ini juga menandai kapasitas negara untuk memaksa, mengikat diri melalui hukum, dan menjamin kepentingan jangka panjang yang tidak selalu sejalan dengan logika laba.

Negative Emissions Technologies
Teknologi yang diklaim dapat menyedot CO_2 di masa depan untuk mengimbangi emisi sekarang. Dalam logika politik, ia dapat menjadi pembenaran untuk menunda aksi hari ini.

Negosiasi antar-Rezim Regulasi
Proses tawar-menawar antara kerangka aturan berbeda ketika kebijakan dijalankan. Negosiasi ini membentuk kompromi dan hasil akhir implementasi.

Negosiasi Internasional
Negosiasi internasional merujuk pada perundingan yang menjadikan angka dan definisi sebagai dasar kesepakatan. Ketika angka menjadi dasar negosiasi, metode pencatatan ikut menentukan hasil politik.

Negosiasi Kompensasi
Proses tawar-menawar tentang ganti rugi dan manfaat lokal. Negosiasi ini mudah timpang ketika celah informasi dan representasi tidak ditutup.

Negosiasi Tertutup
Negosiasi tertutup merujuk pada proses pengambilan keputusan antara negara dan pelaku pasar yang tidak dapat diakses publik. Proses ini menguat ketika energi didefinisikan murni sebagai komoditas.

Negosiasi Ulang Mandat Institusional
Proses menata kembali batas kewenangan dan tanggung jawab lembaga ketika konflik meningkat. Negosiasi ulang ini muncul ketika praktik implementasi dipersoalkan secara politik oleh warga.

Negosiasi Ulang
Proses mengubah desain proyek atau kebijakan setelah konflik muncul. Negosiasi ulang menunjukkan bahwa legitimasi tidak bisa dipaksakan melalui target.

Netralitas
Netralitas merujuk pada klaim bahwa kebijakan dapat dibuat tanpa nilai, tanpa kepentingan, dan tanpa keberpihakan. Istilah ini dipersoalkan karena keberlanjutan selalu memuat pilihan moral tentang siapa yang dilindungi dan siapa yang menanggung beban.

Net-Zero
Target yang membayangkan kondisi ketika emisi yang dilepaskan harus diseimbangkan dengan emisi yang diserap kembali. Ia berfungsi bukan hanya sebagai konsep teknis, tetapi juga sebagai horizon moral dan politis.

Nilai Martabat
Nilai martabat digunakan untuk menunjuk jenis nilai yang tidak boleh dinegosiasikan. Istilah ini dipakai sebagai penanda batas, bahwa ada dimensi kebijakan yang tidak layak dipadatkan menjadi kalkulasi uang.

Nilai Masa Depan
Nilai masa depan merujuk pada nilai manfaat atau kerugian yang terjadi pada waktu yang belum terjadi, tetapi dipertimbangkan dalam keputusan kebijakan hari ini. Istilah ini menjadi pusat persoalan ketika masa depan diperkecil melalui tingkat diskonto.

Nilai Masa Kini
Nilai masa kini merujuk pada nilai yang diposisikan lebih tinggi dalam kalkulasi kebijakan dibanding nilai masa depan. Istilah ini menandai bias struktural dalam perhitungan yang dapat menguntungkan generasi sekarang.

Nilai Non-Pasar
Nilai non-pasar merujuk pada nilai seperti kesehatan, budaya, dan keutuhan ekologi yang tidak selalu masuk dalam analisis biaya. Ketika nilai ini diabaikan, keputusan tampak rasional tetapi menyempit secara etis.

Nilai Publik
Nilai publik dibahas sebagai hal-hal yang dianggap penting untuk dipertahankan bersama, termasuk ketika tidak menguntungkan secara finansial. Dalam subbab ini, nilai publik diposisikan berhadapan dengan kecenderungan mereduksi kepentingan kolektif menjadi angka rupiah semata.

Nilai Tukar
Nilai tukar merujuk pada nilai yang dapat dinegosiasikan melalui transaksi atau kompensasi. Istilah ini menandai cara pikir yang memperlakukan persoalan publik sebagai komoditas.

Non-Market Values
Non-market values merujuk pada nilai yang tidak memiliki harga pasar langsung, tetapi tetap nyata dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekologis. Istilah ini mencakup kehilangan yang tidak dapat diganti dengan uang, seperti rusaknya situs budaya atau terputusnya relasi komunitas dengan lanskap.

Normalisasi Data
Proses menyetarakan skala berbagai variabel agar dapat digabungkan dalam satu indeks. Teknik ini tampak teknis, tetapi memengaruhi interpretasi akhir tentang kinerja suatu negara atau sektor.

O

Objek Sosialisasi
Objek sosialisasi merujuk pada posisi warga yang hanya diperlakukan sebagai penerima kampanye, bukan sebagai

subjek politik. Istilah ini menandai bahwa partisipasi sering direduksi menjadi penyampaian informasi satu arah.

Oligarki Energi
Oligarki energi merujuk pada konsentrasi kekuasaan dan kendali sektor energi pada kelompok kecil yang memiliki modal dan jaringan politik. Istilah ini menandai bahwa transisi dapat mempertahankan dominasi lama dalam bentuk baru.

Optimasi Sistem
Optimasi sistem merujuk pada upaya memaksimalkan efisiensi sistem energi melalui perhitungan dan model. Fokus optimasi sering mengabaikan pertanyaan tentang distribusi manfaat dan beban.

Organisasi Masyarakat Sipil
Organisasi masyarakat sipil merujuk pada aktor yang berada dalam ruang *governance* bersama pemerintah, perusahaan, dan komunitas. Istilah ini menandai bahwa tata kelola energi tidak hanya ditentukan oleh lembaga negara dan pasar.

Orientasi Jangka Pendek
Orientasi jangka pendek merujuk pada kecenderungan kebijakan atau investasi yang mengutamakan keuntungan segera. Istilah ini dikritik sebagai salah satu penghalang transformasi jangka panjang.

Otoritas Ilmiah
Otoritas ilmiah merujuk pada legitimasi yang melekat pada sains dan kepakaran dalam proses kebijakan. Istilah ini menandai bahwa kebijakan sering mengandalkan klaim ilmiah untuk menutup perdebatan nilai.

Otoritas Indikator
Otoritas indikator merujuk pada kuasa yang melekat pada angka dan skor dalam menentukan arah kebijakan. Angka tersebut

sering diperlakukan sebagai fakta objektif, padahal lahir dari pilihan metodologis.

Otoritas Kebijakan
Otoritas kebijakan merujuk pada kuasa untuk menetapkan aturan dan mengarahkan keputusan publik. Istilah ini menjadi sumber konflik ketika publik merasa otoritas hanya berada di tangan elite.

Otoritas Pengetahuan
Otoritas pengetahuan merujuk pada posisi aktor atau lembaga yang diakui berhak menentukan apa yang dianggap sah sebagai fakta dan risiko. Ledakan riset menggeser pusat gravitasi otoritas ini ke jaringan lembaga riset dan konsorsium data.

Over-governance
Gejala penumpukan aturan, prosedur, dan standar setiap kali muncul krisis atau kritik. Ia menimbulkan kebuntuan kebijakan karena setiap perubahan harus melewati kepatuhan yang kompleks.

P

Panel Pengambilan Keputusan
Panel pengambilan keputusan merujuk pada ruang penilaian kebijakan yang sering bergantung pada indikator dan model. Di dalamnya, hal yang tidak mudah terukur dapat menjadi tidak terlihat.

Paradigma Dominan
Paradigma dominan merujuk pada kerangka berpikir yang mengarahkan bagaimana masalah energi didefinisikan dan solusi dirancang. Istilah ini menandai bahwa alternatif yang berada di luar paradigma sering dianggap tidak realistis atau tidak ilmiah.

Parameter Teknis
Parameter teknis merujuk pada angka atau asumsi yang ditetapkan dalam model sebagai dasar perhitungan kebijakan. Penetapan parameter ini memuat pilihan normatif yang tersembunyi.

Paris Agreement
Paris Agreement merujuk pada kesepakatan global yang menjadi titik lonjakan perhatian riset energi berkelanjutan. Istilah ini menandai hubungan antara agenda internasional dan orientasi penelitian akademik.

Partisipasi Bermakna
Partisipasi bermakna merujuk pada keterlibatan warga yang benar-benar memengaruhi keputusan, bukan sekadar formalitas. Istilah ini menandai bahwa legitimasi kebijakan bergantung pada ruang tawar yang nyata.

Partisipasi Bermakna
Partisipasi bermakna merujuk pada keterlibatan yang benar-benar memberi kesempatan mempengaruhi jalannya perundingan. Tanpa itu, kehadiran dapat berubah menjadi latar simbolik.

Partisipasi Demokratis
Partisipasi demokratis merujuk pada keterlibatan warga dalam menentukan arah kebijakan energi. Pengakuan energi sebagai hak menuntut pelebaran ruang partisipasi ini.

Partisipasi Formal
Keterlibatan warga yang dicatat sebagai prosedur, tetapi tidak selalu berpengaruh pada substansi. Partisipasi formal sering menghasilkan frustrasi dan sinisme sosial.

Partisipasi Publik
Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan warga dalam proses kebijakan, baik melalui konsultasi, forum, maupun deliberasi. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan membutuhkan ruang demokratis, bukan hanya ruang ahli.

Pasar Karbon
Pasar karbon merujuk pada mekanisme perdagangan yang mengaitkan emisi dengan nilai ekonomi. Dalam konteks energi, mekanisme ini menjadi bagian dari komodifikasi dan kalkulasi finansial.

Pasar Sukarela
Ruang transaksi yang menjanjikan pembiayaan proyek iklim tanpa regulasi ketat. Ia dapat menciptakan kepemilikan baru atas udara, tanah, dan hutan.

Pasar
Pasar merujuk pada arena yang membawa klaim efisiensi, inovasi, dan fleksibilitas alokasi sumber daya dalam transisi energi. Istilah ini sekaligus menandai logika untung-rugi yang tidak otomatis sejalan dengan keadilan distribusi maupun perlindungan ekologis.

Patronase Politik
Pola pertukaran dukungan dan keuntungan antara elite dan jaringan pendukungnya. Patronase membentuk arah distribusi sumber daya dalam kebijakan energi.

Pecundang Transisi
Kelompok yang kehilangan pekerjaan, identitas ekonomi, atau basis fiskal lokal akibat transformasi energi. Mereka sering menjadi pusat resistensi politik.

Peer-to-Peer Energy Trading
Peer-to-peer energy trading adalah model bisnis yang memungkinkan warga saling menjual listrik antar rumah. Ia menantang desain regulasi lama yang mengandaikan transaksi hanya melalui perusahaan besar.

Pekerjaan Filosofis
Kerja reflektif yang menuntut pertanyaan tentang tujuan, nilai, dan struktur kekuasaan yang ingin ditantang. Ia menegaskan bahwa kapasitas implementasi tidak pernah murni teknis.

Pelaku Usaha Kecil
Aktor ekonomi dengan kapasitas modal dan daya tawar terbatas dalam proyek energi bersih. Mereka sangat rentan terhadap perubahan regulasi yang tidak dapat diprediksi.

Pembaca Awam
Pembaca awam merujuk pada publik yang tidak berada dalam komunitas teknokratis, tetapi menjadi pihak yang terdampak kebijakan. Istilah ini menandai pentingnya transparansi agar publik memahami bahwa angka kebijakan adalah hasil keputusan politik.

Pembagian Kekuasaan
Pengaturan agar keputusan tidak terkunci pada satu kelompok ahli atau lembaga. Pembagian ini diperlukan untuk menjaga ruang demokrasi.

Pembiayaan Hibah Publik
Pendekatan pendanaan yang mengutamakan hak dan kebutuhan komunitas, bukan laba. Ia diposisikan sebagai alternatif terhadap instrumen pasar yang timpang.

Pembiayaan
Pembiayaan merujuk pada keterlibatan negara dan pasar dalam mendukung pembangunan energi terbarukan. Istilah ini menandai bahwa pertanyaan etis yang muncul bukan hanya "siapa membayar", tetapi juga "siapa memutuskan" dan "siapa menanggung akibatnya".

Pembingkaian Ambisi
Proses membentuk kesan bahwa target tertentu sudah cukup ambisius. Pembingkaian ini memengaruhi legitimasi negara dan korporasi di ruang publik.

Pembingkaian Teknis
Pembingkaian teknis merujuk pada cara isu energi dan iklim didefinisikan sebagai masalah teknologi semata. Istilah ini menandai pengurangan ruang debat moral.

Pemerintah Daerah
Aktor yang berada paling dekat dengan warga dan dampak proyek. Pemerintah daerah sering menanggung beban konflik, meskipun kewenangannya terbatas.

Pemerintah Pusat
Aktor yang menetapkan target dan kerangka regulasi nasional. Ia sering mengendalikan narasi keberhasilan, tetapi tidak selalu menanggung dampak sosial.

Pemodelan Teknis
Penggunaan model ekonomi dan skenario iklim sebagai bahasa utama kebijakan. Ia dapat menggeser pengalaman warga ke posisi sekunder.

Pemutusan Karena Tunggakan
Pemutusan karena tunggakan merujuk pada penghentian layanan akibat keterlambatan pembayaran dalam kerangka kontrak jasa. Konsekuensinya, akses dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dicabut, bukan hak dasar.

Penanggung Jawab
Aktor atau institusi yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak proyek. Ketidakjelasan penanggung jawab memperbesar rasa tidak adil.

Penarikan Lisensi Sosial
Perubahan sikap komunitas dari toleransi menuju penolakan ketika rasa adil dianggap runtuh. Penarikan ini dapat muncul meski prosedur formal tetap berjalan.

Penawaran Tarif Terendah
Pilihan tarif paling rendah dalam proses seleksi berbasis kompetisi. Ia cenderung menguntungkan aktor dengan biaya modal murah dan kapasitas negosiasi kuat.

Pendistribusian Ulang Hak
Proses ketika aturan teknis menentukan siapa yang boleh menentukan masa depan sistem energi. Ia terjadi melalui prosedur, mandat, dan bahasa teknis.

Penetrasi Energi Terbarukan
Tingkat masuknya energi terbarukan dalam sistem energi suatu negara. Ia sering dijadikan indikator keberhasilan transisi.

Pengabaian Etika
Pengabaian etika merujuk pada situasi ketika nilai, martabat, dan keadilan tidak dianggap sebagai bagian utama analisis. Istilah ini menandai kelemahan mendasar dalam riset energi berkelanjutan.

Pengakuan Sosial
Pengakuan bahwa warga terdampak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sah. Tanpa pengakuan sosial, partisipasi berubah menjadi teknik pengendalian.

Pengalaman Komunitas Terdampak
Pengalaman komunitas terdampak merujuk pada pengetahuan yang muncul dari hidup bersama dampak proyek dan kebijakan. Pengetahuan ini sering didorong ke pinggir ketika standar bukti dipersempit.

Pengalaman Mikro
Pengalaman konkret warga terkait tanah, air, dan ruang hidup yang terdampak proyek. Pengalaman mikro menjadi dasar penilaian apakah proyek memperbaiki atau memperburuk kondisi sehari-hari.

Pengalaman Warga
Pengetahuan sosial tentang bagaimana proyek memengaruhi kehidupan sehari-hari. Pengalaman warga sering tidak diakui sebagai data yang sah dalam prosedur teknokratis.

Pengambilan Keputusan Berbasis Model
Pengambilan keputusan berbasis model merujuk pada praktik menjadikan hasil simulasi dan proyeksi sebagai dasar kebijakan. Praktik ini menunjukkan bagaimana model dapat memandu pilihan politik.

Pengambilan Keputusan Multikriteria
Pengambilan keputusan multikriteria merujuk pada proses evaluasi kebijakan dengan membandingkan berbagai indikator sekaligus. Istilah ini menandai upaya merumuskan kompleksitas menjadi skor dan peringkat.

Pengambilan Keputusan
Proses memilih desain proyek, lokasi, dan syarat pelaksanaan. Ia menjadi inti pertarungan antara prosedur formal dan legitimasi substantif.

Pengawasan Parlemen
Fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan pemerintah. Lemahnya pengawasan membuka ruang penyimpangan.

Pengelolaan Konflik
Proses menangani ketegangan sosial melalui komunikasi, negosiasi, dan koreksi kebijakan. Pengelolaan konflik menuntut institusi belajar, bukan sekadar menenangkan.

Pengelolaan Risiko
Proses memonitor, mengantisipasi, dan menangani risiko proyek energi bersama warga. Ia menuntut transparansi dan mekanisme pengaduan yang efektif.

Pengelolaan
Pengelolaan merujuk pada praktik menjalankan proyek energi terbarukan yang melibatkan negara dan pasar. Istilah ini menandai bahwa pengelolaan bukan tindakan teknis netral,

karena ia selalu memuat pilihan tentang distribusi risiko dan manfaat.

Pengetahuan Ahli
Pengetahuan ahli merujuk pada otoritas epistemik yang sering dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan energi. Istilah ini menandai bahwa keahlian teknis dapat memperkuat legitimasi, tetapi juga dapat membatasi partisipasi publik ketika diposisikan sebagai satu-satunya sumber kebenaran.

Pengetahuan Dominan
Pengetahuan dominan merujuk pada bentuk pengetahuan yang diakui sah dan menjadi dasar utama kebijakan. Istilah ini menandai bahwa pengetahuan teknis dapat mendominasi ruang publik dan menggeser pertanyaan etis.

Pengetahuan Energi Berkelanjutan
Pengetahuan energi berkelanjutan merujuk pada kumpulan kajian, model, peta jalan, dan studi kelayakan yang membentuk cara masa depan energi dibayangkan. Istilah ini menandai bahwa pengetahuan tidak lahir di ruang hampa, melainkan ditenun dalam jaringan kekuasaan, institusi, dan kepakaran yang menentukan apa yang dianggap rasional dan layak didanai.

Pengetahuan Etis
Pengetahuan etis merujuk pada pengetahuan yang menempatkan nilai, martabat, dan tanggung jawab sebagai pusat. Istilah ini menuntut agar riset energi tidak hanya menjadi kalkulasi teknis.

Pengetahuan Lokal
Informasi dan pengalaman warga tentang ekologi, ruang, dan dampak sosial. Pengetahuan lokal sering lebih akurat untuk konteks tertentu dibanding model umum.

Pengetahuan Teknis
Pengetahuan teknis merujuk pada model, indikator, dan perangkat analitis yang sering dipakai untuk mengunci arah kebijakan sebagai pilihan rasional. Istilah ini menandai bahwa pengetahuan teknis dapat menjadi alat legitimasi sekaligus alat eksklusi.

Penghapusan Utang
Langkah politik-ekonomi yang mengurangi beban struktural negara rentan. Ia diposisikan sebagai bagian dari redistribusi kapasitas adaptasi.

Pengukuran Dampak
Pengukuran dampak merujuk pada proses menilai efek kebijakan melalui indikator tertentu. Pengukuran ini menentukan aspek mana yang dianggap signifikan dalam evaluasi.

Penjumlahan Kepuasan
Penjumlahan kepuasan muncul sebagai cara pandang yang menilai kebijakan baik jika memaksimalkan total manfaat bersih. Istilah ini dipakai untuk mengkritik kecenderungan menyamakan kebaikan publik dengan akumulasi kepuasan, tanpa memastikan batas moral dan keadilan.

Penolakan di Tingkat Lokal
Penolakan yang muncul di wilayah terdampak meski proyek dianggap baik pada tingkat kebijakan dan dokumen. Penolakan ini sering berkaitan dengan jurang antara narasi makro dan pengalaman mikro.

Penundaan Emisi Radikal
Strategi yang menempatkan pengurangan besar pada masa depan sementara emisi jangka pendek tetap tinggi. Ia membentuk ruang kompromi antara tekanan iklim dan kepentingan industri.

Penundaan Tindakan
Strategi yang menempatkan pengurangan emisi radikal ke dekade mendatang. Ia memberi ruang bagi emisi jangka pendek tetap tinggi sambil mengandalkan janji masa depan.

Penyesuaian Tarif
Perubahan besaran tarif untuk menyesuaikan kondisi teknologi, fiskal, atau sosial. Ia menjadi titik sensitif karena menyentuh kepentingan investor, utilitas, dan konsumen.

Peran Negara
Peran negara merujuk pada kapasitas negara untuk menetapkan aturan, memaksa kepatuhan, dan menjamin kepentingan jangka panjang. Istilah ini menandai bahwa negara tidak dapat sepenuhnya menyerahkan transisi energi kepada pasar tanpa risiko ketimpangan.

Peran Pasar
Peran pasar merujuk pada klaim pasar sebagai sumber efisiensi, inovasi, dan fleksibilitas dalam alokasi sumber daya. Istilah ini menandai bahwa peran pasar dapat mempercepat transisi, tetapi juga dapat memperdalam ketimpangan bila tidak dikendalikan.

Perangkat Depolitisasi
Cara target teknis menggantikan percakapan tentang siapa berkorban dan siapa diuntungkan. Ia membuat konflik nilai tampak seperti masalah manajemen.

Pergeseran Diskusi
Pergeseran diskusi merujuk pada perubahan fokus dari pertanyaan etis ke pertanyaan teknis. Istilah ini menunjukkan bagaimana dominasi riset teknis membentuk batas wacana.

Pergeseran Kekuasaan
Perubahan lokasi dominasi dari ruang politik terbuka ke meja regulator dan ruang sidang. Pergeseran ini memindahkan konflik ke ranah yang lebih teknis dan mahal.

Peringkat Kelayakan Kredit
Peringkat kelayakan kredit merujuk pada penilaian kelayakan finansial yang memengaruhi akses pembiayaan dan biaya modal. Penilaian ini biasanya berada di luar jangkauan partisipasi warga.

Peripheralization Energi
Kondisi ketika komunitas tertentu tetap berada di pinggiran manfaat transisi energi. Ia menunjukkan ketimpangan yang berlanjut meski ada perubahan teknologi.

Perizinan yang Rumit
Prosedur izin yang panjang dan berlapis antarinstansi. Kerumitan ini dapat menghambat proyek energi bersih.

Perlindungan Sosial
Perlindungan sosial merujuk pada langkah kebijakan untuk melindungi kelompok rentan dari beban transisi energi. Istilah ini menegaskan bahwa transisi tidak boleh memindahkan biaya kepada pihak yang paling lemah.

Persetujuan Bebas
Bentuk persetujuan yang tidak lahir dari tekanan, ancaman, atau ketergantungan ekonomi. Ia menuntut kondisi sosial yang memungkinkan warga menolak tanpa takut dihukum.

Persetujuan Didahulukan
Persetujuan yang diperoleh sebelum keputusan final dan sebelum proyek berjalan. Prinsip ini mencegah partisipasi yang hanya bersifat reaktif.

Persetujuan Diinformasikan
Persetujuan yang diberikan setelah warga memahami informasi yang relevan, termasuk risiko dan dampak. Tanpa informasi yang jelas, persetujuan menjadi manipulatif.

Pertanyaan Epistemologis
Pertanyaan epistemologis merujuk pada pertanyaan tentang kapan temuan ilmiah dianggap bukti yang relevan dan kapan hanya informasi pendukung. Istilah ini menegaskan bahwa penentuan bukti bukan sekadar urusan teknis.

Pertanyaan Etis
Pertanyaan etis merujuk pada pertanyaan tentang siapa yang dilindungi, siapa yang dirugikan, dan siapa yang menanggung beban dalam kebijakan energi. Pertanyaan ini menuntut pembacaan transisi energi sebagai proyek moral.

Pertanyaan Keadilan
Pertanyaan keadilan merujuk pada pertanyaan tentang distribusi manfaat dan beban transisi energi. Pertanyaan ini menuntut riset untuk melampaui optimasi teknologi.

Pertanyaan Mendasar
Pertanyaan mendasar merujuk pada pertanyaan tentang siapa yang memiliki lahan, siapa yang membeli listrik, dan siapa yang menanggung dampak perubahan. Istilah ini menandai inti persoalan keadilan yang sering ditutupi oleh bahasa teknokratis.

Pertarungan Legitimasi
Pertarungan legitimasi merujuk pada perebutan klaim tentang siapa yang paling sah menentukan arah kebijakan. Istilah ini menandai bahwa konflik nilai juga adalah konflik tentang otoritas.

Pertemuan Desa
Kanal komunikasi lokal yang digunakan pemerintah daerah dan komunitas untuk membahas proyek. Kanal ini penting untuk legitimasi karena lebih dekat dengan pengalaman warga.

Pertemuan Metafora
Situasi ketika kerangka keamanan, kedaulatan, dan ketahanan saling bertemu dalam satu arena kebijakan. Pertemuan ini dapat memunculkan ketegangan tujuan dan benturan legitimasi.

Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merujuk pada asumsi yang dipakai dalam kalkulasi kebijakan untuk memperkirakan nilai masa depan. Istilah ini menjadi penting karena asumsi pertumbuhan dapat mengubah bobot moral generasi mendatang dalam model.

Perubahan Arah Proyek
Perubahan lokasi, skala, atau desain proyek akibat tekanan politik atau konflik sosial. Perubahan ini sering terjadi ketika celah institusional tidak ditutup sejak awal.

Perubahan Bertahap
Perubahan bertahap merujuk pada makna transisi sebagai pergeseran yang berlangsung dalam kerangka institusi yang relatif sama. Istilah ini menandai bahwa transisi dapat kompatibel dengan struktur lama yang tetap dominan.

Perubahan Kebijakan Mendadak
Perubahan aturan yang dilakukan tanpa masa transisi memadai dan tanpa sinyal yang jelas sebelumnya. Perubahan semacam ini meningkatkan ketidakpastian dan merusak kepercayaan aktor yang berinvestasi.

Perubahan Radikal
Perubahan radikal merujuk pada makna transformasi sebagai perubahan mendasar dalam produksi, distribusi, dan konsumsi energi. Istilah ini menandai tuntutan perubahan yang menyentuh struktur kepemilikan dan otoritas keputusan.

Perubahan Regulasi
Perubahan regulasi merujuk pada pergeseran aturan yang dapat memengaruhi risiko investasi dan beban kebijakan. Dalam kerangka komodifikasi, perubahan regulasi sering diterjemahkan menjadi risiko finansial.

Perusahaan Besar
Perusahaan besar merujuk pada aktor yang dapat menerima dukungan kebijakan karena memiliki kapasitas modal dan informasi. Istilah ini menandai ketimpangan posisi tawar dalam transisi energi yang sering disamarkan oleh klaim pasar sebagai arena kompetisi setara.

Pesan Perubahan
Pesan perubahan merujuk pada sinyal politis bahwa perubahan akan dikelola tanpa mengusik fondasi status quo. Istilah ini menandai bagaimana pemilihan istilah transisi dapat menjadi cara mengendalikan ekspektasi publik.

Pesan
Pesan merujuk pada makna politis yang dikirim kepada pasar melalui desain kebijakan seperti subsidi atau dukungan teknologi. Istilah ini menandai bahwa detail regulasi berfungsi sebagai sinyal prioritas, bukan sekadar aturan administratif.

Peta Aktor
Pemetaan siapa saja yang terlibat dan berpengaruh dalam proyek energi. Tanpa peta aktor, konflik terlihat acak padahal sesungguhnya struktural.

Peta Jalan Transisi
Peta jalan transisi merujuk pada dokumen strategis yang mengatur tahapan perubahan menuju sistem energi rendah karbon. Istilah ini menandai bagaimana masa depan dikonstruksi melalui target, skenario, dan proyeksi yang tampak objektif tetapi memuat asumsi nilai.

Peta Pemenang dan Pecundang
Peta pemenang dan pecundang merujuk pada konfigurasi pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam perubahan sistem energi. Istilah ini menandai bahwa transisi energi tidak pernah

netral, karena selalu memindahkan posisi tawar, akses, dan keuntungan ekonomi maupun simbolik.

Peta Tema Riset
Peta tema riset merujuk pada pola dominan topik yang muncul dalam kajian energi berkelanjutan. Pemetaan ini menunjukkan bahwa fokus telah meluas dari efisiensi teknologi ke hubungan antara energi, keadilan sosial, dan kekuasaan.

Pilihan Normatif
Pilihan normatif merujuk pada keputusan nilai yang tersembunyi di balik penyusunan skenario teknis. Istilah ini menegaskan bahwa bukti ilmiah selalu mengandung keputusan moral yang terselubung.

Pilihan Variabel
Keputusan tentang aspek mana yang dimasukkan atau dikeluarkan dalam penyusunan indikator. Pilihan ini mencerminkan prioritas normatif dan dapat memengaruhi hasil akhir penilaian.

Pledge and Review
Pledge and review merujuk pada pendekatan di mana negara berjanji secara sukarela lalu dievaluasi. Istilah ini menandai mekanisme yang dapat menciptakan legitimasi simbolik, tetapi juga menghadapi kritik karena menghasilkan rezim yang penuh celah dan minim sanksi.

Pola Hubungan Kualitas Institusi
Relasi antara mutu tata kelola dan capaian energi terbarukan yang tidak selalu linier. Pola ini dipengaruhi sejarah dan konfigurasi kekuasaan.

Pola Konsumsi
Pola konsumsi merujuk pada asumsi tentang bagaimana masyarakat menggunakan energi dari waktu ke waktu. Pola ini memengaruhi proyeksi permintaan dan keputusan investasi.

Pola Pembangunan Tinggi Karbon
Model pembangunan yang bergantung pada energi fosil dan menempatkan pertumbuhan jangka pendek sebagai tujuan utama. Pola ini mudah kembali menguat ketika krisis menekan kebijakan.

Policy Diffusion
Proses penyebaran kebijakan lintas negara karena peniruan, tekanan, atau pembelajaran dari contoh yang dianggap berhasil. Ia dapat menghasilkan dampak berbeda ketika konteks institusinya tidak sama.

Politik Material
Dimensi konkret yang memperlihatkan bahwa target dan skenario selalu bertemu lahan, regulasi, dan relasi sosial. Ia menolak anggapan bahwa transisi berjalan steril.

Politik Pencitraan
Orientasi kebijakan pada penampilan keberhasilan cepat dan simbolik. Ia sering mengorbankan konsistensi jangka panjang dan keadilan sosial.

Politik Tanggung Jawab
Orientasi kebijakan yang menilai keberhasilan dari kemampuan menyeimbangkan kepentingan, risiko, dan dampak ekologis. Ia membutuhkan indikator yang menilai konsistensi dan keadilan.

Porsi Energi Bersih
Porsi energi bersih merujuk pada ukuran kuantitatif tentang bagian energi bersih dalam bauran energi. Ukuran ini membantu perbandingan tetapi dapat mengaburkan persoalan distribusi dampak.

Portofolio Keuangan
Portofolio keuangan merujuk pada cara energi diperlakukan sebagai aset investasi yang dihitung dalam kerangka

pendapatan dan risiko. Dalam kerangka ini, energi bergeser dari layanan publik menjadi instrumen finansial.

Power Purchase Agreements

Power purchase agreements merujuk pada kontrak pembelian listrik yang menjadi bagian dari mekanisme komodifikasi energi. Istilah ini menandai hubungan energi dengan skema pendapatan dan penguncian risiko dalam kontrak.

Praktik-Praktik Lokal

Praktik-praktik lokal merujuk pada cara komunitas mengelola sumber daya dan beradaptasi dalam konteks tertentu. Pengakuannya dapat membuka spektrum opsi kebijakan yang lebih luas.

Prinsip Desain Indikator

Pertimbangan normatif dan metodologis dalam menyusun ukuran kinerja yang adil dan transparan. Prinsip ini mencakup keseimbangan antara keterukuran, relevansi sosial, dan akuntabilitas.

Prioritas Kebijakan

Prioritas kebijakan merujuk pada urutan tujuan yang dianggap paling penting dalam desain kebijakan energi. Penetapan prioritas sering ditentukan oleh standar bukti dan indikator yang dipilih.

Prioritas Negara

Urutan kepentingan yang ditetapkan melalui bahasa kebijakan dan narasi ancaman. Ia menentukan tujuan yang dianggap mendesak dibanding tujuan lain.

Prioritas Riset

Prioritas riset merujuk pada penentuan tema mana yang dianggap penting dan layak didanai. Istilah ini menandai bahwa keputusan riset juga merupakan keputusan politik.

Procedural Legitimacy

Procedural legitimacy merujuk pada legitimasi yang bertumpu pada kualitas proses penyusunan kebijakan, terutama apakah proses itu dianggap adil, transparan, dan inklusif. Istilah ini menandai bahwa prosedur formal saja tidak cukup apabila publik merasa tidak benar-benar dilibatkan.

Produksi "Kebenaran"

Produksi "kebenaran" merujuk pada proses di mana pengetahuan tertentu dilembagakan sebagai fakta resmi dan dasar legitimasi kebijakan. Istilah ini menandai bahwa apa yang dianggap rasional atau ilmiah dalam kebijakan energi adalah hasil seleksi dan institusionalisasi, bukan refleksi realitas yang sepenuhnya netral.

Produksi Kebenaran

Produksi kebenaran merujuk pada proses institusional yang menentukan apa yang diakui sebagai fakta dalam kebijakan energi. Istilah ini menandai bahwa kebenaran kebijakan tidak hanya ditemukan, tetapi diproduksi melalui seleksi data, metodologi, dan otoritas ilmiah.

Produsen Kecil

Aktor skala kecil yang dapat terdorong masuk bila desain instrumen membuka akses. Keberadaannya sering dipakai sebagai ukuran apakah kebijakan memperluas partisipasi ekonomi.

Program Perluasan Jaringan

Program perluasan jaringan merujuk pada kebijakan untuk memperluas layanan listrik dan energi ke wilayah yang belum terjangkau. Program ini menjadi ukuran apakah bahasa hak diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Project Finance

Project finance merujuk pada struktur pembiayaan proyek secara keseluruhan yang mengatur aliran dana, risiko, dan

pengembalian. Struktur ini dapat membentuk keputusan tarif, kontrak, dan prioritas investasi.

Prosedur Akuntabilitas
Langkah pertanggungjawaban yang memastikan keputusan dapat diaudit dan dipertanyakan. Prosedur ini melindungi kebijakan dari penyalahgunaan.

Prosedur Legitimasi
Rangkaian langkah yang dipakai untuk membuktikan bahwa proyek sah dan dapat diterima. Prosedur legitimasi dapat melindungi warga atau menjadi alat pembenaran.

Prosedur Partisipasi
Aturan yang mengatur bagaimana warga dan pemangku kepentingan dapat terlibat dalam perumusan kebijakan. Kualitasnya menentukan apakah keputusan tarif memiliki legitimasi sosial.

Proses Administratif
Rangkaian dokumen dan persetujuan formal yang membentuk jalur legal proyek. Proses administratif dapat menjadi alat legitimasi tanpa menjamin keadilan.

Proses Negosiasi
Proses negosiasi merujuk pada cara perundingan diatur dan siapa yang diberi ruang untuk mengklaim bicara atas nama bukti. Pengaturan proses dapat menentukan siapa yang tersingkir secara epistemik.

Protes Lokal
Aksi penolakan warga yang muncul ketika proses dianggap tertutup atau tidak adil. Protes lokal sering menjadi cara terakhir untuk memaksa pengakuan.

Proyek di Lapangan
Tahap kebijakan yang sudah menjadi aktivitas fisik seperti pembangunan, pengadaan, dan pengelolaan lokasi. Di tahap ini, konsekuensi sosial dan ekologis menjadi nyata dan sulit disembunyikan.

Proyek Kehutanan
Inisiatif yang sering dipakai sebagai kompensasi emisi. Ia rentan mengabaikan konsultasi memadai dengan komunitas yang tinggal di wilayah proyek.

Proyek Komunitas
Inisiatif energi yang dikelola atau dimiliki berbasis komunitas. Ia sering diposisikan untuk mengoreksi dominasi aktor besar dalam akses insentif.

Proyek Mikrogrid
Infrastruktur energi terbarukan skala kecil yang dapat dimiliki komunitas. Ia menantang model terpusat yang didominasi aktor besar.

Proyeksi Emisi
Proyeksi emisi merujuk pada peramalan lintasan emisi yang biasanya dibangun melalui model iklim. Proyeksi ini dapat diangkat sebagai bukti utama untuk membenarkan pilihan kebijakan tertentu.

Proyeksi Permintaan
Proyeksi permintaan merujuk pada perkiraan kebutuhan energi di masa depan yang dipakai untuk membenarkan investasi dan pilihan teknologi. Proyeksi ini dapat menjustifikasi keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu.

Proyeksi Suplai
Proyeksi suplai merujuk pada perkiraan pasokan energi yang dipakai untuk merancang kebijakan dan investasi. Proyeksi ini

ikut menentukan teknologi mana yang dianggap perlu atau layak.

Public Hearing

Public hearing merujuk pada forum dengar pendapat yang secara formal dimaksudkan untuk menjaring aspirasi warga. Istilah ini menandai mekanisme partisipasi yang dapat menjadi substantif apabila memberi ruang diskusi nyata, tetapi dapat berubah menjadi ritual administratif apabila hanya menjadi presentasi sepihak yang sarat istilah teknis.

Pungutan Khusus

Beban tambahan yang dimasukkan ke dalam tagihan pelanggan untuk menutup selisih biaya skema. Ia menyebarkan biaya ke seluruh pelanggan meski manfaat tidak selalu merata.

Pusat Gravitasi Otoritas

Pusat gravitasi otoritas merujuk pada pergeseran lokasi kekuasaan epistemik dari negara ke kombinasi kompleks lembaga internasional, lembaga keuangan, dan lembaga riset. Istilah ini menandai transformasi struktur pengetahuan global.

Putusan Pengadilan

Keputusan yudisial yang dapat membatalkan atau menafsirkan ulang regulasi transisi energi. Putusan ini bisa memperkuat perlindungan warga, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan jika tanpa masa penyesuaian.

R

Rantai Kebijakan

Urutan proses dari target pusat menuju proyek konkret di lapangan. Ia melibatkan banyak lembaga, dokumen, dan keputusan antara yang sering tidak terlihat publik.

Rantai Nilai Energi Terbarukan
Rantai nilai energi terbarukan merujuk pada keseluruhan jalur produksi dan distribusi manfaat serta risiko dalam proyek energi bersih. Istilah ini menandai bahwa pembagian tanggung jawab hanya adil jika diperiksa sepanjang rantai nilai.

Rantai Pasok
Rangkaian aliran material, teknologi, dan logistik yang menopang penyediaan energi. Kerentanannya sering dibaca sebagai sumber ancaman yang perlu diantisipasi.

Rasio Manfaat
Perbandingan manfaat sosial jangka panjang dengan biaya jangka pendek dalam pembenaran kebijakan. Ia sering mengabaikan pertanyaan siapa yang menanggung biaya lebih dulu.

Rasionalitas Ekonomi
Rasionalitas ekonomi merujuk pada cara berpikir yang menjadikan efisiensi biaya, optimalitas, dan keuntungan agregat sebagai ukuran utama kebijakan. Istilah ini menandai bahwa rasionalitas tertentu dapat menyingkirkan pertimbangan keadilan.

Rasionalitas Kebijakan
Rasionalitas kebijakan merujuk pada standar berpikir yang dianggap sah dalam menilai pilihan energi, termasuk efisiensi, biaya, dan stabilitas sistem. Istilah ini menandai bahwa rasionalitas tertentu dapat mendominasi dan menyingkirkan pertimbangan keadilan sosial.

Rasionalitas Kuantitatif
Rasionalitas kuantitatif merujuk pada kecenderungan menjadikan angka sebagai dasar utama keputusan. Rasionalitas ini dapat menutupi dimensi moral dan politik yang tidak mudah dikalkulasi.

Rasionalitas Teknis
Rasionalitas teknis merujuk pada standar berpikir yang mengutamakan efisiensi, optimasi, dan kelayakan teknologi. Rasionalitas ini dapat menjadi mekanisme marginalisasi terhadap pertanyaan etis.

Rasionalitas Teknokratis
Rasionalitas teknokratis merujuk pada cara berpikir yang mengutamakan model, indikator, dan prosedur sebagai dasar keputusan. Istilah ini dapat mempersempit konflik nilai menjadi sekadar persoalan efisiensi.

Rasionalitas
Definisi tentang apa yang dianggap logis dan dapat diterima dalam kebijakan. Dalam praktiknya, rasionalitas sering dipersempit menjadi efisiensi ekonomi jangka pendek.

Reformasi Kelembagaan
Perubahan aturan, struktur, dan tata kelola institusi agar kapasitas implementasi meningkat. Reformasi ini bisa memperkuat keadilan atau menjadi mesin reproduksi ketidakadilan.

Reformasi Subsidi
Upaya mengubah dukungan harga energi yang telah lama berjalan. Reformasi ini menuntut keberanian politik dan mitigasi dampak sosial.

Regulasi Energi
Regulasi energi merujuk pada aturan yang membentuk akses, struktur pasar, dan mekanisme distribusi risiko serta manfaat. Istilah ini menandai bahwa regulasi adalah arena strategis yang dapat dikendalikan oleh aktor yang memiliki pengaruh politik.

Regulasi Lingkungan
Aturan yang mengatur perlindungan ekosistem dan dampak proyek. Regulasi ini dapat memperkuat legitimasi atau memicu konflik implementasi.

Regulator Energi
Badan yang merumuskan aturan teknis tentang tarif, akses jaringan, dan desain pasar. Keputusan teknisnya dapat menentukan siapa yang bisa berpartisipasi dalam transisi.

Regulator Independen
Lembaga pengatur yang diposisikan terpisah dari kepentingan politik harian. Penempatannya dapat meningkatkan konsistensi, tetapi tetap memerlukan pengawasan publik.

Regulatory Regime
Regulatory regime adalah kumpulan aturan yang saling terkait dan membentuk pola tetap bagi perilaku aktor. Ia menentukan struktur insentif dan batas tindakan yang dianggap sah.

Rekayasa Sosial-Politik
Upaya sadar untuk menata ulang hubungan antara negara, pasar, dan warga dalam sektor energi. Ia menempatkan kebijakan sebagai instrumen pembentukan tatanan sosial baru.

Relasi Kelas, Gender, Ras, Dan Ruang
Dimensi sosial yang menentukan siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung beban perubahan energi. Relasi ini memperlihatkan bahwa transisi tidak pernah netral secara sosial.

Relasi Kuasa dalam Statistik
Relasi kuasa dalam statistik merujuk pada cara angka, grafik, dan model membentuk persepsi tentang kemajuan energi. Istilah ini menandai bahwa statistik tidak sekadar mencerminkan realitas, tetapi ikut membentuk prioritas kebijakan.

Relasi Kuasa Oligarkis
Pola pengaruh kelompok kuat yang menguasai sumber daya dan keputusan. Relasi ini dapat menjadikan sektor energi sebagai arena rente.

Relasi Kuasa
Relasi kuasa merujuk pada hubungan tidak setara antara aktor dalam sistem energi, termasuk negara, korporasi, dan warga. Istilah ini menandai bahwa setiap kebijakan membawa implikasi tentang siapa yang menentukan dan siapa yang ditentukan.

Relasi Kuasa
Relasi kuasa merujuk pada hubungan tidak setara antara aktor dalam proses kebijakan, termasuk negara, korporasi, ahli, dan warga. Istilah ini menandai bahwa keputusan kebijakan selalu dibentuk oleh konfigurasi pengaruh yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dibatasi.

Renewable Energy
Istilah yang merujuk pada energi terbarukan sebagai objek proyek kompensasi atau investasi. Dalam kritik, ia bisa menjadi kedok relasi kepemilikan baru.

Representasi Risiko
Representasi risiko merujuk pada cara risiko energi dan iklim diterjemahkan ke dalam model dan indikator. Cara representasi ini memengaruhi prioritas kebijakan dan distribusi tanggung jawab.

***Resilience* sebagai Wacana Adaptif**
Kerangka yang menekankan adaptasi sebagai jawaban utama atas perubahan dan krisis. Ia mengandung pertanyaan tentang siapa yang diminta menanggung beban penyesuaian.

Resilience
Resilience merujuk pada daya lenting sistem terhadap guncangan yang perlu diperkuat dalam kebijakan energi. Istilah

ini digunakan untuk menandai kebutuhan menggabungkan ketahanan sistem dengan perluasan porsi energi bersih.

Resistensi Komunitas
Penolakan sosial terhadap proyek yang dianggap tidak adil, tidak transparan, atau merusak ruang hidup. Resistensi sering muncul bukan karena anti energi terbarukan, tetapi karena pengalaman ketidakadilan.

Resistensi Reformasi
Resistensi reformasi merujuk pada penolakan atau hambatan terhadap perubahan kebijakan energi. Dalam peta riset, resistensi dipahami sebagai faktor struktural dalam jaringan kompleks transisi.

Resistensi Sosial
Penolakan atau keberatan publik yang muncul ketika kebijakan dipersepsikan membebani secara tidak adil. Ia bisa meningkat ketika kenaikan tagihan listrik dikaitkan dengan skema dukungan.

Resistensi
Resistensi merujuk pada penolakan atau perlawanan warga terhadap kebijakan yang dianggap merugikan atau menyingkirkan mereka. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan tidak otomatis diterima jika keadilan diabaikan.

Respons Institusional
Cara lembaga menanggapi keberatan publik, apakah terbuka atau defensif. Respons ini membentuk kepercayaan dan legitimasi.

Restrukturisasi Relasi Kuasa
Perubahan susunan dominasi dalam birokrasi dan proses kebijakan. Tanpa restrukturisasi ini, peniruan regulasi hanya mempercantik permukaan.

Retorika Dukungan terhadap Inovasi
Narasi resmi yang menyatakan dukungan terhadap percobaan kebijakan dan teknologi. Retorika ini dapat berjarak dari kenyataan struktural yang menghambat.

Retrofit Rumah Susun
Upaya perbaikan bangunan untuk mengurangi kebutuhan energi dan meningkatkan kualitas hidup. Ia menandai transisi yang berangkat dari kebutuhan sosial.

Retrospective Cuts
Pemotongan tarif secara sepihak terhadap ketentuan yang sudah berjalan. Tindakan ini meningkatkan premi risiko politik dan menurunkan kepercayaan investor.

Return on Investment
Return on investment merujuk pada ukuran pengembalian investasi yang dipakai untuk menilai kelayakan proyek. Ukuran ini dapat menjadi penentu prioritas yang menyingkirkan pertimbangan moral.

Review Berkala
Peninjauan yang dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan. Jika lemah, beban tarif dapat terkunci lama tanpa koreksi.

Rezim Kebenaran Teknokratis
Konfigurasi ketika model dan indikator menjadi penentu utama apa yang dianggap benar dalam kebijakan. Rezim ini sulit digugat karena dilindungi bahasa profesional dan audit.

Rezim Kebijakan
Kumpulan aturan yang saling terkait dan membentuk pola tetap bagi perilaku aktor. Rezim ini bekerja lintas sektor, sehingga perubahan satu aturan dapat mengguncang keseluruhan sistem.

Rezim Kepercayaan
Rezim kepercayaan merujuk pada keyakinan tentang pengetahuan yang baik dan siapa yang dipercaya sebagai ahli. Rezim ini membentuk batas bukti yang diakui dalam kebijakan.

Rezim Rente
Pola keuntungan berulang yang dapat terbentuk ketika tarif dan kontrak mengunci manfaat bagi kelompok tertentu. Ia dapat muncul secara legal melalui desain kebijakan yang dipayungi narasi hijau.

Riset Teknis
Riset teknis merujuk pada kajian yang berfokus pada perangkat teknologi, model optimasi, dan efisiensi sistem energi. Fokus ini dapat memperkuat klaim objektivitas sambil mengabaikan dimensi keadilan.

Risiko Dan Ketidakpastian
Risiko dan ketidakpastian merujuk pada kondisi masa depan yang tidak sepenuhnya dapat dipastikan tetapi tetap dimasukkan ke dalam perhitungan kebijakan. Istilah ini menjadi bagian dari cara diskonto dibenarkan sebagai keputusan teknis.

Risiko Investasi
Ketidakpastian yang mempengaruhi keputusan pendanaan dan pengembangan proyek. Sumbernya bisa berasal dari perubahan aturan, kondisi fiskal, maupun desain kontrak.

Risiko Kebuntuan Kebijakan
Kemungkinan bahwa kebijakan tidak bergerak karena terlalu banyak persyaratan, filter kepatuhan, dan konflik prosedural. Risiko ini membuat agenda transisi berubah menjadi proses administratif tanpa energi transformasi.

Risiko Kooptasi
Risiko ketika mekanisme manfaat dan keterlibatan justru dipakai untuk mengendalikan suara kritis atau memecah solidaritas

komunitas. Risiko ini membuat instrumen yang tampak teknis menjadi arena politik yang menentukan legitimasi.

Risiko Politik
Risiko politik merujuk pada konsekuensi sosial dan konflik yang muncul ketika kebijakan tidak dianggap adil. Istilah ini menandai bahwa risiko dapat dipindahkan ke tingkat lokal sementara keuntungan fiskal dan citra hijau dipertahankan di tingkat pusat.

Risiko Revisi Tarif
Ancaman perubahan tarif yang dapat mengubah kelayakan ekonomi investasi. Ia membuat investor memasukkan premi risiko dalam pembiayaan.

Risiko Sosial
Risiko sosial merujuk pada dampak yang ditanggung komunitas lokal ketika keputusan strategis dibuat tanpa partisipasi bermakna. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan tidak dapat dipisahkan dari keadilan dan legitimasi sosial.

Risiko Teknologi Baru
Risiko teknologi baru merujuk pada asumsi tentang ketidakpastian teknologi yang dipakai dalam perhitungan kebijakan. Asumsi ini dapat membatasi keberanian memilih opsi yang lebih ambisius.

Risiko
Risiko merujuk pada konsekuensi sosial-ekologis yang dapat dipindahkan dari aktor kuat ke kelompok rentan melalui desain kebijakan. Istilah ini menandai bahwa pembagian tanggung jawab keberlanjutan harus dibaca dari siapa yang menanggung risiko dan siapa yang memindahkannya.

Risk Premium
Risk premium merujuk pada tambahan biaya karena ketidakpastian yang dilekatkan pada investasi energi. Istilah ini

menentukan siapa yang akhirnya menanggung biaya ketidakpastian melalui harga dan kebijakan.

Ritual Partisipasi
Bentuk partisipasi yang dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban prosedural. Ia menghasilkan kesan demokratis tanpa memberi pengaruh nyata pada keputusan.

Robustness
Robustness merujuk pada kestabilan temuan terhadap variasi asumsi tertentu. Istilah ini tidak otomatis berarti temuan menangkap seluruh dimensi moral suatu situasi.

Ruang Abu-Abu
Wilayah ketidakjelasan informasi dan kewenangan yang muncul akibat koordinasi lemah. Ruang ini membuka peluang bagi spekulasi dan konflik sosial.

Ruang Deliberasi
Ruang deliberasi merujuk pada ruang pembahasan terbuka yang memungkinkan warga menyatakan keberatan dan memengaruhi keputusan. Ruang ini cenderung menyempit ketika energi diperlakukan sebagai komoditas.

Ruang Epistemik
Ruang epistemik merujuk pada ruang penentuan apa yang dianggap bukti dan kebenaran dalam riset energi. Ketika ruang epistemik dikuasai paradigma teknis, dimensi etika cenderung melemah.

Ruang Hidup
Wilayah sosial dan ekologis yang menjadi basis kehidupan komunitas. Kehilangan ruang hidup sering lebih besar dari sekadar kehilangan aset ekonomi.

Ruang Pengaruh
Porsi kekuasaan yang benar-benar tersedia bagi warga untuk mengubah desain proyek. Tanpa ruang pengaruh, partisipasi hanya menjadi dekorasi prosedural.

Ruang Teknokratis
Ruang teknokratis merujuk pada arena tertutup tempat perdebatan kebijakan terjadi dalam bahasa teknis yang sulit ditembus publik. Kondisi ini membuat warga merasakan dampak tanpa memahami pilihan normatif yang dipertaruhkan.

Rumor Lokal
Informasi informal yang menyebar ketika kanal resmi tidak transparan. Rumor sering menjadi mekanisme warga mengisi kekosongan informasi.

Rumor Proyek
Informasi informal yang menyebar ketika kanal resmi tidak jelas. Rumor sering muncul karena kekosongan transparansi.

Rutinitas Audit
Pemeriksaan berkala terhadap lembaga regulator dan implementasi kebijakan. Rutinitas ini meningkatkan visibilitas, tetapi tidak otomatis menjamin keadilan.

S

Sabotase Halus
Gangguan kecil yang berulang dan sulit dilacak sebagai satu tindakan tunggal, namun berdampak pada operasional proyek. Ia muncul ketika warga merasa tidak memiliki saluran negosiasi yang substantif.

Sejarah Kebijakan Industri
Warisan keputusan ekonomi masa lalu yang membentuk resistensi dan dukungan terhadap transisi. Sejarah ini membuat efektivitas kebijakan berbeda antarnegara.

Sejarah Kolonial
Sejarah kolonial merujuk pada warisan relasi kuasa yang membentuk desain pasar dan institusi negara dalam pengelolaan energi. Warisan ini dapat menentukan siapa yang menikmati layanan dan siapa yang terus menanggung beban.

Sektor Ekstraktif
Bidang ekonomi yang bertumpu pada pengambilan sumber daya alam. Sektor ini sering memiliki pengaruh kuat dalam konfigurasi kebijakan energi.

Sengketa Perizinan
Kontestasi yang muncul ketika proyek energi membutuhkan legitimasi hukum dan sosial. Sengketa ini memperlihatkan bahwa transisi adalah medan kuasa.

Shattered Frames
Shattered frames adalah konsep tentang terpecahnya interpretasi tujuan, instrumen, dan tanggung jawab antar lembaga energi terbarukan. Ia menjelaskan mengapa kapasitas implementasi bisa terfragmentasi meski lembaga tampak aktif.

Siapa yang Tahu Apa
Pola distribusi informasi yang menentukan siapa bisa mengambil keputusan lebih cepat. Ia membentuk ketimpangan daya tawar dalam negosiasi proyek.

Siapa yang Tahu Kapan
Dimensi waktu dalam distribusi informasi yang menentukan siapa mendapat keuntungan dari momentum. Pengetahuan yang

datang terlambat sering membuat warga kehilangan kesempatan memengaruhi keputusan.

Significance

Significance merujuk pada ukuran tertentu dalam ilmu statistik yang menandai kekuatan temuan menurut kriteria statistik. Istilah ini tidak identik dengan kepentingan etis atau keadilan sosial.

Simbolisme Kosong

Kondisi ketika target dan slogan tidak diikuti perubahan substantif. Ia memicu kebutuhan akan tekanan sosial-politik agar transisi nyata terjadi.

Sinisme Sosial

Sikap tidak percaya yang berkembang ketika kebijakan dipersepsikan sebagai simbolik atau manipulatif. Sinisme ini menghambat dukungan publik terhadap reformasi.

Sistem Penugasan

Pola distribusi tugas antar lembaga yang menentukan siapa mengurus apa. Jika kabur, sistem penugasan memproduksi saling lempar tanggung jawab.

Skema Kompensasi

Instrumen yang dipakai untuk merespons kerugian yang terukur akibat proyek. Skema ini dapat meredakan konflik atau memunculkan konflik baru jika dianggap tidak adil.

Skema Pajak Karbon

Skema pajak karbon merujuk pada instrumen kebijakan yang mengaitkan produksi dan konsumsi energi dengan kewajiban mengurangi dampak lingkungan. Istilah ini menandai bahwa keuntungan tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab ekologis.

Skema Pajak Karbon
Skema pajak karbon merujuk pada instrumen yang mengenakan biaya pada emisi karbon untuk mengubah perilaku produksi dan konsumsi. Istilah ini menandai upaya mengaitkan keuntungan ekonomi dengan kewajiban ekologis.

Skema Pembiayaan
Rancangan dukungan finansial yang menentukan siapa dapat membangun proyek dan siapa tersingkir. Skema pembiayaan yang berubah sepihak memproduksi ketidakpercayaan jangka panjang.

Skema Pinjaman Berbunga
Bentuk pendanaan yang membebani negara rentan karena harus dikembalikan dengan bunga. Dalam kritik keadilan, ia dianggap tidak memadai untuk reparasi.

Skema Subsidi Silang
Pengalihan beban biaya dari satu kelompok ke kelompok lain melalui mekanisme tarif atau anggaran. Ia dapat menjadi tidak transparan bila tidak disertai pengungkapan penggunaan dana.

Skema Tarif Khusus
Skema tarif khusus merujuk pada aturan tarif yang dirancang untuk mendorong teknologi tertentu atau mempercepat investasi energi. Istilah ini menandai bahwa tarif adalah instrumen kekuasaan yang mengarahkan arus modal.

Skenario Dekarbonisasi
Skenario dekarbonisasi merujuk pada lintasan emisi yang disajikan sebagai pilihan masa depan energi dan iklim. Di dalamnya selalu ada asumsi tentang teknologi, konsumsi, dan distribusi biaya.

Skenario Kebijakan Energi
Proyeksi lintasan masa depan yang disusun melalui model dan asumsi tertentu. Skenario ini membentuk persepsi tentang pilihan yang dianggap realistis atau tidak realistis.

Skenario Teknis
Skenario teknis merujuk pada representasi masa depan yang dibangun melalui model dan asumsi. Istilah ini menunjukkan bagaimana konflik sosial dan ketidakpastian diterjemahkan menjadi angka dan grafik.

Skor Komparatif
Skor komparatif merujuk pada hasil perbandingan alternatif kebijakan dalam kerangka indikator tertentu. Skor ini dapat mempengaruhi persepsi tentang pilihan terbaik.

Skor Tata Kelola
Nilai ringkas untuk menggambarkan kualitas institusi dalam ukuran tertentu. Skor membantu perbandingan, tetapi tidak selalu menangkap praktik nyata.

Solidaritas Konkret
Bentuk keberpihakan yang tampak dalam tindakan dan desain institusi. Ia menjadi fondasi praktik transisi yang berbasis komunitas.

Solidaritas Sosial
Solidaritas sosial merujuk pada komitmen kolektif untuk melindungi kelompok paling rentan dalam perubahan energi. Konsep ini menantang logika yang mendorong beban penyesuaian kepada konsumen kecil.

Solusi Teknologi
Solusi teknologi merujuk pada pendekatan yang menempatkan inovasi teknis sebagai jawaban utama atas krisis energi dan iklim. Istilah ini dapat menutupi konflik sosial yang muncul dalam implementasi kebijakan.

Sosialisasi Proyek
Penyampaian informasi kepada warga tentang rencana proyek dan dampaknya. Sosialisasi sering bersifat satu arah dan tidak selalu membuka ruang koreksi keputusan.

Spekulan
Aktor yang mencari keuntungan dari ketidakpastian proyek dan informasi yang tidak konsisten. Spekulan tumbuh subur ketika koordinasi dan transparansi institusi rapuh.

Stabilitas Hukum
Derajat kepastian bahwa aturan tidak berubah secara tiba-tiba karena tekanan jangka pendek. Stabilitas ini memengaruhi risiko investasi dan keberlanjutan kebijakan energi.

Stabilitas Kebijakan
Keandalan aturan agar tidak berubah secara tiba-tiba dalam horizon investasi. Ia menentukan apakah instrumen dianggap layak oleh pembiayaan jangka panjang.

Stabilitas Pasokan
Kondisi ketika ketersediaan energi dipahami harus terus terjaga tanpa gangguan. Ia sering menjadi dasar pembenaran pilihan kebijakan yang menekankan kepastian jangka pendek.

Stabilitas Regulasi
Kondisi ketika aturan tidak mudah diubah secara sewenang-wenang, sehingga pelaku dapat menghitung risiko. Stabilitas regulasi berfungsi sebagai kontrak politis yang menata harapan kolektif.

Standar Bukti
Standar bukti merujuk pada kriteria yang menentukan jenis data dan metode apa yang diakui sah dalam perumusan kebijakan energi. Istilah ini menandai bahwa batas antara fakta dan opini dibentuk melalui aturan epistemik tertentu.

Standar Emisi
Standar emisi merujuk pada instrumen kebijakan yang menegaskan batas-batas lingkungan bagi operasi pasar. Istilah ini menandai pilihan normatif tentang siapa yang harus mengurangi dampak dan bagaimana kewajiban itu dipaksakan.

Standar Keandalan Sistem
Standar keandalan sistem merujuk pada ukuran teknis yang digunakan untuk menilai stabilitas dan kualitas pasokan energi. Standar ini sering dipakai untuk membenarkan keputusan tarif, investasi, dan pengaturan layanan.

Standar Pelaporan Emisi
Kewajiban transparansi untuk menampilkan data dampak kebijakan. Ia hanya bermakna jika data mudah diakses dan tidak dikaburkan istilah teknis.

Standar Pembuktian
Kriteria yang menentukan bukti seperti apa yang diterima dalam proses legal atau regulasi. Standar ini sering menguntungkan aktor yang memiliki data, ahli, dan biaya.

Standar Tata Kelola Tinggi
Gagasan bahwa mutu regulasi dan institusi yang kuat otomatis menghasilkan kebijakan yang efektif. Ia sering beroperasi sebagai asumsi yang menyamarkan negosiasi, kompromi, dan eksklusi.

Standar Teknis yang Rinci
Aturan teknis yang detail dan ketat yang menentukan bentuk partisipasi dan inovasi. Ia dapat menyaring aktor kecil karena bahasa teknis menuntut kapasitas tinggi.

Status Biner
Cara memahami sesuatu seolah hanya ada dua keadaan yang saling menutup. Dalam konteks penerimaan proyek, status biner dianggap tidak memadai karena penerimaan dapat menguat atau melemah.

Stranded Assets
Aset yang kehilangan nilai ekonomi akibat perubahan kebijakan atau teknologi energi. Risiko ini memengaruhi keputusan fiskal jangka panjang.

Strategi Bertahap
Pendekatan perubahan yang disesuaikan dengan kapasitas nyata institusi. Ia menghindari lompatan kebijakan yang tidak tertopang implementasi.

Strategi Protektif
Pendekatan yang memprioritaskan perlindungan dari risiko korupsi dan rente. Ia menekankan penguatan prasyarat sebelum ekspansi instrumen.

Struktur Kekuasaan Energi
Struktur kekuasaan energi merujuk pada konfigurasi aktor yang menentukan arah sistem energi, termasuk siapa yang memegang kendali, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang tersingkir. Istilah ini menandai bahwa perubahan teknologi tidak otomatis membongkar hierarki lama.

Struktur Kekuasaan
Struktur kekuasaan merujuk pada konfigurasi pengaturan yang membentuk akses energi dan distribusi risiko. Struktur ini bekerja melalui desain pasar, institusi negara, dan aturan kebijakan yang mengikat kehidupan sehari-hari warga.

Struktur Kelas
Susunan ketimpangan sosial yang menentukan siapa menanggung beban dan siapa menikmati manfaat transisi. Struktur ini sering hilang dalam indikator agregat.

Struktur Kepemilikan
Struktur kepemilikan merujuk pada penguasaan aset dan infrastruktur energi yang menentukan siapa yang memegang kendali. Istilah ini menandai bahwa transisi energi dapat gagal menjadi adil bila kepemilikan tetap terkonsentrasi.

Struktur Konflik
Pola yang membuat konflik berulang di banyak proyek meskipun konteksnya berbeda. Struktur konflik biasanya lahir dari celah institusional yang sama.

Struktur Pengetahuan
Struktur pengetahuan merujuk pada susunan yang mengubah data menjadi bukti dan bukti menjadi dasar keputusan. Struktur ini menentukan keputusan tampak wajar atau tampak problematik.

Struktur Subsidi Fosil
Susunan dukungan fiskal yang mempertahankan energi berbasis fosil. Struktur ini dapat menghambat konsistensi transisi energi.

Struktur Tarif Listrik
Susunan penetapan tarif yang memuat cara biaya dan manfaat kebijakan dialokasikan. Ia menjadi kanal utama pengalihan risiko pasar ke publik.

Struktur Tarif
Struktur tarif merujuk pada rancangan harga layanan yang menentukan beban pembayaran pengguna. Struktur ini dapat melindungi kelompok rentan atau memperberat mereka ketika tarif melonjak.

Studi Biaya–Manfaat
Studi biaya–manfaat merujuk pada pendekatan yang menilai kebijakan dengan membandingkan biaya dan manfaat. Pendekatan ini dapat menggeser perhatian dari nilai yang sulit diukur ke angka yang mudah dihitung.

Studi Kelayakan
Studi kelayakan merujuk pada dokumen analitis yang menentukan apakah suatu proyek energi dianggap layak secara teknis dan ekonomi. Istilah ini menandai bahwa parameter

kelayakan tidak netral, karena ia menyaring dimensi sosial dan ekologis tertentu.

Studi Lintas Negara
Perbandingan antarnegara untuk memahami variasi hubungan institusi dan hasil kebijakan. Tujuannya memetakan pola, bukan mencari model tunggal.

Suap Kasat Mata
Praktik pemberian imbalan langsung yang terlihat dalam transaksi kebijakan. Ia hanya satu bentuk dari jaringan korupsi yang lebih luas.

Suara yang Terpinggirkan
Kelompok yang terdorong keluar dari proses penyusunan kebijakan dan penentuan indikator. Ketika mereka tidak diakui, kebijakan cenderung membungkam pengalaman konkret.

Subjek Politik
Subjek politik merujuk pada warga yang memiliki hak untuk merumuskan bentuk perubahan dan mempertanyakan desain kebijakan. Istilah ini menandai bahwa demokrasi energi menuntut lebih dari sekadar penerimaan sosial pasif.

Subsidi Silang
Subsidi silang merujuk pada desain subsidi yang memindahkan sebagian beban dari kelompok rentan ke kelompok yang lebih mampu. Instrumen ini menjadi arsitektur tersembunyi dari keadilan atau ketidakadilan dalam tarif.

Subsidi
Subsidi merujuk pada dukungan kebijakan yang sering dibenarkan atas nama percepatan transisi energi. Istilah ini menandai risiko bahwa subsidi dapat jatuh pada perusahaan besar yang sudah kuat bila tidak didesain sensitif terhadap keadilan sosial.

Substantive Legitimacy

Substantive legitimacy merujuk pada legitimasi yang bersumber dari isi kebijakan, yaitu apakah kebijakan benar-benar menyelesaikan masalah dan membawa keadilan. Istilah ini menguji kebijakan bukan dari retorika atau prosedur, melainkan dari dampak nyata bagi kelompok yang terdampak.

Sufficiency

Gagasan yang menekankan kecukupan sebagai prinsip kebijakan energi. Ia menantang konsumsi mewah dan memprioritaskan kebutuhan riil.

Sunset Clause

Sunset clause adalah ketentuan bahwa suatu aturan akan berakhir pada tanggal tertentu kecuali diperbarui. Ia mencegah aturan usang bertahan tanpa pengujian.

Surya Atap

Jenis pembangkit surya yang dipasang di atap bangunan. Ia sering diperlakukan berbeda dalam diferensiasi tarif berdasarkan teknologi.

Surya Ladang Besar

Proyek surya berskala besar dengan kebutuhan lahan luas. Ia biasanya berhadapan dengan isu akses lahan dan dominasi aktor bermodal besar.

Sustainable Development

Sustainable development merujuk pada agenda pembangunan yang menguat di forum internasional dan mendorong perluasan akses layanan energi. Istilah ini memberi kerangka bahwa akses energi terkait tujuan pembangunan yang lebih luas.

Symbolic Legitimacy

Symbolic legitimacy merujuk pada legitimasi yang bertumpu pada simbol, narasi, dan gestur yang membungkus kebijakan.

Istilah ini menunjukkan bahwa kebijakan dapat memperoleh dukungan melalui citra moral dan tanda-tanda publik, tetapi legitimasi simbolik mudah runtuh bila tidak didukung tindakan konsisten.

T

Tagihan Listrik
Total pembayaran pelanggan listrik yang dapat meningkat akibat pungutan atau biaya tambahan kebijakan. Kenaikannya sangat mempengaruhi persepsi keadilan kebijakan.

Tanggung Jawab Etis
Tanggung jawab etis merujuk pada beban moral terhadap bumi dan generasi mendatang yang diperdebatkan dalam pembagian peran antara negara dan pasar. Istilah ini menandai bahwa pembagian tanggung jawab bukan sekadar soal teknis kelembagaan, melainkan soal siapa yang menanggung risiko dan kerusakan laten.

Tanggung Jawab
Tanggung jawab merujuk pada kewajiban moral dan politis untuk menanggung konsekuensi dari kebijakan energi. Istilah ini menandai bahwa keberlanjutan tidak dapat dipindahkan seluruhnya kepada individu, tetapi harus ditanggung oleh aktor yang memiliki kuasa.

Target Nasional
Tujuan kebijakan tingkat pusat yang biasanya berbentuk angka capaian dan jadwal implementasi. Target ini membentuk tekanan koordinasi yang kuat, tetapi tidak selalu kompatibel dengan kondisi lokal.

Target Numerik
Target numerik merujuk pada angka-angka resmi seperti kapasitas terpasang atau penurunan emisi yang dijadikan

ukuran keberhasilan. Istilah ini menandai kecenderungan mereduksi kompleksitas sosial menjadi capaian kuantitatif.

Tarif Dibedakan
Pengaturan tarif yang tidak seragam berdasarkan jenis teknologi atau skala proyek. Ia mengubah siapa yang paling diuntungkan oleh skema insentif.

Tarif Dipatok Tinggi
Penetapan tarif pada level tinggi untuk menarik investor pada fase awal. Jika tanpa kontrol, ia dapat mengunci beban keuangan dalam jangka panjang.

Tarif Pembelian Listrik
Skema harga yang menentukan apakah listrik dari energi terbarukan dapat diserap dan menguntungkan. Perubahan tarif dapat menjadi alat kekuasaan yang menentukan siapa bisa bertahan dalam transisi.

Tarif Progresif
Tarif progresif merujuk pada rancangan tarif yang meningkat sesuai tingkat konsumsi. Rancangan ini dapat dipakai untuk melindungi rumah tangga miskin dari beban kenaikan harga.

Tata Bahasa Kekuasaan
Tata bahasa kekuasaan merujuk pada pola bahasa dan perangkat teknis yang membentuk cara berpikir dan bertindak dalam kebijakan. Istilah ini menandai bahwa angka dan indikator dapat menjadi alat pengarah prioritas tanpa tampak memerintah secara langsung.

Tata Kelola Energi Terbarukan
Tata kelola energi terbarukan merujuk pada rancangan pengaturan yang mengarahkan transisi ke energi terbarukan. Tata kelola ini dapat menjadi lebih adil bila epistemologi bukti diperluas.

Tata Kelola Iklim
Tata kelola iklim merujuk pada cara aturan, negosiasi, dan mekanisme internasional membentuk respons iklim. Di dalamnya, kategori teknis dapat lahir dari kompromi politik.

Tata Kelola Multilevel
Tata kelola multilevel merujuk pada pengaturan kebijakan energi dan iklim yang melibatkan tingkat lokal, nasional, dan global secara bersamaan. Istilah ini menunjukkan kompleksitas koordinasi dan perebutan otoritas antarlevel pemerintahan.

Tata Kelola Pengetahuan
Cara institusi menentukan pengetahuan mana yang dianggap sah dalam kebijakan. Reformasi tata kelola pengetahuan menuntut integrasi data teknis dan pengalaman warga.

Technology-Specific Tariffs
Penetapan tarif yang berbeda menurut jenis teknologi atau kategori proyek. Ia dapat menjadi intervensi untuk mengoreksi dominasi aktor besar.

Tekanan dari Gerakan Sosial
Daya dorong kolektif yang menantang dominasi definisi resmi tentang transisi. Ia menjadi kunci untuk memaksa pergeseran substantif.

Tekanan Politik Domestik
Dorongan dari pemilih, media, dan oposisi yang membingkai kebijakan keberlanjutan sebagai ancaman atau simbol ketidakadilan. Tekanan ini dapat mengubah kebijakan menjadi pertarungan identitas.

Teknologi Kuasa
Teknologi kuasa merujuk pada instrumen kebijakan, indikator, dan prosedur yang mengatur siapa yang mendapat akses dan siapa

yang tersingkir. Istilah ini menandai bahwa desain kebijakan bukan sekadar teknis, melainkan distribusi kekuasaan.

Teknologi Pemerintah (*Governmentality*)
Teknologi pemerintah (*governmentality*) merujuk pada cara negara mengatur populasi dan pasar melalui teknik administratif, indikator, dan mekanisme pengawasan yang halus. Istilah ini menandai bahwa kekuasaan tidak selalu tampil sebagai paksaan langsung, tetapi sebagai pengelolaan perilaku melalui norma dan insentif.

Teknologi Penyerap Karbon
Teknologi yang dibayangkan mampu menyerap kembali CO_2 dari atmosfer. Ia sering dipakai untuk menutup celah target ketika pengurangan emisi sulit dilakukan.

Template Peraturan
Rancangan aturan siap pakai yang dapat langsung diadopsi sebagai regulasi. Penggunaannya dapat mempercepat proses, tetapi mengurangi ruang penyesuaian konteks lokal.

Template Regulasi
Kerangka kebijakan yang lahir di satu konteks lalu diadopsi di negara lain. Template ini dapat menciptakan kebijakan yang tampak rapi tetapi tidak bekerja.

Tender Kompetitif
Mekanisme seleksi proyek berbasis kompetisi untuk mendapatkan tarif tertentu. Ia mengubah logika dari akses berbasis pemenuhan syarat menjadi perlombaan harga.

Testimoni Komunitas
Testimoni komunitas merujuk pada kesaksian kelompok yang mengalami dampak kebijakan secara langsung. Testimoni ini dapat memperluas pemahaman tentang konsekuensi yang tidak tertangkap indikator.

Tiga Metafora
Rangkaian tiga kerangka yang dipakai untuk memahami energi keamanan, kedaulatan, dan ketahanan. Ketiganya membentuk arah kebijakan sekaligus membuka konflik prioritas.

Time Consistency
Ketahanan janji kebijakan agar tetap dihormati dalam jangka panjang meski pemerintah dan kondisi berubah. Ketika rapuh, biaya pembiayaan proyek berikutnya cenderung meningkat.

Tingkat Diskonto
Tingkat diskonto merujuk pada cara menurunkan nilai manfaat atau kerugian masa depan agar dapat dibandingkan dengan nilai saat ini. Istilah ini menentukan seberapa besar kepentingan generasi mendatang dihargai dalam kebijakan energi.

Tingkat Kepercayaan Warga
Ukuran sosial yang mencerminkan legitimasi proses kebijakan. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya melalui kepatuhan prosedural.

Tingkat Keterlibatan
Derajat pengaruh publik dalam proses kebijakan, dari pasif hingga ikut memutuskan. Tingkat ini menentukan apakah partisipasi menghasilkan legitimasi atau hanya simbol.

Tingkat Penerimaan
Derajat penerimaan komunitas yang dapat berubah seiring pengalaman dan informasi baru. Tingkat ini dapat tinggi di awal karena janji manfaat, lalu turun ketika janji memudar.

Tokenism Partisipasi
Bentuk partisipasi yang hanya bersifat simbolik untuk memenuhi syarat prosedural. Ia membuat warga hadir, tetapi tidak memiliki pengaruh nyata pada keputusan.

Tokenism

Tokenism adalah praktik menghadirkan partisipasi sebagai simbol tanpa memberi ruang keputusan yang nyata. Ia membuat warga terlihat dilibatkan, tetapi sebenarnya tidak berdaya.

TOPSIS

merujuk pada teknik pengambilan keputusan multikriteria yang membandingkan berbagai skenario kebijakan secara sistematis. Penggunaan metode ini menunjukkan bagaimana konflik normatif disederhanakan menjadi evaluasi teknis.

Transformasi Sosial-Politik

Perubahan mendalam dalam relasi kekuasaan, struktur ekonomi, dan tatanan sosial yang menyertai perubahan energi. Ia menolak pandangan bahwa pergantian teknologi saja sudah memadai.

Transformasi

Transformasimerujuk pada perubahan yang lebih mendasar dalam struktur kepemilikan, distribusi manfaat, dan relasi kuasa dalam sistem energi. Istilah ini menandai perbedaan antara perubahan teknis bertahap dan perubahan struktural yang menyentuh fondasi sosial-politik.

Transisi Berkeadilan

Transisi berkeadilan merupakan istilah yang menekankan bahwa perubahan menuju energi rendah karbon harus menjaga perlindungan sosial dan distribusi beban yang adil. Frasa ini menolak anggapan bahwa transisi otomatis membawa kebaikan jika ketimpangan sosial dibiarkan.

Transisi Energi

Peralihan dari satu sistem energi ke sistem lain yang dibingkai sebagai proses bertahap dan terarah. Ia sering dipresentasikan sebagai keniscayaan teknis yang perlu dikelola secara rasional.

Transisi Rendah Karbon
Transisi rendah karbon merujuk pada pergeseran sistem energi menuju pengurangan emisi secara signifikan. Dalam peta riset, istilah ini menjadi pusat perhatian dan membentuk arah diskusi ilmiah maupun kebijakan.

Transisi
Transisi merujuk pada pergeseran menuju sistem energi rendah karbon yang sering dipresentasikan sebagai proses progresif dan tak terelakkan. Istilah ini menandai potensi pengaburan konflik, karena ia dapat digunakan untuk meredam pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Transparansi Informasi Proyek
Keterbukaan data, rencana, dan dampak proyek yang dapat diakses publik. Transparansi menentukan apakah warga dapat menilai risiko atau hanya menerima narasi resmi.

Transparansi yang Terfragmentasi
Kondisi ketika informasi berbeda antar level pemerintahan sehingga pesan kebijakan saling bertentangan. Fragmentasi ini menciptakan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan aktor oportunistik.

Tujuan Kebijakan
Tujuan kebijakan merujuk pada sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan energi, seperti efisiensi, keadilan, atau keamanan. Istilah ini menjadi sumber konflik ketika tujuan saling bertabrakan.

Tumpang Tindih Kewenangan
Situasi ketika beberapa lembaga merasa memiliki hak mengatur keputusan yang sama. Ia menciptakan kebingungan, perlambatan, dan peluang manipulasi.

U

Uji Statistik
Uji statistik merujuk pada metode kuantitatif yang sering dipakai sebagai dasar kekuatan bukti. Ketika dijadikan ukuran utama, bentuk bukti lain dapat dianggap tidak cukup kuat.

Ujian Demokrasi
Momen ketika kebijakan diuji oleh kemampuan institusi mendengar dan mengubah keputusan. Ujian ini menentukan apakah transisi energi memperluas demokrasi atau mempersempitnya.

Ujian Legitimasi
Momen ketika klaim kebijakan diuji oleh pengalaman sosial warga. Ujian ini menentukan apakah transisi energi bertahan atau justru memproduksi resistensi permanen.

Utang Ekologis
Utang ekologis merujuk pada beban kerusakan lingkungan yang ditanggung komunitas tertentu akibat sejarah pembangunan energi. Istilah ini mengaitkan perdebatan status energi dengan ketimpangan historis.

Utang Sosial
Utang sosial merujuk pada beban ketidakadilan sosial yang diwariskan dari pola pembangunan dan distribusi manfaat energi. Istilah ini menandai bahwa komunitas pemasok beban sering justru menjadi pihak terakhir menikmati layanan.

Utang yang Menjerat
Situasi ketika beban finansial memperkecil ruang kebijakan untuk adaptasi dan perlindungan sosial. Ia memperkuat ketidakadilan global dalam transisi.

Utilitas Publik
Utilitas publik merujuk pada penyelenggara layanan energi yang dikelola dalam kerangka kepentingan publik. Istilah ini menegaskan bahwa layanan dapat dipahami sebagai infrastruktur kolektif, bukan sekadar produk.

Utilitas Swasta
Utilitas swasta merujuk pada penyelenggara layanan energi yang beroperasi dalam logika bisnis. Posisi ini sering menguatkan penekanan pada harga, kontrak, dan pengembalian investasi.

V

Variable Renewable Energy
Pembangkit seperti surya dan angin yang output-nya berubah mengikuti cuaca. Ia menuntut penyesuaian model bisnis, tata kelola, dan desain instrumen pendukung.

Variasi Lokal
Perbedaan pengalaman antarwilayah yang hilang dalam penilaian agregat. Variasi ini penting untuk membaca keadilan sosial.

Visi Politik
Arah normatif yang menentukan untuk siapa kebijakan dibuat dan nilai apa yang dilindungi. Visi politik menentukan apakah kapasitas implementasi memperkuat keadilan atau efisiensi semata.

W

Wacana Resmi
Wacana resmi merujuk pada narasi yang diproduksi oleh negara, lembaga internasional, dan aktor dominan untuk

membingkai transisi energi sebagai proyek yang wajar dan progresif. Istilah ini menandai cara bahasa mengurangi konflik dan menata batas perdebatan.

Waktu Informasi

Dimensi kapan informasi diberikan kepada warga dalam rantai keputusan. Informasi yang datang terlambat membuat partisipasi kehilangan daya korektif.

Welfare Economics

Welfare economics adalah cabang ekonomi yang menilai kesejahteraan sosial melalui penjumlahan kepuasan individu. Istilah ini beroperasi dengan asumsi agregatif yang tidak selalu menjawab pertanyaan distribusi dan keadilan.

BIODATA PENULIS

Muhammad Abduh adalah penulis, akademisi, dan peneliti kebijakan yang selama lebih dari tiga dekade berada di garis depan perjumpaan antara ilmu sosial, pemerintahan, kebijakan publik dn sosiologi lingkungan. Ia tidak menempatkan ilmu sebagai ruang yang steril, melainkan sebagai arena yang harus terus diuji di lapangan—di tengah tarik-menarik kepentingan, ketimpangan, dan dilema moral yang melekat dalam setiap keputusan publik. Latar akademiknya berpijak pada kombinasi yang kuat: Sarjana Administrasi Negara, Magister Sains Sosiologi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, serta Doktor Sosiologi Lingkungan. Kombinasi ini membentuk orientasi metodologis yang tegas: kebijakan yang adil tidak lahir dari angka yang rapi semata, melainkan dari cara produksi bukti yang dapat diaudit, keterlibatan warga yang bermakna, dan keberanian mempertanggungjawabkan keberpihakan.

Dalam dunia akademik, ia dipercaya memimpin Program Pascasarjana Universitas Tamansiswa Palembang. Di luar ruang kelas, ia terlibat dalam riset kebijakan, evaluasi program, serta penguatan kapasitas birokrasi daerah. Kerja-kerja tersebut sering dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga internasional seperti Asian Development Bank dan World Bank. Fokusnya konsisten: menghubungkan inferensi ilmiah yang ketat dengan praktik kebijakan yang memulihkan martabat warga, mulai dari desain indikator hingga tata kelola implementasi.

Gagasan dan kontribusinya hadir dalam buku-buku ber-ISBN yang menolak kompromi metodologis dan menggugat ilusi objektivitas dalam kebijakan publik. Karya-karyanya antara lain

Mitos Netralitas dalam Analisis Kebijakan Publik: Politik Pengetahuan dan Ilusi Objektivitas; Pemerintahan dan Keberlanjutan: Dari Birokrasi Instrumen ke Ekosistem Reflektif; Menciptakan Keadilan dengan Data: Refleksi Keberlanjutan dalam Statistik Pemerintahan; Menjaga Pijar Keberlanjutan: Tafsir Kritis atas Metodologi Ilmu Pemerintahan; Ekologi Pemerintahan: Epistemologi Baru bagi Negara yang Adaptif dan Berkelanjutan; Ekologi Sosial Pemerintahan; Konsep Ilmu Pemerintahan untuk Keberlanjutan dan Keadilan; serta Taman Kepemimpinan Ki Hadjar: Epistemologi Among untuk Ilmu Pemerintahan dan Keberlanjutan.

Singkatnya, ia mengembangkan jembatan antara refleksi akademik yang ketat dan praktik pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan—sebuah upaya berkelanjutan agar ilmu pemerintahan benar-benar mengubah cara kita mengelola kehidupan bersama.

Yohandri Bow, profesor dan dosen di Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Bidang keahliannya berfokus pada energi dan lingkungan, teknologi energi biomassa, serta elektrokimia—tiga ranah yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan energi berkelanjutan dan agenda transisi energi di Indonesia. Ia lahir di Bengkulu dan menempuh pendidikan magister di bidang Kimia pada Universitas Padjadjaran, kemudian melanjutkan studi doktoral pada Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya.

Selain menjalankan peran akademik sebagai pengajar dan pembimbing, ia memiliki pengalaman kepemimpinan institusional yang kuat di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya. Ia pernah mengemban tugas strategis dalam

pengelolaan akademik, penguatan program, serta perencanaan dan penganggaran institusi. Pengalaman tersebut memperlihatkan keterlibatannya bukan hanya dalam pengajaran dan penelitian, tetapi juga dalam tata kelola kelembagaan, perancangan kebijakan internal, dan pengembangan kapasitas pendidikan vokasi agar lebih adaptif terhadap tantangan energi dan lingkungan.

Dalam bidang energi terbarukan, ia aktif mengembangkan riset terapan yang berorientasi pada pemecahan masalah dan pemanfaatan sumber daya lokal. Topik-topik penelitiannya mencakup pengembangan peralatan pengering berbasis panel surya fotovoltaik, produksi hidrogen dari air laut sebagai sumber energi berkelanjutan, biosolar melalui proses pirolisis asam lemak metil ester, desain sistem pengering PV-solar portabel, riset konsorsium batere dalam ekstraksi mineral ore, serta pemanfaatan sampah menjadi energi melalui pengembangan biopelet untuk skema co-firing di pembangkit listrik. Minat risetnya juga mencakup efisiensi energi, penyimpanan energi, pembangkit listrik energi terbarukan, dan instrumen kimia analitik.

Ia aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi profesional, termasuk pelatihan tenaga surya lanjutan dengan fokus sistem SCADA, penguatan kompetensi di bidang fotovoltaik. Ia juga terlibat sebagai pengajar pada program Magister Terapan Teknik Energi Terbarukan, asesor kompetensi di bidang K3, analis lingkungan, dan fotovoltaik, serta asesor akreditasi LAM Teknik. Selain kontribusi dalam pengajaran dan riset, ia menghasilkan publikasi ilmiah, prosiding konferensi, serta karya inovasi yang tercatat sebagai hak kekayaan intelektual di bidang energi.